PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6776);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan.
(2) RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023, yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 2

RKPD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) menjadi:
a. Pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.
b. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023; dan
c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023.

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan Evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023, serta fasilitasi terhadap Rancangan RKPD Kabupaten/Kota.
(2) Pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 30 Juni 2022

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PRASENO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 NOMOR

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD)

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dengan memperhatikan Pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial serta pendekatan penganggaran yang terintegrasi yakni "Money Follow Program".

Dengan Tema: ***"MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN",*** RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 merupakan penjabaran dokumen RPJMD 2021-2026.

Ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan kepada semua pihak atas kerjasama dan partisipasi aktif dalam mendukung penyelesaian penyusunan dokumen RKPD ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan senantiasa memberkati cita – cita dan usaha kita untuk membangun Provinsi Sulawei Utara yang lebih baik

Manado, Juni 2022

DAFTAR ISI

			Halaman
BAB I	:	**PENDAHULUAN**	
		1.1. Latar Belakang	I-1
		1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
		1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-8
		1.4. Maksud dan Tujuan	I-9
		1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-10
BAB II	:	**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**	
		2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
		2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
		2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-19
		2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-41
		2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-134
		2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD	II-143
		2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-164
		2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-164
		2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggraan Urusan Pemerintah Daerah	II-165
BAB III	:	**KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**	
		3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
		3.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya	III-4
		3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-16
		3.1.3. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah	III-18
		3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-19
		3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	III-20
		3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah	III-25
		3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-29
BAB IV	:	**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**	
		4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
		4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023	IV-8
		4.2.1. Nasional	IV-8
		4.2.2. Sulawesi Utara	IV-10
BAB V	:	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	V-1
		5.1. Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024	V-1
		5.2. Perkembangan Wilayah Berdasarkan Klaster	V-5

5.2.1. Klaster Kabupaten Kepulauan V-5
5.2.2. Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya V-9
5.2.3. Klaster Wilayah Minahasa Bagian Tengah (Selatan, Tenggara,Induk, dan Tomohon) V-12
5.2.4. Klaster Wilayah Bagian Utara Mencakup Kota Manado-Minahasa Utara-Kota Bitung Sebagai Wilayah Cepat Tumbuh di Sulawesi Utara V-13
5.3. Lingkungan Dan Isu Strategis V-17
5.4. Kondisi Provinsi Sulawesi Utara terhadap Pengarusutamaan dalam RPJMN 2020 – 2024 V-19
5.5. Sasaran, Indikator dan Target V-20
5.6. Arah Kebijakan dan Strategi V-24
5.7. Strategi Pembangunan Wilayah Berdasarkan Klaster Wilayah dan Antar Klaster V-28
5.8. Kawasan Super Hub Sulawesi Utara V-46
5.9. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah V-48
5.9.1. Meningkatkan pemerataan antar wilayah daratan dan kepulauan, maupun daerah pesisir dan pegunungan, melalui strategi pembangunan V-50
5.9.2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, melalui strategi pembangunan V-51
5.9.3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, melalui strategi pembangunan V-52
5.9.4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, melalui strategi pembangunan V-53
BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI-1
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VII-1
7.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2023 VII-1
7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023 VII-3
7.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 VII-7
BAB VIII : PENUTUP VIII-1

DAFTAR GAMBAR

NO	DAFTAR GAMBAR	HALAMAN
Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan penganggaran	I-9
Gambar 2.1	Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Utara	II-1
Gambar 2.2	Letak Geografis Provinsi Sulawesi Utara	II-3
Gambar 2.3	Posisi Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)	II-3
Gambar 2.4	Peta Sebaran COVID-19 di Sulawesi Utara	II-46
Gambar 2.5	Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	II-132
Gambar 4.1	Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023	IV-10
Gambar 5.1	Tingkat resiko bencana kabupaten/kota berdasarkan IRBI 2018	V-19
Gambar 5.2	Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan	V-30
Gambar 5.3	Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Bolaang Mongondow Raya	V-33
Gambar 5.4	Integrasi pembangunan wilayah pada Klaster Wilayah Minahasa Raya	V-37
Gambar 5.5	Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Wilayah Kawasan Cepat Tumbuh (Manado-Minut-Bitung)	V-42
Gambar 5.6	Peta Desa – Desa pesisir di Kabupaten Minahasa Tenggara	V-45
Gambar 5.7	Peta desa – desa pesisir di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	V-46
Gambar 5.8	Peta desa – desa pesisir di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	V-46
Gambar 5.9	Integrasi Pembangunan Wilayah pada Kawasan Super-Hub Sulut	V-47
Gambar 5.10	Tingkat resiko bencana kabupaten/kota berdasarkan IRBI 2018	V-29
Gambar 5.11	Perbandingan IDG dan IPG Kabupaten/Kota Tahun 2019	V-30
Gambar 5.12	Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan	V-39
Gambar 5.13	Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Bolaang Mongondow Raya	V-43

NO	DAFTAR GAMBAR	HALAMAN
Gambar 5.14	Integrasi pembangunan wilayah pada Klaster Wilayah Minahasa Raya	V-47
Gambar 5.15	Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Wilayah Kawasan Cepat Tumbuh (Manado-Minut-Bitung)	V-51
Gambar 5.16	Integrasi Pembangunan Wilayah pada Kawasan Super-Hub Sulut	V-53
Gambar 5.17	Sebaran Kawasan Strategi Provinsi (KSP) Sulawesi Utara	V-62

DAFTAR TABEL

NO	NAMA TABEL	HALAMAN
Tabel. 2.1	Luas Daerah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahandi Provinsi Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 Luas Daerah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahandi Provinsi Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021	II-2
Tabel 2.2	Luas SWP DAS Provinsi Sulawesi Utara	II-7
Tabel. 2.3	Keadaan Rata-rata Suhu di Sulut Tahun 2019 (Derajat Celcius)	II-8
Tabel 2.4	Keadaan Curah Hujan di Provinsi Sulawesi Utara (Milimeter Kubik (mm3) Tahun 2021	II-8
Tabel 2.5	Penggunaan Lahan Di Provinsi Sulawesi Utara	II-9
Tabel. 2.6	Indikator Kependudukan Tahun 2017-2021 di Provinsi Sulawesi Utara	II-15
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 – 2021	II-17
Tabel 2.8	Rasio Penduduk menurut Jenis Kelamin se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 – 2021	II-19
Tabel 2.9	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah)	II-19
Tabel 2.10	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah)	II-21
Tabel 2.11	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRBatas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 (Hb)	II-22
Tabel 2.12	Persentase Kontribusi PDRB Tahun 2017 - 2021 seluruh Kabupaten/Kota	II-22
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2017 - 2021 atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota	II-23
Tabel 2.14	Nilai Inflasi Rata-rata Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021	II-24
Tabel 2.15	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2017-2021 Provinsi Sulawesi Utara	II-26
Tabel 2.16	Angka Melek Huruf Tahun 2020 menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara	II-26
Tabel 2.17	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017 - 2021 Provinsi Sulawesi Utara	II-27

NO	NAMA TABEL	HALAMAN
Tabel 2.18	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata lama SekolahProvinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 - 2021	II-28
Tabel 2.19	Pengeluaran Per Kapita Tahun 2017 - 2021 menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara	II-28
Tabel 2.20	Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utaramenurut Komponen Tahun 2017-2021	II-30
Tabel 2.21	Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara dan Kab/Kotase-Sulawesi Utara Tahun 2017 s/d 2021	II-31
Tabel 2.22	Angka Putus Sekolah SMA/MA Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2018-2021	II-32
Tabel 2.23	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Utara, Tahun 2021 - 2021	II-33
Tabel 2.24	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017 – 2021 Menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara	II-34
Tabel 2.25	Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2017 - 2021 menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara	II-34
Tabel 2.26	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)di Provinsi Sulawesi Utara menurut Daerah Tempat Tinggal,September 2020 – September 2021	II-35
Tabel 2.27	Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Utara Berdasarkan Kriteria Bank Dunia September 2020 – Maret 2021 - September 2021 (Persentase)	II-38
Tabel 2.28	Gini Ratio dan Distribusi Pengeluaran Per Kapita Wilayah Sulawesi September 2020 (Persentase)	II-39
Tabel 2.29	Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2017 - 2020 Provinsi Sulawesi Utara	II-40
Tabel 2.30	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2017 - 2020 Provinsi Sulawesi Utara	II-42
Tabel 2.31	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SMA Sederajat Tahun 2017 - 2021 Provinsi Sulawesi Utara	II-42
Tabel 2.32	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2021 SMA Sederajat menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara	II-42
Tabel 2.33	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SMA SederajatTahun 2017 - 2021 Provinsi Sulawesi Utara	II-43
Tabel 2.34	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SMA Sederajat Tahun 2020menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara	II-43

NO	NAMA TABEL	HALAMAN
Tabel 2.35	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2017 - 2021 Provinsi Sulawesi Utara	II-44
Tabel 2.36	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2017 - 2021 Provinsi Sulawesi Utara	II-45
Tabel 2.37	Update Vaksinasi Covid Per Tanggal 31 Desember 2021	II-47
Tabel 2.38	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2017 – 2021 menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara	II-47
Tabel 2.39	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2017 - 2021 di Provinsi Sulawesi Utara	II-49
Tabel 2.40	Prevalensi Stunting Tahun 2018 - 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara	II-50
Tabel 2.41	Perkembangan AKB dan AKI Tahun 2018 - 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara	II-51
Tabel 2.42	Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 s/d 2021	II-51
Tabel 2.43	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum menurut Kabupaten-Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 – 2021	II-53
Tabel 2.44	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak menurut Kabupaten-Kota di Prov. Sulut Tahun 2017 – 2021	II-54
Tabel 2.45	Jumlah dan Status IPLT menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara	II-55
Tabel 2.46	Timbulan Sampah Tertangani 2017-2019 dan Prediksi 2020-2021	II-56
Tabel 2.47	Data TPA Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara	II-57
Tabel 2.48	Timbulan Sampah di Kabupaten/Kota se – Prov.Sulut Tahun 2017-2018 dan Proyeksi Tahun 2019 – 2021	II-58
Tabel 2.49	Data Target dan Capaian Pengelolaan Persampahan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021	II-59
Tabel 2.50	Keberadaan Peraturan Persampahan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara	II-59
Tabel 2.51	Target dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang	II-60
Tabel 2.52	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 - 2021	II-62

NO	NAMA TABEL	HALAMAN
Tabel 2.53	Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2017-2021	II-64
Tabel 2.54	Indeks Risiko Bencana Sulawesi Utara Tahun 2020	II-65
Tabel 2.55	Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial di Provinsi Sulawesi Utara	II-66
Tabel 2.56	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2019 – Agustus 2021 di Sulawesi Utara	II-69
Tabel 2.57	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Sulawesi Utara Tahun 2021	II-69
Tabel 2.58	Perkembangan TPAK Tahun 2017 s/d 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara	II-70
Tabel 2.59	Perkembangan TPT Tahun 2017 s/d 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara	II-71
Tabel 2.60	Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020	II-72
Tabel 2.61	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sulawesi Utara	II-74
Tabel 2.62	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara	II-74
Tabel 2.63	Indeks Pemberdayaan Gender Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2020	II-75
Tabel 2.64	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten kota Se Sulawesi Utara	II-75
Tabel 2.65	Ketersediaaan Pangan Strategis	II-77
Tabel 2.66	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Sulawesi Utara	II-77
Tabel 2.67	Target Dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Provinsi Sulawesi Utara	II-78
Tabel 2.68	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	II-79
Tabel 2.69	Perkembangan Penduduk Ber-KTP Tahun 2019 – 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara	II-79
Tabel 2.70	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2017-2019	II-80
Tabel 2.71	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 - 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara	II-82
Tabel 2.72	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017 - 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara	II-82

NO	NAMA TABEL	HALAMAN
Tabel 2.73	Perkembangan TFR Tahun 2017 s/d 2021 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara	II-83
Tabel 2.74	Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Utara	II-84
Tabel 2.75	Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2021	II-85
Tabel 2.76	Nilai Modal Sendiri, Modal Luar, dan Volume Usaha Koperasimenurut Kabupaten/Kota Tahun 2020	II-85
Tabel 2.77	Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara	II-87
Tabel 2.78	Capaian Kinerja Koperasi dan UKM 2017 - 2020	II-87
Tabel 2.79	Realisasi PMDN menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 -2021	II-88
Tabel 2.80	Realisasi PMA menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 -2021	II-88
Tabel 2.81	Kinerja DPM PTSP Provinsi Sulawesi Utara	II-89
Tabel 2.82	Capaian Kinerja DPM PTSP 2017-2020	II-89
Tabel 2.83	Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021	II-90
Tabel 2.84	Terminal di Provinsi Sulawesi Utara	II-92
Tabel 2.85	Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021	II-94
Tabel 2.86	Perkembangan Seni, Budaya Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020	II-96
Tabel 2.87	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas yang Menonton Pertunjukan/Pameran Seni baik secara Langsung maupun tidak Langsung selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis Kesenian dan Tipe Daerah, tahun 2018	II-97
Tabel 2.88	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Terlibat Langsung Pertunjukan/Pameran Seni Secara Langsung Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis Kesenian Dan Tipe Daerah, 2018	II-98
Tabel 2.89	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Budaya selama setahun terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018	II-99
Tabel 2.90	IPK Sulut berdasarkan dimensi penyusun tahun 2018	II-102

NO	NAMA TABEL	HALAMAN
Tabel 2.91	Jumlah Kunjungan, Jumlah anggota, Jumlah buku dan banyaknya exemplar Perpustakaan DaerahSulawesi Utara tahun 2007 – 2021	II-105
Tabel 2.92	Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB	II-106
Tabel 2.93	Target dan Capaian Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	II-107
Tabel 2.94	Persentase Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB	II-107
Tabel 2.95	Kontribusi dan Pertumbuhan Sub Kategori Peternakan Terhadap PDRB	II-108
Tabel 2.96	Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Desember 2021	II-108
Tabel 2.97	Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 - 2021	II-108
Tabel 2.98	Persentase Pertumbuhan Subsektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB	II-109
Tabel 2.99	Persentase Pertumbuhan Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB	II-110
Tabel 2.100	Rasio Elektrifikasi di Sulawesi Utara	II-110
Tabel 2.101	Sumber Daya Mineral di Sulawesi Utara	II-111
Tabel 2.102	Neraca Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 -2021	II-111
Tabel 2.103	Capaian Kinerja Perindustrian dan Perdagangan 2017 -2021	II-113
Tabel 2.104	Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara 2018 - 2020	II-113
Tabel 2.105	Industri Kecil dan Menengah menurut Cabang Industri di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021	II-114
Tabel 2.106	Perbandingan Indikator dalam Permendagri 86/2017 dengan RPJMD 2016 - 2021	II-115
Tabel 2.107	Kinerja Keuangan Daerah	II-119
Tabel 2.108	Capaian Keuangan Daerah 2017 -2021	II-120
Tabel 2.109	Persentase ASN dengan Disiplin Tinggi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 - 2021	II-122
Tabel 2.110	Cakupan Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki Jabatan sesuai Anjab dan ABK	II-122
Tabel 2.111	Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 - 2021	II-114
Tabel 2.112	Capaian Pendidikan dan Latihan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 - 2021	II-123

NO	NAMA TABEL	HALAMAN
Tabel 2.113	SAKIP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 - 2021	II-124
Tabel 2.114	Jumlah Perda Dalam Penetapan Propemperda Tahun 2017 – 2021 di Provinsi Sulawesi Utara	II-126
Tabel 2.115	Persentase Perda yang ditetapkan Tahun 2017 – 2021 DPRD Provinsi Sulawesi Utara	II-127
Tabel 2.116	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan DPRD Tahun 2017 – 2021	II-127
Tabel 2.117	Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara	II-128
Tabel 2.118	Indeks Reformasi Birokrasi Sulawesi Utara Tahun 2017 -2021	II-132
Tabel 2.119	Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	II-132
Tabel 2.120	Persentase Konsumsi RT Pangan Kabupaten/Kota,Provinsi Sulawesi Utara 2017 - 2021	II-133
Tabel 2.121	Nilai Tukar Petani Prov. Sulawesi Utara 2015 - 2021	II-134
Tabel 2.122	Persentase Konsumsi RT Nonpangan Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Utara 2017 - 2021	II-135
Tabel 2.123	Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016 s/d 2021 Provinsi Sulawesi Utara	II-136
Tabel 2.124	Rasio Luas Wilayah Produktif menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara	II-136
Tabel 2.125	Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020	II-137
Tabel 2.126	Jumlah Kiejahatan yang dilaporkan Menurut Kepolisisan Resor di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2019	II-139
Tabel 2.127	Kinerja Iklim Berinvestasi	II-139
Tabel 2.128	Sumber Daya Manusia Terhadap Indikator Rasio Lulusan S1/S2/S3	II-141
Tabel 2.129	Evaluasi Capaian Indikator Makro Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020	II-142
Tabel 2.130	Evaluasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020	II-142
Tabel 3.1	*Indikator dan Target Ekonomi Makro Prov. Sulut 2022-2026*	III-18
Tabel 3.2	*Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024*	III-24
Tabel 3.3	*Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024*	III-26

NO	NAMA TABEL	HALAMAN
Tabel 3.4	*Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024*	III-31
Tabel 4.1	**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023**	IV-5
Tabel 4.2	**Keterkaitan Permasalahan, Isu Startegis Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Tahun 2023**	IV-16
Tabel 4.3	**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, dan Daerah Tahun 2023**	IV-17
Tabel 4.4	**Keterkaitan antara Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 terhadap pencapaian 5 Misi Daerah, 7 Prioritas Nasional, 8 Prioritas Daerah dan Perangkat Daerah terkait beserta Target Kinerja Tahun 2023**	IV-18
Tabel 5.1	Arah Target Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara	V-2
Tabel 5.2	Arah Prioritas Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara	V-2
Tabel 5.3	Nilai Indeks Risiko Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara Dari Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2018	V-20
Tabel 5.4	Target Pembangunan Wilayah Tahun 2021-2026	V-21
Tabel 5.5	Sasaran/Indikator/Target Prioritas Pembangunan Klaster Kewilayahan Sulawesi Utara	V-21
Tabel 5.6	Arahan untuk sektor yang masuk dalam perencanaan dan penerapan ekonomi hijau di Kota Bitung, Kotamobagu dan Tahuna	V-28
Tabel 5.7	Cakupan Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan, dan Strategi Pengembangan	V-30
Tabel 5.8	Cakupan Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya dan Strategi Pengembangan	V-34
Tabel 5.9	Cakupan Klaster Wilayah Minahasa Raya dan Strategi Pengembangan	V-37
Tabel 5.10	Cakupan Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian Utara dan Strategi Pengembangan	V-42
Tabel 5.11	Cakupan Kawasan Super-Hub Sulut dan Strategi Pengembangan	V-48
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023	VII-1
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023	VII-3

NO	NAMA TABEL	HALAMAN
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023	VII-7

DAFTAR GRAFIK

NO	NAMA GRAFIK	HALAMAN
Grafik 2.1	Jumlah Penduduk Sulawesi Utara, 2000-2020	II-14
Grafik 2.2	Komposisi Penduduk menurut Umur di Provinsi Sulawesi Utara, 2000-2020	II-15
Grafik 2.3	Komposisi Penduduk menurut Generasi di Sulawesi Utara Tahun 2020	II-16
Grafik 2.4	Laju Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara	II-18
Grafik 2.5	Tren Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara Tahun 2010-2020	II-25
Grafik 2.6	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Utara, Tahun 2014-2020	II-29
Grafik 2.7	Persentase Penduduk MiskinSulawesi Utara dan Nasional, Tahun 2014-2020	II-33
Grafik 2.8	Perkembangan Gini Rasio Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara	II-33
Grafik 2.9	Capaian Rumah Layak Huni Sulut 2017-2020	II-37
Grafik 2.10	Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni Data Target Kinerja RPJMD 2016-2021	II-53
Grafik 2.11	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Terjangkau	II-61
Grafik 2.12	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman	II-86
Grafik 2.13	Persentase Jumlah Koperasi menurut Jenisnya Tahun 2020	II-86
Grafik 2.14	Persentase Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usahanya Tahun 2020	II-100
Grafik 2.15	Diagram Progres naskah PPKD Sulut hingga Juni 2021	II-101
Grafik 2.16	Indeks Pembangunan Kebudayaan Menurut Provinsi Tahun 2018	II-101
Grafik 2.17	Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Juli 2020	II-112
Grafik 2.18	Lima Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sulawesi Utara dengan Nilai Terbesar (US $) EKSPOR	II-112
Grafik 2.19	Lima Negara Tujuan Impor Provinsi Sulawesi Utara dengan Nilai Terbesar (US $) IMPOR	II-116
Grafik 2.20	Penjabaran RPJMD dalam RKPD	II-117
Grafik 2.21	Perkembangan Realisasi Pendapatan DaerahProvinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2020	II-118

NO	NAMA GRAFIK	HALAMAN
Grafik 2.22	Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer DaerahProvinsi Sulawesi Utara Tahun 2019	II-118
Grafik 2.23	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2020	II-119
Grafik 2.24	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Netto DaerahProvinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2020	II-124
Grafik 2.25	Jumlah Inovasi dan Teknologi Daerah yang Dipublikasi	II-125
Grafik 2.26	Jumlah MoU Kerjasama Kelitbangan	II-134
Grafik 2.27	Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Juli 2020	II-138
Grafik 2.28	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen) Agt 2017- Agt 2018	II-140
Grafik 2.29	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017-2018	II-141
Grafik 3.1	Perkembangan Kemiskinan Di Sulut Tahun 2016-2020	III-9
Grafik 3.2	IPM Provinsi Sulut di Pulau Sulawesi 2018-2020	III-12
Grafik 3.3	IPM Sulut dan Nasional 2018-2020	III-12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026. Tahun 2023 menjadi tahun kedua dari rangkaian proses pembangunan jangka menengah daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026. Dokumen RKPD disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2023 merupakan tahun kedua dengan kebijakan yang diarahkan pada upaya ***meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan SDM dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan***. Tahun kedua ini menjadi sangat penting untuk mengevaluasi capaian kinerja pembangunan jangka menengah daerah Sulawesi Utara. RKPD Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021, serta dinamika lingkungan global yang terjadi diantaranya kemungkinan masih berlanjutnya dampak pandemi Covid-19 pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

RKPD Tahun 2023 juga diselaraskan dengan Rancangan RKP Tahun 2023, RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024. Selain itu RKPD Tahun 2023 juga menerapkan peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, penyusunan RKPD Tahun 2023 disusun dengan pendekatan *top-down, bottom-up,* partisipatif, politik, teknokratik serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan (1) *top down,* yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional; (2) *bottom up,* yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi; (3) partisipatif, pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat; (4) politik, pendekatan perencanaan yang menerjemahkan visi misi kepala daerah terpilih; (5) teknokratik, pendekatan menggunakan metode dan kerangka piker ilmiah. Pendekatan yang berorientasi pada THIS dilakukan melalui pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah serta penguatan integrase seluruh pidah dan sumber pendanaan pembangunan. Selain itu, implementasi *money folows priority program* dan *program follows result* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambugan prioritas program/kegiatan, penajaman integrase berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indicator kinerja.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dokumen RKPD Tahun 2023 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis, yaitu:

1. *Secara substansial*, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. *Secara normatif*, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati Bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. *Secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala

perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan

4. *Secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2023 disusun melalui pendekatan:

1. *Top-down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan programprogram prioritas nasional;
2. *Bottom-up*, yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi;
3. *Partisipatif*, yaitu pendekatan perencanaan melibatkan diantaranya unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat; politik, pendekatan perencanaan yang mengakomodir kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; dan
4. *Teknokratik*, yaitu pendekatan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah.

Selanjutnya, selain 4 (empat) pendekatan di atas, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 juga berdasarkan pendekatan substansi perencanaan "THIS" yaitu:

1. *Tematik-Holistik,* Dalam mencapai sasaran Prioritas Nasional dirancang koordinasi berbagai perangkat daerah terkait;
2. *Integratif,* Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi; dan
3. *Spasial,* Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi.

Selain itu, prinsip *money follows priority programs* menjadi landasan dalam pelaksanaan pendekatan substansi perencanaan "THIS", yang dilakukan dengan 4 (empat) fokus penguatan, yakni:

1. Penguatan perencanaan dan penganggaran, dilakukan melalui penajaman prioritas daerah dan program prioritas, serta koordinasi antara pusat dan daerah;
2. Penguatan pengendalian perencanaan, dilakukan melalui penyusunan proyek prioritas pembangunan daerah hingga level satuan sub kegiatan;
3. Penguatan perencanaan berbasis kewilayahan, dilakukan melalui penyusunan proyek prioritas hingga rencana detail lokasi pembangunan; dan
4. Penguatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun KPBU/PINA, Badan Usaha, serta Swasta, guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.

Proses penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 telah didukung oleh sistem dan skema proses perencanaan secara online/berbasis website atau *e-planning* melalui SIPD, sebagai pemanfaatan teknologi dan informasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infomrasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber daya secara optimal.

Tahapan pelaksanaan penyusunan RKPD, dilaksanakan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diselenggarakan sebagai berikut :

1. *Persiapan Penyusunan RKPD*
   a. Pembentukan Tim Penyusun melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 372 Tahun 2021 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023;
   b. Orientasi mengenai RKPD;
   c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun RKPD;
   d. Pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. *Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)*
   a. FGD Perumusan Tema, Isu Strategis dan Prioritas Daerah;
   b. FGD Penetapan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah serta Penetapan Pagu Indikatif;
   c. FGD Penetapan Asumsi Makro Ekonomi Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
   a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
   b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
   c. Analisis kapasitas riil keuangan daerah;
   d. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
   e. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
   f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
   g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
   h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
   i. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
   j. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
   k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
4. Penyusunan Rancangan RKPD
   a. Pelaksanaan Konsultasi Publik;
   b. Pelaksanaan verifikasi pembahasan desk Rancangan Renja Perangkat Daerah;
   c. Rancangan Renja seluruh Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi;
   d. Penginputan Pokok Pikiran DPRD (Pokir) melalui SIPD; dan
   e. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortek) Tingkat Provinsi;

f. Pelaksanaan Pra-Musrenbang Provinsi.

5. Melaksanakan Musrenbang RKPD Provinsi
   Adapun tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD, adalah :
   a. Menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
   b. Menyepakati prioritas pembangunan daerah;
   c. Menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
   d. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; dan
   e. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional.
6. Merumuskan Rancangan Akhir RKPD
   Proses penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi menjadi Rancangan Akhir RKPD provinsi berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD provinsi.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada beberapa dasar hukum yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara, yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemberntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutaakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, dimana mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban sebagai satu siklus manajemen pembangunan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Selanjutnya dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah. Disamping itu, dokumen RKPD juga akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS pada tahapan penganggaran. Pada saat pertanggungjawaban, dokumen RKPD akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ). Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban.

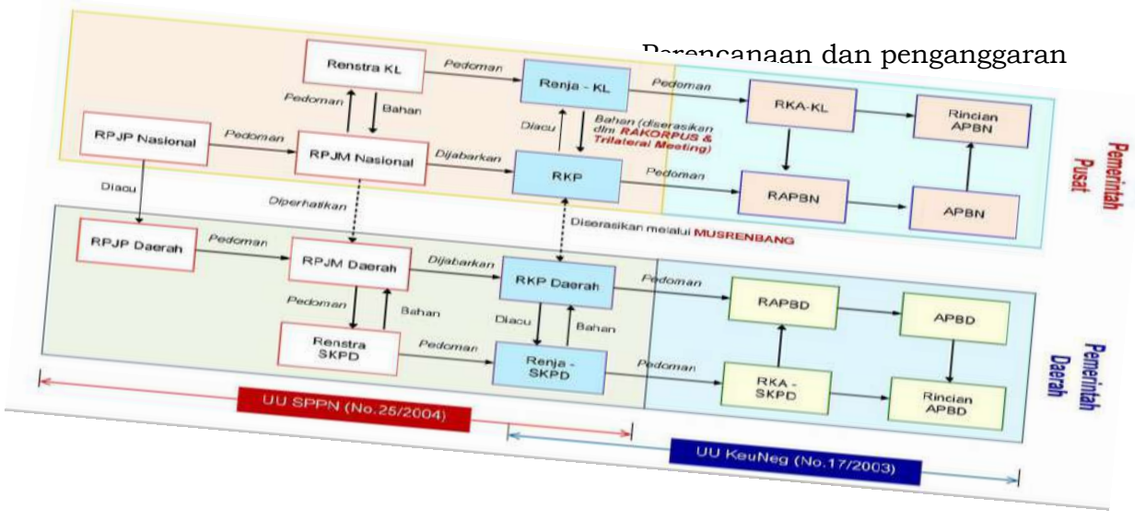

RKPD Tahun 2023 juga disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Provinsi Sulawesi Utara dan memberikan arah program strategis Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten/Kota serta memanfaatkan *competitive* dan *comparative advantage* wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, *holistic, integrative* dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antar wilayah dan lintas sektor. Pengembangan pola kerjasama antara wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah di Provinsi Sulawesi Utara.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023;
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan disusunnya RKPD Tahun 2023 adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023;
3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota tahun 2023.

1.5. Sistematika

Dokumen RKPD Tahun 2023, terdiri dari 2 (dua) buku yaitu: 1) Buku Narasi RKPD Tahun 2023 dan 2) Lampiran yang berisi Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 dan Tabel Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023.

- Buku I Narasi RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini :

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

Kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan serta mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan

layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD

di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Mengemukakan arah dan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan kabupaten/kota.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun

rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi Indikator Kinerja Utama Daerah yang menggambarkan pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Utara dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang menggambarkan kinerja Kepala Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menggambarkan kinerja berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII PENUTUP

Memuat Kesimpulan dan Rekomendasi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Utara.

- Buku II memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 dan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sulawesi Utara terletak antara 00°15' – 05°34' Lintang Utara dan antara 123°07' – 127°10' Bujur Timur, yang berbatasan dengan Laut Sulawesi, Negara Filipina dan Samudera Pasifik disebelah utara serta Laut Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo. Luas Wilayah Sulawesi Utara tercatat 13,892.47 km² yang terbagi atas 11 kabupaten dan 4 kota. Bolaang Mongondow merupakan kabupaten dengan wilayah terluas, yaitu 2,871.65 km² atau 20,67 persen dari wilayah Sulawesi Utara.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Utara

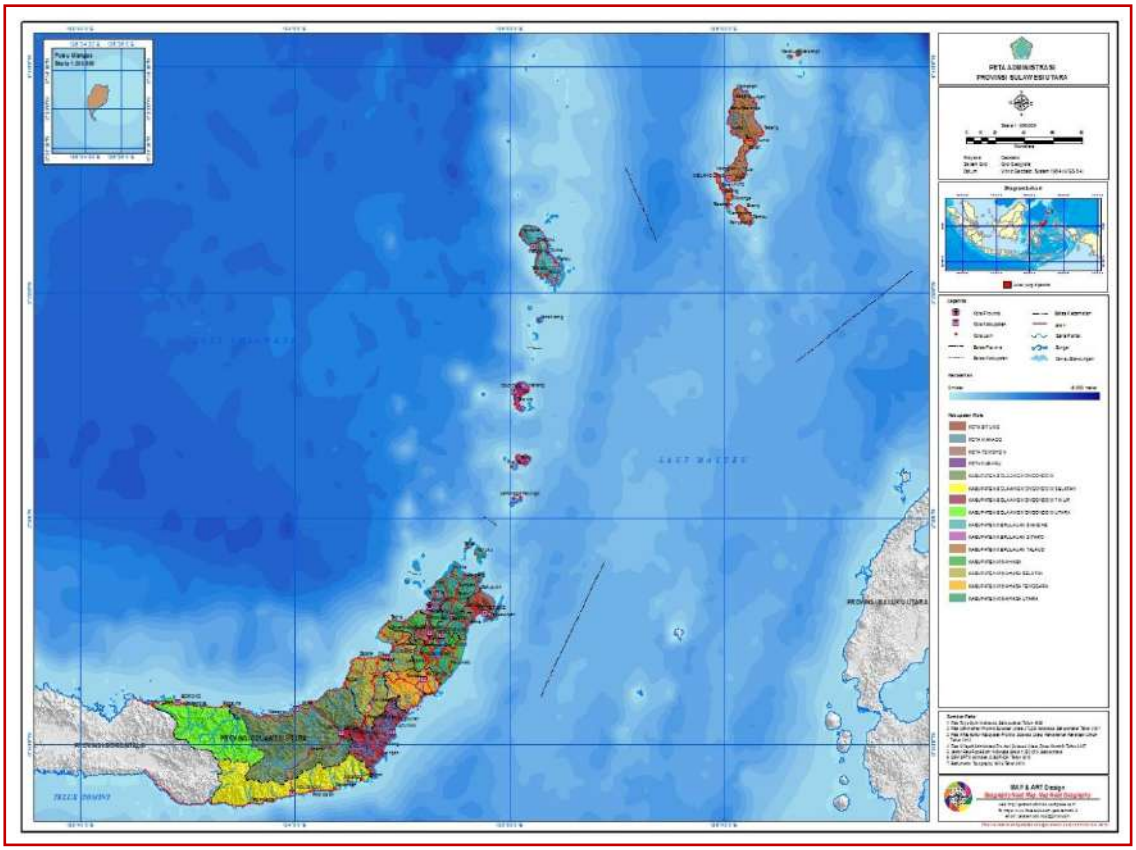

Sulawesi Utara adalah Provinsi Kepulauan dengan ibukota Manado. Provinsi ini terdiri dari 15 Kabupaten/kota (11 Kabupaten yaitu: Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Utara serta 4 kota, yaitu Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon).

Tabel. 2.1
Luas Daerah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan
di Provinsi Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	LUAS (KM^2)	% LUAS WILAYAH	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN
1	Kab. Minahasa	1,114.87	8.02%	15	202
2	Kab. Minahasa Selatan	1,409.97	10.15%	25	270
3	Kab. Minahasa Utara	918.49	6.61%	15	167
4	Kab. Minahasa Tenggara	710.83	5.12%	19	153
5	Kab. Bolmong	2,871.65	20.67%	17	178
6	Kab. Bolmong Utara	1,680.00	12.09%	10	131
7	Kab. Bolmong Selatan	1,615.86	11.63%	6	107
8	Kab. Bolmong Timur	910.18	6.55%	10	93
9	Kab. Kep. Sangihe	461.11	3.32%	12	144
10	Kab. Kep. Talaud	1,240.40	8.93%	7	81
11	Kab. Kep. Sitaro	275.86	1.99%	7	81
12	Kota Manado	157.27	1.13%	11	87
13	Kota Bitung	302.89	2.18%	8	69
14	Kota Tomohon	114.2	0.82%	5	44
15	Kota Kotamobagu	108.89	0.78%	4	33
JUMLAH		13,892,47	100.00%	171	1840

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

Jumlah kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2016-2021 tidak mengalami perubahan yaitu 171 kecamatan, dengan jumlah 1.838 desa/kelurahan tahun 2016-2018 dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 1.839 desa/kelurahan (bertambah 1 desa di Kabupaten Minahasa Selatan). Dari 1839 desa/kelurahan, 783 diantaranya terletak di tepi laut dan 1.056 lainnya bukan tepi laut.

2) Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis letak Provinsi Sulawesi Utara sangat strategis karena berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur (Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, ASEAN) dan Pasifik yang menjadikan Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi sebagai pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi regional. Kondisi ini menciptakan iklim yang menarik bagi para wisatawan, pelaku bisnis, dan para investor domestik

dan internasional untuk berkunjung dan melakukan investasi di Sulawesi Utara.

Posisi Provinsi Sulawesi Utara terletak di tepian Samudra Pasifik, diapit oleh 2 (dua) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang melewati Selat Makassar antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, dan ALKI III yang melewati Laut Maluku antara Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku Utara dan Maluku. Posisi strategis ini menciptakan keunikan dan keunggulan khusus bagi Sulawesi Utara karena sangat dekat dengan pasar Asia Timur dan Pasifik.

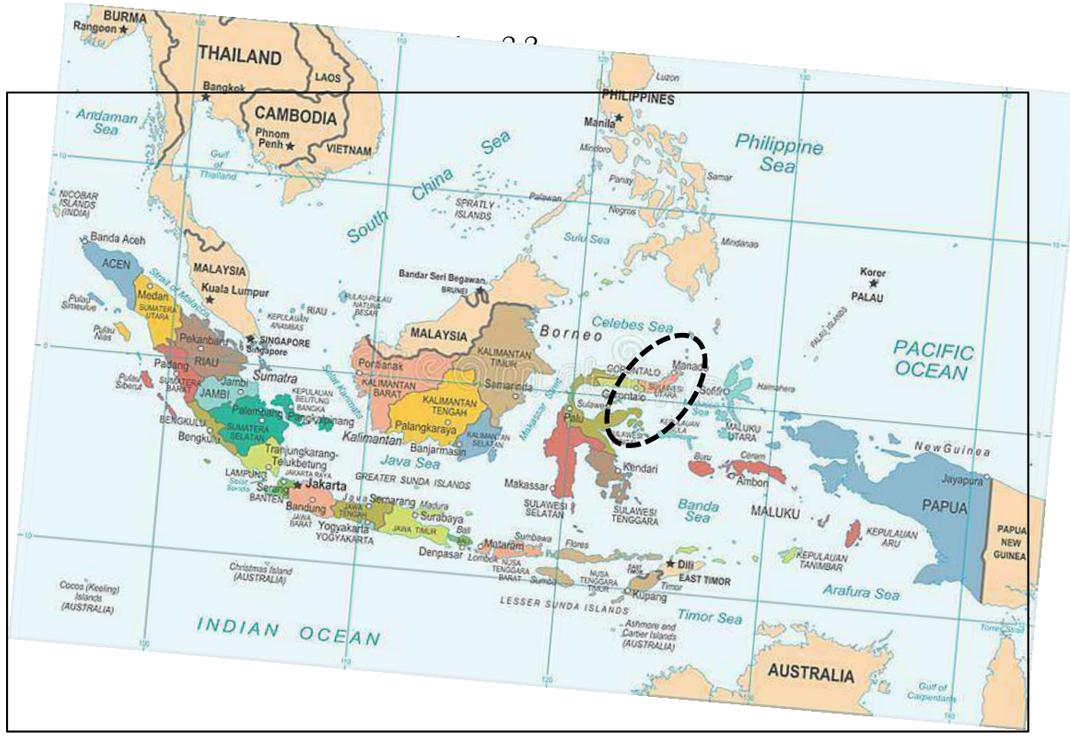

Gambar 2.3
Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan
(ALKI)

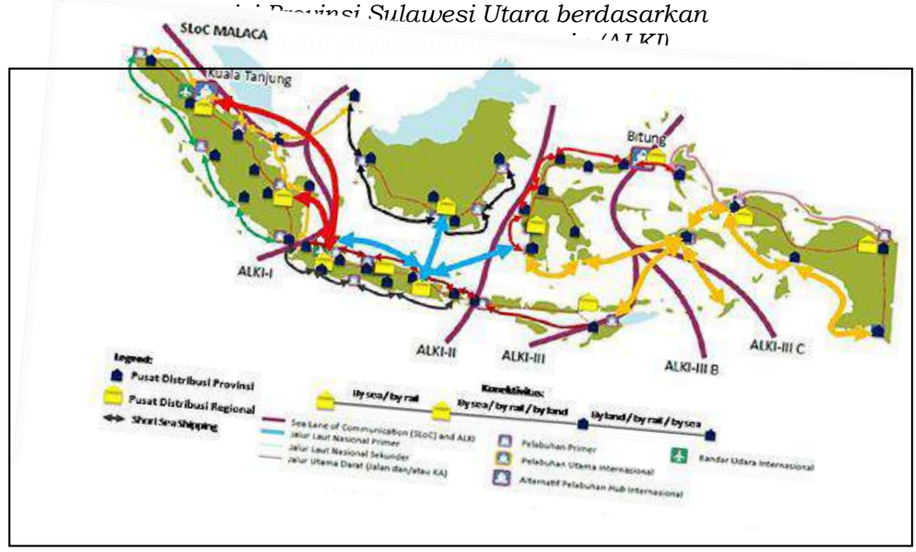

Potensi Pengembangan Wilayah Sulawesi Utara dikembangkan lewat strategi pengembangan klaster yang terdiri dari 5 klaster yaitu: Klaster Wilayah Kepulauan, Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya, Klaster Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Tengah/ Induk, dan Tomohon), Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian (Utara, Manado, dan Bitung) sebagai wilayah cepat tumbuh, dan Pembangunan antar Klaster Wilayah Minahasa Raya dan Bolaang Mongondow Raya dalam koridor pantai Selatan.

3) Topografi

Dilihat dari topografi Sulawesi Utara sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit diselingi oleh lembah yang membentuk dataran. Terdapat 46 gunung yang terletak di sembilan kabupaten/kota. Sedangkan jumlah danau tercatat sebanyak 17 danau dan jumlah sungai yang mengaliri wilayah Sulawesi Utara sebanyak 30 sungai. Gunung-gunung terletak berantai dengan ketinggian di atas 1000 m dari permukaan laut.

Beberapa gunung di Sulawesi Utara yaitu, Gunung Klabat (1.895 m) di wilayah Airmadidi, Gunung Lokon (1.579 m) dan Gunung Mahawu (1.331 m) di wilayah Tomohon, Gunung Soputan (1.789 m) di wilayah Tombatu, Gunung Dua Saudara (1.468 m) (wilayah Bitung), Gunung Awu (1.784 m) di wilayah Kep. Sangihe, Gunung Ruang (1.245 m) dan Gunung Karangetan (1.320 m) di wilayah Kep. Sitaro, Gunung Dalace (1.165 m) di wilayah Minahasa, Gunung Ambang (1.689 m) di wilayah Bolaang Mongondow, Gunung Gambula (1.954 m) di wilayah Bolaang Mongondow Utara, dan Gunung Batu-Balawan (1.970 m) di wilayah Bolaang Mongondow Timur.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki dataran rendah dan dataran tinggi yang potensial mempunyai nilai ekonomi bagi daerah. Beberapa dataran yang terdapat di daerah ini antara lain: Tondano (2.850 Ha), Langowan (2.381 Ha), Modoinding (2.350 Ha), Tompaso Baru (2.587 Ha) di Kabupaten Minahasa serta beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

4) Geologi

Kekayaan geologi yang sangat unik di miliki Provinsi Sulawesi Utara terjadi akibat keberadaan tumbukan antara 2 (dua) *island arc* (Sangihe dan Halmahera) yang menumpang di atas lempeng laut Maluku, sementara di tempat-tempat lain di bagian dunia ini: lempeng benua bertumbukan dengan lempeng samudera. Hal ini menjadikan Sulawesi Utara memiliki keunggulan geologi yang unik untuk dijadikan daya tarik wisata tetapi juga sebagai pusat studi keilmu-bumian dibandingkan dengan daerah lainnya.

Berdasarkan Peta Geologi Bersistem Indonesia (1:250.000), struktur geologi di wilayah Propinsi Sulawesi Utara terdiri dari formasi sebagai berikut:

1) Qal (Aluvium): terdapat dipesisir pantai seperti di Nanasi, Boyongpante, Sidate dan Tawaang, serta di daerah sepanjang Pantai Utara Bolaang Mongondow seperti Boroko, Bolangitang, Biontong, Batulintik, Lolak dan Lolan. Di Kota Manado zona ini terdapat di Pantai Tumumpa dan di pantai bagian utara Manado;
2) Qs (Endapan Danau dan Sungai): terdapat di daerah sepanjang sungai (DAS) Tondano dari Kairagi sampai ke muara Sungai Tondano, daerah pesisir Likupang dan pesisir Tanawangko-Tumpaan;
3) Ql (Batu gamping Terumbu Koral): terdapat di antara daerah pasang naik dan pasang surut (di barat Amurang dan di Pulau Siladen);
4) Qv (Batuan Gunung Api Muda): membentuk Gunung Api strato muda, antara lain, G. Soputan, G. Mahawu, G. Lokon, G. Klabat, G. Tangkoko;
5) Qtv (Tufa Tondano): tersebar di daerah Manado, sekitar jalur jalan Tanahwangko – Amurang, daerah sekitar G. Lolombulan di Kecamatan Tenga dan Sinonsayang;
6) Qtvl (Aliran lava berkomposisi andesit trakhit): Terdapat di daerah G. Tanuwatik, Popontolen dan di S. Sinengkeian. Di daerah pantai antara Sondaken dan Paslaten;
7) Tps (Breksi dan Batu Pasir): terdapat di P. Nain Besar dan P. Nain Kecil, P. Talise, P. Bangka juga sekitar Likupang Barat dan Likupang Timur;
8) Tmv/Tmvl (Batuan Gunung Api): terdapat di sungai dekat Paslaten, Pulau Lembeh, Papusungan, di daerah Bolaang Mongondow terletak di daerah G. Ulutalogon – G. Bumbungan;
9) Tms (Batuan Sedimen): terdapat di Kotamobagu;
10) Ttv (batuan Gunung Api): Satuan ini terdapat di daerah Bolaang Mongondow dan di daerah Bintauna;
11) Tts (Formasi Tinombo Ahlburg 1913): Satuan batuan ini terdapat di Bolangitang dan Kaidipang;
12) Qa (Aluvium): Dataran alluvium yang luas terdapat di Tabukan Utara;
13) Qhav (Batuan Gunung Api Awu):Batuan dihasilkan oleh Gunung Api Awu di P. Sangihe. Endapan awan panas meliputi daerah sekitar kawah, lembah dan beberapa pantai seperti Mitung dan Bahu. Formasi geologi lainnya yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Sangihe-Sitaro dan Talaud adalah Qhkv batuan Gunung Api Karangetang, Qhrv batuan Gunung Api Ruang, Qpp formasi Pintareng, Qtsv batuan Gunung Api Sahendaruman, Qtkv batuan

gunung api Kalama, QTtv batuan Gunung Api Tamata, QTmv batuan Gunung Api Malingge, Qti batuan terobosan, Tpbv batuan Gunung Api Bukide, dan Tnbv batuan Gunung Api Biaro

5) Hidrologi

Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas 3 (tiga) Wilayah Sungai:

1) Wilayah Sungai Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas (Wilayah Sungai Strategis Nasional);
2) Wilayah Sungai Dumoga Sangkub (Wilayah Sungai Lintas Propinsi); dan
3) Wilayah Sungai Poigar-Ranoyapo (Wilayah Sungai Lintas Kabupaten).

Secara garis besar luas SWP DAS Sulawesi Utara adalah 1.423.047 ha. Wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 23 Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS) yang terbagi dalam 66 SWP SUBDAS- dengan luas 1.423.047 ha. SWP DAS sangat berperan da[illegible] pembangunan berkelanjutan yang berwawasan li[illegible]

DANAU:

Danau Tondano luas 4.278 ha, Danau Moat 617 ha, Danau Linow 34 ha, Danau Cinta Makalehi 8 ha, danau Tampusu 2,5 ha, Danau Seper 2,5 ha, Danau Tondok 16,6 ha, Danau Bulilin 21 ha, dan Danau Iloloy 6 ha.

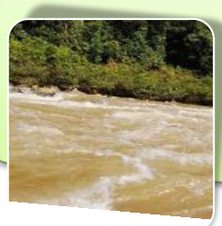

SUNGAI:

Sungai besar terdapat di Kabupaten Minahasa yaitu: Sungai Tondano (40 Km), Sungai Poigar (54,2 Km), Sungai Ranoyapo (51,9 Km), Sungai Talawaan (34,8 Km). di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Sungai Dumoga (87,2 Km), Sungai Sangkup (53,6 Km), Sungai Ongkaw (42,1 Km), dan lainnya.

Terdapat 16 (enam belas) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: DAS Tondano, DAS Kosibidan, DAS Sangkup, DAS Ranoyapo, DAS Pororosen, DAS Poigar, DAS Ongkak Mongondow, DAS Nuangan, DAS Ranowangko/Nimangan, DAS Likupang, DAS Buyat, DAS Bolangitang, DAS Ayong, DAS Andegile, DAS Dumoga dan DAS Bone (berdasarkan Peta Pembagian DAS Sulawesi Utara).

Sebagai prasarana penunjang bagi kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan lahan basah atau persawahan, pengembangan sistem irigasi pada dasarnya mengikuti potensi pengembangan/perluasan daerah persawahan. Proyek-proyek irigasi yang relatif besar ada di

daerah irigasi Kasinggolan-Toraut, daerah irigasi Dumoga, daerah irigasi Sangkup, daerah irigasi Ayong-Bolangat dan daerah Irigasi Lolak.

Tabel 2.2
Luas SWP DAS Provinsi Sulawesi Utara

NO.	SATUAN WILAYAH PENGELOLAAN DAS	LUAS (ha)	%
1.	Buyat	87.909	6.18
2.	Dumoga Mongondow	204.736	14.39
3.	Essang	79.737	5,60
4.	Kep. Nanusa	3.954	0.28
5.	Kep. Nusa Tabukan	1.205	0.08
6.	Kep. Tatoareng	2.200	0.15
7.	Likupang	97.951	6.88
8.	Mahena	50.852	3.57
9.	Molibagu	116.167	8.16
10.	P. Biaro Ds	2.726	0.19
11.	P. Bunaken Ds	4.891	0.34
12.	P. Kabaruan	10.940	0.77
13.	P. Lembeh	5.767	0.41
14.	P. Lirung	11.272	0.79
15.	P. Siau Ds	13.905	0.98
16.	P. Tagulandang Ds	7.897	0.55
17.	P. Talise Ds	7.476	0.53
18.	Poigar	81.520	5.73
19.	Ranoyapo	87.154	6.12
20.	Ratahan Pantai	98.754	6.94
21.	Sangkup Langi	287.019	20.17
22.	Tondano	54.124	3.80
23.	Tumpaan	104.891	7.37
JUMLAH		**1.423.047**	**100**

Sumber: RTRW Prov. SULUT Tahun 2014-2034.

6) Klimatologi

a. Suhu

Rata-rata temperatur di Provinsi Sulawesi Utara sepanjang tahun 2019 adalah 27,4°C sedangkan suhu udara kering sekitar Iklim daerah Sulawesi Utara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh angin muzon. Pada bulan November sampai dengan April bertiup angin barat yang membawa hujan di pantai utara. Pada bulan Mei sampai Oktober terjadi perubahan angin selatan yang kering. Pada umumnya, kondisi iklim di Sulawesi utara sama dengan kondisi iklim wilayah Indonesia lainnya, yaitu memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan.

Sebagai daerah yang beriklim hujan tropis, kelembaban udara terendah di Kabupaten Minahasa Utara dan Manado yaitu 66 persen dan kelembaban tertinggi di Minahasa Utara dan Minahasa yaitu 90 persen. Secara keseluruhan kelembaban rata-rata mencapai 80,8 persen.

Tabel. 2.3
Keadaan Rata-rata Suhu di Sulut Tahun 2019 (Derajat Celcius)

KABUPATEN/KOTA		STASIUN BMKG	SUHU/TEMPERATUR (°C)		
			MINIMUM	RATA - RATA	MAKSIMUM
Kabupaten					
1.	Bolaang Mongondow	Pos Hujan KC Motabang Lolak	--	--	--
2.	Minahasa	Tondano	17,4	23,1	31,4
3.	Kepulauan Sangihe	Stasiun Meteorologi Naha	21,6	27,6	35,0
4.	Kepulauan Talaud	Pos Hujan BPP Beo	--	--	--
5.	Minahasa Selatan	Pos Hujan UPP Tenga	--	--	--
6.	Minahasa Utara	Stasiun Klimatologi Minahasa Utara	21,4	26,5	35,8
7.	Bolaang Mongondow Utara	Pos Hujan BPP Pinogaluman	--	--	--
8.	Siau Tagulandang Biaro	Pos Hujan BPP Siau Tengah	--	--	--
9.	Minahasa Tenggara	Pos Hujan UPTD Ratahan	--	--	--
10.	Bolaang Mongondow Selatan	Pos Hujan UPTD Pinolosian	--	--	--
11.	Bolaang Mongondow Timur	Pos Hujan UPP Kotabunan	--	--	--
Kota					
1.	Manado	Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi	20,4	27,0	35,0
2.	Bitung	Stasiun Meteorologi Maritim Bitung	22,0	28,4	34,8
3.	Tomohon	Pos Hujan BPP Tomohon	--	--	--
4.	Kotamobagu	Pos Hujan BPP Mongkonai	--	--	--

Sumber: BPS Prov. Sulut, 17 Februari 2022.

b. Curah Hujan

Curah hujan tidak merata dengan angka tahunan berkisar antara 2000-3000 mm, dan jumlah hari hujan antara 90-139 hari. Suhu udara berada pada setiap tingkat ketinggian makin ke atas makin sejuk seperti daerah Kota Tomohon, Langowan di Minahasa, Modoinding di Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu, Modayag dan Pasi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Daerah yang paling banyak menerima curah hujan adalah daerah Minahasa. Sedangkan curah hujan rata-rata adalah 279,6 mm dengan sebaran 220-309 mm. Kecepatan angin rata-rata adalah 2,7 knot dengan sebaran 1,9-3,6 knot.

Tabel 2.4
Keadaan Curah Hujan di Provinsi Sulawesi Utara
(Milimeter Kubik (mm3)) Tahun 2021

KABUPATEN/ KOTA	STASIUN BMKG	TEKANAN UDARA (MB)			JMLH CURAH HUJAN (MM)	JUMLAH HARI HUJAN (HARI)	PENYINARAN MATAHARI (%)
		MIN.	RATA-RATA	MAX			
Bolaang Mongondow	Pos Hujan KC Motabang Lolak	-	-	-	-	-	-
Minahasa	Tondano	-	-	-	2306	245	47

KABUPATEN/ KOTA	STASIUN BMKG	TEKANAN UDARA (MB)			JMLH CURAH HUJAN (MM)	JUMLAH HARI HUJAN (HARI)	PENYINARAN MATAHARI (%)
		MIN.	RATA-RATA	MAX			
Kepulauan Sangihe	Stasiun Meteorologi Naha	-	-	-	4678	262	61
Kepulauan Talaud	Pos Hujan BPP Beo	-	-	-	-	-	-
Minahasa Selatan	Pos Hujan UPP Tenga	-	-	-	-	-	-
Minahasa Utara	Stasiun Klimatologi Minahasa Utara	-	-	-	4603	281	51
Bolaang Mongondow Utara	Pos Hujan BPP Pinogaluman	-	-	-	-	-	-
Siau Tagulandang Biaro	Pos Hujan BPP Siau Tengah	-	-	-	-	-	-
Minahasa Tenggara	Pos Hujan UPTD Ratahan	-	-	-	-	-	-
Bolaang Mongondow Selatan	Pos Hujan UPTD Pinolosian	-	-	-	-	-	-
Bolaang Mongondow Timur	Pos Hujan UPP Kotabunan	-	-	-	-	-	-
Manado	Stasiun Meteorolgi Sam Ratulangi	-	-	-	4177	275	58
Bitung	Stasiun Meteologi Maritim Bitung	-	-	-	2340	240	61
Tomohon	Pos Hujan BPP Tomohon	-	-	-	-	-	-
Kotamobagu	Pos Hujan BPP Mongkonai	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Prov. Sulut, 17 Februari 2022.

7) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Adapun jenis penggunaan lahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Di Provinsi Sulawesi Utara

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	***Kawasan Lindung***	**406.949**	**29,38**
1.1	Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	245.165	17,70
1.2	Kawasan Hutan Lindung (HL)	161.784	11,68
2	***Kawasan Budidaya***	**978.215**	**70,62**
2.1	Pertanian Lahan Basah (Sawah)	107.361	7,75
2.2	Perkebunan	301.600	21,77
2.3	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	208.927	15,08
2.4	Kawasan Hutan Produksi (HP)	64.367	4,65
2.5	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)	14.696	1,06
2.6	Areal Penggunaan Lain (APL)	281.264	20,31
TOTAL		**1.385.164**	**100**

Sumber: Bappeda Prov. Sulut (diolah)

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung wilayah provinsi Sulawesi Utara seluas 406.949 ha, meliputi:

1.1. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

Kawasan Suaka Alam (KSA) di Sulawesi Utara terdiri dari: a. Suaka Alam (SA) Laut, meliputi: 1. SA Laut Selat Lembeh di Bitung; 2. SA Laut Sidat di Minahasa dan Minahasa Selatan. b. Suaka Margasatwa (SM) dan Suaka Marga Satwa Laut, meliputi: 1. SM Gunung Manembo-nembo, di Minahasa dan Minahasa Selatan; 2. SM Karakelang Utara-Selatan di Kepulauan Talaud. c. Cagar Alam (CA) dan Cagar Alam Laut, meliputi: 1. CA Dua Saudara, di Bitung; 2. CA Tangkoko-Batuangus, di Bitung; 3. CA Gunung Ambang, terbagi antara Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow; 4. CA Gunung Lokon di Tomohon.

Kawasan Pantai Berhutan Bakau (HB) di Provinsi Sulawesi Utara seluas 12.036,29 ha meliputi Kawasan Pantai HB Esang, HB Beo, HB Rainis, HB Karakelang Selatan di Kepulauan Talaud, HB Pulau Bangka, HB Likupang, HB Tg. Pisok di Minahasa Utara, HB Kuma, HB Manalu, HB Tamako di Kepulauan Sangihe, HB Siau, HB Tagulandang, HB Pasighe, HB Pulau Biaro di Kepulauan Siau Biaro Tagulandang, HB Tg. Kelapa, HB Tg. Walintau, HB Bentenan di Minahasa Selatan, HB Salimburung, HB Dumisil, HB Dumi, HB Kaidipang, HB Bohabak, HB Duminanga, HB Tg. Dodepo di Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongodow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan, HB Tg. Pulisan di Minahasa Utara.

Kawasan Taman Nasional (TN) dan Taman Nasional Laut, yang meliputi: 1. TN Bogani Nani Wartabone, berada di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, dengan rincian di Bolaang Mongondow, di Bolaang Mongondow Selatan dan di Bolaang Mongondow Utara; 2. TN Laut Bunaken, dengan rincian di Manado, di Minahasa, di Minahasa Selatan dan di Minahasa Utara. Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut, meliputi: rencana pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih, di Bitung dan TWA Batu Angus, di Bitung; Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi: rencana pengembangan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (CBP) Bukit Kasih Kanonang dan Batu Pinabetengan di Minahasa; Kawasan Taman Hutan Rakyat meliputi kawasan hutan Gunung Tumpa di Kota Manado.

Kawasan Taman Nasional (TN) dan Taman Nasional Laut, yang meliputi: 1. TN Bogani Nani Wartabone, berada di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, dengan rincian di

Bolaang Mongondow, di Bolaang Mongondow Selatan dan di Bolaang Mongondow Utara; 2. TN Laut Bunaken, dengan rincian di Manado, di Minahasa, di Minahasa Selatan dan di Minahasa Utara. Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut, meliputi: rencana pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih, di Bitung dan TWA Batu Angus, di Bitung; Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (CBP) Bukit Kasih Kanonang dan Batu Pinabetengan di Minahasa; Kawasan Taman Hutan Rakyat meliputi Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Tumpa di Kota Manado.

1.2. Kawasan hutan lindung seluas 161.784 ha

Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Sulawesi Utara tersebar di: a. Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, dan Kotamobagu; b. Minahasa; c. Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara; d. Minahasa Utara; e. Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; f. Kepulauan Talaud; g. Bitung; h. Manado, meliputi bakau dan darat; i. Tomohon.

2. Kawasan Budi Daya

Penetapan kawasan ini dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, kawasan Budi Daya dengan luasan 978.215 ha meliputi:

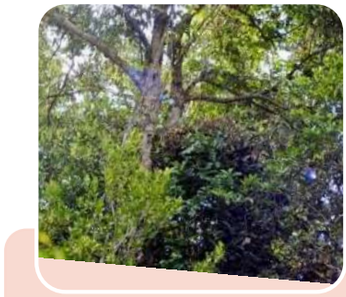

Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Rakyat

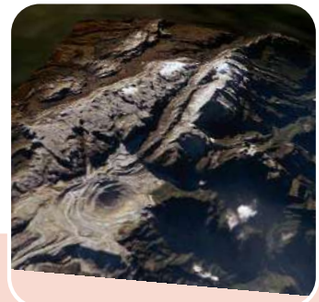

Kawasan Pertambangan

2.1. Kawasan Pertanian Lahan Basah (Sawah)

Kawasan Pertanian Lahan Basah di Provinsi Sulawesi Utara seluas 107.361 ha dengan Persentase terbesar berada di

Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

2.2. Kawasan Perkebunan

Luas Kawasan Perkebunan di Sulawesi Utara adalah 301.600 Ha, yang didominasi oleh Perkebunan Kelapa, Cengkih dan Pala.

2.3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Provinsi Sulawesi Utara seluas 208.927 ha meliputi: HPT Salibabu I & II, HPT Kabaruan di Pulau Salibabu, Kepulauan Talaud; HPT Pulau Bangka, HPT Pulau Talise, HPT Gunung Wiau, HPT Saoan di Minahasa Utara; HPT Gunung Tatawiran dan HPT Gunung Insarang di Minahasa dan Tomohon; HPT Kayuwatu di Minahasa; HPT Sungai Togop, HPT Gunung Surat , HPT Gunung Sinonsayang, HPT Gunung Simbalang, dan HPT Gunung Mintu di Minahasa Selatan; HPT Sungai Ayong-Lobong, HPT Sungai Andagile – Sungai Gambuta – Sungai Biau, HPT Molibagu-Pinolosian-Kombot, HPT Sungai Tanganga – Sungai Salongo – Sungai Molibagu, HPT Sungai Dumoga, HPT Mintu, dan HPT Gunung Bumbungon di Bolaang Mongondow.

2.4. Kawasan Hutan Produksi (HP)

Meliputi HP Tetap Sungai Ranoyapo I di Minahasa Selatan; dan HP Sungai Ilangan I & II, Sungai Pililahunga – Sungai Milangodaa, Mataindo, Matabulu, Inobonto-Poigar, Ongkak Mongondow di Bolaang Mongondow.

2.5. Kawasan Hutan yang dapat dikonversi

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK) Bintauna di Bolaang Mongondow luas kurang lebih 14.696 ha dari luas wilayah Provinsi. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat direncanakan pada lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dan menanaminya dengan tanaman-tanaman yang dapat berfungsi ganda, seperti sebagai penghasil buah, penghasil kayu dan lain-lain yang sekaligus juga berfungsi ekologis. Rencana pengembangan kawasan hutan rakyat dilaksanakan pada kebun Raya Minahasa di Minahasa dan Taman Hutan Rakyat Gunung Tumpa di Manado dan Minahasa Utara.

2.6. Areal Penggunaan Lain (APL)

Areal Penggunaan Lain di Provinsi Sulawesi Utara seluas 281.264 ha terdiri atas: Kawasan Industri, Kawasan Permukiman, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertambangan serta beberapa jenis kawasan lain yang ada.

A. Wilayah Rawan Bencana:

Secara umum wilayah Sulawesi Utara rawan bencana karena berada di area *ring of fire*. Kawasan rawan bencana alam Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas:

1) Kawasan rawan gempa, meliputi seluruh wilayah Provinsi yaitu kawasan yang berada disekitar wilayah patahan lempeng kulit bumi terluar;
2) Kawasan rawan tanah longsor, meliputi: 1. Kepulauan Sangihe dan Siau Tagulandang Biaro: Manganitu, Tamako dan Siau Timur; 2. Manado: Kec. Wanea, Kec. Singkil, Kec. Tuminting, Kec. Tikala, Kec. Mapanget, Kec. Bunaken, Kec. Malalayang, dan Kec. Wenang; 3. Jalur jalan Manado-Amurang; 4. Jalur jalan Manado-Tomohon; 5. Jalur jalan Noongan-Ratahan-Belang (Minahasa Tenggara); dan 6. Torosik (Bolaang Mongondow Selatan);
3) Kawasan rawan gelombang pasang yang meliputi pesisir pantai utara dan selatan Provinsi yang memiliki elevasi rendah;
4) Kawasan rawan gerakan tanah di Gunung Lokon Kota Tomohon, Gunung Klabat di Kabupaten Minahasa Utara, dan Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara serta kawasan sekitar danau Tondano di Kabupaten Minahasa; dan
5) Kawasan rawan banjir yang meliputi daerah muara sungai, dataran banjir dan dataran aluvial terutama di sepanjang sungai di Manado, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow, Minahasa Tenggara, dan Bolaang Mongondow Timur.

B. Demografi:

Pada tahun 2021, penduduk Sulawesi Utara sebanyak 2,639 juta jiwa. Terdiri atas laki-laki sebanyak 1,34 juta jiwa dan perempuan sebanyak 1,28 juta jiwa, hal tersebut menunjukan bahwa angka sex ratio di Sulawesi Utara sebesar 104,69 yang artinya jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi yakni terdapat 104-105 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan.

Grafik 2.1
Jumlah Penduduk Sulawesi Utara (Ribu Jiwa), Tahun 2017-2021, serta Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2021

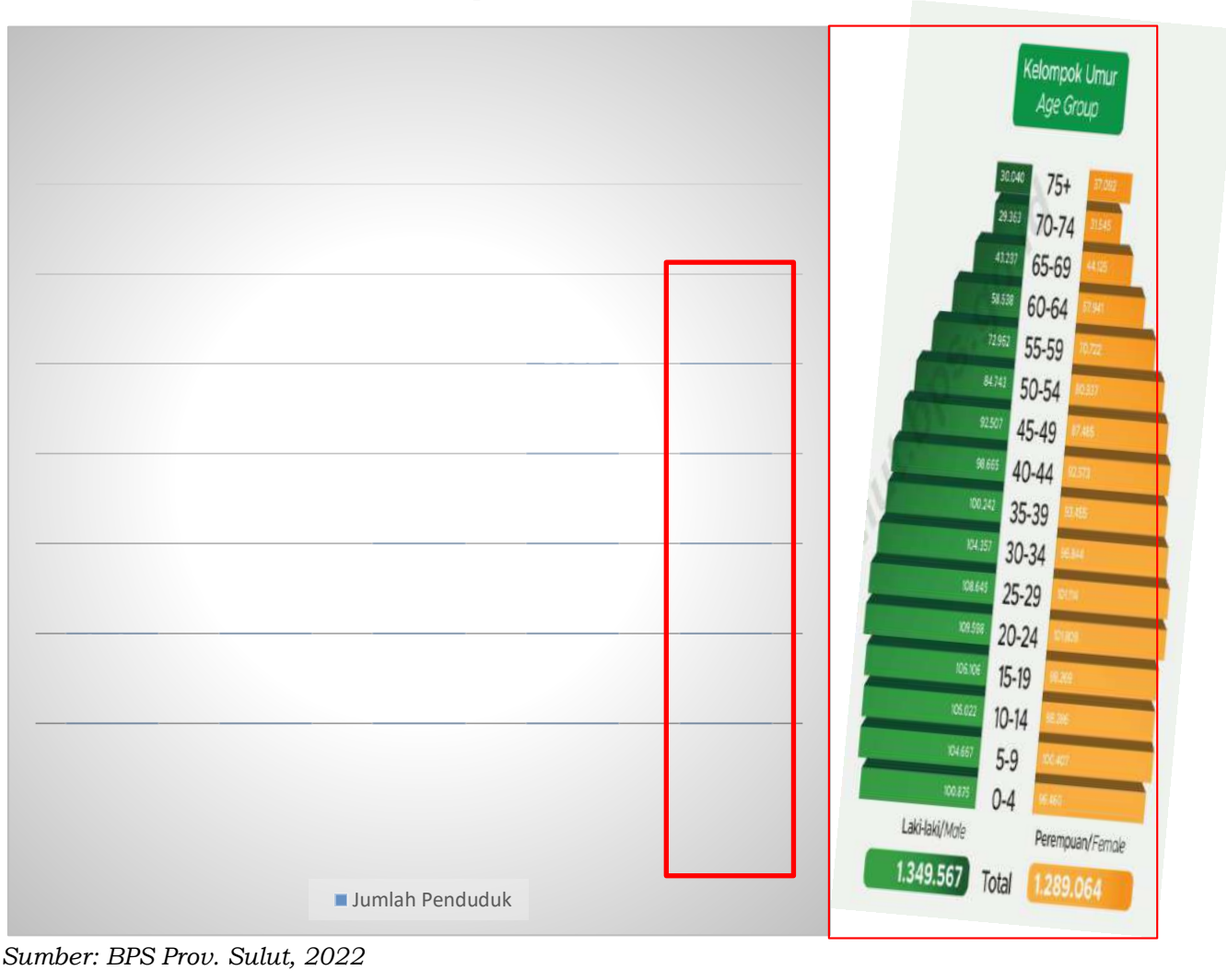

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Mereka terdiri dari "Angkatan Kerja" dan "Bukan Angkatan Kerja". Proporsi penduduk yang tergolong "Angkatan Kerja" adalah mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Penduduk Sulawesi Utara berusia 15 tahun atau lebih pada tahun 2021 mencapai 2,03 juta orang. Adapun Penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 1,81 juta orang, dan usia nonproduktif sebanyak 821,11 ribu orang, sehingga menjadikan angka depedency ratio atau rasio ketergantungan menjadi 45,17, yang artinya dalam 100 orang usia produktif menanggung 45 orang usia nonproduktif. Nilai ini menunjukkan di Sulawesi Utara 1 orang usia nonproduktif ditanggung oleh setidaknya 2 orang usia produktif.

Grafik 2.2
.Piramida Penduduk Provinsi Sulawesi Utara, 2021

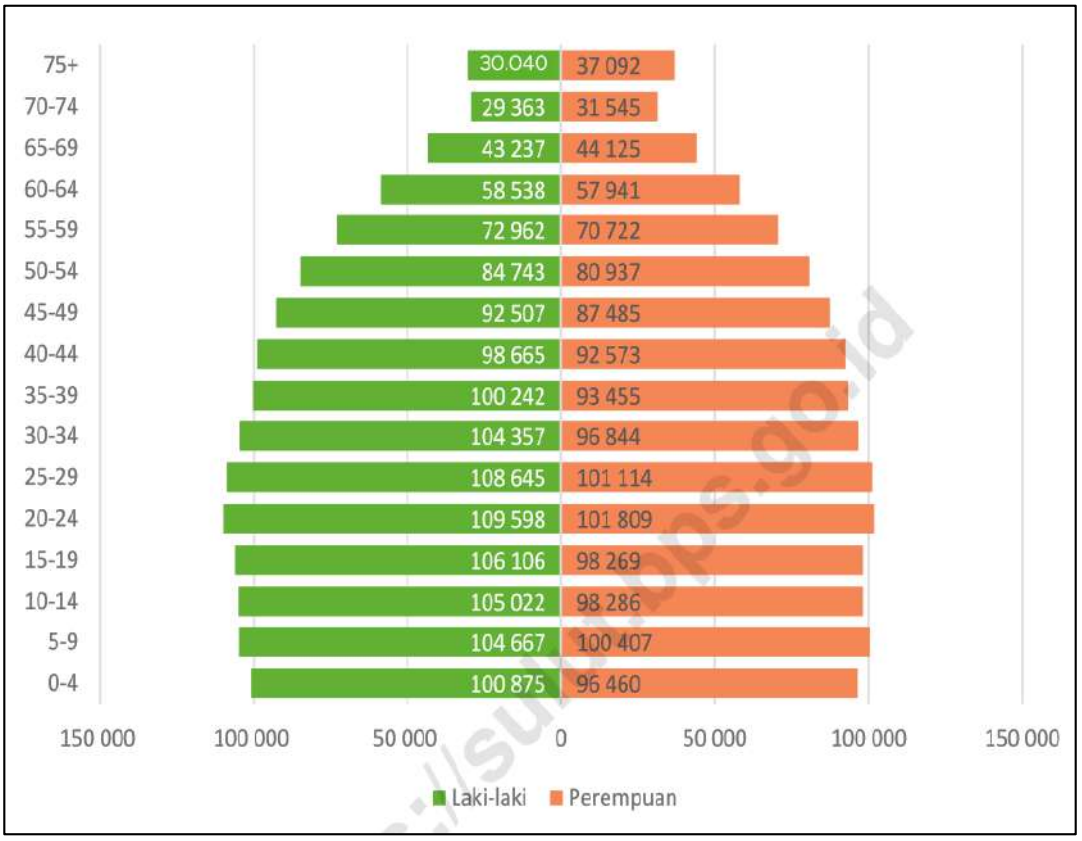

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022

Tabel. 2.6
Indikator Kependudukan Tahun 2017-2021
di Provinsi Sulawesi Utara

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk (000 Jiwa)	2,461	2,484	2,507	2,621	2,638
2	Pertumbuhan penduduk (%)	1,11	1,09	0,01	1,40	0,85
3	Kepadatan penduduk (Jiwa/Km²)	178	176	180	189	190
4	Sex ratio (L/P) (%)	104,17	104,15	104,12	105	104,69
	Menurut Kelompok Umur					
5	0-14 thn (%)	25,30	25,04	24,77	20,09	22,95
6	15-64 thn (%)	68,34	68,36	68,36	72,28	68,88
7	Di atas 65 thn (%)	6,36	6,64	6,87	7,63	8,16

Sumber: BPS Prov. Sulut, 17 Februari 2022.

1. Penduduk menurut Generasi

Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Sulawesi Utara didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Milenial. Proporsi Generasi Z sebanyak 27,50 persen dari total populasi dan Generasi Milenial sebanyak 24,32 persen dari total populasi Sulawesi Utara. Generasi Milenial ini termasuk dalam usia

produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Sekitar 7 tahun lagi, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Indonesia.

Grafik 2.3
Penduduk menurut Generasi

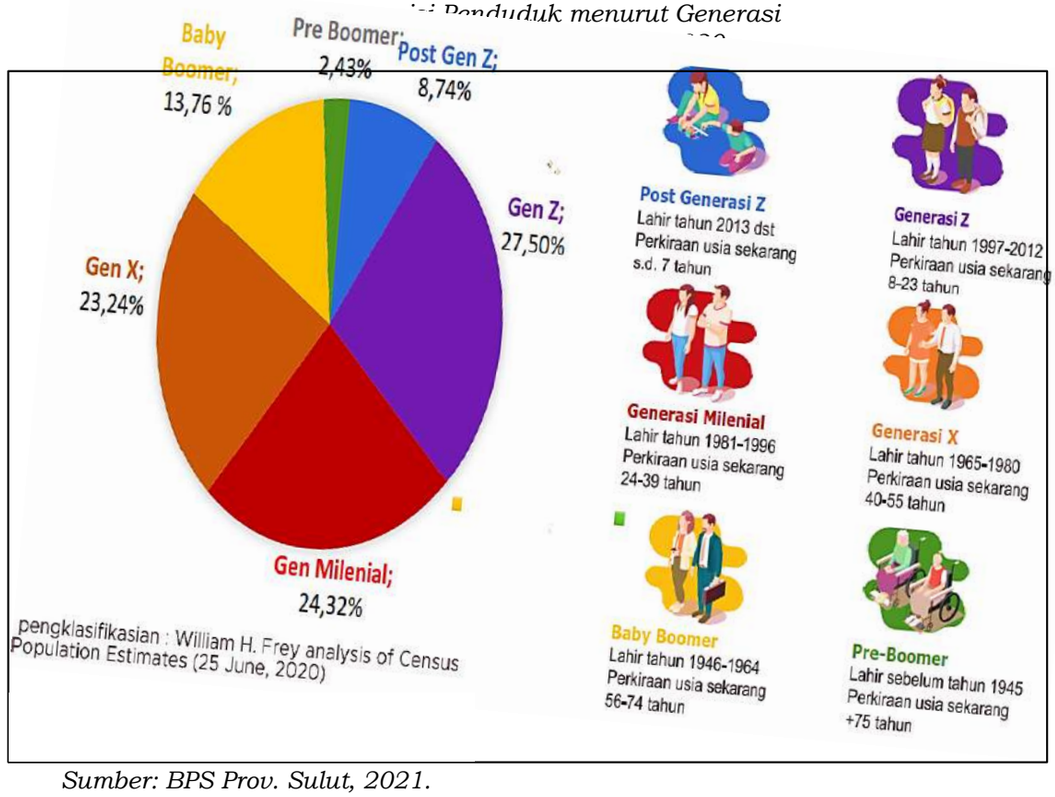

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

2. Jumlah Penduduk Per Kabupaten/Kota

Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, Jumlah penduduk terbesar berada di Kota Manado yang dihuni sebanyak 453,18 ribu jiwa (17,17 persen), diikuti Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bolaang Mongondow, masing-masing 348,67 ribu jiwa dan 250,47 ribu jiwa. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan populasi terkecil adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang memiliki 70,52 ribu penduduk.

Tabel.2.7
Jumlah Penduduk Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	240.505	244.185	247.811	248.751	250.478
Minahasa	335.321	338.364	341.176	347.290	348.673
Kepulauan Sangihe	130.493	130.833	131.163	139.262	139.684
Kepulauan Talaud	90.678	91.599	92.475	94.521	94.983
Minahasa Selatan	208.013	209.501	210.695	236.463	238.746
Minahasa Utara	200.985	202.317	203.624	224.993	226.915
Bolaang Mongondow Utara	78.437	79.366	80.313	83.112	83.743
Kepulauan Sitaro	65.976	66.225	66.403	71.817	72.135
Minahasa Tenggara	105.714	106.303	106.899	116.323	117.079
Bolaang Mongondow Selatan	64.171	65.127	66.071	69.791	70.529
Bolaang Mongondow Timur	70.610	71.477	72.408	88.241	89.981
Kota Manado	430.133	431.880	433.635	451.916	453.182
Kota Bitung	212.409	215.711	219.004	225.134	227.177
Kota Tomohon	103.711	105.306	106.917	100.587	100.853
Kota Kotamobagu	123.872	126.198	128.387	123.722	124.473
Sulawesi Utara	**2.461.028**	**2.484.392**	**2.506.981**	**2.621.923**	**2.638.631**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022

3. Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Luas Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan mencapai 13.893 km2. Sebagian besar wilayah Sulawesi Utara memiliki kepadatan penduduk relatif rendah. Dari 15 Kabupaten/Kota, 11 di antaranya memiliki tingkat kepadatan penduduk kurang dari dari 500 jiwa/km2. Sementara itu, Kota Manado dan Kota Kotamobagu menjadi daerah terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai masing-masing 2.882 jiwa/km2 dan 1.143 jiwa/km2. Adapun secara keseluruhan Laju Pertumbuhan penduduk Sulawesi utara mencapai 0,85 dengan kepadatan penduduk mencapai 190 di tahun 2021.

Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Sulawesi Utara

	Bolmong	Minahasa	Sangihe	Talaud	Minsel	Minut	Bolmut	Sitaro	Mitra	Bolsel	Boltim	Manado	Bitung	Tomohon	Kotamobagu
Laju Pertumbuhan Penduduk	0.93	0.53	0.4	0.65	1.29	1.14	1.01	0.59	0.87	1.41	2.64	0.37	1.21	0.35	0.81
Kepadatan Penduduk	87	313	303	77	169	247	50	261	165	44	99	2882	750	883	1143

Sumber:

4. Rasio Jenis Kelamin

Penduduk laki-laki di Sulawesi Utara sebanyak 1,34 juta orang, atau 51,18 persen dari penduduk Sulawesi Utara. Sementara, penduduk perempuan di Sulawesi Utara sebanyak 1,28 juta orang, atau 48,82 persen dari penduduk Sulawesi Utara. Dari kedua informasi tersebut, rasio jenis kelamin penduduk Sulawesi Utara sebesar 104,69 yang artinya terdapat 104-105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Sulawesi Utara pada tahun 2021.

Adapun rasio jenis kelamin di level kabupaten/kota secara umum selaras dengan level provinsi, yaitu penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin di atas angka 100. Adapun rasio jenis kelaminnya menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Rasio Penduduk menurut Jenis Kelamin Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota, 2010[1]-2021

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Rasio Jenis Kelamin Penduduk *Population Sex Ratio*	
	2010[1]	2021[2]
(1)	(10)	(11)
Kabupaten/*Regency*		
1. Bolaang Mongondow	108	109
2. Minahasa	105	104
3. Kepulauan Sangihe	102	104
4. Kepulauan Talaud	105	106
5. Minahasa Selatan	107	107
6. Minahasa Utara	104	104
7. Bolaang Mongondow Utara	105	106
8. Siau Tagulandang Biaro	98	101
9. Minahasa Tenggara	108	107
10. Bolaang Mongondow Selatan	110	109
11. Bolaang Mongondow Timur	110	109
Kota/*Municipality*		
1. Kota Manado	101	101
2. Kota Bitung	105	105
3. Kota Tomohon	102	102
4. Kota Kotamobagu	104	105
Sulawesi Utara	**104**	**105**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022

https://sulut.bps.go.id

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan PDRB

Peningkatan pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Utara dalam 5 (lima) tahun terakhir diikuti oleh peningkatan pertumbuhan 17 sektor/lapangan usaha. Secara keseluruhan pertumbuhan PDRB ADHK dari tahun 2016 sampai 2020 mencapai 17,87%, kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemic *COVID-19*. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu menjaga keberlanjutan pertumbuhan masing-masing sektor PDRB sehingga pertumbuhan ekonomi pada akhir periode RPJMD tidak negatif.

Tabel 2.9
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah)

SEKTOR/ LAPANGAN USAHA	HARGA KONSTAN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,817,344	16,378,542	17,320,482	17,705,449	17,994,184
Pertambangan dan Penggalian	3,991,183	4,343,225	4,694,004	4,650,508	4,876,170
Industri Pengolahan	8,010,190	8,368,986	8,411,598	8,764,756	9,546,947
Pengadaan Listrik dan Gas	99,137	102,620	112,051	119,828	128,173

SEKTOR/ LAPANGAN USAHA	HARGA KONSTAN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	100,831	104,147	108,748	113,292	113,846
Konstruksi	10,593,031	11,351,939	12,039,440	11,518,351	12,321,288
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,117,866	10,700,477	11,634,920	11,445,858	11,839,704
Transportasi dan Pergudangan	6,922,865	7,467,829	7,909,269	6,790,329	6,911,909
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,848,842	1,958,951	2,013,893	1,491,170	1,680,778
Informasi dan Komunikasi	3,753,807	4,046,717	4,369,734	4,836,156	4,951,192
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,187,945	3,203,612	3,323,855	3,520,446	3,705,996
Real Estate	2,991,486	3,218,628	3,372,685	3,329,613	3,317,983
Jasa Perusahaan	67,490	73,591	78,927	74,745	76,376
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,581,654	5,875,031	5,889,611	5,806,035	5,973,748
Jasa Pendidikan	1,982,364	2,161,349	2,377,244	2,451,117	2,480,204
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,115,678	3,444,889	3,693,477	3,999,186	4,322,967
Jasa lainnya.	1,303,761	1,458,158	1,659,326	1,509,536	1,549,463
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**79.485.474,00**	**84.258.691,00**	**89.009.256,00**	**88.126.374,00**	**91.790.927,00**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022.

Data menunjukkan sektor Informasi dan Komunikasi bertumbuh sebesar 38,23%. Hal ini dapat dimaklumi karena dengan adanya pandemi *COVID-19* sejak awal tahun 2020 sebagian besar rapat/pertemuan dilaksanakan secara daring. Selanjutnya sektor yang mengalami pertumbuhan kedua terbesar adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu 38,14%. Hal ini disebabkan oleh fokus anggaran pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak pandemi *COVID-19* serta untuk mencegah penyebaran *COVID-19* di tengah masyarakat. Penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki nilai pertumbuhan terendah, yakni -14,11%. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan sosial yang menyebabkan menurunnya jumlah orang yang melakukan perjalanan dan aktifitas makan minum di luar rumah.

Pertumbuhan PDRB atas harga berlaku juga terus meningkat selang tahun 2016–2020. Namun perlu diperhatikan bahwa target

pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dalam RPJMD adalah 6,4% dan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2020 hanya -0,99%. Hal ini disebabkan oleh dampak dari pandemi *COVID-19*.

Tabel 2.10
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah)

SEKTOR/ LAPANGAN USAHA	HARGA BERLAKU				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,710,193	25,043,800	27,118,985	28,459,883	30,059,566
Pertambangan dan Penggalian	5,329,459	5,932,142	6,602,929	7,178,794	7,733,985
Industri Pengolahan	10,310,606	10,952,336	11,361,121	12,646,946	14,955,341
Pengadaan Listrik dan Gas	104,622	109,704	120,651	133,570	142,166
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	135,448	140,733	148,153	157,479	160,343
Konstruksi	12,635,541	14,077,436	15,356,041	14,987,747	16,784,715
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,316,278	14,520,696	16,595,416	17,273,918	18,659,487
Transportasi & Pergudangan	11,985,903	13,390,110	14,545,675	12,401,865	12,852,226
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,445,081	2,614,159	2,702,181	1,968,971	2,221,418
Informasi dan Komunikasi	4,321,366	4,718,303	5,194,582	5,747,231	5,919,774
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,415,378	4,566,458	4,860,314	5,194,337	5,739,734
Real Estate	3,803,297	4,185,937	4,471,957	4,472,904	4,554,314
Jasa Perusahaan	102,183	119,188	133,152	130,021	139,571
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,924,536	9,552,854	9,880,643	9,921,539	10,217,899
Jasa Pendidikan	3,014,931	3,335,687	3,840,816	4,024,969	4,150,486
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,845,772	4,275,024	4,785,680	5,308,716	5,920,951
Jasa lainnya	1,719,995	2,009,044	2,483,063	2,290,527	2,388,042
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**110,120,589**	**119,543,612**	**130,201,361**	**132,299,414**	**142,600,020**
PDRB TANPA MIGAS	**100,359,552**	**109,840,402**	**119,285,474**	**131,880,568**	**142,219,960**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 18 Februari 2022.

Menurut harga berlaku tampak bahwa pertumbuhan PDRB mencapai 31,62 % dari tahun 2016 – 2020. Pada awal ahun 2020 sampai TW II telah terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi *COVID-19*.

Perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2020 hanya mencapai Rp132,29 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 88,126 triliun, ekonomi Sulawesi Utara tahun 2020 tumbuh negatif 0,99 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, sebagian besar lapangan usaha mengalami kontraksi, dengan kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar-25,96 persen.

Tabel 2.11
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB
atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 (Hb)

SEKTOR	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,53	20,95	20,82	21,51	21.08
Pertambangan dan Penggalian	4,84	4,96	5,07	5,43	5.42
Industri Pengolahan	9,36	9,15	8,72	9,56	10.49
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,09	0,09	0,10	0.10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,11	0,12	0.11
Konstruksi	11,47	11,78	11,80	11,33	11.77
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,09	12,14	12,75	13,06	13.09
Transportasi & Pergudangan	10,88	11,20	11,19	9,37	9.01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,22	2,19	2,08	1,49	1.56
Informasi dan Komunikasi	3,92	3,96	3,99	4,34	4.15
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,01	3,82	3,73	3,93	4.03
Real Estate	3,45	3,50	3,44	3,38	3.19
Jasa Perusahaan	0,09	0,10	0,10	0,10	0.10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,10	7,99	7,59	7,50	7.17
Jasa Pendidikan	2,74	2,79	2,94	3,04	2.91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,49	3,57	3,67	4,01	4.15
Jasa lainnya	1,56	1,68	1,91	1,73	1.67
PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020.

Kontribusi Sektor pertanian masih dominan membentuk PDRB Provinsi Sulawesi Utara, walaupun sudah terjadi penurunan baik untuk PDRB atas harga berlaku maupun PDRB atas harga konstan.

Tabel 2.12
Persentase Kontribusi PDRB Tahun 2017-2021
seluruh Kabupaten/Kota

KABUPATEN/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	5.95	6.03	6.15	6.31	6.25
Minahasa	13.21	13.16	13.10	13.11	12.98
Kepulauan Sangihe	3.34	3.28	3.25	3.30	3.35

KABUPATEN/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021
Kepulauan Talaud	1.75	1.71	1.69	1.70	1.69
Minahasa Selatan	6.69	6.63	6.58	6.60	6.68
Minahasa Utara	10.43	10.53	10.59	10.81	10.95
Bolaang Mongondow Utara	1.92	1.90	1.90	1.94	1.90
Kepulauan Sitaro	1.78	1.80	1.81	1.84	1.83
Minahasa Tenggara	3.98	3.93	3.91	3.92	3.92
Bolaang Mongondow Selatan	1.57	1.59	1.59	1.62	1.60
Bolaang Mongondow Timur	2.21	2.19	2.20	2.32	2.26
Kota Manado	28.35	28.54	28.62	27.54	27.56
Kota Bitung	12.83	12.65	12.48	12.85	13.02
Kota Tomohon	3.27	3.27	3.28	3.29	3.20
Kota Kotamobagu	2.72	2.78	2.83	2.85	2.81
TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022.

Data menunjukkan bahwa sektor yang kontribusinya meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum.

Jika dilihat menurut kontribusi kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, maka tampak bahwa Kota Manado memberi kontribusi terbesar sebagai ibu kota Provinsi, diikuti oleh Kabupaten Minahasa dan Kota Bitung. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi terkecil datang dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Tabel 2.13
Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2017-2021
atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	6.67	7.49	7.89	0.98	3.87
Minahasa	6.07	6.10	5.79	-1.03	3.53
Kepulauan Sangihe	5.45	5.50	5.42	0.45	5.99
Kepulauan Talaud	5.10	5.02	4.69	0.43	3.34
Minahasa Selatan	6.53	6.09	5.97	-0.77	4.91
Minahasa Utara	6.51	6.41	6.35	-0.55	5.96
Bolaang Mongondow Utara	6.28	6.18	6.17	0.71	3.46
Kepulauan Sitaro	6.99	6.73	6.65	1.03	4.43
Minahasa Tenggara	6.36	6.00	5.98	-0.64	4.29
Bolaang Mongondow Selatan	6.24	6.56	6.39	0.63	3.74
Bolaang Mongondow Timur	5.71	5.06	4.80	0.16	3.05
Kota Manado	6.74	6.65	6.05	-3.14	5.14
Kota Bitung	6.18	6.01	4.06	1.37	4.60
Kota Tomohon	8.84	6.12	6.76	-0.41	2.05
Kota Kotamobagu	6.79	6.66	6.13	0.20	4.20
Sulawesi Utara	6.31	6.00	5.65	-0.99	4.16

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022.

Jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota, maka jelaslah bahwa perlambatan pertumbuhan PDRB ataupun pertumbuhan ekonomi telah terjadi sejak tahun 2018. Tentunya, fenomena ini menjadi tantangan bagi daerah untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi agar tidak negatif di akhir tahun 2022.

a) Laju Inflasi

Rata-rata pertumbuhan inflasi dalam 5 tahun terakhir adalah 2,17%. Jika dilihat dari target RPJMD untuk pertumbuhan inflasi pada tahun 2021, yakni 5%, maka capaian yang ada menunjukkan bahwa status pencapaian inflasi di Provinsi Sulawesi Utara melampaui target.

Tabel 2.14
Nilai Inflasi Rata-rata Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2017-2021

PROVINSI	INFLASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2017	2018	2019	2020	2021	
	TAHUNAN	TAHUNAN	TAHUNAN	TAHUNAN	TAHUNAN	
Sulawesi Utara	2,44	3,83	3,52	-0,18	2,65	2,17

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022.

Dari sebelas kelompok pengeluaran di kota Manado, penurunan indeks terjadi pada kelompok transportasi sebesar -8,81 persen, kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar -1,12 persen dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar -0,4 persen.

Pada Tahun 2021 Kota Manado mengalami inflasi sebesar 2,65 persen karena adanya peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,76 pada Desember 2020 menjadi 108,56 pada Desember 2021.

Kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 7,58 persen, kelompok umum sebesar 2,65 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,63%, kelompok pendidikan sebesar 1,37%, kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,05%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,72%, kelompok transportasi sebesar 0,63%, perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,36% dan perumahan air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,17%. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan adalah kelompok kesehatan sebesar -0,33% dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,66%.

Grafik 2.5
Laju Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021
di Provinsi Sulawesi Utara

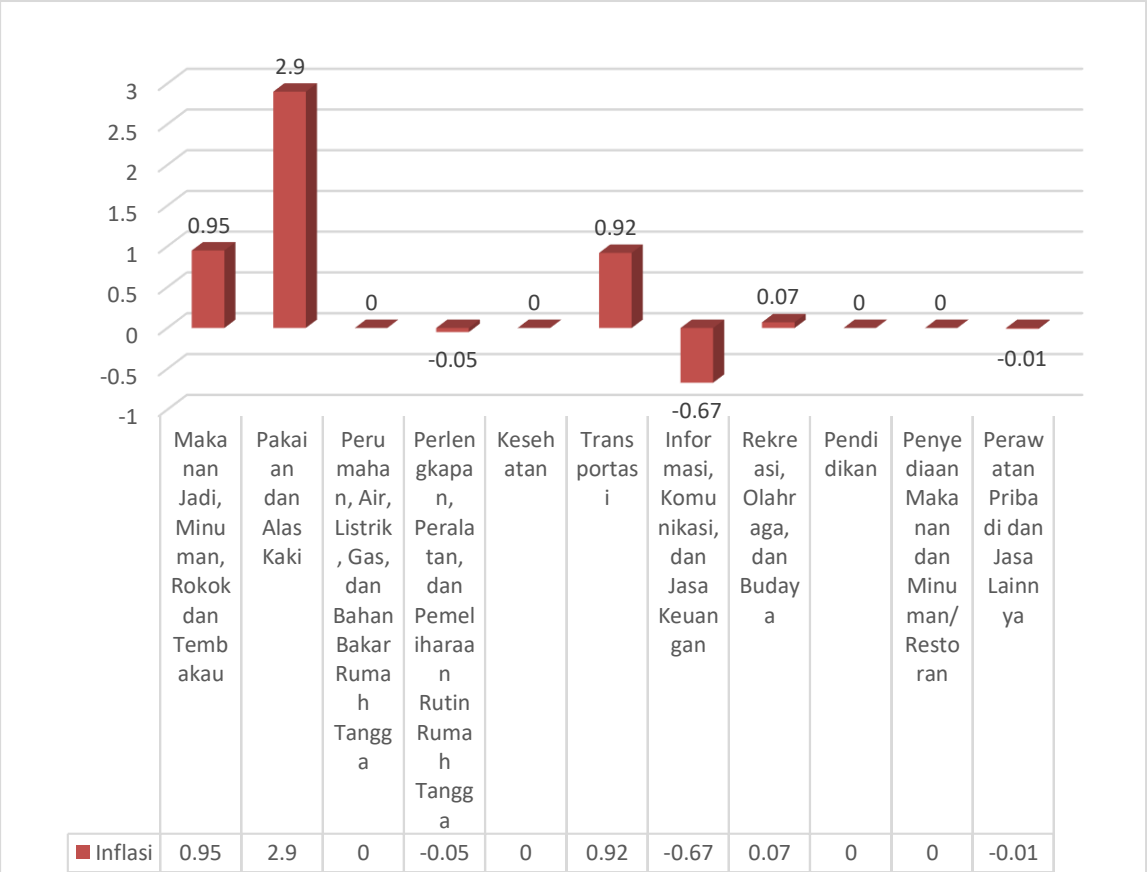

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022.

Jika dilihat dari kelompok pengeluaran maka ternyata laju pengeluaran terbesar yang menyumbang inflasi adalah kelompok pakaian dan alasa kaki, diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Interpretasi persentase AMH menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Perkembangan Angka Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	1,834,007	1,859,853	1,882,298	1,907,852	2,030,067
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	1,838,419	1,862,274	1,886,070	1,909,863	2,032,913
3	Angka Melek Huruf	99,76	99,87	99,80	99,84	99,86

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Tabel 2.16
Angka Melek Huruf Tahun 2020
menurut KabupatenProvinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	ANGKA MELEK HURUF LATIN
1	Bolaang Mongondow	99,79
2	Minahasa	100
3	Kepulauan Sangihe	99,19
4	Kepulauan Talaud	100
5	Minahasa Selatan	100
6	Minahasa Utara	99,85
7	Bolaang Mongondow Utara	99,08
8	Kepulauan Sitaro	99,70
9	Minahasa Tenggara	100
10	Bolaang Mongondow Selatan	99,32
11	Bolaang Mongondow Timur	99,50
12	Kota Manado	99,92
13	Kota Bitung	99,72
14	Kota Tomohon	99,85
15	Kota Kotamobagu	99,85
SULAWESI UTARA		**99,80**

Sumber: Dinas PendidikanProv. Sulut, 2022.

2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah (*mean years school*/MYS) mengombinasikan partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang

ditamatkan. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana tentang terpenuhinya kebutuhan penduduk akan akses pendidikan. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Angka ini dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.

RLS di Sulawesi Utara diperkirakan tumbuh 1,43 persen per tahun selama periode 2016 hungga 2021. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Sulawesi Utara yang lebih baik. Pada tahun 2021, secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai pendidikan selama 9,62 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP, bahkan menempuh pendidikan pada kelas X (SMA Kelas 1).

Tabel 2.17
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017-2021
Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bolaang Mongondow	7,38	7,59	7,77	7,93	8.03
2	Minahasa	9,55	9,56	9,58	9,59	9.73
3	Kepulauan Sangihe	7,89	7,90	8,04	8,29	8.34
4	Kepulauan Talaud	8,93	9,00	9,25	9,51	9.72
5	Minahasa Selatan	8,72	8,84	8,85	9,08	9.09
6	Minahasa Utara	9,32	9,61	9,93	9,99	10.00
7	Bolaang Mongondow Utara	7,86	8,11	8,12	8,40	8.41
8	Kepulauan Sitaro	8,56	8,57	8,75	8,97	9.03
9	Minahasa Tenggara	8,51	8,82	8,87	8,88	9.11
10	Bolaang Mongondow Selatan	7,72	7,73	7,80	7,90	8.15
11	Bolaang Mongondow Timur	7,53	7,57	7,59	7,83	7.93
12	Kota Manado	11,03	11,14	11,26	11,27	11.42
13	Kota Bitung	9;64	9,63	9,87	9,88	9.89
14	Kota Tomohon	10,24	10,25	10,48	10,73	10.74
15	Kota Kotamobagu	9,98	10,04	10,09	10,10	10.31
SULAWESI UTARA		**9,14**	**9,24**	**9,43**	**9,49**	9.62

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

3) Angka Harapan Lama Sekolah;

Sebagai salah satu indikator untuk mengukur dimensi pengetahuan dalam pengukuran IPM, Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan

akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang. Selama periode 2016-2021, indikator Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 0,61 persen per tahun. Meningkatnya HLS merupakan sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2021, HLS di Sulawesi Utara telah mencapai 12,94 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA.

Tabel 2.18
Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata lama Sekolah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021

KABUPATEN/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	11,16	11,30	11,41	11,52	11.53
Minahasa	13,94	13,96	13,97	13,98	14.15
Kepulauan Sangihe	11,90	12,04	12,31	12,32	12.47
Kepulauan Talaud	12,14	12,20	12,27	12,51	12.59
Minahasa Selatan	11,76	12,08	12,43	12,74	12.83
Minahasa Utara	12,45	12,65	12,69	12,80	12.92
Bolaang Mongondow Utara	11,87	11,88	11,90	11,91	12.17
Kepulauan Sitaro	11,32	11,51	11,64	11,67	11.86
Minahasa Tenggara	11,71	11,74	12,04	12,27	12.43
Bolaang Mongondow Selatan	12,22	12,23	12,28	12,29	12.30
Bolaang Mongondow Timur	11,47	11,48	11,50	11,59	11.86
Kota Manado	14,11	14,12	14,14	14,15	14.16
Kota Bitung	12,25	12,26	12,60	12,61	12.62
Kota Tomohon	14,16	14,17	14,19	14,20	14.21
Kota Kotamobagu	12,68	12,75	12,78	12,79	12.88
SULAWESI UTARA	**12,66**	**12,68**	**12,73**	**12,85**	**12.94**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

4) Pengeluaran Perkapita;

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh Pengeluaran Per Kapita per tahun (Harga Konstan 2012). Pada tahun 2021, rata-rata Pengeluaran Per Kapita masyarakat Sulawesi Utara mencapai Rp. 10.88 juta per tahun atau turun 91 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi *COVID-19* yang mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat.

Tabel 2.19
Pengeluaran Per Kapita Tahun 2017-2021
menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

KABUPATEN/KOTA	PENGELUARAN PERKAPITA DISESUAIKAN (RIBU RUPIAH)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	9,761	10,054	10,470	10,128	10,220
Minahasa	12,026	12,319	12,720	12,395	12,481
Kepulauan Sangihe	11,111	11,397	11,663	11,427	11,524
Kepulauan Talaud	8,268	8,525	8,638	8,505	8,558

KABUPATEN/KOTA	PENGELUARAN PERKAPITA DISESUAIKAN (RIBU RUPIAH)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Minahasa Selatan	11,162	11,410	11,760	11,481	11,554
Minahasa Utara	11,075	11,318	11,712	11,405	11,481
Bolaang Mongondow Utara	8,739	8,992	9,366	9,062	9,143
Kepulauan Sitaro	7,812	8,097	8,252	8,080	8,145
Minahasa Tenggara	10,105	10,354	10,665	10,408	10,479
Bolaang Mongondow Selatan	8,452	8,743	9,229	8,837	8,939
Bolaang Mongondow Timur	8,568	8,856	9,483	8,998	9,115
Kota Manado	13,477	13,814	14,232	13,886	13,991
Kota Bitung	11,895	12,168	12,383	12,193	12,271
Kota Tomohon	11,323	11,647	12,152	11,745	11,851
Kota Kotamobagu	10,366	10,663	11,098	10,744	10,848
SULAWESI UTARA	**10,422**	**10,731**	**11,115**	**10,791**	10,882

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

5) Indeks Pembangunan Manusia;

Dalam satu dekade, pembangunan manusia di Sulawesi Utara terus mengalami kemajuan. IPM Sulawesi Utara meningkat dari 68,31 pada tahun 2011 menjadi 73,30 pada tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Sulawesi Utara rata-rata tumbuh sebesar 0,71 persen per tahun dan meningkat dari level "sedang" menjadi "tinggi" sejak tahun 2015. Namun, pandemic COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Sulawesi Utara. IPM Sulawesi Utara tahun 2020 tercatat sebesar 72,93 atau mengalami penurunan 0,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, setelah satu tahun lebih pandemi COVID-19 melanda, IPM Sulawesi Utara mulai mengalami pertumbuhan kembali di tahun 2021. IPM Sulawesi Utara tahun 2021 mencapai 73,30 atau tumbuh 0,51 persen (meningkat 0,37 poin) dibandingkan capaian tahun 2020.

Grafik 2.6
Tren Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara Tahun 2010-2021

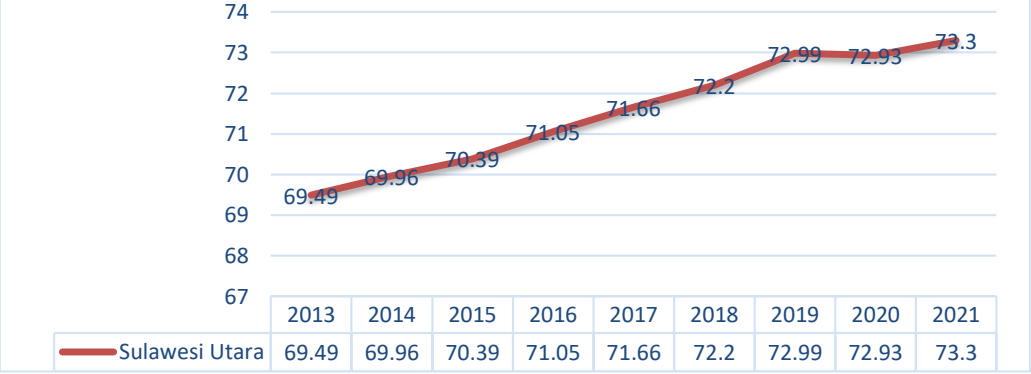

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Peningkatan IPM 2021 didukung oleh peningkatan di semua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan IPM yang disebabkan oleh menurunnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita telah mengalami kenaikan sebesar 0,84 persen dibandingkan tahun 2020.

Dari sisi pendidikan, pada tahun 2021 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,94 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,09 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,85 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,13 tahun, dari 9,49 tahun menjadi 9,62 tahun pada tahun 2021.

Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,76 tahun, lebih lama 0,07 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.20
Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara
menurut Komponen Tahun 2017-2021

KOMPONEN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup	Tahun	71,04	71,26	71.58	71.69	71.76
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,66	12,68	12.73	12.85	12.94
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,14	9,24	9.43	9.49	9.62
Pengeluaran Perkapita disesuaikan	Rp,	10,422	10,731	11,115	10,791	10,882
Indeks Pembangunan Manusia		71,66	72,2	72,99	72,93	73,3
PERTUMBUHAN IPM	**%**	**0,86**	**0,75**	**1,09**	**-0,08**	**0,51**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Seiring dengan meningkatnya IPM Sulawesi Utara, seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara mengalami peningkatan IPM. Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing kabupaten/kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Selata dengan nilai 65,42, sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Manado dengan nilai 79,20.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, UHH berkisar antara 64,49 tahun (Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) hingga 72,06 tahun (Kota Tomohon). Sementara itu pada dimensi pengetahuan, HLS penduduk usia 7 tahun ke atas berkisar antara 11,53 tahun (Kabupaten Bolaang Mongondow) hingga 14,21 tahun (Kota Tomohon) serta RLS

penduduk usia 25 tahun ke atas berkisar antara 7,93 tahun (Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) hingga 11,42 tahun (Kota Manado). Pengeluaran per kapita di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 8,14 juta rupiah per tahun (Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro) hingga 13,99 juta rupiah per tahun (Kota Manado).

Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang "tinggi" (70 ≤ IPM < 80) pada tahun 2021 adalah sebanyak 9, dengan status "sedang" (capaian 60 ≤ IPM <70) adalah 6, dan dengan status "rendah" (IPM < 60) sudah tidak ada lagi.

Tabel 2.21
Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara dan Kab/Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2017-2021

KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	66,08	66,91	67,82	67,89	68,16
Minahasa	74,59	74,97	75,47	75,29	75,73
Kepulauan Sangihe	69,14	69,67	70,53	70,73	71,07
Kepulauan Talaud	67,74	68,32	68,97	69,40	69,83
Minahasa Selatan	70,05	70,86	71,68	72,11	72,32
Minahasa Utara	72,2	73,05	73,95	73,90	74,11
Bolaang Mongondow Utara	65,6	66,32	66,91	66,99	67,39
Kepulauan Sitaro	66,03	66,75	67,48	67,64	68,05
Minahasa Tenggara	68,91	69,66	70,47	70,51	71,06
Bolaang Mongondow Selatan	64,05	64,49	65,28	65,00	65,42
Bolaang Mongondow Timur	64,73	65,21	68,08	65,99	66,55
Kota Manado	78,05	78,41	79,12	78,93	79,20
Bitung	72,94	73,27	74,20	74,10	74,20
Kota Tomohon	75,34	75,78	76,67	76,69	76,86
Kota Kotamobagu	72	72,55	73,22	72,97	73,47
SULAWESI UTARA	**71,66**	**72,2**	**72,99**	**72,93**	**73,30**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Gambar....
...pembangunan manusia menurut kabupaten/kota di Sulawesi ...2021

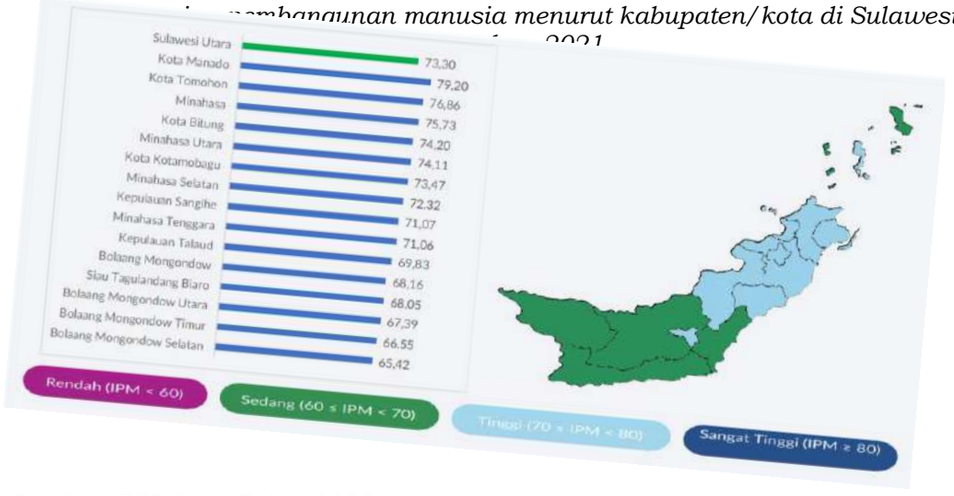

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

6) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APTS) didefonisikan sebagai proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam konteks ini, kelompok umur yang dirujuk adalah kelompok umur 16-18 tahun. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Tabel 2.22
Angka Putus Sekolah SMA/MA dan SMK Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2018-2021

Indikator	Angka Putus Sekolah SMA/MA Provinsi Sulawesi Utara			
	2018	2019	2020	2021
APTS SMA/MA	0.65%	0.66%	0.71%	0,18 %
APTS SMK	0,09%	0,09%	0,70%	0,32 %

Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut, 2022.

APTS SMA/MA Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 mengalami penurunan signifikan sebesar 0,53% dibandingkan baik dengan tahun 2020, hal serupa juga terjadi pada APTS SMK yang turun signifikan dari 0,70% di tahun 2020 menjadi 0,32% pada tahun 2021 atau turun sebesar 0,38%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara mampu menekan angka APTS SMA/MA dan SMK, yang berarti semakin rendah nilai APTS semakin baik kondisi pendidikan di Sulawesi utara.

7) Kemiskinan

Secara umum, pada periode 2014-2020, angka kemiskinan di Sulawesi Utara cenderung fluktuatif namun menunjukkan tren menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2019, kemudian mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2020 sampai awal tahun 2021, dan kembali menurun pada akhir tahun 2021. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2014 sampai dengan September 2021 disajikan pada gambar berikut :

Grafik 2.7
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Utara, Tahun 2014-2021

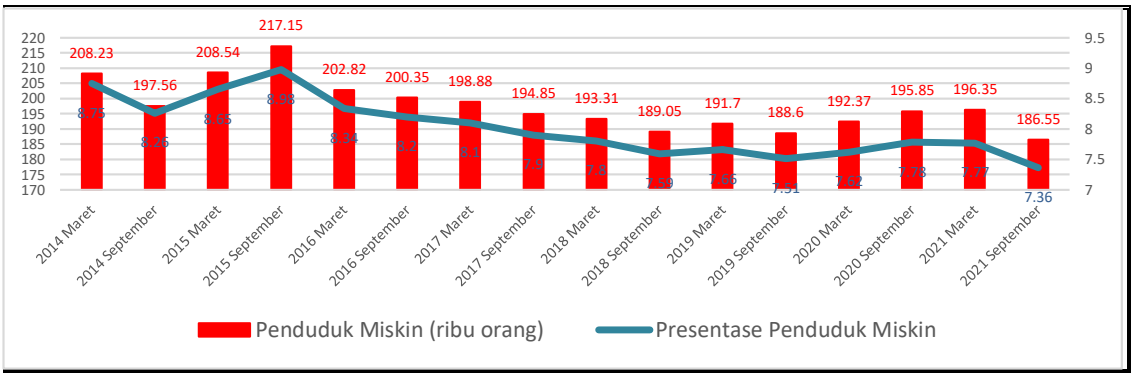

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

Selama periode Maret 2014 – September 2021, persentase penduduk miskin Sulawesi Utara selalu berada di bawah angka kemiskinan nasional, yaitu berada di kisaran 7,36-8,98. Persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada September 2015, sedangkan persentase terendah terjadi pada September 2019, yakni sebesar 7,36 persen.

Grafik 2.8
Persentase Penduduk Miskin
Sulawesi Utara dan Nasional, Tahun 2017-2021

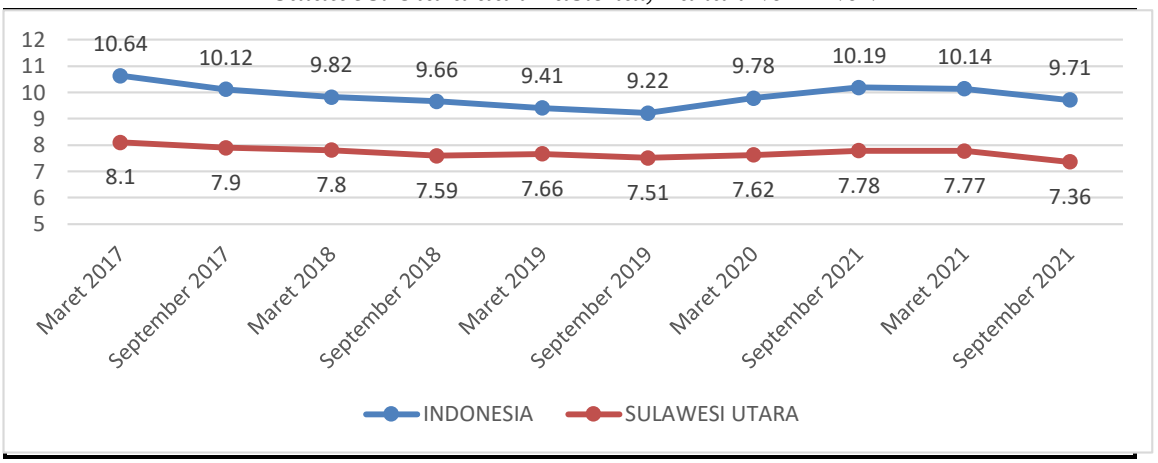

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Persentase penduduk miskin Sulawesi Utara dan nasional pada periode 2017-2021 memiliki pola yang hampir sama. Data jumlah penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sulawesi September 2021 menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Utara adalah yang terendah ketiga, yaitu sebesar 186,55 ribu jiwa, dimana angka ini menunjukkan ada penurunan sebesar 9,3 ribu jiwa dari jumlah di semester 2 tahun 2020.

Tabel 2.23
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Utara, Tahun 2020-2021

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah											
	Perkotaan				Perdesaan				Jumlah			
	2020		2021		2020		2021		2020		2021	
	Sem 1 (Maret)	Sem 2 (Sep)	Sem 1 (Maret)	Sem 2 (Sep)	Sem 1 (Maret)	Sem 2 (Sep)	Sem 1 (Maret)	Sem 2 (Sep)	Sem 1 (Maret)	Sem 2 (Sep)	Sem 1 (Maret)	Sem 2 (Sep)
SULAWESI UTARA	68.80	71.66	73.17	70.14	123.57	124.19	123.17	116.41	192.37	195.85	196.35	186.55
SULAWESI TENGAH	80.73	87.43	88.31	86.67	318.00	316.31	316.14	294.54	398.73	403.74	404.44	381.21
SULAWESI SELATAN	173.80	195.08	191.50	198.84	603.03	605.16	593.48	566.62	776.83	800.24	784.98	765.46
SULAWESI TENGGARA	76.93	73.22	75.05	71.02	224.89	244.10	243.65	252.25	301.82	317.32	318.70	323.26
GORONTALO	20.35	21.55	22.09	21.51	164.67	163.76	164.19	163.09	185.02	185.31	186.29	184.60
SULAWESI BARAT	31.67	28.13	27.82	27.72	120.34	130.91	129.37	138.27	152.02	159.05	157.19	165.99

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022

Tabel 2.24
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017-2021
Menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA (PERSEN)					
	2017	2018	2019	2020	2021 (Maret)	2021 (Sep)
Bolaang Mongondow	8,02	7,67	7,47	7.27	7.58	Data per Kab/Kota hanya dirilis pada bulan maret disetiap tahunnya
Minahasa	7,9	7,3	7,18	7.30	7.67	
Kepulauan Sangihe	11,8	11,82	11,15	11.14	11.02	
Kepulauan Talaud	9,77	9,5	9,86	9.49	9.00	
Minahasa Selatan	9,78	9,34	9,26	9.14	9.37	
Minahasa Utara	7,46	6,99	6,93	7.00	7.11	
Bolaang Mongondow Utara	8,89	8,64	8,45	8.41	8.03	
Kepulauan Sitaro	10,33	9,87	9,56	8.94	8.94	
Minahasa Tenggara	14,08	13,29	12,78	12.30	12.47	
Bolaang Mongondow Selatan	14,16	13,6	13,27	12.77	12.85	
Bolaang Mongondow Timur	6,2	6,03	6,10	5.88	6.10	
Kota Manado	5,46	5,38	5,51	5.86	6.19	
Kota Bitung	6,62	6,67	6,49	6.41	6.43	
Kota Tomohon	6,47	5,95	5,62	5.60	5.69	
Kota Kotamobagu	5,9	5,96	5,71	5.42	5.74	
SULAWESI UTARA	**8,1**	**7,8**	**7,66**	**7.62**	**7.77**	**7,36**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

Dilihat dari daerah tempat tinggal, pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di hampir semua wilayah Kabupaten/Kota rata-rata mengalami kenaikan, dimana hanya di 3 Kabupaten saja yang mengalami penurunan.

Tabel 2.25
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2017-2021
menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA (RIBU JIWA)					
	2017	2018	2019	2020	2021 (Maret)	2021 (Sept)
Bolaang Mongondow	19,05	18,49	18,30	18,07	19.08	Data per Kab/Kota hanya dirilis pada bulan maret disetiap tahunnya
Minahasa	26,34	24,49	24,32	24,95	26.30	
Kepulauan Sangihe	15,38	15,46	14,62	14,64	14.55	
Kepulauan Talaud	8,84	8,68	9,10	8,84	8.37	
Minahasa Selatan	20,26	19,54	19,49	19,38	19.77	
Minahasa Utara	14,93	14,13	14,09	14,33	14.49	
Bolaang Mongondow Utara	6,95	6,84	6,77	6,82	6.53	
Kepulauan Sitaro	6,81	6,53	6,35	5,95	6.00	
Minahasa Tenggara	15,57	14,73	14,22	13,73	13.31	
Bolaang Mongondow Selatan	9,05	8,82	8,74	8,53	8.63	
Bolaang Mongondow Timur	4,37	4,29	4,41	4,30	4.47	
Kota Manado	23,39	23,21	23,89	25,55	26.78	
Bitung	14	14,34	14,10	14,18	14.33	
Kota Tomohon	6,69	6,25	5,99	6,06	6.18	
Kota Kotamobagu	7,28	7,49	7,31	7,06	7.56	
SULAWESI UTARA	**198,88**	**193,31**	**191,70**	**192,37**	**196.35**	**186,55**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

Dimensi kemiskinan lainnya yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman dan indeks keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan menggambarkan ketimpangan ratarata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Selama periode Maret 2020 – September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Utara mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2020 adalah 1,143 dan pada September 2020 naik menjadi 1,228.

Kemudian, Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode yang sama juga mengalami peningkatan dari 0,248 menjadi 0,300 (Tabel 5). Sementara itu, untuk periode September 2019 – September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.26
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Sulawesi Utara menurut Daerah Tempat Tinggal, September 2020 – September 2021

	2020		2021	
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)				
Perkotaan	0.78	0.90	0.80	0.73
Perdesaan	1.54	1.60	1.76	1.42
Total	1.14	1.23	1.24	1.04
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)				
Perkotaan	0.15	0.20	0.17	0.16
Perdesaan	0.35	0.42	0.42	0.28
Total	0.25	0.30	0.29	0.22

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

Selama periode Maret 2020 – September 2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) baik di perdesaan maupun di perkotaan mengalami peningkatan. Hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan dan di perdesaan cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin makin besar.

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai P1 dan P2 di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2020, nilai P1 untuk daerah perdesaan hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan P1 daerah perkotaan.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2019 –September 2020 antara lain adalah:

1) Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Ekonomi Sulawesi Utara Triwulan III-2020 terhadap Triwulan III-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,83 persen (*y-on-y*). Angka ini jauh menurun dibandingkan dengan Triwulan III-2019 yang tumbuh sebesar 5,20 persen (*y-on-y*).
2) Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB terkontraksi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Triwulan III-2020 terkontraksi sebesar 1,09 persen (*y-on-y*), menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 7,27 persen.
3) Laju Inflasi Umum Relatif Rendah. Selama periode Maret 2020-September 2020, angka inflasi umum tercatat sebesar 0,02 perse.,
4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami kenaikan. Pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,37 persen. Terjadi kenaikan sebesar 1,36 persen poin dibandingkan Agustus 2019 yang berada di level 6,01 persen.

5) Sebanyak 287,637 (14,89 persen) penduduk usia kerja terdampak *COVID-19* pada Agustus 2020 dengan rincian:
   a) 24,919 penduduk menjadi Pengangguran
   b) 10,614 penduduk menjadi Bukan Angkatan Kerja
   c) 17,280 penduduk menjadi Sementara Tidak Bekerja
   d) 234,824 penduduk Bekerja dengan Pengurangan Jam Kerja

Adapun Amanat Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 53 Tahun 2020, tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Daerah, menegaskan bahwa Penanggulangan Kemiskinan harus dilakukan secara sistematis, terencana dan sinergis antar tingkatan pemerintah, mulai dari pusat hingga pemerintah daerah serta lintas sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi.

8) Gini Rasio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio di Provinsi Sulawesi Utara berfluktuasi dari waktu ke waktu. Gini Ratio pada Tahun 2017 tercatat sebesar 0,390 dan mengalami fluktuasi hingga Tahun 2021 yang tercatat kembali ke posisi 0,365. *Gini Ratio* Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,02 poin dibandingkan Gini Ratio Tahun 2020.

Grafik 2.9
Perkembangan Gini Rasio Tahun 2017 s/d 2021 di Provinsi Sulawesi Utara

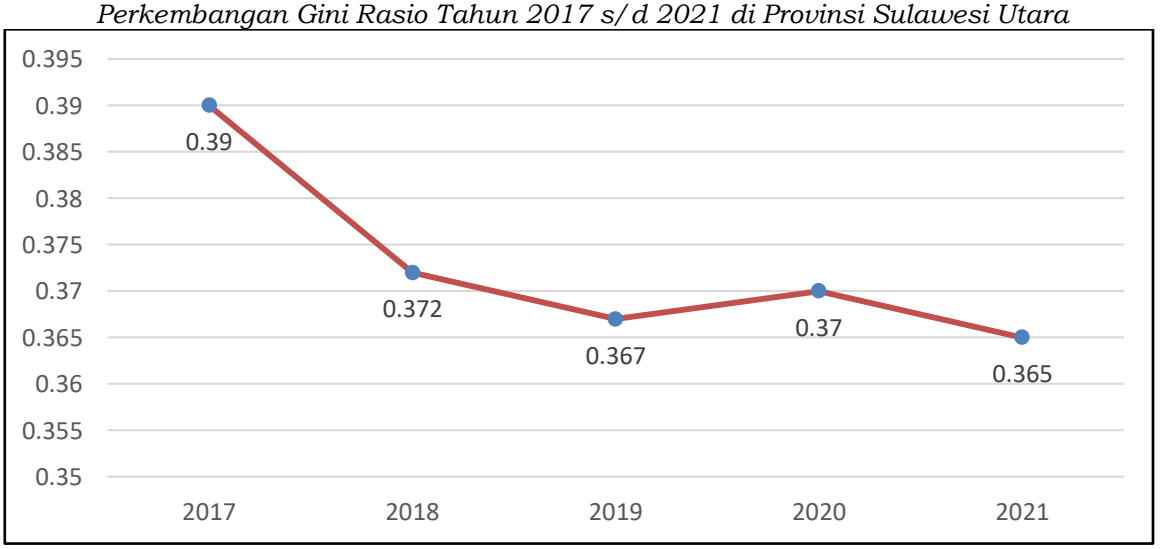

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2021, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,55 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan Maret 2021 yang sebesar 18,09 persen dan menurun dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar 19,11 persen. Jika dibedakan menurut daerah, pada September 2021 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 18,55 persen. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 19,45 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan perdesaan termasuk ketimpangan rendah.

Tabel 2.27
Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Sulawesi Utara, September 2020, Maret 2021, dan September 2021 (Persentase)

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
September 2020	19,28	35,50	45,22	100
Maret 2021	18,11	38,46	43,43	100
September 2021	18,55	37,71	43,74	100
Perdesaan				
September 2020	20,52	35,68	43,80	100
Maret 2021	18,71	38,75	42,53	100
September 2021	19,45	37,72	42,82	100
Perkotaan+Perdesaan				
September 2020	19,11	35,65	45,24	100
Maret 2021	18,09	38,26	43,65	100
September 2021	18,55	37,78	43,66	100

Pada September 2020, ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi

Barat berada pada ketimpangan rendah (distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah berada di atas 17 persen). Sementara ketimpangan di Provinsi Gorontalo masuk dalam kategori ketimpangan sedang (distribusipengeluaran kelompok 40 persen terbawah berada pada rentang 12 – 17 persen).

Tabel 2.28
Gini Ratio dan Distribusi Pengeluaran Per Kapita Wilayah Sulawesi
September 2020 (Persentase)

Provinsi	Gini Ratio			Distribusi Pengeluaran Perkapita		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan	40 Persen Terbawah	40 Persen Menengah	20 Persen Teratas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	0,367	0,436	0,368	19,11	35,65	45,24
Sulawesi Tengah	0,334	0,295	0,321	20,92	37,92	41,16
Sulawesi Selatan	0,384	0,352	0,382	17,95	36,18	45,87
Sulawesi Tenggara	0,403	0,348	0,388	17,19	36,67	46,14
Gorontalo	0,390	0,391	0,406	16,47	35,22	48,31
Sulawesi Barat	0,437	0,321	0,356	19,80	35,95	44,25

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Budaya masyarakat Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang terdiri dari: Suku Minahasa, Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Bolaang, dan Suku Mongondow. Masing-masing kelompok etnis tersebut masih terbagi pula dalam subetnis yang memiliki bahasa daerah, tradisi, dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat semangat Mapalus, Mapaluse, dan Moposad. Dilihat dari unsur budaya bahasa, maka Sulawesi Utara memiliki tiga kelompok bahasa daerah yaitu:

a) Bahasa Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, dan Bantik;
b) Bahasa Sangir Besar, Siau, dan Talaud;
c) Bahasa Boroko, Bolangitang, Bolaang, Mongondow, Bintauna, Kaidipang, Bolango, dan Bantik Mongondow.

Namun demikian, Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh penduduk Sulawesi Utara. Seni Budaya di Sulawesi Utara cukup berkembang yang tersebar di masyarakat luas. Hal ini dikembangkan melalui program menggali, menginventarisasi keunggulan, dan keragaman seni budaya yang dikemas dalam pelaksanaan festival seni budaya berskala nasional dan internasional. Tabel berikut ini adalah indikator Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2017 s/d 2021 di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.29
Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2017-2020
Provinsi Sulawesi Utara(cek data evaluasi Renja)

NO	CAPAIAN PEMBANGUNAN	2017	2018	2019	2020
1	Grup Seni Musik Aktif	50	60	70	70
2	Grup Seni Tari Aktif	20	20	30	30
3	Jumlah teater/sastra Aktif	25	30	35	35
4	Gedung Kesenian	2	3	3	3
5	Apresiasi terhadap maestro ditiap cabang seni	5	5	6	6
6	Seniman Lokal	3	5	7	7
7	Warisan Takbenda	3	3	9	9
8	Apreasiasi terhadap pelaku warisan takbenda	3	6	9	9
9	Pendataan koleksi museum sulut	20	20	30	30

Adapun keterkaitan antara seni budaya dan olahraga disajikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pelayanan kepemudaan mencakup usaha penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

Considerans c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan pentingnya keolahragaan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Justru karena pertimbangan akan pentingnya keolahragaan tersebut dalam keseluruhan pembangunan nasional dan pengembangan manusia Indonesia, considerans d menegaskan penjaminan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestai, dan amanajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Hal tersebut perlu diatur dalam sebuah sistem keolahragaan nasional.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mendefinisikan "Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan." Sedangkan, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa "Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa."

Mengingat pentingnya keolahragaan dalam pembangunan manusia Indonesia, Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa "Setiap

warga negara mempunyai hak yang sama untuk: a.melakukan kegiatan olahraga; b.memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga; c.memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; d.memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan; e.menjadi pelaku olahraga; dan f.mengembangkan industri olahraga."

Pemerintah daerah mempunyai tugas dalam melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Kebijakan nasional yang harus dilakukan pemerinta daerah di daerah ditetapkan di Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang meliputi: a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; b. pembinaan dan pengembangan olahraga; c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga; d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; e. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional; f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; g. pendanaan keolahragaan; h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan; k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga; l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi; m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping; n. pemberian pemberian penghargaan; o. pelaksanaan pengawasan; dan p. evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Urusan Layanan Wajib

1) Pendidikan

a) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket C) turut diperhitungkan. Indikator ini digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas Pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100, Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Dalam hal ini, APS Provinsi menggambarkan peluang pada pendidikan menengah (kelompok umur 16-18 tahun). Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2017 s/d 2021 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C
Tahun 2017-2020 Provinsi Sulawesi Utara

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2017	2018	2019	2020
1	APS SMA/SMK/MA/Paket C	73,04	73,67	74,04	74,12

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

b) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10,000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Di samping itu juga rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SMA Sederajat Tahun 2017 s/d 2021 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SMA Sederajat
Tahun 2017-2021 Provinsi Sulawesi Utara

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	SMA Sederajat					
1,1,	Jumlah gedung sekolah	417	342	342	423	468
1,2,	Jumlah penduduk kelompok usia16-18 tahun	121,464	122,192	122,838	123,433	111,850
1,3,	**Rasio**	**1:291**	**1:357**	**1:359**	**1:292**	1:239

Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut, 2022.

Tabel 2.32
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2021
SMA Sederajat menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	SMA SEDERAJAT		
		JUMLAH GEDUNG SEKOLAH	JUMLAH PENDUDUK USIA 16-18 TH	RASIO
1	Bolaang Mongondow	39	**2.547**	**1:65**
2	Minahasa	54	**5.480**	**1:101**
3	Kepulauan Sangihe	32	**1.561**	**1:48**
4	Kepulauan Talaud	29	**2.088**	**1:72**
5	Minahasa Selatan	37	**3.501**	**1:94**
6	Minahasa Utara	42	**3.340**	**1:79**
7	Bolaang Mongondow Utara	11	**1.518**	**1:138**
8	Kepulauan Sitaro	11	**1.153**	**1:104**
9	Minahasa Tenggara	21	**2.178**	**1:103**

NO	KABUPATEN/KOTA	SMA SEDERAJAT		
		JUMLAH GEDUNG SEKOLAH	JUMLAH PENDUDUK USIA 16-18 TH	RASIO
10	Bolaang Mongondow Selatan	13	900	1:69
11	Bolaang Mongondow Timur	16	725	1:45
12	Kota Manado	91	8.787	1:96
13	Kota Bitung	31	2.873	1:92
14	Kota Tomohon	18	2.403	1:133
15	Kota Kotamobagu	16	2.780	1:173
	SULAWESI UTARA	**461**	**41.834**	**1:90**

Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut, 2022.

c) Rasio Guru/Murid

Rasio guru dan murid pendidikan menengah menunjuk pada perbandingan jumlah murid dan jumlah guru sekolah pada tingkat pendidikan menengah. Perbandingan ini menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar dan mengindikasikan mutu pengajaran di kelas. Interpretasi terhadap nilai rasio ini adalah semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Di bawah ini, disajikan tabel rasio guru dan murid pada jenjang SMA Sederajat di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.33
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SMA Sederajat
Tahun 2017-2021 Provinsi Sulawesi Utara

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2017	2018	2019	2020	2021
1,	SMA Sederajat					
1,1,	Jumlah Guru	4,345	5,500	5,125	8,395	9,747
1,2,	Jumlah Murid	63,969	69,672	71,730	111,906	122,816
1,3,	**Rasio**	**1:15**	**1:13**	**1:14**	**1:13**	**1:13**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

Tabel 2.34
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SMA Sederajat Tahun 2021
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	SMA SEDERAJAT		
		JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	RASIO
1	Bolaang Mongondow	647	7725	1:11,9
2	Minahasa	1150	13426	1:11,7
3	Kepulauan Sangihe	564	4631	1:8,2
4	Kepulauan Talaud	644	3898	1:6,1
5	Minahasa Selatan	831	9905	1:11,9
6	Minahasa Utara	633	9415	1:14,9
7	Bolaang Mongondow Utara	293	3647	1:12,4

NO	KABUPATEN/KOTA	SMA SEDERAJAT		
		JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	RASIO
8	Kepulauan Sitaro	249	2759	1:11,1
9	Minahasa Tenggara	454	5543	1:12,2
10	Bolaang Mongondow Selatan	233	2730	1:11,7
11	Bolaang Mongondow Timur	288	2916	1:10,1
12	Kota Manado	1857	26996	1:14,5
13	Kota Bitung	692	11547	1:16,7
14	Kota Tomohon	471	7004	1:14,9
15	Kota Kotamobagu	741	10674	1:14,4
	SULAWESI UTARA	**9747**	**122,816**	**1:13**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

d) Angka Partisipasi Murni SMA Sederajat

Angka partisipasi murni (APM) merujuk pada proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuain. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket C) turut diperhitungkan. Tujuan dan kegunaan dari pengukuran ini adalah untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2017 s/d 2021 di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
Tahun 2017-2022 Provinsi Sulawesi Utara

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	APM SMA/SMK/MA/Paket C	62,81	62,80	62,98	63,38	63,33

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

e) Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengacu pada perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket C) turut diperhitungkan. Pemerintah daerah perlu mengukur indikator

ini karena indikator ini berguna untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada tingkat pendidikan menengah. APK juga berguna untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK juga dapat digunakan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2017 s/d 2021 Di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada table berikut.

Tabel 2.36
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C
Tahun 2017 s/d 2021 Provinsi Sulawesi Utara

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	APK SMA/SMK/MA/Paket C	91,73	82,25	86,60	69,23	86,17

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022 .

2) Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan oleh semua komponen masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan handal dengan memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

Pembangunan kesehatan dilakukan dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan. Kondisi dan capaian pembangunan kesehatan di Sulawesi Utara tahun 2016-2020 diantaranya disajikan sebagai berikut:

a) Pandemi *COVID-19*

Pandemi *COVID-19* yang terjadi di Indonesia dikategorikan sebagai bencana non alam karena wabah penyakit sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kejadian pandemic *COVID-19* di Sulawesi Utara memiliki dampak sangat luas di berbagai sector (multi sektor) mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Data Kasus *COVID-19* per 31 Desember 2021 di Sulawesi utara mencapai 34.700 kasus positif, dengan rincian 56 jiwa kasus aktif,

33.600 jiwa kasus sembuh dan 1.044 jiwa kasus meninggal dunia. Kondisi Epidemiologi *COVID-19* per 31 Desember 2021 di Sulawesi Utara dapat dilihat pada gambar berikut dibawah.

Gambar 2.4

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut, 2022

b) Vaksinasi

Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Covid-19. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Sejak pertengahan Januari 2021 silam, Satgas Covid-19 Provinsi Sulut terus menggenjot program vaksinasi dengan sasaran Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), pelayan publik serta warga lanjut usia atau lansia.

Kondisi Per-tanggal 31 Desember 2021 total suntikan yang sudah diberikan dari dosis 1 sampai dengan dosis ke 2 dan dosis 3 di sulawesi utara telah mencapai 2.569.195 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Vaksinasi dosis 1 telah mencapai 1.580.564 jiwa
- Vaksinasi dosis 2 telah mencapai 972.340 jiwa
- Vaksinasi dosis 3 telah mencapai 16.291 jiwa

Tabel 2.37
Update Vaksinasi COVID-19 (Per tanggal 31 Desember 2021)

Kabupaten / Kota	Progress Capaian Jumlah Dosis Harian							
	25/12/21	26/12/21	27/12/21	28/12/21	29/12/21	30/12/21	31/12/21	Grafik Tren
Kab. Bolmong	694	82	1.078	1.016	1.153	890	638	
Kab. Bolsel	484	79	563	571	573	531	229	
Kab. Boltim	127	49	183	288	349	547	250	
Kab. Bolmut	368	79	175	233	343	622	553	
Kab. Sitaro	247	24	36	226	338	277	416	
Kab. Sangihe	88	1	136	183	376	309	(69)	
Kab. Talaud	189	81	32	90	182	412	223	
Kab. Minahasa	232	1	435	537	1.754	1.854	1.908	
Kab. Minsel	227	56	264	255	790	345	165	
Kab. Mitra	22	-	93	123	783	160	110	
Kab. Minut	488	24	1.302	(431)	1.240	826	376	
Kota Bitung	99	-	584	1.185	1.820	1.376	391	
Kota Kotamobagu	232	3	314	820	893	830	407	
Kota Manado	805	6	408	1.187	1.558	1.034	441	
Kota Tomohon	48	-	29	218	730	668	82	
SULUT	4.350	485	5.632	6.501	12.882	10.681	6.120	

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut, 2021

c) Tenaga Kesehatan

Penyelenggaraan pembangunan di sektor kesehatan membutuhkan dukungan sumber daya yang berkompeten di bidangnya. Jumlah tenaga medis yang minim dan penempatan yang tidak merata di seluruh wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan kesehatan. Selain itu, kualitas dan kompetensi para tenaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk ditingkatkan.

Jumlah tenaga Kesehatan menurut Kabupaten/Kota tahun 2017 sampai 2021 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.38
Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2017-2021
menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KESEHATAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Bolaang Mongondow	402	463	488	673	783
2	Minahasa	704	822	716	1270	1409
3	Kepulauan Sangihe	505	780	762	846	872

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KESEHATAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	Kepulauan Talaud	408	419	448	695	752
5	Minahasa Selatan	503	580	728	828	828
6	Minahasa Utara	481	493	642	1028	1144
7	Bolaang Mongondow Utara	500	367	543	703	766
8	Kepulauan Sitaro	301	262	465	464	538
9	Minahasa Tenggara	331	260	342	546	609
10	Bolaang Mongondow Selatan	211	298	445	561	566
11	Bolaang Mongondow Timur	229	196	268	413	325
12	Kota Manado	3449	2604	2241	3859	4999
13	Kota Bitung	640	682	638	940	973
14	Kota Tomohon	694	692	696	950	953
15	Kota Kotamobagu	459	457	762	996	960
SULAWESI UTARA		**9817**	**9375**	**10184**	**14772**	**16477**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

d) Fasilitas Kesehatan

Pada hakikatnya, pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi seluruh rakyat agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Adalah relevan bila perbaikan derajat kesehatan masyarakat tersebut dibarengi pula dengan ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit umum (RSU) dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Sulawesi Utara diantaranya rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, posyandu, klinik/balai kesehatan dan polindes. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan Sulawesi Utara dibantu oleh 14 ribuan tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, ahli teknologi laboratorium medik. Jumlah fasilitas Kesehatan tahun 2017 sampai 2021 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.39
Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2017 s/d 2021
di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	FASILITAS KESEHATAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rumah Sakit	60	43	48	51	54
2	Rumah Bersalin	63	7	9	9	9
3	Puskesmas	192	193	195	195	196
4	Posyandu	2231	2302	2302	2302	2287
5	Klinik / Balai Kesehatan	15	58	58	58	66
6	Polindes	40	39	39	39	39
SULAWESI UTARA		**2601**	**2642**	**2410**	**2413**	

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022

e) Prevalensi Stunting

Stunting dalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Berdasarkan hasil Riskesdas pada tahun 2018, proporsi balita *stunting* di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 25,46%, di mana terdapat 4 kabupaten yang menjadi perhatian di tahun 2019 dan tahun 2020, karena menunjukkan baik peningkatan maupun penurunan proporsi yang signifikan. Prevalensi *stunting* di Kabupaten Minahasa Utara terus meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2018 mencapai angka 35,44% atau menjadi yang tertinggi prevalensinya. Prevalensi *stunting* di Kabupaten Bolmong Selatan turun signifikan dari angka 51,30% di tahun 2017 menjadi 33,27% di tahun 2018 namun masih menjadi tertinggi ke-2. Kabupaten Bolaang Mongondow berhasil menurunkan prevalensi *stunting* dari tahun 2017 dengan proporsi 35,80% menjadi 28,60% di tahun 2018. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara konsisten terus menurunkan prevalensi stunting dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2018 (22,24%) hingga tahun 2020 pada angka 5,02%.

Pada tahun 2021 kementerian kesehatan mengeluarkan hasil Survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) secara nasional, dimana angka yang di rilis prevalensi stunting menunjukan peningkatan yang signifikan di sulawesi utara yakni sebesar 21,6%, hal tersebut menunjukan kontradiksi dengan rilisan kementerian kesehatan sebelumnya yakni melalui survei Riset Kesahatan Dasar Tahun 2018 dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), dimana terjadi penurunan yang signifikan di sulawesi utara yakni dari angka 31,4% di tahun 2018 menjadi 21,18% pada tahun 2020. Perbandingan Rilisan SSGBI dan SSGI tersebut menunjukan gap yang cukup besar.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi menyajikan data pembanding melalui hasil Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan

Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), dimana aplikasi tersebut merupakan rekaman data individu secara langsung dilapangan dari setiap posyandu di sulawesi utara yang kemudian diolah menjadi hasil status gizi yang lebih akurat karena dapat disajikan by name by address. Dari hasil pelaporan masing-masing puskemas ke dinas kesehatan provinsi tersebut menunjukan angka prevalensi stunting di sulawesi utara tahun 2021 sebesar 3,10%, dimana angka tersebut merupakan hasil pengukuran dari 77,55% balita yang telah dientri. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri pemerintah sulawesi utara dimana hasil pengukuran balita belum 100% terukur dari total jumlah balita yang terdata. Namun demikian angka prevalensi yang muncul tersebut cukup menggambarkan kondisi senyatanya dilapangan. Prevalensi Stunting Tahun 2018 s/d 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Prevalensi Stunting Tahun 2018-2021
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	PREVALENSI STUNTING				
		2018 (Riskesdas)	2019 (Riskesdas)	2020 (SSGBI)	2021 (SSGI	2021 (E-PPGBM)
1	Bolaang Mongondow	28,6	16,71	5,03	26,6	2,17
2	Minahasa	20,12		3,11	17,5	1,58
3	Kepulauan Sangihe	22,99		13,31	21,1	8,08
4	Kepulauan Talaud	23,59		11,10	25,8	1,88
5	Minahasa Selatan	26,12		2,34	24,2	2,32
6	Minahasa Utara	35,44	16,6	4,50	19,1	2,90
7	Bolaang Mongondow Utara	22,24	13,68	5,02	26,4	1,60
8	Kepulauan Sitaro	19,45		3,03	22,5	1,06
9	Minahasa Tenggara	27,97		8,18	25,5	2,25
10	Bolaang Mongondow Selatan	33,27	6,34	14,78	37,4	6,39
11	Bolaang Mongondow Timur	26,28		6,51	24,4	8,55
12	Kota Manado	19,8		6,32	23,8	1,41
13	Kota Bitung	29,97		4,16	22,1	2,55
14	Kota Tomohon	19,22		1,28	18,3	0,34
15	Kota Kotamobagu	29,03		5,16	25,1	2,61
SULAWESI UTARA		**31,4**	**25,46**	**21,18**	**21,6**	**3,10**

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov, Sulut Tahun 2021

f) Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Sedangkan, yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam

kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll. Perkembangan AKB dan AKI tahun 2018 s/d 2021 di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Perkembangan AKB dan AKI Tahun 2018-2021
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kematian Bayi	215	250	168	200
2	Jumlah Kematian Ibu	58	51	57	64

Sumber: Dinkesda Prov, Sulut, 2022

g) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka Harapan Hidup (AHH) Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2021 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021

Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Tahun)									
	Laki-laki					Perempuan				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
SULAWESI UTARA	**69.11**	**69.33**	**69.71**	**69.82**	**69.89**	**73.01**	**73.23**	**73.55**	**73.67**	**73.72**
Bolaang Mongondow	66.58	66.83	67.18	67.33	67.43	70.54	70.79	71.15	71.29	71.35
Minahasa	68.44	68.65	68.97	69.09	69.15	72.37	72.58	72.88	72.98	73.04
Kepulauan Sangihe	67.32	67.57	67.93	68.09	68.15	71.27	71.52	71.87	72.01	72.07
Kepulauan Talaud	67.45	67.68	68.01	68.14	68.22	71.40	71.63	71.95	72.07	72.12
Minahasa Selatan	67.21	67.45	67.77	67.88	67.95	71.16	71.39	71.71	71.84	71.92
Minahasa Utara	68.84	69.01	69.31	69.40	69.44	72.76	72.94	73.20	73.27	73.27
Bolaang Mongondow Utara	64.96	65.18	65.51	65.63	65.70	68.88	69.12	69.45	69.59	69.66

Siau Tagulandang Biaro	67.82	68.11	68.52	68.72	68.87	71.76	72.05	72.45	72.64	72.76
Minahasa Tenggara	67.55	67.74	68.04	68.13	68.18	71.50	71.70	71.98	72.06	72.09
Bolaang Mongondow Selatan	62.13	62.29	62.48	62.58	62.67	65.88	66.04	66.30	66.35	66.35
Bolaang Mongondow Timur	65.35	65.53	65.77	65.80	65.83	69.23	69.43	69.73	69.83	69.87
Kota Manado	69.34	69.53	69.81	69.89	69.92	73.23	73.41	73.68	73.75	73.76
Kota Bitung	68.52	68.71	68.99	69.07	69.10	72.45	72.63	72.90	72.97	72.98
Kota Tomohon	69.18	69.43	69.80	69.96	70.07	73.08	73.33	73.67	73.80	73.90
Kota Kotamobagu	67.69	67.93	68.30	68.47	68.59	71.58	71.84	72.24	72.38	72.48
INDONESIA	**69.16**	**69.30**	**69.44**	**69.59**	**69.67**	**73.06**	**73.19**	**73.33**	**73.46**	**73.55**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022

3) Pekerjaan Umum

a) Air Minum

Evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, seperti yang diuraikan dalam Permen PUPR 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi:

1. Capaian kinerja pelayanan air minum kabupaten/kota, dalam laporan ini terdiri atas persentase rumah tangga berakses air minum dan persentase rumah tangga memiliki akses berkelanjutan untuk air minum.
2. Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota (SPAM Regional Provinsi) yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dengan lingkup pengelolaan meliputi Unit Air Baku, Unit Produksi dan Unit Distribusi sampai ke *reservoir off take* (lokasi pembacaan pemakaian air curah).

Berikut ini capaian kinerja pelayanan air minum di Provinsi Sulawesi Utara dalam rentang waktu tahun 2016 – 2019.

1) Persentase rumah tangga berakses air minum

Indikator persentase rumah tangga berakses air minum dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 merupakan salah satu indikator dalam Aspek Pelayanan Umum pada Layanan Urusan Wajib Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan data BPS tahun 2017 – 2021, secara umum persentase akses air minum layak di Sulawesi Utara pada tahun 2021 telah mencapai 91,45 persen, dimana seluruh kabupaten/kota menunjukkan kinerja baik di mana terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum. Berdasarkan evaluasi terhadap tahun n-1, peningkatan terbesar pada tahun 2020-2021 terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Daerah dengan tingkat persentase cakupan akses air minum tertinggi di tahun 2021 adalah

Kota Kotamobagu dengan angka 98,06 persen, sedangkan daerah dengan tingkat persentase terendah adalah 79,62 persen. Secara rinci perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum menurut kabupaten/kota dalam setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 2.10
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 – 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Tabel 2.43
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum menurut Kabupaten-Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017–2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	54.40	57.93	78.83	87.57	88.23
Minahasa	70.22	72.62	90.96	90.33	88.01
Kepulauan Sangihe	65.14	78.76	87.83	85.66	90.51
Kepulauan Talaud	57.43	71.27	83.39	71.53	84.61
Minahasa Selatan	66.61	66.92	94.38	90.50	90.78
Minahasa Utara	73.26	70.79	91.39	94.54	88.20
Bolaang Mongondow Utara	48.20	50.06	86.58	77.58	79.62
Kepulauan Sitaro	84.05	87.05	96.66	98.28	96.71
Minahasa Tenggara	64.51	79.34	87.10	88.21	92.98
Bolaang Mongondow Selatan	62.22	74.77	88.87	89.71	86.10
Bolaang Mongondow Timur	73.03	64.13	92.66	77.74	91.61
Kota Manado	90.43	89.50	94.35	92.48	95.89
Kota Bitung	89.08	91.66	93.32	95.48	96.68
Kota Tomohon	80.42	83.15	96.54	97.04	96.34
Kota Kotamobagu	80.01	82.75	95.45	96.80	98.06
Sulawesi Utara	70.22	73.29	90.81	90.31	91.65

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022.

2) Pemenuhan kebutuhan air minum curah di lintas kabupaten/kota

Definisi air minum curah dalam Permen PUPR No 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah air hasil

olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar ini adalah penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota. Kondisi Pelayanan SPAM lintas kabupaten/kota adalah seperti dalam Lampiran I Permen PUPR 29/PRT/M/2018, namun untuk Provinsi Sulawesi Utara sampai saat ini belum terlaksana karena pembangunan SPAM Regional BIMATARA masih dalam tahapan penyusunan dokumen *Feasibility Study*.

b) Sanitasi

Tabel 2.46 menjelaskan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir, persentase akses sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan. Namun jika dibandingkan data tahun 2020, capaian tahun 2021 di Sulawesi Utara turun tipis sebesar 0,64 persen. Hal ini secara umum dikarenakan pandemi Covid-19 yang menyebabkan refocusing anggaran belanja pemerintah daerah. Namun jika dilihat capaian per kabupaten/kota, terdapat 9 kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan akses sanitasi layak 2020 - 2021, dengan persentase peningkatan akses terbesar berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yakni sebesar 12,46 persen.

Tabel 2.44
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak menurut Kabupaten-Kota di Prov. Sulut Tahun 2017 – 2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	64.07	63.50	63.01	70.25	71.07
Minahasa	69.55	83.34	79.21	88.03	81.09
Kepulauan Sangihe	71.14	74.72	77.94	78.65	84.22
Kepulauan Talaud	62.00	83.04	88.36	86.99	86.09
Minahasa Selatan	67.78	71.55	64.39	82.58	78.43
Minahasa Utara	73.10	72.65	73.48	86.05	88.49
Bolaang Mongondow Utara	54.09	52.49	52.08	69.25	71.39
Kepulauan Sitaro	79.30	89.13	82.39	90.09	93.60
Minahasa Tenggara	74.02	75.09	73.52	83.64	78.56
Bolaang Mongondow Selatan	30.88	49.87	53.23	55.16	67.62
Bolaang Mongondow Timur	52.33	55.79	48.12	56.65	56.06
Kota Manado	84.60	84.16	88.72	86.82	87.31
Kota Bitung	85.07	89.75	86.33	89.05	89.33
Kota Tomohon	92.01	89.43	95.52	95.19	95.19
Kota Kotamobagu	57.43	54.66	60.98	71.37	71.55
Sulawesi Utara	71.93	75.23	82.36	85.49	84.85

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022, data diolah.

Sebanyak 5 (lima) Kabupaten/Kota menunjukkan penurunan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, dengan

persentase penurunan terbanyak terdapat di Kabupaten Minahasa yaitu 6,94% dan Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu 5,08%.

Tabel 2.45
Jumlah dan Status IPLT menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	Keberadaan IPLT	
	IPLT	Status
Bolaang Mongondow		
Minahasa	IPLT Minahasa	(Proses) serah terima pengelolaan
Kepulauan Sangihe		
Kepulauan Talaud	IPLT Talaud	(Proses) serah terima pengelolaan
Minahasa Selatan		
Minahasa Utara	IPLT Airmadidi	Belum beroperasi
Bolaang Mongondow Utara		
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		
Minahasa Tenggara		
Bolaang Mongondow Selatan	IPLT Transpatoa	Serah terima pengelolaan dan belum beroperasi
Bolaang Mongondow Timur		
Manado		
Bitung	IPLT Aertembaga	Serah terima pengelolaan dan beroperasi di 2 tahun pertama setelah serah terima
Tomohon	IPLT Tomohon	(Proses) serah terima pengelolaan
Kotamobagu	IPLT Tabang	Belum beroperasi
Sulawesi Utara	**7 IPLT**	**1 IPLT beroperasi**

Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS.

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub – sistem Pengolahan Setempat. IPLT merupakan bagian dari rantai layanan pengelolaan air limbah domestik, sehingga keberadaannya mutlak diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

c) Persampahan

Capaian persentase pengurangan sampah di Provinsi Sulawesi Utara sejauh ini belum terdata namun dapat dipastikan masih di bawah 5 persen. Capaian dipastikan masih jauh dari target karena masih sedikit tempat pengolahan sampah yang tersedia seperti TPS 3R dan masih sedikit juga kabupaten/kota yang menerapkan pemilahan sampah dari rumah dan menggerakkan bank sampah. Tahun 2019 hasil capaian penanganan sampah adalah 57,23 persen melebihi target yang ditetapkan yaitu 55 persen.

Jumlah TPS 3R masih jauh dari kebutuhan daerah, sebagai contoh Kota Manado, untuk mewujudkan penanganan dan pengurangan sampah pada Pengelolaan Sampah yang Berbasis Kecamatan. Manado

membutuhkan minimal 1 TPS 3R di setiap kelurahan (setiap TPS 3R melayani hingga 200 KK), capaian hingga tahun 2018, baru tersedia 2 TPS 3R di 2 kelurahan. Tantangan persentase pengurangan sampah semakin meningkat dengan diterbitkannya Jakstranas Persampahan yaitu 30% di tahun 2025. Karena itu dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pengurangan sampah.

Tabel 2.46
Timbulan Sampah Tertangani 2017-2019 dan Prediksi 2020-2021

Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Tertangani 2017-2019 dan Prediksi 2020-2021				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	61,449,03	62,385,96	63,337,19	64,302,91	65,283,37
Minahasa	85,674,52	86,482,03	87,297,15	88,119,95	88,950,51
Kepulauan Sangihe	33,340,96	33,461,22	33,581,92	33,703,05	33,824,62
Kepulauan Talaud	23,168,23	23,385,38	23,604,56	23,825,80	24,049,11
Minahasa Selatan	53,147,32	53,510,04	53,875,22	54,242,91	54,613,10
Minahasa Utara	51,351,67	51,734,43	52,120,04	52,508,53	52,899,91
Bolaang Mongondow Utara	20,040,65	20,313,62	20,590,30	20,870,75	21,155,02
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	16,856,87	16,895,02	16,933,27	16,971,59	17,010,01
Minahasa Tenggara	27,009,93	27,151,45	27,293,70	27,436,71	27,580,46
Bolaang Mongondow Selatan	16,395,69	16,645,75	16,899,62	17,157,37	17,419,04
Bolaang Mongondow Timur	18,040,86	18,272,20	18,506,51	18,743,83	18,984,19
Manado	109,898,98	110,470,94	111,045,88	111,623,81	112,204,74
Bitung	54,270,50	55,157,03	56,058,03	56,973,76	57,904,44
Tomohon	26,498,16	26,947,67	27,404,81	27,869,71	28,342,49
Kotamobagu	31,649,30	32,214,41	32,789,62	33,375,09	33,971,02
Sulawesi Utara	**628,792,65**	**635,027**	**641,338**	**647,726**	**654,192**

Sumber: Sulawesi Utara Dalam Angka 2022.

Sebagian besar Kabupaten/Kota masih menerapkan mekanisme penanganan sampah yang langsung diangkut dan dibawa ke TPA, tanpa melalui proses pemilahan dan pengolahan di TPS 3R atau bank sampah. Kondisi ini menyebabkan umur TPA lebih pendek daripada yang direncanakan, karena TPA menjadi lebih cepat penuh.

Secara nasional, untuk mencapai target universal access, timbunan sampah harus berkurang 20% sebelum sampai ke TPA, artinya hanya 80% sampah yang akan diproses di TPA. Dengan terbitnya Jakstranas, target penanganan sampah di TPA adalah 70% dari timbulan sampah yang ada, atau sampah harus sudah berkurang 30% sebelum sampai ke TPA. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan, perlu dilakukan penanganan dilakukan secara terpadu dari sumbernya hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pengurangan sampah terjadi sebelum sampai ke TPA.

Dukungan regulasi, kelembagaan hingga kampanye/sosialisasi dengan melibatkan berbagai stakeholder dibutuhkan untuk

mensukseskan pengelolaan sampah berkelanjutan. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah perlu disediakan secara memadai, TPS 3R dan TPA perlu dibangun dan dikelola. Bank Sampah perlu digencarkan pembentukannya dan dibina, masyarakat perlu memulai budaya memilah sampah, serta menjadikan "upaya pengurangan sampah sejak dari diri sendiri" sebagai gaya hidup masa kini.

Catatan:

- timbulan sampah kabupaten menggunakan standar 2 liter/orang/hari, timbulan sampah kota menggunakan standar 2,5 liter/orang/hari;
- timbulan sampah Kota Manado menggunakan standar 2,9 liter/orang/hari (PTMP, 2017);
- Tahun 2020* = proyeksi penduduk BPS, Tahun 2020** = proyeksi timbulan sampah berdasarkan proyeksi penduduk BPS.

Hingga saat ini, masih terdapat 1 kabupaten yang belum memiliki TPA yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Di tingkat provinsi, penyediaan TPA regional Ilo–Ilo masih dalam proses pembangunan. TPA regional Ilo–Ilo diharapkan dapat menjadi hilir dalam rantai pengelolaan sampah Kota Manado yang kondisi TPA-nya saat ini sudah dalam pengelolaan open dumping karena sudah jenuh (over capacity).

Peluang Kota Manado bertambah besar terkait dalam pengelolaan sampah di TPA dengan terbitnya Peraturan Presiden RI No, 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Berikut ini data sebaran TPA di kabupaten/kota dan perencanaan TPA regional yang menjadi kewenangan provinsi.

Tabel 2.47
Data TPA Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	TPA Kabupaten/Kota		
	Nama	Tahun Pembangunan	Luas (ha)
Bolaang Mongondow	TPA Bolmong		
Minahasa	TPA Minahasa	2016	2
Kepulauan Sangihe	TPA Santiago	2014	6
Kepulauan Talaud	TPA Talaud	2016	3,5
Minahasa Selatan	TPA Mobongo	2008	8
Minahasa Utara	TPA Airmadidi	2016	5
Bolaang Mongondow Utara	TPA Kaidipang	2010	7
Kepulauan Sitaro	TPA Tanaki	2017	5
Minahasa Tenggara	TPA Wawali	2012	18
Bolaang Mongondow Selatan	TPA Pinolantungan	2013	7

Bolaang Mongondow Timur	*Belum dibangun*		
Kota Manado	TPA Sumompo	2009	5
Bitung	TPA Aertembaga	2012	7
Kota Tomohon	TPA Tara-Tara	2010	5
Kota Kotamobagu	TPA Poyowa	2015	2,8
Provinsi Sulawesi Utara *(Sesuai Perda Sulut No. 1 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2034)*	TPA Regional Ilo – Ilo	*Dalam proses untuk dibangun*	
	TPA Regional Bolaang Mongondow	*Belum ditindaklanjuti*	

Sumber: Perda Sulut dan Portal Persampahan

Dalam peraturan tersebut, Kota Manado menjadi salah satu dari 12 kota di Indonesia yang menjadi lokasi bagi percepatan pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang disebut PLTSa. Dalam pelaksanannya, Pemerintah Kota Manado dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sekitarnya dalam 1 (satu) daerah provinsi. Peluang ini perlu disinergikan dengan pengelolaan TPA Regional Ilo–Ilo yang sudah lebih dahulu disepakati oleh Pemerintah Kota Manado dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.48
Timbulan Sampah di Kabupaten/Kota se – Prov.Sulut
Tahun 2017-2018 dan Proyeksi Tahun 2019 – 2021

No	Kabupaten/ Kota	Timbulan Sampah/Tahun (TON)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Bolaang Mongondow	61,449,03	62,385,96	63,337,19	64,302,91	65,283,37
2	Minahasa	85,674,52	86,482,03	87,297,15	88,119,95	88,950,51
3	Kep. Sangihe	33,340,96	33,461,22	33,581,92	33,703,05	33,824,62
4	Kep. Talaud	23,168,23	23,385,38	23,604,56	23,825,80	24,049,11
5	Minahasa Selatan	53,147,32	53,510,04	53,875,22	54,242,91	54,613,10
6	Minahasa Utara	51,351,67	51,734,43	52,120,04	52,508,53	52,899,91
7	Bolmong Utara	20,040,65	20,313,62	20,590,30	20,870,75	21,155,02
8	Kep. Sitaro	16,856,87	16,895,02	16,933,27	16,971,59	17,010,01
9	Minahasa Tenggara	27,009,93	27,151,45	27,293,70	27,436,71	27,580,46
10	Bolmong Selatan	16,395,69	16,645,75	16,899,62	17,157,37	17,419,04
11	Bolmong Timur	18,040,86	18,272,20	18,506,51	18,743,83	18,984,19
12	Manado	109,898,98	110,470,94	111,045,88	111,623,81	112,204,74
13	Bitung	54,270,50	55,157,03	56,058,03	56,973,76	57,904,44
14	Tomohon	26,498,16	26,947,67	27,404,81	27,869,71	28,342,49
15	Kotamobagu	31,649,30	32,214,41	32,789,62	33,375,09	33,971,02
	Sulawesi Utara	**628,792,65**	**635,027**	**641,338**	**647,726**	**654,192**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Berdasarkan data SIPSN kementerian LHK Tahun 2021, total volume/timbulan sampah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 mencapai 493.761,93 Ton. Sampah yang dikelola mencapai 310.544,84 ton/tahun atau 62,89 persen dari total volume sampah. Capaian pengurangan sampah tahun 2021 mencapai 54.039,07 ton atau 10,94 persen, sedangkan sampah yang tertangani mencapai 256.505,77 ton atau 51,95 persen. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam dokumen Jakstrada Persampahan Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 10 Tahun 2019, dimana untuk target tahun 2021 pengurangan sampah sebesar 24 persen dan penanganan sampah sebesar 74 persen. Hal ini membutuhkan upaya kerja keras dalam memberikan pelayanan persampahan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara, Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Data Target dan Capaian Pengelolaan Persampahan
di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021

Pengurangan Sampah dari sumbernya	Persentase	Volume (Ton)
Target	24	158,491.00
Capaian	10,94	54,039.07
Penanganan Sampah di TPA	Persen	Volume (Ton)
Target	74	488,680.00
Capaian	51,95	256,505.77

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulawesi Utara 2022, diolah

Terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota (20% dari seluruh kabupaten/kota) yang telah memiliki dasar pengaturan persampahan yang kuat, yaitu diatur melalui Peraturan Daerah. Di sisi lain masih terdapat 4 kabupaten yang sama sekali belum membuat pengaturan tentang persampahan di daerahnya.

Tabel 2.50
Keberadaan Peraturan Persampahan di Wilayah
Provinsi Sulawesi Utara

No	Kabupaten/Kota	Peraturan Terkait Persampahan			
		Peraturan Daerah		Peraturan Bupati/Walikota	
		Pengelolaan	Retribusi	Pengelolaan	Retribusi
1	Kabupaten Bolaang Mongondow	~	~	~	~
2	Kabupaten Minahasa	~	√	~	~
3	Kabupaten Kepulauan Sangihe	~	√	~	~
4	Kabupaten Kepulauan Talaud	~	√	√	~
5	Kabupaten Minahasa Selatan	~	√	~	~

No	Kabupaten/Kota	Peraturan Terkait Persampahan			
		Peraturan Daerah		Peraturan Bupati/Walikota	
		Pengelolaan	Retribusi	Pengelolaan	Retribusi
6	Kabupaten Minahasa Utara	√	√	~	~
7	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	~	~	~	~
8	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	~	√	~	~
9	Kabupaten Minahasa Tenggara	~	√	~	~
10	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	~	~	~	~
11	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	~	~	~	~
12	Kota Manado	√	√	~	~
13	Kota Bitung	√	√	~	~
14	Kota Tomohon	~	√	~	~
15	Kota Kotamobagu	~	√	~	~

Sumber: Roadmap Sanitasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun, 2016-2021.

d) Penataan Ruang

Berdasarkan data yang ada, dari 6 indikator kinerja pembangunan bidang penataan ruang, terdapat 4 indikator dalam Bidang Penataan Ruang RPJMD yang tidak mengukur kinerja Bidang Penataan Ruang tetapi Bidang Perumahan dan Permukiman, dan 2 indikator yang mengukur kinerja Bidang Penataan Ruang sesuai dengan Permendagri 86/2017. Hasil evaluasi capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara untuk kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.51
Target dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang

Indikator	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan luas ber HPL/HGB	56%	56%	*Belum ada data*	56%	*Belum ada data*
Persentase Bangunan ber IMB per satuan bangunan	5,14%	4,90%	*Belum ada data*	5,14%	*Belum ada data*

Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021

4) Perumahan Rakyat dan Pemukiman

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulwesi Utara dalam rangka pemerataan kebutuhan Perumahan dan penataan kawasan permukiman adalah vital bagi Pemerintah. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan peruntukan kawasan permukiman direncanakan dengan melihat perkembangan jumlah penduduk dan KK di Sulawesi

Utara. Peningkatan jumlah penduduk akan memengaruhi kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman, Karakteristik penduduk mulai dari strata rendah sampai strata atas juga menjadi faktor dalam menentukan kebutuhan perumahan.

Rumah layak huni merupakan target Pemerintah Sulawesi Utara dalam pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, Capaian dari aspek ketersediaan rumah layak huni secara umum telah mencapai target di mana dalam 5 tahun hingga 2020 menargetkan masyarakat dihampir semua daerah mendapatkan kesempatan untuk memiliki Rumah yang Layak huni.

Secara umum capaian rumah layak huni di Sulawesi Utara berada di atas angka rata-rata Nasional. Tahun 2017 – 2018 perhitungan masih menggunakan indicator lama, sedangkan mulai tahun 2019 BPS telah memperbarui indikator pengukuran sehingga ada perbedaan yang signifikan terhadap persentase capaian rumah layak huni di seluruh Indonesia. Untuk Sulawesi Utara sendiri mengalami koreksi yang cukup signifikan, yakni dari angka 95,59 persen di tahun 2018 turun menjadi 64,61 persen di 2019. Sedangkan untuk tahun 2021, capaian Sulawesi Utara telah berada di angka 69,50 persen, jauh di atas angka rata-rata nasional yang baru mencapai 60,90 persen. Secara keseluruhan persentase hunian layak di Sulawesi Utara diperlihatkan pada diagram sebagai berikut:

Grafik 2.11
Capaian Rumah Layak Huni Sulut 2017-2021

Sumber: BPS, 2022.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Permendagri ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Bab II Pasal 3 Ayat 4 berbunyi: Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan: a. deteksi dan cegah dini; pembinaan dan penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan; e. Pengawalan; Penertiban; dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmasadalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakantugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memeliharakeamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan Negara. Tabel di bawah ini menggambarkan capaian Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2021.

Tabel 2.52
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021

Indikator	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio kecukupan personil Satuan Polisi Pamong Praja se Provinsi Sulawesi Utara	4,56:1000 Penduduk	4,52:1000 penduduk	4,52:1000 penduduk	5,77 per 1000 Penduduk	5,74 per 1000 Penduduk
Rasio pelayanan 1 orang anggota Satpol PP kepada masyarakat	228,27:50.000 penduduk	226,13:50.000 penduduk	226,13:50.000 penduduk	288,34 per 50.000 penduduk	286,81 per 50.000 penduduk
Rasio peningkatan keamanan dan ketertiban	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat Penegakan Perda, Pergub, Perkepda dan Produk	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara				
	2017	2018	2019	2020	2021
Hukum lainnya					
Persentase tingkat pelanggaran terhadap Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah personil yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Satpol PP	100% (25 orang)	100% (90 orang)	100% (160 orang)	0%	0%
Penurunan *Crime Rate*		100%	100%	100%	100%
Persentase jumlah kebakaran yang tertangani		100%	100%	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022.

Tabel ini memperlihatkan bahwa fokus pengukuran ada pada personil satuan polisi pamong praja dan pelayanan satuan ini kepada masyarakat. Dalam Permendagri Nomor 87 Tahun 2017, tugas ini perlu diseimbangkan dengan satuan perlindungan masyarakat, yang selanjutnya disebut satlinmas, dengan cakupan yang terukur. Dalam permendagri Nomor 44 Tahun 2010, Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Walaupun rasio peningkatan keamanan dan ketertiban, tingkat penegakan Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya, persentase tingkat pelanggaran terhadap Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya, dan penurunan Crime Rate mempunyai capaian rata-rata 100%, perlu senantiasa dijaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pembangunan senantiasa membutuhkan stabilitas masyarakat dan seluruh hasil dan indikator pembangunan seharusnya menyejahterahkan dan membahagiakan masyarakat, termasuk melalui ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarkat.

Penanganan angka kriminalitas berhubungan erat dengan penciptaan stabilitas di tengah masyarakat dan menjamin ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tabel

di bawah ini akan memperlihatkan jumlah kriminalitas yang tertangani Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2020.

Tabel 2.53
Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2017-2021

Indikator	Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kriminalitas yang Tertangani	7534	7037	4180	7140	5629

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2022

6) Kebencanaan

Sulawesi Utara merupakan wilayah yang rawan gempa. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa patahan di daratan Sulawesi Utara dan lokasi Sulawesi Utara yang berada pada lempeng aktif, yaitu Lempeng Laut Maluku di bagian utara. Tingkat kegempaan di Sulawesi Utara berdasarkan data dari Stasiun Geofisika Winangun tercatat terjadi sebanyak 2644 kali sepanjang tahun 2019, namun yang dirasakan sebanyak 117 kali, Dengan kata lain, hanya sebesar 4,42 persen gempa yang dirasakan oleh masyarakat. Gempa tersering terjadi di bulan November 2019, yaitu sebanyak 526 kali, Gempa berskala 5 SR atau lebih terjadi sebanyak 131 kali dan paling banyak terjadi di bulan November. Gempa terbesar yang dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Utara di sepanjang tahun 2019 mencapai 7 skala Richter. Gempa tersebut terjadi di Maluku Utara pada bulan Juli dan bulan November 2019.

Dalam komitmen global untuk mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Penanggulangan bencana menjadi salah satu bidang yang memiliki andil agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam komitmen global difokuskan pada upaya pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Perubahan paradigma penanggulangan bencana menjadi aspek pengurangan risiko bencana, kemudian diimplementasikan dalam beberapa kegiatan sektor yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan membangun kesiapsiagaan.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah rawan bencana, hal ini disebabkan letak geografi, kondisi topografi serta faktor perubahan iklim. Bencana yang menjadi ancaman utama di daerah Prov. Sulut antara lain bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi/tanah goyang, gunung berapi dan tsunami menjadi ancaman utama.

a) Indeks Resiko Bencana

Penanggulangan bencana tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pembangunan nasional, di mana aspek pembangunan

yang diselenggarakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan multisektor.

Dalam komitmen global untuk mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), penanggulangan bencana menjadi salah satu bidang yang memiliki andil agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam komitmen global difokuskan pada upaya pelaksanaan pengurangan risiko bencana.

Data yang ada menunjukkan bahwa Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 berada pada risiko tinggi. Demikian juga indeks risiko bencana di sebagian besar Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, Sedangkan beberapa daerah lainnya berada pada risiko sedang. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Indeks Risiko Bencana Sulawesi Utara Tahun 2020

No	Daerah	Skor	Kelas Risiko
1	Bolaang Mongondow	150	Tinggi
2	Bolaang Mongondow Timur	158	Tinggi
3	Bolaang Mongondow Utara	144	Sedang
4	Kepl, Sangihe	154	Tinggi
5	Minahasa	212	Tinggi
6	Minahasa Selatan	174	Tinggi
7	Minahasa Tenggara	195	Tinggi
8	Minahasa Utara	158	Tinggi
9	Kepl, Sitaro	179	Tinggi
10	Tomohon	119	Sedang
11	Bitung	163	Tinggi
12	Kotamobagu	76	Sedang
13	Manado	130	Sedang
14	Bolaang Mongondow Selatan	150	Tinggi
15	Kepl, Talaud	103	Sedang
Sulawesi Utara		**151**	**Tinggi**

Sumber: Ditjen BAK Kemendagri (2020).

7) Sosial

1. Kondisi Dan Capaian SPM

Menurut PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM Sosial mencakup SPM Sosial Daerah Provinsi dan SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial Daerah Provinsi terdiri dari:

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;

c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dengan standar teknis. Dan untuk SPM Bidang Sosial ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Standar teknis tersebut memuat :

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan social;
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

a. penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
b. anak terlantar adalah untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
c. lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia tarlantar di dalam panti;
d. gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
e. korban bencana provinsi untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Tabel 2.55
Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial di Provinsi Sulawesi Utara

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Capaian Tahun 2021
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Persentase (%) Gelandangan Pengemis Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	0	0

5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Provinsi	100%	100%

Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khusus Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti tidak ada target karena di Provinsi Sulawesi Utara belum memiliki panti milik Pemerintah maupun Masyarakat yang menangani Tuna Sosial khusus Gelandangan dan Pengemis.

2. Alokasi Anggaran

Untuk pengalokasian anggaran belum sesuai dengan standar teknis yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial. Pada Tahun 2021 pengalokasian anggaran masih difokuskan pada penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti, pemberian bimbingan fisik mental spiritual dan sosial, pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari untuk PMKS dalam panti milik masyarakat tetapi tidak untuk setahun dan penyediaan bufferstok untuk permakanan korban bencana daerah Provinsi. Untuk Panti LU milik Pemerintah alokasi anggaran diperuntukkan untuk penyediaan makanan selama setahun, perbekalan kesehatan, penyediaan asrama dan bimbingan fisik mental dan spiritual. Untuk Balai anak alokasi anggaran diperuntukkan untuk penyediaan permakanan, penyediaan asrama, pengasuhan, pembekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dan bimbingan keterampilan.

Sesuai dengan standar teknis SPM Bidang Sosial daerah Provinsi, Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial dan Relawan Sosial. Dan setiap panti sosial harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional. Untuk perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Pemerintah Daerah Provinsi harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial. Panti yang ada di Provinsi saat ini belum memiliki Pekerja Sosial Profesional, dan Untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam hal ini tenaga kesehatan, telah direkrut tenaga perawat. Dan untuk tenaga dokter, pemerintah telah bekerjasama dengan puskesmas terdekat. Penanganan bencana melibatkan tenaga kesejahteraan sosial Tagana (taruna siaga bencana)

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hanya memiliki 1 Panti Lanjut Usia dan belum memiliki Panti Anak, Panti Disabilitas dan Panti untuk Tuna Sosial sehingga penanganan PMKS dalam panti masih melibatkan panti-panti milik masyarakat. Sedangkan untuk anak sudah terdapat 1 balai pelatihan yang nantinya akan dikembangkan juga menjadi Panti Anak;
2. Pengalokasian anggaran untuk Panti masih terkait dengan Permakanan dan lain-lain yang masih sangat jauh dari standar teknis SPM bidang sosial daerah provinsi yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial dalam kaitannya dengan Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa;
3. Panti yang ada belum memenuhi syarat berkaitan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang sudah ditetapkan dengan Standar Teknis SPM Bidang Sosial;
4. Masih minimnya pemahaman tentang Standar Pelayanan Minimal

Solusi

1. Sesuai dengan pembagian kewenangan bahwa penanganan PMKS dalam panti merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi maka Pemerintah Provinsi mengupayakan untuk mendirikan Panti yang belum ada;
2. Diadakan pengumpulan data dilapangan untuk menghitung pembiayaan setiap panti sesuai dengan standar teknis yang sudah ditetapkan agar dapat diakomodir dalam dokumen perencanaan;
3. Diadakan perekrutan pegawai sesuai dengan ketentuan SDM Kesos dalam panti ataupun melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk penyediaan SDM yang dimaksud;
4. Melakukan sosialisasi tentang Standar Pelayanan Minimal kepada pegawai di Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

B. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

a) Status Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Sulawesi Utara pada Agustus 2020 meningkat menjadi 1,93 juta atau naik 19,9 ribu orang dibandingkan Agustus 2019. Dari sejumlah penduduk usia kerja tersebut, 63,42 persen atau 1,23 juta orang merupakan angkatan kerja,

terdiri dari 1,13 juta orang penduduk bekerja dan 90,25 ribu orang pengangguran.

Di sisi lain, sebanyak 686,14 ribu orang (60,46 persen) bekerja di kegiatan informal. Angka tersebut naik cukup signifikan sebesar 5,66 persen poin dibanding Agustus 2019. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur dan persentase pekerja paruh waktu naik masing-masing sebesar 4,67 persen poin dan 7,46 persen poin.

Terdapat 287,64 ribu orang yang terdampak *COVID-19* atau 14,89 persen. Kelompok ini terdiri dari pengangguran karena *COVID-19* (24,92 ribu orang), BAK karena *COVID-19* (10,61 ribu orang), sementara tidak bekerja karena *COVID-19* (17,28 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena *COVID-19* (234,82 ribu orang).

Tabel 2.56
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja,
Agustus 2019 –

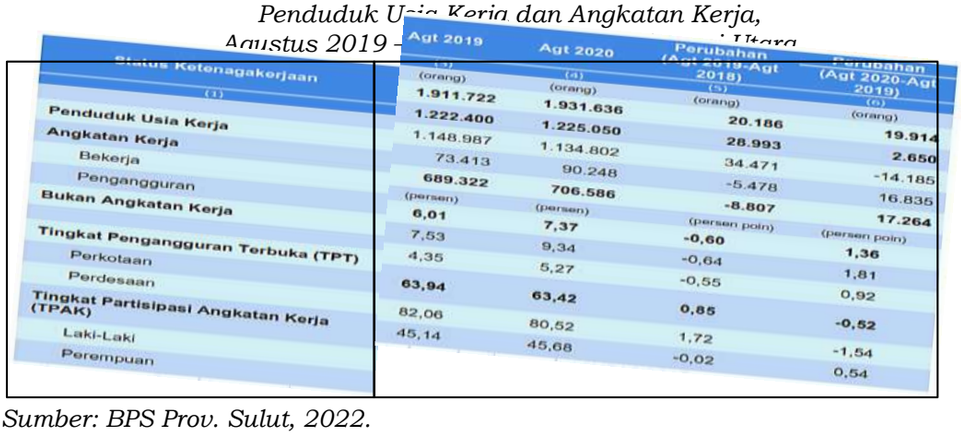

Status Ketenagakerjaan	Agt 2019	Agt 2020	Perubahan (Agt 2019-Agt 2018)	Perubahan (Agt 2020-Agt 2019)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(orang)	(orang)	(orang)	(orang)
Penduduk Usia Kerja	1.911.722	1.931.636	20.186	19.914
Angkatan Kerja	1.222.400	1.225.050	28.993	2.650
Bekerja	1.148.987	1.134.802	34.471	-14.185
Pengangguran	73.413	90.248	-5.478	16.835
Bukan Angkatan Kerja	689.322	706.586	-8.807	17.264
	(persen)	(persen)	(persen poin)	(persen poin)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,01	7,37	-0,60	1,36
Perkotaan	7,53	9,34	-0,64	1,81
Perdesaan	4,35	5,27	-0,55	0,92
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63,94	63,42	0,85	-0,52
Laki-Laki	82,06	80,52	1,72	-1,54
Perempuan	45,14	45,68	-0,02	0,54

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

Tabel 2.57
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Sulawesi Utara Tahun 2021

NO	Kegiatan Utama	Tahun (Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	**Penduduk Usia Kerja**	**1,842,800**	**1,866,055**	**1,911,722**	**1,931,636**	**1,950,758**
2	**Angkatan Kerja**	**1,121,309**	**1,175,809**	**1,222,400**	**1,225,050**	**1,212,337**
	Bekerja	1,040,826	1,095,145	1,148,987	1,134,802	1,126,797
	Pengangguran Terbuka	80,483	80,664	73,413	90,248	85,540
3	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	**60,85**	**63,01**	**63,94**	**63,42**	**62,15**
4	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	**7,18**	**6,86**	**6,01**	**7,37**	**7,06**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2020, turun 0,52 poin dari Agustus 2019. Penurunan nilai TPAK ini terkait dengan pandemi *COVID-19* yang tengah berlangsung. Jumlah penduduk yang

bekerja berkurang dan belum masuk kembali ke pasar kerja sehingga menambah jumlah kelompok bukan angkatan kerja. Hal tersebut mengindikasikan penurunan potensi ekonomi dari sisi suplai tenaga kerja. Pada Agustus 2020, TPAK di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebesar 63,42 persen, artinya dari 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 63 orang yang aktif secara ekonomi.

Berdasarkan kabupaten/kota, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2020 cenderung turun bila dibandingkan dengan Agustus 2019. Namun ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami peningkatan TPAK, yaitu Kepulauan Talaud (9,76 poin), Bolaang Mongondow Selatan (4,67 poin), Kotamobagu (2,98 Poin), Kepulauan Sangihe (2,29 poin), Kepulauan Sitaro (1,67 poin), Bolaang Mongondow (1,17 poin), Bolaang Mongondow Utara (0,63 poin) dan Bolaang Mongondow Timur (0,12 poin).

Tabel 2.58
Perkembangan TPAK Tahun 2017-2021
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	TPAK				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Bolaang Mongondow	64,10	64,77	62,84	64,01	62,06
2	Minahasa	60,83	66,11	63,33	62,34	59,41
3	Kepulauan Sangihe	64,46	63,37	62,27	64,56	63,60
4	Kepulauan Talaud	68,32	67,88	71,20	80,97	79,19
5	Minahasa Selatan	62,42	64,76	70,22	67,09	63,04
6	Minahasa Utara	60,85	60,16	62,38	61,64	61,99
7	Bolaang Mongondow Utara	61,68	59,38	64,12	64,75	64,43
8	Kepulauan Sitaro	56,65	65,99	63,47	65,14	63,09
9	Minahasa Tenggara	60,90	62,06	67,58	64,34	64,87
10	Bolaang Mongondow Selatan	61,52	61,20	58,84	63,51	59,05
11	Bolaang Mongondow Timur	59,58	64,11	66,82	66,94	65,07
12	Kota Manado	59,03	59,55	62,63	58,63	59,08
13	Kota Bitung	56,55	62,85	61,88	61,73	62,22
14	Kota Tomohon	61,66	60,69	62,68	59,59	57,90
15	Kota Kotamobagu	57,96	64,87	63,50	66,48	64,77
SULAWESI UTARA		**60,85**	**63,01**	**63,94**	**63,42**	**62,15**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

c) Tingkat Pengangguran Terbuka;

Tingkat Pengangguran Terbuka berada di angka 7,37 persen, naik 1,36 poin bila dibandingkan Agustus 2019. Hampir semua kab/kota mengalami kenaikan TPT selama setahun terakhir. Jika dilihat polanya kenaikan TPT tertinggi sebagian besar terjadi di wilayah administrasi perkotaan atau wilayah yg berbatasan dengan perkotaan.

Tabel 2.59

Perkembangan TPT Tahun 2017-2021
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	TPT				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Bolaang Mongondow	4,88	3,58	4,39	4,87	4,85
2	Minahasa	6,91	7,35	5,88	6,30	6,14
3	Kepulauan Sangihe	5,11	3,71	4,18	4,91	4,72
4	Kepulauan Talaud	3,50	2,23	2,81	2,64	2,30
5	Minahasa Selatan	7,38	5,93	4,23	5,01	4,90
6	Minahasa Utara	9,48	6,72	5,01	7,88	8,12
7	Bolaang Mongondow Utara	4,71	5,08	4,62	5,48	5,23
8	Kepulauan Sitaro	2,86	2,82	2,78	3,31	3,39
9	Minahasa Tenggara	5,72	4,82	3,18	3,31	3,39
10	Bolaang Mongondow Selatan	6,34	4,54	4,79	4,39	4,60
11	Bolaang Mongondow Timur	7,32	8,18	6,37	6,13	5,99
12	Kota Manado	9,35	10,38	10,46	13,88	12,17
13	Kota Bitung	9,85	11,21	9,80	10,23	9,96
14	Kota Tomohon	8,94	8,22	7,75	8,99	8,84
15	Kota Kotamobagu	5,71	5,73	5,82	7,44	7,32
SULAWESI UTARA		**7,18**	**6,86**	**6,01**	**7,37**	**7,06**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

.

d) Pandemi *COVID-19* dan Ketenagakerjaan di Sulawesi Utara

Pandemi *COVID-19* berdampak tidak hanya pada masalah kesehatan melainkan juga semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih menurun sampai pada triwulan III tahun 2020. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia termasuk Sulawesi Utara di dalamnya. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi *COVID-19*.

Penduduk usia kerja yang terdampak *COVID-19* tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu: a) Penganggur; b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020; c) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi *COVID-19* yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi *COVID-19* bagi mereka yang berhenti bekerja.

Tabel 2.60
Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020

Komponen	Jenis Kelamin		Daerah Tempat tinggal		Total
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengangguran[2] Karena Covid-19	16.639	8.280	14.521	10.398	24.919
Bukan Angkatan Kerja (BAK)[3] Karena Covid-19	8.243	2.371	4.435	6.179	10.614
Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	11.095	6.185	10.500	6.780	17.280
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	146.052	88.772	142.027	92.797	234.824
Total	182.029	105.608	171.483	116.154	287.637
Penduduk Usia Kerja (PUK)	1.029.937	901.699	983.631	948.005	1.931.636
Persentase terhadap PUK	17,67	11,71	17,43	12,25	14,89

Keterangan:
1. Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015
2. Pengangguran karena Covid-19 adalah pengangguran yang berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020
3. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa dari penduduk usia kerja yang mencapai 1,93 juta orang, terdapat 287,64 ribu orang yang terdampak *COVID-19* atau 14,89 persen. Secara total, jumlah laki-laki yang terdampak *COVID-19* lebih besar hampir 1,7 kali lipat dibandingkan perempuan. Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 17,43 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yakni 12,25 persen.

Berkurangnya jam kerja adalah dampak *COVID-19* yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja yakni sebanyak 234,82 ribu orang atau sebesar 81,64 persen. Sedangkan jumlah penganggur karena dampak *COVID-19* sebanyak 24,92 ribu orang atau sekitar 27,61 persen terhadap total penganggur (90,25 ribu orang) di Sulawesi Utara.

Secara umum, pada semua kategori tersebut, jumlah laki-laki yang terdampak lebih banyak dibandingkan perempuan. Begitu juga jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja di daerah perkotaan lebih banyak terdampak *COVID-19* dibandingkan dengan di perdesaan.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal,

misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Sayangnya, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada urusan dapur rumah tangga, sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat.

Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada penghitungan IPM metode baru. Sehingga angka yang sekarang digunakan menggantikan angka IPG yang pernah dipublikasikan. Dengan berlakunya IPG menggunakan metode baru, angka yang disajikan tidak bisa dibandingkan dengan angka-angka sebelumnya. Membandingkannya harus sesuai metode yang digunakan. Hasil penghitungan IPG metode baru, tercatat bahwa IPG Sulawesi Utara mengikuti tren naik.

Tabel 2.61
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sulawesi Utara

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
IPG Sulawesi Utara	94,78	94,79	94,53	94,42	94,61
IPG Nasional	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022.

IPG Sulawesi Utara selang tahun 2017–2019 terus mengalami peningkatan dan berada di atas rata-rata nasional, namun demikian dampak Pandemi *Covid-19* membuat IPG Sulawesi Utara mengalami penurunan pada angka 94,42 di tahun 2020, walaupun kemudian angka tersebur mulai kembali pulih dan naik sebesar 94,61 pada Tahun 2021.

Jika dilihat menurut capaian IPG kabupaten/kota menunjukkan bahwa kesenjangan antar gender tertinggi berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sedangkan kesenjangan antar gender terendah yaitu Kota Tomohon. Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih cukup tinggi. Nilai IPG Kota Tomohon hampir mendekati 100 sehingga kesenjangan pembangunan laki-laki dan perempuan cukup rendah.

Tabel 2.62
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/ Kota Se-Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	IPG Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	87,72	88,03	88,36	88,29	88,41
Minahasa	96,22	96,48	96,76	96,53	96,02
Kepulauan Sangihe	96,10	96,10	95,35	95,23	95,94
Kepulauan Talaud	97,18	97,64	97,67	97,90	98,09
Minahasa Selatan	88,53	89,31	88,81	88,74	88,78
Minahasa Utara	96,26	96,80	96,42	96,40	96,24
Bolaang Mongondow Utara	85,46	86,19	86,92	86,77	87,02
Kepulauan Sitaro	87,64	88,28	88,43	88,40	88,87
Minahasa Tenggara	91,81	92,21	91,87	91,88	92,08
Bolaang Mongondow Selatan	78,34	79,39	79,87	79,70	80,09
Bolaang Mongondow Timur	90,50	90,51	90,75	90,84	90,98
Kota Manado	95,96	96,07	96,28	96,23	96,41
Kota Bitung	94,87	95,01	94,23	94,19	94,56
Kota Tomohon	99,89	99,20	98,98	98,94	98,95
Kota Kotamobagu	94,78	95,13	95,42	95,37	95,38
SULAWESI UTARA	**94,78**	**94,79**	**94,53**	**94,42**	**94,61**

Sumber: BPS Provinsi Provinsi Sulawesi Utara, 2022.

b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender, berdasarkan 3 (tiga) indikator pembentuk, yaitu:

1. Partisipasi perempuan dalam bidang parlemen (politik);
2. Partisipasi perempuan sebagai pemimpin/ *managerial* (pengambilan keputusan); dan
3. Partisipasi perempuan dalam sumbangan pendapatan (distribusi pendapatan) artinya perempuan bidang ekonomi diperhitungkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, skor Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sulawesi Utara sebesar 78,98 poin pada tahun 2020. Nilai tersebut menjadi ke-2 tertinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia. Capaian IDG di Sulawesi Utara pada 2020 didukung oleh partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional yang mencapai 53,59%, Pendapatan perempuan berkontribusi sebesar 32,50%, Sedangkan Keterwakilan perempuan di Parlemen sebesar 29,27%. Capaian Skor Indeks Pemberdayaan Gender Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63

Indeks Pemberdayaan Gender Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
IDG Sulawesi Utara	81,24	82.37	80.91	79.10	78.98
IDG Nasional	71,39	71,74	72,10	75,24	75,57

Sumber: BPS Provinsi Provinsi Sulawesi Utara, 2022.

Jika dilihat menurut capaian IDG kabupaten/kota menunjukkan bahwa pemberdayaan gender tertinggi berada di Kabupaten Minahasa, sedangkan pemberdayaan gender terendah berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Hal ini mengindikasikan bahwa pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka, yang bersifat kodrati sangatlah dirasakan di Kabupaten Minahasa, Ini adalah salah satu tujuan dari Deklarasi Universal Hak asasi Manusia, PBB yang berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi dan memastikan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama.

Tabel 2.64

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/ Kota Se-Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	70.64	78.05	77.77
Minahasa	82.96	87.63	87.05
Kepulauan Sangihe	66.00	61.38	59.91
Kepulauan Talaud	58.86	68.59	68.44

Minahasa Selatan	76.53	76.20	78.34
Minahasa Utara	76.74	67.40	64.60
Bolaang Mongondow Utara	64.90	61.99	63.79
Kepulauan Sitaro	73.90	74.53	74.89
Minahasa Tenggara	79.86	78.46	79.92
Bolaang Mongondow Selatan	67.98	72.22	68.16
Bolaang Mongondow Timur	66.08	73.06	72.48
Kota Manado	83.18	83.96	84.67
Kota Bitung	73.00	65.15	68.84
Kota Tomohon	83.23	81.86	82.91
Kota Kotamobagu	69.33	66.93	66.42
Sulawesi Utara	**80.91**	**79.10**	**78.98**

Sumber: BPS Provinsi Provinsi Sulawesi Utara, 2022.

3) Pangan

a. Ketersediaan Pangan

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu Provinsi penyangga pangan Nasional. Surplus komoditi pangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Provinsi lainnya di Indonesia, disamping untuk stock/cadangan pangan Nasional.

Sebagai Provinsi lumbung pangan, Sulawesi Utara masih perlu melakukan pemantapan ketersediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat wilayah dan rumah tangga.

Ketersediaan beras di Sulawesi Utara pada tahun 2016 sebesar 329,871 ton, selanjutnya terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi 402,722 ton. Kemudian di tahun 2018 menurun menjadi 345,051 ton dan 2019 menjadi 339,930 ton. Di tahun 2020, berjumlah 298,376 ton (per Agustus 2020). Ketersediaan jagung di Sulawesi Utara berjumlah 135,471 ton, di tahun 2016 kemudian turun menjadi 105,929 dan kemudian terus meningkat tiap tahunnya, di tahun 2020, menjadi 351,228 ton. Pada tahun 2021 ketersediaan beras turun menjadi 275.605 ton, jagung turun menjadi 219.578 ton dan terjadi peningkatan pada ketersediaan kedelai menjadi 15.983 ton.

Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, dan mutu keanekaragaman pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan.

Tabel 2.65
Ketersediaan Pangan Strategis

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Beras (Ton)	329,871	402,722	345,051	339,930	298,376	275.605
2	Jagung (Ton)	135,471	105,929	307,961	323,838	351,228	219.578
3	Kedelai (Ton)	15,697	11,543	13,687	2,969	3,000	15.983

Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022

b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Pada tahun 2016 Pola Pangan Harapan (PPH) di Sulawesi Utara sebesar 83,6. Angka ini selanjutanya mengalami peningkatan terus tiap tahun sampai 2018 hingga menjadi 94,1. Di tahun 2019, turun menjadi 93,1. Walau sempat turun di tahun 2019, namun peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat. Optimalisasi gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) perlu dilaksanakan.

Percepatan ini perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk percepatan pencapaian Pola Pangan Harapan.

Tabel 2.66
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Sulawesi Utara

No.	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83,6	94,1	94,1	93,1	86	83,1

Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022

4) Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

Kualitas Lingkungan Hidup saat ini dapat diukur secara kuantitatif dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) merupakan

suatu bentuk penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air sungai dan danau, udara, lahan dan air laut. Adapun 4 (empat) Indikator IKLH yaitu Indeks Kualitas Air (Air Sungai dan Danau), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Provinsi Sulawesi Utara merupakan suatu bentuk penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan di Sulawesi Utara.

Penetapan IKLHD sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Juga sebagai bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Detail capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) di Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.67
Target dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Provinsi Sulawesi Utara

No.	IKLHD	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Target dalam RPJMD	70,51	70,81	71,11	71,41	71,71	72,01
2	Capaian	72,38	-	-	-	-	-

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Utara 2022, diolah.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 sebesar 72,38 telah melampaui target dalam RPJMD yang ditetapkan sebesar 70,51. Capaian ini masuk dalam kategori **"Baik"**, dimana rentang skornya berada pada 70 – 90. Sedangkan besaran angka IKLH setiap kabupaten/kota tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	IKA	IKU	IKL	IKLH	Target	Rating
1	Kabupaten Bolaang Mangondow Utara	Sulawesi Utara	59.52	92.3	85.04	78.39	75.09	BAIK
2	Kabupaten Minahasa Utara	Sulawesi Utara	49.17	88.88	42.69	63.83	62.94	SEDANG
3	Kabupaten Bolaang Mangondow	Sulawesi Utara	53.33	95.44	74.96	75.12	73.65	BAIK
4	Kota Kotamobagu	Sulawesi Utara	44.67	91.25	25.26	59.28	60.59	SEDANG
5	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	0	85.08	44.52	-	63.47	-
6	Kota Manado	Sulawesi Utara	30	89.09	27.27	53.33	57.87	SEDANG
7	Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan	Sulawesi Utara	0	93.04	87.14	-	73.36	-
8	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Bia	Sulawesi Utara	0	97.01	40.16	-	64.84	-
9	Kabupaten Minahasa	Sulawesi Utara	50.71	89.38	34.83	62.89	58.04	SEDANG
10	Kota Bitung	Sulawesi Utara	0	88.9	50.92	-	63.32	-
11	Kabupaten Bolaang Mangondow Timur	Sulawesi Utara	0	94.89	64.01	-	67.47	-
12	Kabupaten Minahasa Tenggara	Sulawesi Utara	0	92.78	38.71	-	62.73	-
13	Kabupaten Minahasa Selatan	Sulawesi Utara	30	86.41	44.87	56.1	63.54	SEDANG
14	Kota Tomohon	Sulawesi Utara	45	89.65	42.64	62.57	59.3	SEDANG
15	Kabupaten Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	0	95	55.07	-	66.13	-

No	Provinsi	IKA	IKU	IKL	IKAL	IKLH	Target	Rating
1	Sulawesi Utara	49.69	91.27	61.94	82.65	72.38	71.49	BAIK

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022

5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Penduduk Ber-NIK;

Nomor Induk Kependudukan atau NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini menerapkan sistem KTP nasional yang terkomputerisasi Kepemilikan KTP adalah hak sipil warga negara Republik Indonesia.

Berdasarkan data tahun 2021 persentase penduduk berumur 17 tahun ke atas dengan Kepemilikan NIK di Sulawesi Utara sudah mencapai 95,61%, di mana jika dilihat menurut kabupaten/kota persentase kepemilikan KTP yang paling rendah adalah 93,37% di Kabupaten Minahasa Utara. Perkembangan Penduduk Ber-KTP Tahun 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69
Perkembangan Penduduk Ber-KTP Tahun 2019-2021
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Berumur 17 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan NIK (Persen)		
	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	93.39	93.82	95.08
Minahasa	95.03	96.22	98.60

Kepulauan Sangihe	95.60	98.17	98.75
Kepulauan Talaud	98.62	99.53	99.01
Minahasa Selatan	93.14	94.34	95.46
Minahasa Utara	87.27	90.75	93.37
Bolaang Mongondow Utara	95.52	96.49	95.29
Kepulauan Sitaro	94.01	94.79	97.12
Minahasa Tenggara	95.41	98.25	98.20
Bolaang Mongondow Selatan	92.48	94.49	97.85
Bolaang Mongondow Timur	90.06	85.46	96.11
Kota Manado	89.88	94.29	89.18
Kota Bitung	97.30	95.04	97.08
Kota Tomohon	99.61	99.54	99.08
Kota Kotamobagu	95.26	96.21	98.80
Sulawesi Utara	**93.54**	**95.03**	**95.61**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 17 Tahun 2019, Pasal 1, ayat (2), pemberdayaan masyarakat desa dimengerti sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pasal 1, ayat (13) PermendesPDTT Nomor 17 Tahun 2019 menegaskan bahwa sistem pembangunan dan perberdayaan masyarakat desa merupakan Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Indikator pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang diukur dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.70
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2017-2019 (data sebagian di kesbangpol)

Indikator	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara			Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap	
	2017	2018	2019	n-1	n-3
Jumlah Kab/Kota dan Perangkat Daerah Prov. yang menerapkan SPM	40 PD dan 15 Kab/ Kota	41 PD dan 15 Kab/ Kota	40 PD dan 15 Kab/ Kota	-1 PD	0

Indikator	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara			Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap	
	2017	2018	2019	n-1	n-3
Jumlah LSM	12	12	25	13	13
Jumlah Organisasi Masyarakat	21	22	38	16	17
Jumlah Organisasi Keagamaan	20	21	15	-6	-5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel ini memperlihatkan bahwa pengukuran fokus pada kuantitas. Walaupun rata-rata LSM, ormas dan organisasi keagamaan terus berkembang dari tahun 2017 sampai 2019 secara kuantitatif, pengukuran keaktivan, partisipasi, bahkan prestasi yang berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan desa tidak tersentuh. Demikian, indikator kinerja pembangunan daerah perlu disesuaikan dan mengukur kontribusi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, LSM, posyandu, serta swadaya masyarakat dalam program-program pemberdayaan masyarakat.

7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk secara umum dapat dibedakan tiga macam yakni pertumbuhan alami, pertumbuhan migrasi, dan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian. Pertumbuhan penduduk total adalah pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Dan pertumbuhan penduduk migrasi adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih migrasi masuk dan migrasi keluar.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2021, jumlah penduduk Sulawesi Utara telah mencapai 2,63 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan data BPS di tahun sebelumnya, jumlah penduduk Sulut terus mengalami peningkatan atau bertambahan sebanyak 16,7 Ribu dari tahun 2020.

Adapun Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 s/d 2021 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara di sajikan pada table berikut.

Tabel 2.71
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2021
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK					LAJU PERTUMBUHAN 2021
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Bolaang Mongondow	240,505	244,185	247,811	248 751	250.478	0,93
2	Minahasa	335,321	338,364	341,176	347 290	348.673	0,53
3	Kepulauan Sangihe	130,493	130,833	131,163	139 262	139.684	0,40
4	Kepulauan Talaud	90,678	91,599	92,475	94 521	94.983	0,65
5	Minahasa Selatan	208,013	209,501	210,695	236 463	238.746	1,29
6	Minahasa Utara	200,985	202,317	203,624	224 993	226.915	1,14
7	Bolaang Mongondow Utara	78,437	79,366	80,313	83 112	83.743	1,01
8	Kepulauan Sitaro	65,976	66,225	66,403	71 817	72.135	0,59
9	Minahasa Tenggara	105,714	106,303	106,899	116 323	117.079	0,87
10	Bolaang Mongondow Selatan	64,171	65,127	66,071	69 791	70.529	1,41
11	Bolaang Mongondow Timur	70,610	71,477	72,408	88 241	89.981	2,64
12	Kota Manado	430,133	431,880	433,635	451 916	453.182	0,37
13	Kota Bitung	212,409	215,711	219,004	225 134	227.177	1,21
14	Kota Tomohon	103,711	105,306	106,917	100 587	100.853	0,35
15	Kota Kotamobagu	123,872	126,198	128,387	123 722	124.473	0,81
	SULAWESI UTARA	**2,461,028**	**2,484,392**	**2,506,981**	**2 621 923**	**2.638.631**	**0,85**

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

Selang tahun 2016 – 2021 terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Utara, yaitu dari 1,1% di tahun 2017 menjadi 0,85% pada tahun 2021.

Tabel 2.72
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017-2021 di Provinsi Sulut

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Laju pertumbuhan penduduk	1,1	1,09	1,01	1,00	0,85

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022.

b) Total Fertility Rate

Total Fertility Rate adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antarwilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Perkembangan TFR Tahun 2017 s/d 2021 di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada table berikut.

Tabel 2.73
Perkembangan TFR Tahun 2017-2021
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	TFR				
		2017	2018	2019	2020	2021
1,	SULAWESI UTARA	2,3	2,31	2,3	2,28	2.10

Sumber: BKKBN, 2022.

C) Cakupan KB Aktif/CPR (%)

Salah satu usaha pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk Indonesia adalah dengan program Keluarga Berencana (KB) yang dikelola oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program KB yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan penduduk ini dilaksanakan dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dalam upaya mencegah terjadinya pembuahan. Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan program KB di Indonesia adalah Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah Persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Peserta KB Aktif pada tahun 2021 di Sulawesi Utara mencapai 184 ribu Jiwa, jika dilihat berdasarkan jenis alat kontrasepsi (IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan, Pil) yang paling banyak di gunakan peserta KB aktif adalah Suntikan berjumlah 97 ribu peserta dan yang paling sedikit adalah MOP berjumlah 351 peserta. Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74
Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota *Regency/ Municipality*	Jumlah PUS *Number of Fertile Age Couples*	Peserta KB Aktif/*Active Family Planning Participant*							
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntikan	Pil	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kabupaten/*Regency*									
1. Bolaang Mongondow	36 044	275	577	33	39	4 466	10 628	3 328	19 346
2. Minahasa	41 725	1 616	753	53	136	2 692	14 734	3 355	23 339
3. Kepulauan Sangihe	18 073	314	343	11	29	2 213	5 613	2 115	10 638
4. Kepulauan Talaud	12.471	291	133	16	40	3 653	2 120	543	6 796
5. Minahasa Selatan	30 883	1 716	668	47	125	2 969	8 892	3 910	18 327
6. Minahasa Utara	31 450	1 024	552	22	32	3 355	10 194	2 237	17 416
7. Bolaang Mongondow Utara	12 749	291	128	11	22	2 316	3 163	1 575	7 506
8. Siau Tagulandang Biaro	8 175	139	122	6	9	990	2 534	891	4 691
9. Minahasa Tenggara	16 706	704	363	17	30	2 315	5 167	1 243	9 839
10. Bolaang Mongondow Selatan	11 275	55	164	13	8	2 091	2 277	1 818	6 426
11. Bolaang Mongondow Timur	13 042	185	403	26	51	1 646	3 898	2 619	8 828
Kota/*Municipality*									
1. Kota Manado	40 899	1 972	428	28	84	2 961	11 602	3 603	20 678
2. Kota Bitung	26 808	729	487	32	46	2 552	8 952	1 909	14 707
3. Kota Tomohon	12 477	866	501	17	70	674	3 674	848	6 650
4. Kota Kotamobagu	15 440	517	488	19	25	2 372	4 058	1 601	9 080
Sulawesi Utara	**328 217**	**10 694**	**6 110**	**351**	**746**	**37 265**	**97 506**	**31 595**	**184 267**

Sumber/*Source*: BKKBN Provinsi Sulawesi Utara/ *National Family Planning Coordinating Board Sulawesi Utara*

https://sulut.bps.go.id

8) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

b) Koperasi

Tahun 2020 jumlah koperasi mencapai 6,381 namun hanya 58, 3% yang aktif. Jumlah anggota koperasi terbanyak berada di Kota Manado yaitu 14.003 anggota. Namun jumlah terbanyak koperasi aktif terdapat di Kabupaten Minahasa.

Tabel 2.75
Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi			Jumlah Anggota
	Aktif	Tdk Aktif	Jumlah	
Bolaang Mongondow	112	240	352	82
Minahasa	1,051	315	1,366	3525
Kepulauan Sangihe	95	99	194	1503
Kepulauan Talaud	73	77	150	...
Minahasa Selatan	366	455	821	421
Minahasa Utara	216	277	493	170
Bolaang Mongondow Utara	23	60	84	417
Kepulauan Sitaro	22	37	59	379
Minahasa Tenggara	180	131	311	517
Bolaang Mongondow Selatan	78	9	87	97
Bolaang Mongondow Timur	25	10	35	23
Kota Manado	622	340	962	143
Kota Bitung	363	151	514	2,548
Kota Tomohon	147	136	283	706
Kota Kotamobagu	147	102	249	-
Binaan Provinsi	166	218	384	8260
Binaan nasional	35	2	37	1998
Sulawesi Utara	**3,722**	**2,859**	**6,381**	**34,849**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021..

Sebagai salah satu penggerak perekonomian koperasi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 memiliki volume usaha mencapai Rp255,215,000,000 dan modal sendiri mencapai 60,65%.

Tabel 2.76
Nilai Modal Sendiri, Modal Luar, dan Volume Usaha Koperasi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Modal Sendiri (Rp, Juta)	Modal Luar (Rp, Juta)	Volume Usaha (Rp, Juta)
Bolaang Mongondow	1318	-	875
Minahasa	8856	5632	39361
Kepulauan Sangihe	5018	84	5679
Kepulauan Talaud	4451	1517	3913
Minahasa Selatan	1572	867	3657
Minahasa Utara	18	9	26
Bolaang Mongondow Utara	1483	94	2202
Kepulauan Sitaro	2389	686	6956
Minahasa Tenggara	927	3122	3214
Bolaang Mongondow Selatan	827	2405	2330
Bolaang Mongondow Timur	120	5	253
Kota Manado	49336	53302	123545
Kota Bitung	4555	145	38346
Kota Tomohon	6492	65	5586
Kota Kotamobagu	4643	6109	4464

Binaan Provinsi	20909	26458	23600
Binaan nasional	49541	7609	8866
Sulawesi Utara	**150153**	**97397**	**255215**

Sumber BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021..

Terdapat koperasi yang merupakan binaan provinsi dan binaan nasional yang volume usahanya mencapai 12,72% dari total volume usaha.

Grafik 2.12
Persentase Jumlah Koperasi menurut Jenisnya Tahun 2021

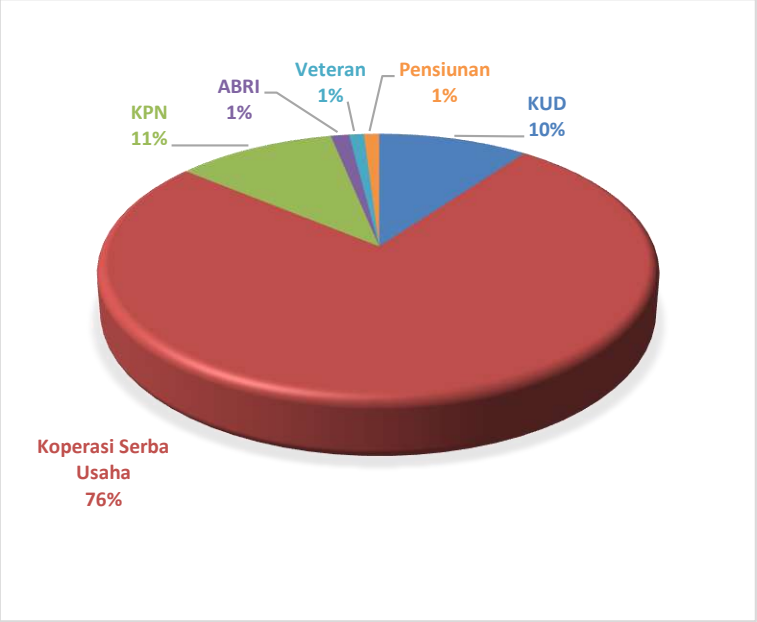

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021..

Data Tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah koperasi serba usaha yang paling dominan (76%), hanya 1% jumlah Koperasi ABRI, Koperasi Veteran dan Koperasi Pensiunan.

Grafik 2.13
Persentase Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usahanya
Tahun 2021

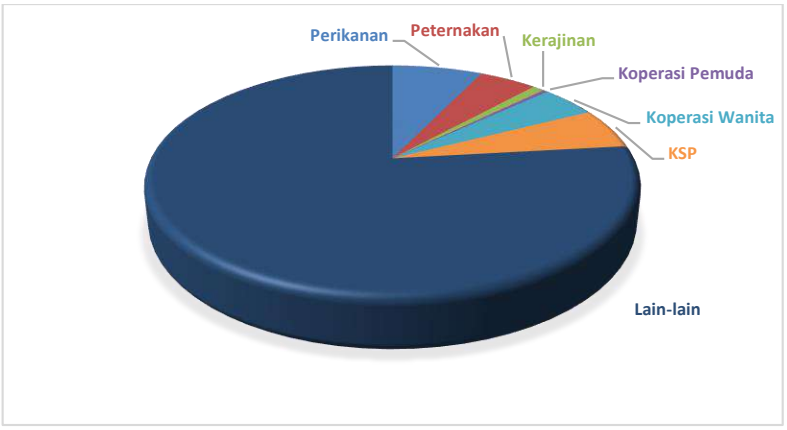

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Tabel 2.77
Kinerja Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Sulawesi Utara

Indikator	Target Akhir RPJMD	Target Thn 2021	Capaian Thn 2021
Jumlah Koperasi Aktif	3,517	3,517	3,517
Jumlah usaha mikro	61,958 UMKM	61,958 UMKM	61,958 UMKM
Jumlah wirausaha baru	3,591	3,591	3,591
Sarjana wirausaha baru	12,428 Org	12,428 Org	12,428 Org
Wirausaha baru non sarjana	2,592 Org	2,592 Org	2,592 Org
Sertifikasi hak atas tanah bagi usaha mikro, kecil	300	300	300

Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021.

Data capaian kinerja bidang koperasi menunjukkan bahwa perlu upaya meningkatkan semangat berwirausaha terutama bagi angkatan kerja yang belum bekerja atau di masa pandemi COVID 19 sudah tidak bekerja lagi. Hal ini akan menjadi tantangan bagi Provinsi Sulawesi Utara di 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 2.78
Capaian Kinerja Koperasi dan UKM 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020	Evaluasi Capaian	
					n-1	n-4
Jumlah Koperasi Aktif	2,853	2,783	3,617	3,722	105	430
Jumlah usaha mikro kecil menengah	76154 UMKM	84392 UMKM	94153 UMKM	222,727	128,574	169,266
Jumlah wirausaha baru	1,110 Wirausaha Baru	1110 Wirausaha Baru	1680 Wirausaha Baru	765 Wirausaha Baru	5,060 Wirausaha Baru	4,665 Wirausaha Baru
Sarjana wirausaha baru	-		1,470 Org	-	-	-
Wirausaha baru non sarjana	-		-		-	-
Sertifikasi hak atas tanah bagi usaha mikro, kecil	2,853	2,783	3,617	3,722	105	430

Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021.

Peran UKM dalam pemulihan dan percepatan ekonomi di daerah menjadi catatan penting para pengambil kebijakan, Provinsi Sulawesi Utara yang cenderung meningkat jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selang tahun 2016–2019. Untuk jumlah wirausaha baru, dari tahun 2016 s/d 2019 selalu melebihi target tahunan yaitu mencapai lebih dari 1000 wirausaha baru per tahun di mana tertinggi adalah pada tahun 2019 yang mencapai 1680 wirausaha baru. Sedangkan di tahun 2020 jumlahnya lebih sedikit yaitu hanya mencapai 765 wirausaha baru.

Stimulus pemerintah dalam mendorong UMKM di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kinerja bidang koperasi dan UMKM di

masa yang akan datang. Hal ini menjawab tantangan dampak pandemi *COVID-19* di Provinsi Sulawesi Utara.

9) Penanaman Modal

Peningkatan penanaman modal menjadi target prioritas pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat stabilitas perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.79
Realisasi PMDN menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018-2021

Kabupaten/Kota	2018 (Rp, Juta)	2019 (Rp, Juta)	2020 (Rp, Juta)	2021 (Rp, Juta)
Bolaang Mongondow	210,425,20	3,728,393	5,243	513,189
Minahasa	733,083,97	4,160	45,775	3,713
Kepulauan Sangihe	0	297	-	200
Kepulauan Talaud	0	4,150	-	-
Minahasa Selatan	780,216,60	5,366	109,549	25,277
Minahasa Utara	213,479,18	98,612	2,016,633	148,433
Bolaang Mongondow Utara	22,777,78	0	546	-
Kepulauan Sitaro	0	0	-	-
Minahasa Tenggara	0	0	1130	2,097
Bolaang Mongondow Selatan	2,950	650	-	-
Bolaang Mongondow Timur	36,492,64	1,401,655	-	183,790
Kota Manado	6,880,603,44	2,979,086	14,230	2,375,734
Kota Bitung	956,216,40	33,534	46,128	80,297
Kota Tomohon	154,444,44	0	-	83,686
Kota Kotamobagu	50,111,11	3,692	2,696	63,606
Sulawesi Utara	**10,040,800,77**	**11,566,700**	**2,241,929**	**3,480,026**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara dan DPMPTSP Prov. Sulut 2022.

Untuk tahun 2018–2019 total realisasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis disebabkan dampak Pandemi Covid-19 dan mulai mengalami peningkatan di Tahun 2021.

Sedangkan untuk Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) juga mengalami peningkatan dari Tahun 2018 ke 2019, namun mengalami penurunan pada Tahun 2020 sampai 2021.

Tabel 2.80
Realisasi PMA menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2021

Kabupaten/Kota	2018 (Rp, Juta)	2019 (Rp, Juta)	2020 (Rp, Juta)	2021 (Rp, Juta)
Bolaang Mongondow	46,817,20	387,816	191,862	17,517
Minahasa	2,519,80	6,718	88,477	-
Kepulauan Sangihe	14,90	0	-	-
Kepulauan Talaud	30,070,50	0	-	-
Minahasa Selatan	1,098,60	171,933	20,404	117,693

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)
Minahasa Utara	170,205,60	1,892,829	908,174	1,777,308
Bolaang Mongondow Utara	146	4,698	-	-
Kepulauan Sitaro	0	0	-	-
Minahasa Tenggara	1,254,10	2,014	-	-
Bolaang Mongondow Selatan	0,40	0	50,275	5,057
Bolaang Mongondow Timur	1,447,70	0	26,419	-
Kota Manado	16,116,60	444,757	1,565,607	129,341
Kota Bitung	27,520,90	394,419	149,681	421,596
Kota Tomohon	0	0	4,347	-
Kota Kotamobagu	0	1,918	395	48,18
Sulawesi Utara	**297,214,40**	**3,307,104**	**3,005,640**	**2,468,563**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, dan DPMPTSP Tahun 2022

Melalui data terlihat bahwa realisasi PMA tahun 2020 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Realisasi PMA di Provinsi Sulawesi Utara terbesar ada di Kota Manado pada tahun 2020 dan di kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2021. Faktor yang paling mempengaruhi terjadinya penurunan PMDN dan PMA pada tahun 2020 sampai 2021 adalah dampak pandemi COVID-19, yang diperkirakan pengaruhnya akan masih cukup besar untuk 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun ke depan.

Tabel 2.81
Kinerja DPM PTSP Provinsi Sulawesi Utara

Indikator	Target Akhir RPJMD	Target RPJMD Thn 2020	Capaian Thn 2020
Total Investasi (Rupiah)	12,823,763,200,000	3,750,000,000,000	5,247,569,053,000
Izin Investasi	7,276	1,450	1,485

Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah terkait jumlah investasi di Provinsi Sulawesi Utara, total investasi yang dicapai adalah melampaui **39,95%** dari target tahun **2021**, Untuk capaian jumlah izin investasi di Provinsi Sulawesi Utara adalah **2,4%** diatas target tahun **2021**.

Tabel 2.82
Capaian Kinerja DPM PTSP 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi investasi PMDN (Rupiah)	1,488,173,300,000	10,040,800,770,000	8,259,59600	3,005,639,600,000	3,480,026,700,000
Realisasi investasi PMA	6,447,766,840,000	3,964,359,960,000	3,307,000,000,000	2,241,929,453,000	2,468,563,270,000
Realisasi Izin Investasi	1,467	1,530	1,581	1,485	1,721

Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2022

10) Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pelayanan kepemudaan mencakup usaha penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Capaian kinerja Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.83
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Klub Olahraga (Standar 1/10,000)	8	8	13	-	300
2	Gedung Olahraga (Standar 1/10,000)	15	15	22	-	16
3	Jumlah organisasi pemuda	30	30	11	-	9
4	Jumlah organisasi olahraga	30	30	53	-	63
5	Jumlah kegiatan kepemudaan	30	40	46	-	70
6	Jumlah kegiatan olahraga	30	40	55	-	33
7	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019;	25%	30%	40%	-	75%
8	Prestasi olahraga ditingkat nasional/tingkatin ternasional	5/8	7/8	13/8	-	21/1
9	Prestasi olahraga *paralympic* ditingkat nasional dan tingkat internasional	-	-	-	-	24 Nasional 4 Internasioanl

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022

Considerans c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan pentingnya keolahragaan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Justru karena pertimbangan akan pentingnya keolahragaan tersebut dalam keseluruhan pembangunan nasional dan pengembangan manusia Indonesia, considerans d menegaskan penjaminan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestai, dan amanajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Hal tersebut perlu diatur dalam sebuah sistem keolahragaan nasional.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mendefinisikan "Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan." Sedangkan, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa "Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia,

sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa."

Mengingat pentingnya keolahragaan dalam pembangunan manusia Indonesia, Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk: a.melakukan kegiatan olahraga; b.memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga; c.memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; d.memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan; e.menjadi pelaku olahraga; dan f.mengembangkan industri olahraga."

Pemerintah daerah mempunyai tugas dalam melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Kebijakan nasional yang harus dilakukan pemerinta daerah di daerah ditetapkan di Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang meliputi: a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; b. pembinaan dan pengembangan olahraga; c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga; d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; e. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional; f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; g. pendanaan keolahragaan; h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan; k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga; l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi; m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping; n. pemberian pemberian penghargaan; o. pelaksanaan pengawasan; dan p. evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

a) Pembinaan Olahraga

Pembinaan Olahraga meupakan bagian dan upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang ditujukan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat, serta pengembangan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan Nasional.

Pembinaan Olahraga di Provinsi Sulawesi Utara terbagi 2 (dua) Fungsi, yaitu:

1. Fungsi pendidikan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan adalah Sekolah Khusus Olahragawan (SKO Keberbakatan); dan

2. Fungsi Pendidikan dan Latihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) dan Klub-klub Olahraga Junior yang ada di Kab/Kota se- Sulawesi Utara.

b) Pelatih Yang Bersertifikasi

Pelatih yang Bersertifikat yamg ada di Provinsi Sulawesi Utara berjumlah kurang lebih sekitar 60 orang.

c) Jumlah Atlet Berprestasi

Atlet berprestasi yang ada di Sulawesi Utara diukur dari keberhasilan dalam Multi *Event* maupun Single *Event* Tingkat Internasional Maupun Nasional berjumlah Kurang Lebih 150 orang.

d) Prestasi Olahraga

Prestasi Olahraga untuk atlet Sulut di tingkat Internasional adalah terpilih masuk dalam tim Asian Games seperti Alm, Hengki Lasut dan Eddi Manoppo dan Bill Mondigir serta Vita Lasut dari Cabang Tinju Farand Papendang, Silat Abdul Malik dan Untuk Sea Games dari Cabor Silat Hidayat Limonu, Anggar Hendra tarega, Muayhai Angel Runtukahu, Kick Boxing Brian Lawitan, Tinju Farand Papandang, Ana kawengian Soft Tenis sedangkan Atlet Sulut yang lolos dalam PON Papua berjumlah 160 orang.

11) Perhubungan

Dalam upaya mewujudkan penyediakan layanan transportasi yang efektif, kapasitas mencukupi, aman dan nyaman, perlu didukung dengan sarana dan prasarana serta pelayanan yang prima jasa perhubungan. Untuk layanan transportasi handal perlu sarana dan prasarana baik perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara berdasarkan kewenangan.

Sarana dan prasarana perhubungan darat antara lain terminal penumpang di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut;

Tabel 2.84
Terminal di Provinsi Sulawesi Utara

Tipe Terminal	Terminal
Tipe A (Pusat)	Terminal Bitung
	Terminal Liwas
	Terminal Malalayang
	Terminal Boroko
Terminal Tipe B (Provinsi)	Terminal Karombasan
	Terminal Paal 2
	Terminal Tomohon
	Terminal Tondano
	Terminal Langowan

	Terminal Kawangkoan
	Terminal Amurang
	Terminal Bonawang (Kotamobagu)
	Terminal Airmadidi
	Terminal Likupang
Terminal Tipe C (Kab/Kota)	Terminal Tomohon
	Terminal Tahuna
	Terminal Kauditan
	Terminal Serasi (Kotamobagu)

Berdasarkan Data BPS Prov. Sulut, banyaknya kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara pada tahun 2021 tercatat 1.151.969 unit. Kendaraan bermotor terbanyak adalah jenis sepeda motor sejumlah 881.271 unit dan kemudian jenis kendaraan mobil penumpang sejumlah 183.755 unit. Lalu lintas angkutan laut di Provinsi Sulawesi Utara mencakup beberapa pelabuhan antara lain Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Manado, Pelabuhan Tahuna, Pelabuhan Lirung, Pelabuhan Ulu Siau dan lainnya. Adapun salah satu pelabuhan terbesar adalah Pelabuhan Bitung. Lalu lintas kapal yang keluar masuk melalui Pelabuhan Bitung tahun 2021 sebesar 2.737 unit. Penumpang yang datang dan berangkat dari Pelabuhan Bitung selama tahun 2021 mencapai 52.710 dan 53.109 orang. Sementara jumlah volume barang yang dimuat dan dibongkar di Pelabuhan Bitung selama tahun 2021 mencapai 498.147 dan 766.546 ton. Lalu lintas pesawat yang datang di Bandara Sam Ratulangi Manado sepanjang tahun 2021 sebanyak 6.029.

Adapun Pelabuhan yang merupakan kewenangan Prov. Sulut adalah Pelabuhan pengumpan regional, sebagai berikut;

1) Pelabuhan Karatung
2) Pelabuhan Essang
3) Pelabuhan Mangaran
4) Pelabuhan Rainis
5) Pelabuhan Dapalan
6) Pelabuhan Tamako
7) Pelabuhan Para
8) Pelabuhan Bukide
9) Pelabuhan Matutuang
10) Pelabuhan Kahakitang
11) Pelabuhan Biaro
12) Pelabuhan Buhias
13) Pelabuhan Torosik
14) Pelabuhan Amurang
15) Pelabuhan Belang
16) Pelabuhan Munte
17) Pelabuhan Mantehage
18) Pelabuhan Naen

19) Pelabuhan Gangga
20) Pelabuhan Bangka
21) Pelabuhan Talise
22) Pelabuhan Likupang
23) Pelabuhan Kema
24) Pelabuhan Tanjung Sidupa
25) Pelabuhan Kotabunan

Kondisi saat ini Pelabuhan pengumpan regional belum diserahkan oleh pemerintah pusat, dan masih berproses untuk pengalihan Personil, Pembiayaan, sarana dan Prasaran dan Dokumen (P3D).

12) Informasi dan Komunikasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sebelum lahir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE dikenal dengan istilah E-government atau Electronic Government.

Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengikuti Evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan predikat Baik dengan nilai indeks 2.84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.85
Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021

Indeks SPBE	:	**2.84**
Predikat SPBE	:	**Baik**
Nilai Indeks		
Domain Kebijakan SPBE	:	1.8
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	:	1.8
Domain Tata Kelola SPBE	:	1.9
Perencanaan Strategis SPBE	:	1.75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	2.5
Penyelenggara SPBE	:	1
Domain Manajemen SPBE	:	1.82
Penerapan Manajemen SPBE	:	2.13
Audit TIK	:	1
Domain Layanan SPBE	:	4.03
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	:	4.7
Layanan Publik Berbasis Elektronik	:	3

Sumber: Dinas KIPS Provinsi Sulut, 2021

Evaluasi SPBE ini bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah dengan mengacu pada 3 (tiga) penerapan SPBE, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing

13) Statistik

Indikator keberhasilan kinerja bidang Statistik ditentukan oleh tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi dan produk buku data ditiap kabupaten, juga tersedianya buku PDRB.

14) Persandian

Capaian Indikator bidang Persandian diukur melalui persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Pada Kinerja RPJMD 2016-2021 belum ada data tersaji dalam evaluasi capaian hingga 2020.

Selain Permendagri, evaluasi Kinerja mengacu pada aturan yang baru yaitu Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah.

15) Kebudayaan

Considerantes Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa negara berkehendak memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional. Dalam pertimbangannya, keberagaman kebudayaan dipahami dan diterima sebagai kekayaan dan identitas bangsa dan merupakan bagian integral dari proses memajukan kebudayaan nasional Indonesia, Karena itu, usaha dan langkah strategis melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dijelaskan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.

Berdasarkan Penjelasan atas Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium, Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Dalam kehidupan sosial, salah satu tujuan diciptakannya seni adalah untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Begitu pula dengan hasil karya dan cipta seni yang juga mengalami perkembangan, sesuai dengan kebudayaan yang ada di masyarakat. Disini akan disajikan kegiatan kesenian yang mencakup berbagai jenis dan cabang seni tersebut.

Aspek yang disajikan mencakup akses, partisipasi, apresiasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan seni dan budaya serta tradisi lisan. Budaya masyarakat Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang terdiri dari: Suku Minahasa, Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Bolaang, dan Suku Mongondow, Masing-masing kelompok etnis tersebut masih terbagi pula dalam subetnis yang memiliki bahasa daerah, tradisi, dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat semangat Mapalus, Mapaluse, dan Moposad, Dilihat dari unsur budaya bahasa, maka Sulawesi Utara memiliki tiga kelompok bahasa daerah yaitu:

a. Bahasa Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, dan Bantik.
b. Bahasa Sangir Besar, Siau, dan Talaud.
c. Bahasa Boroko, Bolangitang, Bolaang, Mongondow, Bintauna, Kaidipang, Bolango, dan Bantik Mongondow.

Namun demikian, Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Sulawesi Utara. Seni Budaya di Sulawesi Utara cukup berkembang yang tersebar di masyarakat luas. Hal ini dikembangkan melalui program menggali, menginventarisasi keunggulan, dan keragaman seni budaya yang dikemas dalam pelaksanaan festival seni budaya berskala nasional dan internasional.

Tabel 2.86
Perkembangan Seni, Budaya Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Grup Seni Musik Aktif	40	50	60	70	70
2	Grup Seni Tari Aktif	20	20	20	30	30
3	Jumlah teater/sastra Aktif	25	25	30	35	35
4	Gedung Kesenian	2	2	3	3	3

5	Apresiasi terhadap maestro ditiap cabang seni	5	5	5	6	6
6	Seniman Lokal	3	3	5	7	7
7	Warisan Takbenda	2	3	3	9	9
8	Apreasiasi terhadap pelaku warisan takbenda	3	3	6	9	9
9	Pendataan koleksi museum sulut	20	20	20	30	30

Sumber: Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, 9 indikator kinerja pembangunan daerah menyangkut seni budaya tercapai sesuai target. Demikian juga pada tahun 2018, semua target dari setiap indikator tercapai, bahkan indikator "apresiasi terhadap warisan tak benda" melampaui target (target = 3; capaian = 6), Pada tahun 2019, 7 indikator mencapai target dan dua indikator melampaui target, yaitu "warisan tak benda" dan "apresiasi terhadap pelaku warisan tak benda".

Sebagai salah satu bentuk kebudayaan manusia, kesenian berbeda dengan hasil budaya lainnya. Kesenian merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang mengandung nilai estetika tinggi dan sarat dengan pesan moral yang dikemas dalam bentuk simbol-simbol. Karya seni yang dihasilkan terdiri dari berbagai macam jenis pertunjukan, antara lain seni tari, seni teater, seni musik dan lain-lain.

Ketertarikan masyarakat terhadap jenis-jenis pertunjukan tersebut berbeda-beda dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti umur, jenis kelamin, tipe daerah dan latar belakang budaya.

Tabel 2.87
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas yang Menonton Pertunjukan/Pameran Seni baik secara Langsung maupun tidak Langsung selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis Kesenian dan Tipe Daerah, tahun 2018

Jenis Kesenian	Perkotaan	Desa	Perkotaan + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Film	51,28	63,33	57,06
Seni Musik/Suara	37,01	49,72	43,11
Seni Rupa	4,08	6,03	5,01
Seni Sastra	4,12	6,97	5,49
Seni Tari Budaya Indonesia	15,81	15,91	15,86
Seni Teater/Pewayangan	5,01	3,63	4,35
Lainnya	9,89	6,29	8,16

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Apresiasi terhadap pertunjukkan/pameran seni salah satunya dapat dilihat berdasarkan banyaknya penduduk menonton pertunjukkan/pameran seni. Diantara beberapa pertunjukan/pameran seni, seni film (57,06 persen) merupakan pertunjukan seni yang paling banyak ditonton baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh penduduk Sulawesi Utara berumur 10 tahun ke atas selama tiga bulan terakhir menurut data BPS, Susenas MSBP 2018. Minat masyarakat terhadap sinematografi didukung oleh fasilitas menonton film yang

semakin mudah diakses membuat seni film lebih banyak ditonton dibandingkan seni musik/suara (43,11 persen). Pelestarian pertunjukan/pameran seni lainnya perlu ditingkatkan agar peminatnya tidak berkurang atau bahkan sampai punah.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan tipe daerah, persentase penduduk yang menonton film lebih banyak di perdesaan (63,33 persen banding 51,28 persen). Demikian juga untuk pertunjukan seni musik/suara, penduduk yang lebih banyak penonton ada di perdesaan (49,72 % banding 37,01 %).

Tabel 2.88
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Terlibat Langsung Pertunjukan/Pameran Seni Secara Langsung Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis Kesenian Dan Tipe Daerah, 2018

Jenis Kesenian	Perkotaan	Desa	Perkotaan + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Film	0,15	0,08	0,12
Seni Musik/Suara	2,99	1,16	2,11
Seni Rupa	0,03	0,21	0,12
Seni Sastra	0,02	0,09	0,06
Seni Tari Budaya Indonesia	0,48	0,44	0,46
Seni Teater/Pewayangan	0,05	0	0,03
Lainnya	0,04	0	0,02

Sumber: BPS, Susenas MSBP, 2018.

Tabel ini memperlihatkan bahwa dalam tiga bulan terakhir persentase penduduk 10 tahun ke atas yang terlibat dalam pertunjukan seni secara langsung masih sangat rendah. Pertunjukan seni musik/suara menjadi pilihan pertama bagi penduduk untuk terlibat secara langsung yakni sebesar 2,11 persen.

Kemudian disusul dengan seni tari budaya Indonesia yakni sebesar 0,46 persen, Di posisi ketiga ada seni film dan seni rupa dengan persentase yang sama sebesar 0,12 persen.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya. Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Peninggalan sejarah dan warisan budaya merupakan cagar budaya yang bersifat kebendaan (*tangible*) yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan, Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah berkewajiban melaksanakan kebijakan pelestarian cagar budaya salah satunya dengan berasaskan kemanfaatan sehingga cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan kesejahteraan rakyat baik dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata, Salah satu apresiasi masyarakat terhadap warisan sejarah dan budaya adalah dengan mengunjungi peninggalan sejarah atau warisan budaya.

Tabel 2.89
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/ Warisan Budaya selama setahun terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018

Tipe Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	13,43	14,24	13,84
Perdesaan	5,87	6,43	6,14
Perkotaan + Perdesaan	9,74	10,57	10,15

Sumber: BPS, Susenas MSBP, 2018.

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya hanya sekitar 10,15 persen. Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, persentase penduduk di perkotaan yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya (13,84 persen) lebih tinggi dari di perdesaan (6,14 persen), sementara dari sisi jenis kelamin penduduk perempuan (10,57 persen) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (9,74 persen). Kecilnya minat masyarakat untuk mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya salah satunya karena kurang memadainya fasilitas yang memberikan tempat khusus terhadap peninggalan bersejarah dan kurangnya sosialisasi mengenai tempat yang menyimpan peninggalan bersejarah di Sulawesi Utara

Salah satu arahan utama UU. No. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan adalah disediakannya oleh tiap daerah kabupaten/kota dan provinsi suatu naskah road map kebijakan kebudayaan yang disebut Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).

Grafik 2.14

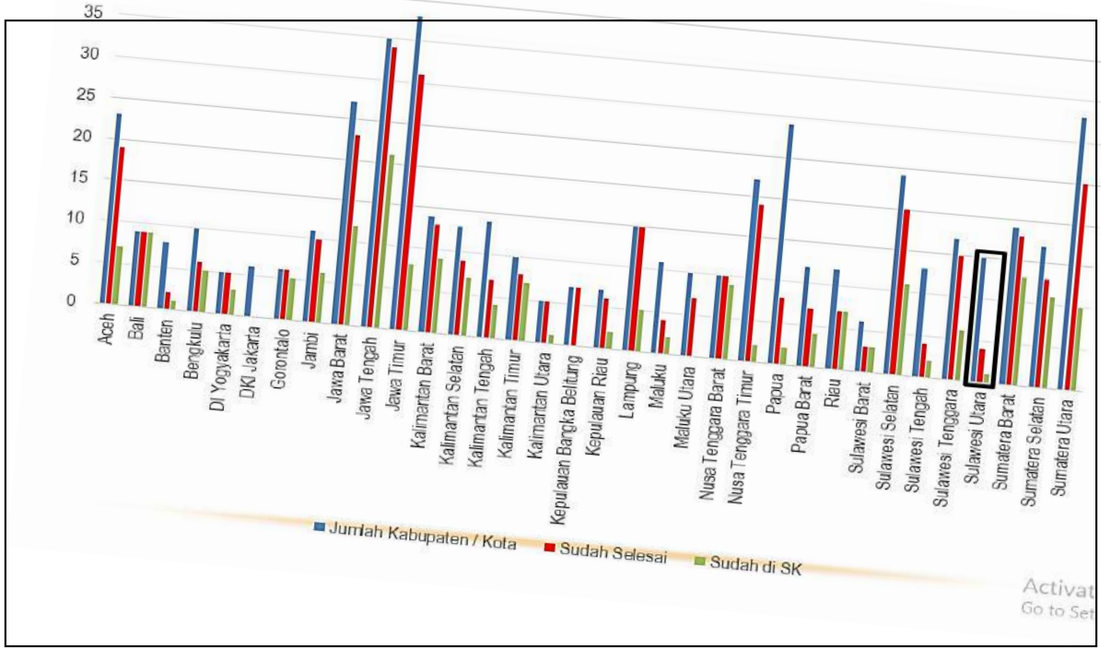

Jika melihat grafik yang disusun berdasarkan capaian tiap provinsi di atas, dapat diketahui bahwa dari 15 jumlah kabupaten/kota, baru 4 daerah (26%) yang membuat naskah PPKD dan baru 1 daerah (6,67%) yang meng-SK-kan naskah tersebut.

Pada tahun 2020, dilakukan berbagai usaha untuk memperbaiki capaian di atas melalui berbagai kegiatan dan sosialisasi. Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah yang telah menyelesaikan naskah tersebut dalam tahun 2020. Begitu pula halnya mengusahakan dibuatnya naskah PPKD tingkat provinsi. Namun, usaha tersebut belum dapat dilanjutkan karena adanya instruksi bahwa naskah PPKD tingkat provinsi hanya dapat dibuat jika sudah ada minimal 80% kabupaten/kota yang menyelesaikan naskahnya. Dengan kata lain untuk Sulawesi Utara membutuhkan setidaknya 12 kabupaten/kota yang telah menyelesaikan naskah PPKD, sebelum naskah tingkat provinsi dapat dilanjutkan pembuatannya dan di SK-kan.

Hingga pertengahan tahun 2021, capaian atas selesainya naskah PPKD sudah mencapai 6 kabupaten/kota atau 40%, yaitu: Bitung, Bolsel, Talaud, Bolmut, Tomohon, Kotamobagu, yang berarti meningkat 14% dari posisi semula. Dimana telah ada 2 kabupaten/kota (13,3%) yang telah meng-SK-kan naskah ini. Dari data tersebut, setidaknya diperlukan lagi 6 kabupaten/kota untuk menyelesaikan naskah dimaksud.

Pada proses ini, hingga pertengahan tahun 2021, Bolaang-Mongondow merupakan daerah yang sementara melaksanakan dan menargetkan naskah tersebut selesai dalam tahun 2021.

Grafik 2.15
Diagram Progres naskah PPKD Sulut hingga Juni 2021

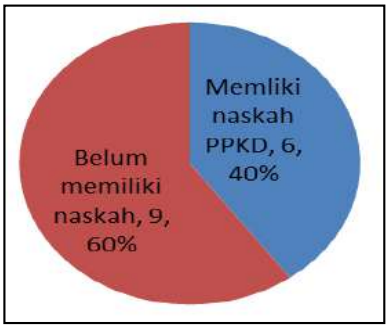

Kebudayaan Sulawesi Utara Berdasar Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sendiri secara umum merupakan indeks yang disusun untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan secara nasional maupun di tingkat provinsi. IPK bertujuan untuk memotret capaian pembangunan kebudayaan suatu wilayah, bukan memotret nilai budaya di daerah tersebut.

Grafik 2.16
Indeks Pembangunan Kebudayaan Menurut Provinsi Tahun 2018

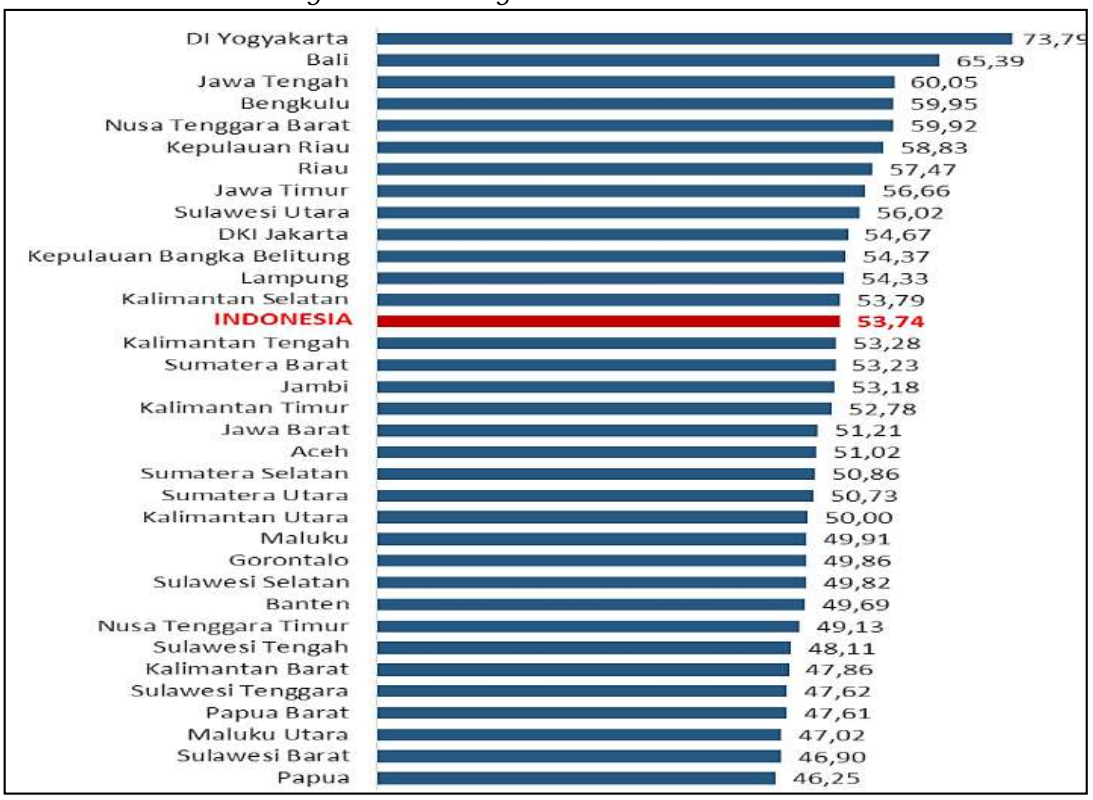

Sumber: Buku Indeks Pembangunan Kebudayaan 2018.

Secara umum IPK Sulawesi Utara berada di atas IPK Nasional (53,74), tepatnya ada di peringkat 9 dengan nilai 56,02. Artinya ada perbedaan kira-kira lebih dari 3 angka dengan IPK Nasional. Namun begitu, jika dibandingkan dengan IPK tertinggi yang dipegang provinsi

DI Yogyakarta (73,76) ada disparitas sekitar 20 angka dan dengan Bali (65,39) sekitar 12 angka. Sehingga, secara umum, Sulawesi Utara memiliki kesenjangan yang cukup jauh ke arah tidak menguntungkan dibandingkan dua provinsi dimaksud. Secara bersamaan, terlihat pula bahwa angka disparitas tersebut jauh lebih banyak dibandingkan perbedaan dengan provinsi dengan IPK terendah Papua (46,25), yaitu hanya berjumlah 7 angka. Artinya, secara kuantitatif, nilai IPK Sulawesi Utara ke arah nilai terendah lebih dekat dibandingkan ke arah nilai tertinggi.

IPK sendiri disusun berdasarkan 7 dimensi, yaitu: (1) ekonomi budaya; (2) pendidikan, (3) ketahanan sosial-budaya; (4) warisan budaya; (5) ekspresi budaya; (6) budaya literasi; (7) gender. Dimensi-dimensi tersebut membuat perincian mengenai posisi IPK semakin detail dalam aspek-aspek yang lebih spesifik. Capaian Sulawesi Utara sendiri dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan dimensi-dimensi dimaksud, maka diketahui bahwa ada 3 dimensi yang masuk tiga besar secara nasional, yaitu: Gender (peringkat 1); Ketahanan Sosial Budaya (Peringkat 2); Ekspresi Budaya (peringkat 3).

Tabel 2.90

II [illegible] tahun 2018

Dimensi	Nilai Indeks		Ranking Sulawesi Utara
	Indonesia	Sulawesi Utara	
Ekonomi Budaya	30,55	33.67	9
Pendidikan	69,67	72.41	11
Ketahanan Sosial Budaya	72,84	81.12	2
Warisan Budaya	41,11	33.06	26
Ekspresi Budaya	36,57	51.00	3
Budaya Literasi	55,03	49.94	23
Gender	54,97	71.77	1
IPK Total	53,74	56.02	9

Sumber: Buku Indeks Pembangunan Kebudayaan 2018.

Terdapat dua dimensi yang lebih rendah dari capaian nasional, yaitu: Warisan Budaya (peringkat 26) dan Budaya Literasi (peringkat 23). Untuk warisan budaya sendiri, ada jarak kurang-lebih 8 angka antara indeks nasional (41,11) dengan Sulawesi Utara (33,06). Artinya, perlu kerja cukup keras untuk memperbaiki nilai ini ke arah sejajar dengan capaian nasional. Secara lebih spesifik, nilai tersebut hadir karena rendahnya indikator soal presentasi penetapan benda, bangunan, struktur dan situs cagar-budaya di Sulawesi Utara.

Capaian nasional berada pada posisi (3,17 %), sementara performa Sulawesi Utara hanya mencapai (2,92%), jika dibandingkan dengan target capaian indikator nasional yaitu 50%. Dengan kata lain, Sulawesi Utara hanya mampu mencapai sekitar 6% dari target nasional tersebut. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki nilai tersebut, adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait (baik horizontal maupun vertikal), kemudian meningkatkan akselerasi secara revolutif melalui mekanisme hukum dalam menetapkan benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya sebagai warisan daerah maupun nasional.

Dimensi Budaya Literasi Sulawesi Utara menempati posisi lebih rendah dari capaian nasional, yaitu 49,94, dibandingkan 55,03. Secara lebih spesifik, nilai tersebut hadir karena kontribusi dari pengunjung perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat yang di bawah capaian nasional. Sulawesi Utara mencapai 8,32% berbanding dengan 12,16% untuk capaian nasional). Target nasional untuk indikator ini sendiri adalah agar dapat mencapai 25%. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu mendorong inovasi terkait perpustakaan dan TBM agar dapat menarik pengunjung secara signifikan, termasuk menggandeng peran serta masyarakat untuk peningkatan kinerjanya.

Dimensi Ekonomi Budaya berada pada posisi lebih tinggi capaian nasional yaitu mencapai 33,67 dibandingkan 30,55 dan berada pada peringkat 9 secara nasional. Pada indikator penyusun dimensi ini, yaitu keterlibatan pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan di Sulawesi Utara yaitu mencapai (0,34%), sehingga berada pada posisi lebih tinggi 0,03% dibandingkan dengan capaian nasional (0,31%). Namun begitu hal ini perlu ditingkatkan dengan menciptakan suatu ekosistem ekonomi budaya yang kondusif dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi warganya, hal tersebut karena target capaian nasional berada pada rasio nilai 1% yang merupakan nilai maksimal, berarti Sulawesi Utara baru mampu mencapai sekitar 1/3 dari target nasional tersebut.

Dimensi Pendidikan berada pada peringkat 11 dari 34 provinsi di Indonesia dan Sulawesi Utara (72,41) memiliki nilai yang lebih tinggi dari capaian nasional (69,67). Namun begitu, jika melihat lebih dalam, indikator penyusun dimensi ini yaitu ketersediaan guru muatan lokal yang mengajar bahasa dan kesenian daerah justru lebih rendah dari capaian nasional dengan jarak 0,12%, dimana Sulawesi Utara mencapai 25,25% dan nasional mencapai 25,37%. Sementara, target nasional berada pada angka maksimal 45%. Karena itu, perlu didorong penyediaan lebih banyak guru muatan lokal dan ekstrakurikuler bahasa dan kesenian daerah. Secara simultan, jika persentase ini naik maka akan pula menaikkan dimensi Ekonomi Budaya.

Dimensi Gender Sulawesi Utara merupakan yang tertinggi secara nasional (71,77 berbanding 54,97) yang merupakan indikasi baiknya pembangunan kebudayaan dalam bidang keterwakilan gender. Namun begitu, angkatan kerja perempuan hanya mencapai kira-kira 56,52% atau masih sekitar setengah dari angkatan kerja laki-laki. Dimana target capaian nasional untuk indikator ini mencapai 62,74%.

Indeks dimensi Ketahanan Sosial-Budaya Sulawesi Utara memiliki nilai 81,12, berada di peringkat 2 secara nasional dan lebih tinggi dari capaian nasional (72,84). Indikator penyusun dimensi inipun menempatkan Sulawesi Utara lebih tinggi dari nasional (24,89 berbanding 23.08), dimana capaian barusan merupakan indikator yang berhubungan dengan rumah tangga yang khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir. Karena itu, persoalan rasa aman ini perlu ditingkatkan karena target capaian indikator mencapai 50%. Dimana baik Sulawesi Utara maupun nasional bahkan tidak mencapai setengah nilai tersebut.

Dimensi Ekspresi Budaya Sulawesi Utara menduduki peringkat ke 3 secara nasional dan lebih tinggi dari capaian nasional. Nilai Sulawesi Utara mencapai 51,00, dibandingkan dengan capaian nasional 36,57. Indikator dimensi ini yang tergambar dari persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni lebih tinggi dari nasional (2,58% berbanding 1,91%). Namun begitu, indikator ini perlu ditingkatkan dengan memperhatikan kesejahteraan dan keberlangsungan pertunjukan seni. Hal mana karena target nasional mencapai 20%.

16) Perpustakaan

Sebagai salah satu sarana penting dalam upaya belajar mandiri menuju masyarakat cerdas dan berkepribadian, penyediaan sarana Perpustakaan dipandang penting untuk dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki Perpustakaan daerah dengan jumlah buku koleksi per tahun bertambah di mana data awal berjumlah 64,007 dan data terakhir berjumlah 68,541 buku. Target hingga 2021 adalah 67,554 buku, banyaknya exemplar buku secara keseluruhan hingga tahun 2019 sebanyak 254,371.

Jumlah pengunjung per tahun dari tahun 2016 hingga 2019 sebanyak 7543 atau mengalami kenaikan secara eksponensial dengan target hingga 2021 adalah 7846. Sementara masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan mengalami peningkatan di tahun 2016 hingga 2018 sebanyak 161 anggota namun di tahun 2019 sedikit mengalami

penurunan menjadi 115 orang, namun target capaian secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91
Jumlah Kunjungan, Jumlah anggota, Jumlah buku dan banyaknya exemplar Perpustakaan Daerah Sulawesi Utara tahun 2007 – 2021

Tahun	Jumlah Buku	Eksemplar	Pengunjung	Anggota	Buku yang dipinjam
2007	53,889	166,211	17,311	498	10,423
2008	54,270	167,731	13,141	396	7,329
2009	56,463	177,311	11,458	484	5,194
2010	57,605	183,879	11,192	289	5,192
2011	58,035	201,079	9,417	537	4,484
2012	60,646	214,334	9,573	536	4,615
2013	61,441	220,214	8,066	426	3,831
2014	61,782	222,975	4,588	310	1,593
2015	64,348	234,714	4,826	196	12,721
2016	66,914	246,453	5,826	161	1,320
2017	67,554	251,477	7,046	162	3,793
2018	67,554	251,477	7,345	167	1,359
2019	68,541	254,371	7,543	115	729
2020	68,541	254,371	1,450	253	203
2021	68,541	254,371	859	253	153

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulut 2020.

Hasil evaluasi kinerja perpustakaan khususnya pada pencapaian koleksi jumlah buku perpustakan melampaui target sementara jumlah pengunjung mengalami penurunan drastis dikarenakan adanya pandemi *COVID-19*, di mana terjadi pembatasan aktivitas masyarakat pada umumnya sehingga tidak mencapai target.

Di bidang perpustakaan dari 2 indikator yang ditargetkan terdapat 1 indikator yang belum mencapai target yakni jumlah pengunjung perpustakaan per tahun. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan teknologi semakin memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi.

Sumber ilmu pengetahuan yang pada masa lalu berada di ruang-ruang perpustakaan, kini berada dalam genggaman gawai. Internet menjadi jalan pintas bagi publik untuk mengonsumsi informasi. Popularitas perpustakaan di tengah masyarakat akan semakin pudar. Minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan terus mengalami penurunan. Hal itu setidaknya tampak dari merosotnya jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan selama lima tahun terakhir. Adanya kondisi akses internet atau perkembangan *Internet of Things* yang begitu cepat saat ini dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan minimnya pengunjung Perpustakaan Daerah.

17) Kearsipan

Dalam menunjang layanan dan operasional kearsipan di Propinsi Sulawesi Utara. ketersediaan SDM pengelola Arsip penting diupayakan untuk menyelamatkan dokumen dokumen penting milik daerah.

Kegiatan terkait peningkatan dan pembinaan dalam pengelolaan Kearsipan Daerah di Propinsi Sulawesi Utara telah diupayakan Pemerintah terutama penataan arsip dokumen-dokumen daerah yang penting. Pentingnya kegiatan terkait sosialisasi dan pembinaan yaitu untuk memperlengkapi pengetahuan SDM agar menjadi unggul dalam mengelola arsip di setiap perangkat daerah Sulawesi Utara. Selain itu perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kearsipan. Pembina SDM di setiap PD agar tertata sesuai klasifikasi arsi. Penataan arsip penting untuk menghindari permasalahan dalam penyalahgunaan dokumen dari pihak luar pemerintah daerah, sebagai contoh dokumen kepemilikan tanah, pembuktian sejarah atau tokoh sejarah.

C. Fokus Urusan Layanan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

a. Persentase pertumbuhan subkategori perikanan terhadap PDRB

Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sulawesi Utara. Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB tahun 2016 sebesar 7,59 persen, kemudian meningkat menjadi 7,84 persen pada tahun 2019. Sementara itu, pada tahun 2020 Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB menjadi 7,23 persen.Di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 7,89 persen

Tabel 2.92
Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB

INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB (Atas dasr Harga berlaku)	7,60	7,64	7,86	8,13*	7,89

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

.

2) Pariwisata

a. Jumlah Wisatawan Mancanegara

Seiring dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang menjadi tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah dipandang perlu untuk segera mengembangkan sektor lain yang terbarukan untuk menstimulasi pertumbuan ekonomi.

Pariwisata dianggap menjadi sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan selain karena mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, juga cukup strategis bagi suatu negara atau daerah karena pariwisata dipandang sebagai penunjang sektor lainnya.

Tabel 2.93
Target dan Capaian Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kunjungan wisatawan mancanegara	79377	122100	129588	23031	15239

Sumber: BPS Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2016, yakni berjumlah 40.624 wisatawan, dan di tahun 2019 meningkat sekitar 300% mencapai 129.588 wisatawan. Di tahun 2020 Wisman yang datang ke Provinsi Sulawesi Utara sampai pada bulan Desember hanya mencapai 23,031 orang atau menurun sebesar 82,23 persen. Begitupula di tahun 2021 wisman yang datang berkunjung ke Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan hanya mencapai 15239 orang dari periode di tahun sebelumnya dan paling besar wisman yang berkunjung di Sulawesi Utara berasal dari Tiongkok, yaitu sebesar 20.634 orang atau 89,59 persen dari seluruh wisman yang berkunjung. Berkurangnya pengunjung wisman di tahun 2020 dikarenakan adaya pandemi *COVID-19*.

3) Pertanian

a) Persentase Pertumbuhan Subkategori Tanaman Pangan Terhadap PDRB

Subkategori tanaman pangan meliputi komoditi: padi dan palawija (jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedele, ubi kayu, ubi jalar, dan palawija lainnya).

Tabel 2.94
Persentase Pertumbuhan Subsektor Tanaman PanganTerhadap PDRB

INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (Atas dasr Harga berlaku)	6,11	2,46	-0,35	-4,82	-7,10

Sumber: BPS Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021.

Pertumbuhan Subsektor ini naik dari tahun 2016 (5,74) ke 2017 (6,11) tetapi di tahun 2018-2021 menunjukkan tren penurunan hingga mencapai -7,10 ditahun 2020.

b. Persentase Pertumbuhan Subsektor Peternakan terhadap PDRB

Pertumbuhan sub kategori peternakan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 7,42 persen menjadi 7,70 persen pada tahun 2017,Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 6,49 dan terjadi akselerasi percepatan menjadi 9,76 persen di

tahun 2019. Di tahun 2020 di tengah pandemic covid 19 mengalami penurunan yang sangat signifikan hinga menjadi -1,95 persen. Di tahun 2021 walaupun masi dalam keaadan pandemic covid 19 mengalami kenaikan menjadi 2,92 persen.

Tabel 2.95
Kontribusi dan Pertumbuhan Sub Kategori PeternakanTerhadap PDRB

INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB (ADHB)	7,70	6,49	9,76	-1,95	2,92

Sumber: BPS-Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021.

c. Nilai Tukar Petani

Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP) Provinsi Sulawesi Utara, dapat disajikan ke dalam grafik sebagai berikut:

Tabel 2.96
Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Desember 2021

Perubahan Nilai It, Ib, NTP dan NTUP antar Provinsi di Pulau Sulawesi, Desember 2021

Provinsi	I_t		I_b		NTP		NTUP	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Sulawesi Utara	121,30	1,12	109,76	1,39	110,51	-0,26	111,68	1,02
Sulawesi Tengah	115,08	1,43	111,17	0,81	103,51	0,61	105,12	1,24
Sulawesi Selatan	108,25	0,85	107,86	0,35	100,37	0,50	101,19	0,78
Sulawesi Tenggara	108,73	0,58	107,57	0,32	101,08	0,26	100,78	0,18
Gorontalo	114,22	2,35	108,17	1,18	105,59	1,16	108,55	2,23
Sulawesi Barat	142,50	0,32	109,90	0,84	129,66	-0,52	133,13	-0,01

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022.

Jika dilihat perbandingannya dengan provinsi lain yang ada di Sulawesi, maka NTP dan NTUP di Provinsi Sulawesi Utara masih berada di bawah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Barat, dengan besaran NTUP (111,68) lebih besar dari NTP (110,51).

Tabel 2.97
Nilai Tukar Petani Prov. Sulawesi Utara Tahun 2017-2021

Bulanan tanpa Tahunan	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	92,89	93,50	96,38	103,11	102,26
Februari	91,41	91,15	95,85	103,87	101,62
Maret	89,93	91,92	95,64	104,59	102,27
April	90,28	91,37	96,35	104,20	103,47
Mei	90,84	92,14	94,49	105,04	105,54
Juni	91,32	92,90	95,09	104,76	108,09
Juli	89,55	92,86	94,49	105,50	108,65
Agustus	90,30	93,55	95,74	105,32	109,44

Bulanan tanpa Tahunan	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan				
	2017	2018	2019	2020	2021
September	90,82	94,32	96,15	104,41	109,43
Oktober	92,20	96,01	95,57	105,72	109,28
November	92,21	95,98	94,86	105,59	110,80
Desember	93,25	96,52	103,33	105,72	110,51

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021-2022.

4) Perkebunan

a) Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB

Tanaman perkebunan yang diusahakan di Sulawesi Utara yaitu kelapa, Tanaman perkebunan yang diusahakan di Sulawesi Utara yaitu kelapa, cengkih, pala, kopi, kakao, vanili, jambu mete, cassiavera, lada, kemiri, aren, jarak, sagu dan abaka.

Pada tahun 2016, pertumbuhan subsektor perkebunan terhadap PDRB sebesar 2,34 persen, kemudian meningkat pada tahun 2017 sebesar 2,28 persen dan turun kembali pada tahun 2018 menjadi 0,19 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 naik menjadi 5,39 persen. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 4,76 persen, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 4,85 persen.

Tabel 2.98
Persentase Pertumbuhan Subsektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB

INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	2,28	0,19	5,39	4,76	4,85

Sumber: BPS-Sulawesi Utara Dalam Angka, 2022.

5) Kehutanan

a) Persentase Pertumbuhan Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB

Subkategori kehutanan dan penebangan kayu meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun, getah, dan akar, termasuk jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak.

Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Tabel 2.99
Persentase Pertumbuhan Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB

INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (Atas dasar Harga berlaku)	-1,93	0,15	-4,63	-1,11	0,39

Sumber: BPS Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021.

Pertumbuhan Sub sektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDRB menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu empat tahun (2016-2019). Pada tahun 2017, pertumbuhan 4,36 persen, turun menjadi -1,93 persen di tahun 2017. Di tahun 2018, naik sedikit menjadi 0,15 dan di tahun 2019, mengalami penurunan mencapai -4,63 persen. Mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi -1,11 dan kembali meningkat ditahun 2021 menjadi 0,39 persen.

b) Indeks Tutupan Hutan

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunya fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuna dan teknologi. Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Indeks Tutupan Hutan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sulawesi Utara.

6) Energi dan Sumber Daya Mineral

a) Rasio Elektrifikasi

Ketersediaan pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor perekonomian (industri, perdagagangan, dan sebagainya). Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah teraliri listrik dengan total rumah tangga, Rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.100
Rasio Elektrifikasi di Sulawesi Utara

INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Elektrifikasi	94,47%	92%	98%	99%	99,99%

Sumber: Capaian Kinerja sector ESDM tahun 2021.

Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2017 hingga tahun 2020 cenderung meningkat, yaitu dari 94,47% pada tahun 2017 menjadi sebesar 99% pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pula jumlah pelanggan, yang dapat menikmati pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari. Hal ini dibuktikan dengan naiknya presentase Rasio Elektrifikasi pada tahun 2021 yakni menjadi 99,99% dimana secara tidak langsung memberikan dampak pada capaian kinerja dari masing-masing pelanggan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.

b) Sumber Daya Mineral

Produksi mineral logam khususnya emas di Sulawesi Utara bergantung pada jumlah IUP dan KK tahap Operasi Produksi. Jumlah IUP dan KK tidak mengalami penambahan sehingga produksi tahunan tidak mengalami peningkatan. Produksi emas tiap IUP dan KK juga dibatasi sesuai dengan Studi Kelayakan yang disetujui Pemerintah.

Di Provinsi Sulawesi Utara IUP Komoditas Non Logam Operasi Produksi hanya PT. Sulut Solog Tambang. Adapun data jumlah produksi pada tahun 2021 yakni emas sebanyak 89,290.00 OZ dan perak 29,666.00 OZ.

Tabel 2.101
Sumber Daya Mineral di Sulawesi Utara

NO	INDIKATOR	TARGET / CAPAIAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Logam (OZ)	TARGET	101,858.22	122,229.83	146,675.83	176,010.99	211,213.19
		CAPAIAN	-	-	97.816.00	-	emas 89,290.00 OZ
							perak 29,666.00 OZ
2	Produksi Non Logam (m3)	TARGET	12,512,655	15,015,186	8,018,223	21,621,867.84	25,946.241.41
		CAPAIAN	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara

7) Perdagangan

Kondisi perkembangan perdagangan di Provinsi Sulawesi Utara selang tahun 2017–2019 sebelum adanya pandemi *COVID-19* dan di tahun 2020 pada saat pandemi *COVID-19* hingga tahun 2021 saat gelombang kedua, tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 2.102
Neraca Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Ekspor (Juta US $)	972,709	974,8	842,02	776,31	1.117,29
Impor (Juta US $)	214,96	163,66	288,12	148,21	97,17
Neraca Perdagangan	757,749	811,14	553,9	628,08	987,24

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Data menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara masih memiliki net ekspor (surplus neraca perdagangan), namun sempat berkurang pada tahun 2019. tahun 2017 mencapai 757,74 juta US$ dan pada tahun 2019 hanya 553,9 juta US$ atau turun sebesar 26,05%. Di Tahun 2020 meskipun dalam pandemi Covid-19 mengalami penurunan disisi ekspor sebesar 17,61% dan terjadi penurunan impor sebesar 74,7%%. di Tahun 2021 masih dalam pandemi COVID-19 mengalami peningkatan ekspor mencapai 1.117,29 Juta US$ atau naik sebesar 43,94%.

Grafik 2.17
Lima Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sulawesi Utara dengan Nilai Terbesar (US $)
EKSPOR

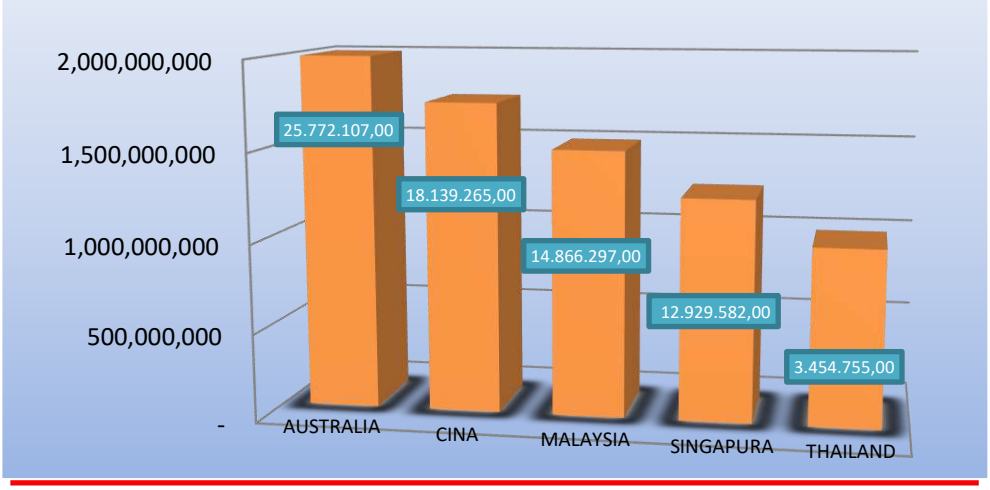

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022.

Dilihat dari tabel di atas, lima Negara tujuan yang menyumbang nilai ekspor cukup besar ke Sulawesi Utara tahun 2021 yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Belanda, Jepang, dan Singapura.

Grafik 2.18
Lima Negara Tujuan Impor Provinsi Sulawesi Utara dengan Nilai Terbesar (US $)
IMPOR

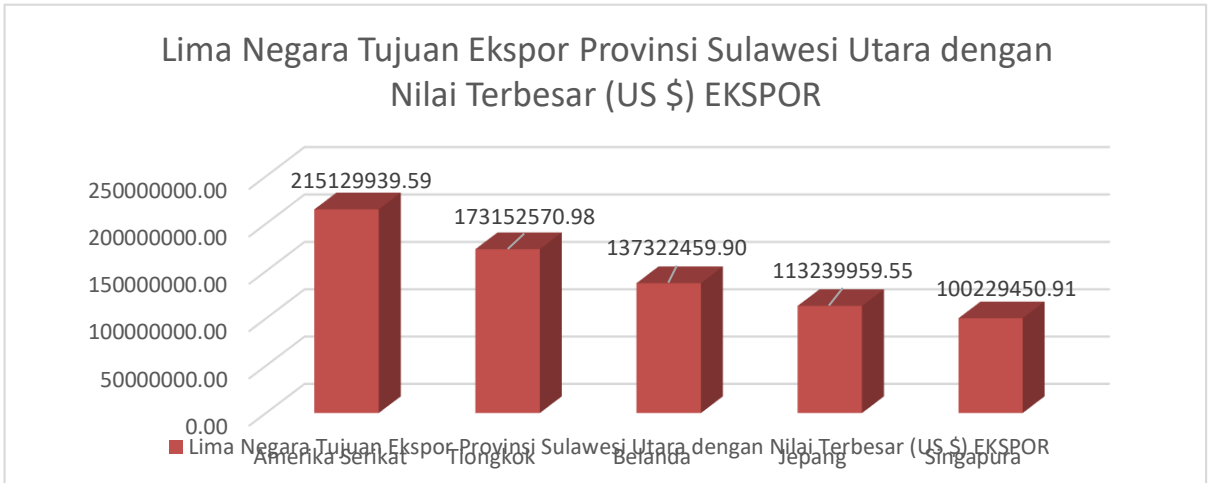

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Dari lima negara asal yang menyumbang nilai impor yang cukup besar ke Sulawesi Utara tahun 2021 yaitu Australia, Cina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Namun negara yang mengalami pertumbuhan impor terbesar adalah negara Australia.

Tabel 2.103
Capaian Kinerja Perindustrian dan Perdagangan 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai Ekspor Produk Industri	-4,74	0,14	-21,22	1,18%	39.65%
Pertumbuhan Industri	8	4,48	5	4,41	1.02%
Jumlah IKM (unit usaha) Aktif	115	1864	871	0	450

Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat daerah, 2021.

8) Perindustrian

Perkembangan perindustrian Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Pertama adalah perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi negara-negara tujuan ekspor Sulawesi Utara sehingga menyebabkan penurunan permintaan atas komoditas industri. Kedua, perang dagang Tiongkok-AS yang berkepanjangan juga turut mempengaruhi permintaan produk-produk hasil Industri Indonesia. Apalagi kedua negara tersebut merupakan dua negara besar tujuan ekspor Indonesia.

Pandemi *COVID-19* menyebabkan banyak industri, baik besar maupun IKM, tidak berproduksi atau bahkan gulung tikar. Industri Kecil dan Menengah di Sulawesi Utara masih membutuhkan revitalisasi teknologi agar produktivitas lebih meningkat dan efisien. Revitalisasi teknologi ini diperlukan terutama dalam implementasi Industri 4.0. Peningkatan kompetensi pelaku IKM dan penguatan pemberdayaan IKM juga perlu mendapat perhatian lebih, serta pembangunan sentra-sentra IKM di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara perlu segera dipercepat pembangunannya.

Tabel 2.104
Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara 2018-2021

KATEGORI	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	856,134	915,377	945,034	1,234,083
Pertambangan dan Penggalian	12,986	206,560	62,580	96,157
Industri Pengolahan	464,798	587,831	548,724	609,377
Pengadaan Listrik dan Gas	76,249	76,068	67 470	67,072
Konstruksi	641,423	931,245	848 875	809,176
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda,Motor	5,989,361	6,913,747	6 644 111	7,408,281
Transportasi dan Pergudangan	389,378	399,473	353 119	244,695

KATEGORI	2018	2019	2020	2021
Keuangan, *Real Estate* dan Jasa Perusahaan	213,858	520,098	574 883	722,314
Jasa-jasa	686,999	710,753	674 537	722,957
Bkn Lap Usaha	5,382	7,842	8 595	2,119
TOTAL	**9,336,568**	**11,268,994**	**10 727 926**	**11,916,231**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020.

Secara umum data 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan bahwa kredit UMKM terus meningkat. Jika dilihat menurut sektor tampak bahwa kredit UMKM terbesar di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Di tahun 2021 terbesar diberikan pada sektor perdagangan sebanyak 7,408,281 dan untuk jumlah total tahun 2021 berada di 11,916,231. Adanya pandemi Covid 19 gelombang kedua menyebabkan sebagian besar dari UMKM di sektor ini terkena dampak dalam keberlanjutan usahanya, namun dengan strategi serta kerja sama Pemerintah dalam membantu pelaku ekonomi sehingga tren positif dapat tercapai.

Tabel 2.105
Industri Kecil dan Menengah menurut Cabang Industri di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021

No,	Cabang industri	Unit usaha	Tenaga kerja		Nilai investasi (Rp, 000)	Nilai produksi (Rp, 000)	Nilai bb/bp (Rp, 000)
			Laki-Laki	Perempuan			
1	Pangan	416	298	629	3,426,943	28,055,469	14,144,658
2	Sandang	87	80	83	719,355	1,674,620	1,539,023
3	Kimia dan bahan bangunan (kbb)	259	590	138	4,511,370	26,400,100	12,584,737
4	Logam dan elektronika	143	163	0	972,562	7,234,339	3,465,680
5	Kerajinan	26	25	25	82,435	561,550	177,160
JUMLAH		**913**	**1,156**	**875**	**9,712,665**	**63,926,078**	**31,911,258**

Sumber: Disperindag Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

Di sisi lain Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga perlu mendapat perhatian di masa pemulihan ini. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa nilai produksi terbesar dari IKM adalah untuk cabang industri pangan, industri kimia dan bahan bangunan. Jumlah tenaga kerja masih lebih banyak laki-laki, namun untuk cabang industri sandang dan pangan didominasi oleh tenaga kerja perempuan.

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan acuan Permendagri 86/2017, Indikator 1–4 hanya berdasarkan Ketersediaan dokumen dokumen yang dimaksud, sedangkan indikator 5,6 didasarkan pada jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan

dikalikan 100. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW dihitung berdasarkan kesesuaian program /kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang dibagi dokumen RTRW dan dikalikan 100%.

Tabel 2.106
Perbandingan Indikator dalam Permendagri 86/2017
dengan RPJMD 2016-2021

Indikator Kinerja Aspek Perencanaan	
Permendagri 86/2017	**RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021**
1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	(1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tepat waktu
2. Tersedianya DokumenPerencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	(2) Kab/Kota yang menyelesaikan dokumen RAD
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah dtetapkan dengan PERKADA	(3) Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	(4) Konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dalam RPJMD-RKPD_KUA/PPAS
5. Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	(5) Cakupan hasil Evaluasi pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah
6. Penjabaran Konsistensi program RKPD kedalam APBD	
7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Pemerintah Provinsi telah mengupayakan agar dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tersedia tepat waktu dengan menargetkan per tahun sebanyak 5 dokumen hingga akhir tahun 2021 sebanyak 5 dokumen perencanaan. Pemerintah Provinsi melalui Bappeda juga menargetkan tersedianya Perda RPJPD Provinsi, Penetapan RKPD per tahun dengan Peraturan Gubernur. Dengan demikian kinerja RPJMD tercapai pada bidang perencanaan pembangunan, yaitu pada poin tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu. Sementara penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dalam RPJMD, RKPD, KUA/PPAS, cakupan hasil evaluasi pencapaian target kinerja perangkat daerah juga mencapai target.

Evaluasi kinerja dan pencapaian Pemerintah Provinsi dalam Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD per tahun memperlihatkan persentase yang meningkat dari tahun 2016 (75%) hingga tahun 2020 (90%). Capaian hingga 2021 ditargetkan hingga 90%. Sedangkan konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dalam RPJMD–RKPD menunjukkan persentase yang konstan yaitu 90% setiap tahun dan khususnya di tahun 2019 melampaui target yaitu 95%. Target di akhir tahun periode RPJMD adalah 95%. Kenaikan persentase Kinerja penjabaran RPJMD dalm RKPD dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.19
Penjabaran RPJMD dalam RKPD

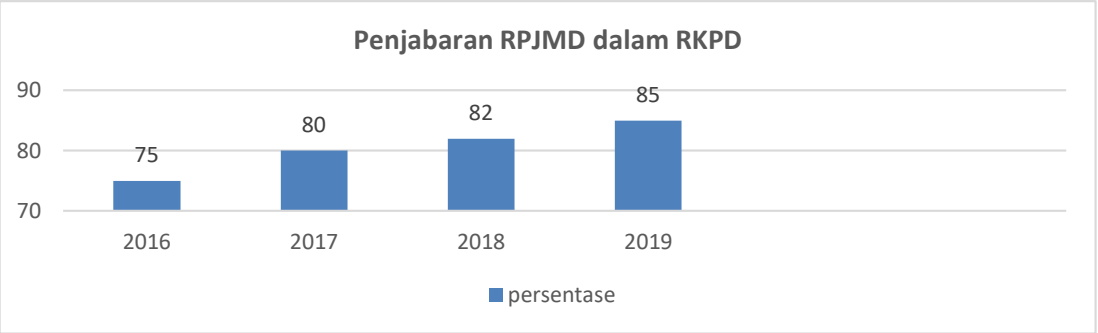

Sumber: Hasil Olahan, 2020.

Pemerintah Provinsi juga telah mengupayakan tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda, yaitu Perda RTRW Propinsi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Peraturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018. Dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah mulai dari penyusunan dokumen sampai pada implementasinya, Pemerintah Propinsi selalu melibatkan masyarakat dalam kapasitas memberikan masukkan ide dan atau pemecahan masalah.

2) Keuangan

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD.

Analisis juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Kemudian dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini akan dibahas lebih rinci dalam BAB III.

Grafik 2.20
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2021

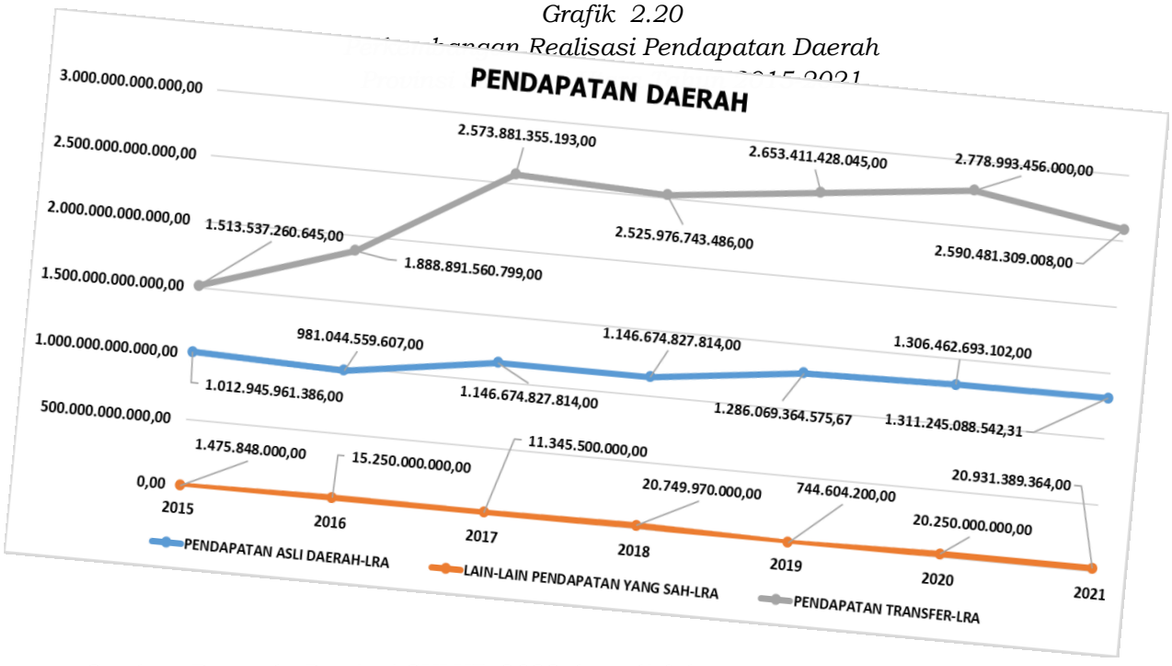

Sumber: Bapenda Provinsi SULUT, 2022 data diolah.

Pendapatan transfer masih dominan menjadi sumber pendapatan daerah. Rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir proporsinya mencapai 66,34% dan untuk PAD hanya mencapai 33,14%. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah juga cenderung turun dari 0,40 tahun 2015 menjadi 0,33 di tahun 2019. Pandemi *COVID-19* mempengaruhi realisasi PAD di tahun 2020 yang turun 24% dan selama masa pemulihan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Tingkat cakupan sentra pelayanan hanya 1:29 di tahun 2020 dari target 1:58.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah 49%. Namun di masa pandemi ini banyak wajib pajak yang tidak membayar karena masalah keuangan sehingga isu utama di sisi pendapatan adalah stagnasi pada pendapatan dari WP.

Grafik 2.21
Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019

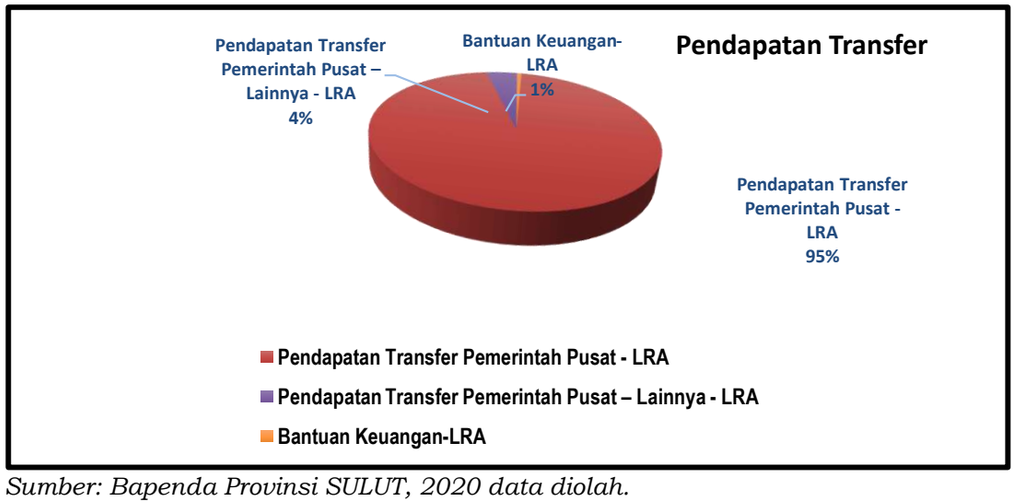

Sumber: Bapenda Provinsi SULUT, 2020 data diolah.

Proporsi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2019 mencapai 95%, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya 4%, dan hanya 1% berasal dari bantuan keuangan.

Grafik 2.22
... Tahun 2015-2021

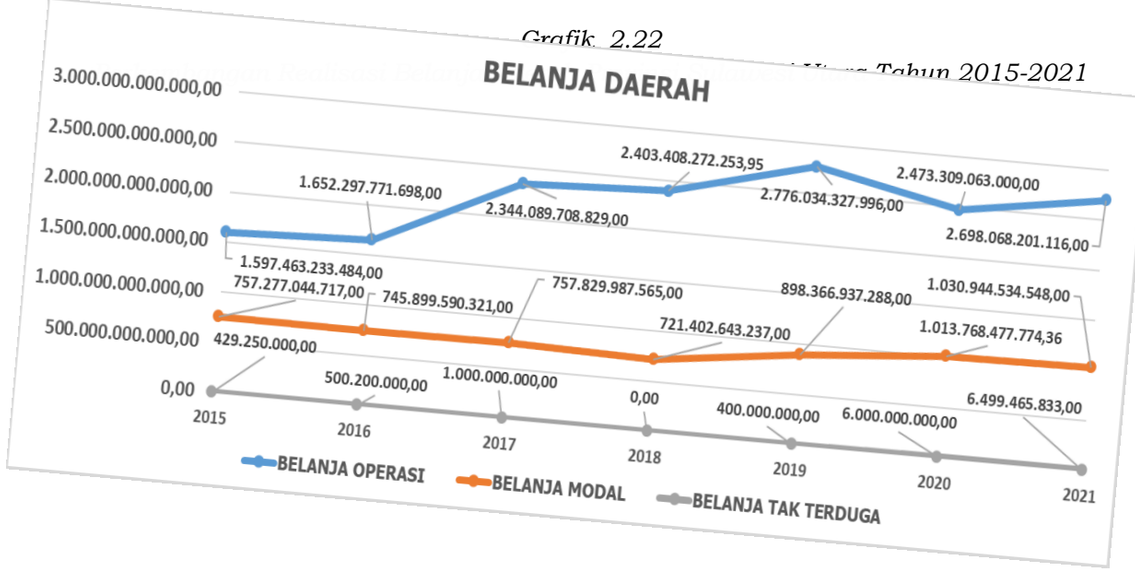

Sumber: Bapenda Provinsi SULUT, 2022 data diolah

Pengeluran pemerintah daerah terbesar untuk belanja operasi masih dominan menjadi sumber pendapatan daerah rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir. Proporsinya mencapai 66,34% dan untuk PAD hanya mencapai 33,14%. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah juga cenderung turun dari 0,40 tahun 2015 menjadi 0,33 di tahun 2019. *COVID-19* mempengaruhi realisasi PAD di tahun 2020 dan selama masa pemulihan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

Grafik 2.23
Realisasi Pembiayaan Netto Daerah

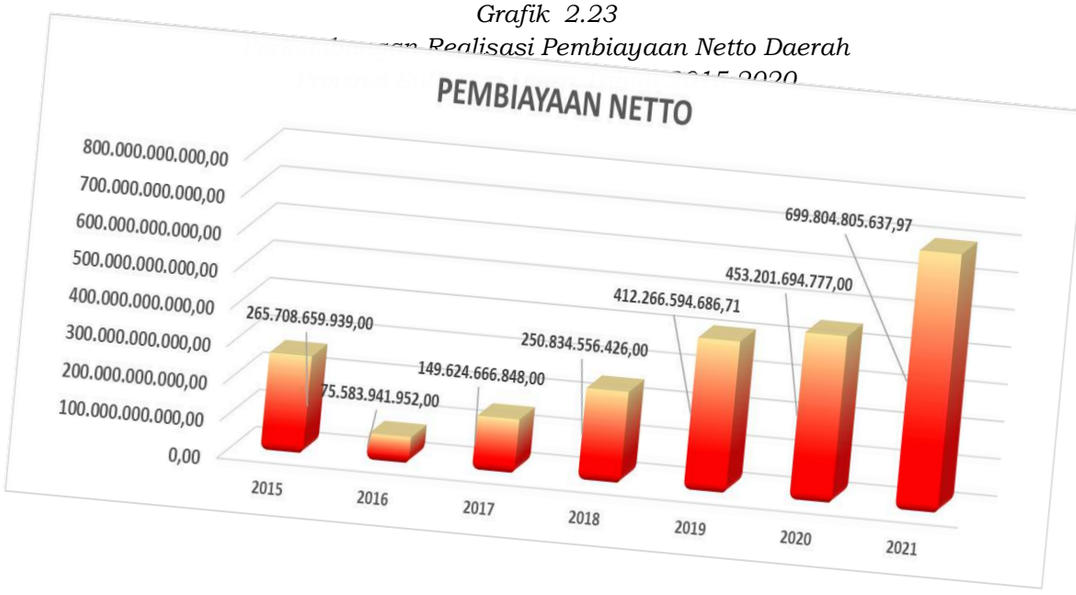

Sumber: Bapenda Provinsi SULUT, 2021 data diolah.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali sesuai tahun anggaran yang ada. Sumber pembiayaan terdiri atas 3 (tiga), yaitu: penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali investasi Pemda. Dalam 5 (lima) tahun terakhir SiLPA terus meningkat dan pada tahun 2019 terdapat penerimaan kembali investasi pemda sebesar 57,6 miliar rupiah.

Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 terjadi peningkatan pembiayaan netto di Provinsi Sulawesi Utara atau naik sebesar 55,16% dari tahun 2015 ke tahun 2019. Jika dilihat dari rasio Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap pembiayaan netto dari tahun 2015–2019 naik sebesar 25,58%.

Tabel 2.107
Kinerja Keuangan Daerah

Indikator	Target Akhir RPJMD	Target Thn 2020	Capaian Thn 2020	Target Thn 2021	Capaian Thn 2021
Opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah Prov. Sulut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Cakupan jumlah dokumen RAPBD yang disusun tepat waktu	3	3	3	3	3
Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun Anggaran	Minimal 5 %	5%	(-2,27%)	5%	(-2,38%)
Persentase Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (di luar DAK)	34 %	33 %	42,98%	34%	43 %
Jumlah Potensi Wajib Pajak PKB	823,135,4	776,542	697,563	823,135,4	628,358

Indikator	Target Akhir RPJMD	Target Thn 2020	Capaian Thn 2020	Target Thn 2021	Capaian Thn 2021
Jumlah Potensi Wajib Pajak PBBKB	10 WAPU	9 WAPU	8 WAPU	10 WAPU	7 WAPU
Jumlah Potensi Wajib Pajak PAP	24 WP	38 WP	43 WP	24 WP	52 WP
Jumlah Objek Penerimaan Pendapatan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	15 Objek	15 Objek	2 Objek	15 Objek	2 Objek
Jumlah Potensi Wajib Retribusi	39 WR	39 WR	30 WR	39 WR	51 WR
Persentase Potensi Wajib Pajak Yang Terpungut	70 %	67 %	45%	70 %	55,88%
Persentase Potensi Wajib Retribusi Yang Terpungut	100 %	100%	90%	100 %	88,23%
Persentase Potensi Objek Penerimaan Di Luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 %	82 %	97,14 %	82 %	80 %
Rasio Cakupan Sentra Layanan Perpajakan Daerah Terhadap Wajib Pajak Per Hari Yang Dilayani Antar Tahun Anggaran	1:57 (per hari)	1:36 (perhari)	1:35 (perhari)	1 :57 (per hari)	1:35 (per hari)
Persentase Tingkat Gangguan dan Sistem	1,0 %	1,5 %	1,3%	1,0 %	
Persentase Tingkat Gangguan Perangkat Keras Teknologi Informasi	1,0 %	1,5 %	1,3%	1,0 %	
Persentase Tingkat Pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	
Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kab,/Kota/Provinsi Yang Melaksanakan Hasil Kesepakatan	100 %	100 %	84,61 %	100 %	

Sumber: Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2022

Tabel 2.108
Capaian Keuangan Daerah 2017 -2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Evaluasi Capaian	
						n-1	n-5
Opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah prov. Sulut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Cakupan jumlah dokumen RAPBD yang disusun tepat waktu	-	-	3	3	3	-	-
Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun Anggaran	29,34%	1,53%	3,96%	(-2,27%)	(-2,38%)	(-6,23%)	(-7,27%)
Persentase Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	42,09%	44,43%	44,56%	42,98 %	43%	(-1,58%)	12,98%

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Evaluasi Capaian	
						n-1	n-5
Jumlah Potensi Wajib Pajak PKB	657,555	628,358	720,223	697,563	628,358	-22,66	95,99
Jumlah Potensi Wajib Pajak PBBKB	7 WAPU	6 WAPU	5 WAPU	8 WAPU	7 WAPU	3	4
Jumlah Potensi Wajib Pajak PAP	16 WP	20 WP	38 WP	43 WP	52 WP	5	28
Jumlah Objek Penerimaan Pendapatan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	15 objek	15 Objek	21 Objek	24 objek	2 objek	3	10
Jumlah Potensi Wajib Retribusi	31 WR	41 WR	48 WR	30 WR	51 WR	-18	6
Persentase Potensi Wajib Pajak Yang Terpungut	63%	60,20%	65%	45%	55,88%	-20%	-10%
Persentase Potensi Wajib Retribusi Yang Terpungut	100%	100%	100%	90%	88,23%	-10%	-10%
Persentase Potensi Objek Penerimaan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	0	0
Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,82%	95%	89,39%	97,14 %	80 %	7,75%	17,14%
Rasio Cakupan Sentra Layanan Perpajakan Daerah Terhadap Wajib Pajak Per Hari Yang Dilayani Antar Tahun Anggaran	1:60 (per hari)	1:41 (per hari)	1:36 (per hari)	1:35 (per hari)	1:35(per hari)	1:1	1:31
Persentase Tingkat Gangguan Dan Sistem	2,48%	1,9%	1,6%	1,3%		-0,3%	-0,7%
Persentase Tingkat Gangguan Perangkat Keras Teknologi Informasi	2,12%	2,4%	1,6%	1,5%		0,1%	-0,5%
Persentase Tingkat Pelaksanaan SOP Dan Standar Pelayanan	100%	100%	100%	100 %		0%	10%
Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kab,/Kota/Prov, Yang Melaksanakan Hasil Kesepakatan	100%	100%	100%	100 %		0%	10%

Sumber: Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2022.

3) Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Berdisiplin merupakan karakter ASN yang diharap tumbuh dan dipraktikkan oleh birokrasi, Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah mendesak demi percepatan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan reformasi birokrasi tak lain untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar

kode etik aparatur negara. Inilah konteks besar pengukuran persentase ASN dengan disiplin kerja tinggi. Persentase ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.109
Persentase ASN dengan Disiplin Tinggi
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018-2021

Indikator	Persentase ASN dengan Disiplin Tinggi Provinsi Sulawesi Utara				Evaluasi Capaian Tahun 2021 (n) terhadap	
	2018	2019	2020	2021	n-1	n-4
ASN dengan Disiplin Tinggi	95%	93,31%	93,94%	96%	2,06%	1,00%

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah, 2022.

Tabel di atas memperlihatkan persentase ASN dengan disiplin tinggi, dimana Capaian tahun 2021 (96%) mengalami kenaikan dari capaian tahun 2020 (93,94%), yakni sebesar 2,06%. Kenaikan ini melampaui target yang ditetapkan oleh RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 yaitu Target 2017 (82%), 2018 (85%), 2019 (90%) dan 2020 (92%), yang capaiannya terpampang dalam tabel di atas.

Berikut ini akan disajikan tabel yang memperlihatkan cakupan pejabat struktural dan fungsional menduduki jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tentunya, penempatan pejabat berdasarkan ANJAB dan ABK, bahkan evaluasi jabatan akan menjamin kinerja bermutu pejabat yang bersangkutan. Kualitas pejabat yang demikian akan mempercepat pencapaian reformasi birokrasi.

Tabel 2.110
Cakupan Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki
Jabatan sesuai Anjab dan ABK

Indikator	Cakupan Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki Jabatan sesuai Anjab dan ABK				Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap	
	2018	2019	2020	2021	n-1	n-4
Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki Jabatan sesuai Anjab dan ABK	83,89%	91,66%	92%	93%	1,00%	12,73%

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah, 2022.

Tabel di atas menunjukkan progres yang konsisten dalam cakupan pejabat struktural dan fungsional menduduki jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja sejak tahun 2018-2021. Jika capaian tahun 2021 (93%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020=92%), maka ada kenaikan sebesar 1,00%. Sedangkan, kenaikan sebesar 12,73%, terungkap dengan membandingkan capaian tahun 2021 dengan capaian tahun 2017.

Dalam pelayanan prima kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan baku. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan. Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Pedoman ini perlu dirujuk setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan prima menyasar kepuasan masyarakat. Karena itu, kepuasan masyarakat perlu diukur sebagai evaluasi bagi proses pelayanan publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M, PAN/ 2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah merupakan instrumen untuk pengukuran indeks tersebut. Tabel berikutnya akan menunjukkan cakupan layanan baku mutu kepegawaian. Di bawah ini, cakupan layanan baku mutu kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Utara dideskripsikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.111
Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018-2021

Indikator	Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian				Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap	
	2018	2019	2020	2021	n-1	n-4
Layanan Baku Mutu Kepegawaian	90%	95%	96%	97%	1%	9,26%

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah, 2022.

Capaian cakupan layanan baku mutu kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam tabel ini memperlihatkan peningkatan. Capaian tahun 2021 (97%) mengalami kenaikan sebesar 1% ketika dibandingkan dengan capaian tahun 2020=96%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (86,74%), maka capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 10,26%.

a) Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal;

Tujuan diklat menyasar pengembangan kompetensi ASN baik yang mencakup sikap/karakter dan pengetahuan maupun keterampilan dan kepemimpinan. *Outcome* yang diharapkan tak lain adalah tercapainya reformasi birokrasi dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Di bawah ini, tabel yang berisi indikator dan capaian kinerja pembangunan daerah bidang pendidikan dan latihan akan disajikan.

Tabel 2.112
Capaian Pendidikan dan Latihan
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018-2021

Indikator	Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian				Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap	
	2018	2019	2020	2021	n-1	n-4
Persentase alumni diklat kepemimpinan yang menerapkan Inovasi/ proyek perubahan	90%	90%	0%	0%	-90%	-85%
Persentase peserta diklat kompetensi manajerial lulus dengan kategori sangat memuaskan	85%	80%	36,69 %		-43,31%	-43,31%
Persentase ASN menduduki jabatan struktural telah mengikuti diklat manajerial sesuai jabatan yang diampu	85%	90%	90%	90%	0%	10%
Persentase instansi/kab-kota pengirim puas terhadap pelaksanaan diklat kepemimpinan	85%	85%	0 %		-85%	-85%
Persentase peserta diklat kompetensi teknis inti lulus dengan kategori sangat memuaskan	75%	90%	0%		-90%	-75%
Persentase peserta diklat kompetensi teknis umum dan fungsional lulus dengan kategori sangat memuaskan	75%	90%	0 %		-90%	-25%
Jumlah karya tulis di bidang Administrasi dan pengelolaan kelembagaan yang Terpublikasi di media ilmiah/ Publikasi nasional	-	22	0		-22	-

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah, 2022.

Tampilan tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata indikator mengalami kenaikan dari tahun 2018-2021, kecuali indikator persentase peserta diklat kompetensi manajerial lulus dengan kategori sangat memuaskan. Capaian indikator ini pada tahun 2019 (80%) mengalami penurunan sebesar -5% dari tahun sebelumnya 2018 (85%). Perbandingan capaian untuk indikator jumlah karya tulis di bidang administrasi dan pengelolaan kelembagaan yang terpublikasi di media ilmiah/publikasi nasional tidak bisa dilakukan karena capaian tahun 2017-2018 tidak teridentifikasi.

4) Penelitian dan Pengembangan

Grafik 2.24

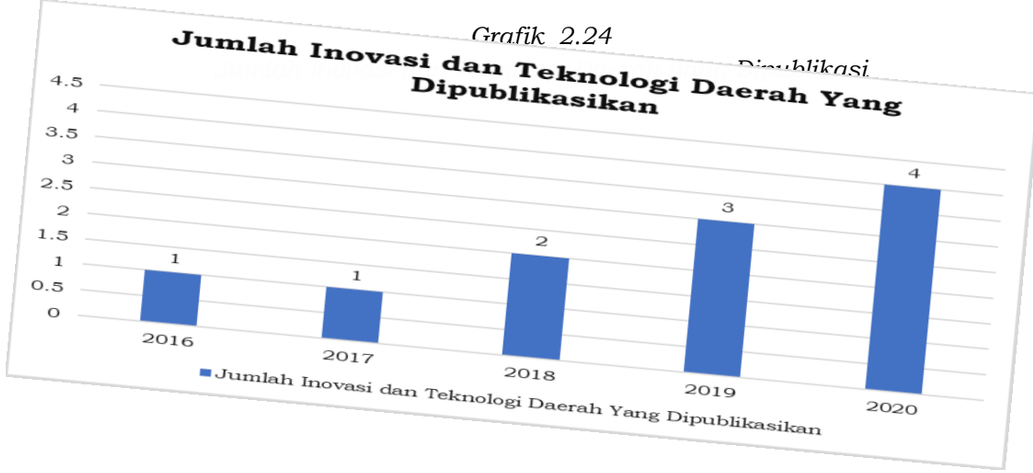

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

Kinerja terkait rekomendasi hasil kajian dan penelitian dokumen perencanaan daerah yang kemudian ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah sebanyak 23 dokumen rekomendasi per tahun mulai tahun 2017, dan khususnya di tahun 2019 melampaui target yaitu 42 dokumen. Sementara untuk dokumen terkait pengembangan inovasi dan teknologi daerah yang dipublikasikan meningkat secara exponensial hingga mencapai target di tahun 2021 sebanyak 16 dokumen.

Grafik 2.25
Jumlah MoU Kerjasama Kelitbangan

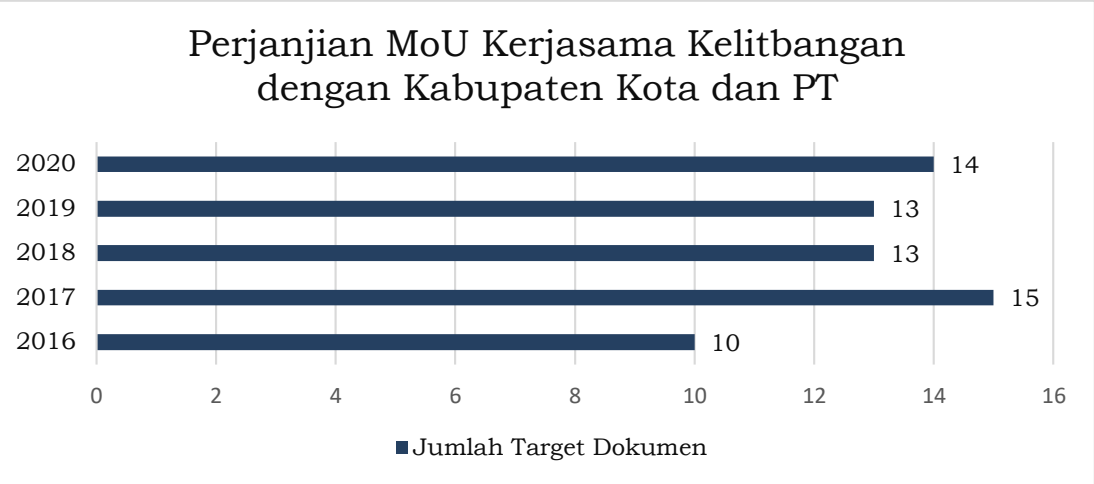

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

Pemerintah Daerah juga dalam Penelitian dan Pengembangan melakukan sejumlah perjanjian MoU kerja sama kelitbangan dengan Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan terkait pembangunan daerah Sulawesi Utara.

Di bidang Penelitian dan Pengembangan ada 2 indikator yang belum tercapai yakni: 1) Jumlah Inovasi dan Teknologi daerah yang dipublikasikan, dan 2), Jumlah Perjanjian MOU kerjasama kelitbangan dengan Kabupaten/Kota/PT dan tindak lanjutnya.

Beberapa hal yang terkait capaian kinerja indikator pertama adalah:

- Target yg ditetapkan di awal RPJMD tahun 2016 cukup tinggi
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terbentuk pada bulan Januari tahun 2017.
- Peraturan Pemerintah No, 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah baru ditetapkan tanggal 14 September 2017 dan diundangkan tgl 15 september 2017.
- Pelaksanaan Lomba Inovasi dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan hasilnya baru dipublikasikan sehingga jumlah inovasi yg dipublikasi tergantung hasil lomba.

- Di Tahun 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulaewsi Utara membuat draft dan naskah akademik tentang Peraturan Daerah Inovasi Daerah untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No, 38 Tahun 2019.

Kendala capaian kinerja pada indikator kedua:

- Target yg ditetapkan awal RPJMD tahun 2016 terlalu tinggi.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara baru berdiri pada Bulan Januari Tahun 2017.
- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan Kabupaten/Kota berjalan dengan koordinasi yang baik. Namun MoU dengan Kabupaten/Kota ditandatangani antar Kepala Daerah belum terealisasi karena waktu yang belum tepat dilaksanakan, yaitu dengan Universitas Sam Ratulangi, Universitas Negeri Manado, dan Universitas Katolik De La Salle Manado

5) Pengawasan

Output dari sistem pengawasan yang baik tercermin dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Berikut adalah nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2021.

Tabel 2.113
SAKIP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021

No,	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B

Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara,2022

Tabel ini memperlihatkan bahwa nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Utara konsisten "B". Rentang nilai yang diperoleh berarti 60-70 poin.

6) Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD diukur dari dukungan penyelenggaraan administrasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi: Perda yang ditetapkan, pelaksanaan reses, kunjungan kerja dan peninjauan lapangan, bimtek yang diikuti oleh anggota DPRD serta Rapat Paripurna DPRD dan Rapat Dengar Pendapat Komisi DPRD. Data terkait pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD tahun 2016–2020 sebagai berikut:

Tabel 2.114
Jumlah Perda Dalam Penetapan Propemperda
Tahun 2017 – 2021 di Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1,	Jumlah Perda Yang dibahas	23	24	25	16	12

Sumber: Sekretariat DPRD Prov, Sulawesi Utara, 2022

Tabel 2.115
Persentase Perda yang ditetapkan
Tahun 2017 – 2021 DPRD Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1,	Persentase Capaian Perda Yang Ditetapkan	13 (56%)	10 (41%)	8 (36%)	3	25%

Sumber: Sekretariat DPRD Prov, Sulawesi Utara, 2022.

Tabel 2.116
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan DPRD
Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	JUMLAH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DPRD									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1,	JUMLAH RESES	3	3 (100%)	3	3 (100%)	3	2 (100%)	3	3 (100%)	3	3 (100%)
2,	JUMLAH KUNJUNGAN KERJA DAN PENINJAUAN LAPANGAN DPRD	96	85 (88%)	96	92 (95%)	96	98 (97%)	96	70 (72%)	96	
3,	JUMLAH PENDALAMAN TUGAS DPRD	2	2 (100%)	2	2 (100%)	2	2 (100%)	2	1 (50%)	2	1 (50%)
4,	RAPAT PARIPURNA DPRD	24	28 (116%)	24	28 (104%)	24	21 (87%)	24	19 (79%)	24	22 (90%)
5,	RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI	96	92 (95%)	96	87 (90%)	96	90 (93%)	96	72 (75%)	96	

Sumber: Sekretariat DPRD Prov, Sulawesi Utara, 2022.

7) Sekretariat Daerah

Considerans huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menegaskan bahwa demi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut adalah survei kepuasan masyarakat yang hasilnya dalam wujud Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM. IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mengukur secara komprehensif tentang persepsi dan penilaian masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterimanya dari penyelenggara layanan publik. Survei ini tunduk pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keadilan dan netralitas.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei untuk mendapatkan IKM ini wajib dilakukan secara berkala minimal sekali setahun. Selanjutanya. Pasal 6 menegaskan bahwa penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap IKM unit pelayanan publik.

Evaluasi ini dibutuhkan sebagai acuan dasar bagi pemerintah/ penyelenggara pelayanan publik untuk senantiasa memperbaiki dan mengembangkan pelayanannya demi memenuhi harapan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan public. Berdasarkan pentingnya indikator ini bagi pengembangan kebijakan di ranah pelayan publik, IKM diintegrasikan dalam indikator-indikator dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.117
Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara

NO	URAIAN	NILAI IKM					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Provinsi Sulawesi Utara**	-	-	-	89,739 (Sangat Baik)	85,236 (Baik)	85,747 (Baik)

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2021

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1 – 2,5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2021.

Catatan:

- Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dimulai pada Tahun 2019,

- Untuk penilaian Tahun 2020 masih dalam proses pengumpulan data sesuai surat Sekretaris Daerah Prov. Sulut Nomor: 060/21.102/Sekr-Ro.Org.

Capaian IKM Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 (89,739) melampaui target tahun 2019 yang menargetkan peningkatan sebesar 82. Capaian ini bahkan melampaui target indeks yang ditetapkan untuk dicapai di akhir periode RPJMD 2016-2021. Angka ini mencerminkan tren atau kecenderungan layanan publik yang telah diberikan oleh penyelenggara kepada masyarakat dan menggambarkan kinerja dari penyelenggara pelayanan publik yang bersangkutan. Selain itu, angka ini menggambarkan persepsi atau penilaian masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Artinya, masyarakat mengapresiasi kinerja penyelenggara layanan publik. Dengan kata lain, layanan yang diberikan penyelenggara dirasakan secara positif dan selaras dengan harapan, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat Sulawesi Utara.

Fungsi utama pemerintah tak lain adalah memberikan pelayanan prima terhadap masyarakatnya. Karena itu, pemerintah perlu untuk secara *regular* mengevaluasi IKM dan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Dalam kualitas pelaksanaan program kerja dan pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan. IKM ini menghadirkan *feedback* secara berkala kepada penyelenggara layanan publik atas capaian kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat, guna menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik demi kesinambungan pembangunan daerah.

a) Indeks Reformasi Birokrasi;

Salah satu dasar pertimbangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah mendesak demi percepatan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan reformasi birokrasi tak lain untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara. Area perubahan yang dikejar dalam reformasi birokrasi adalah organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Perkembangan reformasi birokrasi sempat mengalami ketertinggalan dari reformasi politik, ekonomi, dan hukum. Pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip universal good and clean government demi menjamin pelayan prima bagi

masyarakat. Pada tahun 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan kebijakan PMPRB yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment), yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Dari segi kebijakan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 telah dua kali diubah yaitu melalui Perauran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019.

Penyempurnaan tersebut mencakup: (1) penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan, (2) tingkat kedalaman penilaian/evaluasi sampai dengan ke unit kerja, serta (3) perubahan terhadap sistem daring dan petunjuk teknisnya.

Pada tahun 2020, dengan pertimbangan bahwa peraturan di atas sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:

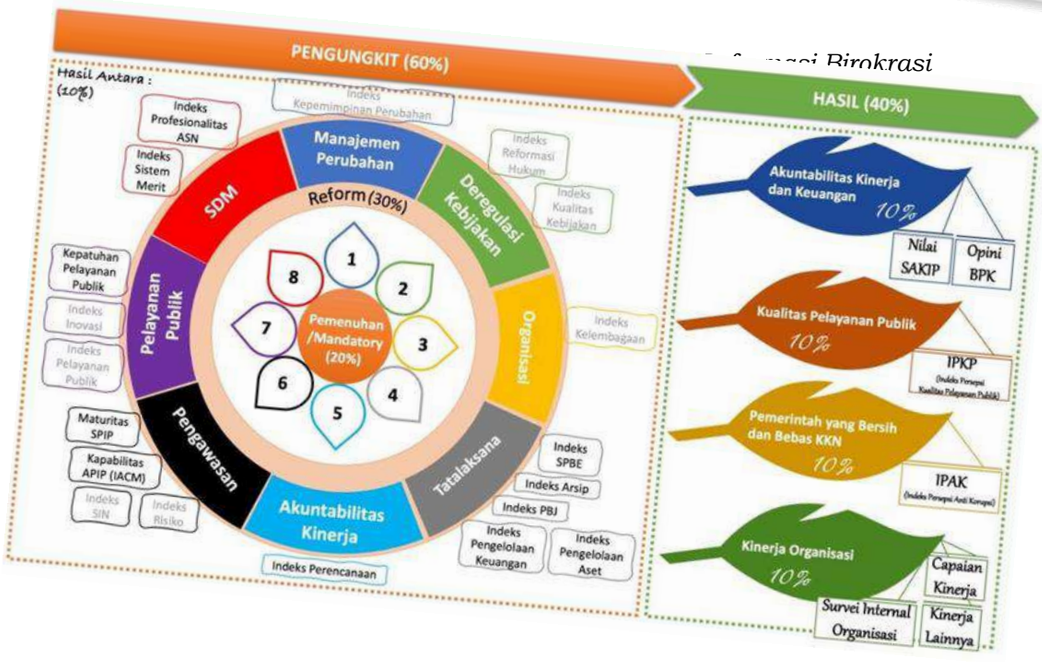

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Komponen Pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Sedangkan, Komponen Hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi. Komponen Hasil mempunyai empat bagian, yaitu Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dan Kinerja Organisasi.

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Sedemikian penting dan mendesaknya proses reformasi birokrasi ini, IRB dirujuk sebagai indikator penyelenggaraan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Di bawah ini, disajikan IRB Provinsi Sulawesi Utara:

Tabel 2.118
Indeks Reformasi Birokrasi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi	58,56	54,97	55,09	56,51	60,04

Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

Pada tahun 2017 pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan Permenpan-RB 14 Tahun 2014 dan dilakukan secara langsung oleh Tim Kemenpan. Tahun 2018 mengalami transisi dari pedoman evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi yaitu Permenpan-RB 14 Tahun 2014 Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2018 yang dilakukan secara mandiri melalui aplikasi PMPRB. Pada tahun selanjutnya (2019) telah dilakukan upaya untuk peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi melalui penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan melibatkan 10 (sepuluh) unit kerja menginput PMPRB. Tahun 2020 pelaksanaan evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi terjadi perubahan pedoman yaitu Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020, dengan melibatkan minimal 20 unit kerja dan hasilnya kemungkinan dalam waktu dekat ini.

Tabel di atas menggambarkan peningkatan IRB Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2019 sebesar 55,09 ke tahun 2020 sebesar 56,51. Hal ini berarti peningkatan dari tahun 2019-2020 sebesar 1,42. Nilai hasil akhir dari penjumlahan semua komponen, baik pengungkit maupun hasil, di atas dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi. Kategori dan interpretasi hasil akhir dapat dirujuk pada tabel berikut:

Tabel 2.119
Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	> 90 - 100	Istimewa
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	> 30 - 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
7	D	> 0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018

Berdasarkan kategori di atas, IRB Provinsi Sulawesi Utara baik di tahun 2017 dan 2019 mendapat kategori CC dengan interpretasi “cukup

(memadai), perlu banyak perubahan yang tidak mendasar". Sejak tahun 2020, kategori ini telah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi perkapita menjadi salah satu indikator utama kemampuan masyarakat untuk pangan dan non pangan. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat provinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2017 lebih besar persentase pengeluaran untuk pangan setiap bulannya, namun sejak tahun 2018-2020 pola konsumsi non pangan menjadi lebih tinggi dari konsumsi pangan.

Selanjutnya secara detail pola pengeluaran konsumsi per kapita menurut kabupaten kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.120
Persentase Konsumsi RT Pangan Kabupaten/Kota,
Provinsi Sulawesi Utara 2017-2021

Kabupaten /Kota	Persentase Pengeluaran Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perdesaan dan Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen)				
	Pangan				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	58,81	53,88	52,62	53,66	53,56
Minahasa	56,14	46,24	50,67	50,26	45,93
Kepulauan Sangihe	59,41	54,67	56,67	52,64	54,50
Kepulauan Talaud	60,20	53,69	52,98	49,07	55,65
Minahasa Selatan	56,31	53,23	52,37	56,18	54,66
Minahasa Utara	51,27	52,19	50,74	50,39	52,70
Bolaang Mongondow Utara	56,82	55,11	59,36	55	54,82
Kepulauan Sitaro	58,57	53,45	54,83	54,15	50,88
Minahasa Tenggara	60,02	57,20	52,30	53,05	55,06
Bolaang Mongondow Selatan	61,93	55,20	51,87	55,02	55,85
Bolaang Mongondow Timur	56,14	53,01	50,57	50,90	50,98
Kota Manado	49,24	39,98	43,14	42,68	48,11
Kota Bitung	53,31	53,27	51,73	49,92	53,45
Kota Tomohon	47,97	43,67	44,51	40,97	45,70
Kota Kotamobagu	48,67	45,81	45,30	44,96	46,60
Sulawesi Utara	**53,75**	**48,26**	**49,36**	**48,69**	**50,59**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

Data menunjukkan dengan bahwa pola konsumsi per bulan di beberapa Kabupaten/Kota sejak 2017 sampai 2021 tetap di dominasi untuk pangan seperti kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupatebn Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten kepulauan SITARO, Kabupaten

MinahasanTenggara, Kabupaten Bolaang Mongongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Bitung. Konsumsi pangan tertinggi tahun 2021 terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan terendah di Kota Tomohon.

2. Nilai Tukar Petani

Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP) Provinsi Sulawesi Utara, dapat disajikan ke dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 2.26
Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Juli 2020

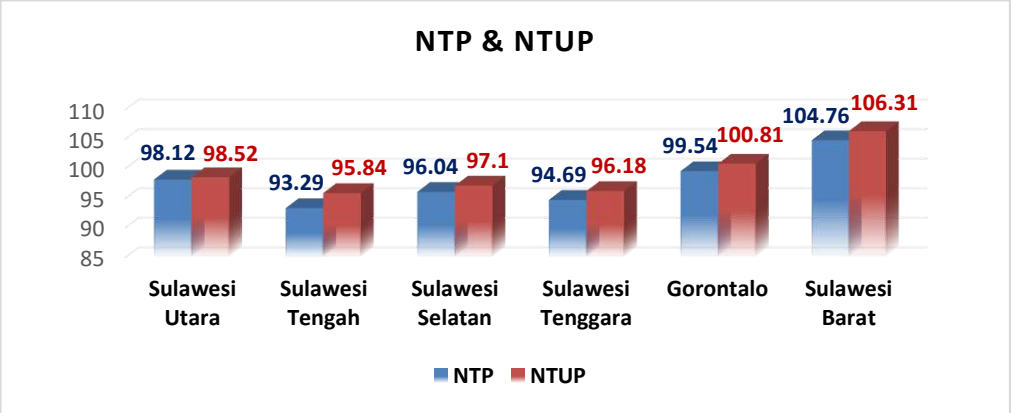

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020.

Jika dilihat perbandingannya dengan provinsi lain yang ada di Sulawesi menunjukkan bahwa NTP dan NTUP di Provinsi Sulawesi Utara masih berada di bawah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Barat, Dengan besaran NTUP (98,12) lebih besar dari NTP (98,12).

Tabel 2.121
Nilai Tukar Petani Prov. Sulawesi Utara 2015-2021

Bulanan tanpa Tahunan	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	97,76	99,79	92,89	93,50	96,38	103,11	102,26
Februari	98,17	99,02	91,41	91,15	95,85	103,87	101,63
Maret	98,92	97,39	89,93	91,92	95,64	104,59	102,27
April	96,66	97,02	90,28	91,37	96,35	104,20	103,47
Mei	94,60	97,02	90,84	92,14	94,49	105,04	105,54
Juni	92,81	95,89	91,32	92,90	95,09	104,76	108,09
Juli	93,22	95,10	89,55	92,86	94,49	105,50	108,65
Agustus	94,64	95,69	90,30	93,55	95,74	105,32	109,44
September	95,95	94,84	90,82	94,32	96,15	104,41	109,43
Oktober	97,15	93,41	92,20	96,01	95,57	105,72	109,28
November	97,70	93,32	92,21	95,98	94,86	105,59	110,80
Desember	97,81	93,34	93,25	96,52	103,33	105,72	110,51

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

3. Pengeluaran Konsumsi Nonpangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Nonpangan)

Tabel 2.122
Persentase Konsumsi RT Nonpangan Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Utara 2017-2021

Kabupaten/Kota	Persentase Pengeluaran Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perdesaan dan Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen)				
	Non Pangan				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	41,19	46,11	47,38	46,34	46,44
Minahasa	43,86	43,76	49,33	49,74	54,07
Kepulauan Sangihe	40,59	45,33	43,33	47,36	45,50
Kepulauan Talaud	39,80	46,31	47,02	50,93	44,35
Minahasa Selatan	43,69	46,77	47,63	43,82	45,34
Minahasa Utara	48,73	47,81	49,26	49,61	47,30
Bolaang Mongondow Utara	43,18	44,89	40,64	45	45,18
Kepulauan Sitaro	41,43	46,55	45,17	45,85	49,12
Minahasa Tenggara	39,98	42,80	47,70	46,95	44,94
Bolaang Mongondow Selatan	38,07	44,80	48,13	44,98	44,15
Bolaang Mongondow Timur	43,86	46,99	49,43	49,10	49,02
Kota Manado	50,76	60,02	56,86	57,32	51,89
Kota Bitung	46,69	46,73	48,27	50,08	46,55
Kota Tomohon	52,03	56,33	55,49	59,03	54,30
Kota Kotamobagu	51,33	54,19	54,71	55,04	53,40
Sulawesi Utara	**46,25**	**51,74**	**50,64**	**51,31**	**49,41**

Sumber: BPS Sulut, 2021

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya saing daerah. Hal ini karena pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah. Apabila tidak, maka pembangunan yang dilaksanakan dikhawatirkan akan menyebabkan dampak fisik, lingkungan, ekonomi dan sosial yang tidak baik bagi suatu wilayah.

Saat ini proses perubahan RTRW Provinsi Sulawesi Utara sedang berjalan, demikian halnya juga dengan RTRW Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara, sebagai tindak lanjut adanya beberapa perubahan aturan di tingkat Pusat. Pemerintah Daerah kesulitan untuk mendapatkan data pasti terkait ketaatan terhadap RTRW, mengingat adanya beberapa perubahan parameter yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti sektor perijinan yang telah berubah kewenangannya. Akibatnya, aspek pengendalian pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi semakin terbatas.

2) Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah yang produktif seperti wilayah perkotaan dan perdesaan di provinsi Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan, perkembangan yang pesat yaitu semua wilayah perkotaan (Manado, Bitung, Tomohon dan Kotamobagu). Juga ibukota kabupaten seperti Airmadidi, Amurang dan Melonguane.

Selama kurun waktu 15 tahun perkembangan wilayah mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya pemanfaatan ruang. Perubahan struktur tata ruang baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan infrastruktur baik di tingkat lokal, regional maupun lintas provinsi.

Tabel 2.123
Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Wilayah Produktif	n/a	n/a	n/a	65,551	65,551	65,551
2	Luas seluruh wilayah budidaya	n/a	n/a	n/a	620,399,37	620,399,37	620,399,37
3	Rasio (1/2)				0,11	0,11	0,11

Sumber: Bappeda Provinsi Sulut, 2021.

Tabel 2.124
Rasio Luas Wilayah Produktif menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budaya	(Rasio)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten			
1	Bolaang Mongondow	24,399,00	43,136,12	0,57
2	Minahasa	7,534	91,514,39	0,08
3	Kepulauan Sangihe	131	36,299,06	0
4	Kepulauan Talaud	585	81,966,98	0,01
5	Minahasa Selatan	5,749	84,678,78	0,07
6	Minahasa Utara	3,638	28,992,67	0,13
7	Bolaang Mongondow Utara	5,635	46,490,98	0,12
8	Siau Tagulandang Sitaro	8,380	27,441,83	0,31
9	Minahasa Tenggara	3,235	47,628,90	0,07
10	Bolaang Mongondow Selatan	2,069	62,874,72	0,03
11	Bolaang Mongondow Timur	1,657	43,870,23	0,04
	Kota			
1	Kota Manado	0	15,565	0
2	Kota Bitung	79	16,202	0
3	Kota Tomohon	831	11,387,60	0,07
4	Kota Kotamobagu	1,629	6,081	0,27
	Sulawesi Utara	65,551	620,399,37	0,11

Sumber: Bappeda Provinsi Sulut, 2020.

Rasio Ketaatan terhadap Tata Ruang/RTRW Provinsi Sulawesi Utara terdapat dalam dokumen RPJMD Perubahan 2016-2021 pada tabel 5.6.

C. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Angka Kriminalitas;

Penanganan angka kriminalitas berhubungan erat dengan penciptaan stabilitas di tengah masyarakat dan menjamin ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tabel di bawah ini akan memperlihatkan jumlah kriminalitas yang tertangani Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2020.

Tabel 2.125
Jumlah Kriminalitas yang Tertangani
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020

Indikator	Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kriminalitas yang Tertangani	7534	7037	4180	7140

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keamanan suatu wilayah salah satunya adalah angka korban kejahatan pembunuhan. Di Sulawesi Utara, pada tahun 2018 terdapat sebanyak 42 kasus kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan (sumber: Polda Sulawesi Utara). Jika dibagi sebanyak 12 bulan, maka rata-rata ada sebanyak 3,5 kasus pembunuhan per bulan yang terjadi di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Angka ini sebenarnya relatif cukup rendah. Namun, tentu saja masyarakat berharap kondisi ideal yang terjadi, yakni tidak adanya kasus. Untuk saat ini, masyarakat bisa mendukung kepolisian setempat dalam penanganan kasus semacam ini, sehingga tidak menjadi semakin banyak.

Selain jumlah kasus kejahatan pembunuhan, indikator lainnya yang dapat menggambarkan rasa aman yakni proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan. Definisi korban kejahatan kekerasan disini adalah seseorang yang diri atau harta bendanya mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan, seperti penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, atau pelecehan Seksual Referensi waktu yang digunakan disini adalah setahun terakhir.

Grafik 2.27
Propo[illegible] Korban Kejahatan kekerasan Dalam 12 Bulan [illegible]

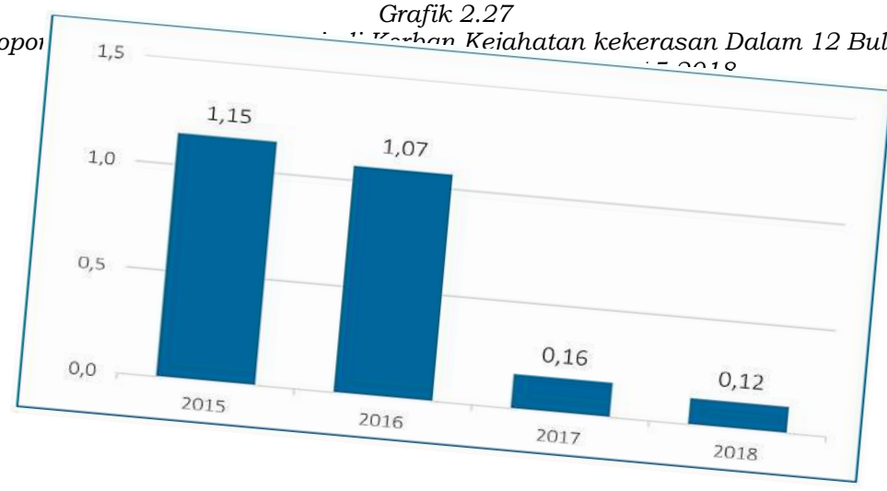

Sumber: BPS Prov, Sulut, 2021.

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2015 proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan di Sulawesi Utara dari tahun ke tahun terus menurun, hingga mencapai angka 0,12 di tahun 2018 atau sekitar 297 ribu orang penduduk. Hal ini dapat menunjukkan bahwa secara umum Sulawesi Utara semakin aman, namun kerjasama yang baik tetap dibutuhkan oleh kepolisian dan pemerintah setempat hingga masyarakat untuk menjaga agar tidak terjadi lebih banyak lagi kejahatan kekerasan di Sulawesi Utara.

Dalam beberapa kasus, masyarakat yang mengalami kasus kekerasan tidak serta merta melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib. Tindakan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang maupun polisi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya. Indikator proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi bertujuan untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak yang berwenang.

Tabel 2.126
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Resor di Provinsi Sulawesi Utara, 2017-2019

Kepolisian Resort	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Polres Manado	1 338	1 639	1 129
Polres Bitung	452	773	969
Polres Tomohon	685	656	577
Polres Kotamobagu	2 534	2 295	1 936
Polres Minahasa	1 006	983	785
Polres Minahasa Selatan	1 130	1 188	1 218
Polres Minahasa Utara	844	393	461
Polres Sangihe	959	747	589
Polres Talaud	192	168	122
Direktorat Reskrim Umum Polda Sulut	820	772	465
Direktorat Reskrim Khusus Polda Sulut	99	141	141
Direktorat Res Narkoba Polda Sulut			
a. Narkotika	73	94	48
b. Psikotropika	5	8	1
c. Bahan Berbahaya	76	99	9
d. Obat-obatan	58	41	10
Direktorat Polisi Perairan Polda Sulut	43	24	25
Jumlah	10 314	10 021	8 485

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Secara umum sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 tren jumlah kejahatan yang dilaporkan di kepolisian resort di Sulawesi Utara secara total menujukkan penurunan. Kejahatan yang paling banyak dilaporkan ada di kepolisian resort Kotamobagu. Hal ini cukup wajar saat dipahami bahwa polres Kotamobagu masih mencakup wilayah 1 kota dan 5 kabupaten.

Masyarakat disarankan agar tidak ragu menghubungi kepolisian setempat jika merasa mengalami suatu kejadian kejahatan, Jika korban kejahatan tidak melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya, maka pihak yang berwenang tidak akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan tindakan pengadilan. Selain itu, pelaku kejahatan juga tidak akan menerima efek jera dari perbuatan yang dilakukannya.

2) Lama Proses Perijinan

Iklim berinvestasi didukung oleh kemudahan perijinan yang ditawarkan pemerintah daerah, namun keamanan dan kenyamanan masih perlu di perhatikan di masa yang akan datang, (sesuai dengan hasil indikator kinerja yang diperoleh).

Tabel 2.127
Kinerja Iklim Berinvestasi

Indikator	Target Akhir RPJMD	Target Thn 2019	Capaian Thn 2019	Target Thn 2020	Capaian Thn 2020
Jumlah Demo	15	15	91	15	70
Kemudahan Perijinan (Lama Proses perijinan)	4 hari	4 hari	4 hari	3-4 hari	3-5 hari

Sumber: Bappeda Provinsi Sulut, 2021.

Lama proses perizinan di Provinsi Sulawesi Utara adalah 4 hari tentunya dengan adanya sistem *online* dalam perizinan akan lebih memudahkan proses perizinan sesuai kewenangan daerah.

Indikator kinerja lainnya yang harus tersedia sebagai penopang iklim berinvestasi di Provinsi Sulawesi Utara adalah jumlah dan pajak daerah serta jumlah Perda yang mendukung investasi daerah.

D. Fokus Sumberdaya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pengangguran tertinggi adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tertinggi kedua adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMA dan SMK. Jika pendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dilihat dari TPT SD ke bawah terendah diantara semua tingkat pendidikan. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, tingkat pengangguran terdidik mengalami penurunan, yaitu SMA (0,43 poin), SMK (0,53 poin), dan Perguruan Tinggi (2,29 poin).

Grafik 2.28
Ti (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang

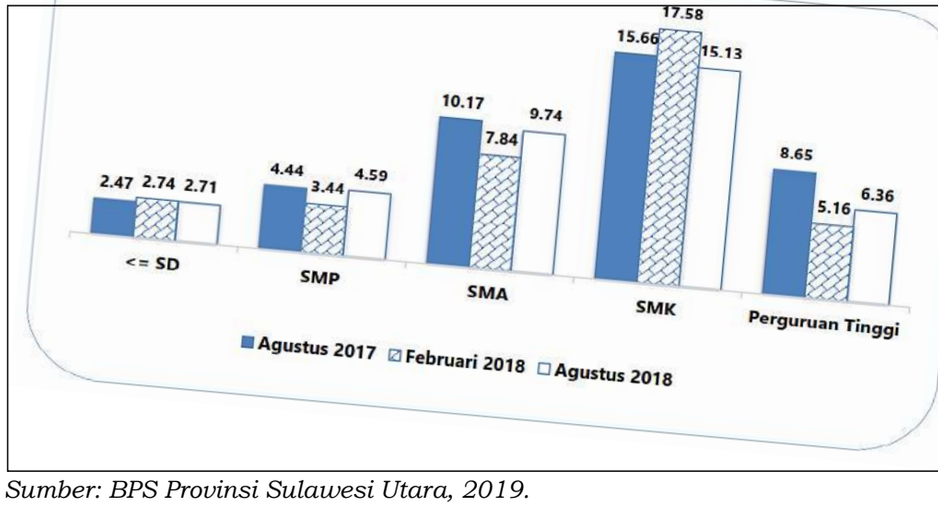

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Kualitas pekerja diukur dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih tergolong rendah, yakni sebagian besar pekerja berpendidikan rendah (tamat SMP ke bawah). Untuk pekerja dengan pendidikan menengah (SMA sederajat) ada sekitar sepertiga dari total pekerja, dan persentase terkecil adalah berpendidikan tinggi (Diploma/Sarjana). Persentase penduduk bekerja berpendidikan

menengah dan tinggi naik 0,47 poin dan 0,04 poin. Persentase penduduk bekerja yang berpendidikan rendah turun 0,51 poin.

Grafik 2.29
Perse *Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017-*

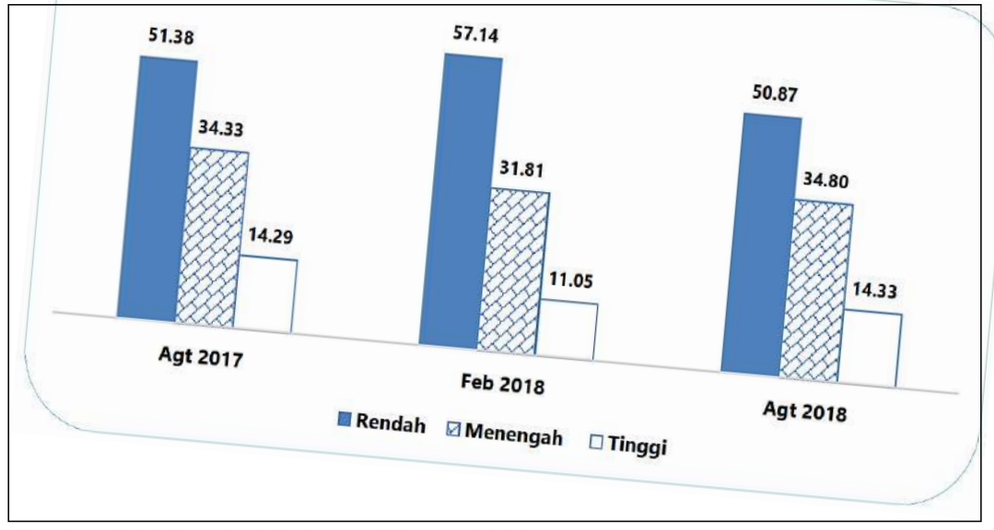

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Tabel 2.128
Sumber Daya Manusia Terhadap Indikator Rasio Lulusan S1/S2/S3

Status Pekerjaan Utama ***Main Employement Status***	**≤ SD ≤** ***Elementary School***	**SMP** ***Junior High School***	**SMA** ***Senior High Scool***	**Perguruan Tinggi** ***Collage***	**Jumlah** ***Total***
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Berusaha sendiri *Own account worker*	121 675	64 694	102 858	13 827	303 054
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar *Employer assisted by temporary worker/unpaid worker*	39 100	22 267	26 160	3 915	91 442
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar *Employer Assisted by permanent worker/paid worker*	10 978	8 262	16 927	5 049	41 216
Buruh/karyawan/pegawai Employee	74 496	54 172	199 112	145 929	473 709
Pekerja Bebas *Casual Worker*	77 964	36 927	29 504	856	145 251
Pekerja Keluarga/tak dibayar *Family Worker/Unpaid worker*	29 439	16 497	25 769	5 144	76 849
Jumlah/*Total*	353 652	202 819	400 330	174 720	1 131 521

Sumber: Sulawesi Utara dalam angka 2020

2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Dependency Ratio atau Rasio ketergantungan perbandingan antara jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia tidak produktif (kelompok usia di bawah 15 tahun dan kelompok usia di atas 64 tahun) terhadap dengan jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia 15–64 tahun. Indikator ini dapat diartikan sebagai beban ketergantungan kelompok penduduk usia tidak produktif terhadap kelompok penduduk usia yang produktif.

Penduduk usia produktif (15- 64 tahun) mencapai 1,71 juta orang, dan usia nonproduktif sebanyak 793,23 ribu orang menjadikan angka dependency ratio atau rasio ketergantungan menjadi 46,29, yang artinya dalam 100 orang usia produktif menanggung 46 orang usia nonproduktif. Nilai ini menunjukkan di Sulawesi Utara 1 orang usia nonproduktif ditanggung oleh setidaknya 2 orang usia produktif.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

Pelaksanaan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan setiap awal tahun terhadap kinerja tahun sebelumnya adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk perbaikan kinerja daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta untuk penentuan kebijakan pembangunan tahun yang akan datang.

Tabel 2.129
Evaluasi Capaian Indikator Makro Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Status Capaian Target Tahun 2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,6	6,6	4,16	🔴
2.	PDRB per Kapita (Rp, Juta)	45	45	50,04	🟢
3.	Inflasi (%)	5	5,00	2,65	🟢
4.	Gini Ratio (%)	0,38	0,38	0,359	🟢
5.	Kemiskinan (%)	7,5	7,5	7,36	🟢
6.	Pengangguran (%)	6,6	6,6	7,06	🔴
7.	IPM (%)	72	72	73,30	🟢

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ekonomi Sulawesi Utara Tahun 2021 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,16 % dibandingkan tahun 2020, sebagai efek dari pertumbuhan sebagian besar lapangan usaha yang terkontraksi. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2021 utamanya didukung dari sisi produksi dengan adanya 16 lapangan usaha yang tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan minuman. Dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh positif kecuali pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen eksport barang dan jasa.

Tabel 2.130
Evaluasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Status Capaian Target Tahun 2021
1.	**PENDIDIKAN**				
1.1	APK SMA/MA (%)	86.16	86,16	86,17	
1.2	APM SMA/MA (%)	64.20	64,2	63,33	
1.3	Angka Putus Sekolah SMA/MA (%)	0.70	0,7	0,18	
1.4	Angka Kelulusan SMA/MA (%)	99.56	99,56	99,56	
1.5	Rasio Guru/Murid SMA/MA	1:17	1:17	1:13,4	
1.6	Jumlah Ruang Kelas Baik SMA (Ruang)	1.979	1.979	2.223	
1.7	Ratio APK Perempuan: Laki-laki di SMA	113	111	103,25*	
1.8	Angka Putus Sekolah SMK (%)	0.70	0,7	0,32	
1.9	Angka Kelulusan SMK (%)	99.56	99,56	99,56	
1.10	Jumlah Ruang Kelas Baik SMK (Ruang)	2.311	2311	2.470	
1.11	Rasio Guru/Murid SMK/MA	1:19	1:19	1:12,3	
1.12	Ratio APK Perempuan: Laki-laki di SMK	111	110	103,25*	
1.13	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 (%)	99.85	99,85	99,86	
1.14	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9.00	9,01	9,62	
1.15	Angka Partisipasi	70.68	70,68	73,86	

	sekolah Pendidikan Menengah (%)				
2	**KESEHATAN**				
2.1	Cakupan kematian Neo Natal / 1000 Kelahiran Hidup	18	18	4	
2.2	Angka Kematian Balita/ 1000 Kelahiran Hidup (kasus)	38	38	6	
2.3	Angka Kematian Bayi/1000 Kelahiran Hidup (kasus)	28	28	5	
2.4	Angka kematian Ibu/100,000 KH	125	125	172	
2.5	Usia Harapan Hidup	71,05	71,05	71,76	
2.6	Ratio Puskesmas/12,000 penduduk	1:12.000	1:12.000	1:12.000	
2.7	Presentase gizi buruk (%)	1	1	0,024	
2.8	Prevalensi dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi (%)	4	4	7,1	
2.9	Persentase Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	75	75	72,27	
2.10	Jumlah Kab/Kota dengan API Malaria <1 / 1,000 penduduk	15	15	12	
2.11	Jumlah Kasus TB tercatat per 100,000 penduduk yang diobati	340	340	224	
2.12	Jumlah kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	14	14	8	
2.13	Persentase angka kasus HIV yang diobati	100 %	100%	75,6%	
2.14	Presentase Kab/kota yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok di minimal 50 % sekolah (%)	100	90	30%	
2.15	Jumlah Kab/kota yang memiliki RSUD daerah yang tersertifikasi/	10	10	13	

	Akreditasi				
2.16	Terbangunnya fasilitas RSUD dan Rumas Sakit Mata (COD 2021)	COD 1 RSUD dan 1 RS Mata	2	2	
2.17	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi/akre ditasi	187	187	169	
2.18	% Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	70	70	73,31%	
2.19	% Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	80	80	89,49%	
2.20	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	87 %	87,0%	60,34%	
2.21	Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas I SD	95 %	95,0%	73,85%	
2.22	Puskesmas Mampu Laksana PKPR	75 %	75	31,8%	
2.23	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Antenatal K4	84	84	83,26%	
2.24	Presentase Ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan	91%	91	84,57%	
3	**SOSIAL**				
3.1	Kemiskinan	7,5 %	7,5%	7,36 %	
3.2	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (Baseline: Berdasarkan Kepmensos 178/HUK/2016, Jumlah panti=73, Jumlah PMKS=2933)	1,50	2,65	2,65	
3.3	Persentase (%) Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan	60 %	60%	60%	

	standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial,				
3.4	Persentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (panti)	12	3	3	
3.5	Persentase (%) Organisasi Sosial/ Yayasan/ LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti,	60 %	60%	60%	
3.6	Persentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial,	66,5 %	66%	66 %	
4	**PENGANGGURAN**	66 %	**6,60%**	7,06%	
4.1	Ratio Penduduk yang Bekerja	59,25 %	59,25%	94,43%	
4.2	Ratio Partisipasi Angkatan Kerja	63,80 %	63,80%	64,41%	
5	**ANGKA KRIMINALITAS YANG TERTANGANI (JUMLAH TINDAK KRIMINAL TERTANGANI DALAM SATU TAHUN PER JUMLAH PENDUDUK x 10,000)**		**580**	**4,180***	
6	**SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA**				
6.1	Grup Seni Musik Aktif	90	90	70	
6.2	Grup Seni Tari Aktif	50	50	30	

6.3	Jumlah teater/sastra Aktif	45	45	35	
6.4	Gedung Kesenian	3	3	3	
6.5	Apresiasi terhadap maestro ditiap cabang seni	8	8	6	
6.6	Seniman Lokal	11	11	7	
6.7	Warisan Takbenda	9	9	9	
6.8	Apreasiasi terhadap pelaku warisan tak benda	9	9	9	
6.9	Pendataan koleksi museum sulut	50	50	30	
6.10	Klub Olahraga (Standar 1/10,000)	12	12	13	
6.11	Gedung Olahraga (Standar 1/10,000)	16	16	22	
6.12	Jumlah organisasi pemuda	30	30	11	
6.13	Jumlah organisasi olahraga	30	30	53	
6.14	Jumlah kegiatan kepemudaan	70	70	46	
6.15	Jumlah kegiatan olahraga	70	70	55	
6.16	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019;	45 %	45%	40%	
6.17	Prestasi olahraga ditingkat nasional / tingkat internasional	10/8	10/ 8	13/8	
6.18	Prestasi olahraga paralympic ditingkat nasional dan tingkat internasional	10;Nasional;1 internasional	10 Nasional internasional	7 Nasional; 1 Internasional	
	ASPEK PELAYANAN UMUM				
	URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				

	DASAR				
1	**PENDIDIKAN**				
1.1	Penuntasan Buta Aksara	99,80%	99,80%	99,81*	
1.2	Angka kelulusan SMA	99,56%	99,56	99,56	
2	**KESEHATAN**				
2.1	Usia Harapan Hidup	71,05 Tahun	71,05 tahun	71,76 tahun	
2.2	Cakupan kematian Neo Natal / 1000 Kelahiran Hidup (%)	18	18	4	
2.3	Angka Kematian Balita / 1000 Kelahiran Hidup	38	38	6	
2.4	Angka Kematian bayi / 1000 Kelahiran Hidup	28	28	5	
2.5	Usia Harapan Hidup	71,05	71,05	71,76	
2.6	Presentase gizi buruk	3%	3,02%	0,024	
3	**LINGKUNGAN HIDUP**				
3.1	Persentase penanganan sampah (M^2)	60% dari 1,169,559,81 Timbunan Sampah	60% dari 1.169.559,81 timbulan sampah	69,97% dari 1,054,441,75 timbulan sampah	
3.2	% Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	70 %	70%	-*	Belum ada data
3.3	AMDAL (dokumen)	45	9	17	
3.4	Pengelolaan Limbah B3 (Perusahaan)	46	6	36	
3.5	Persentasi Pengendalian pencemaran kualitas udara	8 Kota	8 kota	15 Kota	
3.6	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan terhadap izin lingkungan	100% dari 125 pelaku usaha/kegiatan	100% dari 25 pelaku usaha/ kegiatan	100% dari 3 pelaku usaha/ kegiatan	

3.7	Jumlah KLHS	11	1	1	
3.8	Konservasi Sumber Daya Alam (Daerah Aliran Sungai)	125 Lokasi	25 Lokasi	3	
4	**SARANA DAN PRASARANA UMUM**				
4.1	Proporsi panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap	878,74 KM dari 998,613 KM (89,54% kemantapan jalan)	878,74 km dari 998.613 km (89,54% kemantapan jalan)	850,837 km Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap dari 926,737 km (91,81% Kemantapan Jalan)	
4.2	Jumlah KK yang memperoleh akses air limbah	950KK	450 KK	38 Unit SPALD-S, setiap unit melayani 5 KK (38 x 5 = 190 KK)	
4.3	Ratio jaringan irigasi/persentasi daerah irigasi yang terairi air irigasi	Tercapainya fungsi pelayanan air untuk irigasi secara maksimal yang menunjang ketahanan pangan provinsi/nasional yang berkelanjutan(84,43% kondisi mantap atau 15,453 ha luas fungsional irigasi dari 18,302 ha luas potensial irigasi)	Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan 12 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (84,43% kondisi mantap atau 15,453 Ha Luas Fungsional Irigasi dari 18,302 Ha Luas Potensial Irigasi)	94,75% Kondisi Mantap atau 17.341 Ha Luas Fungsional Irigasi dari 18.302 Ha Luas Potensial Irigasi	
4.4	Jumlah KK yang dilayani oleh sistem persampahan	1,000KK	400 KK	-*	Belum ada data
4.5	Rasio Rumah Layak Huni	97,92%	97,92%	69%	
4.6	Jumlah KK yang terlayani akses Sistem Penyediaan Air Minum	5,000 SR	1600 SR	80 SR	
5	**PENATAAN RUANG**				

5.1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	74,83 %	74,83%	95,58	
5.2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	68,50 %	68,50%	95,58%	
5.3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	53 %	53,00%	60%	
5.4	Luas Tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum (ha)	80 ha	80	27,5	
5.5	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas ber HPL/HGB	56 %	56%	70%	
5.6	Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan	5,14 %	5,14%	10%	
6	**PERHUBUNGAN**				
	Produksi Angkutan				
6.1	Angkutan Pelabuhan Laut:				
	Angkutan penumpang (org)	2,000,000	2.102.000	1,792,207	
	Angkutan barang (ton)	10,181,212,06	10.181.212,06	9,484,000	
	Angkutan Peti Kemas (box)	1,307,032 Box	1.307.032	14,583,000	
6.2	Bandar Udara:				
	Angkutan penumpang:				
	Penerbangan internasional	164,652	164.652	18,101	
	Penerbangan domestic	2,007,000	2.007.000	906,916	
	Penerbangan internasional (angkutan barang-ton)	2,746,616,90	2.746.616,90	511,705	
	Penerbangan domestic (angkutan peti kemas – box)	38,184,546,29	38.184.546,29	16,065.668	

6.3	Jumlah bandar udara pusat penyebaran primer	1 Buah	1 buah	1 buah	
6.4	Jumlah Bandar udara pusat penyebaran tersier	1 Buah	1 buah	1 buah	
6.5	Jumlah Bandar udara bukan pusat penyebaran	3 Buah	3 buah	3 buah	
6.6	Jumlah pelabuhan utama(internasional HUB)	1 buah	1 buah	1 buah	
6.7	Jumlah pelabuhan pengumpul (nasional)	11 Buah	11 buah	5 buah	
6.8	Jumlah pelabuhan pengumpan regional	3 Buah	3 buah	11 buah	
6.9	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal	25 Buah	25 buah	27 buah	
6.10	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	16 Buah	16 Buah	16 buah	
6.11	N Jumlah terminal bus tipe A	5 Buah	5 buah	4 buah	
6.12	Jumlah terminal bus tipe B	15 Buah	15 buah	10 buah	
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
1	**PENANAMAN MODAL**				
1.1	Target rencana investasi PMDN (Rupiah)	12,823,763,200,000	4.000.000.000.000	3,005,640,000,000	
1.2	Target rencana investasi PMA	24,243,861,310,000	6.000.000.000.000	2,241,929,000,000	
1.3	Target Izin Investasi	7,276	1.700	1,469	
2	**KOPERASI DAN UKM**				
2.1	Jumlah Koperasi Aktif	3,517	3,517	3,722	
2.2	Jumlah usaha mikro, kecil Menengah	61,958 UMKM	61958 UMKM	423,036 UMKM	
2.3	Jumlah wirausaha baru	3,591	247 Wirausaha Baru	765	
2.4	Sarjana wirausaha baru	12,428 Org	12.428 org	-	Belum ada data
2.5	Wirausaha baru non sarjana	2,592 Org	2.592 org	-	Belum ada data

2.6	Sertifikasi hak atas tanah bagi usaha mikro, kecil	300	300	-	Belum ada data
3	**PANGAN**				
3.1	Ketahanan pangan yang ditunjukkan dengan: Ketersediaan Energi dan Konsumsi Energi	Ketersediaan energi minimal 2,400; konsumsi energi minimal 2,150	Ketersediaan energi minimal 2400, Konsumsi Energi minimal 2150	Ketersediaan energi minimal 2,812; Konsumsi Energi minimal 2,335	
3.2	Menurunnya daerah beresiko rawan pangan	12 % (dari 224 desa beresiko)	2 % (dari 224 desa beresiko)	4,68 % (dari 224 desa beresiko)	
3.3	Cakupan ketersediaan infrastruktur kemandirian pangan	17 lumbung pangan didaerah kepulauan dan non sentra produksi	4 Lumbungan pangan di daerah kepulauan dan non sentra produksi	-*	Belum ada data
4	**KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**				
4.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,6 %	0,9%	1,0%	
4.2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) per WUS (15-49 tahun)	2,25	2,25	2,36	
4.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet needs)	10%	10%	8,76%	
4.4	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	30%	30%	37%	
4.5	Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera (%)	37,380	37.380	-	
4.6	Tersedianya profil kependudukan provinsi	8	2	2	
4.7	Cakupan peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan data base kependudukan yang akurat	15	15	15	

5	**KETENAGAKERJAAN**				
5.1	Rasio Penduduk yang bekerja	59,25 %	59,25%	94,43%	
5.2	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	63,80 %	63,80%	64,41%	
5.3	Pencari kerja yang sudah ditempatkan	40 %	40%	67% (670 orang)	
5.4	Angka penyelesaian kasus hubungan industrial	410 kasus yang diselesaikan	120 kasus yang diselesaikan	25 kasus yang diselesaikan	
6	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
6.1	Ratio kontribusi perempuan dlm pekerjaan upahan disektor non pertanian	47%	47%	47%	
6.2	Proporsi kursi parlemen yang diduduki perempuan	25%	25%	29%	
6.3	Indeks pemberdayaan gender	79,85 %	79,85	79,98%	
6.4	Indeks pembangunan gender	96,00 %	96,00	96	
6.5	Ratio KDRT	0,02 %	0,02	0,02	
6.6	Tenaga kerja perempuan yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	200 Org	200 org	200 org	
6.7	Jumlah calon wirausaha baru perempuan yang dilatih	500 Org	500 org	-	
6.8	Prosentase calon pekerja migrant perempuan yang terlayani dan tercatat	75%	75%	75%	
6.9	Jumlah kader Parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik	500 Org	100 Orang	-	
6.10	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (jumlah	45 %	45%	45%	

	perempuan dilembaga pemerintah/jumlah pekerja)				
6.11	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (pekerja perempuan dilembaga swasta/jumlah pekerja perempuan x 100)	14 %	14%	14%	
6.12	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (pekerja anak usia 5-14 tahun/jumlah pekerja usia 5 tahun keatas x 100)	2 %	2%	-	Belum ada data
6.13	Prosentase SKPD Provinsi dengan Renstra Responsif Gender	40 %	40%	40%	
6.14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	80 %	80%	100%	
6.15	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	80 %	80%	100%	
6.16	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100%	100%	
7	**KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**				
7.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 anak	2 anak	2 anak	
7.2	Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	70 %	70%	70 %	

	semua cara				
7.3	Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun cara modern	78 %	78,00%	78 %*	
8	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
8.1	Jumlah surat kabar nasional	5 Buah	5 buah	1 buah	
8.2	Jumlah surat kabar local	7 Buah	7 buah	11 buah	
8.3	Jumlah stasiun penyiaran radio	20 Buah	20 buah	4 buah	
8.4	Jumlah stasiun penyiaran TV local	3 Buah	3 buah	3 buah	
8.5	Terbangunnya Command Centre	1 Unit	-	-	
9	**PERTANAHAN**				
9.1	Luas Lahan terdaftar	85,152,231,21 ha	85,152,231, 21 ha	29,27 ha	
9.2	Jumlah bidang tanah terdaftar	332,391	332,391	135	
10	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				
10.1	Jumlah Kab/Kota dan Perangkat Daerah Prov, yang menerapkan SPM	39 PD dan 15Kab/Kota	38 PD dan 15 Kab/ Kota	38 PD dan 15 Kab/Kota^	
10.2	Jumlah LSM	56	56	16	
10,3	Jumlah Organisasi Masyarakat	48	48	25	
10.4	Jumlah Organisasi Keagamaan	6	6	7	
11	**PERPUSTAKAAN**				
11.1	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	67,554	67.554	68,541	
11.2	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	7,846	7.846	1,450	

12	**PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**				
12.1	Rasio kecukupan personil Satuan Polisi Pamong Praja se Provinsi Sulawesi Utara	5,665	5.665	4,52: 1000 penduduk	
12.2	Rasio pelayanan 1 orang anggota Satpol PP kepada masyarakat	400	400	226,13: 50,000 Penduduk	
12.3	Rasio peningkatan keamanan dan ketertiban	95,08 %	95.08%	100%	
12.4	Tingkat Penegakan Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya	100 %	100%	100%	
12.5	Persentase tingkat pelanggaran terhadap Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya	11,07 %	11.07%	100%	
12.6	Jumlah personil yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Satpol PP	310 Org	310 org	0%	
12.7	Penurunan Crime Rate	4,92	4.92	100%	
12.8	Persentase jumlah kebakaran yang tertangani	60 %	60%	-	Belum ada data
	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	**KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH**				
1.1	Nilai Tukar Petani	101	101	110,51	
1.2	Indeks Pembangunan Manusia	72	71,8	73,30	
1.3	Jumlah kunjungan wisman dan wisnus	7,5 juta WISNU dan 650 WISMAN	1.500.000 Wisnus dan 150.000 Wisman	447.020 wisnus dan 23.031 wisman	
1.4	Occupancy Rate	70 %	70%	-	Belum ada data
1.5	Indeks Williamson	0,36 – 0,38	0,36-0,38	-	Belum ada data
2	**IKLIM BERINVESTASI**				
2.1	Jumlah Demo	15	15	-	Belum ada data

2.2	Kemudahan Perijinan (Lama Proses perijinan)	4 hari	4 hari	3 hari	
	URUSAN PILIHAN				
1	**PERTANIAN DAN PETERNAKAN**				
1.1	Produksi Tanaman Pertanian	Produksi padi 786,543 ton,	Produksi padi 786.543 ton	Produksi padi 788.787 ton	
		Produksi,jagung 1,535,987 ton	Produksi jagung 1.535.987 ton	Produksi jagung 1.538.063 ton	
		Produksi kedelai 11,400 ton	Produksi kedelai 11.400 ton	Produksi kedelai 3.122 ton	
		Produksi bawang merah 2,915ton	Produksi bawang merah 2.915 ton	Produksi bawang merah 4.986 ton	
		Produksi cabe rawit 14,113ton	Produksi cabe rawit 14.113 ton	Produksi cabe rawit 17.370 ton	
		Produksi cabe besar 3,942ton	Produksi cabe besar 3.942 ton	Produksi cabe besar 8.882 ton	
		Produksi tomat 26,783 ton	Produksi tomat 26.783 ton	Produksi tomat 66.711 ton	
1.2	Produksi Peternakan	Produksi daging sapi 3,465,691Kg	Produksi daging sapi 3.465.691 kg	Produksi daging sapi 3.702.209 kg	
		Produksi daging babi 22,526,776 Kg	Produksi daging babi 22.526.776 kg	Produksi daging babi 27.197.166 kg	
		Produksi daging ayam 2,432,007 Kg	Produksi daging ayam 2.432.007 kg	Produksi daging ayam 3.116.660 kg	
		Populasi sapi perah 75 ekor	Populasi sapi perah 35 ekor	Populasi sapi perah 18 ekor	
		Populasi kuda pacu 150 ekor	Populasi kuda pacu 700 ekor	Populasi kuda pacu 4.016 ekor	
2	**PERKEBUNAN**				
2.1	NTP Pekebunan	95	NTP Perkebunan 95	106,3	
2.2	Produksi dan produktifitas komoditi perkebunan meningkat	Produksi kelapa 275,500ton	Produksi kelapa 275.500 ton,	270,370	
		Produktivitas kelapa 1,250 Kg/ha	Produktifitas kelapa 1250 kg/ha	1,217	

		Produksi cengkeh 20,230Ton	Produksi Cengkih 20.230 ton	153	
		Produktifitas cengkeh 445 Kg/ha	produktifitas cengkih 445 kg/ha	3,59	
		Produksi pala 10,170 ton	Produksi Pala 10.170 ton	12,181	
		Produktifitas pala 1,170Kg/ha	Produktifitas pala 1170 kg/ha	1,160	
		Produksi Kakao 4,260Ton	Produksi kakao 4260 ton	5,678	
		Produktifitas kakao 522Kg/ha	Produktifitas kakao 522 kg/ha	705	
		Produksi aren 1,334 ton	Produksi Aren 1334 ton	1,160	
		Produktifitas aren 475Kg/ha	Produktifitas Aren 475 kg/ha	496	
3	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
3.1	Produksi perikanan tangkap (ton)	405,422	405.422	344,426.77	
3.2	Produksi perikanan budidaya (ton)	575,000	575.000	402,311.85	
3.3	Nilai ekspor perikanan (US$1000)	160,000	160.000	127,437	
3.4	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	61,5	61,5	62,67	
3.5	Jumlah penerimaan PAD(Rp,1000)	2,200,000	2.200.000	1,800,448, 500*	
3.6	Jumlah kontribusi PDRB	8,0	8,0	6,7	
3.7	Jumlah PPK yang dikelola potensi ekonominya (pulau)	7	7	5	
3.8	Luas kawasan konservasi (ha)	150,000	150.000	374,231	
3.9	Prosentase penurunan tingkat kerusakan terumbu karang da mangrove (%)	22	22	25	
3.10	Jumlah jenis keanekaragaman hayati yang dikelola (jenis)	7	7	5	
3.11	Prosentase penyelesaian tindak pidana	95	95	-	Tidak ada data

	perikanan (%)				
3.12	Prosentasi kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan yang berlaku	100	98	95	
3.13	Jumlah kerjasama pengelolaan SDKP (Mou)	10	10	6	
3.14	Indeks NTN perikanan (%)	-	-	-	
3.15	NTN (nelayan)	108	108	105,59	
3.16	NTPi (Pembudidaya)	102	102	101,19	
4	**KEHUTANAN**				
4.1	Menurunnya lahan kritis dalam kawasan hutan	0,60 % (5,000 ha)	0,12 % (1000 Ha)	152,5% 1,525 ha*	
4.2	Menurunnya kerusakan kawasan hutan	7,363,11 ha	7.363,11 Ha	2,11%* 177 ha	
4.3	Peningkatan Pengelolaan Taman Hutan Raya	2 Tahura	2 Tahura	1 Tahura*	
5	**ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL**				
5.1	Rasio Elektrifikasi(%)	99 %	91%	99%	
5.2	Rasio Desa berlistrik (%)	100 %	100%	99,39%	
5.3	Produksi Logam	211,213,19 Oz	211.213,19 OZ	97,816,00	
5.4	Produksi Non Logam	25,946,241,41M 3	25.946.241,41 M3	14,562,226	
5.5	Penurunan Jumlah Wilayah PETI	100%	100%	51,82%	
6	**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**				
6.1	Nilai Ekspor Produk Industri	Peningkatan nilai exoport ($) sebesar 6 % per tahun	Peningkatan Nilai Ekspor (US$) sebesar 6% per tahun	39,65%	
6.2	Pertumbuhan Industri	2,77 %	2,77%	1,02%	
6.3	Jumlah IKM (unit usaha) Aktif	134	134	450	
1	**OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN UMUM, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN**				

	PERSANDIAN				
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	6,6 %	6,6 %	4,16%	
1.2	Laju Inflasi Provinsi	5 %	5%	2,65	
1.3	Pendapatan per Kapita (PDRB Per Kapita-Juta)	45	45	50,04	
1.4	IPM	72	72	73,30	
1.5	Indeks Gini	0,38	0,38	0,359	
2	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**				
2.1	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	5	5	5	
2.2	Kab/kota yang menyelesaikan dokumen RAD	14	14	14	
2.3	Prosentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	95%	95%	95%	
2.4	Konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dalam RPJMD-RKPD-KUA/PPAS	90%	90%	96%	
2.5	Cakupan Hasil Evaluasi pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	87 %	87%	87%	
3	**ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH**				
3.I	Opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah Prov, Sulut	WTP	WTP	Belum ada Opini BPK	
3.2	Cakupan jumlah dokumen RAPBD yang disusun tepat waktu	3	3	3	
3.3	Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun Anggaran	Minimal 5 %	Minimal 5%	9.70%	
3.4	Persentase Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	34 %	34%	42,98*	
3.5	Jumlah Potensi Wajib Pajak PKB	823,135,4	823.1354	697,563	
3.6	Jumlah Potensi Wajib Pajak PBBKB	10 WAPU	10 WAPU	8 WAPU	
3.7	Jumlah Potensi Wajib Pajak PAP	24 WP	24 WP	43 WP	
	Jumlah Objek Penerimaan Pendapatan Di Luar	15 Objek	15 objek	24 objek	

3.8	Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah				
3.9	Jumlah Potensi Wajib Retribusi	39 WR	39 WR	50 WR	
3.10	Persentase Potensi Wajib Pajak Yang Terpungut	70 %	70%	45%	
3.11	Persentase Potensi Wajib Retribusi Yang Terpungut	100 %	100%	90%	
3.12	Persentase Potensi Objek Penerimaan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	100 %	100%	100%	
3.13	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 %	82%	97,14%*	
3.14	Rasio Cakupan Sentra Layanan Perpajakan Daerah Terhadap Wajib Pajak Per Hari Yang Dilayani Antar Tahun Anggaran	1;57 (per hari)	1:57 (per hari)	1:35 (per hari)	
3.15	Persentase Tingkat Gangguan dan Sistem	1,0 %	1,0%	1,3%	
3.16	Persentase Tingkat Gangguan Perangkat Keras Teknologi Informasi	1,0 %	1,0%	1,3%	
3.17	Persentase Tingkat Pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan	100 %	100%	100%*	
3.18	Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kab,/Kota/Provinsi Yang Melaksanakan Hasil Kesepakatan	100 %	100%	84,61	
4	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				
4.1	Jumlah rekomendasi hasil kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan	23 Rekomendasi	23 Rekomendasi	36 Rekomendasi	
4.2	Jumlah inovasi dan teknologi daerah yang dipublikasikan	16	5	8	
4.3	Jumlah perjanjian MOU kerjasama kelitbangan dengan kab/kota/PT dan tindak lanjutnya	15	15	7	
5	**KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				

5.1	Persentase ASN dengan disiplin kerja tinggi	95%	95%	96%	
5.2	Cakupan pejabat struktural dan fungsional menduduki jabatan sesuai anjab dan ABK	88%	88%	93%	
5.3	Cakupan layanan baku mutu kepegawaian	100%	100%	97%	
5.4	Persentase alumni diklat kepemimpinan yang menerapkan inovasi/proyek perubahan	75%	75%	96%	
5.5	Persentase peserta diklat kompetensi manajerial lulus dengan kategori sangat memuaskan	75%	75%	96%	
5.6	Persentase ASN menduduki jabatan struktural telah mengikuti diklat manajerial sesuai jabatan yang diampu	100%	100%	-	
5.7	Persentase instansi/kab-kota pengirim puas terhadap pelaksanaan diklat kepemimpinan	100%	100%	Kab/Kota tidak melaksanakan Diklat Struktural sehubungan dengan Refocusing dan Realokasi Anggaran	Tidak dilaksanakan
5.8	Persentase peserta diklat kompetensi teknis inti lulus dengan kategori sangat memuaskan	95%	95%	80%	
5.9	Persentase peserta diklat kompetensi teknis umum dan fungsional lulus dengan kategori sangat memuaskan	95%	95%	25% (Tidak dapat dilaksanakan100% sehubungan dengan Refocusing dan Realokasi Anggaran)	
5.10	Jumlah karya tulis di bidang Administrasi dan pengelolaan kelembagaan yang Terpublikasi di media ilmiah/ Publikasi nasional	30	30	26	

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Sulawesi Utara tahun 2021, teridentifikasi dari hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, diantaranya meliputi:

1) Terkontraksinya struktur ekonomi Sulawesi Utara terutama pada sektor akomodasi dan makan minum serta transportasi yang utamanya dipengaruhi oleh puncak pembatasan aktivitas dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19;
2) Kualitas SDM mengalami sedikit penurunan terutama terkait komponen pengeluaran per kapita akibat menurunnya pendapatan masyarakat terutama di masa pandemi.
3) Masih tingginya kecenderungan ketergantungan terhadap energi fosil akibat dari belum optimalnya pengelolaan sumber daya energi baru terbarukan;
4) Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang ditandai dengan belum selesainya pembangunan TPA Regional Mamitarang dan belum adanya fasilitas pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis;
5) Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat, akibat dari menurunnya ketersediaan dan konsumsi pangan secara khusus beras, distribusi yang belum maksimal, maupun susunan ragam pangan yang belum terdiversifikasi dengan baik;
6) Kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan; dan
7) Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal terutama di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, akibat dari perubahan regulasi terkait pemenuhan SPM yang mempengaruhi proses perencanaan.

Berdasarkan Permasalahan pembangunan daerah Sulawesi Utara tahun 2021, maka di rumus Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2023, sebagai berikut:

1) Penguatan Ekonomi melalui industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa;
2) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM, Pemajuan Kebudayaan dan Revolusi Mental;
3) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
4) Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan;

5) Peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan serta distribusi pangan yang terdiversifikasi;
6) Peningkatan kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan;
7) Penguatan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta penyelanggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Pendidikan

- Menurunnya kompetensi siswa akibat belum ada kepastian pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka dimasa pandemi;
- Kurangnya kompetensi guru di bidang teknologi penunjang pembelajaran secara daring di masa pandemi;
- Rasio Guru terhadap murid di tingkat sekolah menengah belum merata terutama diwilayah kepulauan;
- Kualitas kompetensi guru masih sangat rendah meskipun sudah mendapat sertifikasi;
- Keterpenuhan jumlah guru belum diikuti dengan keterpenuhan kompetensi guru;
- Sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah masih belum memadai terutama diwilayah kepulauan;
- Terbatasnya akses internet dalam menunjang pelayanan pendidikan terutama diwilayah kepulauan;
- Masih lemahnya koordinasi penyelarasan kegiatan antara dinas pendidikan di tingkat provinsi dan kab/kota;
- Minimnya data terkait jumlah anak usia sekolah reguler dan jumlah anak berkebutuhan khusus yang terupdate secara berkala.

b Kesehatan

- Pandemi COVID-19 belum dapat diperkirakan kapan berakhir;
- Masih adanya kasus stunting;
- Prevalensi penyakit menular di antaranya malaria, diare, dan DBD masih tinggi;
- Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan dan kasus kematian bayi;
- Masih adanya puskesmas dan Rumah sakit yang belum terkareditasi oleh karena kebijakan Pandemi Pemerintah Pusat terkait COVID-19;
- Kualitas tenaga, fasilitas dan infrastruktur kesehatan belum memadai serta distribusi yang belum merata terutama di daerah kepulauan;

- Pedidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi masih kurang;
- Prevalensi penyakit tidak menular di antaranya penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes, dan penyakit paru Obstruktif kronis (PPOK) makin tinggi.
- rendahnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui pola hidup sehat.

c. Pekerjaan Umum
   - Kondisi jalan Provinsi dalam kondisi mantap masih perlu ditingkatkan;
   - Akses air bersih masih sangat rendah dan belum mencapai standar pelayanan minimum perumahan rakyat;
   - Akses sanitasi masih sangat rendah.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
   - Akses terhadap air bersih, penanganan persampahan dan sanitasi belum memenuhi standar pelayanan minimum;
   - Masih terdapat kawasan permukiman yang belum dilengkapi dengan fasilitas PSU.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
   - Penegakan Perda belum optimal;
   - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah yang berlaku;
   - Koordinasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan pemangku kepentingan belum optimal dalam mencegah tindakan yang bertentangan dengan hukum, penegakan Perda dan pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).

f. Sosial
   - Penanganan rumah tangga miskin by name by address secara holistik belum optimal;
   - Pemutakhiran DTKS belum maksimal;
   - Penanganan terhadap 22 (dua puluh dua) kelompok marginal (penyakit jiwa, anak terlantar, bayi terlantar, anak yang bermasalah hukum, dan lain-lain) masih terbatas;
   - Fasilitas penapungan (*shelter*) untuk penanganan masalah kesejahtraan sosial (PMKS) masih terbatas.

2.3.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

- Kemajuan teknologi akan menurunkan kebutuhan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pengangguran;
- Penggunaan tenologi yang lebih tinggi membutuhkan penggunaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang lebih tinggi, sedangkan perkembangan penguasaan keterampilan oleh tenaga kerja masih relatif lambat;

- Migrasi tenaga kerja dari daerah lain yang disebabkan oleh ketertarikan terhadap perkembangan ekonomi semakin meningkat sehingga dapat mengancam kesempatan tenaga kerja loal dan menimbulkan pengangguran;
- Angka pengangguran masih relatif tinggi;
- Kualitas tenaga kerja yang tersedia mencakup pengetahuan, keterampilan, disiplin dan etos kerja kebanyakan belum memenuhi kebutuhan pasar serta kepentingan pembangunan daerah;
- Pengangguran suka rela masih sering terjadi.
- Anggaran Program Pembangunan daerah dalam rangka menurunkan angka pengangguran relatif belum memadai;

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   - Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang dan peraturan terkait bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
   - Masih banyak anak-anak yang mengalami korban kekerasan oleh orang orang terdekat, di rumah, sekolah dan dimana anak-anak berada;
   - Masih terjadi kasus trafiking (perdagangan orang) di Sulawesi Utara;
   - Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang gender;

c. Pangan
   - Kualitas keberagaman konsumsi pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan.
   - Ketahanan pangan untuk swasembada beras dan daging masih perlu perhatian yang besar dan komitmen anggaran yang serius;
   - Penanganan terhadap daerah kabupaten rawan bencana belum maksimal;
   - Keamanan pangan yang masih perlu ditingkatkan sering dengan meningkatnya penemuan kasus akibat keracunan makanan;

d. Pertanahan

- Sertifikasi tanah untuk rumah tangga miskin masih perlu terus digalakkan;
- Program pemerintah untuk sertifikasi tanah belum dilakukan secara optimal.

e. Lingkungan Hidup
   - Degradasi lingkungan akibat aktivitas ekonomi dan kemasyarakatan, termasuk alih fungsi lahan semakin sering terjadi;
   - Belum tersedianya pengelolaan limbah B3.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   - Belum Optimalnya Database Kependudukan;
   - Laporan Data Kependudukan Skala Provinsi yang masih manual.
   - Kepedulian Instansi Pemerintah dan Swasta akan manfaat Pemanfaatan Data Kependudukan masih kurang;
   - Kesadaran Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan oleh masyarakat masih rendah
   - Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil masih rendah;
   - Ketersediaan jaringan internet yang berdampak pada proses perekaman dan cetak dokumen kependudukan (KTP);
   - Sarana dan prasarana penunjang operasional belum memadai.

g. Perhubungan
   - Pertumbuhan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak diikuti dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana jalan dan jembatan;
   - Pelayanan transportasi publik masih sangat perlu ditingkatkan;
   - Prasarana jalan belum memenuhi standar pelayanan minimum.

h. Komunikasi dan Informasi
   - Tingkat penyebaran danketerbukaan informasi masih sangat rendah;
   - Penerapan sistemnpemerintahan berbasis elektronik masih belum optimal;
   - Database pemerintahan daerah relatif belum memadai;
   - SDM TIK masih belum memadai.

i. Persandian dan Statistik
   - Ketersediaan dan pemanfaatan data sectoral belum optimal.

- SDM dalam penanganan insiden siber masih belum memadai.

j. Koperasi dan UKM
   - Sulitnya akses permodalan usaha koprasi dan UKM;
   - Lemahnya kompetensi pengurus koperasi untuk memaksimalkan pencapaian target usaha;
   - Prosedur perjanjian investarisasi yang masih belum kondusif untuk meningkatkan daya saing investasi.

k. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   - Masih kurangnya Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat tertinggal dan miskin;
   - Belum Optimalnya Pemberdayaan masyarakat di desa tertinggal dalam mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri;
   - kualitas penataan dan administrasi pemerintahan desa serta kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan belum maksimal;
   - belum optimalnya pelaksanaan bina desa secara berkelanjtan dalam pengelolaan keuangan dan aset, akibat adanya pergantian struktur perangkat pemerintahan desa;
   - Masih rendahnya Intervensi dan penganggaran penanganan stunting berbasis APBDes di kab/kota;
   - Kelembagaan BUMDes sebagai wadah kreativitas desa belum optimal.

l. Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
   - Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum terpenuhi kebutuhan ber KB (unmet needs) di Provinsi Sulawesi Utara;
   - Masih Kurangnya Petugas pelayanan Keluarga Berencana (bidan) yang bersertifikat (CTU);
   - Tingginya angka keluarga Prasejahtera di Provinsi Sulawesi Utara;
   - Lemahnya pelaporan terkait data Pengendalian Penduduk (Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera) ke ProvinsiSulawesi Utara.;
   - Kurangnya kebijakan/aturan daerah tentang Pelaksanaan Pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana;
   - Penguatan data dan informasi Indeks Pembangunan Keluarga dan UPPKS;
   - Kurangnya pemahaman keluarga akan gizi pada Ibu hamil sampai balita usia 2 tahun;

- Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di bidang Pengendalian Penduduk masih rendah;
- Sarana dan Prasarana penunjang operasional masih sangat kurang;
- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan dalam rangka pendewasaan usia perkawinan melalui program Genre, serta peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;
- Masih kurang dan belum optimalnya salah satu fungsi sarana Sistem Komunikasi, Informasi dan Edukasi yaitu Rumah Dataku di setiap desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi Utara.

m. Penanaman Modal
- Pandemi COVID-19 yang masih mengancam berpotensi menghambat pertumbuhan investasi;
- Kondisi infrastruktur yang kurang memadai, seperti bandara, pelabuhan, dan jalan, serta kurangnya pasokan listrik dan ketersediaan air bersih di daerah-daerah tertentu yang produktif;
- Status tanah di wilayah investasi yang kurang jelas sehingga sering menimbulkan gugatan setelah investor melakukan produksi.
- Belum tersedia Peraturan Daerah Kemudahan Berusaha;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan instansi terkait tentang pelayanan perizinan.;
- Pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM tepat waktu dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

n. Kepemudaan dan Olahraga
- Sarana dan prasarana olaraga belum tersedia secara memadai;
- Institusi-institusi yang membawahi cabang-cabang olahraga belum terkelola secara memadai.
- Lembaga-lembaga kepemudaan belum berjalan dengan baik.

o. Kebudayaan
- Belum terkoordinasinya dokumen yang berisi pokok-pokok pikiran kebudayaan di 15 Kabupaten dan Kota sebagai dokumen pemajuan kebudayaan;
- Kurangnya Penyelenggaraan festival seni dan budaya secara professional pelestarian tradisi masyarakat;
- Belum optimalnya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya peringkat provinsi yang diregistrasi dan ditetapkan.

- Kurangnya sarana dan prasarana, pengembangan seni budaya, serta dukungan manajemen kebudayaan yang memadai;
- Belum optimalnya inventarisasi warisan budaya tak benda untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai warisan budaya nasional dan warisan budaya dunia;
- Mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya seperti tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional., yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi;

p. Perpustakaan
   - Minat baca mayarakat masih rendah;

q. Kearsipan
   - Penataan arsip daerah belum sesuai standar

2.3.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan
   - Luasnya wilayah teritorial dan ZZEI Sulawesi Utara serta banyaknya pulau-pulau dan perbatasan dengan negara tetanga merupakan lahan subur ntuk penagkapan ikan secara ilegal dan perusakan ilegal perusakan dan ekosistim pesisir, Pengawasan menjadi kurang optimal karena sarana pengawasan terbatas, kurang optimal peran serta masyarakat dalam pengawasan, kurangnya koordinasi lintas sektor;
   - Dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, masih terdapat kegiatan *illegal fishing* akibat akibat kemampuan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan masih lemah, penyediaan sarana dan prasarana belum memadai;
   - Pelanggaran lintas batas oleh nelayan tradisional karena perbatasan dengan negara tetangga Republik Filipina dan kejelasan perbatasan wilayah dengan negara tetangga yang belum diselesaikan serta ABK nelayan yang status kewarganegaraan tidak jelas;
   - Sumber daya ikan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan pesisir, termasuk oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan perairan pantai. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan terkait dengan degradasi kualitas lingkungan pesisir, termasuk oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan perairan seperti penggunaaan alat tangkap yang direkomendasikan metode

penangkapan yang merusak lingkungan (bom, racun, listrik, dan lain-lain);

- Produktivitas nelayan masih tergolong rendah disebabkan armada perikanan masih didominasi oleh kapal berukuran kecil yaitu perahu tanpa motor, motor tampel dan kapal motor ukuran 0,5-3. Kelemahan dari nelayan yang hanya mampu melakukan penangkapan ikan *one day fishing*, tingginya tingkat kehilangan mutu ikan karena belum menerapkan sistem rantai dingin, keterbatasan dalam memanfaatkan dana perbankan;
- Dalam perkembangan perikanan budi daya, masih dihadapkan pada implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam penanggulangan hama dan penyakit, bahan baku pakan serta tingginya harga pakan;
- Pengembangan sistem jaminan kesehatan mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan di era perdagangan global;
- Kesejahteraan pelaku usaha perikanan merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan daya saing bangsa. Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya perlindungan terhadap pasar domestik dan sertifikasi produk perikanan.
- Aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tidak terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut, intrusi air laut kedaratan peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim. Oleh karena itu penyiapan kapasitas masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim sangat diperlukan;
- Wilayah pesisir memiliki potensi kerusakan pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran sehingga diperlukan berbagai berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian perencanaan dan upaya revitalisasi di antaranya melalui reklamasi yang terkendali.

b. Pariwisata

- Pendidikan menyangkut pengetahuan tentang kebudayaan lokal (tarian daerah, musik tradisional, dan bahasa daerah) belum terakomodasi secara memadai dan merata dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah;

- Paguyuban-Paguyuban yang dibentuk oleh masyarakat atau pun organisasi kemasyarakatan untuk mengangkat kebudayaan lokal secara rutin masih sangat minim;
- Meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata.
- Masih kurangnya masyarakat menyadari tanggung jawab untuk memperkenalkan wisata kuliner dan budaya daerah sendiri;
- Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan industri;
- Pembebasan lahan untuk pembagunan Infrastruktur dan KEK;
- Kebutuhan layanan listrik dan energi yang berkesinambungan.

c. Pertanian
- Kerusakan jaringan irigasi di lapangan. Kerusakan ini terjadi akibat bencana alam, erosi dan banjir. Jumlah jaringan irigasi yang dibangun dan direhabilitasi relatif lebih sedikit;
- Prasarana jalan pertanian dan jalan produksi yang telah dibangun jumlahnya jauh di bawah kebutuhan;
- Masih banyak serta produksi yang belum dibangun jalan usaha tani/jalan produksi akibat biaya angkutan hasil relatif mahal, juga mengakibatkan terjadinya kerusakan mekanis pada komoditi hasil pertanian serta menurunnya harga jual produk tersebut;
- Sistem perbenihan dan perbibitan daerah belum berjalan optimal;
- Keterbatasan akses petani terhadap permodalan;
- Jumlah penyuluh pertanian setiap tahun berkurang karena pensiun dan beralih kejabatan struktural;
- Sarana dan prasarana penyuluhan masih kurang;
- Anggaran untuk pelaksanaan penyelenggaran penyuluhan di tingkat pusat sampai dengan kab/kota masih terbatas;
- Penyelanggaraan penyuluhan masih tertumpu pada tanaman pangan, karena kurangnya tenaga penyuluh perikanan dan kehutanan;
- Masih rendahnya kualitas SDM penyuluh terutama dalam penyusun *feasibility study* untuk mendapatkan kredit perbankan;
- Ketersedian pangan, masyarakat melalui pengelolaan lumbung pangan masyarakat belum seluruhnya mencangkup wilayah kepulauan, termasuk di 12 pulau terluar yang ada di wilayah Sulawesi Utara, dari 9 (sembilan) di antaranya berpenghuni baru 2 (dua) pulau Miangas dan pulau Kawio;
- Cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) belum mencapai *iron stock* (jumlah yang wajib tersedia setiap saat) sebesar 275 ton sebagaimana Permentan Nomor 1 tahun 2019 tentang Penetapan Jumlah CPPD;

- Masih tingginya fluktuasi harga beberapa pangan pokok dan strategis khususnya pada saat menghadapi hari-hari besar keagamaan serta kondisi tertentu yang diakibatkan oleh faktor alam seperti perubahan iklim dan/atau cuaca, sehingga kondisi ini akan memengaruhi kemampuan akses pangan masyarakat;
- Upaya stabilisasi harga pangan belum mencakup keseluruhan komoditas pangan pokok dan strategis. Hal ini juga dipengaruhi antara lain oleh belum adanya intervensi penetapan harga minimum daerah untuk pangan lokal atau harga pangan yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- Sulawesi Utara merupakan wilayah kepulauan dari antara delapan provinsi kepulauan di Indonesia. Kondisi letak geografis ini akan sangat memengaruhi ketersediaan pangan masyarakatnya. Berdasarkan peta *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) daerah rentan rawan pangan sebagian besar berada di daerah kepulauan yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud, Sangihe dan Sitaro;

- Kualitas konsumsi pangan masyarakat Sulawesi Utara belum beragam dan berimbang. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang walaupun dari tahun ke tahun telah mengalami kenaikan skor tetapi belum mencapai skor PPH ideal yaitu skor 95-100 sebagaimana Perpres Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen pangan dan konsumsi terhadap pentingnya keamanan pangan terutama pada produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

d. Kehutanan
- Masih maraknya *illegal loging,* perambahan kawasan hutan dan kegiatan pertambangan tanpa ijin dalam kawasan hutan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu
- Kurangnya sarana dan prasarana pengamanan hutan
- Jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) dan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan (PPNS Kehutanan) masih terbatas
- Masih kurangnya peran serta para pemangku kepentingan kebakaran hutan dan lahan
- Jumlah tenaga penyuluh kehutanan terbatas
- Terjadinya konflik tenurial kawasan hutan
- Pembuatan jalan (baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten) dalam kawasan hutan yang tidak prosuderal/tanpa ijin

- Kurangnya ruang terbuka hijau di kabupaten/kota sebagai sarana ruang publik
- Identifikasi potensi sumber daya hutan (Hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, hasil hutan kayu), kelompok masyarakat serta penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Desa (HD) dalam kawasan hutan belum terfasilitasi secara optimal
- Adanya perburuan satwa yang dilindungi dalam kawasan hutan
- Adanya penerbitan surat keterangan pemilikan tanah (SKPT) oleh pemerintah desa, penerbitan akte jual beli tanah dalam kawasan hutan oleh camat dan penerbitan sertifikat tanah dalam kawasan oleh Badan Pertanahan Nasional
- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang Kawasan Taman Hutan Raya Gn. Tumpa H.V. Worang yang merupakan suatu kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi Tumbuhan dan Satwa, Pendidikan, Penelitian serta Pariwisata Alam.
- Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan
- Kurangnya ketersediaan bibit kayu berkualitas.
- Terbatasnya sarana dan prasarana persuteraan alam.

e. Energi Sumber Daya Mineral
- Kurangnya data potensi energi yang valid. Data ini berupa pra studi kelayakan potensi energi yang bisa menjadi bahan untuk menarik investasi di bidang pembangkit tenaga listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan.
- Minimnya Sumber Daya Manusia aparatur pengelolaan energi baru terbarukan. Pengelolaan energi terbarukan dimasa yang akan datang akan semakin meningkat seiring berkurangnya ketersediaan energi fosil. Peningkatan kopetensi aparatur di bidang energi dimasa yang akan datang demi terwujudnya kemandirian energi dan ketahanan energi.
- Kurangnya anggaran pengelolaan energi terbarukan untuk penelitian, pengembangan dan pengadaan infrastruktur energi terbarukan.
- Masih adanya desa belum berlistrik dan daerah yang belum menikmati listrik 24 jam. Dan masih banyak usaha ketenagalistrikan yang belum sesuai dengan aturan.
- Dalam hal eksplorasi potensi Sumber Daya Mineral yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, masih terkendala oleh kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten di Bidang Geologi dan ketersediaan dana. Sementara data potensi Sumber Daya Mineral ini sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan disuatu daerah.

- Untuk air tanah, masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran para pemilik badan usaha yang menggunakan air tanah secara komersil untuk mengurus Ijin Pemboran dan Surat Ijin Penggunaan Air Tanah (SIPA). Sementara perijinan ini diperlukan untuk mengendalikan Pemanfaatan Air Tanah agar tidak melampaui debit yang diijinkan demi menjaga kelangsungan dan upaya konservasi air tanah.
- Kewenangan terkait Pengawasan dan Pengendalian juga teredukasi oleh Undang-Undang 3 Tahun 2020, hal ini menyebabkan sulitnya Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam seluruh tahapan kegiatan pertambangan.
- Dengan sulitnya proses perizinan yang diakibatkan oleh beralihnya kewenangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat secara langsung berakibat kepada meningkatnya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Sulawesi Utara, dengan kmoditas, mulai dari Komoditas Batuan, Mineral Non Logam, Mineral Non Logam Jenis Terentu dan Mineral Logam.
- Belum sinkronnya pemahaman antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terkait Pajak dan Retribusi dari sector Pertambangan sering membuat kerugian di pihak Pemegang IUP, dikarenakan proses penetapan Retribusi dari Pemerintah Kabupaten seringkali tidak memperhatikan Surat Keputusan Penetapan Harga Patokan Komoditas Batuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- Banyaknya Pemegang IUP yang tidak menjalankan Kaidah Good Minning Practise mengakibatkan pelaksanaan pertambangan yang tidak berjalan secara optimal serta kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol, hal ini juga terjadi karena tidak adanyan kewenangan dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian.
- Pemahaman masyarakat terkait Kegiatan Usaha Pertambangan yang masih minim yang mengakibatkan mereka mudah termakan dengan isu-isu oleh orang yang tidak bertanggung jawab juga menjadi permasalahan yang sangat serius yang menyebabkanterhambatnya kegiatan pertambangan oleh pemegang IUP dalam hal Pembebasan Lahan, Perekrutan Tenaga Kerja, dll.

f. Perdagangan
   - Untuk perdagangan dalam negeri, tantangan terbesar adalah menjaga agar nilai inflasi terkendali agar daya beli masyarakat

tetap terjaga. Ketersediaan dan distribusi barang pokok harus dijaga dan dikendalikan;

- Untuk perdagangan luar negeri, tantangan terbesar adalah peningkatan ekspor di tengah perlambatan ekonomi global dan turunnya permintaan komoditas dari negara-negara tujuan ekspor, Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta pandemi global COVID-19 sangat mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan aktivitas ekspor. Di sisi lain, pengendalian impor perlu dilaksanakan untuk memperkuat dan mengamankan pasar dalam negeri.

g. Industri

- Perkembangan perindustrian Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Pertama adalah perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi negara-negara tujuan ekspor Sulawesi Utara sehingga menyebabkan penurunan permintaan atas komoditas industri. Kedua, perang dagang Tiongkok-AS yang berkepanjangan juga turut mempengaruhi permintaan produk-produk hasil Industri Indonesia, apalagi kedua negara tersebut merupakan dua negara besar tujuan ekspor Indonesia;
- Pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak industri, baik besar maupun IKM, yang tidak berproduksi atau bahkan gulung tikar;
- Industri Kecil dan Menengah di Sulawesi Utara masih membutuhkan revitalisasi teknologi agar produktivitas lebih meningkat dan efisien. Revitalisasi teknologi ini diperlukan terutama dalam implementasi industri 4,0. Peningkatan kompetensi pelaku IKM dan penguatan pemberdayaan IKM juga perlu mendapat perhatian lebih, serta pembangunan sentra-sentra IKM di kabupaten/kota se-Sulawesi Utara perlu segera dipercepat pembangunannya;
- Sulawesi Utara masih mengandalkan kontribusi dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam menggerakkan roda perekonomian sehingga sektor ini yang masih sangat dominan dalam sumbangsihnya terhadap PDRB Sulawesi Utara. Di lain sisi, sektor industri pengolahan belum memberikan sumbangsih yang terlalu berarti. Kawasan Ekonomi Khusus Bitung merupakan solusi untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan bagi perekonomian Sulawesi Utara. Namun belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung membuat perkembangan industri Sulawesi Utara menjadi lambat.

2.3.2.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

a. Perencanaan
   - Regulasi Nasional yang sering berubah-ubah;
   - Ego sektoral yang mengemuka;
   - Kurangnya komitmen kabupaten/kota dalam perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

b. Keuangan
   - Perangkat Daerah yang belum mempunyai tenaga perencanaan, serta tenaga akuntan yang memadai.
   - Koordinasi antar SKPD untuk proses perencanaan masih lemah sehingga kegiatan yang dibangun jarang yang sinergis bahkan tidak jarang muncul egosektoral.
   - Belum semua ASN memahami regulasi yang mengatur kebijakan pengelolaan keuangan daerah sehingga mengakibatkan terdapatnya pengelolaan yang tidak sesuai ketentuan.

c. Pendapatan
   - Ketersediaan sarana dan prasarana pada objek retribusi daerah;
   - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan;
   - Sistem jaringan komunikasi yang belum merata di semua Kab/Kota di Provinsi Sulut;
   - Keakuratan data berbasis digitalisasi masih dalam pengembangan.

d. Kepegawaian dan Diklat
   - Belum sesuai antara kompetensi yang dimiliki ASN dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) sebagai jaminan profesionalisme Aparatur Sipil Negara;
   - Kapasitas dan kapabilitas Manajemen Penyelenggaraan Diklat belum memadai untuk mencetak aparatur professional;

e. Penelitian dan Pengembangan
   - Lemahnya kapasitas kelembagaan balitbangda karena struktur organisasi yang termasuk typology c;
   - Kurangnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
   - Belum optimalnya fasilitasi pendampingan kepada Perangkat daerah terhadap inovasi daerah;
   - Belum tersedianya pejabat fungsional perekayasaan dan analisa kebijakan untuk mendukung kegiatan kelitbangan;

- Masih rendahnya penyediaan data dan informasi yang akurat dan aktual pada bidang penelitan dan pengembangan.

f. Pengawasan
   - Pengawasan belum sepenuhnya dilakukan terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
   - Jumlah Pejabat Fungsional (Auditor dan P2UPD) masih terbatas sehingga tidak sebanding dengan Objek Pemeriksaan;
   - Belum meratanya kemampuan aparatur pengawas;
   - Masih terbatasnya dana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan.
   - Belum maksimalnya tindak lanjut atas hasil temuan audit.

g. Sekretariat Daerah
   - Belum rampungnya penyelesaian tapal batas, belum optimalnya kabupaten/kota dalam penyusunan LPPD dukungan administrasi terhadap usulan daerah pemekaran kurang optimal;
   - Penyesuaian terhadap perubahan berbagai regulasi dari Pemerintah Pusat yang sangat dinamis, dan belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi untuk implementasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;

h. Sekretariat DPRD
   - Penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu;
   - Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan;
   - Belum tersedianya sarana pendukung pelayanan kedewanan terkait risalah elektronik;
   - Belum optimalnya sarana data, informasi dan publikasi kegiatan DPRD dalam pelayanan terhadap masyarakat;
   - Belum adanya instrument dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan DPRD;
   - Kurangnya pelatihan dan pengembangan Kompetensi SDM terkait tugas dan fungsi, serta administrasi;
   - Penggunaan dana APBD yang belum dimanfaatkan secara maksimal;
   - Belum optimalnya pemahaman Anggota Dewan terkait Tugas dan Fungsi DPRD.

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2021

Indikator dan Target kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi :

No	Sasaran	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 (akhir periode renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											I			II			III			IV													
1	2	3	4	K	5 Rp	K	6 Rp	K	7	Rp	K	8 Rp		K	9 Rp		K	10 Rp		K	11 Rp			12 = (I, II, III, IV) Rp		13 = 12/7 * K		K	14 = 6 + 12 Rp		K	15 = 14/5 * 100% Rp		16	17
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terselenggaranya kebutuhan pelayanan Administrasi Perkantoran**		**351,980,540,739.00**																												
		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	60 Bulan	332,757,267,203.00																												
		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	60 Bulan	7,350,835,124.00																												
		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	60 Bulan	2,891,627,341.00																												
		Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi	Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi	60 Bulan	7,538,338,237.00																												
		Kegiatan Penataan Kearsipan	Terselenggaranya Kegiatan Penataan Kearsipan	60 Bulan	490,482,834.00																												
		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Terselanggaranya kegiatanan penyediaan kebutuhan administrasi kepegawaian	60 Bulan	951,990,000.00																												
2		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam keadaan baik**		**26,849,603,552.00**																												
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan operasional	5 T.A	9,480,295,379.00																												
		pengadaan kenderaan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional	5 T.A	4,634,114,014.00																												
		pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan / perlengkapan gedung kantor	5 T.A	631,048,893.00																												
		Pengadaan Peralatan/perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan / perlengkapan gedung kantor	5 T.A	7,830,596,439.00																												
		rahabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	5 T.A	2,857,812,500.00																												
		pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	5 T.A	1,415,736,327.00																												
3		**Program peningkatan Disiplin Aparatur**	**Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin**		**13,083,296,338.00**																												
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	1 T.A	17,400,000.00																												
		Pengadaaan Pakaian khusus hari hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	1 T.A	6,879,998,438.00																												
		Pengadaan mesin/kartu absensi	terlaksananya pengadan mesin / kartu absensi	5 T.A	2,716,281,250.00																												
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	4 T.A	3,469,616,650.00																												
4		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Prosentase kinerja Aparatur**		**911,292,750.00**																												
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	5 Keg	753,666,969.00																												
		Pelatihan Kantor Sendiri	Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri	3 Keg	157,625,781.00																												
5		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**prosentase cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, laporan per tahun sesuai perundang - undangan**		**997,294,808.00**																												
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya pembuatan laporan keuangan tahunan	5 Lap	153,980,192.00																												
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja realisasi triwulan	20 Lap	107,878,250.00																												
		Penyusunan Laporan Bulanan SKPD	Terlaksananya laporan bulanan	120 Lap	621,693,656.00																												
		Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Lap	16,790,000.00																												
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya laporan keuangan per semester	10 Lap	96,952,710.00																												
6		**Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan**	**Prosentase ASN Dikda yang mengikuti hari - hari besar kenegaraan / kedaerahan**		**824,893,557.00**																												
		Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi	Prosentase ASN Dikda yang mengikuti hari - hari besar kenegaraan / kedaerahan	8 Keg	824,893,557.00																												
7		**Program Perencanaan Perangkat Daerah**	**Prosentase tercapainya perencanaan perangkat daerah**		**2,084,605,625.00**																												
		Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Rencana kerja SKPD	10 Dok	163,656,250.00																												
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Terlaksananya Rencana Kerja Anggaran	10 Dok	1,920,949,375.00																												

No	Sasaran	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 (akhir periode renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											I			II			III			IV													
1	2	3	4	K	5 Rp	K	6 Rp	K	7	Rp	K	8	Rp	K	9	Rp	K	10	Rp	K	11	Rp	K	12 = (I, II, III, IV)	Rp	13 = 12/7 * K		14 = 6 + 12 K		Rp	15 = 14/5 * 100% K	Rp	16	17
8		Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah Atas Siswa Miskin (SMA)	Jumlah Ruang kelas baik Rasio APK Perempuan:laki-laki di SMA Angka kelulusan SMA/SMK APK SMA/SMK/MA (Sederajat) APM SMA/SMK/MA (Sederajat) APS (Angka Putus Sekolah) SMA/SMK/MA (Sederajat)		358,855,762,535.00																												
		Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	5 T.A	24,058,227,375.00																												
		Pembangunan Laboratorium (DAK)	Tersedianya Pembangunan Laboratorium (DAK)	4 T.A	32,316,313,125.00																												
		Pengadaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Pengadaan Unit Sekolah Baru SMA	1 T.A	2,500,000,000.00																												
		Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserts perabotnya (DAK SMA)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta perabotnya (DAK SMA)	3 T.A	2,721,928,125.00																												
		Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMA	Terselenggaranya Penyelenggaraan O2SN Tingkat SMA	10 Keg	3,886,084,209.00																												
		Pengadaan Seni Budaya (DAK SMA)	Tersedianya Pengadaan Sarana Seni Budaya (DAK SMA)	3 T.A	2,091,425,000.00																												
		Olimpiade Sains SMA	Terlaksananya Olimpiade Sains SMA	10 Keg	15,459,515,292.00																												
		Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Menengah Atas (SMA)	Terlaksananya Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Menengah Atas (SMA)	5 T.A	4,256,718,750.00																												
		Pengadaaan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tersedianya Pengadaan ruang kelas baru (RKB) sekolah menengah atas (SMA)	1 T.A	29,573,281,250.00																												
		Pembangunan Asrama Siswa (DAK)	Terlaksananya Pembangunan Asrama Siswa (DAK)	4 T.A	29,879,512,734.00																												
		Penyusunan Kurikulum muatan lokal tentang penyelenggaraan pendidikan budaya anti korupsi (PBAK)	Terlaksananya Penyusunan Kurikulum muatan lokal tentang penyelenggaraan pendidikan budaya anti korupsi (PBAK)	1 T.A	140,188,500.00																												
		Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK SMA)	Tersedianya Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK SMA)	3 T.A	16,082,124,799.00																												
		Pemilihan Siswa Teladan	Terselenggaranya Pemilihan Siswa Teladan	8 Keg	1,337,107,320.00																												
		Pengadaan Alat Kesenian Tradisional (DAK SMA)	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional (DAK SMA)	3 T.A	1,660,837,500.00																												
		Lomba Debat bahasa Siswa SMA	Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Siswa SMA	8 Keg	1,478,970,307.00																												
		Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Terselenggaranya Sekolah Menengah Atas (SMA)	1 T.A	27,487,200,000.00																												
		Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah (DAK)	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK)	1 T.A	11,727,920,000.00																												
		Pembangunan Laboratorium	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium	1 T.A	15,253,741,000.00																												
		Pengadaaan Seragam Bagi siswa SMA	Tersedianya seragam bagi siswa SMA	1 T.A	1,075,625,000.00																												
		Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA)	5 T.A	23,394,718,750.00																												
		Pengadaan Media Pendidikan (DAK SMA)	Tersedianya Pengadaan Media Pendidikan (DAK SMA)	3 T.A	2,091,425,000.00																												
		Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMA dan SMALB	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMA dan SMALB	8 Keg	2,827,085,588.00																												
		Pengadaan Rumah Dinas Guru beserta perabotnya (DAK SMA)	Tersedianya Pengadaan RDG beserta Perabotnya (DAK SMA)	3 T.A	17,256,419,491.00																												
		Olimpiade Olahraga siswa sekolah keberkatan olehraga (SKO)	Terlaksananya Olimpiade Olahraga siswa sekolah keberkatan olehraga (SKO)	1 Keg	45,000,000.00																												
		Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran	Tersedianya Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran	1 T.A	5,282,257,000.00																												
		Pengadaaan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Atas (SMA) (DAK)	Terlaksananya Pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Atas (SMA) (DAK)	5 T.A	29,573,281,250.00																												
		Pemetaan dan Perencanaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Terlaksananya Pemetaan dan Perencanaan SMA	1 T.A	310,200,000.00																												
		Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (DAK)	Terlaksananya Pembangunan Toilet (Jamban) (DAK SMA)	3 T.A	11,954,954,375.00																												
		Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Keberkatan Olahraga (SMAKOR)	Terselenggaranya Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga (SMAKOR)	60 Bulan	15,765,959,269.00																												

No	Sasaran	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 (akhir periode renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											I			II			III			IV															
1	2	3	4	5		6		7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 *		14 = 6 + 12			15 = 14/5 * 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K			K				
		Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) (DAK SMA)	Tersedianya Pengadaan Sarana PJOK (DAK SMA)	3 T.A	1,882,282,500.00																													
		Cerdas cermat empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara SMA dan sederajat	Terlaksananya Cerdas Cermat Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara SMA dan Sederajat	8 Keg	1,227,447,823.00																													
		Rehabilitasi Prasarana belajar SMA Ruang Belajar dan Ruang Penunjang Beserta Perabotnya (DAK SMA)	Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA Rungan Belajar dan Ruang Penunjang Lainnya beserta perabotnya (DAK SMA)	3 T.A	21,837,255,828.00																													
		Rehabilitasi ruang laboratorium IPA dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya (DAK Reguler)	Terlaksananya rehabilitasi ruang Laboratorium IPA dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya	3 T.A	0.00																													
		Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya (DAK Reguler)	Terlaksananya rehabilitasi ruang Guru dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya	3 T.A	0.00																													
		Rehabilitasi ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya (DAK Reguler)	Terlaksananya rehabilitasi ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya	3 T.A	0.00																													
		Rehabilitasi Laboratorium Komputer dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya (DAK Reguler)	Terlaksananya rehabilitasi ruang Laboratorium Komputer dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya	3 T.A	0.00																													
		Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa/Guru dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta Sanitasinya (DAK Reguler)	Terlaksananya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa/Guru dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta Sanitasinya (DAK Reguler)	3 T.A	0.00																													
		Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya (DAK SMA)	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya (DAK SMA)	3 T.A	0.00																													
		Rehabilitasi Laboratorium Bahasa dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya (DAK SMA)	Terlaksananya Rehabilitasi Laboratorium Bahasa dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya (DAK SMA)	3 T.A	0.00																													
		Pengadaan Alat Tulis Sekolah bagi siswa SMA	Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Sekolah bagi siswa SMA	2 T.A	2,000,000,000.00																													
		Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	5 T.A	420,755,375.00																													
9		**Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah Kejuruan Siswa Miskin (SMK)**	**APK SMA/SMK/MA SEDERAJAT** **APM SMA/SMK/MA SEDERAJAT** **APS (Angka Putus Sekolah)** **SMA/SMK/MA/SEDERAJAT** **JUMLAH RUANG KELAS BAIK** **RASIO APK PEREMPUAN : LAKI-LAKI SMK** **Angka kelulusan SMA/SMK/MA**		**380,228,829,653.00**																													
		Pengadaan Seragam Bagi siswa SMK	Tersediannya Seragam bagi siswa SMK	1 T.A	1,075,625,000.00																													
		Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) beserta perlengkapannya	terlaksananya pembangunan ruang praktis siswa (RPS) beserta perlengkapannya	1 T.A	26,654,000,000.00																													
		Pengadaan alat kesenian tradisional (DAK SMK)	Pengadaan alat kesenian tradisional (DAK SMK)	3 T.A	2,214,450,000.00																													
		Promosi Kreativitas Siswa SMK Kepada Dunia Usaha dan Masyarakat	terselenggaranya Kreativitas Siswa SMK Kepada Dunia Usaha dan Masyarakat	5 Keg	1,377,151,000.00																													
		Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan	terlaksananya Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan	4 T.A	1,068,906,250.00																													
		Pengadaan Peralatan Praktek Utama/Peralatan Praktek Produksi (SMK Penugasaan 3T) (DAK)	terselenggaranya Peralatan Praktek Utama/Peralatan Praktek Produksi (SMK Penugasaan 3T) (DAK)	4 T.A	135,756,643,250.00																													
		Penyelenggaraan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Terselenggaranya Penyelenggaraan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan	1 T.A	27,955,200,000.00																													
		Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (DAK SMK)	terlaksananya Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (DAK SMK)	3 T.A	6,089,737,500.00																													
		Pengadaaan Peralatan Praktek Utama/Peralatan Praktek Produksi Siswa SMK	terlaksanya Pengadaaan Peralatan Praktek Utama/Peralatan Praktek Produksi Siswa SMK	1 T.A	42,974,000,000.00																													
		Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Beserta Perabotnya (DAK SMK)	terlaksanya Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Beserta Perabotnya (DAK SMK)	3 T.A	1,633,156,875.00																													
		Lomba Debat Bahasa Siswa SMK	Terselenggaranya Lomba Debat Bahasa Siswa SMK	6 Keg	630,728,985.00																													
		Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	5 T.A	498,805,688.00																													
		Pengadaaan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta perabotnya (SMK Penugasan 3T)(DAK)	Terlaksanya Pengadaaan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta perabotnya (SMK Penugasan 3T)(DAK)	4 T.A	16,677,995,000.00																													

No	Sasaran	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 (akhir periode renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											I			II			III			IV																	
1	2	3	4	5		6		7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 *		14 = 6 + 12			15 = 14/5 * 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K			K					
		Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah	Terlaksanya Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah	4 T.A	3,229,406,250.00																															
		Rehabilitasi Ruang Belajar dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK SMK)	Terlaksanya Rehabilitasi Ruang Belajar dengan Tingkat Kerusakan sedang atau beart beserta perabotnya (DAK SMK)	3 T.A	848,872,500.00																															
		Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	terselenggaranya Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	8 Keg	3,051,451,114.00																															
		Pengembangan Kurikulum SMK	terlaksananya Pengembangan Kurikulum SMK	4 Dok	891,165,229.00																															
		Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Terlaksananya Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	5 T.A	3,293,062,500.00																															
		Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta perabotnya (DAK)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta perabonta (DAK)	3 T.A	60,356,065,000.00																															
		Pengadaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengadaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan	3 T.A	6,151,250,000.00																															
		Rehabilitasi Toilet (Jamban) dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat beserta sanitasinya (DAK SMK)	Rehabilitasi Toilet (Jamban) dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat beserta sanitasinya (DAK SMK)	3 T.A	3,321,675,000.00																															
		Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMA / SMK dan SMALB	Terselenggaranya Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMA / SMK dan SMALB	10 Keg	2,931,929,699.00																															
		Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK	Terlaksananya Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK	8 Keg	1,336,325,938.00																															
		Pembangunan Laboratorium Beserta Perabotnya (SMK Penugasan Sektor Unggulan) (DAK)	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Beserta Perabotnya (SMK Penugasan Sektor Unggulan) (DAK)	4 T.A	28,211,226,875.00																															
		Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Belajar Berupa Alat Tulis bagi siswa SMK	Terlaksananya pengadaan Peralatan / Perlengkapan Belajar Berupa Alat Tulis bagi Siswa SMK	2 T.A	2,000,000,000.00																															
10		**Program Pendidikan Khusus/Layanan Khusus**	**Rata-rata angka melek aksara penduduk usia diatas 15** **Prosentasi WNI Berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan menengah sesuai dengan standart nasional pendidikan**		**16,300,155,949.00**																															
		Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta perabotnya (DAK SLB)	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya (DAK) SLB	3 T.A	1,514,799,290.00																															
		Pengadaan peralatan seni dan budaya (DAK SLB)	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Seni dan Budaya (DAK) SLB	3 T.A	418,285,000.00																															
		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary sekolah	Tersedianya sarana air bersih dan sanitary SLB	1 T.A	600,000,000.00																															
		Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa ABK	Terselenggaranya Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa ABK	4 Keg	431,366,063.00																															
		Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru beserta sanitasinya (DAK SLB)	Terlaksananya Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru beserta sanitasinya (DAK) SLB	3 T.A	482,725,495.00																															
		Pengadaan alat kesenian tradisional (DAK SLB)	Tersedianya Pengadaan Alat Kesenian Tradisional (DAK SLB)	3 T.A	276,806,250.00																															
		Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Layanan Khusus	Tersedianya Bantuan dana pendidikan	5 T.A	4,037,939,820.00																															
		Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah Autis	5 T.A	1,910,077,800.00																															
		Rehabilitasi Toilet (Jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya (DAK SLB)	Terlaksananya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa/Guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya (DAK) SLB	3 T.A	676,637,500.00																															
		Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK SLB)	Tersedianya Pengadaan Peralatan pendidikan (DAK) SLB	3 T.A	338,318,750.00																															
		Penyediaan beasiswa retreival untuk putus sekolah pada rumah tangga miskin	Penyediaan beasiswa retrival untuk anak putus sekolah pada rumah tangga miskin	1 T.A	960,000,000.00																															
		Penyelenggaraan Festival Siswa Berkebutuhan Khusus	Terselenggaranya Festival siswa berkebutuhan khusus	5 Keg	1,997,466,683.00																															
		Rehabilitasi Ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK SLB)	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK) SLB	3 T.A	676,637,500.00																															
		Pengadaan media Pendidikan (DAK SLB)	Tersedianya Pengadaan Media Pendidikan (DAK) SLB	3 T.A	461,313,750.00																															
		Penyediaan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu/miskin	Tersedianya bantuan untuk dana pendidikan siswa ABK	5 T.A	719,007,048.00																															
		Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (DAK SLB)	Tersedianya Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (DAK SLB)	3 T.A	0.00																															
		Monitoring dan evaluasi pelaporan	Tercapainya pendidikan yang lebih baik bagi SLB/ABK	5 T.A	798,775,000.00																															

No	Sasaran	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 (akhir periode renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											I			II			III			IV															
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		13 = 12/7 *	K		14 = 6 + 12	K		15 = 14/5 * 100%	16	17
				5		6		7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)													
11		**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4**		**15,938,919,744.00**																														
			Prosentase guru bersertifikat kompetensi																																
		Bimbingan Teknis Sulut Pintar Menghitung	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Sulut Pintar Menghitung	1 T.A	1,000,000,000.00																														
		Bimtek Penguatan Kapasitas Guru Matematika IPA dan Bahasa Inggris	Terlaksananya Bimtek Penguatan Kapasitas Guru Matematika IPA dan Bahasa Inggris	1 T.A	1,000,000,000.00																														
		Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	5 T.A	467,654,438.00																														
		Olimpiade Sains Guru	Terselenggaranya kegiatan Olimpiade Sains Guru	4 Keg	1,177,147,097.00																														
		Pelaksanaan Assesment THL Guru dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Assesment THL Guru dan Tenaga Kependidikan	1 T.A	150,000,000.00																														
		Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Tingkat SMA, SMK, dan Pendidikan khusus	Terlaksananya kegiatan Kompetensi Tenaga Pendidk Tingkat SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	5 Keg	2,612,838,500.00																														
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Guru SMA dan SMK	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Guru SMA dan SMK	1 T.A	25,150,000.00																														
		Pemilihan guru berprestasi	Terselenggaranya pemilihan Guru Berprestasi	5 Keg	3,489,265,152.00																														
		Penilaian dan Pemberian Angka kredit Guru	Terlaksananya Penilaian dan Pemberian Angka Kredit Guru	5 T.A	646,327,025.00																														
		Penyelenggaraan Manajemen Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas	Terselenggaranya Manajemen Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas	4 Keg	2,389,669,219.00																														
		Penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Kelompok Kerja Guru (MGMP/KKG)	Terselenggaranya Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Kelompok Kerja Guru (MGMP/KKG)	5 Keg	1,607,028,813.00																														
		Penyelenggara Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)	Terselenggaranya Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)	2 Keg	726,551,000.00																														
		Workshop Kepemimpinan pendidikan	Terlaksananya Workshop Kepemimpinan pendidikan	1 T.A	200,000,000.00																														
		Workshop Penguatan Kapasitas Calon Kepala Sekolah	Terlaksananya Workshop Penguatan Kapasitas Calon Kepala Sekolah	1 T.A	447,288,500.00																														
12		**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	**Jumlah Sekolah SMA/SMK sederajat yang terakreditasi**		**105,364,704,285.00**																														
			Rata-rata nilai ujian nasional SMA Sederajat dan SMK																																
		Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya rapat evaluasi dan koordinasi bidang Pendidikan	5 T.A	2,148,257,634.00																														
		Majalah Pendidikan Sulut Pintar	Tersedianya Majalah Pendidikan Sulut Pintar	1 T.A	60,000,000.00																														
		Penyelenggaraan Kegiatan pendukung Program Nasional Olahraga seiswa nasional tingkat Provinci (O2SN)	Terselenggaranya Kegiatan pendukung Program Nasional Olahraga seiswa nasional tingkat Provinci (O2SN)	5 Keg	3,261,955,623.00																														
		Penyusunan RANPERDA Pendidikan	Terlaksananya RANPERDA Pendidikan	5 Dok	938,666,138.00																														
		Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Terlaksananya Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	5 T.A	2,109,755,850.00																														
		Manajemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK Penugasan	Terlaksananya Manajemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusu (DAK) SMK Penugasan	4 T.A	5,622,629,000.00																														
		Lomba TIK Tingkat Provinsi	Terlaksananya Lomba TIK Tingkat Provinsi	1 T.A	43,251,400.00																														
		Monitoring dan evaluasi TIK & GIS, SD, SMP, SMA/SMK, SLB	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi TIK & GIS, SD, SMP, SMA/SMK, SLB	5 T.A	460,099,706.00																														
		Pengadaan Peralatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	Terlaksananya Pengadan Peralatan Ujian Nasional Berbasis Komputer UNBK	5 T.A	24,378,125,000.00																														
		Pengelolaan Sistem Pendidikan Berbasis Teknologi	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Pendidikan Berbasis Teknologi	1 T.A	900,000,000.00																														
		Penyelenggaraan kegiatan Pendukung Program Nasional lomba festival seni siswa nasional tingkat provinsi (FLS2N)	Terselenggaranya kegiatan Pendukung Program Nasional lomba festival seni siswa nasional tingkat provinsi (FLS2N)	5 Keg	2,273,836,750.00																														

No	Sasaran	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 (akhir periode renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											I			II			III			IV													
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 *		14 = 6 + 12			15 = 14/5 * 100%		16	17
		Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Terlaksananya Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	4 Keg	855,376,438.00																												
		Menajemen pengelolaan Bantuan Tunjangan Profesi Guru	Terlaksananya Manajemen pengelolaan Bantuan Tunjangan Profesi Guru	1 T.A	227,445,850.00																												
		Pengembangan Radio Edukasi	Terlaksananya pengembangan radio edukasi	5 T.A	413,243,169.00																												
		Seminar TIK	Terselenggaranya Seminar TIK	4 T.A	151,640,969.00																												
		Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	1 T.A	264,276,820.00																												
		Pengadaan Aplikasi SIMAPAN	Terlaksananya Pengadaan Aplikasi SIMAPAN	1 T.A	100,000,000.00																												
		Pelaksanaan Pra Ujian Nasional dan Ujian Nasional	Terlaksananya Kegiatan Pra Ujian Nasional dan Ujian Nasional	5 Keg	2,235,182,150.00																												
		Penyelenggaraan ASEAN Science Camp (ASC)	Terselenggaranya ASEAN Science Camp (ASC)	1 Keg	3,325,500,000.00																												
		Pembangunan Gedung Pendidikan	Terlaksananya pembangunan gedung pendidikan	5 T.A	25,943,235,750.00																												
		Manajemen Pengelolaan dana Alokasi Khusus (DAK) SLB	Terlaksananya Manajemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SLB	3 T.A	255,029,133.00																												
		Workshop TIK, SD, SMP, SMA/SMK	Terselenggaranya Workshop TIK	4 T.A	808,362,296.00																												
		Kihajar Tingkat Provinsi	Terselenggaranya Kihajar tingkat Provinsi	4 T.A	403,560,781.00																												
		Penyelenggaraan kegiatan pendukung nasional olimpiade sains nasional tingkat provinsi (OSN)	Terselenggaranya kegiatan pendukung nasional olimpiade sains nasional tingkat provinsi (OSN)	5 Keg	2,837,854,815.00																												
		Pengelolaan aset dan sertifikasi sekolah menengah	Terlaksananya Pengelolaan aset dan sertifikasi sekolah menengah	1 T.A	200,000,000.00																												
		Manajemen Pengelolaan dana Alokasi Khusus (DAK)	Terlaksananya Manajemen Pengelolaan dana Alokasi Khusus (DAK)	1 T.A	227,445,850.00																												
		Manajemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus SMA Reguler	Terlaksananya Manajemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus SMA Reguler	4 T.A	7,373,807,198.00																												
		Penyelenggaraan Apresiasi Pendidikan	Terselenggaranya kegiatan Apresiasi Pendidikan	4 Keg	9,529,443,750.00																												
		Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	5 T.A	3,373,440,853.00																												
		Workshop GIS, SD, SMP, SMA/SMK	Terlaksananya Workshop GIS	4 T.A	807,506,296.00																												
		Bimtek TIK SD, SMP, SMA/SMK	Terlaksananya Bimtek TIK SD, SMP, SMA/SMK	1 Keg	177,399,033.00																												
		Bimtek GIS SD, SMP, SMA/SMK	Terlaksananya Bimtek GIS SD, SMP, SMA/SMK	1 Keg	177,399,033.00																												
		Manajemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) AFIRMASI SMA	Terlaksananya Manajemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) AFIRMASI SMA	1 T.A	80,977,000.00																												
		Penyelenggaraan kegiatan Pendukung Program Nasional Gala Siswa Indonesia (GSI)	Terselenggaranya Kegiatan Pendukung program Nasional Gala Siswa Indonesia (GSI)	2 T.A	350,000,000.00																												
		Penyelenggaraan kegiatan Pendukung Nasional Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN)	Terselenggaranya kegiatan Pendukung program Nasional Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN)	2 T.A	350,000,000.00																												
		Penyelenggaraan Kegiatan Program Nasional Lomba Cipta Seni Siswa Nasional	Terselenggaranya kegiatan program Nasional Lomba Cipta Seni Siswa Nasional	2 T.A	350,000,000.00																												
		PPDB Online SMA dan SMK	Terlaksananya PPDB Online Tingkat SMA dan SMK di Prov. Sulut	2 T.A	1,300,000,000.00																												
		Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Bidang Pendidikan	Terlaksananya Rapat kerja Daerah Bidang Pendidikan	2 T.A	700,000,000.00																												
		Sekretariat Dewan Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Tertentuknya Sekretariat Dewan Pendidikan Daerah Prov. Sulawesi Utara	2 T.A	350,000,000.00																												
13		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pendidikan**	**Angka partisipasi sekolah pendidikan menengah** **Beasiswa luar negeri** **Kemampuan berbahasa korea, cina, dan Jepang (MEA)** **Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang berkualifikasi S1** **Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM yang berkualifikasi S2** **Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM yang berkualifikasi S3**		**17,372,474,125.00**																												
		Penyediaan Beasiswa bagi Siswa pada Keluarga Tidak mampu/miskin	Penyediaan Beasiswa bagi Siswa pada Keluarga Tidak mampu/miskin	2 T.A	1,253,000,000.00																												
		Pengembangan Kreatifitas Prestasi Siswa	Pengembangan Kreatifitas Prestasi Siswa	1 T.A	380,000,000.00																												
		Penyelenggaraan Operasional Daerah Siswa kesetaraan (ODSK)	terselenggaranya Operasional Daerah Siswa kesetaraan (ODSK)	5 T.A	3,545,812,500.00																												
		Pengembangan Pendidikan ke Luar negeri	terlaksanya Pengembangan Pendidikan ke Luar negeri	5 T.A	1,511,343,750.00																												
		Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksanya Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	1 T.A	119,583,500.00																												
		Penyelenggaraan Bantuan Peningkatan SDM Pendidikan	terselenggaranya Bantuan Peningkatan SDM Pendidikan	5 T.A	10,562,734,375.00																												
14		**Program Manajemen Pengelolaan Dana BOS SMA/SMK/SLB**	**Terlaksananya manajemen pengelolaan dana BOS SMA/SMK/SLB**		**767,080,517,674.00**																												

No	Sasaran	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 (akhir periode renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											I			II			III			IV															
1	2	3	4	5		6		7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 *		14 = 6 + 12			15 = 14/5 * 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K			Rp	K			
		Manajemen Pengelolaan Dana BOS SMA/SMK/SLB	Terlaksananya manajemen pengelolaan dana BOS SMA/SMK/SLB	4 T.A	767,080,517,674.00																													
15		**Program Peningkatan mutu pendidik dan mutu tenanga pendidik SMK Pertanian Pembangunan**	**Peningkatan mutu pendidik dan mutu tenanga pendidik SMK Pertanian Pembangunan**		**595,118,059.00**																													
		Pengembangan Mutu dan Kualitas Tenaga Pendidik	Meningkatnya Pengembangan mutu dan Kualitas Tenaga Pendidik	3 T.A	409,673,250.00																													
		Penyebaran Informasi Sekolah	Terlaksananya Penyebaran Informasi Sekolah	3 T.A	185,444,809.00																													
16		**Program peningkatan mutu siswa SMK pertanian pembangunan**	**Terselenggarannya peningkatan mutu siswa SMK Pertanian Pembangunan**		**15,563,277,625.00**																													
		Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Usaha	Terlaksananya Kegiatan Praktek Kerja Usaha	3 T.A	1,261,006,250.00																													
		Test Minat Bakat Siswa	Terlaksananya Minat Bakat Siswa	3 T.A	138,403,125.00																													
		Penyediaan Kebutuhan Siswa	Terlaksanya Penyediaan Kebutuhan Siswa	3 T.A	14,163,868,250.00																													
17		**Program Sarana dan Prasarana Aparatur (Kewajiban)**			**415,900,000.00**																													
		Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor (kewajiban)		1 T.A	415,900,000.00																													
18		**Program Peningkatan Mutu Pendidikan (Kewajiban)**			**89,820,000.00**																													
		Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (Kewajiban)		1 T.A	89,820,000.00																													
19		**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (Kewajiban)**			**101,924,000.00**																													
		Kegiatan Pengembangan Manajemen Kepramukaan (Kewajiban)		1 T.A	101,924,000.00																													
20		**Program Pendidikan Anak Usia Dini non Formal dan Informal (PAUDNI) (Kewajiban)**			**267,750,000.00**																													
		Kegiatan Apresiasi pendidik dan Tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini non formal dan informal (PTK PAUDNI) berprestasi (Kewajiban)		1 T.A	15,750,000.00																													
		Kegiatan pengembangan lembaga berbasis gender (kewajiban)		1 T.A	42,000,000.00																													
		Kegiatan pelatihan pembelajaran dan penyusunan rencana kegiatan harian (RKH) (Kewajiban)		1 T.A	42,000,000.00																													
		Kegiatan penyelenggaraan apresiasi lembaga kursus dan pelatihan berprestasi (Kewajiban)		1 T.A	25,200,000.00																													
		Kegiatan pendidikan dan pelatihan pendidik/ tutor pendidikan anak usia dini (PAUD) (Kewajiban)		1 T.A	42,000,000.00																													
		Kegiatan pelatihan palang merah remaja (kewajiban)		1 T.A	31,500,000.00																													
		Kegiatan pelatihan kepramukaan (Kewajiban)		1 T.A	69,300,000.00																													
21		**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Kewajiban**		**1 T.A**	**60,060,000.00**																													
		Kegiatan penyelenggaraan BMPS (Kewajiban)		1 T.A	29,400,000.00																													
		Kegiatan pembinaan kelompok kerja guru (KKG) (Kewajiban)		1 T.A	30,660,000.00																													
22		**Program Pendidikan Menengah (Kewajiban)**		**1 T.A**	**44,950,000.00**																													
		Kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (kewajiban)		1 T.A	44,950,000.00																													
1		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah : Nilai LKIP SKPD Dinas Pendidikan Daerah rata-rata Minimum B**																															
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Pegawai					12	Bulan	402,285,300.00	3	Bulan	0.00	3	Bulan	86,470,000.00	3	Bulan	0	3	Bulan	308,624,500.00	12	Bulan	395,094,500.00	98.21%	Persen								
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Kebutuhan Jasa Tenaga Administrasi					1	T.A	7,914,904,942.00	3	Bulan	959,021,267.00	3	Bulan	2,369,484,276.00	3	Bulan	1,720,034,607.00	3	Bulan	1,971,389,358.00	12	Bulan	7,019,929,508.00	88.69%	Persen								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					2	Keg	607,752,649.00	0	Keg	0.00	1	Keg	31,930,500.00	0	Keg	0	1	Keg	248,480,500.00	2	Keg	280,411,000.00	46.14%	Persen								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																																
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor					1	T.A	400,863,630.00	3	Bulan	0.00	3	Bulan	450,000.00	3	Bulan	0	3	Bulan	46,340,000.00	12	Bulan	46,790,000.00	11.67%	Persen								
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor					1	T.A	356,149,190.00	3	Bulan	0.00	3	Bulan	55,742,000.00	3	Bulan	0	3	Bulan	226,397,500.00	12	Bulan	282,139,500.00	79.22%	Persen								
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi					1	T.A	284,618,804.00	3	Bulan	0.00	3	Bulan	0.00	3	Bulan	0	3	Bulan	246,620,092.00	12	Bulan	246,620,092.00	86.65%	Persen								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																																
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kebutuhan Jasa Listrik, Penyediaan Kebutuhan Jasa Internet					12	Bulan	780,000,000.00	3	Bulan	0.00	3	Bulan	98,506,171.00	3	Bulan	332,182,795.00	3	Bulan	124,982,640.00	12	Bulan	555,671,606.00	71.24%	Persen								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																																
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas					1	T.A	603,216,000.00			0.00			70,319,283.00			0			411,934,456.00			482,253,739.00	79.95%	Persen								

No	Sasaran	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 (akhir periode renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (I, II, III, IV)		13 = 12/7 *		14 = 6 + 12			15 = 14/5 * 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K		Rp	K	Rp		
2		Program Pengelolaan Pendidikan	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal																											
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																												
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU							2,264,442,200.00		0.00		0.00		326,948,400.00		1,324,484,000.00		1,651,432,400.00	72.93%									
		Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi							1,517,334,000.00		0.00		0.00		292,749,300.00		341,559,000.00		634,308,300.00	41.80%									
		Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika							1,516,618,000.00		0.00		0.00		298,067,400.00		522,980,500.00		821,047,900.00	54.14%									
		Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia							484,484,000.00		0.00		0.00		108,973,800.00		0.00		108,973,800.00	22.49%									
		Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer							1,588,013,000.00		0.00		0.00		363,149,100.00		774,520,880.00		1,137,669,980.00	71.64%									
		Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa							1,937,747,000.00		0.00		0.00		281,119,800.00		799,228,350.00		1,080,348,150.00	55.75%									
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							3,469,001,000.00		0.00		0.00		786,866,200.00		1,640,959,750.00		2,427,825,950.00	69.99%									
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							7,316,585,800.00		0.00		0.00		977,443,500.00		3,229,734,550.00		4,207,178,050.00	57.50%									
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							5,511,183,000.00		0.00		0.00		1,137,597,900.00		2,827,171,000.00		3,964,768,900.00	71.94%									
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							2,515,833,000.00		0.00		0.00		290,837,100.00		1,624,557,900.00		1,915,395,000.00	76.13%									
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi							2,728,674,000.00		0.00		0.00		59,661,000.00		1,473,680,000.00		1,533,341,000.00	56.19%									
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika							2,026,235,000.00		0.00		0.00		59,931,000.00		1,258,326,800.00		1,318,257,800.00	65.06%									
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia							2,499,975,060.00		0.00		0.00		366,614,700.00		1,186,646,500.00		1,553,261,200.00	62.13%									
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer							444,011,200.00		0.00		0.00		0.00		295,762,200.00		295,762,200.00	66.61%									
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa							569,855,000.00		0.00		0.00		0.00		410,476,750.00		410,476,750.00	72.03%									
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							152,391,200.00		0.00		0.00		0.00		106,449,000.00		106,449,000.00	69.85%									
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							3,030,723,960.00		0.00		0.00		277,079,850.00		2,044,104,000.00		2,321,183,850.00	76.59%									
		Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							4,074,770,448.00		0.00		0.00		511,176,000.00		2,182,542,800.00		2,693,718,800.00	66.11%									
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas							107,166,299,020.00		0.00		0.00		0.00		122,571,000.00		122,571,000.00	0.11%									
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa							13,865,000,000.00		0.00		0.00		0.00		13,777,469,044.00		13,777,469,044.00	99.37%									
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							43,875,401,970.00		4,922,057,010.00		18,213,805,296.00		12,416,560,870.00		8,315,424,755.00		43,867,847,931.00	99.98%									
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas							5,304,965,600.00		0.00		202,950,500.00		275,428,000.00		2,965,411,015.00		3,443,789,515.00	64.92%									
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																												
		Pembangunan Ruang Praktik Siswa							22,680,000,000.00		0.00		0.00		4,322,384,942.00		9,364,776,191.00		13,687,161,133.00	60.35%									
		Pembangunan Ruang Laboratorium							3,784,113,072.00		0.00		0.00		742,024,800.00		1,541,199,000.00		2,283,223,800.00	60.34%									
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							1,360,486,200.00		0.00		0.00		251,823,000.00		890,513,280.00		1,142,336,280.00	83.97%									
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							760,003,363.00		0.00		0.00		0.00		417,128,800.00		417,128,800.00	54.89%									
		Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah							28,161,000,000.00		0.00		0.00		5,863,820,620.00		12,805,142,658.00		18,668,963,278.00	66.29%									
		Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							647,472,280.00		0.00		0.00		0.00		465,110,900.00		465,110,900.00	71.83%									
		Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa							3,100,000,000.00		0.00		0.00		597,611,700.00		1,464,281,627.00		2,061,893,327.00	66.51%									
		Rehabilitasi Ruang Laboratorium							580,000,048.00		0.00		0.00		0.00		394,826,380.00		394,826,380.00	68.07%									
		Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah							810,000,000.00		0.00		0.00		80,710,500.00		464,391,000.00		545,101,500.00	67.30%									
		Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							1,090,000,000.00		0.00		0.00		0.00		463,771,075.00		463,771,075.00	42.55%									
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							35,759,001,680.00		0.00		0.00		0.00		23,019,708,766.00		23,019,708,766.00	64.37%									
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan							91,407,108,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00%									
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							41,854,278,805.00		4,886,590,665.00		17,763,449,715.00		10,559,416,670.00		41,840,356,250.00		75,049,813,300.00	179.31%									
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan							4,966,693,000.00		0.00		0.00		1,229,691,880.00		2,777,358,160.00		4,007,050,040.00	80.68%									
		Pengelolaan Pendidikan Khusus																												
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							801,200,400.00		0.00		0.00		0.00		506,951,599.00		506,951,599.00	63.27%									
		Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah							480,000,800.00		0.00		0.00		0.00		307,185,900.00		307,185,900.00	64.00%									
		Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							164,762,000.00		0.00		0.00		0.00		123,483,000.00		123,483,000.00	74.95%									
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus							378,829,975,360.00		0.00		0.00		0.00		151,956,000.00		151,956,000.00	0.04%									
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus							1,747,966,297.00		182,840,460.00		639,345,520.00		385,004,840.00		1,708,271,015.00		2,915,461,835.00	166.79%									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM									0.00		0.00		0.00																	
Rata-rata capaian kinerja (%)									#DIV/0!																					
Predikat kinerja									SANGAT RENDAH																					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Dana Dak yang besar dan belum realisasi sampai triwulan dengan triwulan II

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Provinsi berikutnya *):

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2021

DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)				Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)				Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2020								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2021)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Kawab	Lokasi / Ket
																				I		II		III		IV																
100%	200%	300%	400%	500%				600%				600%				700%				800%		900%		1000%		1100%		12 = 8+9+10+11				13=12/7x100%		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100%		1600%	1700%
				K			Rp	K			Rp	K			Rp	K			Rp	K	Rp.	K	Rp	M	Rp.	K	Rp.	K	Rp			K	Rp			K		Rp.		Rp.			
1		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan ; NILAI LKIP SKPD DINAS KESEHATAN RATA - RATA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat**			**236,814,120,704**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan ; NILAI**			**39,248,612,025**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat**			**4,192,052,062**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat**			**36,840,970,045**												**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat**										**4,192,052,062**			**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
1.1	**Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana/Prasarana Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan Kebutuhan Organisasi**	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Tersediannya kebutuhan administrasi umum	60	Bulan	0	49,922,190,944	48	Bulan		35,670,991,394.00	48	Bulan		2,775,738,493.00	12	Bulan		34,024,993,954.00											-	Bulan		0.00	0.00	0.00	48	Bula		2,775,738,493	80.00	6%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
1.2		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	60	Bulan	0	38,391,487,996	48	Bulan		1,121,937,334.00	36	Bulan		385,422,824.00	12	Bulan		844,398,893.00											-	Bulan		0.00	0.00	0.00	36	Bula		385,422,824	60.00	1%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
1.3		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Tersedianya Kebutuhan administrasi Barang/Jasa	60	Bulan	0	36,978,972,700	48	Bulan		538,276,845.00	36	Bulan		165,892,895.00	12	Bulan		717601285											-	Bulan		0.00	0.00	0.00	36	Bula		165,892,895	60.00	0%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
1.4		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Kebutuhan administrasi Kepegawaian	60	Bulan	0	36,498,012,680	48	Bulan		321,699,428.00	36	Bulan		27,343,325.00	12	Bulan		355,535,000.00											-	Bulan		0.00	0.00	0.00	36	Bula		27,343,325	60.00	0%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
1.5		Kegiatan penataan Kearsipan	Terlaksananya Kegiatan Penataan Kearsipan	60	Bulan	0	36,397,755,800	48	Bulan		3,745,000.00	36	Bulan		2,595,000.00	12	Bulan		1,150,100.00											-	Bulan		0.00	0.00	0.00	36	Bula		2,595,000	60.00	0%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
1.6		Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan	60	Bulan	0	38,625,700,583	48	Bulan		1,591,962,024.00	36	Bulan		835,059,525.00	12	Bulan		897,290,813.00											-	Bulan		0.00	0.00	0.00	36	Bula		835,059,525	60.00	2%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**799,422,309.00**	**-**	**0.00%**		**0.00**	**-**	**Bulan**		**0.00**				**851,553,929.00**											#	**Bulan**		**666,897,632.00**	**300.00**	**211.90**	**36.00**		**666,897,632.00**			**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
		Penyediaan , Peralatan ,Perlengkapan Kantor		12	Bulan		Rp 41,399,920	-	0.00%		0.00	-	Bulan		0.00	12	Bulan	Rp	41,399,920											#	Bulan		13,738,477	12	Bulan	**13,738,477.00**	100.00	33.18	12	Bulan	13,738,477	100	33%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Penyediaan bahan logistik Kantor		12			Rp 12,837,098	-	0.00%		0.00	-	Bulan		0.00	12	Bulan	Rp	9,586,598											#	Bulan		9,275,000	12	Bulan	**9,275,000.00**	100.00	96.75	12	Bulan	9,275,000	100.00	72%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12			Rp 745,185,291	-	0.00%		0.00	-	Bulan		0.00	12	Bulan	Rp	785,567,291											#	Bulan		643,884,155	12	Bulan	**643,884,155.00**	100.00	81.96	12	Bulan	643,884,155	100.00	86%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Administasi Keuangan Perangkat Daerah		**12**			**2,985,822,733.00**	**-**	**0.00%**		**0.00**	**-**	**Bulan**		**0.00**				**3,156,464,126.00**											#	**Bulan**		**2,895,455,899**	**12**	**Bulan**	**3,010,709,583.00**			**12**			**100.00**		**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12			Rp 300,000,000	2	unit		2,456,457,410.00	-	Bulan		0.00	12	Bulan	Rp	2,784,583,410											#	Bulan		298,215,003	12	Bulan	**298,215,003.00**	100.00	10.71	12	Bulan	298,215,003	100.00	99.41%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		12			Rp 5,411,808	48	Bulan		24,491,867,537.00	-	Bulan		0.00	12	Bulan	Rp	5,411,808											#	Bulan			12	Bulan	**0.00**	100.00	0.00	12	Bulan	-	100.00	0.00%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12			Rp 2,568,090,097	37	Tahun		961,870,606.00	-	Bulan		0.00	12	Bulan		**2,600,187,294.00**											#	Bulan		2,600,187,294	12	Bulan	**2,600,187,294.00**	100.00	100.00	12	Bulan	2,600,187,294	100.00	101.25%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		12			78,220,828	4	Tahun		1,388,218,004.00	-	Bulan		0.00	12	Bulan		**78,220,828.00**											#	Bulan		78,220,828	12	Bulan	**78,220,828.00**	100.00	100.00	12	Bulan	78,220,828	100.00	100.00%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/		12			Rp 34,100,000	4	Tahun		766,136,797.00	-	Bulan		0.00	12	Bulan		**34,086,458.00**											#	Bulan		34,086,458	12	Bulan	**34,086,458.00**	100.00	100.00	12	Bulan	34,086,458	100.00	99.96%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
																													Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00	65.33						100.00	74.06%		
																													Peringkat Kinerja			Tinggi	Tinggi						Tinggi	Tinggi		
2		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya kinerja pelayanan publik Dinas Kesehatan; Indeks Kinerja SKPD**	**Indeks Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD**			**69,085,522,700**	**1**	**##########**		**32,938,732,986**	**###**			**18,829,893,298**				**14,143,809,895**			**0**								**5**	**unit**		**0.00**		**0.00**	**6**	**unit**		**18,829,893,298**	**18.76**	**5.97**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
2.1		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Adanya pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	5	unit		10,281,621,014	2	unit		2,456,457,410	1	unit		2,311,457,410	1	Unit		145,000,000.00											-	unit		0.00	0.00	0.00	1	unit		2,311,457,410	20.00	22.48	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
2.2		Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Dinas Kesehatan rata-rata	60	Bulan	0	19,075,255,428	48	Bulan		24,491,867,537	36	Bulan		15,093,212,662	12	Hn		9,398,654,875.00											-	Bulan		-	0.00	0.00	36	Bulan		15,093,212,662	60.00	79.12	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
2.3		Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Dinas Kesehatan rata-rata	60	Bulan		500,000,000	37	Tahun		961,870,606	36	Bulan		-	12	Hn		976,295,500.00											1	Tahu		-	8.33	0.00	37	Tahun		-	61.67	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
2.4		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Dinas Kesehatan rata-rata	5	Tahun	0	10,468,400,437	4	Tahun		1,388,218,004	3	Tahun		316,912,917	1	Tahun		1,091,850,400.00											1	Tahu		-	100.00	0.00	4	Tahun		316,912,917	80.00	3.03	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
2.5		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor	Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Dinas Kesehatan rata-rata	5	Tahun	0	9,163,637,240	4	Tahun		766,136,797	3	Tahun		173,511,902	1	Tahun		592,624,895.00											-	Tahu		-	0.00	0.00	3	Tahun		173,511,902	60.00	1.89	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
2.6		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Dinas Kesehatan rata-rata	5	Tahun	0	11,259,987,564	4	Tahun		2,799,182,631	3	Tahun		859,798,407	1	Tahun		1,939,384,224.00											-	Tahu		-	0.00	0	3	Tahun		859,798,407	60.00	7.64	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
2.7		Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran	Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Dinas Kesehatan rata-rata	5	Tahun	0	8,836,621,014	4	Tahun		75,000,001	3	Tahun		75,000,000	1	Tahun		1.00											-	Tahu		1	0.00	100.00	3	Tahun		75,000,001	60.00	0.85	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**1**	**Tahun**		**15,997,228,858.00**						**Tahun**		**75,000,000**	**1**	**Tahun**		**63,254,649,407.00**	**1**	**Tahun**	**0.00**		**Rp**					**1**	**Tahun**		**38,488,449,402.00**	**100.00**	**60.85**	**1**	**Bulan**		**38,563,449,402**	**100.00**	**241%**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		1	Tahun		Rp 273,245,456						Tahun		75,000,000	1	Tahun	Rp	69,127,272	1	Tahun	Rp-		Rp-		Rp 69,127,272			1	Tahun		**69,127,272.00**	100.00	100.00	1	Bulan		144,127,272	100.00	53%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		uan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan		1	Tahun		Rp 750,000,000									1	Tahun	Rp	750,000,000										#	Tahun	Rp	708,985,200	1	Tahun	**708,985,200.00**	100.00	94.53	1	Bulan		708,985,200	100	95%		
		adaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		1	Tahun		Rp 10,285,000,000						Tahun		75,000,000	1	Tahun	Rp	7,046,524,070							Rp -		1	Tahun		3,686,143,860	1	Tahun	**3,686,143,860.00**	100.00	52.31	1	Bulan		3,761,143,860	100.00	37%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		a dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	Tahun		Rp 5,311,719,762						Tahun		75,000,000	1	Tahun	Rp	55,192,188,974							Rp 6,316,669,150		1	Tahun		27,477,053,595	1	Tahun	**33,793,722,745.00**	100.00	61.23	1	Bulan		33,868,722,745	100.00	638%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		a Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		1	Tahun		Rp 127,263,640						Tahun		75,000,000	1	Tahun	Rp	230,470,330							Rp 33,862,400		1	Tahun		196,607,930	1	Tahun	**230,470,330.00**	100.00	100.00	1	Bulan		305,470,330	100.00	240%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**1**	**Tahun**		**25,696,061,487.00**						**Tahun**		**75,000,000**				**28,933,966,882.00**																								**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
		ian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	Tahun		Rp 7,833,150,715						Tahun		75,000,000	1	Tahun	Rp	7,833,150,715									1	Tahun		6,174,711,018	1	Tahun	**6,174,711,018.00**	100.00	78.83	1	Bulan		6,249,711,018	100.00	80%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		diaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	Tahun		Rp 108,234,948						Tahun		75,000,000	1	Tahun	Rp	677,034,977									1	Tahun		599,221,657	1	Tahun	**599,221,657.00**	100.00	88.51	1	Bulan		674,221,657	100.00	623%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1	Tahun		Rp 17,754,675,824						Tahun		75,000,000	1	Tahun	Rp	29,293,208,000									1	Tahun		29,293,207,009	1	Tahun	**29,293,207,009.00**	100.00	100.00	1	Bulan		29,368,207,009	100.00	165%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**1**	**Tahun**		**6,923,478,210.00**												**7,937,154,699.00**																								**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
		Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan		1	Tahun		Rp 634,918,476						Tahun		75,000,000	1	Tahun	Rp	1,615,120,559									1	Tahun		559,918,476	1	Tahun	**559,918,476.00**	100.00	34.67	1	Bulan		634,918,476	100.00	100%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan		1	Tahun		Rp 250,000,000						Tahun		75,000,000	1	Tahun	Rp	278,609,831									1	Tahun		174,526,085	1	Tahun	**174,526,085.00**	100.00	62.64	1	Bulan		249,526,085	100.00	100%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		emeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		1	Tahun		Rp 139,432,500						Tahun		75,000,000	1	Tahun	Rp	67,050,272									1	Tahun		64,432,500	1	Tahun	**64,432,500.00**	100.00	96.10	1	Bulan		139,432,500	100.00	100%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	Tahun		Rp 4,399,127,234						Tahun		75,000,000	1	Tahun	Rp	3,998,559,894									1	Tahun		4,324,127,234	1	Tahun	**4,324,127,234.00**	100.00	108.14	1	Bulan		4,399,127,234	100.00	100%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Pemeliharaan/ Rehabilitsi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		1	Tahun		Rp 1,500,000,000						Tahun		75,000,000	1	Tahun	Rp	1,977,814,143									1	Tahun		1,412,827,525	1	Tahun	**1,412,827,525.00**	100.00	71.43	1	Bulan		1,487,827,525	100.00	99%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
																													Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00	85.33						100.00	84.81%		
																													Peringkat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
3		**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin**	**97%**			**4,553,695,552**	**-**	**##########**		**162,289,600**	**-**			**559,536,230**	**224**			**62,500,001.00**				**###**		**###**		**Rp -**			**-**	**pega**		**2,665,032,100.00**	**0.00**	**4,264.05**		**pega**		**3,224,568,330**		**0.71**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
3.1		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin	1,120	pegawai	0	2,143,647,776	224	pegawai		**162,289,600**	##			162,289,600	224	pegawai		1.00	-										-	pegawai		0	1.00	0.00	224.00	pegawai		162,289,600	20.00	7.57	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
3.2	**Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Dinas Kesehatan Daerah**	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin	1,120	pegawai	0	2,410,047,776	-				##			229,331,630	224	pegawai		62,500,000.00										-	pegawai		-	0.00	0.00	224.00	pegawai		229,331,630	20.00	9.52	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**224**			**1,800,000,000.00**									**224**			**1,493,470,000.00**								**1,422,516,000**	**224**	**pegawai**		**1,422,516,000**	**100**	**95.25**	**224.00**	**pegawai**		**1,422,516,000**	**100.00**	**79.03**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
		n Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya		224	pegawai		Rp 1,500,000,000								229,331,630	224	pegawai	Rp	1,428,470,000							#	pegawai	1,177,695,000	224	pegawai		**1,177,695,000.00**	100.00	82.44	224	Bulan		1,407,026,630	100.00	93.80	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2020											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provisi yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Kawab	Lokasi / Kec
																I		II		III		IV																
100%	200%	300%	400%	500%			600%			600%			700%			800%		900%		1000%		1100%					12 = 8+9+10+11			13=12/7x100%		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100%		1600%	1700%
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp		K	Rp	K		Rp.	K	Rp.		
		oring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		224	pegawai	Rp 300,000,000						229,331,630	224	pegawai	Rp 65,000,000							#	pegawai	64,821,100	224	pegawai	64,821,100.00	100.00	99.72	224	Bulan	294,152,730	100.00	98.05	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
																											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	75.25	69.35				100.00	95.93		
																												Tinggi	Tinggi				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4	Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Dinas Kesehatan Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kinerja pelayanan publik Dinas Kesehatan: Indeks	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA		5,962,301,904	-	##########	627,349,544	-		-			926,083,581.00												-	-	-	-	-		-		-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
4.1		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah dinas kesehatan	5	Tahun	0 3,122,672,952	1	Tahun	71,818,100	4	Tahun	-	1	Tahun	71,875,000.00											1	Tahun	0.00	100.00	0.00	1.00	Tahun	-	20.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
4.2		Sulut Sehat Satu Peta (3SP)		5	Tahun	28,304,600	1	Tahun	28,304,600				1	Tahun	56,470,000.00											1	Tahun	0.00	100.00	0.00	1.00	Tahun	-	20.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
4.3		Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	Adanya Sumber daya Manusia Kesehatan	5	Tahun	0 2,839,628,952	1	Tahun	527,226,844	4	Tahun		1	Tahun	797,738,581.00											1	Tahun	0.00	100.00	0.00	1.00	Tahun	-	20.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
																											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100.00	0.00				46.67	0.00		
																											Peringkat Kinerja	Tinggi	Tinggi				Rendah	Rendah		
5	Meningkatkan Perencanaan dan Pengembangan Program Dinas Kesehatan Daerah	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Cakupan pelaporan capaian kinerja keuangan; laporan	100% dari 42 Laporan (LKIP, LAPORAN		785,866,272	1	##########	121,482,197	1		32,348,297			151,443,300.00												-	-	0.00	#DIV/0!	0.00		-		-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
5.1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Adanya Laporan LKIP,LPPD, LKPJ	5	Tahun	0 202,445,574	5	Tahun	35,163,364	4	Tahun	9,636,364	1	Tahun	32,634,800.00											1	Tahun	0.00	100.00	0.00	5	Tahun	9,636,364	100	4.76	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
5.2		Penyusunan pelaporan Keuangan Semester	Adanya laporan keuangan semester	10	Lap	0 152,895,574	8	Lap	23,973,250	6	Lap	1,900,000	2	Lap	23,687,200.00											2	Lap	0.00	100.00	0.00	8	Lap	1,900,000	80	1.24	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
5.3		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Adanya Laporan Keuangan akhir tahun	5	Lap	0 155,295,574	4	Lap	6,483,250	3	Lap	-	1	Lap	54,270,300.00											1	Lap	0.00	100.00	0.00	4	Lap	-	80	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
5.4		Penyusunan Laporan Bulanan SKPD	Adanya laporan bulanan, laporan Fungsional bendahara, laporan	60	Bulan	0 275,229,549	39	Bulan	55,862,333	36	Bulan	20,811,933	12	Bulan	40,851,000.00											3	Bulan	0.00	25.00	0.00	39	Bulan	20,811,933	65	7.56	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
																											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	81.25	-				81.25	4.52		
																											Peringkat Kinerja	Tinggi	Sangat Rendah				Tinggi	Sangat Rendah		
6	TERINTEGRASINYA POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar	Terselenggaranya Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan	100%		1,318,004,755	1	##########	101,255,437	1		101,255,437			0.00		####		###	Rp -						-	-	0.00	0.00	0.00	1	Bulan	101,255,437			Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
6.1		Pertemuan hari Kesehatan Nasional	Terselenggaranya Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan	5	Tahun	0 658,442,507	3	Bulan	55,763,637	3	Tahun	55,763,637	1	Tahun	0.00		###			Rp -			-	-	Tahun	0.00	0.00	0.00	3	Bulan	55,763,637	60.00	8.47	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
6.2		Kegiatan Pameran Promosi Kesehatan Hari Kesehatan	Terselenggaranya Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan	5	Tahun	0 659,562,248	3	Tahun	45,491,800	3	Tahun	45,491,800	1	Tahun	0.00		###			Rp -			-	-	Tahun	0.00	0.00	0.00	3.00	Tahun	45,491,800	60.00	6.90	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
																											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	-	-				60.00	7.68		
																											Peringkat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				Rendah	Sangat Rendah		
7	TERWUJUDNYA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG SESUAI SPM KESEHATAN	Program Perencanaan SKPD	Terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan	100% dari 42 DOKUMEN PERENCANAA		2,607,857,617	1	##########	220,365,863.00	1		52,336,526			100,490,000.00												-	-	0.00		0.00	1	Bulan	52,336,526	20.00	2.21	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
7.1		Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Adanya dokumen perencanaan	60	Bulan	0 883,642,539	42	Bulan	44,256,859	36	Bulan	5,449,909	12	Bulan	53,010,000.00											6	Bulan	0.00	50.00	0.00	42	Bulan	5,449,909	70.00	0.62	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
7.2		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Tersediannya Dokumen RKA, DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan	60	Bulan	0 362,672,539	42	Bulan	95,479,590	36	Bulan	13,569,317	12	Bulan	0.00											6	Bulan	0.00	50.00	0.00	42	Bulan	13,569,317	70.00	3.74	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
7.3		Focus Group Discusion Lintas Program/Sektor/Kabupaten/Kota	Adanya dokumen perencanaan penyusunan Renja, RKPD, LAKIP,	60	Bulan	0 1,356,942,539	-		80,629,414	36	Bulan	33,317,300	12	Bulan	47,480,000.00											6	Bulan	0.00	50.00	0.00	42	Bulan	33,317,300	70.00	2.46	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	Bulan	126,993,040.00							12	Bulan	425,470,628.00							12	Bulan	126,877,691.00	12	Bulan									Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		sanan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12	Bulan	Rp 100,400,000							12	Bulan	Rp 104,105,986							12	Bulan	Rp 100,399,401	12	Bulan	100,399,401.00	100.00	96.44	12	Bulan	100,399,401	100.00	100.00	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		dinasi dan Penyusupan Dokumen RKA -SKPD		12	Bulan	Rp 11,520,000							12	Bulan	Rp 12,753,848							12	Bulan	Rp 11,510,990	12	Bulan	11,510,990.00	100.00	90.26	12	Bulan	11,510,990	100.00	99.92	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		12	Bulan	Rp 12,167,400							12	Bulan	Rp 12,637,732							12	Bulan	Rp 12,167,400	12	Bulan	12,167,400.00	100.00	96.28	12	Bulan	12,167,400	100.00	1.00	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	Bulan	Rp 2,905,640							12	Bulan	Rp 2,905,640							12	Bulan	Rp 2,799,900	12	Bulan	2,799,900.00	100.00	96.36	12	Bulan	2,799,900	100.00	96.36	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
																											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100.00	94.83				100.00	74.32		
																											Peringkat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Tinggi		
8	TERINTEGRASINYA POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT SULAWESI UTARA	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%		6,420,196,517	1	##########	1,153,067,820	1		155,509,500			1,645,514,000												-	-			0.00		-		155,509,500	53.33	38.10	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
8.1		Sinkronisasi Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi		15	Kab/Kota	150,000,000.00	15	Kab/Kota	67,037,200				15	Kab/Kota	83,064,000.00											15	Kab/Kota	-	100.00	0.00	15	Kab/Kota	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
8.2		Pertemuan kasus Gizi Buruk, gizi kurang dan stunting pada anak		15	Kab/Kota	125,000,000.00	15	Kab/Kota	147,274,000				15	Kab/Kota	430,000,000.00											15	Kab/Kota	-	100.00	0.00	15	Kab/Kota	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
8.3		Sinkronisasi Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi (DAK)		15	Kab/Kota	100,000,000.00	15	Kab/Kota	130,939,800				15	Kab/Kota	131,600,000.00											15	Kab/Kota	-	100.00	0.00	15	Kab/Kota	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
8.4		Pemberian tambahan makanan dan Vitamin pada Balita Gizi	Prosentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	1720	Anak	0 5,332,639,939	15	Kab/Kota	807,816,820	##	Anak	-	450	Anak	1,000,850,000.00	-										450	Anak	-	100.00	0.00	794	anak	-	46.16	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
																											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	80.00	-				69.23	-		
																											Peringkat Kinerja	Tinggi					Tinggi			
9	TERINTEGRASINYA POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT SULAWESI UTARA	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	% Penduduk Yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	70.0%		1,727,169,282	1	##########	#REF!	1		130,507,300			1,183,960,000.00		####									-	-	0.00		0.00		-		130,507,300	20.00	8.29	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
9.1		Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat di daerah kumuh	Menciptakan lingkungan sehat di daerah kumuh	75	Kab/Kota	97,500,000.00	30	Kab/Kota	105,757,600	15	Kab/Kota		15	Kab/Kota	343,060,000.00											15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	30	Kab/Kota	-	40.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
9.2		Melakukan Bimbingan teknis STBM	Integrasi program kesehatan Olahraga dan Dinas Pendidikan	30	Kab/Kota	350,000,000.00	15	Orang	220,030,700	-	0		15	Kab/Kota	220,500,000.00											15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	15	Orang	-	50.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
9.3		Pemantauan dan Pengawasan Limbah Medis (DAK)		15	Kab/Kota	171,000,000.00	-	0	#REF!		0		15	Kab/Kota	171,000,000.00											15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	15	-	-	100.00		Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
9.4		Orientasi Penjamah dan Penanggungjawab makanan	Orientasi Kesehatan Olahraga senam jantung sehat	40	Orang	49,480,000.00	40	Orang	62,310,000	-	0		40	Orang	256,700,000.00											40	Orang	0.00	100.00	0.00	40	Orang	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
9.5		Orientasi Pengawasan Kualits Air Minum (DAK)					-	0	127,800,900				15	Kab/Kota	192,700,000.00											15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	15	Orang	-	-	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
																											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100.00	-				58.00	-		
																											Peringkat Kinerja	Tinggi	Rendah				Rendah	Sangat Rendah		
10	TERINTEGRASINYA POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT SULAWESI UTARA	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melakukan pendataan dan	75%		3,027,498,376	1	##########	2,720,166,501	1		193,681,181	1		4,168,483,000.00		####		###	Rp -						-	-	0.00	0	0.00		-		193,681,181	20.00	6.83	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
10.1		Koordinasi LS dalam mendorong regulasi/implementasi GERMAS	Terlaksananya Koordinasi LS dalam mendorong	45	Kab/Kota	0 150,000,000	15	Kab/Kota	164,568,200	-		0	15	Kab/Kota	190,200,000.00											15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	15.00	Kab/Kota	-	33.33	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
10/2		Penanaman/Penggadaan sarana penyuluhan dan Promosi	Pengadaan Media penyuluhan dan Promosi kesehatan	1	kegiatan	150000000.00	1	Kab/Kota	376,539,136				1	kegiatan	750,500,000.00											1	kegiatan	0.00	100.00	0.00	1.00	Kab/Kota	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
10.3		Sosialisasi dan advokasi kebijakan Pembangunan	Adanya advokasi Kebijakan Pembangunan berwawasan	1		153610000.00	1	Kab/Kota	60,548,200			0	1		153,610,000.00											1		0.00	100.00	0.00	1.00	Kab/Kota	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
10.4		Advokasi untuk mendorong Kab/Kota menerapkan kebijakan	Terlaksananya advokasi untuk mendorong Kab/Kota menerapkan	15	Kab/Kota	134143000.00	15	Kab/Kota	64,487,400			0	15		134,143,000.00											15		0.00	100.00	0.00	15.00	Kab/Kota	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
10.5		Pendampingan teknis dalam rangka mendorong	Terlaksananya Pendampingan teknis dalam rangka mendorong	45	Kab/Kota	490,720,000.00	15	Kab/Kota	444,788,500	-		0	15	Kab/Kota	490,720,000.00											15	Kab/Kota	0	100.00	0.00	15.00	Kab/Kota	-	33.33	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
10.6		Penguatan promosi kesehatan di tatanam (sekolah, Pasar, dan	Terlaksanaanya Penguatan promosi kesehatan di tatanam (sekolah,	45	Kab/Kota	400,190,000.00	0.00		360,793,100	0		0	15	Kab/Kota	400,190,000.00											-	Kab/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab/Kota	-	-	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
10.7		Penguatan upaya kesehatan bersumber masyarakat UKBM	Terlaksanaanya penguatan upaya kesehatan bersumber masyarakat	45	Kab/Kota	0 283,599,999.00	15	Kab/Kota	192,962,400	-		0	15	Kab/Kota	283,581,000.00											15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	15.00	Kab/Kota	-	33.33	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
10.1		Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Kesehatn		45	Kab/Kota	119,629,600.00	15	Kab/Kota	119,629,600				15	Kab/Kota	495,600,000.00											15	Kab/Kota	0.00	100	0.00	15.00	Kab/Kota	-	33.33	0	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
10.11		Pemberdayaan Generasi Muda dalam Pelaksanaan Saka Bhakti		45	Kab/Kota	231,500,200.00	15	Kab/Kota	231,500,200				15	Kab/Kota	364,200,000.00											15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	15.00	Kab/Kota	-	33.33	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
10.12		Orientasi Advokasi / Kemitraan bagi Kab/Kota dalam Mendukung		45	Kab/Kota	86,972,965.00	15	Kab/Kota	86,972,965				15	Kab/Kota	173,640,000.00											15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	15.00	Kab/Kota	-	33.33	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Mobilisasi dan Penguatan UKBM di Kab/Kota	Terlaksananya mobilisasi dan Penguatan UKBM di Kab/Kota	45	Kab/Kota	0 617,376,800.00	15	Kab/Kota	617,376,800	-		0	15	Kab/Kota	732,099,000.00											15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	15.00	Kab/Kota	-	33.33	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
																											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	90.91	-				48.48	-		
																											Peringkat Kinerja	Tinggi	Tinggi				Rendah	Tinggi		

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2020								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Kawab	Lokasi / Kel
																		I		II		III		IV														
100%	200%	300%	400%		500%				600%				600%				700%		800%		900%		1000%		1100%			12 = 8+9+10+11			13=12/7x100%		14 = 6+12			15 = 14/6 x 100%		1600%	1700%
					K		Rp		K		Rp		K		Rp		K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K		Rp	K	Rp		
																													-											
11		**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	**Jumlah kab/kota yang melaksanakan pelayanan**	**15**	**Kab/Kota**		**10,701,484,034**	**1**	**##########**	**#REF!**	**1**		**749,896,569**			**1,037,190,000.00**													-	**0.00**		**0.00**		-	**749,896,569**	**20.00**	**3.35**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan**
11.1		Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan	200	Lokasi	0	681,664,190	60	Lolasi	192,826,385	0		63,350,785	60	Lolasi	130,000,000.00											60	Lolasi	0.00	100.00	0.00	60	Lolasi	63,350,785	30.00	9.29	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
11.2	TERWUJUDNYA MASYARAKAT SULAWESI UTARA YANG MEMILIKI USIA HARAPAN HIDUP YANG PANJANG	Peningkatan SDM Program pengendalian zoonosis	Meningkatnya SDM Program pengendalian zoonosis	640	Orang	0	1,488,014,190	0	Orang	190,217,800	0		132,461,000	1	Orang	121,720,000.00											60	Orang	0.00	0.00	0.00	0	Orang	132,461,000	-	8.90	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
11.3		Pelayanan Pencegahan dan deteksi dini Filariasis dan	terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan deteksi dini	5	Tahun	0	4,672,170,815	0	Tahun	47,222,800			-	1	Tahun	121,720,000.00											0	Tahun	0.00	0.00	0.00	0	Tahun	-	-	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
11.4		Fasilitasi diseminasi Kabupaten Percontohan Pengendalian	Prosentase Kab/Kota eliminasi rabies	30	Kab/Kota	0	581,800,290	0	Kab/Kota	246,629,000	0		50,279,000	15	Kab/Kota	250,000,000.00											0	Kab/Kota	0.00	0.00	0.00	0	Kab/Kota	50,279,000	-	8.64	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
11.5		Pembinaan Kabupaten Kota dalam pengendalian TB-HIV	Setiap orang yang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan	600	Orang	0	873,944,190	15	Kab/Kota	342,592,948	15	Kab/Kota	102,612,548	15	Kab/Kota	300,000,000.00											15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	15	Kab/Kota	102,612,548	2.50	11.74	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
11.6		VCT Mobile/konseling dan pemeriksaan status HIV pada		15	Kab/Kota		100,000,000.00	15	Kab/Kota	72,898,600				15	Kab/Kota	110,000,000.00											15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	15	Kab/Kota	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
11.7		Pembinaan Kab/Kota dalam skrining Hepatitis B pada Ibu	Pembinaan Kab/Kota dalam skrining Hepatitis B pada Ibu	15	Kab/Kota		109,770,000.00	15	Kab/Kota	#REF!	15	Kab/Kota	-	15	Kab/Kota	3,750,000.00											0	Kab/Kota	0.00	0.00	0.00	15		-	100.00	0.00	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
																											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		37.50	-				29.06	4.82		
																											Peringkat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat rendah				Sangat Rendah	Sangat rendah		
12		**Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM)**	**Presentase Kab/Kota melaksanakan pelayanan**	**80%**			**6,923,540,697**	**1**	**##########**	**#REF!**	**1**		**72,334,000**			**2,626,277,000.00**			**####**		**###**							-	**0.00**	**0.00**	**0.00**				**30.82**	**13.42**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan**
12.1	TERWUJUDNYA MASYARAKAT SULAWESI UTARA YANG MEMILIKI USIA HARAPAN HIDUP YANG PANJANG	Pengadaan Logistik PPTM	Prosentase desa/kelurahan yang melaksanakan monitoring FR.PTM	75	Kab/Kota	0	5,396,181,303	30	Kab/Kota	749,919,007	15	Kab/Kota	-	15	Kab/Kota	808,793,000.00											15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	30	Kab/Kota	-	40.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
12.2		penggerakan masyarakat dalam pengendalian penyakit tidak	terlaksananya penggerakan masyarakat dalam pengendalian							0	#REF!			15	Kab/Kota	450,000,000.00											15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00						Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
12.3		Deteksi Dini Kanker	Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang di deteksi dini kanker	2370	Orang	0	438,492,131	1,625	Orang	160,517,700	###	Orang	23,228,000	1500	Orang	467,484,000.00											125	Orang	0.00	8.33	0.00	1,625	Orang	23,228,000	68.57	5.30	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
12.4		Deteksi gangguan mental pada anak sekolah	Terlaksananya Deteksi gangguan mental pada anak sekolah	500	Orang	0	775,155,131	200	Orang	76,903,600	###		-	100	Orang	450,000,000.00											100	Orang	0.00	100.00	0.00	200	Orang	-	40.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
12.5		Deteksi gangguan penglihatan pada anak sekolah	terlaksananya Deteksi gangguan penglihatan pada anak sekolah	150	Orang	0	313,712,131	60	Orang	141,678,000	30	Orang	49,106,000	30	Orang	450,000,000.00				Ora	###	Ora					30	Orang	0.00	100.00	0.00	60	Orang	49,106,000	40.00	15.65	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
																											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		81.67	-				37.71	4.19		
																											Peringkat Kinerja		Tinggi	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
13		**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	**Jumlah Kab/kota yang melaksanakan standarisasi**	**15**	**Kab/Kota**		**5,584,115,360**	**1**	**##########**	**6,266,068,505.00**	**1**		**354,069,163**			**7,578,634,148.00**			**####**									-	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**		-	**354,209,163**	**20.00**	**1.12**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan**
13.1		Penyusunan standar pelayanan kesehatan	terlaksananya penyusunan standar pelayanan kesehatan	5			522,050,000.00	1	Puskesmas	107,777,000				1	tahun	277,625,000.00											1	Tahu	0.00	100.00	0.00	1.00	Puskesma	-	20.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
13.2	TERWUJUDNYA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTU R DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG SESUAI SPM KESEHATAN	Pembinaan Pendamping Akreditasi Puskesmas	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang	150	Puskesmas	0	122,939,148.00	60.00	Puskesmas	122,939,148.00	30	Puskesmas	112,300,000.00	30	Puskesmas	37,759,148.00											30	Puskesmas	0.00	100.00	0.00	60.00	Puskesma	112,300,000	40.00	91.35	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
13.3		Pemantapan Pemahaman Standar Akreditasi Bagi Puskesmas	Adanya tempat pelayanan kesehatan yang memenuhi	150	Puskesmas	0	166,416,000.00	0.00	Puskesmas	166,416,000	0		-	1	Puskesmas	1,800,000.00			###	Pu	###	Pu					1	Puskesmas	0.00	100.00	0.00	1.00	Puskesma	-	0.67	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
13.4		Pelaksanaan survei akreditasi	Terpenuhinya standart yang ada di RS dan puskesmas	175	RS/PKM	0	5,868,936,357.00	60.00	Puskesmas	5,868,936,357	0		-	175	tahun	7,261,450,000.00	1	tahun	###		###						1	Tahun	140,000.00	0.57	0.00	1.00	RS/PKM	140,000	0.57	0.00	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		**1**	**Keg**		**Rp 3,640,160,830**							**1**		**Rp 3,239,555,604**			##		**Rp**		**Rp 1,082,343,000**				**1**	**Tahun**	**1,352,325,882.00**	**100.00**	**41.74**	**1**	**Bulan**	**1,352,325,882**	**100.00**	**0.37**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit		1	Keg		Rp 253,235,604						-	1		Rp 239,555,604	1	tahun	Rp		Rp		Rp -		238,094,708	1	Tahun	238,094,708.00	100.00	99.39	1	Bulan	238,094,708	100.00	94.02	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit		1	Keg		Rp 166,773,636						-	1		Rp -	1	tahun	Rp		Rp		Rp -			1	Tahun	0.00	0.00	0.00	1	Bulan	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		ngkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		1	Keg		Rp 3,220,151,590						-	1		Rp 3,000,000,000	1	tahun	##		Rp		Rp 884,453,792		1,765,321,503	1	Tahun	2,919,758,177.00	100.00	97.33	1	Bulan	2,919,758,177	100.00	90.67	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
																											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00	98.36				100.00	92.35		
																											Peringkat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Sangat tinggi		
14		**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	**Presentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Faskes**	**100%**			**31,506,281,570**	**1**	**##########**	**8,569,166,210**	**1**		**6,766,480,000.00**			**6,741,011,788**											-	**0.00**	**0.00**	**0.00**		-	**6,766,480,000**	**3.74**	**3.83**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan**
14.1		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Obat-obatan buffer stock provinsi,	5	Tahun	0	11,238,063,994	2	Tahun	8,209,584,200.00	1	Tahun	2,744,400,000.00	1	Tahun	5,548,659,288.00											1	Tahun	0.00	100.00	0.00	2	Tahun	2,744,400,000	39.65	24.42	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
14.2		Monev Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Distribusi Obat	Peningkatan pelayanan di sarana kefarmasian dan distribusi obat,	75	Kab/Kota	0	3,053,659,271	16	Kab/Kota	359,582,010.00	1	Kab/Kota	101,180,000.00	15	Kab/Kota	261,731,500.00											15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	16	Kab/Kota	101,180,000	21.32	3.31	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
14.4	TERWUJUDNYA AKSES TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SESUAI SPM KESEHATAN	Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Sarana Gudang Obat (DAK)	Tersedianinya Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Sarana	5	Tahun	0	6,511,960,271	-	0	0.00	-	Tahun	3,310,500,000.00	1	Tahun	930,621,000.00											1	Tahun	0.00	100.00	0.00	1	Tahun	3,310,500,000	20.00	50.84	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan,sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk		**1**	**Tahun**		**2,981,901,800.00**							**1**	**Tahun**	**11,160,368,468.00**	**1**	**tahun**	**###**								**1**	**Tahun**	**11,160,368,468.00**	**100.00**	**100.00**	**1**	**Tahun**		**100.00**	**-**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta		1	Tahun		Rp 2,981,901,800							1	Tahun	Rp 38,742,000			##							38,742,000.00	0.00	100.00	-	Bulan	38,742,000	-	0.01	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		n , Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		1	Tahun		Rp 8,465,225,044							1	Tahun	Rp 11,121,626,468			##							11,121,626,468.00	0.00	100.00	-	Bulan	11,121,626,468	-	1.31	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan		**1**	**Tahun**		**#REF!**																														**Dinas Kesehatan Daerah**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan		1	Tahun		Rp 300,800,000							1	Tahun	Rp 300,733,300			Rp		Rp		Rp 84,515,200		216,218,100	1	Tahun	300,733,300.00	100.00	100.00	1	Bulan	300,733,300	100.00	99.98	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
																											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		125.00	100.00				70.24	25.33		
																											Peringkat Kinerja		Tinggi	Tinggi				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
																													-									
15		**Program penanggulangan wabah dan bencana**	**Tertanganinya wabah dan bencana**	**5**	**Tahun**		**747,579,300.00**		**##########**	**56,781,477,795.00**				**1**	**Tahun**	**57,209,133,200.00**											-	**0.00**	**0.00**	**0.00**				**40.00**	**0.38**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan**
15.1	TERWUJUDNYA AKSES TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SESUAI SPM KESEHATAN	Pengendalian vektor penyakit bersumber binatang (Fogging,	terlaksananya Pengendalian vektor penyakit bersumber	5	Tahun		307,894,500.00	1	Tahun	108,735,295	-		-	1	Tahun	307,894,500.00											1	Tahun	0.00	100.00	0.00	1.00	Tahun	-	20.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
15.2		Pengadaan vaksin dan logistik penyakit menular	tersedianya vaksin dan logistik penyakit menular	5	Tahun		220,020,000.00	1	Tahun	740,000	-		-	1	Tahun	220,020,000.00											1	Tahun	0.00	100.00	0.00	1.00	Tahun	-	20.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
15.3		Workshop penanggulangan krisis kesehatan	terlaksananya workshop penanggulangan krisis kesehatan	5	Tahun		39,999,800.00	1	Tahun	22,303,200	-		-	1	Tahun	39,999,800.00											1	Tahun	0.00	100.00	0.00	1.00	Tahun	-	20.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
15.4		Pengadaan Logistik krisis kesehatan (Boot, sarung tangan,	tersedianya logistik krisis kesehatan (Boot, sarung tangan,	5	Tahun		##############	1	Tahun	56,611,553,900	-		-	1	Tahun	56,611,553,900.00											1	Tahun	0.00	100.00	0	1.00	Tahun	-	20.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2020											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provisi yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Kawab	Lokasi / Kel
																I			II			III			IV															
100%	200%	300%	400%			500%			600%			600%			700%			800%			900%			1000%			1100%			12 = 8+9+10+11			13=12/7x100%		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100%		1600%	1700%
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K			K			K		Rp.	K	Rp.		
15.5		Perjalanan dinas dalam rangka rapid health assesment saat	Perjalanan dinas dalam rangka rapid health assesment saat	5	Tahun	100,000,000.00	1	Tahun	38,145,400	-		9,000,000	1	Tahun	29,665,000.00													1	Tahun	0.00	100.00	0.00	1.00	Tahun	9,000,000	20.00	9.00	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
																												Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00	-				20.00	1.80		
																												Peringkat Kinerja			Tinggi	Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
																													-										
16		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Setiap Bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan	88%		5,202,043,497	1	##########	916,409,150.00	1		270,200,000.00			1,188,208,200.00														-	0.00	#DIV/0!	0.00		-	270,200,000	19.04	4.31	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
16.1		Orientasi Konselor sebaya / Kader Kesehatan remaja		15	Kab/Kota	200,000,000.00	15	Kab/Kota	100,823,100.00			0.00	15	Kab/Kota	122,150,000.00													15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	15	Kab/Kota	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
16.2		Penguatan Panti/Lembaga Kesejahteraan sosial anak (LKSA),		15	Kab/Kota	205,580,000.00	15	Kab/Kota	130,020,000.00			0.00	15	Kab/Kota	405,580,000.00													15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	15	Kab/Kota	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
16.3	TERKENDALINYA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN DAN KEMATIAN ANAK/BALITA	Penguatan Model Sekolah/Madrasah sehat		15	Kab/Kota	116,350,000.00	15	Kab/Kota	73,743,950.00			0.00	15	Kab/Kota	116,350,000.00													15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	15	Kab/Kota	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
16.4		Penanganan Program Kesehatan mental anak kurang mampu dan miskin	Penanganan Kesehatan mental anak kurang mampu dan miskin	15	Kab/Kota	362,264,000.00	-	0.00%	362,264,000.00			119,200,000.00	15	Kab/Kota	269,859,000.00													15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00			119,200,000	-	32.90	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
16.5		Scrinning Bayi Baru Lahir Keluarga Miskin	Setiap bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai	5000	Bayi	168,803,900.00	2,000	Bayi	168,803,900.00	##	Bayi	151,000,000.00	1000	Bayi	17,819,200.00													1000	Bayi	0.00	100.00	0.00	2,000	Bayi	151,000,000	40.00	89.45	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
16.6		Penguatan Kab/Kota dalam membina Posyandu Remaja	Jaminan Kesehatan bagi anak panti	1,255	Anak	136,300,000.00	15	Anak	7,118,000.00	-		0.00	15	Kab/Kota	136,300,000.00													15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	15	Anak	-	1.20	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
16.7		Koordinasi Lt/Ls, Organisasi profesi terkait kesehatan anak	Terlaksananya pemantauan teknis terhadap pelaksanaan Pelayanan	75	Kab/Kota	120,150,000.00	15	Kab/Kota	73,636,200	-	0	-	15	Kab/Kota	120,150,000.00													15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	15	Kab/Kota	-	20.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
																												Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00	-				51.60	17.48		
																												Peringkat Kinerja			Tinggi	Tinggi				Rendah	Rendah		
																													-										
17	TERKENDALINYA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN DAN KEMATIAN ANAK/BALITA	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pelayanan	15 Kab/Kota		4,959,596,520	1	##########	2,385,989,248.00	1		740,010,000.00			1,658,075,000.00														-	0.00	0.00	0.00			740,010,000	20.00	20.86	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
17.1		Jambore Lansia	Meningkatnya cakupan pelayanan kepada Lansia	3750	Orang	2,666,724,380	1,500	Orang	651,950,000.00	##	Orang	351,950,000.00	750	Orang	300,000,000.00													750	Orang	0.00	100.00	0.00	1,500	Orang	351,950,000	40.00	13.20	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
17.2		Pelayanan pemeliharaan Kesehatan bagi Lansia	Pelayanan pemeliharaan Kesehatan bagi Lansia	15	Kab/Kota	1,734,039,248.00	-	0	1,734,039,248.00	15	Kab/Kota	388,060,000.00	15	Kab/Kota	1,358,075,000.00													15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	15		388,060,000	100.00	22.38	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
																												Rata-rata Capaian Kinerja (%)			66.67	-				46.67	17.79		
																												Peringkat Kinerja			Tinggi	rendah				Tinggi	rendah		
18	TERKENDALINYA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN DAN KEMATIAN ANAK/BALITA	Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan	Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan	84%		3,163,513,022			#REF!			1,314,309,000.00			1,236,397,150.00			###		###	Rp	-						-	#VALUE!	0.00	#VALUE!			#VALUE!	10.00	15.92	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
18.1		Peningkatan kapasitas petugas KIA dalam deteksi resiko ibu hamil	Peningkatan kapasitas petugas KIA dalam deteksi resiko ibu hamil	15	Kab/Kota	83,250,000.00	0.00	0.00	#REF!	15	Kab/Kota	83,250,000.00	15	Kab/Kota	439,739,150.00			###		###	Rp	-						0	Kab/Kota	0.00	0.00	0.00			0	-	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
18.2		Penguatan sistem rujukan maternal neonatal	terlaksanannya penguatan sistem rujukan maternal neonatal	15	Kab/Kota	1.00	0.00	0.00	#REF!	15	Kab/Kota	0.00	15	Kab/Kota	143,954,000.00			###		###	Rp	-						0	Kab/Kota	0.00	0.00	0.00			0	-	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
18.4		Orientasi Maternal Death Notification (MDN)	Terlaksananya Orientasi Maternal Death Notification (MDN)	20	Regional	1,549,655,511	8.00	Regional	#REF!	4	Regional	0.00	4	Regional	117,654,000.00	Kab/Kota		###	Kab/Kota	###	Rp	-						4	Regional	0.00	100.00	0.00	8	Regional	0	40.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
18.5		Penguatan kesehatan reproduksi catin / Lapas Dewasa /	terlaksananya penguatan kesehatan reproduksi catin /	20		1	0.00	0%	#REF!	4			4		412,800,000.00			###	Kab/Kota	###	Rp	-						4	Regional	0.00	100.00	0.00	8	Regional	0	40	0	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
18.6		koordinasi penguatan penggunaan buku KIA bagi kader	terlaksananya koordinasi penguatan penggunaan buku KIA	75	Kab/Kota	1,613,857,511	8.00	Regional	#REF!	15	Kab/Kota	0.00	15	Kab/Kota	122,250,000.00	Kab/Kota		###	Kab/Kota	###	Rp	-						15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	30	Kab/Kota	0	40.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
																												Rata-rata Capaian Kinerja (%)			50.00	-				20.00	-		
																												Peringkat Kinerja			tinggi	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
19		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat	90%		268,455,041,355	1	##########	43,663,118,233.00	1		1,455,995,000.00			45,728,944,737.00			###		###	Rp	-						-	0.00		0.00		-	1,455,995,000	0.63	0.60	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
19.1		Penambahan daya tahan tubuh laboran	Adanya penambahan daya tahan tubuh laboran	1.00	Tahun	123,286,000.00	1	Tahun	74,440,000.00				1	Tahun	74,903,100.00													1	Tahun	0.00	100	0.00	1.00	Tahun	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
19.3		Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	terlaksananya monitoring, Evaluasi dan pelaporan	15	Kab/Kota	64,885,000.00	15.00	Orang	64,306,700.00				15	Kab/Kota	64,885,000.00													15	Kab/Kota	0.00	100	0.00	15.00	Orang	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
19.6		Pertemuan Validasi data RS dan SIRS	Adanya data dari setiap RS yang ada di Kab/Kota	270	Orang	22,644,000.00	2.00	Orang	14,160,800.00	1	Tahun	0.00	1	Orang	14,160,800.00													1	Orang	0.00	100	0.00	2.00	Orang	-	0.74	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
19.7		Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	5	Tahun	4,231,263,750.00	2.00	Tahun	2,720,366,320.00	1	Tahun	0.00	1		3,844,013,750.00					####								1	Tahun	14,160,800.00	100	0.37	2.00	Tahun	14,160,800	40.00	0.33	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
19.8		Akreditasi rumah sakit/ Laboratorium kesehatan	Terlaksananya akreditasi rumah sakit/ Laboratorium kesehatan	5	Tahun	758,662,760.00	2.00	Tahun	177,838,700.00	1	Tahun	0.00	1	Tahun	714,128,575.00													1	Tahun	0.00	100.00	0.00	2.00	Tahun	-	40.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
19.9		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional	Tersedianya Jaminan Kesehatan Nasional	5	Tahun	############	2.00	Tahun	39,336,001,975.00	1	Tahun	0.00	1	Tahun	40,436,113,112.00													1	Tahun	0.00	100.00	0.00	2.00	Tahun	-	40.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
19.1		Pelayanan kesehatan medical centre event-event daerah,	terlaksananya pelayanan kesehatan medical centre event-	5	Tahun	248,686,000.00	2.00	Tahun	51,198,200.00	1	Tahun	0.00	1	Tahun	58,026,200.00													1	Tahun	0.00	100.00	0.00	2.00	Tahun	-	40.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
19.11		Pengadaan alat/bahan ketrampilan pasien jiwa	Tersedianya alat/bahan ketrampilan pasien jiwa	5	Tahun	60,000,000.00	2.00	Tahun	59,948,738.00	1	Tahun	0.00	1	Tahun	60,000,000.00													1	Tahun	0.00	100.00	0.00	2.00	Tahun	-	40.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
19.12		Home visit dan pemulangan pasien jiwa	Terlaksananya home visit dan pemulangan pasien jiwa	5	Tahun	113,475,000.00	2.00	Tahun	113,367,600.00	1	Tahun	0.00	1	Tahun	113,475,000.00						Rp	-						1	Tahun	0.00	100.00	0.00	2.00	Tahun	-	40.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
19.12		Fasilitasi pelayanan kesehatan di DTPK (Daerah Terpencil,	Terlaksananya pelayanan kesehatan bergerak bagi	50	Desa	650,000,000.00	15.00	Desa	609,117,400.00	10	Desa	476,500,000.00	10	Desa	132,617,400.00	Desa		###										5	Desa	0.00	50.00	0.00	15.00	Desa	476,500,000	30.00	73.31	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
19.13		Pelayanan Kesehatan, Pengobatan Gratis Bagi	Masyarakat mendapat Pelayanan dan Pengobatan Gratis oleh tim	150	Desa	442,371,800.00	2.00	Tahun	442,371,800.00	30	Desa	225,750,000.00	30	Desa	216,621,800.00	Desa		###										15	Desa	0.00	50.00	0.00	45.00	Desa	225,750,000	30.00	51.03	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
																												Rata-rata Capaian Kinerja (%)			90.91	0.03				45.52	11.33		
																												Peringkat Kinerja			Tinggi	sangat rendah				rendah	Sangat rendah		
20	TERWUJUDNYA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG SESUAI SPM KESEHATAN	Program Kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan	5		-	-	##########	14,061,806,602	-		-			15,148,906,240.00			###		###								-	0.00								Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
20.1		Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Meningkatnya kemitraan kualitas dokter dan paramedis	5	Tahun	5,676,202,900.00	3	Tahun	5,676,202,900	-		-	1	Tahun	5,889,000,000.00													1	Tahun	0.00	100.00	0.00	3.00	Tahun	-	60	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
20.2		Kemitraan pengobatan bagi Pasien kurang mampu dan	pengobatan bagi Pasien kurang mampu dan miskin	5	Tahun	8,353,263,002.00	3	Tahun	8,353,263,002				1	Tahun	8,868,560,640.00													1	Tahun	0.00	100	0.00	3.00	Tahun	-	60	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		Pelatihan Petugas JKN	Pelatihan Petugas JKN	5	Tahun	32,340,700.00	3	Tahun	32,340,700	-		-	1	Tahun	391,345,600.00												-	1	Tahun	0.00	100.00	0.00	3.00	Tahun	-	60	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
																												Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00	-				60.00	-		
																												Peringkat Kinerja			Tinggi	Tinggi				Tinggi	Tinggi		
21	TERSEDIANYA SDM KESEHATAN/ TENAGA MEDIS YANG BERKOMPETENSI DAN	Program Kesehatan Haji	Presentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji	15 Kab/Kota		267,476,349	1		#REF!	1		23,124,000.00			0.00			###		###	Rp	-				0.00		-	0.00					23,124,000	20.00	20.15	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		Surveilans terhadap K3JH di Puskesmas	Surveilans terhadap K3JH di Puskesmas	15		30,000,000	0.90	Kab/Kota	#REF!	15	Kab/Kota	13,124,000.00	15	Kab/Kota	0.00	0	Kab/Kota	###		###	Rp	-				-		-	0.00	0.00	#DIV/0!	0.90	Kab/Kota	13,124,000	6	44%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		Evaluasi Kesehatan Haji bidang Kesehatan Diembarkasi Haji	Evaluasi Kesehatan Haji bidang Kesehatan Diembarkasi Haji	3		25,000,000	0.00		#REF!	1	Orang	10,000,000.00	1	Orang	0.00	0	Orang	###		###	Rp	-				-		Orang	0.00	0.00	#DIV/0!	1.00	Orang	10,000,000	33	40%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
																												Rata-rata Capaian Kinerja (%)			-	-				19.67	0.42		
																												Peringkat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
																													-										
22	TERSEDIANYA SDM KESEHATAN/ TENAGA MEDIS YANG BERKOMPETENSI DAN PROFESIONAL DAN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokter,perawat,bidan		2,669,459,465			0.00			630,001,746.00			99,510,000.00													-	0.00	#DIV/0!	0.00			630,001,746	5.00	22.51	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
22.1		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Tenaga kesehatan	35	Kab/Kota	289,943,129	-	0.00	#REF!	15	Kab/Kota	0.00	15	Kab/Kota	99,510,000.00													15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	30.00	Kab/Kota	-	86	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya		15	Kab/Kota								15	Kab/Kota	334,430,240.00			0.00		Rp																	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		peningkatan kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia		15	Kab/Kota	Rp 403,360,477					Kab/Kota	0.00	15	Kab/Kota	Rp 334,430,239			0.00		Rp			15	Kab/Kota	288,552,600	15	Kab/Kota	288,552,600.00	100.00	86.28	15	Kab/Kota	288,552,600	100.00	72%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		15	Kab/Kota	Rp 154,613,094					Kab/Kota	0.00	15	Kab/Kota	Rp 1			0.00		Rp			15	Kab/Kota		15	Kab/Kota	1.00	100.00	100.00	15	Kab/Kota	1	100.00	0%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
																												Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00	62.09				95.24	1		
																												Peringkat Kinerja			Tinggi	Sangat Rendah				Tinggi	Sangat Rendah		
																													-										
23	TERWUJUDNYA MASYARAKAT	Program Surveilans dan Imunisasi		85%		4,482,550,891	15	Kab/Kota	122,502,800.00	15	Kab/Kota	516,160,000.00	15	Kab/Kota	11,667,401,000			-										-	0.00	0.00	0.00		-	516,160,000	40.00	9.51	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2020								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provisi yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Kawab	Lokasi / Kel
																		I		II		III		IV														
100%	200%	300%	400%	K			Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	1600%	1700%
				500%				600%			600%			700%			800%		900%		1000%		1100%			12 = 8+9+10+11			13=12/7x100%		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100%			
23.1	SULAWESI UTARA YANG MEMILIKI USIA HARAPAN HIDUP YANG PANJANG	Pelayanan Imunisasii bagi balita dan anak sekolah	Terlaksananya Imunisasi bagi Balita dan Anak Sekolah	2250	Orang	0	3,591,132,791	900	Orang	20,661,200.00	##	Orang	0.00	450	Orang	78,840,000.00										450	Orang	0.00	100.00	0.00	900	Orang	-	40.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
23.2		Pelaksanaan Verifikasi sinyal kewaspadaan dini dan PIE	Tertanganinya KLB <24 jam	75	Kab/Kota	0	148,367,500	30	Kab/Kota	81,180,400.00	15	Kab/Kota	58,460,000.00	15	Kab/Kota	40,300,000.00										15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	30	Kab/Kota	58,460,000	40.00	39.40	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
23.3		Penyelidikan Epidemiologi (PE) KLB dan wabah serta PIE	Tertanganinya KLB <24 jam	75	Kab/Kota	0	20,623,193,769	900	Orang	20,661,200.00	0		0.00	15	Kab/Kota	11,548,261,000.00										15	Kab/Kota	0.00	100	0.00	15	Kab/Kota	-	20.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
																										Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100	-				33	13.13		
																										Peringkat Kinerja			Tinggi	Sangat Rendah				Rendah	Sangat Rendah		
24	TERWUJUDNYA AKSES TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SESUAI SPM KESEHATAN	Program JKN	Jumlah Kab/Kota yang mencapai Universal Coverage	15	Kab/Kota		1,251,841,342			24,820,146,000.00			24,820,146,000.00			18,360,126,195.00											-	0.00	0.00	0.00			24,820,146,000		1983%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
24.1		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pelaksanaan program sesuai perencanaan	75	Kab/Kota	0	522,484,671	30	0	315,543,700.00	15	Kab/Kota	145,050,000.00	15	Kab/Kota	175,650,000.00										15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	30		145,050,000	40.00	27.76	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
24.2		Advokasi menuju Universal Health Coverage	Advokasi menuju Universal Health Coverage	45			65,000,000,000	30	0	42,679,364,300.00	15	Kab/Kota	24,536,267,000.00	15	Kab/Kota	18,144,476,395.00										15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	30		24,536,267,000	66.67	37.75	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
24.3		Penanganan sengketa JKN	terlaksananya Penanganan sengketa JKN	45	Kab/Kota	0	53,000,000	30	0	315,543,700.00			0.00	15	Kab/Kota	39,999,800.00										15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	15		-	33.33	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
																										Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00	-				46.67	21.84		
																										Peringkat Kinerja			Tinggi	Tinggi				Rendah	Rendah		
25	TERSEDIANYA SDM KESEHATAN/ TENAGA MEDIS YANG	Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga	Jumlah Kabupaten Kota yang melaksanakan Program PIS-PK	15	Kab/Kota		781,339,438			297,305,200.00			184,969,000.00			206,700,000.00											-	0.00	0.00	0.00			184,969,000		24%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
25.1		Peningkatan kapasitas Petugas Penanggungjawab Program	Adanya penanggungjawab untuk pendataan Keluarga Sehat di	45	Kab/Kota	0	475,719,438	30	Kab/Kota	297,305,200.00	15	Kab/Kota	108,564,000.00	15	Kab/Kota	206,700,000.00										15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	30	Kab/Kota	108,564,000	66.67	22.82	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
																										Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00	-				66.67	22.82		
																										Peringkat Kinerja			Tinggi	Tinggi				Tinggi	Tinggi		
26	TERWUJUDNYA AKSES TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SESUAI SPM KESEHATAN	PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	KETERSEDIAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	100%			1,028,800,779	-		65,113,600.00	-		352,000,000.00	3		240,300,000.00			####							-	0.00	0.00	0.00	0	Kab/Kota	-	-	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
26.1		Sosialisasi penyakit akibat kerja (PAK) (DAK)	Terlaksananya sosialisasi penyakit akibat kerja (PAK) (DAK)	45	Kab/Kota	0	120,150,000.00	30	Kab/Kota	65,113,600.00	-		0.00	15	Kab/Kota	120,150,000.00										15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	30	Kab/Kota	-	66.67	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
26.2		Penguatan Pos UKK, GP2SP, K3, Perkantoran, K3 Pasyanlkes (DAK)	Terlaksananya penguatan Pos UKK, GP2SP, K3, Perkantoran, K3	45	Kab/Kota	0	120,150,000.00	-	Kab/Kota	0.00	-	0.00%	0.00	15	Kab/Kota	120,150,000.00										15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	30	Kab/Kota	-	66.67	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
																										Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00	-				66.67	-		
																										Peringkat Kinerja			Tinggi	Sangat Rendah				Tinggi	Sangat Rendah		
27	TERWUJUDNYA AKSES TERHADAP KUALITAS PELAYANAN	Program Pelayanan Umum Kesehatan Poliklinik	Jumlah pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di poliklinik	0			681,268,208			1,407,704,549.00			202,161,000.00			1,350,346,600.00											-	0.00	0.00	0.00					0.65	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
27.1		Pelayanan Umum Kesehatan Poliklinik	Terlaksananya Pelayanan kesehatan pada keadaan darurat	45	Kab/Kota	Rp	1,407,704,549	24	Kab/Kota	1,407,704,549.00	12	Bulan	202,161,000.00	12	Bulan	1,350,346,600.00										12	Bulan	0.00	100.00	0.00	24	Kab/Kota	202,161,000	53.33	14.36	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
																										Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00	-				53.33	14.36		
																										Peringkat Kinerja			Tinggi	Tinggi				Rendah	Tinggi		
28		Program Dukungan Manajement	Jumlah pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di poliklinik	0			681,268,208			1,138,909,402.00			202,161,000.00			1,175,836,600.00			####			###					-	0.00	0.00	0.00					0.65	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
28.1		Mengikuti Pertemuan Pusat atau Konsultasi DAK Program Kesmas	Terlaksananya Pelayanan kesehatan pada keadaan darurat	60	Bulan	Rp	681,268,208	12	Bulan	320,781,742.00	12	Bulan	202,161,000.00	12	Bulan	60,200,000.00	3	bulan	###		Bul	###	Rp			12	Bulan	0.00	100.00	0.00	12	Bulan	202,161,000	20.00	29.67	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
28.2		Peminaan, Supervisi teknis Program dan Pemanfaatan Dana		2	Kegiatan	Rp	129,736,600	2	Kab/Kota	129,736,600.00	1	Kegiatan		1	kegiatan	129,736,600.00										1	kegiatan	0.00	100.00	0.00	2	Kab/Kota	-	100.00	-		
28.3		Pertemuan Koordinasi Perencanaan Program dan		2	Kegiatan	Rp	315,215,560	2	Kab/Kota	315,215,560.00	1	Kegiatan		1	kegiat an	384,600,000.00										1	kegiat an	0.00	100.00	0.00	2	Kab/Kota	-	100.00	-		
28.4		Pertemuan Koordinasi Teknis Program (DAK)		2	Kegiatan	Rp	95,223,500	2	Kab/Kota	95,223,500.00	1	Kegiatan		1	kegiat an	256,700,000.00										1	kegiat an	0.00	100.00	0.00	2	Kab/Kota	-	100.00	-		
28.5		Pertemuan Pemantauan Evaluasi Program dan Pemanfaatan Dana		2	Kegiatan	Rp	277,952,000	2	Kab/Kota	277,952,000.00	1	Kegiatan		1	kegiat an	344,600,000.00										1	kegiat an	0.00	100.00	0.00	2	Kab/Kota	-	100.00	-		
																										Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00	-				84.00	5.93		
																										Peringkat Kinerja			Tinggi					Tinggi	Sangat Rendah		
29		Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah	Jumlah pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di poliklinik	0			681,268,208			325,331,217,883.00			202,161,000.00			428,661,226,425.00			####			###					-	0.00	0.00	0.00					0.65	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
29.1		Rehabilitasi bangunan rumah sakit	Terlaksananya Pelayanan kesehatan pada keadaan darurat	60	Bulan	Rp	681,268,208	24	Kab/Kota	593,634,557.00	12	Bulan	202,161,000.00	12	Bulan	396,247,400.00										12	Bulan	0.00	100.00	0.00	24	Kab/Kota	202,161,000	40.00	29.67	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
29.2		Pengadaan Obat-obatan rumah sakit		24	Bulan		2,458,560,683	24	Kab/Kota	2,458,560,683.00	12	Bulan		12	Bulan	2,530,500,000.00										12	Bulan	0.00	100.00	0.00	24	Kab/Kota	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
29.3		Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit (tapur,ruang,		24	Bulan		229,913,100	24	Kab/Kota	229,913,100.00	12	Bulan		12	Bulan	260,690,000.00										12	Bulan	0.00	100.00	0.00	24	Kab/Kota	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
29.4		Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit		24	Bulan		2,989,997,771	24	Kab/Kota	2,989,997,771.00	12	Bulan		12	Bulan	3,038,003,000.00										12	Bulan	0.00	100.00	0.00	24	Kab/Kota	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
29.5		Pembangunan Rumah Sakit		24	Bulan		274,904,888,830	24	Kab/Kota	274,904,888,830.00	12	Bulan		12	Bulan	373,844,694,777.00										12	Bulan	0.00	100.00	0.00	24	Kab/Kota	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
29.6		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit		24	Bulan		6,097,224,348	24	Kab/Kota	6,097,224,348.00	12	Bulan		12	Bulan	6,968,099,153.00										12	Bulan	0.00	100.00	0.00	24	Kab/Kota	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
29.7		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)		24	Bulan		34,683,441,594	24	Kab/Kota	34,683,441,594.00	12	Bulan		12	Bulan	34,690,873,027.00										12	Bulan	0.00	100.00	0.00	24	Kab/Kota	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
29.8		Pengadaan Prasarana Rumah Sakit (DAK)		24	Bulan		3,356,305,000	24	Kab/Kota	3,356,305,000.00	12	Bulan		12	Bulan	3,500,000,000.00										12	Bulan	0.00	100.00	0.00	24	Kab/Kota	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
29.9		Penyelenggaran Rapat Koordinasi (penugasan)		2	Kegiatan		17,252,000	2	Kab/Kota	17,252,000.00	1	Kegiatan		1	Kegiat an	27,690,493.00										1	Kegiat an	0.00	100.00	0.00	2	Kab/Kota	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
29.11		Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Batuan Pemerintah)		24	Bulan		3404428575	0	0	-	12	Bulan		12	Bulan	3,404,428,575.00										12	Bulan	0.00	100.00	0.00	24	Kab/Kota	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan					80,007,896,539.00					Bulan				144,700,115,238.00																				Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		12	Bulan	Rp	1					Bulan		12	Bulan	Rp 39,181,993,905			Rp			Rp			12	Bulan	0.00	100.00	0	12	Bulan	-	100.00	0%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		12	Bulan	Rp	21,719,713,261					Bulan		12	Bulan	Rp 21,719,713,261			Rp		Rp	-	12	Bulan		12	Bulan	0.00	100.00	0.00	12	Bulan	-	100.00	0%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		12	Bulan	Rp	88,000,000					Bulan		12	Bulan	Rp 88,000,000			Rp		Rp	-	12	Bulan	87,013,000	12	Bulan	87,013,000.00	100.00	98.88	12	Bulan	87,013,000	100.00	99%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan , Kesehatan		12	Bulan	Rp	31,565,130,092					Bulan		12	Bulan	Rp 29,319,320,797			Rp		Rp	-	12	Bulan	22,396,682,594	12	Bulan	22,396,682,594.00	100.00	76.39	12	Bulan	22,396,682,594	100.00	71%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya		12	Bulan	Rp	2,981,901,800									Rp 2,981,901,800			Rp		Rp	-	12	Bulan	247,827,200	12	Bulan	247,827,200.00		8.31			247,827,200		8%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Pengadaan Obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya		12	Bulan	Rp	8,465,225,044									Rp 36,378,401,159			Rp		Rp	-	12	Bulan	35,114,534,453	12	Bulan	35,114,534,453.00		96.53			35,114,534,453		415%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Pengadaan dan pemeliharaan alat-alat kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan		12	Bulan	Rp	1,415,790,853									Rp 1,258,648,828			Rp		Rp	-	12	Bulan	1,157,123,345	12	Bulan	1,157,123,345.00		91.93			1,157,123,345		82%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan		12	Bulan	Rp	10,995,958,675									Rp 10,995,958,675			Rp		Rp	-	12	Bulan	10,385,011,348	12	Bulan	10,385,011,348.00		94.44			10,385,011,348		94%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Pemeliharaan sarana fasilitas layanan kesehatan		12	Bulan	Rp	964,344,000									Rp 964,344,000			Rp		Rp	-	12	Bulan	948,437,164	12	Bulan	948,437,164.00		98.35			948,437,164		98%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan		12	Bulan	Rp	1,811,832,813					Bulan		12	Bulan	Rp 1,811,832,813			Rp		Rp	-	12	Bulan	1,811,475,795	12	Bulan	1,811,475,795.00	100.00	99.98	12	Bulan	1,811,475,795	100.00	100%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
																										Rata-rata Capaian Kinerja (%)			62.50	27.70				60.00	1.64		
																										Peringkat Kinerja			Tinggi					Tinggi	Sangat Rendah		
30		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana rumah sakit/	Jumlah pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di poliklinik	0			681,268,208			1,435,145,732.00			202,161,000.00			1,557,489,500.00											-	0.00	0.00	0.00					0.65	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
30.1		Pemeliharaan rutin/ berkala alat alat kesehatan rumah sakit	Terlaksananya Pelayanan kesehatan pada keadaan darurat	60	Bulan	Rp	851,783,000	48	Bulan	851,783,000	12	Bulan	202,161,000.00	12	Bulan	771,554,000.00										12	Bulan	0.00	100.00	0.00	48	Bulan	202,161,000	80.00	23.73	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
30.2		Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan air limbah		24	Bulan		240,966,334	24	Bulan	240,966,334	12	Bulan		12	Bulan	241,000,000.00										12	Bulan	0.00	100.00	0.00	24	Bulan	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2020											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Kawab	Lokasi / Kel
																I			II			III			IV															
100%	200%	300%	400%			500%			600%			600%			700%			800%			900%			1000%			1100%			12 = 8+9+10+11			13=12/7x100%		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100%		1600%	1700%
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.			
30.3		Pemeliharaan rutin berkala mobil ambulance / jenazah		24	Bulan	342,396,398	24	Bulan	342,396,398	12	Bulan		12	Bulan	544,935,500.00													12	Bulan	0.00	100.00	0.00	24	Bulan	-	100.00	-			Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
																													Rata-rata Capaian Kinerja (%)	50.00	-					46.67	7.91		
																													Peringkat Kinerja	Tinggi	Rendah					Tinggi	Rendah		
31		**Program Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	**Jumlah pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di poliklinik**	**0**		**681,268,208**			**33,514,740,203.00**			**202,161,000.00**			**43,906,282,000.00**			**####**		**###**	**Rp**	-							-	**0.00**	**0.00**	**0.00**					**0.65**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan**
31.1		Peningkatan kesehatan masyarakat	Terlaksanannya Pelayanan kesehatan pada keadaan darurat	60	Bulan	Rp 1,104,570,952	48	Bulan	1,104,570,952.00	12	Bulan	202,161,000.00	12	Bulan	906,282,000.00													12	Bulan	0.00	100.00	0.00	48	Bulan	202,161,000	80.00	18.30	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
31.2		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional		24	Bulan	32,410,169,251	24	Bulan	32,410,169,251.00	12	Bulan		12	Bulan	43,000,000,000.00													12	Bulan	0.00	100.00	0.00	24	Bulan	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
																													Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100.00	-					90.00	9.15		
																													Peringkat Kinerja	Tinggi	Sangat Rendah					Tinggi	Sangat Rendah		
32		**Program Peningkatan Kualitas Laboratorium**	**Jumlah pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di poliklinik**	**0**		**681,268,208**			**267,009,800.00**			**202,161,000.00**			**64,885,000.00**			**####**		**###**	**Rp**	-							-	**0.00**	**0.00**	**0.00**					**0.65**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan**
32.1		Monitoring , Evaluasi dan pelaporan	Terlaksanannya Pelayanan kesehatan pada keadaan darurat	60	Bulan	Rp 681,268,208	24	Kab/Kota	267,009,800.00	12	Bulan	202,161,000.00	12	Bulan	64,885,000.00	3												12	Bulan	**0.00**	100.00	0.00	24	Kab/Kota	202,161,000	40.00	29.67	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara													**60,008,625.00**																						**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan**
		Pengeloaan Sistem Informasi Kesehatan		12		60,008,625.00							12	Bulan	60,008,625.00	-		**###**		**###**	Rp	-						12	Bulan	**58,968,500.00**	100	98.27	12	Kab/Kota	58,968,500	100.00	98	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
																													Rata-rata Capaian Kinerja (%)	50.00	49.13					50.00	49.13		
																													Peringkat Kinerja										
		Penyediaan Layanan kesenatan untuk UKP Rujukan, UKM dan				##############									**180,967,655,033.00**			**####**		**###**	##############								**95,527,729,010.00**		**52.79**	-				**0%**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan**
		olaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		15	Kab/Kota	3,315,022,682.00					Desa	111,089,600	15	Kab/Kot	2,865,151,780.00													15	Kab/Kot	2,806,161,801	15	Kab/Kota	2,806,161,801.00	100.00	97.94	15	Kab/Kota	2,917,251,401	100.00	88.00	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		an Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		15	Kab/Kota	129,381,008.00							15	Kab/Kot	174,581,008.00													15	Kab/Kot	173,585,300	15	Kab/Kota	173,585,300.00	100.00	99.43	15	Kab/Kota	173,585,300	100.00	134.17	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		gelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		15	Kab/Kota	##############							15	Kab/Kot	136,946,439,499.00													15	Kab/Kot	201,269,715,622	15	Kab/Kota	201,269,715,622.00	100.00	146.97	15	Kab/Kota	201,269,715,622	100.00	137.58	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		ngelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		15	Kab/Kota	##############							15	Kab/Kot	9,425,416,993.00													15	Kab/Kot	9,377,514,369	15	Kab/Kota	9,377,514,369.00	100.00	99.49	15	Kab/Kota	9,377,514,369	100.00	81.09	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		olaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		15	Kab/Kota	480,050,000.00					Kab/Kota	-	15	Kab/Kot	111,089,600.00													15	Kab/Kot	111,089,600	15	Kab/Kota	111,089,600.00	100.00	100.00	15	Kab/Kota	111,089,600	100.00	23.14	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		olaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		15	Kab/Kota	1,308,281,364.00							15	Kab/Kot	311,464,000.00													15	Kab/Kot	300,349,400	15	Kab/Kota	300,349,400.00	100.00	96.43	15	Kab/Kota	300,349,400	100.00	22.96	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		an Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga		15	Kab/Kota	736,140,829.00					0.00%	-	15	Kab/Kot	593,538,822.00													#	Tahun	584,210,196	15	Kab/Kota	584,210,196.00	100.00	98.43	15	Kab/Kota	584,210,196	100.00	79.36	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		olaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		15	Kab/Kota	1,707,227,136.00							15	Kab/Kot	1,735,691,724.00													#	Tahun	1,627,867,100	15	Kab/Kota	1,627,867,100.00	100.00	93.79	15	Kab/Kota	1,627,867,100	100.00	95.35	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		gelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		15	Kab/Kota	3,133,941,600.00							15	Kab/Kot	3,289,757,532.00													#	Tahun	3,133,941,600	15	Kab/Kota	3,133,941,600.00	100.00	95.26	15	Kab/Kota	3,133,941,600	100.00	100.00	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		anan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		15	Kab/Kota	##############					Kab/Kota		15	Kab/Kot	22,004,985,136.00													#	Tahun	21,740,303,619	15	Kab/Kota	21,740,303,619.00	100.00	98.80	15	Kab/Kota	21,740,303,619	100.00	100.00	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan		15	Kab/Kota	##############						-	15	kab/kot	38,551,460,325.00													#	Tahun	24,811,779,418	15	Kab/Kota	24,811,779,418.00	100.00	64.36	15	Kab/Kota	24,811,779,418	100.00	100.00	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		ngelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		1	Tahun	17,980,000.00					Orang	10,000,000	1	Tahun	45,002,998.00													#	Tahun	7,980,000	1	Tahun	7,980,000.00	100.00	17.73	1	Bulan	17,980,000	100.00	100.00	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		iian Kelayakan Puskesmas Untuk Registrasi Puskesmas		1	Keg	0 1,231,534,402.00	-	0.00%					175	PKM	1,244,306,553,402.00													#	pkm	1,231,534,402	1	Tahun	1,231,534,402.00	0.57	0.10	1	Bulan	1,231,534,402	100.00	100.00	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		iian Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1	Tahun	4,268,182,030.00					Anak		1	Tahun	4,076,862,800.00			**###**		**###**	Rp	-					#	Tahun	3,971,974,800	1	Tahun	3,971,974,800.00	100.00	97.43	1	Bulan	3,971,974,800	100.00	93.06	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
																													Rata-rata Capaian Kinerja (%)	92.90	86.15					100.00	89.62		
																													Peringkat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		an sistem informasi kesehatan secara terintegrasi		**1**	**Keg**	**60,008,625.00**									**60,008,625.00**			**####**		**###**	**Rp 58,968,500**		#	**Tahun**			**58,968,500.00**		**98.27**			**58,968,500**		**98%**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan**
		ngelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1	Keg	60,008,625.00							1	Tahun	60,008,625.00			**###**		**###**	Rp 58,968,500		#	Tahun	-	1	Tahun	**58,968,500.00**	100	98.27	1	Bulan	58,968,500	100	98%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
																													Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100.00	98.27					100.00	0.98		
																													Peringkat Kinerja										
		Perencanaa kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk				##############									17,853,652,946.00			**###**		**###**	##############								**11,261,948,700.00**		63.08			11,261,948,700		63%	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan**
		n kebutuhan sumber daya manusia kesehatan		12	bulan	##############							12	bulan	17,880,888,426.00													12	bulan	16,440,244,824	12	bulan	**16,440,244,824.00**	100.00	91.94	12	Bulan	16,440,244,824	100	92.68	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		an pemerataan sumber daya manusia kesehatan		12	Bulan	115,664,920.00							12	Bulan	115,664,920.00													12	Bulan	114,392,400	12	Bulan	**114,392,400.00**	100	98.90	12	Bulan	114,392,400	100.00	98.90	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
																													Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100.00	95.42					100.00	95.79		
																													Peringkat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
														Anggara	**520,373,042,182**						**Realisas**	##############																
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																																						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																																						
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																																						

FORMULIR E.55

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2021

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi / Ket.
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%		16	17
					Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**73,686,496,731**		**10,098,520,844**		**19,229,947,074**		**18,399,856,565.00**		**20,702,415,660**		**68,430,740,143**		**92.87**							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				6,460,065,626		344,401,794		2,041,446,479		1,558,795,966.00		2,313,622,065		6,268,256,304		97.03							
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				372,893,124		-		51,731,100		93,745,540.00		192,844,516		338,325,156		90.73							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				995,958,858		30,018,700		293,742,191		342,958,034.00		308,402,262		975,121,187		97.91							
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4,610,310,132		292,788,385		1,379,173,311		1,060,521,592.00		1,744,640,387		4,477,123,675		97.11							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				480,903,512		21,594,709		316,798,877		71,556,800.00		67,734,900		477,686,286		99.33							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				30,825,501,531		6,208,539,561		9,558,923,948		5,722,252,903.00		6,375,176,081		27,874,892,493		90.43							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				28,091,638,262		6,012,313,659		8,762,981,986		5,123,915,927.00		5,492,284,252		25,390,505,824		90.38							
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD				2,633,166,287		183,540,552		788,084,591		582,419,426.00		842,554,814		2,396,599,383		91.02							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				28,784,050		9,494,350		5,283,450				13,702,465		28,480,265		98.94							
		SKPD				64,546,105		3,191,000		12,563,921		16,917,550.00		26,634,550		59,307,021		91.88							
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				7,366,827																			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1,111,096,677		67,283,635		264,510,910		169,743,484.00		548,425,001		1,049,963,030		94.50							
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1,024,548,285		52,677,135		249,161,044		160,742,285.00		524,236,975		986,817,439		96.32							
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				39,982,074		10,248,500		5,251,850		4,416,200.00		18,549,650		38,466,200		96.21							
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				46,566,318		4,358,000		10,098,016		4,584,999.00		5,638,376		24,679,391		53.00							
																Peringkat Kinerja		**Sangat Tinggi**						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2,782,785,883		123,581,074		735,987,124		538,185,590.00		1,153,138,914		2,550,892,758		91.67							
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				311,745,000				44,950,182		22,885,000.00		243,516,240		311,351,422		99.87							
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2,451,040,883		123,581,074		691,036,992		515,300,590.00		909,622,674		2,239,541,336		91.37							
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi																							
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20,000,000										-		-							
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6,772,008,287		-		58,724,900		4,513,767,912.00		1,810,851,985		6,383,344,797		94.26							
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5,221,853,208						3,500,518,412.00		1,448,502,000		4,949,020,412		94.78							
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1,482,765,078				58,724,900		1,013,249,500.00		362,349,985		1,434,324,385		96.73							
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan				67,390,001																			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20,449,240,618		3,277,114,244		6,120,208,853		4,649,230,228.00		6,100,274,789		20,146,828,114		98.52							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				842,413,534		26,895,687		237,446,804		223,775,019.00		214,357,576		702,475,086		83.39							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				19,605,375,084		3,250,218,557		5,881,312,049		4,425,455,209.00		5,885,917,213		19,442,903,028		99.17							
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1,452,000				1,450,000						1,450,000		99.86							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5,097,904,960		77,600,536		339,893,810		1,218,576,776.00		2,383,863,425		4,019,934,547		78.85							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2,666,529,452		1,632,966		37,716,578		966,112,528.00		1,277,323,973		2,282,786,045		85.61							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				663,035,126		16,218,001		274,705,593		103,262,962.00		263,772,626		657,959,182		99.23							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1,511,207,032		59,749,569		6,494,639		142,961,286.00		649,742,696		858,948,190		56.84							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				243,306,350				16,977,000		6,240,000.00		193,024,130		216,241,130		88.88							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4,400,000				4,000,000						4,000,000		90.91							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9,427,000																			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				187,893,149		-		100,251,000		19,313,700.00		17,063,400		136,628,100		72.72							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3,691,351										-		-							
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				44,427,942						15,524,200.00		5,435,700		21,009,900		47.29							
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				29,426,056				1,906,000		1,398,200.00		2,108,700		5,412,900		18.39							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				110,347,800				98,345,000		2,341,300.00		9,519,000		110,205,300		99.87							
2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				**632,776,339,842**		**88,288,075,120**		**128,393,415,205**		**35,337,342,940.00**		**218,739,716,493**		**470,758,549,758**		**74.40**							
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi				632,776,339,842		88,288,075,120		128,393,415,205		35,337,342,940.00		218,739,716,493		470,758,549,758		74.40							
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				2,327,246,347				164,350,500		185,934,420.00		1,606,546,930		1,956,831,850		84.08							
		Survei Kondisi Jalan/Jembatan				376,836,226		5,720,000		12,630,908		102,467,888.00		240,280,000		361,098,806		95.82							
		Pembangunan Jalan				108,986,355,132		20,048,281,811		12,023,826,140		7,631,698,221.00		47,215,109,925		86,918,908,097		79.75							
		Rekonstruksi Jalan				456,586,713,723		60,399,849,985		102,735,788,316		24,419,421,446.00		143,778,499,609		331,333,559,356		72.57							
		Rehabilitasi Jalan				7,494,890,109		5,907,714,556		1,000,214,033						6,907,928,589		92.17							
		Pembangunan Jembatan				52,542,638,595				10,224,572,192		2,724,566,205.00		25,887,422,629		38,836,561,026		73.91							
		Rehabilitasi Jembatan				1,517,746,985		1,517,746,983								1,517,746,983		100.00							
		Pemeliharaan Rutin Jalan				2,886,047,731		399,161,785		2,220,479,766		248,655,000.00				2,868,297,551		99.38							
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				57,684,994		9,600,000		11,553,350		24,606,750.00		11,857,400		57,617,500		99.88							
																Peringkat Kinerja		**Sedang**						
3		**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**				**47,983,652,017**		**5,791,652,204**		**3,433,040,181**		**9,515,649,083.00**		**19,164,584,156**		**37,904,925,624**		**79.00**							
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4,649,368,357		1,921,559,368		1,299,520,989		210,467,434.00		1,177,072,566		4,608,620,357		99.12							
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Penoendali Banlir, Lahar. Drainase Utama Perkotaan dan Penoaman Pantai				700,000,000								685,982,000		685,982,000		98.00							
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				3,949,368,357		1,921,559,368		1,299,520,989		210,467,434.00		491,090,566		3,922,638,357		99.32							
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				43,334,283,660		3,870,092,836		2,133,519,192		9,305,181,649.00		17,987,511,590		33,296,305,267		76.84							
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irioasi dan Rawa				1,421,256,899				127,959,000		61,617,000.00		128,777,815		318,353,815		22.40							
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				2,899,087,191		2,875,157,836								2,875,157,836		99.17							
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				36,026,015,129		994,935,000		1,945,431,192		6,801,541,933.00		17,457,251,475		27,199,159,600		75.50							
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				2,400,000,000						2,392,547,716.00				2,392,547,716		99.69							
		Pengelolaan dan Pengawasan Abkasi Air Irigasi				587,924,441				60,129,000		49,475,000.00		401,482,300		511,086,300		86.93							
4		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**				**7,018,171,916**		**1,249,295,566**		**105,115,235**		**850,771,649.00**		**2,511,660,379**		**4,716,842,829**		**67.21**							
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional				6,819,842,260		1,234,795,659		18,392,000		788,987,147.00		2,511,660,379		4,553,835,185		66.77							
		Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan				6,603,816,260		1,234,795,659				742,535,147.00		2,361,117,179		4,338,447,985		65.70							
		Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota				216,026,000				18,392,000		46,452,000.00		150,543,200		215,387,200		99.70							
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				198,329,656		14,499,907		86,723,235		61,784,502.00		11,177,681		174,185,325		87.83							
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota				99,196,384		14,499,907		37,503,235		24,524,502.00		11,177,681		87,705,325		88.42							
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan				99,133,272				49,220,000		37,260,000.00				86,480,000		87.24							
5		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**				**1,225,576,900**		**-**		**7,590,000**		**174,479,064.00**		**1,021,043,821**		**1,203,112,885**		**98.17**							
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional				1,225,576,900		-		7,590,000		174,479,064.00		1,021,043,821		1,203,112,885		98.17							
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tersusat				1,225,576,900				7,590,000		174,479,064.00		1,021,043,821		1,203,112,885		98.17							
6		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**				-		-		-		-		-		-		-							
		Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan														-		-							
7		**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**				**22,700,000**		**-**		**-**		**-**		**22,396,500**		**22,396,500**		**98.66**							
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi				22,700,000		-		-		-		22,396,500		22,396,500		98.66							
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi				22,700,000								22,396,500		22,396,500		98.66							
8		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**				**87,323,571,600**		**2,156,453,103**		**9,869,317,407**		**16,548,817,425.00**		**54,702,910,737**		**83,277,498,672**		**95.37**							
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				87,323,571,600		2,156,453,103		9,869,317,407		16,548,817,425.00		54,702,910,737		83,277,498,672		95.37							
		Penataan Bangunan dan Lingkungan				87,309,051,600		2,156,453,103		9,869,317,407		16,548,817,425.00		54,702,910,737		83,277,498,672		95.38							
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan				14,520,000										-		-							
9		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**				**106,509,292**		**-**		**10,071,000**		**24,649,000.00**		**71,266,500**		**105,986,500**		**99.51**							
		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				106,509,292		-		10,071,000		24,649,000.00		71,266,500		105,986,500		99.51							
		Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi				106,509,292				10,071,000		24,649,000.00		71,266,500		105,986,500		99.51							

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi / Ket.
										I			II			III			IV													
1	2	3	4	K		Ko	K		Ko	K		Ko	K		Ko	K		Ko	K		Ko	12 = 8 + 9 + 10 + 11			13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100%		16	17
10		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**							**4,226,043,508**			-			**173,588,820**			**735,471,500.00**			**2,647,472,550**			**3,556,532,870**		**84.16**						
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi							241,622,000			-			51,521,000			31,540,000.00			131,250,000			214,311,000		88.70						
		Pelaksanaan Persetuluan Substansi. Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi							241,622,000			-			51,521,000			31,540,000.00			131,250,000			214,311,000		88.70						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang							711,269,500			-			12,812,800			10,075,000.00			571,286,100			594,173,900		83.54						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi							711,269,500			-			12,812,800			10,075,000.00			571,286,100			594,173,900		83.54						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi							1,171,804,754			-			54,596,320			167,334,500.00			744,437,000			966,367,820		82.47						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah							1,171,804,754			-			54,596,320			167,334,500.00			744,437,000			966,367,820		82.47						
		Sistem Informasi Penataan Ruang																						-								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi							2,101,347,254			-			54,658,700			526,522,000.00			1,200,499,450			1,781,680,150		84.79						
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang							2,101,347,254			-			54,658,700			526,522,000.00			1,200,499,450			1,781,680,150		84.79						
11		**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**							239,531,518																								
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi							172,177,014			-			156,855,811			-			15,150,000			172,005,811		99.90						
		Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi							172,177,014			-			156,855,811			-			15,150,000			172,005,811		99.90						
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi							67,354,504			-			12,410,000			-			54,849,500			67,259,500		99.86						
		Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi							67,354,504			-			12,410,000			-			54,849,500			67,259,500		99.86						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				:					**854,608,593,324.00**			**107,583,996,837.00**			**161,222,084,922.00**			**81,587,037,226.00**			**319,583,466,796.00**			**669,976,585,781.00**								
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA				:	**Adanya dana non APBD yaitu dana DAK dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**																												
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA				:	**Adanya keterlambatan dalam penyerapan anggaran dan**																												

15 PROGRAM

52 KEGIATAN

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN I s/d III TAHUN 2021
DINAS PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAEARAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 sampai dengan 2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2020)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2020)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
													I		II		III		IV														
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 x 100%		14 = 6÷12			15 = 14/5 x 100%		16	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp	K	Rp	K		Rp.	K	Rp		
1	**Meningkatkan kualitas SDM dari setiap ASN**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah; nilai LKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah rata-rata minimum B	INDEKS NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD DINAS PERKIMTAN RATA - RATA MINIMUM B		1,955,396,971,575	INDEKS NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD DINAS PERKIMTAN RATA - RATA MINIMUM B		1,153,962,873,912	INDEKS NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD DINAS PERKIMTAN RATA - RATA MINIMUM B		4,450,418,214	3 bulan	743,483,323		440,097,119		1,726,227,377			INDEKS NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD DINAS PERKIMTAN RATA-RATA MINIMUM B		3,703,686,147	0.25	0.83	INDEKS NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD DINAS PERKIMTAN RATA - RATA MINIMUM B		1,157,666,560,059	INDEKS NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD DINAS PERKIMTAN RATA - RATA MINIMUM B	0.59	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**627,384,438**			**192,460,400.00**			**116,127,629**		**8,002,000**		**8,000,000**		**31,905,300**		**44,441,043**			**47,907,300**		0.41					-	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja	60	bulan	365,573,000	48	bulan	89,063,000.00	12	bulan	56,076,987	3 bulan	8,002,000	3 bulan	8,000,000	3 bulan	20,007,900	3 bulan	20,066,000	12	bulan	56,075,900	**1.00**	**1.00**	60	bulan	**145,138,900**	1.00	**0.40**	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA Dinas Perkimtan	60	bulan	135,346,875	48	bulan	55,199,000.00	12	bulan	36,272,443					3 bulan	11,897,400	3 bulan	24,375,043	12	bulan	36,272,443	1.00	1.00					-	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Dinas Perkimtan	60	bulan	-	48	bulan	-	12	bulan	20,008,081							3 bulan	19,972,000	3	bulan	19,972,000.00	0.25	1.00					-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	bulan	126,664,563	48	bulan	48,198,400.00	12	bulan	3,770,118							3 bulan	3,362,500	3	bulan	3,362,500	0.25	0.89						Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terpenuhinya administrasi keuangan**	60	bulan	**165,447,063**			**63,971,648.00**			**767,280,539**		**72,910,914**		**53,058,830**		**257,285,810**		**338,613,760**			**721,869,314**	**1.25**	**0.94**	-	bulan	**785,840,962**	1.85	**4.75**	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perkimtan	60	bulan	32,605,000	48	bulan	29,672,348.00	12	bulan	3,984,346	3 bulan	3,850,084							3	bulan	3,850,084	0.25	0.97	51	bulan	33,522,432	0.85	**1.03**	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terwusuinnya Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	60	bulan	132,842,063	48	bulan	34,299,300.00	12	bulan	763,296,193	3 bulan	69,060,830	3 bulan	53,058,830	3 bulan	257,285,810	3 bulan	338,613,760	12	bulan	718,019,230	1.00	0.94	60	bulan	752,318,530	1.00	**5.66**	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kedisiplinan dan Kepatiun Sumber Daya Aparatur di Dinas Perkimtan**	60	bulan	**1,255,712,500**			**254,800,000.00**			**209,642,680**						**123,615,200**		**23,806,400**			**126,017,600**							-	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	60	bulan	486,806,250	48	bulan	254,800,000.00	12	bulan	97,600,000		-		-	3 bulan	92,396,700		-	3	bulan	92,396,700	0.25	0.95					-	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidkan dan Pelatihan Formal	60	bulan	246,050,000	48	bulan	-	12	bulan	23,654,512		-		-			3 bulan	21,404,000	3	bulan	21,404,000	0.25	0.90					-	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60	bulan	246,050,000	48	bulan	-	12	bulan	46,154,855		-		-	3 bulan	31,218,500	3 bulan	2,402,400	3	bulan	33,620,900	0.25	0.73		bulan			-	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	bulan	276,806,250	48	bulan	-	12	bulan	42,233,313		-		-								-	-					-	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Administrasi Umum**	60	bulan	**8,893,764,675**			**5,680,757,559.00**			**1,980,489,566**		**234,113,059**		**229,139,059**		**1,214,977,561**		**226,543,279**			**1,904,772,938**	**1.00**	**0.96**	-	bulan	**7,585,530,497**	-	**0.85**	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersiadinya peralatan dan perlengkapan kantor	60	bulan	4,532,362,125	48	bulan	3,013,683,660.00	12	bulan	1,515,453,419	3 bulan	176,920,059	3 bulan	160,918,059	3 bulan	1,017,697,941	3 bulan	75,732,641	12	bulan	1,431,268,700	1.00	0.94	60	bulan	4,444,952,360	1.00	**0.98**	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Penggandaan dan Cetakan									88,200,000.00		-	3 bulan	27,030,000	3 bulan	15,000,000	3 bulan	15,000,000	9	bulan	57,030,000			9		57,030,000			Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanaya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60	bulan	4,361,402,550	48	bulan	2,667,073,899.00	12	bulan	465,036,147	3 bulan	57,193,000	3 bulan	41,191,000	3 bulan	182,279,600	3 bulan	135,830,638	12	bulan	416,474,238	1.00	0.90	60	bulan	3,083,548,137	1.00	**0.71**	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**5,363,437,500**			**1,852,244,857.00**			**400,000,000**		**392,000,000**				-					**392,000,000**			-		**2,244,244,857**			Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	60	bulan	5,363,437,500	12	Unit	1,852,244,857.00	2	Unit	400,000,000	2 Unit	392,000,000							2	Unit	392,000,000	1.00	0.98	14	bulan	2,244,244,857	0.23	**0.42**	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**617,553,750**			**342,549,325.00**			**328,200,000**		**26,886,873**		**49,767,417**		**52,934,412**		**198,611,298**			**328,200,000**					**670,749,325**			Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bulan	617,553,750	48	bulan	342,549,325.00	12	Bulan	328,200,000	3 bulan	26,886,873	3 bulan	49,767,417	3 bulan	52,934,412	3 bulan	198,611,298	12	bulan	328,200,000	1.00	1.00	60	bulan	670,749,325	1.00	**1.09**	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**1,938,473,671,450**			**1,145,576,096,123.00**			**648,677,800**		**9,570,477**		**100,131,813**		**45,509,114**		**147,516,091**			**182,918,995**					**1,145,759,009,118**		**0.59**	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	60	bulan	377,162,500	48	bulan	118,923,361.00	12	bulan	328,200,000	3 bulan	9,570,477	3 bulan	67,083,813	3 bulan	19,449,814	3 bulan	86,814,891	12	bulan	182,918,995	1.00	0.56	60	bulan	301,842,356	1.00	**0.80**	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	6	Paket	5,704,406,250	6	Paket	3,725,797,202.00	1	Paket	199,999,800		-		-		-		-			-		-						Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60	bulan	617,553,750	48	bulan	2,511,080,504.00	12	Bulan	120,478,000		-	3 bulan	33,048,000	3 bulan	26,059,300	3 bulan	60,701,200	6	bulan	119,808,500	0.50	0.99	54	bulan				Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni**									**773,556,512**		**2,766,200**		**135,419,800**		**85,830,000**		**355,851,041**			**493,908,300**					493,908,300			Dinas Perkimtan	Prov. Sulut

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 sampai dengan 2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2020)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2020)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
													I		II		III		IV														
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100%		16	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp	K	Rp	K		Rp.	K	Rp		
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**									**690,317,117**		**2,766,200**		**132,312,800**		**85,830,000**		**355,851,041**			**493,908,300**	**12.00**		-		493,908,300			Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi			-			-	1	Keg	238,546,741	3 bulan	2,766,200	3 bulan	104,233,800	3 bulan	48,695,000	3 bulan	82,851,741	12	bulan	155,695,000	12.00	0.65	12					Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Identifikasi lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Terlaksananya kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi			-			-	1	Keg	451,770,376		-	3 bulan	28,079,000	3 bulan	37,135,000	3 bulan	272,999,300	9	bulan	338,213,300	9.00	0.75	9					Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**									**83,239,395**				**3,107,000**							**3,107,000**			-		3,107,000			Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Koordinasi untuk Menyepakati Penerima idan Jenis Pelayanan	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan			-			-	1	Keg	83,239,395		-	3 bulan	3,107,000					3	bulan	3,107,000	3.00	0.04	3					Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase Jumlah Keh/Kota dengan Satuan Permukiman yang dilengkapi dengan PSU**			**55,457,309,710**			**80,583,521,939.00**			**85,697,761,589**		**118,971,080**		**14,750,992,565**		**1,487,839,718**		**69,296,958,226**			**85,697,761,589**			-		**166,281,283,528**			Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	**Terlaksananya Kegiatan Urusan penyelenggaraan PSU**			**55,457,309,710**			**80,583,521,939.00**			**85,697,761,589**		**118,971,080**		**14,750,992,565**		**1,487,839,718**		**69,296,958,226**			**85,697,761,589**	**24.00**	1.00			**166,281,283,528**	**5.87**	**3.00**	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Pungsi Permukiman	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Pungsi	75	Paket	54,734,375,000	260	Paket	80,156,142,439.00	1	Keg	84,698,165,389	3 bulan	28,390,000	3 bulan	14,480,308,295	3 bulan	1,239,240,097	3 bulan	68,950,226,997	12	bulan	84,698,165,389	12.00	1.00	272	Paket	164,854,307,828	3.63	**3.01**	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	75	Keg	722,934,750	156	Paket	427,379,500.00	1	Keg	999,596,200	3 bulan	90,581,080	3 bulan	313,684,270	3 bulan	248,599,621	3 bulan	346,731,229	12	bulan	999,596,200	12.00	1.00	168	Keg	1,426,975,700	2.24	**1.97**	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				**441,539,914,500**			**224,544,887,427**			**36,783,329,818**		**415,695,862**		**1,442,161,395**		**5,287,831,836**		**22,766,861,072**			**29,912,470,165**	**12.46**	34.90	-		**254,457,357,592**			Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	**Presentase Tanah yang Dibebaskan Bagi Pembangunan Infrastruktur Untuk Kesetiinan Umum**			**757,038,300**			**709,836,469.00**			**1,211,882,920**		**38,450,000**		**365,815,350**		**144,615,150**		**663,002,420**			**1,211,882,920**	**12.00**	1.43	-		**1,921,719,389**			Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	5	Dokumen	757,038,300	3	dokumen	709,836,469.00	1	Keg	1,211,882,920	3 bulan	38,450,000	3 bulan	365,815,350	3 bulan	144,615,150	3 bulan	663,002,420	12	bulan	1,211,882,920	12.00	1.00	15	dokume	1,921,719,389	3.00	**2.56**	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan tepat waktu**			**440,782,876,200**			**223,835,050,958.00**			**34,418,509,636**		**333,196,662**		**863,065,045**		**4,958,214,686**		**21,625,214,252**			**27,779,690,645**	**0.46**	0.81	-		**251,614,741,603**			Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	**Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**			440,782,876,200			223,835,050,958.00			34,418,509,636	3 bulan	333,196,662	3 bulan	863,065,045	3 bulan	4,958,214,686	3 bulan	21,625,214,252	12	bulan	27,779,690,645			12		251,614,741,603			Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	88	Ha	440,782,876,200	30.46	Ha	223,835,050,958.00	26	Ha	34,418,509,636	3 bulan	333,196,662	3 bulan	863,065,045	3 bulan	4,958,214,686	3 bulan	21,625,214,252	12	bulan	27,779,690,645	0.46	0.81	42	Ha	251,614,741,603	0.48	**0.57**	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	**Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.**									**1,110,327,465**		**43,989,200**		**213,281,000**		**184,982,000**		**478,644,400**			**920,896,600**			-		**920,896,600**			Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Pengelolaan Masalah Tanah Kosong	Jumlah masalah tanah kosong yang terselesaikan			-			-			47,483,216		-		-							-			-					Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-			-			47,483,216.00		-		-							-			-					Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong			-			-			1,062,844,249.00		43,989,200		213,281,000		184,982,000		478,644,400			920,896,600		0.87	-		920,896,600			Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong			-			-			1,062,844,249.00	3 Bulan	43,989,200	3 Bulan	213,281,000	3 Bulan	184,982,000	3 Bulan	478,644,400	12	Bulan	920,896,600		0.87	12		920,896,600			Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Terlaksananya Penatausahaan Pertanahan milik Pemerintah Provinsi**			-			-			**42,609,797**											-			-					Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			-			-			42,609,797		-									-			-					Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			-			-			42,609,797		-									-			-					Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
																									Rata-Rata Capaian Kinerja per-Program									
																									Predikat Kinerja per-Program									
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					**2,452,394,195,625**			**1,459,091,283,278**			**127,705,066,133**		**1,280,856,465**		**16,811,670,879**		**8,587,708,931**		**92,419,670,339**			**119,807,826,201**					**1,577,929,154,779**				
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM ....)																						**119,807,826,201**	**54.71**	**93.82**				**1.64**	**64.16**		
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM ....)																							Rendah	**Sangat Tinggi**				Sangat Rendah	Rendah		
	FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA		:																													
	FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA		: Pandemi Covid 19, menjadi faktor yang menghambat terlaksananya program/kegiatan dan Dinas Perkimtan Prov. Sulut																													
	TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA		:																													

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN IV TAHUN 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :
1. Meningkatnya Indeks Kapasitas Melalui Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Meningkatnya Indeks Kapasitas Melalui Pengkajian Risiko dalam Perencanaan Terpadu
3. Meningkatnya Indeks Kapasitas Melalui Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
4. Meningkatnya Indeks Kapasitas Melalui Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
5. Meningkatnya Indeks Kapasitas Melalui Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
6. Meningkatnya Indeks Kapasitas Melalui Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penangaan Darurat
7. Meningkatnya Indeks Kapasitas Melalui Penguatan Sistem Pemulihan Bencana

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Unit PD
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%		16
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
A	Meningkatnya Kinerja ASN BPBD	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	Persentase meningkatnya Kinerja ASN					100%	9,322,788,662							494,435,230		8,417,146,979							
1	Meningkatnya Kinerja ASN BPBD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya Kinerja ASN					%	35,262,582	0	4,400,000	50%	14,695,000	50	12,840,000			50%	34,940,000	100.00	99.09					BPBD
	1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan					2 dokumen	16,061,594	0 dokumen	3,000,000	1 dokumen	12,975,000	0 dokumen	9,720,000			1 dokumen	15,975,000	100.00	99.46					BPBD
	1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA PD					2 dokumen	16,080,988	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen				0 dokumen	15,845,000	100.00	98.53					BPBD
	1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian kinerja					3 Laporan	3,120,000	1 Laporan	1,400,000	2 Laporan	1,720,000	0 dokumen	3,120,000			3 Laporan	3,120,000	100.00	100.00					BPBD
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**100.00**	**99.09**					
																			Peringkat Kinerja	**SANGAT TINGGI**	**SANGAT TINGGI**					
2	Meningkatnya Kinerja ASN BPBD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya Kinerja ASN					100%	6,744,376,621	50	2,037,836,471	50	3,806,884,987	52	4,746,580,449		211,012,789	100	5,857,551,458	100.00	86.85					BPBD
	1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12 bulan	6,696,671,147	3 bulan	2,032,876,471	5 bulan	3,777,296,987	3 bulan	4,724,677,449	1 bulan	205,712,789	12 bulan	5,810,173,458	100.00	86.76					BPBD
	1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Cakupan Waktu Pelakanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD					12 bulan	16,128,970	3 bulan	0	3 bulan	16,015,000	3 bulan	9,975,000	3 bulan		12 bulan	16,015,000	100.00	99.29					BPBD
	1.05.01.1.02.04	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan Waktu Pelakanaan Akuntansi SKPD					12 bulan	9,983,000	3 bulan	2,000,000	3 bulan	7,883,000	3 bulan	5,983,000	3 bulan	1,560,000	12 bulan	9,883,000	100.00	99.00					BPBD
	1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun					1 Laporan	3,025,000	0 Laporan	1,480,000	1 Laporan	1,545,000	0 laporan	3,025,000			1 Laporan	3,025,000	100.00	100.00					BPBD
	1.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaaan					2 Dokumen	9,992,211.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 dokumen			2,300,000	2 Dokumen	9,950,000	100.00	99.58					BPBD
	1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan					12 Laporan	5,627,396	3 Laporan	1,480,000	3 Laporan	4,145,000	0 laporan	2,920,000			6 Laporan	5,625,000	100.00	99.96					BPBD
	1.05.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis					1 Laporan	2,948,897	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 laporan		1 Laporan	1,440,000	1 Laporan	2,880,000	100.00	97.66					BPBD
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**100.00**	**86.85**					
																			Peringkat Kinerja	**SANGAT TINGGI**	**TINGGI**					

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Unit PD
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%		16
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	Meningkatnya Kinerja ASN BPBD	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase meningkatnya Kinerja ASN					100%	113,276,093	95%	0	95%	9,743,000	95%	20,126,000		0	95%	112,137,500	95.00	98.99					BPBD
	1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN dan THL yang Menggunakan Seragam Sesuai Ketentuan					100 pasang	88,000,000	0 pasang	0	0 pasang	0	0 pasang		100 pasang	86,872,500	100 pasang	86,872,400	100.00	98.72					BPBD
	1.05.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					12 bulan	15,533,093	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	10,383,000		15,522,000	9 bulan	15,522,000	75.00	99.93					BPBD
	1.05.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan Waktu Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai					bulan		0 bulan	0	0 bulan	0	bulan				0 bulan	0							BPBD
	1.05.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi					2 kegiatan	9,743,000	0 kegiatan	0	2 kegiatan	9,743,000	0 kegiatan	9,743,000			2 kegiatan	9,743,000	100.00	100.00					BPBD
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**95.00**	**98.99**			
																			Peringkat Kinerja		**SANGAT TINGGI**	**SANGAT TINGGI**			
4	Meningkatnya Kinerja ASN BPBD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya Kinerja ASN					100%	173,357,324	40%	42,859,533	10%	85,264,048		49,477,121		39,666,160	50%	173,308,231	100.00	99.97					BPBD
	1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4 Jenis	58,457,324	0 Jenis	13,244,300	2 Jenis	45,184,650	2 jenis	50,800,950		1,596,000	2 Jenis	58,428,950	100.00	99.95					BPBD
	1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	cakupan waktu pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi					12 bulan	114,900,000	3 bulan	29,615,233	3 bulan	85,264,048	3 bulan	49,477,121		38,070,160	9 bulan	114,879,281	100.00	99.98					BPBD
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00**	**99.97**			
																			Peringkat Kinerja		**SANGAT TINGGI**	**SANGAT TINGGI**			
5	Meningkatnya Kinerja ASN BPBD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya Kinerja ASN					100%	234,325,003	0%	0	38%	231,730,000	38%	231,730,000			38%	231,730,000	100.00	98.89					BPBD
	1.05.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebeler Kantor					1 unit		0 unit	0	0 unit	0					0 unit	0	100.00	#DIV/0!					
	1.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya					20 unit	234,325,003	0 unit	0	15 unit	231,730,000	15 unit	231,730,000			15 unit	231,730,000	100.00	98.89					BPBD
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00**	**98.89**			
																			Peringkat Kinerja		**SANGAT TINGGI**	**SANGAT TINGGI**			
6	Meningkatnya Kinerja ASN BPBD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase meningkatnya Kinerja ASN					100%	1,551,986,044	22%	367,082,885	28%	1,174,551,932	50%	1,048,759,654		213,595,181	50%	1,541,634,817	75.00	99.33					BPBD
	1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 bulan	1,551,986,044	3 bulan	367,082,885	3 bulan	1,174,551,932	3 bulan	1,048,759,654		213,595,181	9 bulan	1,541,634,817	75.00	99.33					BPBD
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**75.00**	**99.33**			
																			Peringkat Kinerja		**SEDANG**	**SANGAT TINGGI**			

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Unit PD
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%		16
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7	Meningkatnya Kinerja ASN BPBD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase meningkatnya Kinerja ASN					100%	470,204,995	0	27,794,935	70	438,050,038	63	349,422,873		30,161,100	70	465,844,973	70.00	99.07					BPBD
	1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara					10 unit	336,235,880	2 unit	27,794,935	5 unit	306,171,710		235,344,545		30,161,100	7 unit	333,966,645	70.00	99.33					BPBD
	1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Terpelihara					5 unit	34,000,000	0 unit		1 unit	32,535,000		14,735,000			1 unit	32,535,000	20.00	95.69					BPBD
	1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Yang Terpelihara/Direhabilitasi					1 gedung	99,969,115	0 gedung	0	1 gedung	99,343,328		99,343,328			1 gedung	99,343,328	100.00	99.37					BPBD
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**70.00**	**99.07**					
																			Peringkat Kinerja	**SEDANG**	**SANGAT TINGGI**					
B	Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam pengelolaan Bencana	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**							3,017,882,486								303,326,984		**2,986,713,560**							
8	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase meningkatnya kapasitas warga negara dalam Penanggulangan Bencana					100%	317,741,221	50%	239,802,050	0	77,526,000	50	288,782,050		4,675,000		317,328,050	100.00	99.87					BPBD
	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Penyediaan/Pemutakhiran Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi					1 Dokumen	92,420,071	0 Dokumen	14,791,000	0 Dokumen	77,526,000	0 dokumen	78,391,000		4,675,000	0 Dokumen	92,317,000	100.00	99.89					BPBD
	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana					100 %	225,321,150	0 %	225,011,050	5 %	0		210,391,050			100 %	225,011,050	100.00	99.86					BPBD
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**100.00**	**99.87**					
																			Peringkat Kinerja	**SANGAT TINGGI**	**SANGAT TINGGI**					
9	meningkatnya kapasitas warga negara dalam Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase meningkatnya kapasitas warga negara dalam Penanggulangan Bencana					100%	1,680,063,829	0	59,960,500	0.00	606,433,916	46.3	345,206,894		152,937,183		1,670,319,459	67.86	99.45					BPBD
	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Penyediaan/Pemutakhiran Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi					1 dokumen	90,072,742	0 dokumen	0	0 dokumen	88,963,000	0 dokumen	70,992,000		3,500,000	0 dokumen	88,963,000	0.00	98.77					BPBD
	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	persentase aparatur yang menagani sub-urusan bencana dan warga negara yang berada dikawasan rawan bencana					100 %	103,136,300	0 %	0	100 %	103,136,300	0 dokumen	103,136,300			100 %	103,136,300	100.00	100.00					BPBD
	1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Waktu pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana					12 bulan	550,260,526	3 bulan	110,257,092	3 bulan	437,373,151	3 bulan	324,142,322		88,771,283	9 bulan	547,630,243	75.00	99.52					BPBD

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Unit PD
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%		16
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana					1 paket	42,180,000	0 paket	0	0 paket	41,847,500		4,430,000		21,700,000	0 paket	41,847,500	100.00	99.21					BPBD
	1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah dokumen pengelolan risiko bencana					1 dokumen	223,572,688	0 dokumen	69,887,500	0 dokumen	152,460,500	0 dokumen	179,337,500		11,155,500	0 dokumen	222,348,000	0.00	99.45					BPBD
	1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan yang Risiko Bencana Tinggi Menjadi					3 Desa/kelurahan	104,142,400	0 Desa/kelurahan	0	3 Desa/kelurahan	104,142,400	0 dokumen	104,142,400			3 Desa/kelurahan	104,142,400	100.00	100.00					BPBD
	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Penanganan Konstruksi Fisik Pasca Bencana Pelaksanaan					2 paket	566,699,173	1 paket	59,960,500	1 paket	502,291,516		241,064,494		27,810,400	1 paket	562,252,016	100.00	99.22					BPBD
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00**	**99.45**			
																			Peringkat Kinerja		**SANGAT TINGGI**	**SANGAT TINGGI**			
10	menurunnya rata-rata angka kematian (mortalitas) akibat bencana per 100.000 penduduk	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase menurunnya rata-rata angka kematian (mortalitas) akibat bencana per 100.000 penduduk					100%	908,098,409	1.46	148,483,670	0	741,666,581	26.7	555,694,114		145,714,801	95.00	890,150,251	95.00	98.02					BPBD
	1.05.03.1.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana					100 %	47,974,641	0 %	0	0 %	46,146,500		41,503,000			44 %	46,146,500	95.00	96.19					BPBD
	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana					100 %	689,277,322	21.5 %	148,483,670	76.3 %	525,850,635		414,544,668		145,714,801	39 %	674,334,305	95.00	97.83					BPBD
	1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah paket logistik untuk korban bencana					1 paket	170,846,446	0 paket	0	0 paket	169,669,446		99,646,446			0 paket	169,669,446	95.00	99.31					BPBD
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**95.00**	**98.02**			

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Unit PD
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%		16
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																			Peringkat Kinerja	**SANGAT TINGGI**	**SANGAT TINGGI**					
11	meningkatnya pengelolaan sistem informasi Kebencanaan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase meningkatnya pengelolaan sistem informasi Kebencanaan					100%	111,979,027	1	27,950,500	1	80,965,300		8,485,150,527			1	108,915,800	66.67	97.26					BPBD
	1.05.03.1.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah MoU dengan Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana					5 surat	62,874,548	0 surat	27,950,500	0 surat	34,073,800		41,898,900			0 surat	62,024,300	100.00	98.65					BPBD
	1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan informasi kejadian bencana					15 Kab/Kota	49,104,479	0 Kab/Kota	0	3 Kab/Kota	46,891,500	3 Kab/Kota	8,443,251,627			3 Kab/Kota	46,891,500	100.00	95.49					BPBD
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**88.14**	**92.41**					
																			Peringkat Kinerja	**TINGGI**	**SANGAT TINGGI**					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 11)					**0**		**0**		**12,340,671,148**										**11,403,860,539**							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 11)																				**88.14**	**92.41**					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 11)																				**TINGGI**	**SANGAT TINGGI**					

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : Adanya Kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan.

FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : Adanya Pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan penyerapan Anggaran berkurang.

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : Realisasi berjalan sesuai anggaran kas dan percepatan dalam melaksanakan kegiatan.

FORMULIR E.S5
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2021

DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang Mengacu pada Sasaran RKPD Provinsi:
1. Menurunkan Jumlah Fakir Miskin (FM),Kelompok Rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
2. Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re		
		URUSAN WAJIB																									
		DINAS SOSIAL																									
1		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial : Nilai LKIP SKPD Dinas Sosial RATA-RATA MINIMUM B**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD Dinas Sosial Rata-Rata Minimum B**	**10,387,115,868**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Dinas Sosial Rata-Rata Minimum B**	**8,357,595,337**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Dinas Sosial Rata-Rata Minimum B**	**13,080,652,465**			-	**6,513,442,582**		**2,456,619,282**		**2,037,447,273**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Dinas Sosial Rata-Rata Minimum B**	**11,007,509,137**	**100.00%**	**92.13%**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Dinas Sosial Rata-Rata Minimum B**	**19,365,104,474**	**104.00%**	**82.27%**		
1.1.		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Tersedianya kebutuhan adminsitrasi umum	60 bulan	7,000,162,006	60 bulan	5,902,659,318	bulan		bulan		bulan		bulan		bulan		0 bulan	-	0.00%	0.00%	60 bulan	5,902,659,318	100.00%	84.32%	Dinas Sosial, BPLU, BPAR	
1.2.	Pengemlangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan	60 bulan	1,102,339,000	60 bulan	726,153,000	bulan		bulan		bulan		bulan		bulan		0 bulan	-	0.00%	0.00%	60 bulan	726,153,000	100.00%	65.87%	Dinas Sosial, BPLU, BPAR	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan*					*12 bulan*	*12,799,473,184*	*bulan*		*6 bulan*	*6,368,428,670*	*3 bulan*	*2,419,666,208*	*3 bulan*	*1,948,780,049*	*12 bulan*	*10,736,874,927*	*100.00%*	*83.89%*	*12 bulan*	*10,736,874,927*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*Dinas Sosial, BPLU, BPAR*	
1.3.		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi barang / jasa	Tersedianya kebutuhan administrasi barang / jasa	60 bulan	777,838,250	60 bulan	440,600,250	bulan		bulan		bulan		bulan		bulan		0 bulan	-	0.00%	0.00%	60 bulan	440,600,250	100.00%	56.64%	Dinas Sosial, BPLU, BPAR	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya kebutuhan administrasi barang / jasa*					*12 bulan*	*140,630,206*	*bulan*		*6 bulan*	*70,966,487*	*3 bulan*	*31,691,874*	*3 bulan*	*30,362,566*	*12 bulan*	*133,020,927*	*100.00%*	*94.59%*	*12 bulan*	*133,020,927*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*Dinas Sosial, BPAR*	
1.4.		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya kebutuhan administrasi kepegawaian	60 bulan	115,101,250	60 bulan	128,056,250	bulan	-	bulan		bulan		bulan		bulan		0 bulan	-	0.00%	0.00%	60 bulan	128,056,250	100.00%	111.26%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
1.5.		Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	60 bulan	1,391,675,362	60 bulan	1,160,126,519	12 bulan	140,549,075	bulan		6 bulan	74,047,425	3 bulan	5,261,200	3 bulan	58,304,658	12 bulan	137,613,283	100.00%	97.91%	72 bulan	1,297,739,802	120.00%	93.25%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	92.13%			104.00%	82.27%		
																		Peringkat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi		
2		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial : Nilai LKIP SKPD Dinas Sosial RATA-RATA MINIMUM B**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD Dinas Sosial Rata-Rata Minimum B**	**6,756,522,957**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Dinas Sosial Rata-Rata Minimum B**	**4,761,626,520**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Dinas Sosial Rata-Rata Minimum B**	**915,353,077**			-	**73,919,070**		**105,794,406**		**568,286,295**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Dinas Sosial Rata-Rata Minimum B**	**747,999,771**	**228.85%**	**70.34%**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Dinas Sosial Rata-Rata Minimum B**	**5,509,626,291**	**76.98%**	**82.00%**		
2.1.		Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya Kendaraan Dinas	15 Unit	700,500,000	10 unit	592,700,000	0 unit	-	unit		0 unit	-	unit		unit		0 unit	-	0.00%	0.00%	10 unit	592,700,000	66.67%	84.61%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
2.2.		Kegiatan Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	550 unit/set/ paket	1,980,558,000	237 unit/set/ paket	1,404,498,753	13 unit/set	323,317,519	0 unit		4 unit/set/ paket	14,175,500	9 unit/set/ paket	36,679,000	67 unit/set/ paket	253,435,500	80 unit	304,290,000	615.38%	94.11%	317 unit	1,708,788,753	57.64%	86.28%	*Dinas Sosial, BPAR, BPLU*	
2.3.	Pengemlangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	235 buah/set /unit	1,050,000,000	134 buah/set/unit		0 buah/set /unit		buah/set/unit		0 buah/set/	-	buah/set/unit		buah/set/		0 buah/ set/ unit	-	0.00%	0.00%	134 buah/ set/ unit	-	57.02%	0.00%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
2.4.		Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor	Tersedianya alat listrik rutin/ berkala elektronik	60 bulan	402,945,050	48 bulan	320,087,935	0 bulan		bulan		0 bulan		bulan		bulan		0 bulan	-	0.00%	0.00%	48 bulan	320,087,935	80.00%	79.44%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
2.5.		Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional ketahun	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam ketahun	10 unit	1,103,825,907	10 unit	918,905,140	10 unit	254,580,807	unit		6 unit	53,753,570	2 unit	57,996,506	2 unit	66,431,076	10 unit	178,181,152	100.00%	69.99%	8 unit	1,097,086,292	80.00%	99.39%	*Dinas Sosial, BPAR, BPLU*	
2.6.		Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya peralatan/ perlengkapan gedung kantor	255 unit	161,410,000	178 unit	121,016,000	12 unit	32,999,225	unit		unit	-	4 unit	8,118,900	8 unit	3,000,000	12 unit	11,118,900	100.00%	33.69%	190 unit	132,134,900	74.51%	81.86%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
2.7.		Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	15 unit	793,357,000	12 unit	1,105,911,692	3 unit/paket	304,455,526	unit/paket	-	1 it/pa	5,990,000	unit/pake	3,000,000	2 it/pa	245,419,719	3 unit/paket	254,409,719	100.00%	83.56%	15 unit	1,360,321,411	100.00%	171.46%	*Dinas Sosial, BPAR*	
2.8.		Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung gudang	Terlaksananya Rehabilitasi Gudang Logistik Dinas Sosial	2 unit	563,927,000	2 unit	298,507,000	unit/paket				-	-	paket		paket		0 paket	-	0.00%	0.00%	2 unit	298,507,000	100.00%	52.93%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	70.34%			76.98%	82.00%		
																		Peringkat Kinerja		Sangat Tinggi	Sedang			Tinggi	Tinggi		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provisi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 5 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
3	Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Presentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin**	**97%**	**791,695,000**		**517,287,500**		**32,000,000**		-		**14,250,000**		-		**16,000,000**		**30,250,000**	**100.00%**	**94.53%**		**547,537,500**	**66.06%**	**53.44%**		
3.1.		Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	575 stel	497,145,000	454 stel	299,545,000	36 stel	32,000,000	stel		16 stel	14,250,000	stel		20 stel	16,000,000	36 stel	30,250,000	100.00%	94.53%	490 stel	329,795,000	85.22%	66.34%	BPAR	
3.2.		Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	220 stel	254,550,000	221 stel	213,742,500	0 stel		stel		0 stel	-	stel		stel	-	0 stel	-	0.00%	0.00%	221 stel	213,742,500	100.45%	83.97%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
3.3.		Kegiatan Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Tersedianya Mesin/Kartu Absensi	8 unit	40,000,000	1 unit	4,000,000	0 unit		unit		0 unit	-	unit		unit	-	0 unit	-	0.00%	0.00%	1 unit	4,000,000	12.50%	10.00%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	94.53%			66.06%	53.44%		
																			Peringkat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Rendah		
4	Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial : Nilai LKIP SKPD Dinas Sosial RATA-RATA MINIMUM B**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD Dinas Sosial Rata-Rata Minimum B**	**350,000,000**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Dinas Sosial Rata-Rata Minimum B**	**158,364,350**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Dinas Sosial Rata-Rata Minimum B**	-		-		-		-		-	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Dinas Sosial Rata-Rata Minimum B**	-	**0.00%**	**0.00%**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Dinas Sosial Rata-Rata Minimum B**	**158,364,350**	**42.38%**	**44.26%**		
4.1.		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksanasnya Pendidikan dan Pelatihan Formal	21 orang	200,000,000	1 orang	102,381,600	0 orang		orang	-	0 oran	-	orang	-	orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	1 orang	102,381,600	4.76%	51.19%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
4.2.		Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksanasnya Sosialisasi Perundang-undangan	5 kegiatan	150,000,000	4 kegiatan	55,982,750	0 kegiatan	-	Keg	-	0 Keg	-	Keg	-	Keg		0 kegiatan	-	0.00%	0	4 kegiatan	55,982,750	80.00%	37.32%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%			42.38%	44.26%		
																			Peringkat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5	Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangs; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan**	**100% dari 42 laporan (LKIP, LAPORAN TAHUNAN,LPPD SKPD, LKPJ SKPD, 12 Laporan bulanan, 12 laporan fungsional bendahara, laporan semesteran,12 laporan EPRA)**	**244,244,300**	**20% dari 42 laporan (LKIP, LAPORAN TAHUNAN,LPPD SKPD, LKPJ SKPD, 12 Laporan bulanan, 12 laporan fungsional bendahara, laporan semesteran,12 laporan EPRA)**	**71,785,701**	**12% dari 42 laporan (LKIP, LAPORAN TAHUNAN,LPPD SKPD, LKPJ SKPD, 12 Laporan bulanan, 12 laporan fungsional bendahara, laporan semesteran,12 laporan EPRA)**	**6,592,606**		-		**3,616,500**		-		**600,000**		**4,216,500**	**100%**	**63.96%**		**76,002,201**	**57.22%**	**32.23%**		
5.1.		Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	20 laporan	116,102,050	17 laporan	57,527,050	4 laporan	6,592,606	0 laporan	-	1 lapo	3,616,500	laporan		3 lapo	600,000	4 laporan	4,216,500	100.00%	63.96%	21 laporan	61,743,550	105.00%	53.18%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
5.2.		Kegiatan Penyusunan laporan bulanan SKPD	Jumlah laporan bulanan yang disusun	60 laporan	65,000,000					-	-	0 lapo	-	laporan		laporan		0 laporan	-	0.00%	0.00%	0 laporan	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
5.3.		Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semester yang disusun	15 laporan	26,612,750	6 laporan	4,392,750	laporan		laporan	-	0 lapo	-	laporan		laporan		0 laporan	-	0.00%	0.00%	6 laporan	4,392,750	40.00%	16.51%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
5.4.		Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan yang berhasil disusun	15 laporan	36,529,500	4 laporan	9,865,901	laporan		laporan		0 laporan		laporan		laporan		0 laporan	-	0.00%	0.00%	4 laporan	9,865,901	26.67%	27.01%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100%	63.96%			57.22%	32.23%		
																			Peringkat Kinerja		Sangat Tinggi	Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
6	Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesos	**Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan / Kedaerahan**	**Cakupan informasi pembangunan kesos melalui pameran promosi ; jumlah materi yang dipamerkan**		**100%**	**250,000,000**	**Cakupan informasi pembangunan kesos melalui pameran promosi : jumlah materi yang dipamerkan**		**34,281,500**	**Cakupan informasi pembangunan kesos melalui pameran promosi : jumlah materi yang dipamerkan**	-		-		-		-		-	**0%**	**0%**		**34,281,500**	**60.00%**	**13.71%**		
6.1.		Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi	Terlaksanasnya Pameran Provinsi	5 kegiatan	250,000,000	3 kegiatan	34,281,500	kegiatan	-	kegiatan	-	0 rgiat	-	kegiatan	-	kegiatan	-	0 kegiatan	-	0.00%	0.00%	3 kegiatan	34,281,500	60.00%	13.71%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0%	0.00%			60.00%	13.71%		
																			Peringkat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provisi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 5 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	**Program Perencanaan SKPD**	**Terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. (Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD)**	**100% (43 Dokumen Perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD)**	**442,616,875**	**22% (43 Dokumen Perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD)**	**334,731,250**	**10% (43 Dokumen Perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD)**	**18,516,337**	**2%**	-		**4,750,000**		**1,667,000**		**7,220,500**		**13,637,500**	**100.00%**	**83.98%**		**348,368,750**	**47.98%**	**61.79%**		
7.1.		Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya Rencana Strategis SKPD	2 dokumen	102,685,375	1 dokumen	64,976,000					dokum	-	dokumen	-	dokumen		0 dokumen	-	0.00%	0.00%	1 dokumen	64,976,000	50.00%	63.28%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
7.2.		Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD	20 dokumen	221,070,500	12 dokumen	202,687,250	4 dokumen	12,917,129	dokumen	-	2 dcum	4,750,000	1 dokumen	1,667,000	1 dcum	2,397,500	4 dokumen	8,814,500	100.00%	68.24%	16 dokumen	211,501,750	80.00%	95.67%	Dinas Sosial	
7.3.		Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial Prov. Sulut	28 dokumen	94,861,000	15 dokumen	67,068,000	1 dokumen	826,910	dokumen	-	dokum	-	dokumen	-	1 dcum	826,500	1 dokumen	826,500	100.00%	99.95%	16 dokumen	67,894,500	57.14%	71.57%	Dinsos, BPLU	
7.4.		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	21 laporan	24,000,000		-	1 laporan	4,772,298		-	lapora	-	laporan	-	1 spora	3,996,500	1 laporan	3,996,500	100.00%	83.74%	1 laporan	3,996,500	4.76%	16.65%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	83.98%			47.98%	61.79%		
																		Peringkat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
8	Menurunkan Jumlah PM, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya sebesar 1% dari target	**Program Jaminan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial**	**Meningkatnya Kemampuan Keluarga Miskin dan rentan serta PMKS lainnya termasuk wargs korban bencana dalam memenuhi kebutuhan dasar: cakupan PMKS penerima manfaat dan PSKS yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui perlindungan dan jaminan sosial**	**7500 korban, 15 Keg**	**6,888,618,750**	**4300 korban, 1 Keg**	**3,540,453,716**	**1800 korban, 2 Keg**	**989,639,867**		**360,980,000**	900 Korban, 2 Keg	**199,312,520**		**213,333,177**		**202,133,400**		**975,759,097**	**100.00%**	**98.83%**		**4,516,212,813**	**131.56%**	**81.71%**		
8.1.		Kegiatan Penanggulangan Bencana Sosial	Tersedianya Bufferstock untuk korban bencana sosial	3750 orang	1,400,000,000	3200 orang	860,795,016	900 orang	188,245,284	orang		0 oran	-	900 orang	182,754,877	orang	5,346,000	900 orang	188,100,877	100.00%	99.92%	4100 orang	1,048,895,893	109.33%	74.92%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
8.2.		Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	Tersedianya Bufferstock untuk korban bencana alam	3750 orang	1,500,000,000	5300 orang	1,293,777,700	900 orang	402,554,078	orang		900 oran	199,312,520	orang		orang	196,787,400	900 orang	396,099,920	100.00%	98.40%	6200 orang	1,689,877,620	165.33%	112.66%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
8.3.		Kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Terlaksanannya Jaminan Kesejahteraan Sosial PKH	5 keg	300,000,000		-			kegiatan		0 rgiat	-	kegiatan		kegiatan		0 kegiatan	-	0.00%	0.00%	0 kegiatan	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
8.4.		Kegiatan Bimbingan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Meningkatnya Kapasitas Pendamping dan Operator PKH	5 keg	3,088,618,750	4 kegiatan	1,385,881,000	2 kegiatan	398,840,505	2 kegiatan	360,980,000	kegiatan		kegiatan	30,578,300	kegiatan		2 kegiatan	391,558,300	100.00%	98.17%	6 kegiatan	1,777,439,300	120.00%	57.58%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
8.5.		Kegiatan Sosialisasi Program Bantuan Tunai Bersyarat/PKH	Terinformasikannya Program Bantuan Tunai Bersyarat (PKH)	3 keg	300,000,000		-	kegiatan	-	kegiatan		0 rgiat	-	kegiatan		kegiatan		0 kegiatan	-	0.00%	0.00%	0 kegiatan	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
8.6.		Kegiatan Sosialisasi Program Asuransi Kesejahteraan Sosial	Terinformasikannya Program Asuransi Kesos (Askeso)	2 keg	300,000,000		1,261,485,750	-	-	kegiatan		0 rgiat	-	kegiatan		kegiatan		0 kegiatan	-	0.00%	0.00%	0 kegiatan	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	98.83%			131.56%	81.71%		
																		Peringkat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provisi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
9	Menurunkan Jumlah PM, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya sebesar 1% dari target	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**	**Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar, persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat produktifitasnya secara sosial, ekonomi dan kelembagaan melalui pemberdayaan sosial**	**24.32%**	**81,525,740,000**	**20.64%**	**36,455,309,913**	**1%**	**4,175,837,051**		-		**3,333,962,608**		**83,315,062**		**743,651,126**		**4,160,928,796**	**100.00%**	**97.26%**		**40,616,238,709**	**46.08%**	**55.74%**		
9.1.		Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Tersedianya Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha, Pelayanan Sosial Dasar Melalui KUBE	420 Klp (KK)	8,500,000,000	81 Klp (KK)	1,655,390,000	5 Klp (KK)	115,931,504	Klp (KK)		5 Klp (KK)	99,786,610	Klp (KK)		Klp (KK)	8,735,000	5 Klp (KK)	108,521,610	100.00%	93.61%	86 Klp (KK)	1,763,911,610	20.48%	20.75%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
9.2.		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi	Tersedianya Akses Perumahan dan Pemukiman Melalui RTLH	2400 KK/unit	72,000,000,000	1109 KK/unit	34,078,410,713	117 KK/unit	3,935,375,019	KK/unit		97 K/un	3,234,175,998	3 KK/unit	83,315,062	17 K/un	612,499,217	117 KK/unit	3,929,990,277	100.00%	99.86%	1226 KK/unit	38,008,400,990	51.08%	52.79%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
9.3.		Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Terlaksanasnya Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Tersedianya Sarana Umum di Lokasi KAT	36 unit	900,740,000	20 unit	721,509,200	4 unit	124,530,528	unit		0 unit	-	unit		4 unit	122,416,909	4 unit	122,416,909	100.00%	98.30%	24 unit	843,926,109	66.67%	93.69%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
9.4.		Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Fakir Miskin dan KAT	Jumlah Warga KAT	260 orang	125,000,000	0 orang	-	0 orang		orang		0 oran	-	orang		orang		0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	97.26%			46.08%	55.74%		
																		Peringkat Kinerja		Sedang	Rendah			Sangat Rendah	Rendah		
10		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**Meningkatnya Kemampuan Penduduk Miskin dan Rentan, Anak, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan Kelompok Marginal Lainnya dalam Pemenuhan Hak Dasar dan Inklusif: Persentase PMKS Penerima Manfaat yang Meningkat Kemampuannya Melalui Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**	**9.23%**	**11,758,212,100**	**4.7%**	**6,894,769,721**	**1.2%**	**1,848,461,802**		-		**20,558,000**		**916,581,380**		**880,497,850**		**1,817,637,230**	**100.00%**	**98.30%**		**8,712,406,951**	**216.44%**	**66.97%**		
10.1.		Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak	Jumlah Perempuan dan Anak Korban Eksploitasi yang Mendapatkan Pelayanan dan Perlindungan Sosial	265 orang	4,163,967,700	55 orang	1,895,079,200	orang		orang		orang		orang		orang		0 orang				orang		0.00%		Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
			Jumlah Anak, Balita Terlantar, Anak Jalanan, ABH, ADK, Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Pelayanan Sosial di Luar Panti	1414 Anak		200 Anak		Anak		Anak		Anak		Anak		Anak		0 Anak				200 Anak		14.14%			
			Jumlah LKS Anak yang difasilitasi/ dibantu	25 LKS		44 LKS		LKS		LKS		LKS		LKS		LKS		0 LKS				44 LKS		176.00%			

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provisi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	*Tersedianya Permakanan Anak Dalam Panti;Tersedianya Perbekalan kesehatan bagi anak;Tersedianya bimbingan fisik mental dan spiritual bagi anak dalam panti; Terlaksananya bimbingan aktivitas hidup sehari-hari bagi anak dalam panti*					*1100 Anak*	*980,307,781*		*500,000*	## *Anak*	*400,251,160*		*563,079,400*	*1100 Anak*	*963,830,560*	*100.00%*	*98.32%*	*1155 Anak*	*2,858,909,760*	*435.83%*	*68.66%*		
10.2.	Menurunkan Jumlah PM, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya sebesar 1% dari target	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Jumlah Lanjut Usia Terlantar/ Miskin Tidak Potensial yang Mendapatkan Bantuan Sosial	1070 LU	3,106,071,000	960 LU	3,472,863,821	LU		LU		LU		LU		LU		0 LU				LU	-	0.00%		Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
			Jumlah Lanjut Usia Miskin yang Potensial yang Mendapatkan Bantuan	380 LU		LU		LU		LU		LU		LU		LU		0 LU				0 LU	-	0.00%			
			Jumlah LKS Lanjut Usia yang dilaksanakan/dibantu	20 LKS		18 LKS		LKS		LKS		LKS		LKS		LKS		0 LKS				13 LKS	-	65.00%			
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	*Tersedianya permakanan dalam Panti LU; Terlaksananya bimbingan aktivitas hidup sehari-hari*					*200 LU*	*455,684,308*	*LU*		*LU*	*8,837,500*	*200 LU*	*139,168,600*	*LU*	*304,710,000*	*200 LU*	*452,716,100*	*100.00%*	*99.35%*	*1160 LU*	*3,925,579,921*	*108.41%*	*126.38%*		
10.3.		Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan	Jumlah Penyandang Cacat yang Mendapatkan Bantuan Peralatan	100 orang	1,783,054,400	5 orang	815,755,400	orang		orang		0 orang		orang		orang		0 orang	-			5 orang	-	5.00%		Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
			Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Bantuan Sosial diluar Panti	398 orang		170 orang		orang		orang		oran		orang		orang		0 orang				170 orang	-	42.71%			
			Jumlah LKS Cacat yang Mendapatkan Bantuan Sosial	10 LKS		7 LKS		LKS		LKS		LKS		LKS		LKS		0 LKS				7 LKS	-	70.00%			
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	*Tersedianya permakanan penyandang cacat dlm panti; Terlaksananya bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi penyandang cacat dalam panti*					*336 orang*	*412,469,713*	*orang*		*336 orang*	*11,220,500*	*orang*	*377,161,620*	*orang*	*12,708,450*	*336 orang*	*401,090,570*	*100.00%*	*97.24%*	*336 orang*	*1,216,845,970*	*84.42%*	*68.25%*		
10.4.		Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS	Terlaksananya Kegiatan Kampanye Sosial bagi PMKS dan Masyarakat	26 Keg	390,000,000	Keg								Keg		Keg		Keg	-	0.00%	0.00%	0 Keg	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
10.5.		Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bagi Lanjut Usia Miskin	Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Lanjut Usia Miskin	50 LU/ Unit	1,425,000,000	7 LU/ Unit	197,769,000	0 unit		LU/ Unit		0 unit	-	LU/ Unit		unit		0 paket	-	0.00%	0.00%	7 paket	197,769,000	14.00%	13.88%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
10.6.		Kegiatan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Terlaksanasnya Hari Lanjut Usia Nasional	6 Keg	890,119,000	4 Keg	513,302,300	0 Keg	-	Keg		0 Keg	-	Keg		Keg		0 Keg	-	0.00%	0.00%	4 Keg	513,302,300	66.67%	57.67%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
																		Rata-rata Capaian Kinerja [%]		100.00%	98.30%			216.44%	66.97%		
																		Peringkat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provisi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 5 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
11	Menurunkan Jumlah FM, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya sebesar 1% dari target	**Program Pembinaan Anak Terlantar**	**Meningkatnya Fungsi Sosial PMKS Anak Terlantar melalui Pelaksanaan Pelayanan, Perlindungan dan Pelatihan Keterampilan; Persentase Anak Terlantar yang Mampu Melaksanakan Peranan dan Fungsi Sosial Melalui Pelaksanaan Pelayanan, Perlindungan dan Rehsos**	**570 Anak**	**7,419,358,500**	**240 Anak**	**2,427,881,800**	**60 Anak**	**67,893,204**	**Anak**	-	**20 Ana**	**36,190,000**	**Anak**	**31,680,000**	**Anal**	-		**23,873,700,271**	**100.00%**	**99.97%**		**32,898,896,889**	**76.32%**	**54.57%**		
11.1.		Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja	570 Anak	6,819,358,500	300 Anak	2,197,147,600	Anak		Anak		Anak		Anak		Anak		0 Anak	-	0.00%	0.00%	300 Anak	2,197,147,600	52.63%	32.22%	BPAR	
11.2.		Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksanasnya Kegiatan Monitoring dan Pelaporan	5 Keg	300,000,000	5 Keg	230,734,200	Keg		Keg		Keg		Keg		Keg		0 Keg	-	0.00%	0.00%	5 Keg	230,734,200	100.00%	76.91%	BPAR	
11.3.		Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Anak Terlantar	Tervalidasinya Data Anak Terlantar yang Mengikuti Praktek Belajar Kerja	5 Keg	300,000,000	0 Keg	-	0 Keg	-	Keg		0 Keg	-	Keg		Keg		0 Keg	-	0.00%	0.00%	0 Keg	-	0.00%	0.00%	BPAR	
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	*Tersedianya pemakanan, sandang, asrama yg mudah diakses, perbekalan kesehatan, serta terlaksananya bimbingan fisik mental spiritual, aktifitas hdp sehari-hari dan pelayanan penelusuran keluarga*					*3 Keg*	*67,893,204*			*2 Keg*	*36,190,000*	*1 Keg*	*31,680,000*		-	3 Keg	67,870,000	100.00%	99.97%	3 Keg	67,870,000			BPAR	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	99.97%			76.32%	54.57%		
																		Peringkat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Rendah		
12	Menurunkan Jumlah FM, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya sebesar 1% dari Target	**Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma**	**Meningkatnya Fungsi Sosial PMKS Penyandang Cacat dan Trauma Melalui Pelaksanaan Pelayanan, Perlindungan dan Rehsos; Persentase PMKS, Penyandang Cacat dan Trauma yang Mampu Melaksanakan Peranan dan Fungsi Sosial Melalui Pelaksanaan Pembinaan**	**100% Eks Kusta**	**1,040,680,000**	**100% Eks Kusta**	**899,496,500**	**100% Eks Kusta**	**122,475,000**		-		**63,154,500**		**28,423,500**		**30,526,000**		**122,104,000**	**100.00%**	**99.70%**		**1,021,600,500**	**120.00%**	**121.52%**		
12.1.		Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Terpenuhinya Makanan Penyandang Eks Kusta dalam Setahun	5 TA	840,680,000	5 TA	899,496,500	1 TA	122,475,000	TA		1 TA	63,154,500	TA	28,423,500	TA	30,526,000	1 TA	122,104,000	100.00%	99.70%	6 TA	1,021,600,500	120.00%	121.52%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
12.2.		Kegiatan Hari Disabilitas Internasional	Terlaksanasnya Hari Disabilitas Internasional	4 Keg	200,000,000	0 Keg		Keg		Keg		Keg		Keg		Keg		0 Keg	-	0.00%	0.00%	0 Keg	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	99.70%			120.00%	121.52%		
																		Peringkat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
13	Menurunkan Jumlah FM, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya sebesar 1% dari Target	**Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo**	**Meningkatnya Fungsi Sosial PMKS Penerima Manfaat Melalui Pelaksanaan Pelayanan, Perlindungan dan Rehsos;**	**100%**	**9,576,586,875**	**100%**	**4,667,149,022**	**100%**	**828,076,936**		-		**196,603,500**		**351,982,000**		**274,521,400**			**100.00%**	**99.40%**		**5,490,255,922**	**31.67%**	**31.58%**		
13.1.		Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Panti Asuhan/ Jompo	Terpeliharanya Bangunan Panti/ Wisma	16 wisma	3,200,000,000	4 wisma	596,205,150	wisma		wisma		wisma		wisma		wisma		0 wisma	-	0.00%	0.00%	4 wisma	596,205,150	25.00%	18.63%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
13.2.		Kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan bagi Lanjut Usia	Jumlah Lanjut Usia Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Rehsos	100 LU	6,036,586,875	55 LU	4,062,123,784	0 LU		LU	-	LU		LU		LU		0 LU	-	0.00%	0	50 LU	4,062,123,784	50.00%	67.29%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
13.3.		Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Lanjut Usia dalam Panti	Terciptanya Lanjut Usia yang Berdayaguna	4 Keg	140,000,000	Keg		Keg		Keg		Keg		Keg		Keg		0 Keg	-	0.00%	0.00%	0 Keg	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
13.4.		Kegiatan Bimbingan Mental dan Sosial bagi Lanjut Usia dalam Panti	Terlaksanasnya Bimbingan Mental dan Sosial bagi Lanjut Usia dalam Panti	5 Keg	100,000,000	Keg		Keg		Keg		Keg		Keg		Keg		0 Keg	-	0.00%	0.00%	0 Keg	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
13.5.		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Panti	Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional Panti	5 unit	100,000,000	1 unit	8,820,088	unit		unit		unit		unit		unit		0 unit	-	0.00%	0.00%	1 unit	8,820,088	20.00%	8.82%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	*Tersedianya pemakanan dan perbekalan kesehatan di dalam panti*					*2 Keg*	*828,076,936*	*Keg*		*1 Keg*	*196,603,500*	*1 Keg*	*351,982,000*	*Keg*	*274,521,400*	*2 Keg*	*823,106,900*	100.00%	99.40%	*2 Keg*	*823,106,900*	0.00%	0.00%	*Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut*	

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provisi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 5 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K			
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	99.40%			31.67%	31.58%		
																		Peringkat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
14		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Meningkatnya Fungsi Sosial PMKS Eks Penyandang Penyakit Sosial Melalui Pelaksanaan Pelayanan, Perlindungan dan Rehsos;	11%	1,287,472,081	1.5%	324,349,000	100%	72,693,200		-		965,398		-		65,531,394		66,496,792	100.00%	91.48%		390,845,792	21.28%	43.98%		
14.1	Menurunkan Jumlah PM, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya terbesar 1% dari Target	Kegiatan Pembangunan Pusat Bimbingan/ Konseling bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Sarana Sosial Eks Penyandang Penyakit Sosial yang dibangun/direhabilitasi	1 unit	500,000,000	0 unit		unit		unit		unit	0	unit		unit		0 unit	-	0.00%	0.00%	0 unit	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
14.2		Kegiatan Bimbingan Sosial Keterampilan bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Tuna Sosial yang berhasil dibantu dan direhabilitasi	282 orang	737,472,081	60 orang	324,349,000	orang		orang		oran	-	orang	-	orang		0 orang	-	0.00%	0.00%	60 orang	324,349,000	21.28%	43.98%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
14.3		*Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya di Luar Panti*	*Tersedianya permakanan bagi Tuna Sosial*					15 orang	72,693,200	orang		oran	965,398			*15* oran	*65,531,394*	15 orang	66,496,792	100.00%	91.48%	15 orang	66,496,792			Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
14.4		Kegiatan Hari Anti Narkoba Internasional	Terlaksananya Hari Anti Narkoba Internasional	5 Keg	50,000,000	Keg		Keg		Keg		Keg	0	Keg		Keg		0 Keg	-	0.00%	0.00%	0 Keg	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	91.48%			21.28%	43.98%		
																		Peringkat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
15		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesos; Persentase SDM Kesos, Pendamping dan Lembaga Kesos yang Meningkat Kualitasnya dalam Penyelenggaraan Kesos	20,72%	4,739,212,250	8.92%	4,580,003,250	3%	174,497,431		-		-		144,113,260		20,552,000		164,665,260	100.00%	94.37%		4,744,668,510	457.08%	256.75%		
15.1.	Pengemlangan Kapasitas SDM dan Kelembagan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kegiatan Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesos Mitra	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	283 PSKS	466,477,864	106 PSKS	825,779,400	11 PSKS	174,497,431	PSKS		PSKS		11 PSKS	144,113,260	PSKS	20,552,000	11 PSKS	164,665,260	100.00%	94.37%	117 PSKS	990,444,660	41.34%	212.32%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
15.2.		Pembinaan/ Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina/ diberdayakan	5 KT	150,000,000	129 KT	1,700,100,000	KT		Keg		Keg		Keg		Keg		0 Keg	-	0.00%	0.00%	129 Keg	1,700,100,000	2580.00%	1133.40%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
15.3.		Sosialisasi Permensos RI No. 77/HUK/2010	Terinformasikannya Permensos RI No. 77/HUK/2010	23 Lok	912,292,386	11 Lok	432,133,750	Lok		Lok		Lok		Lok		Lok		0 Lok	-	0.00%	0.00%	11 Lok	432,133,750	47.83%	47.37%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
15.4.		Kegiatan Pelaksanaan Bhakti Sosial Karang Taruna	Terlaksananya Bulan Bhakti Karang Taruna	9 Lok	1,350,000,000	3 Lok	403,393,000	Lok		Lok		Lok		Lok		Lok		0 Lok	-	0.00%	0.00%	3 Lok	403,393,000	33.33%	29.88%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
15.5.		Kegiatan Jaringan Kerja Karang Taruna Daerah	Terlaksananya Jaringan Kerja Karang Taruna Daerah	5 Keg	685,000,000	1 Keg	227,512,600	Keg		Keg		Keg		Keg		Keg		0 Keg	-	0.00%	0.00%	1 Keg	227,512,600	20.00%	33.21%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
15.6.		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional KT	Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional Untuk Karang Taruna Daerah	5 TA	1,175,442,000	1 TA	991,084,500	TA		TA		TA		TA		TA		0 TA	-	0.00%	0.00%	1 TA	991,084,500	20.00%	84.32%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	94.37%			407.08%	256.75%		
																		Peringkat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalo (2017 s.d. 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provisi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 5 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
16		**Program Pelestarian Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial**	**Meningkatnya Nilai-Nilai Kebangsaan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial; Cakupan Partisipasi dalam Peningkatan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial**	**50 Keg**	**2,826,733,625**	**26 Keg**	**1,097,838,600**	**4 Keg**	-	-		-		-		-		-	**0.00%**	**0.00%**		**1,097,838,600**	**39.51%**	**38.70%**		
16.1.		Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Kebangsaan	Terlaksanannya Ziarah ke TMP/MPN dan Makam Mantan Gubernur	23 Keg	1,888,733,625	14 Keg	736,265,000	Keg	-	Keg		Keg		Keg		Keg		0 Keg	-	0.00%	0.00%	14 Keg	736,265,000	60.87%	38.98%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
16.2.	Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)	Terlaksanannya Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	5 Keg	70,000,000	1 Keg	12,030,000	Keg		Keg		Keg		Keg		Keg		0 Keg	-	0.00%	0.00%	1 Keg	12,030,000	20.00%	17.19%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
16.3.		Kegiatan Penilaian/ Pengkajian Gelar Daerah/Gelar Pahlawan	Terlaksanannya Rapat/ PGD	8 Keg	56,000,000	3 Keg	21,600,000	Keg		Keg		Keg		Keg		Keg		0 Keg	-	0.00%	0.00%	3 Keg	21,600,000	37.50%	38.57%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
16.4.		Kegiatan Seminar Pengusulan Gelar Daerah/ Pahlawan	Terlaksanannya Seminar Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	8 Keg	560,000,000	3 Keg	159,010,000	Keg		Keg		Keg		Keg		Keg		0 Keg	-	0.00%	0.00%	3 Keg	159,010,000	37.50%	28.39%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
16.5.		Kegiatan Sidang Tim Pengkaji dan Peneliti Gelar Daerah	Terlaksanannya Sidang Tim Pengkaji dan Peneliti Gelar Daerah	12 Keg	240,000,000	5 Keg	168,933,600	Keg		Keg		Keg		Keg		Keg		0 Keg	-	0.00%	0.00%	5 Keg	168,933,600	41.67%	70.39%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
16.6.		Kegiatan Penyusunan Usulan Gelar Daerah/ Gelar Pahlawan	Tersedianya Laporan Pengusulan Gelar Pahlawan/ Dokumen Usulan Gelar Pahlawan	12 Keg	12,000,000	Keg		Keg		Keg		Keg		Keg		Keg		0 Keg	-	0.00%	0.00%	0 Keg	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
16.7		Kegiatan Penanaman Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial	Terlaksanannya Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	3 Keg	143,000,000			0 Keg		Keg		Keg		Keg		Keg		0 Keg	-			0 Keg	-	0.00%	0.00%		
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%			39.51%	38.70%		
																			Peringkat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
17		**Program Pemantapan Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan PSKS**	**Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Melalui Ketersediaan Data PMKS dan PSKS; Tersedianya Data PMKS dan PSKS yang terupdate**	**100%**	**855,000,000**	**100%**	**563,182,900**		-	-		-		-		-		-	**0.00%**	**0.00%**		**563,182,900**	**43.33%**	**71.58%**		
17.1.	Menurunkan Jumlah PM, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya sebesar 1% dari Target	Kegiatan Pengumpulan Data PMKS dan PSKS	Tersedianya data PMKS dan PSKS	2 Keg	75,000,000	1 Keg	30,103,500	Keg		Keg		Keg		Keg		Keg		0 Keg	-	0.00%	0.00%	1 Keg	30,103,500	50.00%	40.14%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
17.2.		Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS	Terlaksanannya Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS	5 Keg	750,000,000	4 Keg	500,729,400	Keg		Keg		Keg		Keg		Keg		0 Keg	-	0.00%	0.00%	4 Keg	500,729,400	80.00%	66.76%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
17.3.		Kegiatan Pengolahan dan Penyusunan Database PMKS dan PSKS	Tersedianya Database PMKS dan PSKS	3 Dok	30,000,000		32,350,000	%		%		%		%		%		0 %	-	0.00%	0.00%	0 %	32,350,000	0.00%	107.83%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
17.4.		*Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi*	*Terseleksinya Data DTKS yang terupdate*					%		%		%		%		%		0 %	-	*0.00%*	*0.00%*	*0 %*	-			*Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut*	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%			43.33%	71.58%		
																			Peringkat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sedang		
18		**Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial**	**Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Melalui Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sosial; Jumlah Sarana dan Prasarana Sosial yang dibangun/ direhabilitasi**	**10 unit**	**2,998,037,500**	**6 unit**	**663,206,000**		-	-		-		-		-		-	**0.00%**	**0.00%**		**4 unit**	**663,206,000**	**75.00%**	**33.17%**		
18.1.		Kegiatan Rehabilitasi TMPN	Jumlah TMPN yang direhabilitasi	2 unit	513,037,500	2 unit	159,934,000	unit		unit		unit		unit		unit		0 unit	-	0.00%	0.00%	2 unit	159,934,000	100.00%	31.17%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
18.2.		Kegiatan Rehabilitasi MPN	Jumlah MPN yang direhabilitasi	2 unit	360,000,000	1 unit	179,900,000	unit		unit		unit		unit		unit		0 unit	-	0.00%	0.00%	1 unit	179,900,000	50.00%	49.97%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
18.3.		Kegiatan Rehabilitasi Panti Sosial LU	Jumlah Panti Sosial LU milik Masyarakat yang direhabilitasi	4 unit	575,000,000	2 unit	273,372,000	unit		unit		unit		unit		unit		0 unit	-	0.00%	0.00%	2 unit	273,372,000	50.00%	47.54%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
18.4.		Kegiatan Pembangunan Panti Sosial Lanjut Usia Eksklusif	Jumlah Panti Sosial LU Eksklusif yang dibangun	2 unit	300,000,000	unit		unit		unit		unit		unit		unit		0 unit	-	0.00%	0.00%	0 unit	-	0.00%	0.00%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
18.5		Pembangunan Rumah Singgah/Shelter [illegible]	Jumlah rumah singgah/shelter yang dibangun	1 unit	1,250,000,000	1 unit	50,000,000	unit		unit		unit		unit		unit		0 unit	-	0.00%	0.00%	1 unit	50,000,000	100.00%	4.00%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%			60.00%	33.17%		
																			Peringkat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalo (2017 s.d. 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provisi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
19		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembinaan Anak dan Remaja**	**Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Program Melalui Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sosial; Jumlah Sarana dan Prasarana Sosial yang dipelihara**	**6 unit**	**260,000,000**	**5 unit**	**171,702,000**	**unit**	-	**unit**	-	**uni t**	-	**unit**	-	**uni t**	-	**unit**	-	**0.00%**	**0.00%**	**5 unit**	**171,702,000**	**90.00%**	**70.88%**		
19.1		Kegiatan Rehabilitasi Wisma Pelatihan	Terpeliharanya Wisma Pelatihan Anak Terlantar	5 unit	100,000,000	4 unit	91,830,000	unit		unit		unit		unit		unit		unit	-	0.00%	0.00%	4 unit	91,830,000	80.00%	91.83%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
19.2		Kegiatan Rehabilitasi Balai Pelatihan	Terpeliharanya Balai Pelatihan Anak Terlantar	1 unit	160,000,000	1 unit	79,872,000	unit		unit		unit		unit		unit		unit	-	0.00%	0.00%	1 unit	79,872,000	100.00%	49.92%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%			90.00%	70.88%		
																		Peringkat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sedang		
20		**Program Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial**	**Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Program Melalui Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sosial**	**10 Keg**	**240,950,000**	**3 Keg**	**88,300,000**	**1 Keg**	**24,182,130**	**Keg**	-	**Keg**	-	**1 Keg**	**12,356,500**	**- Keg**	**11,809,000**	**1 Keg**	**24,165,500**	**100.00%**	**99.93%**	**5 Keg**	**112,465,500**	**50.00%**	**44.62%**		
20.1		Kegiatan Sosialisasi Program UGB dan RTS	Terlaksanannya Kegiatan Sosialisasi	5 Keg	135,950,000	2 Keg	58,250,000	1 Keg	24,182,130	Keg		Keg		1 Keg	12,356,500	Keg	11,809,000	1 Keg	24,165,500	100.00%	99.93%	3 Keg	82,415,500	60.00%	60.62%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
20.2		Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pemantauan UGB dan RTS	Terlaksanannya Koordinasi Lintas Sektor	5 Keg	105,000,000	2 Keg	30,050,000	- Keg	-	Keg		Keg		Keg		Keg		0 Keg	-	0.00%	0.00%	2 Keg	30,050,000	40.00%	28.62%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	99.93%			50.00%	44.62%		
																		Peringkat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
21		**Program Bantuan Pangan Non Tunai**	**Terkoordinasinya bantuan pangan non tunai**	**15 keg**	**1,330,000,000**	**5 keg**	**73,661,000**	**2 keg**	**102,091,014**	**- keg**	-	**1 keg**	**34,001,300**	**- keg**	**19,516,200**	**- keg**	**13,591,000**	**1 keg**	**67,108,500**	**50.00%**	**65.73%**	**6 keg**	**140,769,500**	**51.14%**	**168.45%**		
21.1		Kegiatan Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan	Terlaksanannya kegiatan rapat koordinasi bansos pangan	11 keg	1,210,000,000	3 keg	29,550,000	keg		keg		keg		keg		keg		0 keg	-	0.00%	0.00%	3 keg	29,550,000	27.27%	244.21%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
21.2		Kegiatan Monitoring Evaluasi Bantuan Sosial Pangan	Terlaksanannya kegiatan monitoring koordinasi bansos pangan	4 keg	120,000,000	2 keg	44,111,000	2 keg	102,091,014	keg		1 keg	34,001,300	keg	19,516,200	keg	13,591,000	1 keg	67,108,500	50.00%	65.73%	3 keg	111,219,500	75.00%	92.68%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50.00%	65.73%			51.14%	168.45%		
																		Peringkat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah			Rendah	Sangat Tinggi		
22		**Program Layanan Rujukan Terpadu**	**Terkoordinasinya program layanan dan rujukan terpadu**	**6 Keg**	**375,000,000**	**2 Keg**	**86,700,000**	**0 Keg**	-	**Keg**	-	**Keg**	-	**Keg**	-	**Keg**	-	**Keg**	-	**0.00%**	**0.00%**	**2 Keg**	**86,700,000**	**33.33%**	**23.82%**		
22.1		Kegiatan Rapat Koordinasi Program SLRT	Terlaksanannya rapat koordinasi program SLRT	3 Keg	200,000,000	1 Keg	26,600,000	- Keg	-	Keg		Keg		Keg		Keg		0 Keg	-	0.00%	0.00%	1 Keg	26,600,000	33.33%	13.30%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
22.2		Kegiatan Sosialisasi Program SLRT dan Puskesos	Terlaksanannya Sosialisasi SLRT dan Puskesos	3 Keg	175,000,000	1 Keg	60,100,000	- Keg	-	Keg		Keg		Keg		Keg		0 Keg	-	0.00%	0.00%	1 Keg	60,100,000	33.33%	34.34%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%			33.33%	23.82%		
																		Peringkat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 5 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
23		**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Terpeliharanya TMP Nasional Provinsi**					**1 Keg**	**435,080,137**	**1 Keg**	**87,100,094**	**Keg**	**58,066,729**	**Keg**		**Keg**		**1 Keg**	**145,166,823**	**100.00%**	**99.70%**	**1 Keg**	**145,166,823**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut**	
23.1		*Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi*	*Jumlah TMP yang dipelihara*					*1 Keg*	*435,080,137*	*Keg*	*87,100,094*	*Keg*	*58,066,729*	*Keg*	*109,896,374*	*Keg*	*178,726,897*	**1** *Keg*	433,790,094	100.00%	99.70%	*1 Keg*	433,790,094	#DIV/0!	*#DIV/0!*		
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)		*100.00%*	*99.70%*			#DIV/0!	*#DIV/0!*		
																				Peringkat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							*943,744,843*				*418,346,634*																
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																											
		Sub Kegiatan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan						*12 Bulan*	*3,959,759*					*9 Bulan*	*949,000*	*3 bulan*	*3,009,000*	12 *Bulan*	3,958,000	100.00%	99.96%	12 *Bulan*	3,958,000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu						*12 Bulan*	*2,200,000*							*12 bulan*	*2,170,000*	12 *Bulan*	2,170,000	100.00%	98.64%	12 *Bulan*	2,170,000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan																											
		Sub Kegiatan Pengadaan Jasa Surat Menyurat						*12 Bulan*	*125,914,005*		*6 Bula*	*72,851,659*	*3 Bulan*	*27,690,555*	*3 bulan*	*14,299,948*	12 *Bulan*	114,842,162	100.00%	91.21%	12 *Bulan*	114,842,162	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut	
		Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						*12 Bulan*	*271,220,000*		*6 Bula*	*83,252,058*	*3 Bulan*	*56,783,692*	*3 bulan*	*59,946,253*	12 *Bulan*	199,982,003	100.00%	73.73%	12 *Bulan*	199,982,003	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Sosial, BPAR, BPLU	
		Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor						*12 Bulan*	*13,500,000*		*6 Bula*	*6,000,000*			*6 bulan*	*7,500,000*	12 *Bulan*	13,500,000	100.00%	100.00%	12 *Bulan*	13,500,000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPAR	
		Sub Kegiatan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						*12 Bulan*	*212,385,584*		*6 Bula*	*110,286,697*	*3 Bulan*	*50,727,828*	*3 Bula*	*49,215,827*	12 *Bulan*	210,230,352	100.00%	98.99%	12 *Bulan*	210,230,352	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut, BPAR	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						*1 Thn*	*314,565,495*		*1 Tahu*	*145,956,220*		*68,514,988*		*98,563,999*	1 Tahun	313,035,207	100.00%	99.51%	1 Tahun	313,035,207	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Sosial, BPLU	
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							23,837,787,100		448,080,280		10,971,139,341		4,365,381,767		4,872,367,238		20,656,968,626										
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 23)																		**96.88%**	**96.64%**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 23)																		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Tinggi**	**Sedang**		
		FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA	:																										
		FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA	: SEBAGIAN ANGGARAN DIGESER UNTUK PENANGANAN COVID 19																										
		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA																											

- Ada beberapa Program/Kegiatan ditahun 2021 tidak ada realisasi anggaran karena sudah mengalami Refocusing serta tidak memiliki anggaran
- Dari 23 Program terasisa 16 Program yang memiliki anggaran

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 5 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

EVALUASI HASIL TERHADAP RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021 TRIWULAN III

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja :

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (2019 dan 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2021		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TAHUN 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Provinsi s/d Tahun 2021 (%)		Unit PD Penanggung jawab	Ket
										TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp			
		Urusan Wajib																											
		Ketenagakerjaan			**76,063,562,163**	**124,360**	**14,184,028,005**			#								**190**	**3,989,019,292**				**16,796,354,707**	**440,206,961**		**19**			
1	Penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran SKPD selama 1 (satu) TA	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**			**8,551,548,860**	**120**	**4,940,765,904**	**60**	**1,036,539,385**	**##**	**191,642,318**	**-**	**-**	**12**	**128,926,195**	**15**	**1,084,818,435**	**39**	**1,405,386,948**	**325.00%**	**1840.75%**	**159**	**6,346,152,852**	**265%**		**311%**			
		1. Penyediaan kebutuhan administrasi umum	- Tersedianyan kebutuhan administrasi	60	5,784,913,704	24	4,143,456,881	12	528,537,636	3	103,775,323	0		3		3	528,537,636	9	632,312,959	75%	119.63%	33	4,775,769,840	55%		83%			
		2. Penyediaan kebutuhan administrasi keuangan	- Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan	60	910,204,000	24	117,142,601	12	347,861,539	3	83,041,295	0		3	128,926,195	3	222,052,837	9	434,020,327	75%	124.77%	33	551,162,928	55%		61%			
		3. Penyediaan kebutuhan administrasi barang dan jasa	- Tersediannya kebutuhan administrasi barang dan jasa	60	386,014,356	24	82,013,156	12	14,939,902	3	0	0		3		3	207,987,377	9	207,987,377	75%	1392.16%	33	290,000,533	55%		75%			
		4. Penyediaan kebutuhan administrasi kepegawaian	- Tersedianya kebutuhan administrasi	60	175,000,000	24	44,950,000	12	24,289,598	3	4,825,700	0		3		3	24,289,598	9	29,115,298	75%	119.87%	33	74,065,298	55%		42%			
		5. Penunjang pelaksanana rapat koordinasi dan konsultasi	- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	60	1,295,416,800	24	553,203,266	12	120,910,710	0	0	0	0	0		3	101,950,987	3	101,950,987	25%	84.32%	27	655,154,253	45%		51%			
																		Rata-rata Capaian Kinerja per-Program		65.00%	368.15%			53%		62%			
																		Predikat kinerja per-Program		sedang	tinggi			sedang		sedang			
2	Pengadaan, Pemeliharaan dan rehab sarana dan prasarana aparatur	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**			**4,808,669,703**	**91**	**2,401,375,037**	**40**	**1,327,075,233**	**10**	**24,777,400**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1,298,544,534**	**30**	**1,323,321,934**	**300%**	**413.72%**	**121**	**3,724,696,971**	**473%**		**521%**			
		1 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	- Terlaksananya peralatan/perlengkapan gedung kantor selama 12 (dua belas) bulan	60	2,099,081,798	24	162,889,200	12	172,256,321	3	7,127,400	0		3		3	152,125,900	9	159,253,300	75%	92.45%	33	322,142,500	55%		15%			
		2 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor	- Terlaksananya pemeliharaan 4 (empat) gedung kantor selama 1 (satu) tahun	20	545,000,000	12	436,394,810	4	797,146,382	1		0		1		1	789,099,500	3	789,099,500	75%	98.99%	15	1,225,494,310	75%		225%			
		3 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	- Terlaksananya rehab gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Sulut	3	550,000,000	7	559,066,641	0	0.0	0	0.0	0		0		0	0	0	0	0%	0.00%	7	559,066,641	233%		102%	UPTD		
		4 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Terlaksananya pemeliharaan berkala kendaraan dinas/ operasional selama 12 (dua belas) bulan	60	1,132,440,604	24	979,039,286	12	321,922,530	3	10,850,000	0		3		3	321,569,134	9	332,419,134	75%	103.26%	33	1,311,458,420	55%		116%			
		5 Pemeliharan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor	- Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama 1 (satu) anggaran	60	482,147,301	24	263,985,100	12	35,750,000	3	6,800,000	0		3		3	35,750,000	9	42,550,000	75%	119.02%	33	306,535,100	55%		64%			
																		Rata-rata Capaian Kinerja per-Program		75.00%	82.74%			95%		104%			
																		Predikat kinerja per-Program		sedang	tinggi			sangat tinggi		sangat tinggi			
3	Pengadaan pakaian Dinas/lapangan/khusus beserta perlengkapannya bagi Pegawai	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**			**584,400,000**	**450**	**229,150,000**	**150**	**108,000,000**	**3**	**0.0**	**-**	**-**		**0**		**108,000,000**		**108,000,000**	**0%**	**100%**			**60%**		**58%**			
		1. Pengadaan Pakaian Dinas/lapangan/khusus beserta perlengkapannya	- Tersedianya pakaian dinas Dinas/lapangan/khusus pegawai beserta perlengkapannya	750	584,400,000	450	229,150,000	150	108,000,000	0	0.0	0	0	0	0	0	108,000,000	0	108,000,000	0%	100.00%	450	337,150,000	60%		58%	Dinas, UPTD		
																		Rata-rata Capaian Kinerja per-Program		0%	100%			60%		58%			
																		Predikat kinerja per-Program		rendah	tinggi			sedang		sedang			
4		**PROGRAM PENINGGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**					**58,514,090**		-	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		**0**			**1**	**0**	**0%**	**0%**	**200%**	**58,514,090**	**40%**		**100%**			
		1 Pelatihan Kantor Sendiri	- tersosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bagi ASN/stake holder dan terfaksananya diklat	5	147,758,000	1	58,514,090	0	0.0	0	0.0	0		1	0	0	0	1	0	0%	0.00%	2	58,514,090	40%		100%			
		2																Rata-rata Capaian Kinerja per-Program		0%	0%			40%		100%			
																		Predikat kinerja per-Program		rendah	rendah			rendah		sangat tinggi			
5	partisipasi dalam kegiatan pameran/promosi	**Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan**			**73,202,600**	**1**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			-	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**1**	-	**20%**		**0%**			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (2019 dan 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2021		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TAHUN 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Provinsi s/d Tahun 2021 (%)		Unit PD Penanggung jawab	Ket
										TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV													
		1. Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi	Terfaksananya pameran dan promosi	5 pameran	73,202,600	1 pameran		0 pameran	0.0	0	0.0	0	0	0 kgt	0	0 keg	0	0 kgt	0	0%	0%	1 kgt	-	20%		0%	Dinas	
																		Rata-rata Capaian Kinerja per-Program		0%	0.00%			20%		0%		
																		Predikat kinerja per-Program		sangat rendah	sangat rendah			sangat rendah		sangat rendah		
6	Tersusunnya LKIP, Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Bulanan, LPPD dan LKPJ	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**			**1,105,573,200**	**64**	**186,239,900**	**22**	**414,533,251**	**3**	**76,423,011**		-		-		**407,827,877**	**10**	**484,250,888**	**175%**	**487%**	**74**	**670,490,788**	**315%**		**265%**		
		1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan LKIP	25 dokumen	220,000,000	20 doc	31,944,000	5 doc	24,054,599	0 dok	9,998,011	0 dokumen		0 Dolumen		0 dok	24,054,599	0 dokumen	34,052,610	0%	141.56%	20 dok	65,996,610	80%	dok	30%	Dinas	
		2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	5 semester	220,000,000	4 doc	26,704,200	1 semester	151,971,911.0	0 sem	0			1 Semester		0 sem	151,971,730	1 sem	151,971,730	100%	100.00%	5 dok	178,675,930	100%	dok	81%	Dinas, UPTD	
		3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan neraca dan LRA	20 dokumen	150,000,000	16 doc	44,908,000	4 doc	106,089,028	0 dok		0 dokumen		0 Dokumen		0 dok	106,082,188	0 dokumen	106,082,188	0%	99.99%	16 dok	150,990,188	80%	dok	101%	Dinas, UPTD	
		4. Penyusunan Laporan Bulanan SKPD	Tersusunnya laporan keuangan dan kinerja bulanan	60 laporan	515,573,200	24 bulan	82,683,700	12 lap	132,417,713	3 lap	66,425,000	- lap		3 lap		3 lap	125,719,360	9 laporan	192,144,360	75%	145.10%	33 bln	274,828,060	55%	bln	53%	Dinas, UPTD	
																		Rata-rata Capaian Kinerja per-Program		43.75%	122%					**79%**	**124%**		
																		Predikat kinerja per-Program		rendah	tinggi			tinggi		tinggi		
7	Terciptanya pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan pekerja di perusahaan	**Program Pengawasan Tenaga Kerja dan HIPERKES**			1,510,000,000	**1,713**	**1,039,542,590**	**410**	**732,230,881**	**40**	**327,415,000**	-		-		-	440,206,851	**92**	**767,621,851**	**94%**	**376%**	**1805**	**1,807,164,441**	**760%**		**334%**		
		1. Pengujian kualitas lingkungan kerja di perusahaan	Terfaksananya Pengujian Lingkungan Kerja di Perusahaan	80 perusahaan	600,000,000	152 prsh	286,580,300	60 perusahaan	360,352,212	10 perusahaan	0.0	- prsh		5 Perusahaan		5 perush	360,352,212	20 perusahaan	360,352,212	33%	100.00%	172	646,932,512	215%	prsh	108%		
		2. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di perusahaan	Terfaksananya Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja di Perusahaan	350 tenaga kerja	380,000,000	1,505 TK	296,525,200	300 tenaga kerja	292,024,030	20 orang	256,990,000	- org		30 Orang		0 org		50 orang	256,990,000	17%	88.00%	1,555	553,515,200	444%	org	146%		
		3. monitoring evaluasi dan pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	40 perusahaan	90,000,000	27 Kab/Kota	36,750,000	- prsh	-	-	0.0	-				0 perush		0 prsh	0	0%	0.00%	27	36,750,000	68%		41%		
		4. Kalibrasi Alat K3	Terfaksananya kalibrasi alat K3	50 alat	440,000,000	10 alat	175,954,690	- alat	-	- alat	0.0	- alat		0 Alat		0 alat		0 alat	0	0%	0.00%	10	175,954,690	20%	alat	40%		
		5. Pemeriksaan pengaduan kasus norma ketenagakerjaan	Terfaksananya pemeriksaan pengaduan kasus norma ketenagakerjaan	300 kasus	1,600,000,000,000	19 kss	243,732,400	50 kss	79,854,639	10 kasus	70,425,000	- kss		10 Kasus		2 kss	79,854,639	22 kasus	150,279,639	44%	188.19%	41	394,012,039	14%	kasus	0%		
																		Rata-rata Capaian Kinerja per-Program		31.33%	75.24%			152%		67%		
																		Predikat kinerja per-Program		rendah	tinggi			sangat tinggi		sedang		
8	Tersedianya dokumen RENSTRA 2016-2020, dokumen Renja Tahunan dan Dokumen	**Program Perencanaan SKPD**			**490,659,900.00**	**8**	**94,446,800**	**2**	**18,707,751**	**1**	**0.0**	**0.0**		**0.0**		-	**18,707,751.00**	**1.0**	**18,707,751.0**	**100%**	**100.00%**	**9**	**113,154,551**	**330%**		**49%**		
		1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen RENJA yang tersusun	5 dokumen	134,659,900	4 dokumen	37,437,000	1 doc	-	1 dok	0.0	- dok		0 Dok		0 dok	0.0	0 dok	0	0%	0.00%	4 dok	37,437,000	80%	dok	28%	Dinas	
		2. Penyusunan Rencana Kerja anggaran	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	2 dokumen	356,000,000	4 dokumen	57,009,800	1 doc	18,707,751	0	0.0	0 dok		0 dok	0.0	1 dok	18,707,751	1 dok	18,707,751	100%	100.00%	5 dok	75,717,551	250%	dok	21%	Dinas	
																		Rata-rata Capaian Kinerja per-Program		100%	50.00%			165%		25%		
																		Predikat kinerja per-Program		rendah	rendah			sangat tinggi		rendah		
9	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas**		**5,295**	**50,774,728,700**	**1,926**	**3,631,629,280**	**1,000**	**311,179,671**	**2**	**-**	**27**		**-**		-	0	**29**	**311,179,671**	**103%**	**100%**	**1,955**	**3,942,808,951**	**191%**		**125%**		
		1 Pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	2855 pencari kerja	20,483,652,500	1,336 pencari kerja	1,449,262,000	1,000 Pencaker	267,314,048	0 Pencaker	0.0	25 Pencaker		0 Pencaker	0.0	0 Pencaker	267,314,048	25 pencaker	267,314,048	3%	100.00%	1,361 pencari kerja	1,716,576,048	48%	pencaker	8%	UPTD Balai Ptk	
		2 Pelatihan Kewirausahaan/ Wira Usaha Baru	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kewirausahaan / Wira Usaha baru yang produktif	1000 org	6,347,423,700	375 org	1,940,550,930	0 org	0.0	0 org	0.0	0 org	0.0	0 org	0.0	0 org	0.0	0 orng	0	0%	0.00%	375 org	1,940,550,930	38%	org	31%	UPTD Balai Ptk	
		3 monitoring evaluasi dan pelaporan	Terfaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	15 Kab/Kota	60,000,000	15	49,350,000	0 Kab/kota	0.0	0 Kab/kota	0.0	0 Kab/kota	0.0	0 Kab/kota	0.0	0 Kab/kota	0.0	0 kab/kota	0	0%	0.00%	15	49,350,000	100%		82%	UPTD Balai Ptk	
		4 Pemagangan Luar Negeri	Terfaksananya pemagangan ke jepang	800 org	3,400,000,000	50 org	126,065,750	0 org	0.0	0 org	0.0	0 org	0.0	0 org	0.0	0 org	0.0	0 orng	0	0%	0.00%	50 org	126,065,750	6%	org	4%	Dinas	
		5 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan produktif,berdaya saing	625 org	20,483,652,500	150	66,400,600	0 org	0.0	0 org	0.0	0 org	0.0	0 org	0.0	0 org	0.0	0 org	0	0%	0.00%	150	66,400,600	24%		0%	UPTD Balai Ptk	
		6 Akreditasinya Instruktur dan Lembaga UPTD PTK dan Transmigrasi		4	250,000,000		0	4 org	43,865,623	2 org	0.0	2 org		0 org	0.0	0 org	43,865,623	4	43,865,623	100%	100.00%	4	43,865,623	100%		18%		
																		Rata-rata Capaian Kinerja per-Program		51.25%	16.67%			32%		21%		
																		Predikat kinerja per-Program		sangat rendah	sangat rendah			sangat rendah		sangat rendah		
10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	**Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja**			**2,653,026,000**	**415**	**191,255,000**	**400**	**104,539,058**	**0.0**	**0.0**					-	0	**0**	**0.0**	**0.00%**	**0.00%**	**415**	**191,255,000**	**52%**		**21%**		
		1 Penempatan tenaga kerja antar kerja lokal (AKL)	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	1250 org	2,397,700,000	400 org	154,350,000	400 org	104,539,058.0	0 orng	0.0	0 org	0.0	0 org	0.0	0 orng	0.0	0 orng	0	0%	0.00%	400 org	154,350,000	32%	org	6%	Dinas	
		2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terfaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	75 Kab/Kota	255,326,000	15 kab/kota	36,905,000	- Kab/Kota	0.0	0 kab/kota	0.0	0	0.0	0 kab/kota	0.0	0 kab/kota	0.0	0 kab/kota	0	0%	0.00%	15 kab/kota	36,905,000	20%	kab/kota	14%	Dinas	
																		Rata-rata Capaian Kinerja per-Program		0.00%	0.00%			17%		7%		
																		Predikat kinerja per-Program		sangat rendah	sangat rendah			rendah		sangat rendah		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (2019 dan 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2021		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TAHUN 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Provinsi s/d Tahun 2021 (%)			Unit PD Penanggung jawab	Ket
										TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV														
11	Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan	**Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**			**2,015,491,200**	**119,242**	**528,156,200**	**101**	**123,051,774**	**0.0**	**1,522,800.0**				**10,881,008**			**4**	**0.0**	**103%**	**0%**	**119,246**	**528,156,200**	**8648%**		**94%**			
		1 peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja	- Jumlah pekerja/masyarakat yang menjadi peserta BPJS	1,400 org	250,000,000	118,510 org	45,266,400	0 org	0.0	0 org	0.0	0 org	0.0	0 org	0.0	0 org	0.0	0 org	0	0%	0.00%	118,510	45,266,400	8465%	org	18%	Dinas		
		2 Penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP)	- Penetapan UMP melalui Peraturan Gubernur	5 Pergub	1,290,491,200	2 Pergub	397,962,200	1 Pergub	98,050,000	0 pergub	0.0	0 pergub	0.0	0 pergub	0.0	1 pergub	98,050,000	1 pergub		100%	0.00%	3 Pergub	397,962,200	60%	Pergub	31%	Dinas		
		3 Peningkatan Kapasitas Pengurus SPSB/ Peningkatan Kelembagaan HI		650	175,000,000	650 0rang	74,806,800	0 orang	0.0	0 orang	0.0	0 orang	0.0	0 orang	0.0	0 Org	0.0	0 orang	0	0%	0.00%	650 orang	74,806,800	100%	org	43%			
		4 penyelesaian kasus hubungan industrial		360 kss	550,000,000	80 kss	10,120,800	100 kss	25,001,774	0 kss	1,522,800.0	0 kss	9,370,908.0	0 kss	10,881,008.0	3 kss	2,476,092	3 kss		3%	0.00%	83	10,120,800	23%	kss	2%			
		5 monitoring evaluasi dan pelaporan		15 kab	220,000,000		34,666,400	0 kab/kota	0.0	0 kab/kota	0.0	0 kab/kota	0.0	0 kab/kota	0.0	0 kab/kota	0.0	0											
																			Rata-rata Capaian Kinerja per-Program		52%	0%				23%			
																			Predikat kinerja per-Program		sangat rendah	sangat rendah				rendah			
12	Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan	**Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan**			**1,403,178,000**	**260**	**415,350,600**	**170**	**269,393,225**	**16**	**108,940,600**		-		-		**119,022,000**	**76**	**227,962,600**	**132%**	**157%**	**336**	**643,313,200**	**336%**		**237%**			
		1 Pengawasan Objek Pengujian K3 di perusahaan	- Jumlah pengujian dan pengelolaan K3 di perusahaan	250 prsh	728,178,000	150 prsh	61,675,000	60	9496330.0	0	0.0	60 perusahaan		0 Perusahan	0		94,591,300	60 prsh	94,591,300	100%	99.61%	210 prsh	156,266,300	84%	prsh	21%	Dinas		
		2 pemeriksaan kasus norma ketenagakerjaan		50 kasus	500,000,000	60	121,200,000	60	24,430,790	0	22,311,500.0	0		0 Kasus	0	20	24,430,700	0 kss	46,742,200	0%	0.00%	60	167,942,200	120%	kasus	34%			
		3 peningkatan penerapan sistem K3 di perusahaan	- Meningkatnya penerapan sistem K3 di perusahaan	50 prsh	175,000,000	50 prsh	232,475,600	50	149,999,132	16 prsh	86,629,100	0		0 Prsh	0			16 prsh	86,629,100	32%	57.75%	66	319,104,700	132%	prsh	182%	Dinas		
																			Rata-rata Capaian Kinerja per-Program		44.00%	52.45%				84%		59%			
																			Predikat kinerja per-Program		rendah	rendah				tinggi		sedang			
13	Tersusunnya dokumen perencanaan dan database yang baik serta meningkatnya SDM dalam menyusun dokumen perencanaan	**Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan**			**2,093,084,000**	**70**	**467,602,604**	**30**	**110,607,896**	**0**	**0.0**				-		**150,959,500**	**0**	**110,209,500.0**	**0.00%**	**0.00%**	**71**	**577,812,104**	**247%**		**103%**			
		1 Penyusunan data base tenaga kerja daerah	- Jumlah dokumen database yang disusun	12 buku	976,793,000	8 buku	104,934,160	- buku	0.0	0	0.0	0		0	0	0		0	0	0%	0.00%	8 buku	104,934,160	67%	buku	11%	Dinas		
		2 Bimbingan Teknis penyusunan perencanaan tenaga kerja bagi kabupaten/kota	- Terfaksananya bimtek penyusunan perencanaan tenaga kerja	50 orang	485,000,000	60 orang	249,918,444	30 orang	110,607,896.0	0	0.0	0		0	0	30	110,209,500	0 org	110,209,500	0%	0.00%	60 orang	360,127,944	120%	orang	74%	Dinas		
		3 Penyusunan indeks pembangunan ketenagakerjaan	- Terfaksananya penyusunan indeks pembangunan ketenagakerjaan	5 dokumen	631,291,000	2 dokumen	112,750,000	- dokumen	0.0	0	0.0	0		0 dok	0	1 dok	40,750,000	1 dok		0%	0.00%	3 dok	112,750,000	60%	dok	18%	Dinas		
																			Rata-rata Capaian Kinerja per-Program		0.00%	0.00%				82%		34%			
																			Predikat kinerja per-Program		sangat rendah	sangat rendah				tinggi		rendah			
		Urusan Pilihan													**0**														
		Ketransmigrasian			**700,000,000**		**99,445,000**		**549,999,169**		**0.0**		-		**0**		**49,999,915**	**0.0**	**49,999,915.0**										
14	Tersedianya lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak berkembang dan layak lingkungan	**Program Transmigrasi Lokal**			**700,000,000**		**99,445,000**		**549,999,169**		**0.0**				**0**		**49,999,915**	**0.0**	**49,999,915.0**	0.00%	0.00%	**104**	**149,444,915**	**133%**		**43%**			
		1 inventarisasi dan pengendalian kawasan transmigrasi	- Tersedianya data pengembangan kawasan transmigrasi	4 Lokasi	350,000,000	4 lokasi	39,445,000	4 lokasi	499,999,254	- orng	0.0	0		0 Lokasi	0		-	0 lok	0	0%	0.00%	4	39,445,000	100%		11%	Dinas		
		2 pembinaan usaha dan pemberdayaan warga transmigran	- Prosentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	300 Orang	350,000,000	100 0rng	60,000,000	300 org	49,999,915	- orng	0.0	0		0	0		**49,999,915**	0	49,999,915	0%	0.00%	100	109,999,915	33%		31%	Dinas		
																			Rata-rata Capaian Kinerja per-Program		0%	0.00%				67%		21%			
																			Predikat kinerja per-Program		sangat rendah	rendah				sedang		rendah			
									5,105,857,294										4,806,641,058										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							**14,283,473,005**				-		-		-								**440206961**		**19**			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 14)									-		-		-		-					**57.73%**	**94.14%**			**29347131**		**1**			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 14)																				rendah	sedang			tinggi		sangat rendah			

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : KETERSEDIAAN ANGGARAN
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR DAN SARANA/PRASARANA YAG TERBATAS
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR MELALUI KEGIATAN BIMTEK MAUPUN DIKLAT

Ada beberapa program dan kegiatan yang tidak mencapai target dikarenakan di masa pancemic banyak kegiatan yang anggarannya di refocusing,

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	ASARA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018 dan 2019)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2020)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi /Ket.
													I			II			III			IV									
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 x 100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K		Rp	K	Rp.		
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**B**		**2,375,000,000**	**B**		**653,979,660**	**B**		**80,440,265**	**25%**		**13,845,276**	**25%**		**34,613,190**			**55,381,104**			**80,045,325**			**80,045,325**		**99.5%**		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	60	Bulan	1,500,000,000	12	Bulan	628,992,860	12	Bulan	15,896,500	3	Bulan		3	Bulan			Bulan		12	Bulan	15,648,318	12	Bulan	15,648,318	100.0%	98.4%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja SKPD	60	Bulan	625,000,000	12	Bulan	20,087,000	12	Bulan	3,031,215	3	Bulan		3	Bulan			Bulan		12	Bulan	2,913,803	12	Bulan	2,913,803	100.0%	96.1%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja ASN DPP-PAD Prov. Sulut	60	Bulan	250,000,000	12	Bulan	4,899,800	12	Bulan	61,512,550	3	Bulan	13,845,276	3	Bulan	34,613,190	3	Bulan	55,381,104	3	Bulan	61,483,204	12	Bulan	61,483,204	100.0%	100.0%		
																										Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0%	98.2%		
																										Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**		**2,462,000,000**	**100**		**160,951,200**	**100**		**115,242,409**	**0.005**		**13,845,276**	**0**		**34,613,190**			**55,381,104**			**114,905,898**			**114,905,898**		**99.7%**		
		Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya dan tertatanya Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	Unit	1,000,000,000		Unit		12	Bulan	108,583,133	3	Bulan	13,845,276	3	Bulan	34,613,190	3	Bulan	55,381,104	3	Bulan	108,253,622	12	Bulan	108,253,622	100.0%	99.7%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan	70	Jenis	1,250,000,000	14	Jenis	120,579,200	12	Bulan	3,797,296	3	Bulan		3	Bulan			Bulan		12	Bulan	3,797,296	12	Bulan	3,797,296	100.0%	100.0%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan	60	Bulan	212,000,000	12	Bulan	40,372,000	12	Bulan	2,861,980	3	Bulan		3	Bulan			Bulan		12	Bulan	2,854,980	12	Bulan	2,854,980	100.0%	99.8%		
																										Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0%	99.8%		
																										Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**0.95**		**275,000,000**	**0.95**		**47,553,458**	**0.95**		**145,598,906**			**13,845,276**			**120,613,190**			**141,381,104**			**145,506,104**			**145,506,104**		**99.9%**		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Orang/Stel	210	Stel	150,000,000	65	Stel	47,553,458	54	Stel	88,000,000	0	Stel		54	Stel	86,000,000	54	Stel	86,000,000	54	Stel	87,975,000	54	Stel	87,975,000	100.0%	100.0%		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data Administrasi Kepegawaian	210	Stel	125,000,000	42	Stel	-	12	Bulan	57,598,906	3	Bulan	13,845,276	3	Bulan	34,613,190	3	Bulan	55,381,104	3	Bulan	57,531,104	12	Bulan	57,531,104	100.0%	99.9%		
																										Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0%	99.9%		
																										Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

NO	ASAR/	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018 dan 2019)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2020)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi /Ket.
													I			II			III			IV									
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 x 100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K		Rp	K	Rp.		
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1**		**125,000,000**	**0.2**		**-**	**0.2**		**220,777,543**			**-**			**46,968,650**			**133,568,048**			**212,751,865**			**212,751,865**		**96.4%**		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan	235	Orang	125,000,000	45	Orang	-	12	Bulan	220,777,543	0	Bulan		6	Bulan	46,968,650	3	Bulan	133,568,048	12	Bulan	212,751,865	12	Bulan	212,751,865	100.0%	96.4%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0%	96.4%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100**		**150,000,000**	**33**		**-**			**653,485,001**			**-**			**-**			**-**			**643,490,500**			**643,490,500**		**98.5%**		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan/perlengkapan gedung kantor	235	Orang	150,000,000	45	Orang	-	1	Unit	580,000,001	0	Unit		0	Unit	-		Unit		1	Unit	572,400,000	1	Unit	572,400,000	100.0%	98.7%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan/perlengkapan gedung kantor	235	Orang	150,000,000	45	Orang	-	1	Paket	73,485,000	0	Paket		0	Paket	-		Paket		1	Paket	71,090,500	1	Paket	71,090,500	100.0%	96.7%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0%	97.7%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1**		**100,000,000**	**1**		**16,249,700**	**1**		**295,899,597**	**0.003**		**7,622,500**			**23,742,250**			**45,504,000**			**295,646,079**			**295,646,079**		**99.9%**		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi	25	Laporan	50,000,000	5	Laporan	11,999,800	12	Bulan	32,000,000	3	Bulan		3	Bulan	4,686,000	3	Bulan	15,014,000	3	Bulan	31,911,957	12	Bulan	31,911,957	100.0%	99.7%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	Laporan	50,000,000	1	Laporan	4,249,900	12	Bulan	263,899,597	3	Bulan	7,622,500	3	Bulan	19,056,250	3	Bulan	30,490,000	3	Bulan	263,734,122	12	Bulan	263,734,122	100.0%	99.9%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0%	99.8%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

NO	ASAR/	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018 dan 2019)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2020)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi /Ket.
													I			II			III			IV									
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 x 100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K		Rp	K	Rp.		
7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**5**		**175,000,000**	**5**		**48,038,400**	**5**		**172,762,753**			**-**			**43,535,000**			**92,973,000**			**160,875,398**			**160,875,398**		**93.1%**		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Tersedianya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	5	Dokumen	-	5	Dokum	-	12	Bulan	53,122,973	0	Bulan	-	6	Bulan	14,600,000	3	Bulan	41,085,500	3	Bulan	45,390,814	12	Bulan	45,390,814	100.0%	85.4%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	Dokumen	125,000,000	2	Dokum	38,618,500	12	Bulan	78,410,000	0	Bulan	-	6	Bulan	28,935,000	3	Bulan	40,287,500	3	Bulan	74,386,750	12	Bulan	74,386,750	100.0%	94.9%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya alat-alat perkantoran yang menunjang pelaksanaan tugas							12	Bulan	17,600,000		Bulan			Bulan		9	Bulan	11,600,000	3	Bulan	17,500,000	12	Bulan	17,500,000	100.0%	99.4%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya alat-alat listrik yang menunjang pelaksanaan tugas	10	Dokumen	50,000,000	2	Dokum	9,419,900	12	Bulan	23,629,780	0	Bulan	-	0	Bulan	-		Bulan		12	Bulan	23,597,834	12	Bulan	23,597,834	100.0%	99.9%		
																										Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0%	94.9%		
																										Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
8		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**		**100**		**41,031,273**	**33**		**41,031,273**	**33**		**134,693,797**			**6,922,638**			**80,650,995**			**106,872,234**			**133,375,984**			**133,375,984**		**99.0%**		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi PUG	5	Kegiatan	41,031,273	1	Kegiata	41,031,273	1	Kegiatan	134,693,797	1	Kegiatan	6,922,638	1	Kegiatan	80,650,995		Kegiatan	106,872,234		Kegiatan	133,375,984	1	Kegiat	133,375,984	100.0%	99.0%		
																										Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0%	99.0%		
																										Predikat Kinerja			Sangat tinggi	Sangat Tinggi		
9		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**		**100**		**41,031,273**	**33**		**41,031,273**	**33**		**428,815,546**			**350,903,902**			**350,903,902**			**350,903,902**			**428,313,602**			**428,313,602**		**99.9%**		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi Organisasi Perempuan	5	Kegiatan	41,031,273	1	Kegiata	41,031,273	1	Kegiatan	428,815,546	1	Kegiatan	350,903,902	1	Kegiatan	350,903,902		Kegiatan	350,903,902	1	Kegiatan	428,313,602	1	Kegiat	428,313,602	100.0%	99.9%		
																										Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0%	99.9%		
																										Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

NO	ASAR/	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018 dan 2019)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2020)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi /Ket.
													I			II			III			IV									
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 x 100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K		Rp	K	Rp.		
10		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**		**100**		**41,031,273**	**33**		**41,031,273**	**33**		**34,372,491**			-			-					**32,751,500**			**32,751,500**			**95.3%**		
		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	5	Kegiatan	41,031,273	1	Kegiata	41,031,273	1	Kegiatan	34,372,491		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		1	Kegiatan	32,751,500	1	Kegiat	32,751,500	100.0%	95.3%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0%	95.3%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
11		**Program Perlindungan Hak PerempuanPencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**		**100**		**925,000,000**	**100**		**52,895,000**	**100**		**260,248,291**	**25**		**6,922,638**	**25**		**99,321,099**			**115,561,616**			**253,668,116**			**253,668,116**		**97.5%**		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	500	Orang	925,000,000	40	Orang	52,895,000	1	Kegiatan	215,171,492	1	Kegiatan	6,922,638	1	Kegiatan	71,316,499		Kegiatan	87,557,016	1	Kegiatan	208,797,066	1	Kegiat	208,797,066	100.0%	97.0%		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan				0	Orang	-	1	Kegiatan	45,076,799		Kegiatan		1	Kegiatan	28,004,600		Kegiatan	28,004,600	1	Kegiatan	44,871,050	1	Kegiat	44,871,050	100.0%	99.5%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0%	98.3%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
12		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**		**100**		**41,031,273**	**33**		**41,031,273**	**33**		**17,071,245**			-			-			-			**16,164,750**			**16,164,750**		**94.7%**		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Layanan penanganan	5	Kegiatan	41,031,273	1	Kegiata	41,031,273	1	Kegiatan	17,071,245		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		1	Kegiatan	16,164,750	1	Kegiat	16,164,750	100.0%	94.7%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0%	94.7%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

NO	ASAR/	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018 dan 2019)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2020)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi /Ket.
													I			II			III			IV									
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 x 100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K		Rp	K	Rp.		
13		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**		**0.93**		**4,575,000,000**	**0.07**		**111,173,464**			**107,075,362**	**0**		**6,922,638**	**0**		**17,306,595**			**80,780,752**			**105,662,852**			**105,662,852**		**98.7%**		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	5	Kegiatan	2,500,000,000	1	Kegiata	79,077,064	1	Kegiatan	27,613,939	0	Kegiatan			Kegiatan		1	Kegiatan	26,608,200	1	Kegiatan	26,608,200	1	Kegiat	26,608,200	100.0%	96.4%		
		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Tersedianya Kegiatan Pendampingan	5	Kegiatan	925,000,000	1	Kegiata	23,098,400	1	Kegiatan	27,690,552	1	Kegiatan	6,922,638	1	Kegiatan	17,306,595	1	Kegiatan	27,690,552	1	Kegiatan	27,690,552	1	Kegiat	27,690,552	100.0%	100.0%		
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Tersedianya Kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi	5	Kegiatan	1,150,000,000	1	Kegiata	8,998,000	1	Kegiatan	51,770,871	0	Kegiatan			Kegiatan		1	Kegiatan	26,482,000	1	Kegiatan	51,364,100	1	Kegiat	51,364,100	100.0%	99.2%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0%	98.5%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
14		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**		**1**		**3,500,000,000**	**1**		**18,950,000**	**1**		**113,124,025**			**6,922,638**			**35,244,595**			**85,364,630**			**111,481,830**			**111,481,830**		**98.5%**		
		Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Tersedianya Data Gender	5	Kegiatan	3,250,000,000	1	Kegiata	-	1	Kegiatan	59,676,863	1	Kegiatan	6,922,638	1	Kegiatan	17,306,595	1	Kegiatan	38,056,630	1	Kegiatan	58,426,330	1	Kegiat	58,426,330	100.0%	97.9%		
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Tersedianya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak	9	Kegiatan	250,000,000	4	Kegiata	18,950,000	1	Kegiatan	53,447,162	1	Kegiatan		1	Kegiatan	17,938,000	1	Kegiatan	47,308,000	1	Kegiatan	53,055,500	1	Kegiat	53,055,500	100.0%	99.3%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100%	99%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
15		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**		**28**		**5,000,000,000**	**28**		**638,244,233**	**28**		**20,377,030**			-			-			**20,377,030**			**20,377,030**			**651,905,576**		**3199.2%**		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi	10	Kegiatan	5,000,000,000	2	Kegiatan	1,754,676,196	1	Kegiatan	20,377,030	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	20,377,030	1	Kegiatan	20,377,030	1	Kegiat	20,377,030	100.0%	100.0%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100%	100%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

NO	ASAR/	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018 dan 2019)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2020)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi /Ket.
													I			II			III			IV									
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 x 100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K		Rp	K	Rp.		
16		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**		**0.93**		**5,725,000,000**	**0.07**		**120,171,464**			**320,349,351**	**0**		**6,922,638**	**0**		**124,077,895**			**187,615,852**			**187,615,852**			**314,281,352**			**98.1%**		
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	5	Kegiatan	2,500,000,000	1	Kegiata	79,077,064	1	Kegiatan	70,455,170	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	40,982,400	1	Kegiatan	40,982,400	1	Kegiatan	70,451,900	1	Kegiat	70,451,900	100.0%	100.0%		
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Tersedianya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	5	Kegiatan	925,000,000	1	Kegiata	23,098,400	1	Kegiatan	17,970,113	0	Kegiatan	-		Kegiatan		1	Kegiatan	17,970,000	1	Kegiatan	17,970,000	1	Kegiat	17,970,000	100.0%	100.0%		
		Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kegiatan Penguatan Jejaring	5	Kegiatan	1,150,000,000	1	Kegiata	8,998,000	1	Kegiatan	191,235,450	1	Kegiatan	6,922,638	1	Kegiatan	83,095,495	1	Kegiatan	93,479,452	1	Kegiatan	190,675,452	1	Kegiat	190,675,452	100.0%	99.7%		
		Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kegiatan Penguatan Jejaring	5	Kegiatan	1,150,000,000	1	Kegiata	8,998,000	1	Kegiatan	40,688,618	1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan	35,184,000	1	Kegiatan	35,184,000	1	Kegiat	35,184,000	100.0%	86.5%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0%	96.5%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
			Total		Rp	19,553,031,273		Rp	1,789,066,388		Rp	3,120,333,612		Rp	434,675,420		Rp	1,011,590,551		Rp	###########		Rp	2,942,632,685								
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																													
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 16)																										100.00%	94.31%		
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 16)																										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA		: Pelaksanaan yang Te																											
		FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA		: Jadwal kegiatan yan																											
		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA		: Konsistensi pelaksan																											

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021
DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017.2018.2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(I, II, III, IV)		13 = 12/7		14=6+12			15=14/5 x		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
		DINAS PANGAN DAERAH																										
	PENINGKATAN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	***Meningkatnya Akuntabiilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan ; NILAI LKIP PD DINAS PANGAN DAERAH RATA - RATA***															-				-		-				
	ASN Dinas Pangan Daerah	Penyediaan kebutuhan administrasi umum	Tersedianya honor, bahan, jasa, perawatankendaraan, cetak/penggandaan dan makan minum untuk menunjang kegiatan kantor	60	bulan	2,568,874,293	48 Kegiatan	2,015,647,781														48	0	2,015,647,781	80.00	78.46		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
	ASN Dinas Pangan Daerah	Penyediaan kebutuhan administrasi keuangan	Tersedianya honor, bahan, jasa, cetak dan makan minum untuk menunjang kegiatan kantor	60	bulan	513,613,100	48 bulan	303,533,120														48	0	303,533,120	80.00	59.10		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
	ASN Dinas Pangan Daerah	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Tersedianya honor, bahan, cetak dan penggandaan untuk menunjang kegiatan kantor	60	bulan	272,590,000	48 bulan	114,966,645														48	0	114,966,645	80.00	42.18		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
	ASN Dinas Pangan Daerah	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya lembur, bahan material, cetak dan makan minum untuk menunjang kegiatan kantor	60	Bulan	71,960,200	48 Bulan	43,807,800														48	0	43,807,800	80.00	60.88		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
	ASN Dinas Pangan Daerah	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya bahan, cetak dan mengikuti rapat koordinasi yang dilaksanakan diluar daerah	60	Laporan	902,567,850	48 Paket	636,179,004														48	0	636,179,004	80.00	70.49		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
									-				0					**Rata - Rata Capaian Kinerja (%)**		-	-				**80.00**	**62.22**		
																		Predikat Kinerja							**Sangat Tinggi**			
	TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERDAYA SAING	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan ; NILAI LKIP PD DINAS PANGAN***																										
		Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2 sebagai sarana/penunjang pekerjaan	6	Unit	700,000,000	6 Unit	591,875,000														6	Unit	591,875,000	100	84.55		Dinas Pangan Daerah Prov.
	ASN Dinas Pangan Daerah	Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan, perlengkapan kantor sebagai sarana/penunjang pekerjaan	15	Jenis	924,842,850	7 Jenis	204,162,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	Jenis	204,162,500	46.67	22.08		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
	ASN Dinas Pangan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	60	bulan	276,709,000	48 bulan	212,234,785														48	bulan	212,234,785	80.00	76.70		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
	ASN Dinas Pangan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja dan operasional kendaraan dinas	60	bulan	700,045,935	41 bulan	555,539,047														41	bulan	555,539,047	68.33	79.36		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
	ASN Dinas Pangan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kerja/gedung	60	bulan	110,490,000	48 bulan	66,746,315														48	bulan	66,746,315	80.00	60.41		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
	ASN Dinas Pangan Daerah	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang aman dan memadai	5	unit	901,788,500	4 Unit	234,851,577	-									-	-			4	Unit	234,851,577	80.00	26.04		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
									-				-					**Rata - Rata Capaian Kinerja (%)**		-	-				**75.83**	**58.19**		
																		Predikat Kinerja							**Sangat Tinggi**			
	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI SERTA PEMERANTAS	***Program peningkatan disiplin aparatur***	***Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin***																										
	ASN Dinas Pangan Daerah	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian	331	Orang	260,540,000	247 pasang	184,418,200	-									-	-	-		247	pasang	184,418,200	74.62	70.78		Dinas Pangan Daerah Prov.
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	85	Orang	55,250,000	- Orang	-	-									-	-			-		-	-	-		Dinas Pangan Daerah Prov.
																		Rata - Rata Capaian Kinerja (%)		-	-				**74.62**	**70.78**		
																		Predikat Kinerja							**Tinggi**			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(I, II, III, IV)		13 = 12/7		14=6+12		15=14/5 x		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PENINGKATAN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	***Prosentasi ASN Dinas Pangan Daerah yang Menguasai Tugas Pokok dan Fungsi***																								
	ASN Dinas Pangan Daerah	Pelatihan Kantor Sendiri	Tersedianya ASN yang memahami tugas pokok dan fungsi dinas pangan daerah	331 Orang	205,759,313	176 orang	53,550,030		-										-			176 orang	53,550,030	53.17	26.03		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
																		Rata - Rata Capaian Kinerja (%)		**-**	**-**			**53.17**	**26.03**		
																		Predikat Kinerja						**Tinggi**			
	PENINGKATAN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***	***Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan: Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan***												-				-			-	-				
	ASN Dinas Pangan Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Terlaksananya Penyusunan laporan LAKIP PD	5 Laporan	27,828,000	4 dokumen	13,920,112															4 dokumen	13,920,112	80.00	50.02		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
	ASN Dinas Pangan Daerah	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terlaksananya penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	5 Laporan	27,959,938	5 dokumen	14,223,088															5 dokumen	14,223,088	100.00	50.87		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
	ASN Dinas Pangan Daerah	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	5 Laporan	30,374,000	4 dokumen	19,611,255															4 dokumen	19,611,255	80.00	64.57		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
	ASN Dinas Pangan Daerah	Penyusunan laporan bulanan PD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan/EPPA	60 Laporan	28,223,500	36 Laporan	21,242,697	48 laporan	23,604,147	-	-		-						-	-	-	48 laporan	23,604,147	80.00	83.63		Dinas Pangan Daerah Prov.
									23,604,147				**-**					**Rata - Rata Capaian Kinerja (%)**		**-**	**-**			**85.00**	**62.27**		
																		Predikat Kinerja						**Tinggi**			
		Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan																									
		Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan pameran dan promosi dalam rangka HUT Prov. Sulut	2 Laporan	45,737,000	-	-											-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI SERTA PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	***Program Perencanaan SKPD***	***Tersedianya dokumen perencanaan progam/kegiatan dan anggaran***															-									
		Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan	1 buku	12,500,000													-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
	ASN Dinas Pangan Daerah	Penyusunan Rencana Kerja PD	Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan 1 tahun	10 dokumen	35,747,500	8 dokumen	23,461,718												-			8 dokumen	23,461,718	80.00	65.63		Dinas Pangan Daerah Prov.
	ASN Dinas Pangan Daerah	Penyusunan Rencana Anggaran	Tersedianya dokumen perencanaan anggaran 1 tahunan	10 dokumen	44,185,888	8 dokumen	30,560,621												-			8 dokumen	30,560,621	80.00	69.16		Dinas Pangan Daerah Prov.
									-				-					**Rata - Rata Capaian Kinerja (%)**		**-**	**-**			**80.00**	**67.40**		
																		Predikat Kinerja						**Tinggi**			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(I, II, III, IV)		13 = 12/7		14=6+12		15=14/5 x		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	TERWUJUDNYA KONSISTENSI PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIA	***Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)***	***Persentase Penguatan Cadangan Pangan***																										
		Penanganan daerah rawan pangan	Terfasilitasinya kebutuhan pangan di daerah yang terkena kejadian rawan pangan kronis dan/atau transien	9	desa	183,601,900	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Terlaksananya pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	1	kali	10,075,400	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
		Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Terlaksananya pemantauan dan analisis harga pangan pokok dan penyebaran harga pangan	52	Kali	22,539,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah Prov.
		Promosi ketahanan pangan	Terselenggaranya promosi hasil-hasil dibidang ketahanan pangan	3	Paket	110,241,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
		Dewan ketahanan pangan	Tersedianya rumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan	4	Kali	180,607,600	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
		Apresiasi pemanfaatan pekarangan	Terlatihnya wanita tani/masyarakat dalam memanfaatkan	1	laporan	20,436,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
		Prognosa ketersediaan pangan	Terlaksananya penyusunan prognosis ketersediaan pangan	12	bulan	6,026,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
		Peningkatan konsumsi pangan melalui pemanfaatan pekarangan	Tersedianya kelompok wanita/organisasi kewanitaan yang memanfaatkan	6	KWT	77,890,200	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Pemantauan pasokan harga pangan	Terlaksananya pemantauan harga pangan	2	Kali	25,475,700	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
		Apresiasi pemantauan harga, pasokan, dan akses pangan	Terlaksananya pertemuan apresiasi pemantauan harga, pasokan dan akses pangan	1	Laporan	24,294,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Pemantauan harga pangan menjelang HBKN	Terlaksananya pemantauan harga pangan menjelang HBKN	1	Laporan	22,386,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah Prov.
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar	Tersedianya hasil pengawasan keamanan pangan segar	10	bulan	9,216,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
		Monitoring evaluasi dan pelaporan	Tersedianya hasil pelaksanaan evaluasi program/kegiatan	3	Kali	122,647,700	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
		Monitoring dan evaluasi penanganan daerah rawan pangan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi daerah rawan pangan	1	Kali	15,194,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah Prov.
		Monitoring dan evaluasi pengembangan lumbung pangan	Terpantaunya dan terevaluasinya lumbung pangan masyarakat	1	Kali	29,812,300	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah Prov.
		Monitoring dan evaluasi pengembangan cadangan pangan	Telaksanamya monitoring dan evaluasi program/kegiatan pengembangan cadangan pangan	1	Kali	23,671,433	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Monitoring dan evaluasi unit usaha pengolahan pangan lokal	Telaksanamya monitoring dan evaluasi program/kegiatan kelompok unit usaha pangan lokal	1	Laporan	12,604,900	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Pengadaan cadangan pangan daerah	Tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah	68,67	ton	626,348,033	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
		Pemantauan ketersediaan pangan menjelang HBKN	Terlaksanamya pemantauan ketersediaan pangan menjelang HBKN	1	Kali	16,155,400	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah Prov.
		Pemanfaatan pangan lokal	Tersalurnya bantuan alat penggiling jagung	2	Unit	74,951,800	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah
		Monitoring dan evaluasi peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP)	Termonitor dan terevaluasinya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan	1	kali	39,941,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Monitoring dan evaluasi lembaga distribusi pangan masyrakat	Terkoordinasi dan terevaluasinya lembaga distribusi pangan	1	kali	19,154,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah Prov.
		Analisis pola panen bulanan di sentra produksi	Terlaksanya penyusunan analisis pola panen bulanan disentra produksi	1	kali	27,188,600	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah Prov.

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(I, II, III, IV)		13 = 12/7		14=6+12		15=14/5 x		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	TERSEDIANYA AKSESIBILITAS PETANI, PEKEBUN, NELAYAN, PELAKU IKM, UMKM DAN KOPERASI TERHADAP PEMANFAATAN TEKNOLOGI, SUMBER	***Program Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan***	***Persentase Penguatan Cadangan Pangan***																				- 0	-				
	Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat	Pembangunan lumbung pangan	Terbangunnya lumbung pangan	11	Unit 1,744,995,400	2	Laporan 970,066,864											-	-			2	970,066,864	18.18	55.59		Dinas Pangan Daerah Prov.
		Penyusunan pendukung database infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Tersedianya data infrastruktur yang mendukung kemandirian pangan	4	Laporan 220,269,800	1	Laporan 22,191,000											-	-			1	22,191,000	25.00	10.07		Dinas Pangan Daerah Prov.
	Kelompok Lumbung Pangan di Kec. Mapore	Pengawasan kegiatan lumbung pangan	Terawasinya kegiatan lumbung pangan	14	Laporan 285,820,400	5	kali 51,315,400											-	-			5	51,315,400	35.71	17.95		Dinas Pangan Daerah
		Koordinasi infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan	Terlaksananya koordinasi infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan	4	Laporan 141,162,000	1	Laporan 19,042,000											-	-			1	19,042,000	25.00	13.49		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
	ASN Dinas Pangan Daerah	Pemantauan Infrastruktur dan sarana prasarana untuk kemandirian pangan	Terwujudnya Infrastruktur dan sarana prasarana pendukung kemandirian pangan	3	Laporan 64,560,000	3	kali 33,015,008												-			3	kali 33,015,008	100.00	51.14		Dinas Pangan Daerah Prov.
									-				-					**Rata - Rata Capaian Kinerja (%)**		-	-			**100.00**	**51.14**		
																		Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**				**Rendah**			
	TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN WILAYAH DAN KELUARGA, PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, SERTA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL	***Program Penyelenggaraan ketahanan pangan***	***Persentase Penguatan Cadangan Pangan***																										
	ASN DINAS PANGAN DAERAH	Promosi ketahanan pangan	Terselenggaranya promosi, pameran dan lomba	20	Paket 1,350,398,950	12	Paket 628,585,427		-									-	-	-	-	12 paket	628,585,427	60.00	46.55		Dinas Pangan Daerah Prov.
		Dewan ketahanan pangan	Terfasilitasinya pelaksanaan rapat Dewan Ketahanan Pangan	52	Laporan 452,000,000	7	Laporan 56,306,600											-	-			7	56,306,600	13.46	12.46		Dinas Pangan Daerah
		Prognosa ketersediaan pangan	Tersedianya data/informasi prakiraan kebutuhan 9 bahan pangan pokok setiap bulan	48	bulan 43,264,000	12	Laporan 9,470,400											-	-			12	9,470,400	25.00	21.89		Dinas Pangan Daerah Prov.
		Koordinasi Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya pengawasan terhadap penyaluran Cadangan pangan pemerintah daerah		-		-		-																			
	Kelompok Tani /Organisasi	Peningkatan konsumsi pangan melalui pemanfaatan pekarangan	Tersedianya kebun bibit dan Demplot	60	KWT/Organisasi wanita 876,542,763	44	Paket 462,964,977			-	-	-							-			44 Paket	462,964,977	73.33	52.82		Dinas Pangan Daerah Prov.
		Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi	Tersedianya data PPH	4	Laporan 51,721,500	2	Dokumen 5,484,270		-										-	-		2 dokumen	5,484,270	50.00	10.60		Dinas Pangan Daerah Prov.
	Masyarakat yang Mengalami Pasca bencana dan beresiko tinggi rawan pangan dan Pemerintah Daerah	Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Tersedianya data tentang keragaman ketersediaan pangan	5	Laporan 66,328,000	2	Laporan 24,927,000		-										-			2 laporan	24,927,000	1.68	37.58		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Pengadaan cadangan pangan daerah	Tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah	319	ton 3,867,610,153	241,5	ton 2,610,906,826												-			241,5 ton	2,611,521,191	#VALUE!	67.52		Dinas Pangan Daerah
		Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah	Tersalurnya cadangan pangan pemerintah daerah	5	Laporan 118,396,000	2	Paket 86,050,740															2 Paket	86,050,740	40.00	72.68		Dinas Pangan Daerah
		Pemantauan ketersediaan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional	Tersedianya informasi ketersediaan pangan menjelang HBKN	7	Laporan 137,666,800	4	kali 87,167,470		-										-			4 kali	87,167,470	57.14	63.32		Dinas Pangan Daerah Prov.
	Kelompok	Pengembangan Pangan Lokal	Tersalurnya alat pengolahan pangan lokal untuk pengembangan usaha beras jagung	8	Unit 350,008,800	5	unit 171,252,112				-								-			5 unit	171,252,112	62.50	48.93		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(I, II, III, IV)		13 = 12/7		14=6+12		15=14/5 x		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Analisis pola panen bulanan	Tersedianya informasi data kondisi surplus/defisit ketersediaan pangan beras bulanan	4 Laporan	36,702,400	1 Laporan	17,048,600											-	-			1	17,048,600	25.00	46.45		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Informasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	tersedianya informasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen	208 Minggu	251,431,900	24 Laporan	23,036,900											-	-			24	23,036,900	11.54	9.16		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Workshop Pemanfaatan Pekarangan	terlatihnya kelompok/masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan	180 Orang	102,107,000	60 Laporan	15,107,000											-	-			60	15,107,000	33.33	14.80		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Pengembangan Usaha Pangan masyarakat	stabilisasi harga gabah ditingkat petani (di atas HPP)	20 Gapoktan dan 40 TTI	3,630,908,400	2	38,688,000												-			2	38,688,000	10.00	1.07		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Penyusunan pedoman umum penanganan distribusi dan cadangan pangan masyarakat	tersusunnya pedoman umum penanganan distribusi dan cadangan pangan Masyarakat	4 dokumen	106,988,000	1 Laporan	16,988,000											-	-			1	16,988,000	25.00	15.88		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Sosialisasi penanganan cadangan pangan masyarakat	terlaksananya sosialisasi cadangan pangan pemerintah	4 laporan	85,605,500	1 Laporan	19,332,000											-	-			1	19,332,000	25.00	22.58		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Penyusunan harga minimum daerah pangan lokal	Tersedianya Penetapan Harga Regional Daerah (Komoditi jagung, cabe rawit dan bawang merah)	4 Laporan	221,748,900	1 Laporan	26,748,900											-	-			1	26,748,900	25.00	12.06		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Pengawasan kegiatan pemanfaatan pekarangan dan pengembangan pangan lokal	termonitor dan terevaluasinya kegiatan konsumsi dan penganekaragaman pangan	8 Laporan	56,322,000	2 Laporan	4,575,000											-	-			2	4,575,000	25.00	8.12		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Pengawasan kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat	Termonitor dan terevaluasinya sistem distribusi pangan dan cadangan pangan	4 Kegiatan	85,786,300	- Laporan	-											-	-			-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Pengawasan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah	terlaksananya pengawasan terhadap penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah	4 Paket	91,872,900	2 Laporan	12,159,000												-			2 laporan	12,159,000	50.00	13.23		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya data ketersediaan gabah dan beras ditingkat penggilingan	2 Laporan	56,247,500	2 Dokumen	38,920,170		-										-			2 dokumen	38,920,170	100.00	69.19		
		Monitoring Ketersediaan Gabah dan Beras di Penggilingan	Tersedianya data ketersediaan gabah dan beras ditingkat penggilingan	1 Laporan	14,943,000	6 laporan	16,182,400															6 0	16,182,400	600.00	108.29		
		Pemantauan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Tersedianya informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen	3 Laporan	100,503,000	5 Laporan	103,895,018		-										-			5 laporan	103,895,018	166.67	103.38		
		Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat	terlaksananya sosialisasi cadangan pangan pemerintah	10000 Kg	206,227,500	6,000 Kg	221,489,740										-	-	-			6,000 Kg	221,489,740	60	107.40		
	ASN Dinas Pangan Daerah	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Termonitor dan terevaluasinya program kegiatan ketahanan pangan	13 Laporan	518,493,900	8 Kali	265,719,421									-		-	-			8 Kali	265,719,421	61.54	51.25		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
									-				-					Rata - Rata Capaian Kinerja (%)		100	-			#VALUE!	78.25		
																		Predikat Kinerja						Sangat Tinggi			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
													I		II		III		IV											
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=(I, II, III, IV)		13 = 12/7		14=6+12		15=14/5 x		16	17
					K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN WILAYAH DAN KELUARGA, PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, SERTA USAHA	***Program Penanganan Kerawanan Pangan***	***Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan***																											
	Masyarakat di Daerah yang beresiko rawan pangan	Penanganan daerah rawan pangan	Tertanganinya daerah beresiko rawan pangan	55	Desa	1,319,152,698	41	paket	889,965,797																41	paket	889,965,797	74.55	67.46		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
	Masyarakat yang menerima bantuan penanganan	Pengawasan Penanganan Kerawanan Pangan	Terawasinya penanganan kerawanan pangan	5	Laporan	194,933,000	4	kali	73,137,075													-			5	laporan	73,137,075	100.00	37.52		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
	ASN Dinas Pangan Daerah	Analisis sistem (SKPG)kewaspadaan pangan dan gizi	Terawasinya penanganan kerawanan pangan	5	Laporan	128,947,600	3	Laporan	70,925,190		-														3	laporan	70,925,190	60.00	55.00		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan	tersedianya data hasil analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	4	Laporan	286,834,700	1	Laporan	39,957,200												-	-			1		39,957,200	25.00	13.93		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
											-					-					Rata - Rata Capaian Kinerja (%)		-	-				86.52	57.97		
																					Predikat Kinerja							Tinggi			
	TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN WILAYAH DAN KELUARGA, PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, SERTA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL	***Program Pengawasan Keamanan Pangan Segar***	***Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan***																											
	Pelaku Penanganan Pangan segar (Produsen dan Konsumen)	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar	Tersedianya informasi pengawasan keamanan pangan segar	62	Laporan	433,520,000	19	Laporan	47,507,000													-			19		47,507,000	30.65	10.96		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Database keamanan pangan segar	Tersedianya data dan informasi keamanan pangan segar	4	Laporan	116,276,800	1	Laporan	27,508,000													-			1		27,508,000	25.00	23.66		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
	ASN Dinas Pangan Daerah	Informasi keamanan pangan segar	Teriinformasinya keamanan pangan segar bagi masyarakat melalui media cetak dan elektronik	17	Laporan	183,002,285	14	Laporan	61,350,840		-											-			14	laporan	61,350,840	82.35	33.52		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
	ASN Dinas Pangan Daerah	Pembinaan dan Database Petani PSAT		5	Paket	51,623,000	2	Laporan	12,706,600																2	0	12,706,600	40.00	24.61		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
	ASN Dinas Pangan Daerah	Surveylan Pelaku Usaha		36	Laporan	161,189,400	1	Laporan	71,844,015																1	0	71,844,015	2.78	44.57		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Jaringan Keamanan Pangan Daerah (JKPD)	Terlaksananya jaringan data pangan derh (JKPD)								-																				
	ASN Dinas Pangan Daerah	Pembinaan Pelaku Usaha Dalam Rangka Sertifikat dan Registrasi PSAT		43	Laporan	483,294,000	1	Paket	1,097,160	1	Kegiatan	1,097,160			1	Kegiatan	1,097,160					1	Kegiatan	1,097,160	100	100	2	Kegiatan	2,194,320	4.65	0.45		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
	ASN Dinas Pangan Daerah	Pengujian Laboratorium Dalam Rangka Pembinaan Sertifikat dan Registrasi PSAT		6	Paket	120,330,000	-	Paket	-												-	-	-		-	0	-	-	-		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
											1,097,160.00	-	-	-	1.00	-	1,097,160.00	-	-	-	-	1.00	-	1,097,160.00	100.00	#####	39.00	-	223,110,775.00	185.43	137.78	-	-
																						Predikat Kinerja							Sangat Rendah			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(I, II, III, IV)		13 = 12/7		14=6+12		15=14/5 x		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Perencanaaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	3 Dok	20,891,597			3 Dok	20,891,597		Rp -		Rp -	3 Dok	20,878,123		-	3 Dok	20,878,123	100	100	3 Dok	20,878,123	100.00	99.94		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	3 Dok	6,496,686			3 Dok	6,496,686		Rp -		Rp -			3 Dok	3,778,306	3 Dok	3,778,306	100	58	3 Dok	3,778,306	100.00	58.16		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	3 Dok	2,164,640			3 Dok	2,164,640		Rp -		Rp -	-	-	3 Dok	2,164,640	3 Dok	2,164,640	100	100	3 Dok	2,164,640	100.00	100.00		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
									29,552,923.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**20,878,123**	**6 Dok**	**5,942,946**	**9 Dok**	**26,821,069**	**100**	**86.03**	**3.00 Dok**	**26,821,069**	**100.00**	**86.03**	**-**	**-**
																		Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**			
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	9,430,730,820			12 Bulan	9,153,774,862	3 Bulan	2,174,893,403	6 Bulan	4,499,944,220	9 Bulan	6,851,100,732	12 Bulan	8,456,079,391	12 Bulan	8,456,079,391	100	92	12 Bulan	8,456,079,391	100.00	89.67		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	199,789,054			12 Bulan	224,732,239	3 Bulan	29,390,552	6 Bulan	77,920,645	9 Bulan	132,719,165	12 Bulan	224,203,658	12 Bulan	224,203,658	100	100	12 Bulan	224,203,658	100.00	112.22		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Lap	5,272,111			1 Lap	5,272,111		-	1 Lap	5,266,379	-	-	-	-	1 Lap	5,266,379	100	100	1 Lap	5,266,379	100.00	99.89		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	5,983,069			12 Bulan	5,983,069		-			-	-	12 Bulan	5,982,877	12 Bulan	5,982,877	100	100	12 Bulan	5,982,877	100.00	100.00		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	2,707,500			12 Bulan	2,707,500		-			-	-	12 Bulan	2,664,301	12 Bulan	2,664,301	100	98	12 Bulan	2,664,301	100.00	98.40		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	3,244,913			12 Bulan	3,244,913		-			-	-	12 Bulan	2,816,359	12 Bulan	2,816,359	100	87	12 Bulan	2,816,359	100.00	86.79		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
									9,395,714,694				**-**	**-**	**-**	**##**	**-**	**11,463,537**	**-**	**8,697,012,965**	**100**	**96.20**	**61 -**	**11,463,537.00**	**100**	**97.83**	**-**	**-**
																		Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(I, II, III, IV)		13 = 12/7		14=6+12		15=14/5 x		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah																									
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	10,065,637			12 Bulan	10,065,637		-			9 Bulan	3,149,440	12 Bulan	10,064,235	12 Bulan	10,064,235	100	100	12 Bulan	10,064,235	100.00	99.99		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
								10,065,637		-	-	-	-	**9**	**3,149,440**	**12**	**10,064,235**	**12.00**	**10,064,235**	**100.00**	**99.99**	**12**	**10,064,235**	**100.00**	**99.99**	-	-
																		Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																									
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang baik	86 orang	68,422,200			86 orang	68,422,200		-			86 Org	68,422,200			86 Org	68,422,200	100	100	86 Org	68,422,200	100.00	100.00		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang baik	86 orang	39,755,892			86 orang	39,755,892		-			86 Org	25,385,892	86 Org	39,545,890	86 Org	39,545,890	100	99	86 Org	39,545,890	100.00	99.47		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
								108,178,092		-	-	-	-	**86**	**68,422,200**	**86 Org**	**39,545,890**	**86 Org**	**107,968,090**	**100**	**99.74**	**86.00**	**107,968,090**	**100.00**	**99.74**		-
																		Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																									
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang baik	12 Bulan	228,818,933			12 Bulan	228,818,933		Rp 7,851,952	6 Bulan	216,818,933	-	-	12 Bulan	228,818,933	12 Bulan	228,818,933	100	100	12 Bulan	228,818,933	100.00	100.00		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang baik	12 Bulan	16,639,083			12 Bulan	16,639,083		-	6 Bulan	4,000,000	9 Bln	8,800,000	12 Bulan	16,598,854	12 Bulan	16,598,854	100	100	12 Bulan	16,598,854	100.00	99.76		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Penyediaan Bahan/ Material	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang baik	12 Bulan	5,541,235			12 Bulan	5,541,235		-	6 Bulan	2,769,858	-	-	12 Bulan	5,538,544	12 Bulan	5,538,544	100	100	12 Bulan	5,538,544	100.00	99.95		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang baik	12 Bulan	19,012,442			12 Bulan	19,012,442		-	6 Bulan	6,000,000	-	-	12 Bulan	18,952,442	12 Bulan	18,952,442	100	100	12 Bulan	18,952,442	100.00	99.68		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang baik	12 Bulan	4,127,600			12 Bulan	4,127,600		-	6 Bulan	4,127,600	-	-			12 Bulan	4,127,600	100	100	12 Bulan	4,127,600	100.00	100.00		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
								274,139,293		-	-	**7,851,952.00**	-	**233,716,391.00**	-	-	-	-	**228,818,933**	-	**274,036,373**	**100.00**	**99.88**	-	**274,036,373**	**100.00**	**99.88**	-	-
																		Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(I, II, III, IV)		13 = 12/7		14=6+12		15=14/5 x		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	198,912,000			12 Bulan	198,912,000	3 Bulan	Rp 32,980,415	6 Bulan	64,404,166	9 Bln	103,469,429	12 Bln	165,363,901	12 Bulan	165,363,901	100	83	12 Bulan	165,363,901	100.00	83.13		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	296,682,288			12 Bulan	296,682,288	3 Bulan	Rp 48,525,228	6 Bulan	121,809,720	9 Bln	195,077,657	12 Bln	293,570,313	12 Bulan	293,570,313	100	99	12 Bulan	293,570,313	100.00	98.95		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
								495,594,288		**- -**	**81,505,643**	**6.00 -**	**186,213,886.00**	**- -**	**-**	**- -**	**228,818,933**	**-**	**458,934,214**	**100.00**	**91.04**	**-**	**229,467,107**	**100.00**	**91.04**	**-**	**-**
																		Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**			
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	182,117,633			12 Bulan	182,117,633	3 Bulan	Rp 17,769,356	6 Bulan	49,581,203	9 Bln	86,072,903	12 Bln	177,218,420	12 Bulan	177,218,420	100	97	12 Bulan	177,218,420	100.00	97.31		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bagunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	40,385,836			12 Bulan	40,385,836		Rp -	6 Bulan	6,542,160	9 Bln	18,188,756	12 Bln	40,376,437	12 Bulan	40,376,437	100	100	12 Bulan	40,376,437	100.00	99.98		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
								222,503,469		**3.00 -**	**17,769,356.00**	**12.00 -**	**56,123,363.00**	**9.00 -**	**104,261,659**	**-**	**217,594,857**	**-**	**217,594,857**	**100.00**	**98.64**	**12.00**	**-**	**108,797,429**	**100.00**	**98.64**	**-**	**-**
																		Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**			
		Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Pada Berbagai Sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi																									
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Jumlah Sarana Pendukung Kemandirian Pangan	1 Lap	24,700,348			1 Lap	24,700,348			1 Lap	8,592,500	-	-	1 Lap	23,282,848	1 Lap	23,282,848	100	94	1 Lap	23,282,848	100.00	94.26		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Koordinasi dan Singkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Sarana Pendukung Kemandirian Pangan	1 Lap	41,993,869			1 Lap	41,993,869					1 Lap	38,333,869			1 Lap	38,333,869	100	91	1 Lap	38,333,869	100.00	91.28		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
								66,694,217		**- -**	**-**	**1.00 -**	**8,592,500.00**	**1.00 -**	**38,333,869**	**-**	**23,282,848**	**2.00 -**	**61,616,717**	**100.00**	**92.77**	**-**	**61,616,717.00**	**100.00**	**92.77**	**-**	**-**
																		Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(I, II, III, IV)		13 = 12/7		14=6+12		15=14/5 x		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam RangkaStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan																									
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase Cadangan Pangan Penduduk Skor PPH, Informasi Harga	2 Lap	40,898,182			2 Lap	40,898,182					-	-	2 Lap	38,455,682	2 Lap	38,455,682	100	94	2 Lap	38,455,682	100.00	94.03		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Cadangan Pangan Penduduk Skor PPH, Informasi Harga	2 Lap	27,395,323			2 Lap						-	-		z	-	-	-		-	-	-	-	-	Refocusing	Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Cadangan Pangan Penduduk Skor PPH, Informasi Harga	2 Lap	59,833,228			2 Lap	59,833,228			1 Lap	39,800,000	2 Lap	50,677,592	2 Lap	57,916,528	2 Lap	57,916,528	100	97	2 Lap	57,916,528	100.00	96.80		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Persentase Cadangan Pangan Penduduk Skor PPH, Informasi Harga	2 Lap	94,185,000			2 Lap										-	-	-		-	-	-	-	-		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
									100,731,410.00				**39,800,000**	**2.00** -	**50,677,592**	## -	**57,916,528**	-	**96,372,210**	**67**	**64**	-	**96,372,210**	**67**	**33.33**	-	-
																		Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**			
		Program Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan pangan																									
		Koordinasi , Singkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Penduduk, Skor PPH, Informasi Harga	40 Ton	500,017,773			40 Ton	500,017,773					40 Ton	499,143,150		499,980,423	40 Ton	499,980,423	100	100	40 Ton	499,980,423	100.00	99.99		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Penduduk, Skor PPH, Informasi Harga	40 Ton	12,673,296			40 Ton	12,673,296					40 Ton	5,850,000		12,148,296	40 Ton	12,148,296	100	96	40 Ton	12,148,296	100.00	95.86		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
									512,691,069.00	- -		-	- -	-	**504,993,150**	-	-	**80.00**	-	**512,128,719.00**		**80.00**	-	**512,128,719.00**	**100.00**	**97.92**	-	-
																		Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(I, II, III, IV)		13 = 12/7		14=6+12		15=14/5 x		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Promosi Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi																									
		Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	Persentase Cadangan Pangan Penduduk Skor PPH, Informasi Harga	17 Paket	175,200,890			17 Paket			Revocusing																
		Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi , dan Sosialiasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi , Seimbang dan Aman (B2SA)	Persentase Cadangan Pangan Penduduk Skor PPH, Informasi Harga	2 Paket	333,199,703			2 Paket	333,199,703			1 paket	39,717,500		-	2 Paket	330,686,938	2 paket	330,686,938	100	99	2 paket	330,686,938	100.00	99.25		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapitasi Per Tahun	Persentase Cadangan Pangan Penduduk Skor PPH, Informasi Harga	17 Paket	21,175,244			2 Paket										- -	-	-		- -	-	- -	-		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
									333,199,703.00	-	-	-	-	**39,717,500.00**	- -	-	-	**330,686,938**	**2.00**	**-**	**330,686,938.00**	**100.00**	**99.25**		**330,686,938.00**	**100.00**	**99.25**	**-**	**-**
																		Predikat Kinerja		**sangat tinggi**							
		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi																									
		Penyusnan Pemutahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan provinsi dan Kabupaten Kota	Persentase Cadangan Pangan Penduduk Skor PPH, Informasi Harga	1 lap	56,540,454			1 lap	56,540,454							1 lap	51,065,454	1 lap	51,065,454	100	90	1 lap	51,065,454	100.00	90.32		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
									56,540,454.00	-	-	-	-	-	- -	-	-	**381,752,392**		**-**	**51,065,454.00**	**100.00**	**90.32**		**51,065,454.00**	**100.00**	**90.32**	**-**	**-**
																		Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**							
		Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi																									
		Koordinasi dan singkronisasi Penangan Kerwanan Pangan Provinsi	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (Persentase Daerah Aman Dari Resiko Rawan pangan)	15 Paket	203,889,021			15 Paket	203,889,021							15 Paket	198,666,379	15 Paket	198,666,379	100	97	15 Paket	198,666,379	100.00	97.44		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerwanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (Persentase Daerah Aman Dari Resiko Rawan pangan)	15 Paket	87,313,229			15 Paket	87,313,229							15 Paket	85,437,956	15 Paket	85,437,956	100	98	15 Paket	85,437,956	100.00	97.85		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
									291,202,250.00	-	-	-	-	-	- -	-	-	##	-	**284,104,335**		**-**	**284,104,335.00**	**100.00**	**97.65**	**30.00**	**-**	**284,104,335.00**	**100.00**	**97.65**	**-**	**-**
																		Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(I, II, III, IV)		13 = 12/7		14=6+12		15=14/5 x		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah kabupaten/Kota																									
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar Provinsi	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Amana)	3 Keg	89,957,428			3 Keg	49,957,428					1 Keg	4,400,000	3 Keg	48,915,608	3 Keg	48,915,608	100	98	3 Keg	48,915,608	100.00	54.38		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kab/Kota	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Amana)	3 Keg	111,020,230			3 Keg	111,020,230			1 Keg	71,196,820			3 Keg	110,840,230	3 Keg	110,840,230	100	100	3 Keg	110,840,230	100.00	99.84		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
		Rekomendasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Amana)	3 Keg	36,707,139			3 Keg	36,707,139							3 Keg	36,367,135	3 -	36,367,135	100	99	3 -	36,367,135	100.00	99.07		Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
									197,684,797.00	-	-	-	**1.00** -	**71,196,820.00**	**1.00** -	**4,400,000**	-	**147,207,365**	**6.00** -	**196,122,973.00**	**100.00**	**98.94**	**6.00** -	**196,122,973.00**	**100.00**	**84.43**	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**5,218,491,704**		**Jumlah Anggaran**	**12,094,492,296**			**Realisasi Anggaran**							**11,324,529,149**		**93.63**						
UPTD. BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA																											
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Pelaksanaan pemerintahan yang baik																								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan evaluasi																								
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		3 dok	1,918,925	0 dok	-	3 dok	1,918,925	0 dok	-	0 dok	-	dok		3 dok	1,672,300	3 dok	1,672,300	100	87	3.00 dok	1,672,300	100.00	87.15	UPTD. BPMKP	Manado
									1,918,925.00										**1,672,300.00**								
																		Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(I, II, III, IV)		13 = 12/7		14=6+12		15=14/5 x		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan																								
		Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD		12 bulan	2,204,203	0 bulan	-	12 bulan	2,204,203	3 bulan	668,000	3 bulan	-	bulan		12 bulan	2,100,166	12 dok	2,100,166	100	95	12.00 dok	2,100,166	100.00	95.28	UPTD. BPMKP	Manado
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		12 bulan	1,567,068	0 bulan	-	12 bulan	1,567,068	3 bulan	-	3 bulan	-	bulan		12 bulan	1,371,500	12 dok	1,371,500	100	88	12.00 dok	1371500.00	100.00	87.52	UPTD. BPMKP	Manado
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD		12 bulan	1,646,212	0 bulan	-	12 bulan	1,646,212	3 bulan	-	3 bulan	394,000	bulan		12 bulan	1,604,000	12 dok	1,604,000	100	97	12.00 dok	1,604,000	100.00	97.44	UPTD. BPMKP	Manado
									5,417,483.00										**5,075,666.00**	**100.00**	**93.41**			**100.00**	**93.41**		
																		Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**				**Rendah**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya aparat yang disiplin																								
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		12 psg	16,719,242	0 psg	-	12 psg	16,719,242	12 psg	219,242	0 psg	-	12 psg	15,190,800	12 psg	15,190,800	12 psg	15,190,800	100	91	12.00 dok	15,190,800	100.00	90.86	UPTD. BPMKP	Manado
									16,719,242.00										**15,190,800.00**	**100.00**	**90.86**			**100.00**	**90.86**		
																		Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah																								
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	36,759,203	0 bulan	-	12 bulan	36,759,203	3 bulan	-	3 bulan	36,544,000	bulan		12 bulan	68,397,000	12 bulan	68,397,000	100	186	12.00 dok	68,397,000	100.00	186.07	UPTD. BPMKP	Manado
		Penyediaan bahan logistik kantor		12 bulan	1,700,056	0 bulan	-	12 bulan	1,700,056	3 bulan	-	3 bulan	-	3 bulan	1551500	bulan		3 dok	1,551,500	25	91	3.00 dok	1551500	25.00	91.26	UPTD. BPMKP	Manado
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 bulan	26,820,545	0 bulan	-	12 bulan	26,820,545	3 bulan	-	3 bulan	-	bulan		bulan		12 bulan	0	100	-	12.00 dok	0.00	100.00	-	UPTD. BPMKP	Manado
									65,279,804.00										**69,948,500**	**75.00**	**92.44**			**75.00**	**92.44**		
																		Predikat Kinerja		**Tinggi**				**Rendah**			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(I, II, III, IV)		13 = 12/7		14=6+12		15=14/5 x		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD																								
		Pengadaan mebel		1 paket	24,242,043	0 paket	-	1 paket	6,242,043	0 paket	-	0 paket	-	paket		paket		1 paket	5,660,700	100	91	1.00 dok	5,660,700	100.00	23.35	UPTD. BPMKP	Manado
									6,242,043.00										**5,660,700**								
																		Predikat Kinerja		**sangat tinggi**				**sangat tinggi**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa dan tenaga penunjang urusan perangkat daerah																								
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	52,800,000	0 bulan	-	12 bulan	13,200,000	3 bulan	990,000	6 bulan	2,105,000	9 bulan	4,580,000	12 bulan	6,560,000	9 dok	6,560,000	75	50	9.00 dok	6,560,000	75.00	12.42	UPTD. BPMKP	Manado
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		12 bulan	43,172,837	0 bulan	-	12 bulan	43,172,837	3 bulan	6,922,632	3 bulan	10,383,948	9 bulan	27,690,528	12 bulan	42,605,828	9 dok	42,605,828	75	99	9.00 dok	42,605,828	75.00	98.69	UPTD. BPMKP	Manado
									56,372,837.00										**49,165,828**	**75.00**	**74.19**			**75.00**	**55.56**		
																		Predikat Kinerja		**Tinggi**				**Tinggi**			
		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD																								
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan		12 bulan	37,323,000	0 bulan	-	12 bulan	37,323,000	3 bulan	2,150,036	6 bulan	13,985,230	9 bulan	20,134,100	12 bulan	29,459,000	12 bulan	29,459,000	100	79	12.00 dok	29,459,000	100.00	78.93	UPTD. BPMKP	Manado
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		12 bulan	3,300,000	0 bulan	-	12 bulan	1,650,000	3 bulan	-	3 bulan	-	bulan		12 bulan	1,650,000	12 bulan	1,650,000	100	100	12.00 dok	1650000.00	100.00	50.00	UPTD. BPMKP	Manado
		Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		12 bulan	9,966,136	0 bulan	-	12 bulan	3,827,880	3 bulan	-	3 bulan	-	bulan		12 bulan	3,423,000	12 dok	3,423,000	100	89	12.00 dok	3423000.00	100.00	34.35	UPTD. BPMKP	Manado
									42,800,880.00										**34,532,000**	**100.00**	**89.45**			**100.00**	**54.43**		
																		Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017.2018.2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(I, II, III, IV)		13 = 12/7		14=6+12		15=14/5 x		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Mening katnya derajat ekono mi masyarakat	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan																								
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengawasana keamanan pangan segar (Permendagri No. 18/2020)																								
		Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar provinsi	Terlaksananya koordinasi kelembagaan keamanan pangan segar dan pembinaan peningkatan keamanan mutu PSAT	6 lap	51,941,546	0 lap	-	6 lap	18,377,878	0 lap	-	3 lap	3,892,800	lap		6 lap	13,044,300	6 lap	13,044,300	100	71	6.00 dok	13,044,300	100.00	25.11	UPTD. BPMKP	Luar Manado
		Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kab/ kota	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100 %	31,843,102	0 %	-	100 %	40,316,102	%	-	%	-	25 %	21,855,000	100 %	37,212,900	100 %	37,212,900	100	92	100.00 dok	37,212,900	100.00	116.86	UPTD. BPMKP	Luar Manado
		Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Tersedianya sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar	2 lap	5,669,127	0 lap	-	2 lap	11,648,127	0 lap	-	0 lap	-	lap		2 lap	7,475,000	2 lap	7,475,000	100	64	2.00 dok	7475000.00	100.00	131.85	UPTD. BPMKP	Luar Manado
									70,342,107.00				**3,892,800**						**57,732,200**	**100.00**	**75.82**			**100.00**	**91.28**		
																				Tinggi				**Tinggi**			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM UPTD								**Jumlah Anggaran**	**265,093,321**			**Realisasi Anggaran**							**238,977,994**	**87.01**							
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM.....)																											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM.....)																											
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA																											
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																											
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :																											

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalannya yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2021											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan renja PD tahun 2020)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
													Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	Kinerja		Rp	Kinerja	Rp		
1		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD**	**7**		**21,155,400.08**	**0**		**-**	**9**		**24,407,208**	**0**		**-**	**3**		**6,464,500**	**0**		**999,600**	**4**		**16,354,200**	**7**		**23,818,300**	**78%**	**98%**	**7**		**23,818,300**	**100%**	**113%**		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	Dok	7,814,732.78	0	Dok	-	4	Dok	7,631,426		Dok	-	2	Dok	4,289,500		Dok	-	2	Dok	3,255,200	4	Dok	7,544,700	100%	99%	4	Dok	7,544,700	200%	97%	DLHD	Prov. SULUT
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD	1	Dok	7,682,242.60	0	Dok	-	2	Dok	9,348,290		Dok	-		Dok	-		Dok	-	2	Dok	9,114,000	2	Dok	9,114,000	100%	97%	2	Dok	9,114,000	200%	119%	DLHD	Prov. SULUT
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	5,658,424.70	0	Laporan	-	3	Laporan	7,427,492		Laporan	-	1	Laporan	2,175,000		Laporan	999,600		Laporan	3,985,000	1	Laporan	7,159,600	33%	96%	1	Laporan	7,159,600	25%	127%	DLHD	Prov. SULUT
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**77.78%**	**97.58%**				**100.00%**	**100.00%**		
																									Predikat Kinerja		**Sedang**	**Tinggi**				**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD**	**19**		**7,910,525,348**	**0**		**-**	**30**		**6,848,968,501**	**4**		**1,602,892,460**	**7**		**2,062,783,889**	**3**		**1,521,981,033**	**5**		**64,366,015**	**19**		**6,496,830,202**	**63%**	**95%**	**19**		**6,496,830,202**	**100%**	**82%**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan yang diperlukan untuk menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	7,719,198,927	0	Bulan	-	14	Bulan	6,671,005,288	3	Bulan	1,592,508,502	3	Bulan	2,017,421,811	3	Bulan	1,477,523,092	3	Bulan	1,239,865,672	12	Bulan	6,327,319,077	86%	95%	12	Bulan	6,327,319,077	100%	82%	DLHD	Prov. SULUT
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	Kegiatan	181,620,968	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	161,809,650	1	Kegiatan	10,383,958	0	Kegiatan	43,732,078	0	Kegiatan	43,662,941	0	Kegiatan	56,185,148	1	Kegiatan	153,964,125	100%	95%	1	Kegiatan	153,964,125	100%	85%	DLHD	Prov. SULUT
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi	3	Laporan	4,369,259	0	Laporan	-	12	Laporan	8,500,636	0	Laporan	-	3	Laporan	965,000	0	Laporan	-	0	Laporan	7,124,500	3	Laporan	8,089,500	25%	95%	3	Laporan	8,089,500	100%	185%	DLHD	Prov. SULUT
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	3	Laporan	5,336,194	0	Laporan	-	3	Laporan	7,652,927	0	Laporan	-	1	Laporan	665,000	0	Laporan	795,000	2	Laporan	5,997,500	3	Laporan	7,457,500	100%	97%	3	Laporan	7,457,500	100%	140%	DLHD	Prov. SULUT
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**77.68%**	**95.65%**				**100.00%**	**100.00%**		
																									Predikat Kinerja		**Sedang**	**Tinggi**				**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**122**		**192,299,820**	**0**		**-**	**98**		**166,029,752**	**0**		**-**	**3**		**4,244,080**	**86**		**65,304,800**	**9**		**92,211,900**	**98**		**161,760,780**	**100%**	**97%**	**98**		**161,760,780**	**80%**	**84%**		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya	110	Orang	147,767,937	0	Orang	-	86	Orang	139,500,000		Orang	-		Orang	-	86	Orang	65,304,800		Orang	70,797,500	86	Orang	136,102,300	100%	98%	86	Orang	136,102,300	78%	92%	DLHD	Prov. SULUT
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data yang diperlukan per bulan untuk administrasi kepegawaian	12	Laporan	44,531,883	0	Laporan	-	12	Laporan	26,529,752		Laporan	-	3	Laporan	4,244,080	0	Laporan	-	9	Laporan	21,414,400	12	Laporan	25,658,480	100%	97%	12	Laporan	25,658,480	100%	58%	DLHD	Prov. SULUT
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**97.14%**				**89.09%**	**74.86%**		
																									Predikat Kinerja		**Tinggi**	**Tinggi**				**Tinggi**	**Sedang**		
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Penyediaan Jada Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1**		**105,493,301**	**0**		**-**	**1**		**85,377,783**	**0**		**-**	**0**		**-**	**1**		**760,200**	**0**		**63,002,472**	**1**		**63,762,672**	**100%**	**75%**	**1**		**63,762,672**	**100%**	**60%**		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	Kegiatan	105,493,301	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	85,377,783		Kegiatan	-		Kegiatan	-	1	Kegiatan	760,200	**0**	Kegiatan	63,002,472	1	Kegiatan	63,762,672	100%	75%	1	Kegiatan	63,762,672	100%	60%	DLHD	Prov. SULUT
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**74.68%**				**100.00%**	**60.44%**		
																									Predikat Kinerja		**Tinggi**	**Sedang**				**Tinggi**	**Sedang**		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalannya yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2021											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan renja PD tahun 2020)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
													Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	Kinerja		Rp	Kinerja	Rp		
5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Pengadaan barang milik daerah penunjang kegiatan PD**	**23**		**92,610,000**	**0**		**-**	**22**		**388,188,249**	**0**		**-**	**0**		**-**	**6**		**80,050,000**	**16**		**303,140,000**	**22**		**383,190,000**	**100%**	**99%**	**22**		**383,190,000**	**96%**	**414%**		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diperlukan untuk menunjang kegiatan PD	15	Unit	48,234,375	0	Unit	-	2	Unit	30,000,002	0	Unit	-		Unit	-	1	Unit	15,000,000	1	Unit	15,000,000	2	Unit	30,000,000	100%	100%	2	Unit	30,000,000	13%	62%	DLHD	Prov. SULUT
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diperlukan untuk menunjang kegiatan PD	8	Unit	44,375,625	0	Unit	-	20	Unit	358,188,247	0	Unit	-		Unit	-	5	Unit	65,050,000	15	Unit	288,140,000	20	Unit	353,190,000	100%	99%	20	Unit	353,190,000	100%	796%	DLHD	Prov. SULUT
																								-	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**100.00%**	**99.30%**				**56.67%**	**100.00%**		
																									Predikat Kinerja			**Tinggi**	**Tinggi**				**Tinggi**	**Sedang**		
6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**24**		**527,848,832**	**0**		**-**	**24**		**545,751,618**	**6**		24,025,967	**6**		**128,201,056**	**6**		**127,716,457**	**6**		**225,277,233**	**24**		**505,220,713**	**100%**	**93%**	**24**		**505,220,713**	**100%**	**96%**	DLHD	DLHD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang diperlukan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	117,417,903.8	**0**	Bulan	**-**	12	Bulan	139,200,000	3	Bulan	-	3	Bulan	16,883,200	3	Bulan	47,664,575	3	Bulan	35,829,900	12	Bulan	100,377,675	100%	72%	12	Bulan	100,377,675	100%	85%	DLHD	DLHD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan yang diperlukan untuk penyedliaan jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	410,430,927.8	0	Bulan	-	12	Bulan	406,551,618	3	Bulan	24,025,967	3	Bulan	111,317,856	3	Bulan	80,051,882	3	Bulan	189,447,333	12	Bulan	404,843,038	100%	100%	12	Bulan	404,843,038	100%	99%	DLHD	DLHD
																								-	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**100.00%**	**85.85%**				**100.00%**	**92.06%**		
																									Predikat Kinerja			**Tinggi**	**Tinggi**				**Tinggi**	**Tinggi**		
7		**Pemeliharaan Barang Milik**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang**	**41**		**236,009,807**	**0**		**-**	**31**		**198,488,938**	**0**		**-**	**8**		**17,366,212**	**9**		**11,800,338**	**14**		**143,848,323**	**31**		**173,014,873**	**100%**	**87%**	**31**		**173,014,873**	**76%**	**73%**		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	14	Unit	85,072,675	0	Unit	-	9	Unit	93,834,000	0	Unit	-	2	Unit	12,746,292	4	Unit	10,190,338	3	Unit	46,249,347	9	Unit	69,185,977	100%	74%	9	Unit	69,185,977	64%	81%	DLHD	Prov. SULUT
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	25	Unit	14,586,075	0	Unit		20	Unit	17,500,000	0	Unit	-	5	Unit	1,600,000	5	Unit	1,610,000	10	Unit	14,232,894	20	Unit	17,442,894	100%	100%	20	Unit	17,442,894	80%	120%	DLHD	Prov. SULUT
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi	1	Gedung	131,084,147	0	Gedung		1	Gedung	73,000,000		Gedung	-		Gedung	-		Gedung	-	1	Gedung	72,606,082	1	Gedung	72,606,082	100%	99%	1	Gedung	72,606,082	100%	55%	DLHD	Prov. SULUT
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala	1	Gedung	5,266,910	0	Gedung	-	1	Gedung	14,154,938	0	Gedung	-	1	Gedung	3,019,920		Gedung	-	0	Gedung	10,760,000	1	Gedung	13,779,920	100%	97%	1	Gedung	13,779,920	100%	262%	DLHD	Prov. SULUT
																								-	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**100.00%**	**92.55%**				**86.07%**	**100.00%**		
																									Predikat Kinerja			**Tinggi**	**Tinggi**				**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
8		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi**	**1**		**402,501,020**	**0**		**-**	**1**		**291,806,882**	**0**		**-**	**0**		**2,184,000**	**1**		**283,750,000**	**0**		**5,866,500**	**1**		**291,800,500**	**100%**	**100%**	**1**		**291,800,500**	**100%**	**72%**		
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Tersusunnya RPPLH Provinsi	1	Dok	402,501,020	0	Dok	-	1	Dok	291,806,882		Dok	-	0	Dok	2,184,000	1	Dok	283,750,000		Dok	5,866,500	1	Dok	291,800,500	100%	100%	1	Dok	291,800,500	100%	72%	DLHD	Prov. SULUT
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**100.00%**	**100.00%**				**100.00%**	**72.50%**		
																									Predikat Kinerja			**Tinggi**	**Tinggi**				**Tinggi**	**Tinggi**		
9		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**Tersedianya Dokumen KLHS Provinsi**	**0**	**Dok**	-	**0**	**Dok**	**-**	**2**	**Dok**	**381,547,973**	**0**	**Dok**	-	**0**	**Dok**	**25,400,000**	**2**	**Dok**	**320,300,836**	**0**	**Dok**	**29,955,300**	**2**	**Dok**	**375,656,136**	**100%**	**98%**	**2**	**Dok**	**375,656,136**	**0%**	**0%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
		Pemtuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Terselenggaranya Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	0	Dok	-	0	Dok	-	1	Dok	95,445,929	0	Dok	-	0	Dok	25,100,000	1	Dok	37,400,836	0	Dok	27,077,800	1	Dok	89,578,636	100%	94%	1	Dok	89,578,636	0%	0%	DLHD	Prov. SULUT

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalannya yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2021											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan renja PD tahun 2020)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
													Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	Kinerja		Rp	Kinerja	Rp		
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau	Terselenggaranya Pelaksanaan KLHS Untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0	Dok	-	0	Dok	-	1	Dok	286,102,044	0	Dok	-	0	Dok	300,000	1	Dok	282,900,000	0	Dok	2,877,500	1	Dok	286,077,500	100%	100%	1	Dok	286,077,500	0%	0%	DLHD	Prov. SULUT
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	96.92%				0.00%	0.00%		
																									Predikat Kinerja			Tinggi	Tinggi				Rendah	Rendah		
10		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**Terlaksananya Kegiatan perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Hutan (ITH) dan air laut di Provinsi**	**2**		**235,293,863**	**0**		**-**	**2**		**329,088,540**	**1**		**6,922,639**	**2**		**68,001,152**	**0**		**49,587,703**	**0**		**201,850,368**	**2**		**326,361,862**	**100%**	**99%**	**2**		**326,361,862**	**100%**	**139%**		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	Keg	185,293,863	0	Keg	-	1	Keg	249,184,165	1	Keg	6,922,639	1	Keg	58,783,152	0	Keg	42,197,703	0	Keg	141,114,968	1	Keg	249,018,462	100%	100%	1	Keg	249,018,462	100%	134%	DLHD	DLHD
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Laporan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1	Laporan	50,000,000	0	Laporan	-	1	Laporan	79,904,375	0	Laporan	-	1	Laporan	9,218,000		Laporan	7,390,000	0	Laporan	60,735,400	1	Laporan	77,343,400	100%	97%	1	Laporan	77,343,400	100%	155%	DLHD	Prov. SULUT
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	98.36%				100.00%	100.00%		
																									Predikat Kinerja			Tinggi	Tinggi				Tinggi	Sangat Tinggi		
11		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**1**	**keg**	**40,000,000**	**0**	**keg**	**-**	**1**	**keg**	**93,548,726**	**0**	**keg**	**-**	**1**	**keg**	**54,752,800**	**0**	**keg**	**975,000**	**0**	**keg**	37,550,500	**1**	**keg**	**93,278,300**	**100%**	**100%**	**1**	**keg**	**93,278,300**	**100%**	**233%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	Keg	40,000,000	0	Keg	-	1	Keg	93,548,726		Keg	-	1	Keg	54,752,800		Keg	975,000		Keg	37,550,500	1	Keg	93,278,300	100%	100%	1	Keg	93,278,300	100%	233%	DLHD	Prov. SULUT
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	99.71%				100.00%	100.00%		
																									Predikat Kinerja			Tinggi	Tinggi				Tinggi	Sangat Tinggi		
12		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**terlaksananya kegiatan pemulihan untuk peningkatan kualitas lingkungan**	**2**	**Keg**	**70,000,000**	**0**	**Keg**	**-**	**2**	**Keg**	**78,639,521**	**0**	**Keg**	**-**	**2**	**Keg**	**7,631,900**	**0**	**Keg**	**46,011,500**	**0**	**Keg**	**23,987,000**	**2**	**Keg**	**77,630,400**	**100%**	**99%**	**2**	**Keg**	**77,630,400**	**100%**	**111%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	terlaksananya kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	Kegiatan	35,000,000	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	28,871,058		Kegiatan	-	1	Kegiatan	5,826,200	0	Kegiatan	15,525,000	0	Kegiatan	6,524,000	1	Kegiatan	27,875,200	100%	97%	1	Kegiatan	27,875,200	100%	80%	DLHD	Prov. SULUT
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	terlaksananya kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1	Kegiatan	35,000,000	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	49,768,463		Kegiatan	-	1	Kegiatan	1,805,700	0	Kegiatan	30,486,500	0	Kegiatan	17,463,000	1	Kegiatan	49,755,200	100%	100%	1	Kegiatan	49,755,200	100%	142%	DLHD	Prov. SULUT
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	98.26%				100.00%	100.00%		
																									Predikat Kinerja			Tinggi	Tinggi				Tinggi	Tinggi		
13		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah laporan usaha pengumpulan limbah B3 Lintas Kab/kota**	**4**	**Keg**	**83,854,379**	**0**	**Keg**	**-**	**2**	**Keg**	**79,246,383**	**0**	**Keg**	**-**	**2**	**Keg**	**27,735,354**	**0**	**Keg**	**4,250,000**	**0**	**Keg**	**42,876,600**	**2**	**Keg**	**74,861,954**	**100%**	**94%**	**2**	**Keg**	**74,861,954**	**50%**	**89%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi.	1	Keg	15,000,000	0	Keg	-	1	Keg	11,364,134		Keg	-	1	Keg	4,290,354		Keg	4,250,000		Keg	2,106,800	1	Keg	10,647,154	100%	94%	1	Keg	10,647,154	100%	71%	DLHD	Prov. SULUT
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah pusat	3	Keg	68,854,379	0	Keg	-	1	Keg	67,882,249		Keg	-	1	Keg	23,445,000		Keg	-		Keg	40,769,800	1	Keg	64,214,800	100%	95%	1	Keg	64,214,800	33%	93%	DLHD	Prov. SULUT
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	94.14%				66.67%	82.12%		
																									Predikat Kinerja			Tinggi	Tinggi				Sedang	Tinggi		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalannya yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2021											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan renja PD tahun 2020)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
													Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	Kinerja		Rp	Kinerja	Rp		
14		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi**	**100**	**Persen**	**274,611,122**	**0**	**Persen**	**-**	**100**	**Persen**	**292,020,265**	**25**	**Persen**	**6,922,639**	**25**	**Persen**	**68,430,337**	**25**	**Persen**	**39,695,474**	**25**	**Persen**	174,651,462	**100**	**Persen**	**289,699,912**	**100%**	**99%**	**100**	**Persen**	**289,699,912**	**100%**	**105%**		
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1	Keg	194,474,264	0	Keg	-	1	Keg	236,104,112	1	Keg	6,922,639	0	Keg	61,850,637		Keg	38,545,474	0	Keg	126,928,562	1	Keg	234,247,312	100%	99%	1	Keg	234,247,312	100%	120%	DLHD	Prov. SULUT
		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang dilatih dan dibina	30	Orang	15,000,000	0	Orang	-	30	Orang	-		Orang	-		Orang	-		Orang	-		Orang	-	0	Orang	-	0%	0%	0	Orang	-	0%	0%	DLHD	Prov. SULUT
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	15	Pelaku usaha/kegiatan	65,136,858	0	Pelaku usaha/kegiatan		15	Pelaku usaha/kegiatan	55,916,153		Pelaku usaha/kegiatan	-	5	Pelaku usaha/kegiatan	6,579,700	5	Pelaku usaha/kegiatan	1,150,000	5	Pelaku usaha/kegiatan	47,722,900	15	Pelaku usaha/kegiatan	55,452,600	100%	99%	15	Pelaku usaha/kegiatan	55,452,600	100%	85%	DLHD	Prov. SULUT
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**66.67%**	**66.13%**				**66.67%**	**68.53%**		
																									Predikat Kinerja			**Sedang**	**Sedang**				**Sedang**	**Sedang**		
15		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan**	**terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan gerakan peduli lingkungan**	**0**	**Keg**	**-**	**0**	**Keg**	**-**	**1**	**Keg**	**-**	**0**	**Keg**	**-**	**0**	**Keg**	**-**	**0**	**Keg**	**-**	**0**	**Keg**	**-**	**0**	**Keg**	**-**	**0%**	0%	**0**	**Keg**	**-**	**0%**	**0%**		
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	-		Kegiatan	-	0	Kegiatan	-		Kegiatan	-		Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0%	0%	0	Kegiatan	-	0%	0%	DLHD	Prov. SULUT
																								-	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**0.00%**	**0.00%**				**0.00%**	**0.00%**		
																									Predikat Kinerja			**Rendah**	**Rendah**				**Rendah**	**Rendah**		
16		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**Terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup**	**1**	**Keg**	**71,875,182**	**0**	**Keg**	**-**	**1**	**Keg**	**119,958,091**	**0**	**Keg**	**-**	**1**	**Keg**	**25,644,200**	**0**	**Keg**	**27,175,000**	**0**	**Keg**	**65,829,200**	**1**	**Keg**	**118,648,400**	**100%**	**99%**	**1**	**Keg**	**118,648,400**	**100%**	**165%**	DLHD	Prov. SULUT
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan	Jumlah Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	1	Kegiatan	71,875,182	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	119,958,091		Kegiatan	-	1	Kegiatan	25,644,200		Kegiatan	27,175,000		Kegiatan	65,829,200	1	Kegiatan	118,648,400	100%	99%	1	Kegiatan	118,648,400	100%	165%	DLHD	Prov. SULUT
																								-	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**100.00%**	**98.91%**				**100.00%**	**100.00%**		
																									Predikat Kinerja			**Tinggi**	**Tinggi**				**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
17		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang diselesaikan**	**100**	**Persen**	**97,305,415**	**0**	**Persen**	**-**	**100**	**Persen**	**109,007,716**	**25**	**Persen**	**3,063,999**	**25**	**Persen**	**18,269,371**	**25**	**Persen**	**9,448,372**	**25**	**Persen**	**68,014,996**	**100**	**Persen**	**98,796,738**	**100%**	**91%**	**100**	**Persen**	**98,796,738**	**100%**	**102%**		
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Tersedianya Sistem Pengelolaan Pengaduan LH	1	Kegiatan	88,389,143	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	109,007,716	1	Kegiatan	3,063,999	0	Kegiatan	18,269,371		Kegiatan	9,448,372	0	Kegiatan	68,014,996	1	Kegiatan	98,796,738	100%	91%	1	Kegiatan	98,796,738	100%	112%	DLHD	Prov. SULUT

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalannya yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2021											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan renja PD tahun 2020)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
													Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Kinerja		Rp	Kinerja			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	1	Kegiatan	8,916,272	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	-		Kegiatan	-		Kegiatan	-		Kegiatan	-		Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0%	0%	0	Kegiatan	-	0%	0%	DLHD	Prov. SULUT
																							-	Rata-rata Capaian Kinerja (%)			50.00%	45.32%				50.00%	55.89%		
																								Predikat Kinerja			Sedang	Rendah				Sedang	Sedang		
18		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**Prosentase Penanganan Sampah di Provinsi Sulut**	**70**	**Persen**	**512,333,471**	**0**	**Persen**	**-**	**45**	**Persen**	**572,735,816**	**5**	**Persen**	**10,350,848**	**5**	**Persen**	**108,155,393**	**15**	**Persen**	**154,753,876**	**20**	**Persen**	271,412,153	**45**	**Persen**	**544,672,270**	**100%**	**95%**	**45**	**Persen**	**544,672,270**	**64%**	**106%**		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen rencana Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	5	Dok	171,834,329	0	Dok	-	4	Dok	178,948,170	1	Dok	10,350,848	1	Dok	29,448,152	1	Dok	36,154,000	1	Dok	100,634,000	4	Dok	176,587,000	100%	99%	4	Dok	176,587,000	80%	103%	DLHD	Prov. SULUT
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	1	Keg	169,602,697	0	Keg	-	1	Keg	243,536,050		Keg	-	1	Keg	59,134,241		Keg	38,824,876		Keg	122,590,153	1	Keg	220,549,270	100%	91%	1	Keg	220,549,270	100%	130%	DLHD	Prov. SULUT
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1	Keg	170,896,445	0	Keg	-	1	Keg	150,251,596		Keg	-	1	Keg	19,573,000		Keg	79,775,000		Keg	48,188,000	1	Keg	147,536,000	100%	98%	1	Keg	147,536,000	100%	86%	DLHD	Prov. SULUT
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	95.81%				93.33%	100.00%		
																								Predikat Kinerja			Tinggi	Tinggi				Tinggi	Tinggi		
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**518**		**10,873,716,961**	**0**		**-**	**472**		**10,604,811,962**	**66**		**1,654,178,552**	**90**		**2,625,264,244**	**179**		**2,744,560,189**	**124**		**1,830,194,222**	**458**		**10,099,004,012**	**92.48%**	**95.23%**	**458**		**10,099,004,012**	**88.03%**	**95.23%**		
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D 14																																		
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 18)																									**Tinggi**	**Rendah**				**Rendah**	**Rendah**		
		FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait, kabupaten/kota dan pelaku usaha kegiatan ketika pengambilan data dan Adanya ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor ketika bekerja																																		
		FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : Realisasi Masih rendah dikarenakan adanya pengurangan anggaran akibat pandemi covid-19																																		
		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : Realisasi berjalan sesuai anggaran kas dan percepatan dalam melaksanakan kegiatan.																																		

FORMULIR E.55

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI

RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang Mengacu pada Sasaran RKPD Provinsi:

1. **Cakupan penerbitan dokumen kependuduka**
2. **angka kelahiran total (Total Ferlitity Rate/TFR) per WUS Usia 15-19 Tahun**
3. **Angka Kelahiran Remaja Umum 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19 tahun)**

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
1	2	3	7		8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12			15 = 14 / 5 x 100%		16	17
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV															
			K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		9,173,391,878															7,988,592,929	100.00%	87.08%							
1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		8,910,490,404															7,733,440,579	100.00%	86.79%							
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		8,115,321,721															7,019,769,175	100.00%	86.50							
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		62,693,634															252,527,775	100.00%	402.80							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,200,000	1	dokumen	4,200,000										1	dokumen	4,200,000	100.00%	100.00%	1	dokumen	4,200,000			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen dan 2 kegiatan	102,961,907										2	Kegiatan	85,188,875	2	Kegiatan	85,188,875	100.00%	82.74%	2	Kegiatan	85,188,875			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen dan 15 kabupaten kota	164,846,836				3	dokumen	7,512,400				15	kab/kota	155,626,500	3 15	dokumen dan kab/kota	163,138,900	100.00%	98.96%	315	dokumen dan kab/kota	163,138,900			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	15 kab/kota se Prov. Sulut
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0																								
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6,685,092,456															5,716,181,502	100.00%	85.51							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	6,641,986,500	3	bulan	1,401,654,735	4	bulan	2,021,370,084	4	bulan	1,655,416,387	3	bulan	594,966,896	12	bulan	5,673,408,102	100.00%	85.42%	12	bulan	5,673,408,102			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	28,696,956	3	bulan	2,991,000			1,100,000			16,815,750			7,600,000	12	bulan	28,506,750	100.00%	99.34%	12	bulan	28,506,750			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3,350,225	1	dokumen	494,500			2,790,750							1	dokumen	3,285,250	100.00%	98.06%	1	dokumen	3,285,250			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semest eran SKPD	17 Dokumen	11,058,775	4	dokumen	0	5	dokumen	0	4	dokumen	7,078,700	4	dokumen	3,902,700	17	dokumen	10,981,400	100.00%	99.30%	17	dokumen	10,981,400			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		208,653,018															239,945,863	100.00%	115.00							
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya	57 Pegawai	102,600,000				57	pegawai	44,800,000	57	pegawai	56,743,500				57	pegawai	101,543,500	100.00%	98.97%	57	pegawai	101,543,500			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9 ASN	0															0	100.00%	#DIV/0!	0	0	0				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	30 ASN	67,909,804										30	ASN	45,349,079	30	asn	45,349,079	100.00%	66.78%	30	asn	45,349,079			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	100 ASN	105,020,001										100	ASN	93,053,284	100	asn	93,053,284	100.00%	88.61%	100	asn	93,053,284			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah		654,756,180															273,853,809	100.00%	41.83							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 TA	2,977,200										1	TA	2,965,000	1	TA	2,965,000	100.00%	99.59%	1	TA	2,965,000			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	5,707,800				3	bulan	5,400,000							12	bulan	5,400,000	100.00%	94.61%	12	bulan	5,400,000			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	291,611,891	3	bulan	15,350,000	3	bulan	114,300,500	3	bulan	62,043,247	3	bulan	73,795,062	12	bulan	265,488,809	100.00%	91.04%	12	bulan	265,488,809			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Luar daerah (Jakarta, Bandung,
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		19,990,002															98,300,000	100.00%	491.75							
		Pengadaan Mebel	100 %	0																		0	0	0				

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 paket	98,560,000										1	paket	98,300,000	1	paket	98,300,000	100.00%	99.74%	1	paket	98,300,000			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		251,583,095															317,641,658	100.00%	126.26							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	48,360,000	3	bulan	7,840,000	3	bulan	11,760,000	3	bulan	16,280,000	3	bulan	11,760,000	12	bulan	47,640,000	100.00%	98.51%	12	bulan	47,640,000			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	215,365,629	3	bulan	21,685,776	3	bulan	42,728,903	3	bulan	64,950,802	3	bulan	85,734,257	12	bulan	215,099,738	100.00%	99.88%	12	bulan	215,099,738			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Penyediaan jasa Surat Menyurat	15 kab/kota	85,588,868										15	kab/kota	54,901,920	15	kab/kota	54,901,920	100.00%	64.15%	15	kab/kota	54,901,920			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	kabupaten/kota
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		137,011,569															121,318,568	100.00%	88.55							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	131,211,569	3	bulan	15,492,152	3	bulan	26,606,343	3	bulan	485,021	3	bulan	75,530,052	12	bulan	118,113,568	100.00%	90.02%	12	bulan	118,113,568			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	5,800,000	3	bulan	-	3	bulan	500,000	3	bulan		3	bulan	2,705,000	12	bulan	3,205,000	100.00%	55.26%	12	bulan	3,205,000			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																										
		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum																										
		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan																										
		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa																										
		kegiatan penyediaan kebutuhan administrasi kepegawaian																										
		Kegiatan penataan kearsipan																										
		Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi																										
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																										
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor																										
		Pengadaan Meubeleur																										
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional																										
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor																										
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan																										
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan																										
		Program peningkatan disiplin aparatur																										
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya																										
		Pengadaan buku peraturan perundang undangan																										
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur																										
		Kegiatan pelatihan dan bimtek/magang																										
		pendidikan dan pelatihan kepemimpinan																										
		Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan																										
		Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realsasi kinerja PD																										
		Kegiatan Penyusunan Laporan bulanan SKPD																										
		Kegiatan Penyusunan Laporan tahunan																										

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021													Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
		Kegiatan penyusunan laporan keuangan prognosis/semesteran																											
		Program penyelenggaraan hari hari besar kenegaraan/kedaerahan																											
		Pelaksanaan kegiatan pameran/promosi																											
		Program Perencanaan Perangkat Daerah																											
		Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah																											
		Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah																											
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah																											
2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		317,580,118																198,838,574	100.00%	6261.05%							
8		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		18,229,500																17,478,274	100.00%	95.88							
		Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	3 Kegiatan	18,229,503				1	kegiatan	17,478,274							1	kegiatan	17,478,274	100.00%	95.88%	1	kegiatan	17,478,274			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
9		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		99,980,107																48,861,500	100.00%	48.87							
		Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Bulan	49,373,000	3	bulan	11,096,500	3	bulan	20,715,000	3	bulan	6,620,000	3	bulan	10,430,000	12	bulan	48,861,500	100.00%	98.96%	12	bulan	48,861,500			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Kabupaten/Kota
10		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		158,909,505																132,498,800	100.00%	83.38							
		Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	12 Bulan	136,908,632	3	bulan	2,710,000	3	bulan	36,379,900	3	bulan	37,647,500	3	bulan	55,761,400			132,498,800	100.00%	96.78%	0	0	132,498,800			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Kabupaten/Kota
		Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	30 Orang	0																0		#DIV/0!	0	0	0			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		217,600,011																173,002,104	50.00%	79.50							
11		Pelayanan Pencatatan Sipil		58,690,506																0	0.00%	0.00							
		Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	3 Kegiatan	0																0	0.00%	#DIV/0!	0	0	0			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
12		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		158,909,505																173,002,104	100.00%	108.87							
		Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	12 Bulan	136,908,632	3	bulan	22,000,000	3	bulan	5,919,000	3	bulan	38,809,900	3	bulan	52,548,400	12	bulan	119,277,300	100.00%	87.12%	12	bulan	119,277,300			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Kabupaten/Kota
		Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	30 Orang	58,909,804				30	orang	53,724,804							30	orang	53,724,804	100.00%	91.20%	30	orang	53,724,804			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
4		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		678,790,871																312,433,127	100.00%	46.03							
13		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		519,881,366																88,182,122	100.00%	16.96							
		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n	2 Kegiatan	-																0	100.00%	#DIV/0!	0	0	0			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerinta h Kewenangan Provinsi	12 Bulan	56,526,266				3	bulan	4,189,559	3	bulan	8,007,700	3	bulan	30,628,907	12	bulan	42,826,166	100.00%	75.76%	12	bulan	42,826,166			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Jakarta
		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n	1 Kegiatan	63,638,804										1	kegiatan	45,355,956	1	kegiatan	45,355,956	100.00%	71.27%	1	kegiatan	45,355,956			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
14		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		158,909,505																224,251,005	100.00%	141.12							
		Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n	12 Bulan	185,208,632	3	bulan	17,698,500	3	bulan	20,299,701	3	bulan	52,698,000	3	bulan	87,161,300	12	bulan	177,857,501	100.00%	96.03%	12	bulan	177,857,501			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Jabupaten kota
		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n dan Pendayagunaa n Data Kependuduka n	30 Orang	46,393,804							1	kegiatan	46,393,504				1	kegiatan	46,393,504	100.00%	100.00%	1	kegiatan	46,393,504			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
5		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		80,243,272																29,705,506	100.00%	37.02			29,705,506				
15		Penyediaan Profil Kependudukan		80,243,272																29,705,506	100.00%	37.02							

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
		Penyediaan Data Kependuduka n Provinsi	1 Dokumen	0															0			0	0	0			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Penyusunan Profil Data Perkembanga n dan Proyeksi kependuduka n serta Kebutuhan yang lain	1 Dokumen	43,071,606	3	bulan	3,900,000	3	bulan	13,836,506	3	bulan	6,969,000	3	bulan	5,000,000	1	dokumen	29,705,506	100.00%	68.97%	1	dokumen	29,705,506			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Program Pengendalian Pencatatan Sipil																										
		Rapat Koordinasi Pencatatan Sipil																										
		bimbingan teknis pencatatan sipil																										
		Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																										
		Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi Sulawesi Utara																										
		Rapat Koordinasi Pendaftaran Penduduk																										
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan																										
		sosialsiasi kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan																										
		Bimbingan teknis pendaftaran Penduduk																										
		Bimbingan teknis PIAK (Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan)																										
		Bimbingan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan																										
		Fasilitasi Distribusi Blanko KTP El Ke Kab/Kota																										
		Koordinasi dan konsutlasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan																										
		penyusunan buku data kependudukan persemester tingkat provinsi																										
		bimtek petugas pelayanan adminduk (Front office)																										
		Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)																										
		Bimbingan Teknis PIAK (Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan) (DAK)																										
		Fasilitas Distribusi Blanko KTP-el ke Kab./Kota(DAK)																										
		Sosialisasi Pendayagunaan Data Kependudukan																										
		Koordinasi, Konsultasi, dan Asistensi RKA Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan																										
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		299,397,652															255,152,350		85.22%							
6		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		77,796,220															76,416,500	100.00%	98.23							
16		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		55,934,874															8,838,000	100.00%	15.80							
		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependuduka n, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	12 Bulan	8,838,000										12	bulan	8,838,000	12	bulan	8,838,000	100.00%	100.00%	12	bulan	8,838,000			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	jakarta

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021													Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
		Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependuduka n Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA- MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	1 Kegiatan	0																0	100.00%	#DIV/0!						Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependuduka n di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	1 Kegiatan	0																0	100.00%	#DIV/0!						Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
17		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi		21,861,346																67,578,500	100.00%	309.12							
		Penyediaan Dukungan Penyelenggar aan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	12 Bulan	70,701,346	3	bulan	6,354,000	3	bulan	8,294,000	3	bulan	4,930,000	3	bulan	48,000,500				67,578,500	100.00%	95.58%	0	0	67,578,500			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Kabupaten/kota
7		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		71,602,795																49,761,850	100.00%	69.50							
18		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		56,292,803																34,863,200	100.00%	61.93							
		Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	1 Kegiatan	20,164,757																0	100.00%	0.00%	0	0	0			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	1 Kegiatan	36,128,046	3	bulan	8,266,500	1	kegiatan	26,596,700							1	kegiatan	34,863,200	100.00%	96.50%	1	kegiatan	34,863,200			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
19		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		15,309,992																14,898,650	100.00%	97.31							
		Pengembanga n Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaa n dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakat an dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	1 Kegiatan	15,309,992				1	kegiatan	14,898,650							1	kegiatan	14,898,650	100.00%	97.31%	1	kegiatan	14,898,650			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Program Pengendalian Penduduk																											
		Rapat Koordinasi Pengendalian Penduduk																											
		Pengembangan Grand Desain Keluarga Berencana																											
		Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian Penduduk																											
		Koordinasi dan konsultasi pengendalian penduduk																											
		Pembekalan bagi pelaksana / pengelola kampung KB																											
		Bimbingan teknis penyuluh KB																											
		monitoring dan evaluasi analisa data pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan																											
		Rapat kerja daerah bidang keluarga berencana																											
		PROGRAM STRATEGI PENGENDALIAN PENDUDUK																											
		advokasi penanggulangan komplikasi/efek samping kegagalan ber KB																											
		pemberdayaan kelompok masyarakat peduli KB																											
		bimbingan teknis strategi pengendalian penduduk																											
8		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		149,998,637																128,974,000	75.00%	85.98							
20		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		104,078,921																128,531,800	100.00%	123.49							
		Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembanga n Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Kegiatan	21,090,466			-	1	kegiatan	19,525,000						626,450				20,151,450	100.00%	95.55%	0	0	20,151,450			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
		Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1 Kegiatan	20,592,663			-							1	kegiatan	19,481,450	1	kegiatan	19,481,450	100.00%	94.60%	1	kegiatan	19,481,450			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Penyediaan dan Pengembanga n Materi IPK	12 Bulan	78,482,904	3	bulan	12,860,000	3	bulan	15,197,300	3	bulan	9,880,000	3	bulan	40,227,500	12	bulan	78,164,800	100.00%	99.59%	12	bulan	78,164,800			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	kabupaten/kota
		Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbinga n, Pengembanga n, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 Kegiatan	10,872,213			-	1	kegiatan	9,877,200						856,900	1	kegiatan	10,734,100	100.00%	98.73%	1	kegiatan	10,734,100			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
21		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		45,919,716															442,200	50.00%	0.96			442,200				
		Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	12 Bulan	25,844,844									442,200				1	kegiatan	442,200	100.00%	1.71%	1	kegiatan	442,200			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakat an dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga	1 Kegiatan	20,074,872															0	0.00%	0.00%	0	0	0			Disdukcapil dan KB Prov. Sulut	Manado
		Program Keluarga Sejahtera																											
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Keluarga Sejahtera																											
		Monitoring Dan Evaluasi Keluarga Sejahtera																											
		pembinaan bagi remaja usia produkti yang belum memiliki pekerjaan tetap																											
		rapat kerja daerah bidang keluarga sejahtera																											
		pembinaan organinasi kemasyarakatan lingkup provinsi bidang keluarga sejahtera																											
		Bimbingan teknis bina keluarga Balita dan pembinaan kelahiran remaja																											

90.63% 87.08%

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM : Rp. 7.988.59

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 8)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 8)

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : TERSEDIANYA ANGGARAN YANG MEMADAI

FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : TERJADINYA REFOCUSING UNTUK MASA PANDEMI COVID 19

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :

Evaluasi Hasil Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Periode Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2021

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi pada sasaran RKPD Provinsi :

No.	Sasaran	Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017, 2018,2019,2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Tahun Triwulan 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Ket.
													Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV													
1	2	3	4	5				6		7			8		9		10		11		12=(I,II,III,IV)		13=12/7x100%		14 = 6+12		15=14/5x100%		16	17
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rupiah		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Perangkat Daerah DPM-DD ; NILAI LKIP SKPD BPM-PD RATA - RATA MINIMUM B**	**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD Dinas PMDD RATA - RATA MINIMUM B**	**3,112,464,469.00**	**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD Dinas PMDD RATA - RATA MINIMUM B**	**608,068,912.00**	**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD Dinas PMDD RATA - RATA MINIMUM B**	**4,024,025,253.00**	**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD Dinas PMDD RATA - RATA MINIMUM B**	**-**	**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD Dinas PMDD RATA - RATA MINIMUM B**	**0.00**	**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD Dinas PMDD RATA - RATA MINIMUM B**	**0.00**	**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD Dinas PMDD RATA - RATA MINIMUM B**	**0.00**	**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD Dinas PMDD RATA - RATA MINIMUM B**	**0.00**	**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD Dinas PMDD RATA - RATA MINIMUM B**	**-**	**0**	**0%**	**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD Dinas PMDD RATA - RATA MINIMUM B**	**4,760,856,881.00**	**60**	**912%**	**Sekretariat**	
		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	60 Bln	1,067,150,012.00	Bln	213,333,063.00	36 Bln	736,831,628.00	0 Bln	0.00		0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0	0%	36 Bln	736,831,628.00	60	**69.05%**		
		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	60 Bln	600,326,437.00	Bln	149,731,701.00	36 Bln	802,552,378.00	0 Bln	0.00		0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0	0%	36 Bln	802,552,378.00	60	**133.69%**		
		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	60 Bln	230,418,660.00	Bln	91,222,029.00	36 Bln	754,405,028.00	0 Bln	0.00		0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0	0%	36 Bln	754,405,028.00	60	**327.41%**		
		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	60 Bln	131,153,500.00	Bln	49,798,301.00	36 Bln	762,839,891.00	0 Bln	0.00		0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0	0%	36 Bln	762,839,891.00	60	**581.64%**		
		Kegiatan Penyediaan Kearsipan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Kearsipan	60 Bln	21,939,340.00	Bln	21,971,160.00	36 Bln	736,831,628.00	0 Bln	0.00		0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0	0%	0 Bln	736,831,628.00	0	**3358.49%**		
		Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60 Bln	1,061,476,520.00	Bln	103,983,818.00	36 Bln	967,396,328.00	0 Bln	0.00		0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0	0%	36 Thn	967,396,328.00	60	**91.14%**		
																					Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja		**0**	**0%**			**80**	**107.00%**		
																							sangat rendah	**sangat rendah**			**Tinggi**	**sangat tinggi**		
2		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Perangkat Daerah DPM-DD ; Jumlah peralatan/ perlengkapan penunjang kinerja pelayanan publik**	**#### Bh**	**1,478,533,198.00**	**Bh**	**646,184,826.00**	**95 Bh**	**1,261,104,415.00**	**95 Bh**	**-**		**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD DPM-DD RATA-RATA MINIMUM B**	**-**	**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD DPM-DD RATA-RATA MINIMUM B**	**-**	**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD DPM-DD RATA-RATA MINIMUM B**	**-**	**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD DPM-DD RATA-RATA MINIMUM B**	**-**	**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD DPM-DD RATA-RATA MINIMUM B**	**-**	**0**	**0%**	**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD DPM-DD RATA-RATA MINIMUM B**	**1,261,104,415.00**	**54**	**88.75%**	**Sekretariat**	
		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	0 Unit		Unit	0.00	2 Unit	-	0 Unit	0.00		0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0	0%	2 Unit	-	0	**0.00%**		
		Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	Jumlah Peralatan/perlengkapan Gedung Kantor	290 Jenis	585,082,302.00	Jenis	430,255,000.00	123 Jenis	543,806,819.00	0 Jenis	0.00		0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00	0	0%	123 Jenis	543,806,819.00	42.414	**92.95%**		
		Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan/Perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor secara Rutin dan Secara berkala	60 Bln	83,246,500.00	Bln	16,041,390.00	36 Bln	78,657,390.00	0 Bln	-		0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0 Bln	0.00	0	0%	36 Bln	78,657,390.00	60	**94.49%**		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Operasional/Dinas secara Rutin dan Secara	25 Unit	810,204,396.00	Unit	199,888,436.00	15 Unit	638,640,206.00	0 Unit	-		0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0	0%	15 Unit	638,640,206.00	60	**78.82%**		
																					Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :		**0**	**0.00%**			**67**	**88.75%**		
																							sangat rendah	**sangat rendah**			**rendah**	**tinggi**		
3		**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin**	**60 ASN**	**187,679,375.00**	**ASN**		**60 ASN**	**102,730,000.00**	**40 ASN**	**-**		**40 ASN**	**0.00**	**40 ASN**	**0.00**	**40 ASN**	**0.00**		**0.00**	**40 ASN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80 ASN**	**102,730,000.00**	**40**	**44.14%**	**Sekretariat**	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Orang/Stel	300 Org	156,069,375.00	Org	36,120,000.00	0 Org	31,120,000.00	0 Org	-		0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0	0%	0 Org	31,120,000.00	0	**19.94%**		
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Orang/Stel	300 Org	31,610,000.00	Org	31,610,000.00	120 Org	71,610,000.00	0 Org	-		0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0	0%	120 Org	71,610,000.00	40	**44.14%**		
																					Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :		**0**	**0.00%**			**40**	**44.14%**		
																							sangat rendah	**sangat rendah**			**sangat rendah**	**sangat rendah**		
4		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Proporsi aparatur pemerintah Dinas PMDD yang memiliki pengetahuan komprehensif**	**60 ASN**	**176,232,290.00**	**ASN**	**0.00**	**60 ASN**	**13,518,000.00**	**40 ASN**	**-**		**40 ASN**	**0.00**	**40 ASN**	**0.00**	**40 ASN**		**40 ASN**	**0.00**	**40 ASN**	**0.00**	**0**	**0%**	**40 ASN**	**13,518,000.00**	**26.667**	**24%**	**Sekretariat**	
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan,	Jumlah Peserta yang difasilitasi	300 Org	60,000,000.00	Org	0.00	0 Org	-	0 Org	-		0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0	0%	0 Org	-	0	**0.00%**		
		Penguatan Kapasitas SDM Aparatur KP PMD se-	Jumlah peserta yang difasilitasi	300 Org	60,000,000.00	Org	0.00	0 Org	-	0 Org	-		0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0	0%	0 Org	-	0	**0.00%**		
		Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) / In house training	Jumlah peserta	300 Org	56,232,290.00	Org	0.00	80 Org	13,518,000.00	40 Org	-		0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0	0%	80 Org	13,518,000.00	26.667	**24.00%**		
																					Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :		**0**	**0.00%**			**26.66**	**24.00%**		
																							sangat rendah	**sangat rendah**			**sangat rendah**	**sangat rendah**		
5		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan-undangan**	**100% dari 42 Laporan (LKIP, LAPORAN TAHUNAN, LPPD SKPD, LKPJ SKPD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan fungsional bendahara, Laporan semesteran, 12 Laporan EPRA)**	**86,582,038.00**	**100% dari 42 Laporan (LKIP, LAPORAN TAHUNAN, LPPD SKPD, LKPJ SKPD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan fungsional bendahara, Laporan semestera n, 12**	**11,167,450.00**	**100% dari 42 Laporan (LKIP, LAPORAN TAHUNAN, LPPD SKPD, LKPJ SKPD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan fungsional bendahara, Laporan semesteran, 12 Laporan EPRA)**	**21,297,550.00**	**100% dari 42 Laporan (LKIP, LAPORAN TAHUNAN, LPPD SKPD, LKPJ SKPD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan fungsional bendahara, Laporan semesteran, 12 Laporan EPRA)**	**-**	**100% dari 42 Laporan (LKIP, Laporan Tahunan, LPPD PD, LKPJ PD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan Fungsional Bendahara, Laporan Semesteran, 12 Laporan EPRA)**	**0.00**	**100% dari 42 Laporan (LKIP, Laporan Tahunan, LPPD PD, LKPJ PD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan Fungsional Bendahara, Laporan Semesteran, 12 Laporan EPRA)**	**0.00**	**100% dari 42 Laporan (LKIP, Laporan Tahunan, LPPD PD, LKPJ PD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan Fungsional Bendahara, Laporan Semesteran, 12 Laporan EPRA)**	**0.00**	**100% dari 42 Laporan (LKIP, Laporan Tahunan, LPPD PD, LKPJ PD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan Fungsional Bendahara, Laporan Semesteran, 12 Laporan EPRA)**	**0.00**	**100% dari 42 Laporan (LKIP, Laporan Tahunan, LPPD PD, LKPJ PD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan Fungsional Bendahara, Laporan Semesteran, 12 Laporan EPRA)**	**0.00**	**0**	**0%**	**100% dari 42 Laporan (LKIP, Laporan Tahunan, LPPD PD, LKPJ PD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan Fungsional Bendahara, Laporan Semesteran, 12 Laporan EPRA)**	**21,297,550.00**	**48**	**24%**	**Sekretariat**	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang	15 Lap	34,579,600.00	Lap	0.00	9 Lap	750,000.00	0 Lap	0.00		0 Lap	0.00	0 Lap	0.00	0 Lap	0.00	0 Lap	0.00	0 Lap	0.00	0	0%	9 Lap	750,000.00	60	**2.17%**		
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang	10 Lap	18,398,078.00	Lap	3,647,950.00	6 Lap	6,455,000.00	0 Lap	-		0 Lap	0.00	0 Lap	0.00	0 Lap	0.00	0 Lap	0.00	0 Lap	0.00	0	0%	6 Lap	6,455,000.00	60	**35.09%**		
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan yang tersusun	5 Lap	18,759,560.00	Lap	3,914,000.00	3 Lap	7,775,850.00	0 Lap	0.00		0 Lap	0.00	0 Lap	0.00	0 Lap	0.00	0 Lap	0.00	0 Lap	0.00	0	0%	3 Lap	7,775,850.00	60	**41.45%**		
		Penyusunan Laporan Bulanan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Bulanan yang tersusun	60 Lap	14,844,800.00	Lap	3,605,500.00	36 Lap	6,316,700.00	0 Lap	-		0 Lap	0.00	0 Lap	0.00	0 Lap	0.00	0 Lap	0.00	0 Lap	0.00	0	0%	36 Lap	6,316,700.00	60	**42.55%**		

No.	Sasaran	Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017, 2018,2019,2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Tahun Triwulan 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Ket.
												Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV												
																						Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :		0	0.00%			60	24.00%		
																								sangat rendah	sangat rendah			rendah	sangat rendah		
6		Program Perencanaan SKPD	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan-undangan	100% dari total 11 dokumen perencanaan (Rancangan Awal Renja SKPD 2018, Rancangan Renja SKPD 2018, Rancangan Akhir Renja SKPD 2018, Renja SKPD 2018, Renja Perubahan SKPD 2017, RKA 2018, RKA Perubahan 2017)	140,267,293.00	100% dari total 11 dokumen perencanaan (Rancangan Awal Renja SKPD 2018, Rancangan Renja SKPD 2018, Rancangan Akhir Renja SKPD 2018, Renja SKPD 2018, Renja	71,376,850.00	100% dari total 11 dokumen perencanaan (Rancangan Awal Renja SKPD 2018, Rancangan Renja SKPD 2018, Rancangan Akhir Renja SKPD 2018, Renja SKPD 2018, Renja Perubahan SKPD 2017, RKA 2018, RKA Perubahan 2017)	58,386,300.00	100% dari total 11 dokumen perencanaan (Rancangan Awal Renja SKPD 2018, Rancangan Renja SKPD 2018, Rancangan Akhir Renja SKPD 2018, Renja SKPD 2018, Renja Perubahan SKPD 2017, RKA 2018, RKA Perubahan 2017)	-	100% dari total 11 dok. perencanaan (Rancangan Awal Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Akhir Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Awal Renja PD 2019,	0.00	100% dari total 11 dok. perencanaan (Rancangan Awal Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Akhir Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Awal Renja PD 2019, Rancangan	0.00	100% dari total 11 dok. perencanaan (Rancangan Awal Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Akhir Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Awal Renja PD 2019, Rancangan	0.00	100% dari total 11 dok. perencanaan (Rancangan Awal Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Akhir Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Awal Renja PD 2019,	0.00	100% dari total 11 dok. perencanaan (Rancangan Awal Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Akhir Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Awal Renja PD 2019,	0.00	0	0%	100% dari total 11 dok. perencanaan (Rancangan Awal Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Akhir Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Awal Renja PD 2019,	58,386,300.00	0	73%	Sekretariat (Sub.Perencanaan/Keuangan)	
		Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	0 Dok	33,188,502.00	Dok	31,169,000.00	0 Dok	31,169,000.00	0 Dok	-	0 Dok	0.00	0 Dok	0.00	0 Dok	0.00	0 Dok	0.00	0 Dok	0.00	0	0%	0 Dok	31,169,000.00	0	93.92%		
		Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	10 Dok	60,231,300.00	Dok	25,707,250.00	6 Dok	12,619,850.00	0 Dok	-	0 Dok	0.00	0 Dok	0.00	0 Dok	0.00	0 Dok	0.00	0 Dok	0.00	0	0%	0 Dok	12,619,850.00	0	20.95%		
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Jumlah Dokumen yang tersusun	10 Dok	46,847,491.00	Dok	14,500,600.00	6 Dok	14,597,450.00	0 Dok	-	0 Dok	0.00	0 Dok	0.00	0 Dok	0.00	0 Dok	0.00	0 Dok	0.00	0	0%	0 Dok	14,597,450.00	0	31.16%		
																						Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :		0	0			53.33	108%		
																								sangat rendah	sangat renda			sangat rendah	sangat tinggi		
7	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap momentum hari besar kenegaraan/kedaerahan melalui Pameran dan Promosi	Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan	Cakupan informasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa melalui pameran promosi : jumlah meteri yang	1 kegiatan 100%	550,000,000.00	1 kegiatan 100%	109,986,000.00	1 kegiatan 100%	155,061,150.00	1 kegiatan 100%	0.00	1 kegiatan 100%	0.00	1 kegiatan 100%	0.00	1 kegiatan 100%	0.00	1 kegiatan 100%	0.00	1 kegiatan 100%	0.00	0	0	1 kegiatan 100%	155,061,150.00	60	11.81%	Sekretariat	
		Kegiatan pelaksanaan pameran dan proomosi	Jumlah kegiatan pameran promosi pembangunan	5 Keg.	347,161,775.00	Keg.	109,986,000.00	3 Keg.	41,000,000.00	1 Keg.	0	0 Keg	0.00	0 Keg	0.00	0 Keg	0.00	0 Keg	0.00	0 Keg	0	0	0%	3 Keg	41,000,000.00	60	11.81%		
Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :																						0	0.00%			60	43.49%		
																								sangat rendah	sangat renda			rendah	sangat rendah		
8	Meningkatnya kapasitas peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi swadaya murni masyarakat dalam Pembangunan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Proporsi desa/kelurahan yang dapat melaksanakan pembangunan dengan swadaya murni masyarakat desa/kelurahan	40% = 6/15 kab/kota x 100% (Dari jumlah Pokmas yang dilatih dari 15/Kab/Kota x 100%)	1,435,181,425.00	40% = 6/15 kab/kota x 100% (Dari jumlah Pokmas yang dilatih dari 15/Kab/Kota x 100%)	269,442,310.00	40% = 6/15 kab/kota x 100% (Dari jumlah Pokmas yang dilatih dari 15/Kab/Kota x 100%)	724,733,000.00	40% = 6/15 kab/kota x 100% (Dari jumlah Pokmas yang dilatih dari 15/Kab/Kota x 100%)	-	40% = 6/15 kab/kota x 100% (Dari jumlah Pokmas yang dilatih dari 15/Kab/Kota x 100%)	0.00	40% = 6/15 kab/kota x 100% (Dari jumlah Pokmas yang dilatih dari 15/Kab/Kota x 100%)	0.00	40% = 6/15 kab/kota x 100% (Dari jumlah Pokmas yang dilatih dari 15/Kab/Kota x 100%)	0.00	40% = 6/15 kab/kota x 100% (Dari jumlah Pokmas yang dilatih dari 15/Kab/Kota x 100%)	0.00	40% = 6/15 kab/kota x 100% (Dari jumlah Pokmas yang dilatih dari 15/Kab/Kota x 100%)	-	0	0%	40% = 6/15 kab/kota x 100% (Dari jumlah Pokmas yang dilatih dari 15/Kab/Kota x 100%)	724,733,000.00	36.444	53%	Dinas PMDD Prov. Sulut	
	Terwujudnya penyebarluasan informasi berbagai penerapan dan pengembangan teknologi tepat dalam rangka menciptakan forum untuk menggali gagasan pemikiran berbagai stakeholder dalam pemanfaatan SDA melalui penerapan TTG dan	Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional	Jumlah jenis-jenis TTG	75 Jenis	706,885,200.00	Jenis	105,710,300.00	45 Jenis	286,021,200.00	0 Jenis	-	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00	0	0%	45 Jenis	286,021,200.00	60	40.46%		
		Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi	Jumlah jenis-jenis TTG	75 Jenis	-	Jenis	-					0																	
		Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Wilayah pantai pesisir)	Jumlah Kabupaten/kota yang dibina	25 Pokmas	428,296,225.00	Pokmas	163,732,010.00	9 Kab	288,761,400.00	0 Kab	0.00	0 Kab	0.00	0 Kab	0.00	0 Kab	0.00	0 Kab	0.00	0 Kab	0.00	0	0%	9 Kab.	288,761,400.00	36	67.42%		
		Bantuan bagi Pokmas Pantai Pesisir	Jumlah Kabupaten/kota yang dibina	25 Pokmas	-	Pokmas	-																						
		Pembangunan Pusat Informasi Desa Online	Jumlah Kabupaten	15 Desa	300,000,000.00	Desa	-	2 Desa	149,950,400.00	0 Desa	0.00	0 Desa	0.00	0 Desa	0.00	0 Desa	0.00	0 Desa	0.00	0 Desa	0.00	0	0%	2 Desa	149,950,400.00	13.333	49.98%		
		Sosialisasi Posyantek (Pos pelayanan teknologi tepat guna)	Jumlah Kabupaten/kota yang mendapatkan sosialisasi	150 Org	-	Org	-	0	-	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0	0%	0 Desa	-	0	0.00%		
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar perdesaan, khususnya sarana,	Pengembangan Desa mandiri energi (DME) berbasis energi terbarukan	Jumlah kabupaten/kota yang ikut serta dalam kegiatan	20 Desa	-	Desa	-																						
		Pengelolaan Hutan Magrove berbasis pemberdayaan masyarakat	Jumlah kabupaten/kota yang ikut serta dalam kegiatan	20 Desa	-	Desa	-																						
		Sosialisasi Penyediaan Air Minum berbasis Pemberdavaan masyarakat	Jumlah Kabupaten/kota yang mendapatkan sosialisasi	150 Org	-	Org	-																						
Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :																						0	0.00%			43.11	53.00%		
																								sangat rendah	sangat renda			Sangat rendah	Rendah		
9	Terwujudnya ekonomi kreatif lokal	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Proporsi desa yang mempunyai kelompok kerja/BUMDesa pemberdayaan lembaga Usaha Ekonomi desa	46,6 % dari 702/1508(dihitung dari jumlah lembaga Bumdes aktif,Pasar, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), UEP yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan Usaha ekonomi desa/Jumlah desax100%)	3,086,109,551.00	49 % dari 740/1508(dihitung dari jumlah lembaga Bumdes aktif,Pasar, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), UEP yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan Usaha ekonomi desa/Jumlah	757,909,030.00	49 % dari 740/1508(dihitung dari jumlah lembaga Bumdes aktif,Pasar, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), UEP yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan Usaha ekonomi desa/Jumlah desax100%)	1,843,735,400.00	48 % dari 730/1508(dihitung dari jumlah lembaga Bumdes aktif,Pasar, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), UEP yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan Usaha ekonomi desa/Jumlah desax100%)	-	48 % dari 730/1508(dihitung dari jumlah lembaga Bumdes aktif,Pasar, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), UEP yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan Usaha ekonomi desa/Jumlah desax100%)	0.00	48 % dari 730/1508(dihitung dari jumlah lembaga Bumdes aktif,Pasar, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), UEP yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan Usaha ekonomi desa/Jumlah desax100%)	0.00	48 % dari 730/1508(dihitung dari jumlah lembaga Bumdes aktif,Pasar, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), UEP yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan Usaha ekonomi desa/Jumlah desax100%)	0.00	48 % dari 730/1508(dihitung dari jumlah lembaga Bumdes aktif,Pasar, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), UEP yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan Usaha ekonomi desa/Jumlah desax100%)	-	0	0%	48 % dari 730/1508(dihitung dari jumlah lembaga Bumdes aktif,Pasar, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), UEP yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan Usaha ekonomi desa/Jumlah desax100%)	1,843,735,400.00	43.826	65.78%	Bidang Pemberdayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	
	Terciptanya kemandirian masyarakat dalam peningkatan usaha	Pembangunan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi dalam pembangunan/pembentu	25 Bumdes	132,000,000.00	Bumdes	-	10 Bumdes	0.00	0 Bumdes	0.00	0 Bumdes	0.00	0 Bumdes	0.00	0 Bumdes	0.00	0 Bumdes	0.00	0 Bumdes	0.00	0	0%	10 Kab.	0.00	40	0.00%		
		Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi dalam pengembangan Bumdes	25 Bumdes	401,949,250.00	Bumdes	-	10 Bumdes	52,671,350.00	0 Bumdes	0.00	0 Bumdes	0.00	0 Bumdes	0.00	0 Bumdes	0.00	0 Bumdes	0.00	0 Bumdes	0.00	0	0%	10 Kab.	52,671,350.00	40	13.10%		
		Pembangunan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi dalam pengembangan Bumdes	3 Kali	0.00	Bumdes	-	0 Kali	103,023,400.00	0 Kali	0.00	0 Kali	0.00	0 Kali	0.00	0 Kali	0.00	0 Kali	0.00	0 Kali	0.00	0	0%	0 Kali	103,023,400.00	0	0.00%		
		Forum lintas pelaku Badan	Jumlah peserta yang	200 Org	391,182,750.00	Org	-	120 Org	165,345,000.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0 Org	0.00	0	0%	120 Org	165,345,000.00	60	42.27%		
		Pengembangan Ketrampilan usaha industri kerajinan	Jumlah kabupaten yang difasilitasi dalam pengembangan usaha	36 Pokmas	0.00	Pokmas	-	0 Pokmas	0.00	0 Pokmas	0.00	0 Pokmas	0.00	0 Pokmas	0.00	0 Pokmas	0.00	0 Pokmas	0.00	0 Pokmas	0.00	0	0%	0 Kab.	-	0	0		

No.	Sasaran	Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017, 2018,2019,2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Tahun Triwulan 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Ket.
												Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
	ekonomi produktif	Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat	Jumlah Kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberian bantuan dan	46	Pokmas	1,110,905,188.00	Pokmas	569,280,450.00	18	Pokmas	1,018,857,750.00	0	Pokmas	0.00	0	Pokmas	0.00	0	Pokmas	0.00	0	Pokmas	0.00	0	Pokmas	0.00	0	0%	18	Pokmas	1,018,857,750.00	39.13	**91.71%**		
		Bimtek pengelolaan pasar desa	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi dalam kegiatan	150	Org	0.00	Pasar	-	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	0%	0	Kab.	-	0	**0.00%**		
		Identifikasi dan Inventarisir pasar desa	Jumlah pasar desa	14	Pasar	0.00	Lembaga	-	0	Pasar	0.00	0	Pasar	0.00	0	Pasar	0.00	0	Pasar	0.00	0	Pasar	0.00	0	Pasar	0.00	0	0%	0	Pasar	-	0	**0.00%**		
		Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi	75	Lembaga	0.00	Kali	-	0	Lembaga	0.00	0	Lembaga	0.00	0	Lembaga	0.00	0	Lembaga	0.00	0	Lembaga	0.00	0	Lembaga	0.00	0	0%	0	Kab./Kota	-	0	**0.00%**		
		Peningkatan Kapasitas Pengelola Produk Unggulan Desa	Jumlah Kelompok BUMDes yang difasilitasi dalam pemberian bantuan	120	Bumdes	208,198,938.00	Kali	-	0	Bumdes	0.00	0	Bumdes	0.00	0	Bumdes	0.00	0	Bumdes	0.00	0	Bumdes	0.00	0	Bumdes	0.00	0	0%	0	Bumdes	-	0	**0.00%**		
	Terwujudnya penyebarluasan informasi berbagai Produk unggulan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka menggali kemampuan masyarakat dan gagasan berbagai stakeholder dalam peningkatan usaha ekonomi masyarakat sesuai tipologi dan Potensi Desa / kelurahan	Pameran Expo produk unggulan usaha ekonomi masyarakat tingkat nasional	Jumlah kegiatan	5	Kali	682,203,425.00	Kali	108,214,580.00	3	Kali	391,533,900.00	0	Kali	-	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	0%	3	Kali	391,533,900.00	60	**57.39%**		
	Terwujudnya pemikiran, ide, gagasan dan kebijakan dalam rangka sinergitas Program penanggulangan kemiskinan	Forum Koordinasi penguatan kelembagaan Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) kelompok Program pemberdayaan masyarakat dan kelompok kerja Unit pengaduan masyarakat (UPM)	cakupan Kab/kota yang difasilitasi dalam kegiatan forum	200	Org	81,670,000.00	Org	80,414,000.00	0	Org	112,304,000.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	0%	0	Org	112,304,000.00	0	**137.51%**		
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam	75	Desa/Kel	78,000,000.00	Desa/Kel	-	45	Desa/Kel	0.00	15	Desa/Kel	0.00	0	Desa/Kel	0.00	0	Desa/Kel	0.00	0	Desa/Kel	0.00	0	Kab./Kota	0.00	0	0%	45	Kab./Kota	-	60	**0.00%**		
Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :																										0	0.00%				47.82	68.78%		
																										sangat rendah	sangat renda				sangat rendah	rendah		
10	Meningkatnya partispasi masyarakat dalam program / kegiatan pemberdayaan masyarakat guna pembangunan desa	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Proporsi desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pembangunan dengan swadaya murni masyarakat desa/kelurahan**	**30% (dihitung dari 120 Lembaga kemasyarakatan desa / 400 desa**		**2,001,644,223.00**	**45% = 180/400x100% (dihitung dari 180 Lembaga kemasyara**	**606,383,367.00**	**45% = 180/400x100% (dihitung dari 180 Lembaga kemasyarakatan desa / 400**	**543,550,800.00**	**40% (dihitung dari 160 Lembaga kemasyarakatan desa / 400 desa sasaran x 100%)**	**-**	**40% (dihitung dari 160 Lembaga kemasyarakatan desa / 400 desa sasaran x 100%)**	**0.00**	**40% (dihitung dari 160 Lembaga kemasyarakatan desa / 400 desa sasaran x 100%)**	**0.00**	**40% (dihitung dari 160 Lembaga kemasyarakatan desa / 400 desa sasaran x 100%)**	**0.00**	**40% (dihitung dari 160 Lembaga kemasyarakatan desa / 400 desa sasaran x 100%)**	**0.00**	**40% (dihitung dari 160 Lembaga kemasyarakatan desa / 400 desa sasaran x 100%)**	**0.00**	**0**	**0%**	**40% (dihitung dari 160 Lembaga kemasyarakatan desa / 400 desa sasaran x 100%)**	**543,550,800.00**	**60**	**49.25%**	**Bidang Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Masyarakat**	
		Fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan	Jumlah peserta yang difasilitasi	250	Org	0.00	Org	-	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	0%	0	Org	-	0	**0.00%**		
		Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi	250	Org	0.00	Org	-	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	0%	0	Kab./Kota	-	0	**0.00%**		
		Pencanangan Gelar Bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam BBGRM dan HKG	15	Kab./Kota	1,344,753,350.00	Kab/kota	359,470,067.00	15	Kab./Kota	374,671,750.00	0	Kab./Kota	0.00	0	Kab./Kota	0.00	0	Kab./Kota	0.00	0	Kab./Kota	0.00	0	Kab./Kota	0.00	0	0%	15	Kab./Kota	374,671,750.00	100	**27.86%**		
		Forum pemberdayaan	Jumlah peserta yang	250	Org	0.00	Org	-	0	Org	38,313,400.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	0%	0	Org	38,313,400.00	0	**100.00%**		
		Pelatihan perencanaan partisipatif dan	Jumlah Peserta yang difasilitasi	250	Org	0.00	Org	-	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	0%	0	Org	-	0	**0.00%**		
		Rapat koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah peserta yang difasilitasi	2500	Org	0.00	Org	-	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	0%	0	Org	-	0	**0.00%**		
		Temu Karya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi	20	Desa/Kel	0.00	Desa/Kel	-	0	Desa/Kel	0.00	0	Desa/Kel	0.00	0	Desa/Kel	0.00	0	Desa/Kel	0.00	0	Desa/Kel	0.00	0	Desa/Kel	0.00	0	0%	0	Kab.	-	0	**0.00%**		
	Pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat	Desiminasi pelestarian adat istiadat dan budaya lokal	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi	45	Desa	656,890,873.00	Kab.	246,913,300.00	36	Desa	130,565,650.00	0	Desa	0.00	0	Desa	0.00	0	Desa	0.00	0	Desa	0.00	0	Desa	0.00	0	0%	36	Kab.	130,565,650.00	80	**19.88%**		
Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :																										0	0.00%				68.8	49.25%		
																										sangat rendah	sangat renda				rendah	sangat rendah		
11	Terwujudnya desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis dan sejahtra	**Program Bina Desa**	**Cakupan desa yang diberikan perlakuan khusus dalam rangka Pengentasan Kemiskinan**	**10,23% = 40/391x100 % (dihitung dari Jumlah PokMas Penerima Bantuan pada desa tertinggal sebanyak 40 / 391 Desa sasaran x**		**7,483,015,048.00**	**9,5% = 37/391x100 % (dihitung dari Jumlah PokMas Penerima Bantuan pada desa tertinggal sebanyak**	**1,833,763,400.00**	**12,02% = 47/391x100% (dihitung dari Jumlah PokMas Penerima Bantuan pada desa tertinggal sebanyak 47 / 391 Desa sasaran x**	**1,833,763,400.00**	**15,34% = 60/391x100% (dihitung dari Jumlah PokMas Penerima Bantuan pada desa tertinggal sebanyak 60 / 391 Desa sasaran x 100%)**	**0.00**	**15,34% = 60/391x100% (dihitung dari Jumlah PokMas Penerima Bantuan pada desa tertinggal sebanyak 60 / 391 Desa sasaran x 100%)**	**0.00**	**15,34% = 60/391x100% (dihitung dari Jumlah PokMas Penerima Bantuan pada desa tertinggal sebanyak 60 / 391 Desa sasaran x 100%)**	**0.00**	**15,34% = 60/391x100% (dihitung dari Jumlah PokMas Penerima Bantuan pada desa tertinggal sebanyak 60 / 391 Desa sasaran x 100%)**	**0.00**	**15,34% = 60/391x100% (dihitung dari Jumlah PokMas Penerima Bantuan pada desa tertinggal sebanyak 60 / 391 Desa sasaran x 100%)**	**0.00**	**0**	**0.00**	**15,34% = 60/391x100% (dihitung dari Jumlah PokMas Penerima Bantuan pada desa tertinggal sebanyak 60 / 391 Desa sasaran x**	**1,833,763,400.00**	**21.818**	**26.68%**	**Bidang Pemberdayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa**	
		Forum Bina Desa	Jumlah Kegiatan	20	Kali	275,000,000.00	Kali	79,847,900.00	4	Kali	79,847,900.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	0%	4	Kali	79,847,900.00	20	**29.04%**		
		Fasilitasi Bina Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	110	Desa	7,208,015,048.00	Desa	1,753,915,500.00	26	Desa	1,753,915,500.00	0	Desa	0.00	0	Desa	0.00	0	Desa	0.00	0	Desa	0.00	0	Desa	0.00	0	0%	26	Desa	1,753,915,500.00	23.636	**24.33%**		
Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :																										0	0.00%				21.8	26.68%		
																										sangat rendah	sangat renda				sangat rendah	sangat rendah		
12	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**	**Proporsi aparatur pemerintah desa/kelurahan yang memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang administrasi desa**	**56,37% (dari Jumlah 850 Peserta KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di sulut x 100%)**		**3,168,461,822.00**	**29,84% (dari Jumlah 450 Peserta KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di sulut x**	**733,060,120.00**	**29,84% (dari Jumlah 450 Peserta KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di sulut x 100%)**	**1,421,926,832.00**	**43,1% (dari Jumlah 650 Peserta KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di sulut x 100%)**	**-**	**43,1% (dari Jumlah 650 Peserta KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di sulut x 100%)**	**0.00**	**43,1% (dari Jumlah 650 Peserta KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di sulut x 100%)**	**0.00**	**43,1% (dari Jumlah 650 Peserta KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di sulut x 100%)**	**0.00**	**43,1% (dari Jumlah 650 Peserta KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di sulut x 100%)**	**0.00**	**43,1% (dari Jumlah 650 Peserta KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di sulut x 100%)**	**0.00**	**0**	**0%**	**29,84% (dari Jumlah 450 Peserta KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di sulut x 100%)**	**1,421,926,832.00**	**28.8**	**49.44%**	**Pemerintahan Desa/Kelurahan**	
		Bimtek Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah peserta yang difasilitasi	750	Org	0.00	Org	-	0	Org	-	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	0%	0	Org	-	0	**0.00%**		
		Bimtek pengelolaan keuangan dan kekayaan/Aset	Jumlah peserta yang difasilitasi	750	Org	258,188,000.00	Org	-	95	Org	128,528,400.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	0%	95	Org	128,528,400.00	12.667	**49.78%**		
		Bimtek penataan kewenangan desa	Jumlah peserta yang difasilitasi	750	Org	0.00	Org	-	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	0%	0	Org	-	0	**0.00%**		
		Rapat koordinasi dan evaluasi dana desa	Jumlah Rapat koordinasi	12	Kali	915,148,000.00	Kali	230,063,700.00	7	Kali	507,517,800.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	0%	7	Kali	507,517,800.00	58.333	**55.46%**		
		Rapat Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah peserta yang difasilitasi	1600	Org	0.00	Org	-	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	0%	0	Org	-	0	**0.00%**		

No.	Sasaran	Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017, 2018,2019,2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Tahun Triwulan 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Ket.
												Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV												
		Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen perencanaan desa	Jumlah kegiatan	10	Kali	0.00	Kali	-	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	0%	0	Kali	-	0	0.00%		
		Pemantapan Penyusunan Profil desa dan kelurahan	Jumlah peserta yang difasilitasi	2500	Org	315,885,000.00	Org	42,093,000.00	105	Org	177,956,800.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	0%	105	Org	177,956,800.00	4.2	56.34%		
		Evaluasi Tingkat Perkembangan	Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi	60	Desa/ Kel	1,679,240,822.00	Desa/Kel	460,903,420.00	24	Desa/ Kel	607,923,832.00	0	Kab./Kot a	0.00	0	Kab./Kot a	0.00	0	Kab./Ko ta	0.00	0	Kab./K ota	0.00	0	Kab./Kota	0.00	0	0%	24	Kab./Kot a	607,923,832.00	40	36.20%		
																													Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :		0	0.00%			35.4	49.40%		
																														sangat rendah	sangat renda			sangat rendah	sangat rendah		
13	Meningkatnya kapasitas kader-kader perempuan dalam lembaga pemerintahan desa dan kelompok masyarakat	**Program peningkatan peran perempuan di Perdesaan**	**Proporsi desa/kelurahan yang mempunyai kelompok kerja pemberdayaan perempuan aktif**	**75% dari 300/400X100 % (dihitung dari jumlah 250 kelompok perempuan yang memiliki ketrampilan usaha keluarga / 400 desa sasaran x 100%)**		**10,777,323,381.00**	**62,5% dari 250/400X100 0% (dihitung dari jumlah 250 kelompok perempuan yang memiliki ketrampila n usaha keluarga / 400 desa sasaran x**	**2,266,896,500.00**	**62,5% dari 250/400X100 % (dihitung dari jumlah 250 kelompok perempuan yang memiliki ketrampilan usaha keluarga / 400 desa sasaran x 100%)**	**6,174,758,946.00**	**62,5% dari 250/400X100% (dihitung dari jumlah 250 kelompok perempuan yang memiliki ketrampilan usaha keluarga / 400 desa sasaran x 100%)**	**-**	**62,5% dari 250/400X100% (dihitung dari jumlah 250 kelompok perempuan yang memiliki ketrampilan usaha keluarga / 400 desa sasaran x 100%)**	**0.00**	**62,5% dari 250/400X100% (dihitung dari jumlah 250 kelompok perempuan yang memiliki ketrampilan usaha keluarga / 400 desa sasaran x 100%)**	**0.00**	**62,5% dari 250/400X100% (dihitung dari jumlah 250 kelompok perempuan yang memiliki ketrampilan usaha keluarga / 400 desa sasaran x 100%)**	**0.00**	**62,5% dari 250/400X100 % (dihitung dari jumlah 250 kelompok perempuan yang memiliki ketrampilan usaha keluarga / 400 desa sasaran x 100%)**	**0.00**	**62,5% dari 250/400X100% (dihitung dari jumlah 250 kelompok perempuan yang memiliki ketrampilan usaha keluarga / 400 desa sasaran x 100%)**	**0.00**	**0**	**0%**	**62,5% dari 250/400X100 % (dihitung dari jumlah 250 kelompok perempuan yang memiliki ketrampilan usaha keluarga / 400 desa sasaran x 100%)**	**6,174,758,946.00**	**58.908**	**52.20%**	**Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Masyarakat**	
		Penilaian pengelola terbaik Program terpadu P2W-KSS Desa/Kelurahan Tingkat	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi	75	Desa/ Kel	-	Desa/Kel	-	0	Desa/ Kel	0.00	0	Desa/ Kel	0.00	0	Desa/Ke l	0.00	0	Desa/K el	0.00	0	Desa/K el	0.00	0	Desa/Kel	0.00	0	0%	0	Kab.	-	0	0.00%		
		Peranan dewan penyantun bagi perempuan di perdesaan	Jumlah peserta yang difasilitasi	362	Org	-	Org	-	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	0%	0	Org	-	0	0.00%		
		Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan kesejahtraan keluarga	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi	75	Org	175,000,000.00	Desa/Kel	192,289,000.00	75	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	0%	75	Kab.	-	100	0.00%		
		Rapat koordinasi Program Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga	Jumlah peserta rakor Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga	360	Org	118,355,650.00	Org	-	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	0%	0	Org	0.00	0	0.00%		
		Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan di	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi	1440	Org	999,852,500.00	Desa/Kel	-	300	Org	811,852,500.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	0%	300	Kab./Kot a	811,852,500.00	20.833	81.20%		
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembina dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kab/Kota dan	Jumlah Kegiatan/peserta yg difasilitasi	19	Kali	676,289,000.00	Kali	275,531,277.00	6	Kali	466,289,000.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	0%	6	Kali	466,289,000.00	31.579	68.95%		
		Sosialisasi Pelaksanaan Tertib Administrasi Program Perempuan di Perdesaan	Jumlah Kegiatan/peserta yg difasilitasi	720	Org	180,000,000.00	Org	26,768,000.00	240	Org	96,023,500.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	0%	240	Org	96,023,500.00	33.333	53.35%		
		Jambore Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Nasional	Jumlah Kegiatan/peserta yg difasilitasi	5	Kali	687,874,346.00	Kali	-	3	Kali	457,874,346.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	0%	3	Kali	457,874,346.00	60	66.56%		
		Penguatan Peran Wanita di Perdesaan menuju Keluraga Sehat Sejahtera	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi	800	Org	644,499,600.00	Desa/Kel	428,303,853.00	400	Org	459,499,600.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	0%	400	Kab/Kot a	459,499,600.00	50	71.30%		
		Workshop Peningkatan Keterampilan Perempuan di Perdesaan	Jumlah Kegiatan	500	Org	2,393,317,000.00	Desa/Kel	108,541,650.00	300	Org	2,068,568,400.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	Org	0.00	0	0%	300	Kali	2,068,568,400.00	60	86.43%		
		Seleksi/Penilaian Terbaik Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (HATI) berbasis	Jumlah Kegiatan/Kab Kota yang difasilitasi	45	Desa/ Kel	887,562,500.00	Desa/Kel	186,496,223.00	30	Desa/ Kel	415,294,050.00	0	Desa/Ke l	0.00	0	Desa/ Kel	0.00	0	Desa/Ke l	0.00	0	Desa/K el	0.00	0	Desa/K el	0.00	0	0%	30	Desa/Kel	415,294,050.00	66.667	46.79%		
		Seleksi/Penilaian Terbaik Perilaku Hidup Bersih Sehat dan Lingkungan Rumah Sehat	Jumlah Kegiatan/Kab Kota yang difasilitasi	45	Desa/ Kel	903,734,150.00	Desa/Kel	201,321,534.00	30	Desa/ Kel	415,814,950.00	0	Desa/Ke l	0.00	0	Desa/ Kel	0.00	0	Desa/Ke l	0.00	0	Desa/K el	0.00	0	Desa/K el	0.00	0	0%	30	Desa/Kel	415,814,950.00	66.667	46.01%		
		Temu kader perempuan di perdesaan	Jumlah Kabupaten /Kota yang difasilitasi	12	Kab/K ota	563,310,000.00	Desa/Kel	-	12	Kab/K ota	133,266,000.00	0	Kab/Kot a	0.00	0	Desa/ Kel	0.00	0	Desa/Ke l	0.00	0	Desa/K el	0.00	0	Desa/Kel	0.00	0	0%	0	Desa/Kel	133,266,000.00	0	23.66%		
		Temu Kader Perempuan dalam rangka mengikuti Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di	Jumlah Kabupaten /Kota yang difasilitasi	5	Kali	1,104,438,000.00	Desa/Kel	-	3	Kali	469,251,400.00	0	kali	0.00	0	kali	0.00	0	kali	0.00	0	kali	0.00	0	kali	0.00	0	0%	0	Desa/Kel	469,251,400.00	0	42.49%		
		Pelaksanaan Hari Gerak PKK Tingkat Kabupaten	Jumlah Kegiatan/peserta yg difasilitasi	4	Kali	367,591,035.00	Kali	-	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	0%	0	Kali	-	0	0.00%		
		Peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kabupaten /Kota yang difasilitasi	5	Kali	719,151,600.00	Desa/Kel	-	3	Kali	239,717,200.00	0	kali	0.00	0	kali	0.00	0	kali	0.00	0	kali	0.00	0	kali	0.00	0	0%	0	Desa/Kel	239,717,200.00	0	33.33%		
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Kabupaten /Kota yang difasilitasi	15	Kab/K ota	356,348,000.00	Desa/Kel	-	15	Kab/K ota	141,308,000.00	0	Kab/Kot a	0.00	0	Kab/K ota	0.00	0	Kab/Kot a	0.00	0	Kab/Kot a	0.00	0	Kab/Ko ta	0.00	0	0%	15	Kab./Kot a	141,308,000.00	100	39.65%		
																													Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :		0	0.00%			67.85	52.69%		
																														sangat rendah	sangat renda			rendah	rendah		
1	Terwujudnya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa antara lain mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, mendorong program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayahgunakan	**Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa**	**Proporsi desa yang melaksanakan pendampingan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa**	**80,28% = 114/143x100 % (dihitung dari 114 pemdamping desa yang dilatih / 143 kecamatan x 100%**		**116,785,841.00**	**34,9% = 50/143x100 % (dihitung dari 50 pemdamping desa yang dilatih / 143 kecamatan**		**42,3% = 60/143x100% (dihitung dari 60 pemdamping desa yang dilatih / 143 kecamatan x 100%)**	**97,884,000.00**	**61,27% = 87/143x100% (dihitung dari 87 pemdamping desa yang dilatih / 143 kecamatan x 100%**	**########**	**61,27% = 87/143x100% (dihitung dari 87 pemdamping desa yang dilatih / 143 kecamatan x 100%**	**0.00**	**61,27% = 87/143x100% (dihitung dari 87 pemdamping desa yang dilatih / 143 kecamatan x 100%**	**0.00**	**61,27% = 87/143x100% (dihitung dari 87 pemdamping desa yang dilatih / 143 kecamatan x 100%**	**########**	**61,27% = 87/143x100% (dihitung dari 87 pemdamping desa yang dilatih / 143 kecamatan x 100%**	**-**	**61,27% = 87/143x100% (dihitung dari 87 pemdamping desa yang dilatih / 143 kecamatan x 100%**	**-**	**0**	**4569%**	**61,27% = 87/143x100% (dihitung dari 87 pemdamping desa yang dilatih / 143 kecamatan x 100%**	**97,884,000.00**	**100**	**186%**		
1		Forum penguatan kelembagaan masyarakat	Jumlah Kabupaten /Kota yang difasilitasi	15	Kab/K ota	116,785,841.00	Kab/Kota	-	15	Kab/K ota	97,884,000.00	0	Kab/Kot a	0.00	0	Kab/K ota	0.00	0	Kab/Kot a	0.00	0	Kab/Kot a	0.00	0	Kab/Ko ta	0.00	0	0%	15	Kab/Kot a	97,884,000.00	100	83.81%		
		Penguatan kelembagaan Badan kerjasama antar desa	Jumlah peserta yang difasilitasi	12	Kab/K ota	41,376,500.00	Kab/Kota	-	12	Kab/K ota	41,376,500.00	0	Kab/Kot a	0.00	0	Kab/K ota	0.00	0	Kab/Kot a	0.00	0	Kab/Kot a	0.00	0	Kab/Ko ta	0.00	0	0%	12	Kab/Kot a	41,376,500.00	100	100.00%		
		Peningkatan kapasitas pendamping lokal desa Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (PNPM)	Jumlah peserta yang difasilitasi	12	Kab/K ota	0.00	Kab/Kota	-	12	Kab/K ota	0.00	0	Kab/Kot a	0.00	0	Kab/K ota	0.00	0	Kab/Kot a	0.00	0	Kab/Kot a	0.00	0	Kab/Ko ta	0.00	0	0%	12	Kab/Kot a	-	100	0.00%		
																													Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :		0	0%			100	92.00%		
																														sangat rendah	sangat renda			sangat tinggi	sangat tinggi		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**0%**		**0.00**			**0**		**0.00**	**100%**	**########**	**100%**	**######**	**100%**	**########**	**100%**	**#####**	**100%**	**########**	**100%**	**6,247,922,297.00**	**95.23**	**91.38**	**1**	**Kab/Kot a**	**6,247,922,297.00**	**95**	**95%**		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0%**		**0.00**			**0**		**0.00**	**100%**	**########**	**100%**	**0.00**	**100%**	**########**	**100%**	**#####**	**100%**	**########**	**100%**	**19,030,250.00**	**100**	**#####**		**100%**	**19,030,250.00**	**100.00**	**100.00**		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Dok.	0.00			0	Dok.	0.00	1	Dok.	########	0	Dok.	0.00	1	Dok.	##########	1	Dok.	#####	1	Dok.	########	1	Dok.	5,361,500.00	100	#####	1	Dok.	5,361,500.00	100	100%		

No.	Sasaran	Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017, 2018,2019,2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Tahun Triwulan 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Ket.
												Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV												
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	0	Dok.	0.00		0	Dok.	0.00	1	Dok.	########	0	Dok.	0.00	0	Dok.	0.00	1	Dok.	0.00	1	Dok.	########	1	Dok.	3,173,250.00	100	#####	1	Dok.	3,173,250.00	100	100%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	Dok.	0.00		0	Dok.	0.00	1	Dok.	########	0	Dok.	0.00	0	Dok	0.00	1	Dok	0.00	1	Dok	########	1	Dok	2,917,700.00	100	#####	1	Dok.	2,917,700.00	100	100%		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	0	Dok.	0.00		0	Dok.	0.00	1	Dok.	########	0	Dok.	0.00	0	Dok.	0.00	0	Dok.	0.00	1	Dok.	########	1	Dok.	3,111,300.00	100	#####	1	Dok.	3,111,300.00	100	100%		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	0	Dok.	0.00		0	Dok.	0.00	1	Dok.	########	0	Dok.	0.00	0	Dok.	0.00	0	Dok.	0.00	1	Dok.	########	1	Dok.	2,810,950.00	100	#####	1	Dok.	2,810,950.00	100	100%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	0	Lap.	0.00		0	Lap.	0.00	3	Lap.	########	3	Lap.	0.00	3	Dok	##########	3	Dok	#####	3	Dok	########	3	Lap.	1,655,550.00	100	#####	3	Lap.	1,655,550.00	100	100%		
																										Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :		100	90%			100	100%		
																												sangat Tinggi	Sangat Tinggi			sangat tinggi	sangat tinggi		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**0%**		**0.00**		**0**		**0.00**	**100%**		**########**	**100%**		**######**	**100%**		**##########**	**100%**		**#####**	**100%**		**########**	**100%**		**5,404,876,638.00**	**100**	**#####**	**100%**			**100**	**100%**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	0%	ASN	0.00		0		0.00	50	ASN	########	50	ASN	######	50	ASN	##########	50	ASN	#####	50	ASN	########	50	ASN	5,247,131,412.00	100	93%	50	ASN	5,247,131,412.00	100	100%		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah adminstrasi pelaksanaan tugas ASN	0%	Thn	0.00		0		0.00	1	Thn	########	1	Thn	######	1	Thn	##########	1	Thn	#####	1	Thn	########	1	Thn	71,664,138.00	100	99%	1	Thn	71,664,138.00	100	100%		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penataan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	0%	Thn	0.00		0		0.00	1	Thn	########	1	Thn	######	1	Thn	##########	1	Thn	#####	1	Thn	########	1	Thn	21,753,450.00	100	100%	1	Thn	21,753,450.00	100	100%		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi pelaksanaan akutansi SKPD	0%	Thn	0.00		0		0.00	1	Thn	########	1	Thn	######	1	Thn	##########	1	Thn	#####	1	Thn	########	1	Thn	57,167,238.00	100	99%	1	Thn	57,167,238.00	100	100%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	0%	Thn	0.00		0		0.00	1	Thn	########	1	Thn	######	1	Thn	##########	1	Thn	#####	1	Thn	########	1	Thn	1,635,950.00	100	99%	1	Thn	1,635,950.00	100	100%		
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan	0%	Thn	0.00		0		0.00	1	Thn	########	0	Thn	0.00	0	Thn	0.00	1	Thn	0.00	1	Thn	########	1	Thn	2,486,300.00	100	78%	1	Thn	2,486,300.00	100	100%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0%	Lap.	0.00		0		0.00	12	Lap.	########	0	Lap.	0.00	6	Lap.	##########	9	Lap.	#####	12	Lap.	########	12	Lap.	1,521,000.00	100	98%	6	Lap.	1,521,000.00	100	100%		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan analisis prognosis realisasi anggaran	0%	Lap.	0.00		0		0.00	1	Lap.	########	0	Lap.	0.00	0	Lap.	0.00	1	Lap.	0.00	1	Lap.	########	1	Lap.	1,517,150.00	100	98%	1	Lap.	1,517,150.00	100	100%		
																										Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :		100	95%			100	100%		
																												Sangat Tinggi	Sangat tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0%**		**0.00**		**0**		**0.00**	**100%**		**########**	**100%**		**0.00**	**100%**		**##########**	**100%**		**#####**	**100%**		**########**	**100%**		**60,747,700.00**	**66.67**	**#####**	**100%**			**66.67**	**66.67**		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	0%	Thn	0.00		0	Thn	0.00	1	Thn	########	1	Thn	0.00	1	Thn	##########	1	Thn	#####	1	Thn	########	1	Thn	17,972,700.00	100	#####	1	Thn	17,972,700.00	100	100%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0%	Org	0.00		0	Org	0.00	50	Org	########	50	Org	0.00	50	Org	##########	50	Org	#####	50	Org	########	50	Org	42,775,000.00	100	#####	50	Org	42,775,000.00	100	100%		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan	0%	Keg.	0.00		0	Keg.	0.00	1	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0.00%	1	Keg.	-	0	0.00%		
																										Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :		67	67%			67	67%		
																												rendah	rendah			rendah	rendah		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**0%**		**0.00**		**0**		**0.00**	**100%**		**########**	**100%**		**######**	**100%**		**##########**	**100%**		**#####**	**100%**		**########**	**100%**		**242,951,765.00**	**100.00**	**#####**	**100%**		**242,951,765.00**	**100**	**100.00**		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	0%	Thn	0.00		0	Thn	0.00	1	Thn	########	1	Thn	######	1	Thn	##########	1	Thn	#####	1	Thn	########	1	Thn	28,001,750.00	100	#####	1	Thn	28,001,750.00	100	100%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0%	Thn	0.00		0	Thn	0.00	1	Thn	########	1	Thn	0.00	1	Thn	##########	1	Thn	#####	1	Thn	########	1	Thn	8,380,000.00	100	#####	1	Thn	8,380,000.00	100	100%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0%	Thn	0.00		0	Thn	0.00	1	Thn	########	1	Thn	######	1	Thn	##########	1	Thn	#####	1	Thn	########	1	Thn	206,570,015.00	100	#####	1	Thn	206,570,015.00	100	100%		
																										Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :		100	100%			100	100%		
																												Sangat Tinggi	Sangat			sangat tinggi	sangat tinggi		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0%**		**0.00**		**0**		**0.00**	**100%**		**########**	**100%**		**0.00**	**100%**		**##########**	**100%**		**#####**	**100%**		**########**	**100%**		**220,750,400.00**	**100.00**	**1**	**100%**		**220,750,400.00**	**100.00**	**100.00**		
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	0%	Thn	0.00		0	Thn	0.00	1	Thn	########	1	Thn	0.00	0	Thn	0.00	1	Thn	#####	1	Thn	########	1	Thn	23,400,000.00	100	#####	1	Thn	23,400,000.00	100	100%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	0%	Keg.	0.00		0	Keg.	0.00	1	Keg.	########	1	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	1	Keg.	########	1	Keg.	177,487,900.00	100	#####	1	Keg.	177,487,900.00	100	100%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0%	Thn	0.00		0	Thn	0.00	1	Thn	########	1	Thn	0.00	1	Thn	##########	1	Thn	#####	1	Thn	########	1	Thn	19,862,500.00	100	#####	1	Thn	19,862,500.00	100	100%		
																										Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :		100	99%			100	33%		
																												sangat Tinggi	Sangat			sangat tinggi	sangat rendah		
		Pengadaan Jasa Penunjanh Unsan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Jasa Penunjanh Urusan Pemerintah Daerah**	**0%**		**0.00**		**0**		**0.00**	**100%**		**########**	**100%**		**######**	**100%**		**##########**	**100%**		**#####**	**100%**		**########**	**100%**		**103,842,803.00**	**100**	**96**	**100%**		**103,842,803.00**	**100**	**100**		

No.	Sasaran	Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017, 2018,2019,2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Tahun Triwulan 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Ket.
												Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV													
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	0%	Keg.	0.00		0	Keg.	0.00	1	Keg.	########	1	Keg.	######	1	Keg.	#########	1	Keg.	#####	1	Keg.	########	1	Keg.	42,203,388.00	100	98.76	1	Keg.	42,203,388.00	100	100%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0%	Keg.	0.00		0	Keg.	0.00	1	Keg.	########	1	Keg.	######	1	Keg.	#########	1	Keg.	#####	1	Keg.	########	1	Keg.	19,436,027.00	100	91.20	1	Keg.	19,436,027.00	100	100%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	0%	Keg.	0.00		0	Keg.	0.00	1	Keg.	########	1	Keg.	######	1	Keg.	#########	1	Keg.	#####	1	Keg.	########	1	Keg.	42,203,388.00	100	98.76	1	Keg.	42,203,388.00	100	100%		
																										Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :		100 Sangat Tinggi	96% Sangat			100 sangat tinggi	100% sangat Tinggi		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0%**		**0.00**		**0**		**0.00**	**100%**		**########**	**100%**		**######**	**100%**		**#########**	**100%**		**#####**	**100%**		**########**	**100%**		**195,722,741.00**	**100**	**91.98**	**100%**		**183,872,835.24**	**100**	**100**		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendis operasional	0%	Thn	0.00		0	Thn	0.00	1	Thn	########	1	Thn	######	1	Thn	#########	1	Thn	#####	1	Thn	########	1	Thn	183,872,741.00	100	89.73	1	Thn	183,872,741.00	100	100%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	0%	Thn	0.00		0	Thn	0.00	1	Thn	########	0	Thn	0.00	0	Thn	0.00	0	Thn	0.00	1	Thn	########	1	Thn	11,850,000.00	100	94.24	1	Thn	94.24	100	100%		
																										Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :		100 sangat Tinggi	##### Sangat			100 sangat tinggi	100.00% sangat tinggi		
		PROGRAM PENATAAN DESA	**Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa**	**0%**		**0.00**		**0**		**0.00**	**6.64%**		**########**	**6.64%**		**0.00**	**6.64%**		**0.00**	**6.64%**		**#####**	**6.64%**		**########**	**6.64%**		**59,822,400.00**	**100**	**9970%**	**6.64%**		**59,822,400.00**	**100**	**100%**		
		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	**Jumlah Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**1 Keg.**		**0.00**		**1 Keg.**		**0.00**	**1 Keg.**		**########**	**1 Keg.**		**0.00**	**1 Keg.**		**0.00**	**1 Keg.**		**#####**	**1 Keg.**		**########**	**1 Keg.**		**59,822,400.00**	**100**	**9970**	**1 Keg.**		**59,822,400.00**	**100**	**100**		
		Indentifikasi, Inentarisasi dan Fasilitasi Perataan Kesatuan Masyarakat Humum Adat dan Desa Adat yang menjadi	Jumlah Desa Adat yang didetifikasi	0%	Keg.	0.00		0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0%	0	Keg.	-	0	0.00%		
		Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	0%	Keg.	0.00		0	Keg.	0.00	1	Keg.	########	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	1	Keg.	#####	1	Keg.	########	1	Keg.	59,822,400.00	1	99.70	1	Keg.	59,822,400.00	100	100.00%		
		Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Desa yang diFasilitasi melalui Kegiatan Sosialisasi di Tingkat Kabupaten/Kota dan Desa	0%	Keg.	0.00		0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0%	0	Keg.	-	0	0.00%		
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang diberi Bantuan Sarana dan Prasarana (Desa Online)	0%	Desa	0.00		0	Desa	0.00	2	Desa	0.00	0	Desa	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0%	0	Desa	-	0	0.00%		
																										Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :		100 sangat Tinggi	100% Sangat			25 Sangat rendah	25.00% Sangat rendah		
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**0%**		**0.00**		**0**		**0.00**	**100%**		**########**	**100%**		**0.00**	**100%**		**#########**	**100%**		**#####**	**100%**		**########**	**100%**		**68,136,750.00**	**100**	**#####**	**100%**		**68,136,750.00**	**100**	**100%**		
		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	**Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**0%**	Keg.	**0.00**		**0**	Keg.	**0.00**	1	Keg.	########	**0.00**	**1**	**Keg.**	**#########**	**1**	**Keg.**	**#####**	**1**	**Keg.**	**########**	1	Keg.	**68,136,750.00**	**10000**	**99.21**	**1**	**Keg.**	**68,136,750.00**	**100**	**100**		
		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	0%	Desa	0.00		0	Desa	0.00	2	Desa	########	2	Desa	0.00	2	Desa	#########	2	Desa	#####	2	Desa	########	2	Desa	68,136,750.00	100	99.21	2	Desa	68,136,750.00	100	100.00%		
		Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	0%	Keg.	0.00		0	Keg.	0.00	1	Keg.	0.00	1	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0%	1	Keg.	-	0	0.00%		
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan perdesaan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perdesaan	0%	Keg.	0.00		0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0%	0	Keg.	-	0	0.00%		
																											-	100 Sangat Tinggi	100% sangat tinggi			100 sangat tinggi	100% sangat tinggi		
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**0%**		**0.00**		**0**		**0.00**	**22,7 %**		**########**	**22,7 %**		**######**	**22.70%**		**#########**	**22,7 %**		**#####**	**22.70%**		**########**	**22.70%**		**266,320,228.00**	**60**	**53.26**	**22,7 %**		**266,320,228.00**	**60**	**40**		
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	**Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**0% Keg.**		**0.00**		**0 Keg.**		**0.00**	**5 Keg.**		**########**	**5 Keg.**		**######**	**5 Keg.**		**#########**	**5 Keg.**		**#####**	**5 Keg.**		**########**	**5 Keg.**		**266,320,228.00**	**60.00**	**#####**	**5 Keg.**		**266,320,228.00**	**60.00**	**40**		
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang	0%	Keg.	0.00		0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0.00	0	Keg.	-	0	0.00%		
		Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	0%	Keg.	0.00		0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0.00	0	Keg.	-	0	0.00%		
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	0%	Keg.	0.00		0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0.00	0	Keg.	-	0	0.00%		
		Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	0%	Keg.	0.00		0	Keg.	0.00	1	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0.00	1	Keg.	-	0	0.00%		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa	0%	Desa	0.00		0	Desa	0.00	36	Desa	########	0	Desa	0.00	0	Desa	0.00	36	Desa	0.00	36	Desa	########	36	Desa	0.00	100	0.00	36	Desa	-	100	0.00%		

No.	Sasaran	Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017, 2018,2019,2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Tahun Triwulan 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Ket.
												Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV															
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Pengelolaan Aset Desa	0%	Desa	0.00			0	Desa	0.00	0	Desa	0.00	0	Desa	0.00	0	Desa	0.00	0	Desa	0.00	0	Desa	0.00	0	0.00	0	Desa	-	0	0.00%		
		Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0%	Keg.	0.00			0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0.00	0	Keg.	-	0	0.00%		
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0%	Keg.	0.00			0	Keg.	0.00	1	Keg.	########	1	Keg.	0.00	1	Keg.	##########	1	Keg.	#####	1	Keg.	########	1	Keg.	233,218,278.00	100	#####	1	Keg.	233,218,278.00	100	100.00%		
		Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengikuti Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	0%	Operator Desa	0.00			0	Operator Desa	0.00	150	Operator Desa	########	150	Operator Desa	##########	150	Operator Desa	#####	150	Operator Desa	########	##	Operator Desa	33,101,950.00	100	#####	150	Operator Desa	33,101,950.00	100	100.00%		
		Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	0%	Keg.	0.00			0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0.00	0	Keg.	-	0	0.00%		
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD Yang Mendapatkan Pembinaan Peningkatan Kapasitas	0%	Anggota BPD	0.00			0	Anggota BPD	0.00	0	Anggota BPD	0.00	0	Anggota BPD	0.00	0	Anggota BPD	0.00	0	Anggota BPD	0.00	0	Anggota BPD	0.00	0	0.00	0	Anggota BPD	-	0	0.00%		
		Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Kegiatan Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan	0%	Keg.	0.00			0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0.00	0	Keg.	-	0	0.00%		
		Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Kegiatan terkait Koordinasi Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa	0%	Keg.	0.00			0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0.00	0	Keg.	-	0	0.00%		
		Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	0%	Keg.	0.00			0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0.00	0	Keg.	-	0	0.00%		
		Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	0%	Keg.	0.00			0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0.00	0	Keg.	-	0	0.00%		
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0%	Keg.	0.00			0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0.00	0	Keg.	-	0	0.00%		
		Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan	0%	Keg.	0.00			0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0.00	0	Keg.	-	0	0.00%		
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	0%	Kades	0.00			0	Kades	0.00	0	Kades	0.00	0	Kades	0.00	0	Kades	0.00	0	Kades	0.00	0	Kades	0.00	0	0.00	0	Kades	-	0	0.00%		
		Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Ketuan BPD yang mendapatkan Fasilitasi Peran dalam Penyelenggaraan	0%	Ketua BPD	0.00			0	Ketua BPD	0.00	0	Ketua BPD	0.00	0	Ketua BPD	0.00	0	Ketua BPD	0.00	0	Ketua BPD	0.00	0	Ketua BPD	0.00	0	0.00	0	Ketua BPD	-	0	0.00%		
		Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	1). Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa; 2). Jumlah Inovasi Desa	1). 0 Kegiatan; 2). 0 Inovasi Desa		0.00			1). 0 Kegiatan; 2). 0 Inovasi Desa		0.00	1). 0 Kegiatan; 2). 0 Inovasi Desa		0.00	1). 0 Kegiatan; 2). 0 Inovasi Desa		0.00	1). 0 Kegiatan; 2). 0 Inovasi Desa		0.00	1). 0 Kegiatan; 2). 0 Inovasi Desa		0.00	1). 0 Kegiatan; 2). 0 Inovasi Desa		0.00	0	0.00	1). 0 Kegiatan; 2). 0 Inovasi Desa		-	0	0.00%		
		Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	0%	Keg.	0.00			0	Keg.	0.00	1	Keg.	0.00	1	Keg.	0.00	1	Keg.	0.00	1	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0.00	0	Keg.	-	0	0.00%		
		Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di	0%	Keg.	0.00			0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0.00	0	Keg.	-	0	0.00%		
																									0	60	53%				60	40%		
																										rendah	renda h				rendah	Sangat rendah		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum**	**0%**		**0.00**			**0**		**0.00**	**66,6 %**		########	**66,6 %**		######	**66,6 %**		##########	**66,6 %**		#####	**66,6 %**		#########	**66,6 %**	**4,729,526,918.00**	**100**	**98.72**	**66,6 %**			**100**	**100%**		
		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat**	**0%**	**Keg.**	**0.00**			**0**	**Keg.**	**0.00**	**6**	**Keg.**	########	**6**	**Keg.**	##########	**6**	**Keg.**	#####	**6**	**Keg.**	#########	**6**	**Keg.**	**4,729,526,918.00**	**100**	**97.52**	**6**	**Keg.**	**4,729,526,918.00**	**100**	**100.00%**		
		Identifikasi dan Iventarisasi Masyarakat Adat	Jumlah Kegiatan Koordinasi terkait Identifikasi dan Iventarisasi Masyarakat Adat	0%	Keg.	0.00			0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0%	0	Keg.	-	0	0.00%		
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	0%	Keg.	0.00			0	Keg.	0.00	4	Keg.	########	0	Keg.	0.00	4	Keg.	##########	4	Keg.	#####	4	Keg.	#########	4	Keg.	1,904,548,100.00	100	99.04	4	Keg.	1,904,548,100.00	100	100.00%		

No.	Sasaran	Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017, 2018,2019,2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Tahun Triwulan 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Ket.
														Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV																	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	0%	Keg.	0.00			0	Keg.	0.00	16	Keg.	########	0	Keg.	0.00	16	Keg.	##########	16	Keg.	#####	16	Keg.	########	16	Keg.	1,517,475,950.00	100	96.32	16	Keg.	1,517,475,950.00	100	100.00%		
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	0%	Keg.	0.00			0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0%	0	Keg.	-	0	0.00%		
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	0%	Keg.	0.00			0	Keg.	0.00	3	Keg.	########	3	Keg.	#######	3	Keg.	##########	3	Keg.	#####	3	Keg.	########	3	Keg.	322,455,968.00	100	99.60	3	Keg.	322,455,968.00	100	100.00%		
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0%	Keg.	0.00			0	Keg.	0.00	2	Keg.	########	0	Keg.	0.00	2	Keg.	##########	2	Keg.	#####	2	Keg.	########	2	Keg.	178,357,450.00	100	99.88	2	Keg.	178,357,450.00	100	100.00%		
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0%	Keg.	0.00			0	Keg.	0.00	2	Keg.	########	0	Keg.	0.00	2	Keg.	##########	2	Keg.	#####	2	Keg.	########	2	Keg.	89,798,450.00	100	99.94	2	Keg.	89,798,450.00	100	100.00%		
		Fasilitasi Penyelanggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelanggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan	0%	Keg.	0.00			0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	Keg.	0.00	0	0%	0	Keg.	-	0	0.00%		
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0%	Keg.	0.00			0	Keg.	0.00	5	Keg.	########	5	Keg.	#######	5	Keg.	##########	5	Keg.	#####	5	Keg.	########	5	Keg.	716,891,000.00	100	90.33	5	Keg.	716,891,000.00	100	100.00%		
																												Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :		100	#####				100	100.00%		
																													Sangat Tinggi	sangat tinggi				sangat tinggi	Sangat Tinggi		
Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :						**33,800,279,954.00**					**18,276,475,046.00**			########		-			-			-			-		-					**19,013,306,674.00**				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 1 SD 14 PROGRAM																													**0**	**0.00%**				**44.785**	**42.08%**		
	Terwujudnya Program pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa; antara lain Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa, medorong program dan kegiatan pembangunan desa secara	Rapat koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	Jumlah peserta yang difasilitasi dalam Rakor	12	Kab./Kota	150,000,000.00			12	Kab./Kota	7,119,400.00	12	Kab./Kota	-	0	Kab./Kota	0.00	0		0.00							0	Kab./Kota	-			12	Kab./Kota	7,119,400.00		**4.75%**		
																												Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja (%)											
																												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 15)		sangat rendah	sangat				sangat rendah	sangat rendah		
Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja :						**-**					**-**			########		########			########			########			-		**11,371,718,593.00**					**1,805,060,168.00**				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 1 SD 5 PROGRAM																													**91.05**	**88.61**				**91.046**	**87%**		
																												Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja (%)											
																												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 15)		sangat tinggi	Tinggi				Sangat tinggi	Tinggi		

Tabel. E 55
TAHUN 2021
PERANGKAT DAERAH: DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang Mengacu pada Sasaran RKPD Provinsi:

1 Meningkatnya infrastruktur dan konektifitas perhubungan yang memadai

NO	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Base Line Tahun 2021)			Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan) Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (triwulan IV)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		PENANGGUNG JAWAB	KET
													Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13 = 12/7X100%		14 = 6 + 12			15 = 14 / 5 x 100		16	17
				K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K			
		(Permendagri Nomor 90/2019)																																			
	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN DAERAH RATA-RATA MINIMUM B			86,246,754,035				332		15,746,317,386			3,495,413,716			4,347,022,045			3,270,025,639			2,973,111,316	175		14,578,702,716	53%	93%	175		14,578,702,716		17%		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		40		51,623,372				8		3,824,684	3		920,800	-		1,146,400	1		802,800	2		950,600	6		3,820,600	75%	100%	6		3,820,600	15%	7%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10	Dokumen	10,252,184				2	Dokumen	1,973,592	1	Dokumen	920,800		Dokumen	307,200		Dokumen	307,200	1	Dokumen	435,600	2	Dokumen	1,970,800	100%	100%	2	Dokumen	1,970,800	20%	19%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		10	Kegiatan	22,699,840				2	Kegiatan	515,060	1	Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		1	Kegiatan	515,000	2	Kegiatan	515,000	100%	100%	2	Kegiatan	515,000	20%	2%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		10	Kegiatan	9,614,984				2	Kegiatan	0		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		-	Kegiatan	-	0%	0%	-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10	Kegiatan	9,056,364				2	Kegiatan	1,336,032	1	Kegiatan			Kegiatan	839,200	1	Kegiatan	495,600		Kegiatan	-	2	Kegiatan	1,334,800	100%	100%	2	Kegiatan	1,334,800	20%	15%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		188		71,207,036,487				34	14,241,407,297	13,260,872,635	9		3,223,594,599	8		3,789,738,008	8		2,775,814,767	-		2,307,953,064	25		12,097,100,438	74%	91%	25	-	12,097,100,438	13%	17%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan		70	Bulan	69,947,405,702				14	Bulan	13,019,580,492	3	Bulan	3,177,129,485	3	Bulan	3,737,096,357	3	Bulan	2,730,514,053		Bulan	2,215,222,050	12	Bulan	11,859,961,945	86%	91%	12	Bulan	11,859,961,945	17%	17%		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		60	Bulan	1,012,819,662				12	Bulan	238,643,791	3	Bulan	45,164,114	3	Bulan	52,056,451	3	Bulan	44,551,914		Bulan	92,731,014	12	Bulan	234,503,493	100%	98%	12	Bulan	234,503,493	20%	23%		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		6	Kegiatan	78,812,500				-	Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan	-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		10	Kegiatan	24,471,716				2	Kegiatan	1,549,838	1	Kegiatan	799,800		Kegiatan			Kegiatan	748,800		Kegiatan		2	Kegiatan	1,548,600	100%	100%	2	Kegiatan	1,548,600	20%	6%		
		Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan pemeriksaan		8	Kegiatan	47,287,500					Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan	-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		30	Dokumen	33,189,406				6	Dokumen	1,098,514	2	Dokumen	501,200	2	Dokumen	585,200	2	Dokumen			Dokumen		6	Dokumen	1,086,400	100%	99%	6	Dokumen	1,086,400	20%	3%		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran		4	Dokumen	63,050,000					Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen	-	Dokumen	-			-	Dokumen	-	0%	0%		
		Admistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		160		421,275,410				12	84,255,082	11,186,480	3	-	2,144,000	3		1,797,200	3		3,011,700	-		4,221,100	9	602,340	11,174,000	75%	100%	9	120,468	11,174,000	6%	3%		
		Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		8	Dokumen	15,762,500																			-		-			-		-	0%	0%		
		Pengamanan Barang Milik SKPD		16	Kegiatan	94,575,000																			-		-			-		-	0%	0%		
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik daerah SKPD		12	Kegiatan	47,287,500																			-		-			-		-	0%	0%		
		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		8	Kegiatan	78,812,500																			-		-			-		-	0%	0%		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		40	Kegiatan	31,525,000																			-		-			-		-	0%	0%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		60	Bulan	74,500,410				12	Bulan	11,186,480	3	Bulan	2,144,000	3	Bulan	1,797,200	3	Bulan	3,011,700		Bulan	4,221,100	12	Bulan	11,174,000	100%	100%	12	Bulan	11,174,000	20%	15%		
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		16	Bulan	78,812,500																			-		-			-		-	0%	0%		
		Admistrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		72		102,456,250				-		-		-			-			-			-		-	-	-			-	-	-	0%	0%		
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		4	Dokumen	15,762,500					Dokumen	-		Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-			-	Dokumen	-	0%	0%		
		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		4	Kegiatan	7,881,250					Kegiatan	-		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Retribusi Daerah		4	Kegiatan	15,762,500					Kegiatan	-		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Pendataan dan pendaftaran Objek Retribusi Daerah		8	Kegiatan	47,287,500					Kegiatan	-		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Pengolahan Data Retribusi Daerah		48	Bulan	6,305,000					Bulan	-		Bulan			Bulan			Bulan			Bulan		-	Bulan	-			-	Bulan	-	0%	0%		
		Penetapan wajib Retribusi Daerah		4	Kegiatan	9,457,500					Kegiatan	-		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1,000		1,542,079,988				188		208,906,746	3	-	14,566,788	3		143,547,832	3		33,844,437	3	28,709,566	16,406,357	12	6,768,887	208,365,414	6%	100%	12	1,353,777	208,365,414	1%	14%		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		4	Kegiatan	78,812,500					Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		875	Steel	680,130,000				175	Steel	128,513,275		Steel		170	Steel	128,513,275		Steel			Steel		170	Steel	128,513,275	97%	100%	170	Steel	128,513,275	19%	19%		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		60	Bulan	336,787,526				12	Bulan	62,291,586	3	Bulan	14,566,788	3	Bulan	15,034,557	3	Bulan	16,208,137		Bulan	16,406,357	12	Bulan	62,215,839	100%	100%	12	Bulan	62,215,839	20%	18%		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		8	Kegiatan	31,525,000					Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai		36	Kegiatan	47,287,500					Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Pemindahan Tugas ASN		4	Dokumen	6,305,000					Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-			-	Dokumen	-	0%	0%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi		4	Kegiatan	110,337,500					Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		5	Kegiatan	93,269,962				1	Kegiatan	18,101,885		Kegiatan			Kegiatan		1	Kegiatan	17,636,300		Kegiatan		1	Kegiatan	17,636,300	100%	97%	1	Kegiatan	17,636,300	20%	19%		
		Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		4	Kegiatan	157,625,000					Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		315		1,598,572,577	-			24	319,714,515	184,948,205	6	-	11,598,900	6		77,452,689	9		54,609,000	3	15,490,538	41,205,000	24	10,921,800	184,865,589	100%	100%	24	2,184,360	184,865,589	8%	12%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik		10	Kegiatan	1,903,977																			-		-			-		-	0%	0%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100	Unit	6,228,750																			-		-			-		-	0%	0%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		5	Unit	17,762,500																			-		-			-		-	0%	0%		
		Penyediaan bahan logistic kantor		10	Kegiatan	9,381,250																			-		-			-		-	0%	0%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		60	Bulan	195,981,738				12	Kegiatan	15,670,470	3	Kegiatan		3	Kegiatan	7,825,000	6	Kegiatan	7,832,500		Kegiatan		12	Kegiatan	15,657,500			12	Kegiatan	15,657,500	20%	8%		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundang undangan		5	Kegiatan	16,762,500					Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Penyediaan bahan/materil		5	Kegiatan	19,838,750																			-		-			-		-	0%	0%		
		Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		60	Bulan	1,308,798,112				12	Bulan	169,277,735	3	Bulan	11,598,900	3	Bulan	69,627,689	3	Bulan	46,776,500	3	Bulan	41,205,000	12	Bulan	169,208,089	100%	100%	12	Bulan	169,208,089	20%	13%		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasisi elektronik pada SKPD		60	Bulan	21,915,000																			-		-			-		-	0%	0%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		77		2,587,022,727				1	517,404,545	493,130,000	-	-	-			-	1	-			-		1	-	493,130,000	100%	100%	1	-	493,130,000	1%	19%		

NO	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Base Line Tahun 2021)			Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan) Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (triwulan IV)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		PENANGGUNG JAWAB	KET
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV																					
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13 = 12/7X100%		14 = 6 + 12			15 = 14 / 5 x 100		16	17
				K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Dinas Jabatan		12	Unit	378,300,000																		-		-			-		-	0%	0%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1	Unit	1,036,200,000				1	Unit	493,130,000	Unit			Unit			1	Unit	493,130,000	Unit			1	Unit	493,130,000	100%	100%	1	Unit	493,130,000	100%	48%		
		Pengadaan Mebel		5	Unit	84,812,500																		-		-			-		-	0%	0%		
		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		45	Unit	493,647,727																		-		-			-		-	0%	0%		
		Pengadaan Aset tetap lainnya		8	Buah	78,812,500																		-		-			-		-	0%	0%		
		Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya		4	Gedung	315,250,000																		-		-			-		-	0%	0%		
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		1	Unit	100,000,000																		-		-			-		-	0%	0%		
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		1	Unit	100,000,000																		-		-			-		-	0%	0%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		190		4,943,588,268				36	988,717,654	947,163,859	9	-	185,014,552	20		208,825,105	20		243,754,061	20	41,765,021	306,431,394	69	48,750,812	944,025,112	192%	100%	69	9,750,162	944,025,112	36%	19%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		60	Bulan	244,845,310				12	Bulan	42,335,687	3	Bulan	10,383,957	3	Bulan	11,037,981	3	Bulan	10,509,621	3	Bulan	10,367,402	12	Bulan	42,298,961	100%	100%	12	Bulan	42,298,961	20%	17%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik		60	Bulan	1,907,876,000				12	Bulan	340,733,566	3	Bulan	45,507,323	3	Bulan	54,578,611	3	Bulan	94,662,721	3	Bulan	145,948,606	12	Bulan	340,697,261	100%	100%	12	Bulan	340,697,261	20%	18%		
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		10	Bulan	16,610,000					Bulan			Bulan			Bulan			Bulan		Bulan		-	Bulan	-			-	Bulan	-	0%	0%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		60	Bulan	2,774,256,958				12	Bulan	564,094,606	3	Bulan	129,123,272	3	Bulan	143,208,513	3	Bulan	138,581,719	3	Bulan	150,115,386	12	Bulan	561,028,890	100%	99%	12	Bulan	561,028,890	20%	20%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		210		3,793,098,957				29	758,619,791	636,284,777	8	-	57,574,077	7		124,514,811	7		158,188,874	7	24,902,962	295,943,801	29	31,637,775	636,221,563	100%	100%	29	6,327,555	636,221,563	14%	17%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan		60	Bulan	78,812,500					Bulan			Bulan			Bulan			Bulan		Bulan		-	Bulan	-			-	Bulan	-	0%	0%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		60	Bulan	2,536,469,305				12	Bulan	340,183,091	3	Bulan	33,339,752	3	Bulan	92,790,417	3	Bulan	129,874,792	3	Bulan	84,146,801	12	Bulan	340,151,762	100%	100%	12	Bulan	340,151,762	20%	13%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20	Bulan	233,015,000				4	Bulan	42,000,000	1	Bulan		1	Bulan	3,122,124	1	Bulan	28,314,082	1	Bulan	10,540,000	4	Bulan	41,976,206	100%	100%	4	Bulan	41,976,206	20%	18%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		65	Gedung/Bula	857,989,652				13	Gedung/Bulan	254,101,686	4	Gedung/Bulan	24,234,325	3	Gedung/Bulan	28,602,270	3	Gedung/Bulan		3	Gedung/Bulan	201,257,000	13	Gedung/Bulan	254,093,595	100%	100%	13	Gedung/Bulan	254,093,595	20%	30%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5	Kegiatan	86,812,500					Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
																										Rata-rata Capaian Kinerja (%)			103%	113%			13%	15%		
																										Peringkat Kinerja			sangat tinggi	sangat tinggi			sangat rendah	sangat rendah		
	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIFITAS	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Rasio Konektifitas di Jalan Provinsi	77,269		11,279,268,592				15,130		7,671,799,812	61		1,912,447,847			165,003,111			117,729,521			4,716,394,839	61		6,911,575,318	0%	90%	61		6,911,575,318	0%	61%		
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	27		94,575,000				-		-	-												-		-			-		-	0%	0%		
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan	4	Kegiatan	31,525,000					Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk LLAJ	7	Kegiatan	15,762,500					Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Monitoring dan Evaluasi Rencana Induk LLAJ	16	Kab/Kota	47,287,500					Kab/Kota			Kab/Kota			Kab/Kota			Kab/Kota		Kab/Kota		-	Kab/Kota	-			-	Kab/Kota	-	0%	0%		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		74,588		2,418,700,000				14,914		3,072,900,000	-		-	-		-	-		-	1,000		2,916,559,174	1,000		2,916,559,174	7%	95%	1,000		2,916,559,174	1%	121%		
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi		16	Unit	-					Unit			Unit			Unit			Unit		Unit		-	Unit	-			-	Unit	-	0%			
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		3,186	Rambu Lalin	2,418,700,000				637	Rambu Lalin	3,072,900,000		Rambu Lalin			Rambu Lalin			Rambu Lalin		1,000	Rambu Lalin	2,916,559,174	1,000	Rambu Lalin	2,916,559,174	157%	95%	1,000	Rambu Lalin	2,916,559,174	31%	121%		
				584	Rambu Zefron	-				117	Rambu Zefron	-		Rambu Zefron			Rambu Zefron			Rambu Zefron			Rambu Zefron		-	Rambu Zefron	-	0%		-	Rambu Zefron	-	0%			
				20,265	Pagar Pengaman Jalan	-				4,053	Pagar Pengaman Jalan	-		Pagar Pengaman Jalan			Pagar Pengaman Jalan			Pagar Pengaman Jalan			Pagar Pengaman Jalan		-	Pagar Pengaman Jalan	-	0%		-	Pagar Pengaman Jalan	-	0%			
				40	Cermin Cekung	-				8	Cermin Cekung	-		Cermin Cekung			Cermin Cekung			Cermin Cekung			Cermin Cekung		-	Cermin Cekung	-	0%		-	Cermin Cekung	-	0%			
				65	RPPJ	-				13	RPPJ	-		RPPJ			RPPJ			RPPJ			RPPJ		-	RPPJ	-	0%		-	RPPJ	-	0%			
				5,240	Deliniator	-				1,048	Deliniator	-		Deliniator			Deliniator			Deliniator			Deliniator		-	Deliniator	-	0%		-	Deliniator	-	0%			
				43,968	Marka Jalan	-				8,794	Marka Jalan	-		Marka Jalan			Marka Jalan			Marka Jalan			Marka Jalan		-	Marka Jalan	-	0%		-	Marka Jalan	-	0%			
				1,213	Paku Jalan	-				243	Paku Jalan	-		Paku Jalan			Paku Jalan			Paku Jalan			Paku Jalan		-	Paku Jalan	-	0%		-	Paku Jalan	-	0%			
				11	Warning Ligth	-				2	Warning Ligth	-		Warning Ligth			Warning Ligth			Warning Ligth			Warning Ligth		-	Warning Ligth	-	0%		-	Warning Ligth	-	0%			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Jalan			-				-		-	-												-		-			-		-				
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Jalan			-				-		-													-		-			-		-				
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah terminal Tipe B	318		811,437,500				10		4,094,576,936	6		1,825,552,621	-		-	-		-	3		1,668,945,420	9		3,494,498,041	90%	85%	9		3,494,498,041	3%	431%		
		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Perencanaan	4	Dokumen	78,812,500					Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-			-	Dokumen	-	0%	0%		
		Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Terminal Tipe B	1	Terminal	500,000,000				10	Terminal	4,094,576,936	6	Terminal	1,825,552,621		Terminal			Terminal		3	Terminal	1,668,945,420	9	Terminal	3,494,498,041	90%	85%	9	Terminal	3,494,498,041	900%	699%		
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal	3	Terminal	50,000,000					Terminal			Terminal			Terminal			Terminal			Terminal		-	Terminal	-			-	Terminal	-	0%	0%		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan terminal	10	Terminal	25,000,000					Terminal			Terminal			Terminal			Terminal			Terminal		-	Terminal	-			-	Terminal	-	0%	0%		
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah SDM yang tersertifikasi	300	Orang	157,625,000					Orang			Orang			Orang			Orang			Orang		-	Orang	-			-	Orang	-	0%	0%		
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah lokasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	151		788,007,344				5		41,404,458	2		2,208,500	1		13,740,700	1		13,301,900	-		12,029,500	4		41,280,600	80%	100%	4		41,280,600	3%	5%		
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah lokasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu	42	Lokasi	31,525,000					Lokasi			Lokasi			Lokasi			Lokasi			Lokasi		-	Lokasi	-			-	Lokasi	-	0%	0%		
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Lokasi Fasilitas Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan	42	Lokasi	47,287,500					Lokasi			Lokasi			Lokasi			Lokasi			Lokasi		-	Lokasi	-			-	Lokasi	-	0%	0%		
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jarinoan Jalan Provinsi	Jumlah lokasi Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Rekayasa	42	Lokasi	47,287,500					Lokasi			Lokasi			Lokasi			Lokasi			Lokasi		-	Lokasi	-			-	Lokasi	-	0%	0%		
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Pengawasan Kebijakan	15	Kab/Kota	326,880,263				3	Kab/Kota	40,545,910	1	Kab/Kota	1,355,200	1	Kab/Kota	13,740,700	1	Kab/Kota	13,301,900		Kab/Kota	12,029,500	3	Kab/Kota	40,427,300	100%	100%	3	Kab/Kota	40,427,300	20%	12%		
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah kegiatan Forum LLAJ di Jalan Provinsi	10	Kegiatan	335,027,081				2	Kegiatan	858,548	1	Kegiatan	853,300		Kegiatan		1	Kegiatan			Kegiatan		1	Kegiatan	853,300	50%	99%	1	Kegiatan	853,300	10%	0%		
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	103		189,150,000				-		-	-		-										-		-			-		-	0%	0%		

NO	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Base Line Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan) Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (triwulan IV)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		PENANGGUNG JAWAB	KET
											Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV													
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11			13 = 12/7X100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100		16	17
				K		RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP		
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Survey Andalalin	58	Rekomendasi	47,287,500				Rekomendasi		Rekomendasi		Rekomendasi		Rekomendasi		-	Rekomendasi	-			-	Rekomendasi	-	0%	0%		
		Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah SDM Penilai Andalalin/Sertifikat	15	Orang	47,287,500				Orang		Orang		Orang		Orang		-	Orang	-			-	Orang	-	0%	0%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah kegiatan Penilaian Andalin	20	Kegiatan	47,287,500				Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah kegiatan Pengawasan Lokasi Andalalin	10	Kegiatan	47,287,500				Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	270		4,247,143,110	15	52,595,607	4	10,654,157	3	10,771,002	3	10,334,292	1	20,602,364	11		52,361,815	73%	100%	11		52,361,815	4%	1%		
		Peningkatan Kapasites Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah SDM Bersertifikasi	20	Orang	47,287,500				Orang		Orang		Orang		Orang		-	Orang	-			-	Orang	-	0%	0%		
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Inspeksi dan Audit Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	50	Kegiatan	223,101,246				Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Inspeksi dan Audit Pemantauan Terminal	50	Kegiatan	3,834,891,864				Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah kegiatan Pengawasan Angkutan Umum/Rampcek di Terminal	75	Kegiatan	63,050,000				Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kegiatan Pengawasan Angkutan Umum dan Barang di Jalan	75	Kegiatan	78,812,500	15	52,595,607	4	10,654,157	3	10,771,002	3	10,334,292	1	20,602,364	11		52,361,815	73%	100%	11		52,361,815	15%	66%		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kartu Pengawasan AKDP	810		94,575,000	-	-										-		-			-		-	0%	0%		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkuten Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kartu Pengawasan AKDP	750	Kartu Pengawasan	47,287,500				Kartu Pengawasan		Kartu Pengawasan		Kartu Pengawasan		Kartu Pengawasan		-	Kartu Pengawasan	-			-	Kartu Pengawasan	-	0%	0%		
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi	60	Kegiatan	47,287,500				Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 daerah Kab/Kota dalam 1 Provinsi	9		63,050,000	-	-										-		-			-		-	0%	0%		
		Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	Dokumen	31,525,000				Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		-	Dokumen	-			-	Dokumen	-	0%	0%		
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kawasan Perkotaan	8	Kegiatan	31,525,000				Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui	26		94,575,000	-	-										-		-			-		-	0%	0%		
		Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Gubernur	2	Pergub	47,287,500				Pergub		Pergub		Pergub		Pergub		-	Pergub	-			-	Pergub	-	0%	0%		
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Kawasan Perkotaan	24	Kegiatan	47,287,500				Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25		7,881,250	-	-										-		-			-		-	0%	0%		
		Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Gubernur	1	Pergub	7,881,250				Pergub		Pergub		Pergub		Pergub		-	Pergub	-			-	Pergub	-	0%	0%		
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum	24	Kegiatan	-				Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	#DIV/0!		
		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-		-	-	-										-		-			-		-				
		Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Gubernur	1	Pergub	-				Pergub		Pergub		Pergub		Pergub		-	Pergub	-			-	Pergub	-	0%			
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan	4	Kegiatan					Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%			
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	810		809,986,433	162	125,211,103	43	11,357,557	43	65,613,502	43	31,830,957	13	16,292,402	142		125,094,418	88%	100%	142		125,094,418	18%	15%		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek	750	Izin Trayek	224,357,894	150	42,341,005	40	10,711,557	40	10,785,102	40	10,383,957	10	10,367,402	130	Izin Trayek	42,248,018	87%	100%	130	Izin Trayek	42,248,018	17%	19%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan Monitoring Evaluasi	60	Kegiatan	585,628,539	12	82,870,098	3	646,000	3	54,828,400	3	21,447,000	3	5,925,000	12	Kegiatan	82,846,400	100%	100%	12	Kegiatan	82,846,400	20%	14%		
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		120		1,510,187,955	24	285,111,708	6	62,675,012	6	74,877,907	6	62,262,372	6	81,965,979	24		281,781,270	100%	99%	24		281,781,270	20%	19%		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin operasi	100	Izin Operasi	1,300,259,524	20	259,973,651	5	62,353,212	5	61,915,507	5	61,409,772	5	Izin Operasi	70,965,979	20	Izin Operasi	256,644,470	100%	99%	20	Izin Operasi	256,644,470	20%	20%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan Monitoring Evaluasi	20	Kegiatan	209,928,431	4	25,138,057	1	321,800	1	12,962,400	1	852,600	1	11,000,000	4	Kegiatan	25,136,800	100%	100%	4	Kegiatan	25,136,800	20%	12%		
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan	12		150,000,000	-	-	-									-		-			-		-	0%	0%		
		Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan	2	Dokumen	50,000,000				Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		-	Dokumen	-			-	Dokumen	-	0%	0%		
		Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan	2	Dokumen	50,000,000				Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		-	Dokumen	-			-	Dokumen	-	0%	0%		
		Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang	8	Kegiatan	50,000,000				Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-	0%	0%		
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)			88%	116%			10%	118%		
																			Peringkat Kinerja			tinggi	sangat tinggi			sangat rendah	sangat tinggi		

NO	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Base Line Tahun 2021)			Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan) Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (triwulan IV)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		PENANGGUNG JAWAB	KET
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV																							
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13 = 12/7X100%		14 = 6 + 12			15 = 14 / 5 x 100		16	17
				K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		K		RP	K			
	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIFITAS	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	JUMLAH ARUS PENUMPANG ANGKUTAN UMUM	143		3,288,464,937				30		205,219,791	5		34,023,071			47,230,433			50,118,283			72,856,985	5		204,228,772	17%	100%	5		204,228,772	3%	6%		
		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah Pertimbangan teknis Usaha Angkutan Laut dan Penunujang Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilaeth dan Beroperasi	80		157,625,000				16		115,534,610	4		11,701,457	2		25,254,549	2		25,815,984	2		52,337,396	10		115,109,386	63%	100%	10		115,109,386	13%	73%		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pertimbangan Teknis	50	Pertek	78,812,500				10	Pertek	95,850,836	2	Pertek	10,984,757	1	Pertek	22,865,449	1	Pertek	20,865,984	1	Pertek	40,875,596	5	Pertek	95,591,786	50%	100%	5	Pertek	95,591,786	10%	121%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan ijin usaha angkutan laut dan penunjang usaha angkutan laut	30	Kegiatan	78,812,500				6	Kegiatan	19,683,774	2	Kegiatan	716,700	1	Kegiatan	2,389,100	1	Kegiatan	4,950,000	1	Kegiatan	11,461,800	5	Kegiatan	19,517,600	83%	99%	5	Kegiatan	19,517,600	17%	25%		
		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Jumlah pertimbangan teknis Usaha Angkutan Laut Pelayaran rakyat yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi (UU 23 Tahun 2014)	50		753,012,504				10		-	-		-			-			-			-	-		-	0%		-	-		-	0%	0%		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayaran Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Jumlah Rekomendasi Pertimbangan Teknis	25	Pertek	597,692,720				5					-			-			-			-	-		-	0%		-	-		-	0%	0%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan ijin usaha Pelayaran Rakyat	25	Kegiatan	155,319,784				5	31,063,957				-			-			-			-	-		-	0%		-	-		-	0%	0%		
		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi vano Bersanokutan	Jumlah Pertimbangan Teknis ijin pengoperasian Kapal Penyeberangan (Permenhub No. 104 Tahun 2017)	13		157,625,000				3		89,685,181	1		-			22,321,614	1		21,975,884	1		24,302,299	-		20,519,589	3	4,860,460	89,119,386	115%	99%	3	972,092	89,119,386	23%	57%		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang	10	Pertek	78,812,500				2	Pertek	84,400,678	1	Pertek	21,340,614	1	Pertek	21,257,584	-	Pertek	20,718,899		Pertek	20,519,589	2	Pertek	83,836,686	100%	99%	2	Pertek	83,836,686	20%	106%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Operator Kapal ASDP Pengawasan Izin Usaha ASDP (Permenhub No. 104 Tahun 2017)	3	Operator Kapal ASDP	78,812,500				1	Operator Kapal ASDP	5,284,503		Operator Kapal ASDP	981,000		Operator Kapal ASDP	718,300	1	Operator Kapal ASDP	3,583,400		Operator Kapal ASDP		1	Operator Kapal ASDP	5,282,700	167%	100%	1	Operator Kapal ASDP	5,282,700	33%	7%		
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi		-		7,881,250				-		-	-		-			-			-			-	-		-	-		-	-		-	-	0%		
		Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta	Sistem Informasi Penyeberangan Sulawesi Utara (Pergub No. 65 Tahun 2016)			7,881,250				-		-			-			-			-			-	-		-	-		-	-		-	-	0%		
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Informasi Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani	-		294,575,000				1		-			-			-			-			-	-		-	0%		-	-		-	-	0%		
		Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Sistem Informasi Penyeberangan Sulawesi Utara (Pergub No. 65 Tahun 2016)			215,762,500				-															-		-			-	-		-		0%		
		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Operator Kapal ASDP Pengawasan Lintas ASDP (Permenub No. 104 Tahun 2017			78,812,500				-	1 Kegiatan	-		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		-	Kegiatan	-			-	Kegiatan	-		0%		
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah perlimbangan teknis Usaha Jasa terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan	0		618916183.9						0													-		-			-	-		-		0%		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pertimbangan Teknis			565848680																			-		-			-	-		-		0%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan ijin Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan			53067503.93																			-		-			-	-		-		0%		
		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan	-		141,862,500				-		-													-		-			-	-		-		0%		
		Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi (Permenhub No. 104 Tahun 2017)			47,287,500																			-		-			-	-		-		0%		
		Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Penyeberangan Sulawesi Utara (Pergub No. 65 Tahun 2016)			47,287,500																			-		-			-	-		-		0%		
		Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar	Jumlah Koordinasi dan Pengawasan Tarif Angkutan Pelabuhan Penyeberangan			47,287,500																			-		-			-	-		-		0%		

NO	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Base Line Tahun 2021)			Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan) Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (triwulan IV)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		PENANGGUNG JAWAB	KET
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV																						
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13 = 12/7X100%		14 = 6 + 12			15 = 14 / 5 x 100		16	17
				K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		K		RP	K	RP		
		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan	-		236,437,500				-		-													-		-			-			0%		
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Penumpan Regional	jumlah Studi Rencana Induk Pelabuhan Regional di Prov.Sulut			78,812,500																	-		-			-			0%		
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Sosialisasi Rencana induk Pelabuhan, Sosialisasi Keselamatan Pelayaran			78,812,500																	-		-			-			0%		
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Regional di Prov.Sulut			78,812,500																	-		-			-			0%		
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		-		315,250,000				-		-											-		-			-			0%		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Penumpan Regional	Jumlah Pertek			78,812,500																	-		-			-			0%		
		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pengembangan Pelabuhan Reosional			78,812,500																	-		-			-			0%		
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Pelabuhan Regional			78,812,500																	-		-			-			0%		
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Regional di Prov.Sulut			78,812,500																	-		-			-			0%		
		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pertimbangan teknis Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan	-		226,980,000				-		-											-		-			-			0%		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pertek			37,830,000																	-		-			-			0%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Regional di Prov.Sulut			189,150,000																	-		-			-			0%		
		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional		-		126,100,000						-											-		-			-			0%		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional			63,050,000																	-		-			-			0%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Penumpan Regional	Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Regional di Prov.Sulut			63,050,000																	-		-			-			0%		
		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pertek Pekerjaan Pengerukan (UU 23 Tahun 2014)	-		31,525,000						-											-		-			-			0%		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pertimbangan Teknis			15,762,500																	-		-			-			0%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Regional di Prov.Sulut			15,762,500																	-		-			-			0%		
		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pertek Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	-		15,762,500						-											-		-			-			0%		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pertimbangan Teknis			7,881,250																	-		-			-			0%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Regional di Prov.Sulut			7,881,250																	-		-			-			0%		
		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pertimbangan teknis Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	-		204,912,500				-													-		-			-			0%		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pertimbangan Teknis			47,287,500																	-		-			-			0%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Penumpan Regional			157,625,000																	-		-			-			0%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			59%	66%			12%	43%		
																									Peringkat Kinerja			rendah	sedang			sangat rendah	sangat rendah		

NO	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Base Line Tahun 2021)			Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan) Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (triwulan IV)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		PENANGGUNG JAWAB	KET
													Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13 = 12/7X100%		14 = 6 + 12			15 = 14 / 5 x 100		16	17
				K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K		RP	K	RP	K		RP	K	RP		
	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIFITAS	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi di Kab/Kota	2		392,531,364				2		59,697,682	1	-	821,300			20,295,600			23,799,300			14,734,300	1	4,759,860	59,650,500	50%	100%	1	951,972	59,650,500	50%	15%		
		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian (UU 23 tahun 2007)	1		245,399,498				1		33,419,249	1		821,300	-		3,186,500	-		15,099,300	-		14,265,200	1	3,019,860	33,372,300	100%	100%	1	603,972	33,372,300	100%	14%		
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	-		-				-		-		-			-			-			-		-	-	-			-	-	-				
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1		245,399,498				1	Kegiatan	33,419,249	1	Kegiatan	821,300		Kegiatan	3,186,500		Kegiatan	15,099,300		Kegiatan	14,265,200	1	Kegiatan	33,372,300	100%	100%	1	Kegiatan	33,372,300	100%	14%		
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Monitoring dan evaluasi	-		-				-		-		-			-			-			-		-	-	-			-	-	-				
		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Jumlah kegiatan Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	-		-				-		-		-			-			-			-		-	-	-			-	-	-				
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi teknis	-		-				-		-		-			-			-			-		-	-	-			-	-	-				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	-		-				-		-		-			-			-			-		-	-	-			-	-	-				
		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api (UU 23 Tahun 2007)	1		147,131,866				1		26,278,433	-		-	1		17,109,100	-		8,700,000	-		469,100	1		26,278,200	100%	100%	1		26,278,200	100%	18%		
		Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan Rumusan kebijakan	-		-				-		-		-			-			-			-		-	-	-			-	-	-				
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba	1		147,131,866				1	Kegiatan	26,278,433		Kegiatan		1	Kegiatan	17,109,100		Kegiatan	8,700,000		Kegiatan	469,100	1	Kegiatan	26,278,200	100%	100%	1	Kegiatan	26,278,200	100%	18%		
		Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah kegiatan Penetapan Kelas Stasiun Kereta Api (UU 23 Tahun 2007)	-		-				-		-		-			-			-			-		-	-	-			-	-	-				
		Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah kegiatan Rumusan kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun	-		-				-		-		-			-			-			-		-	-	-			-	-	-				
		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan penerbitan Izin Operasi sarana perkeretaapian (UU 23 tahun 2007)	-		-				-		-		-			-			-			-		-	-	-			-	-	-				
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pertimbangan Teknis	-		-				-		-		-			-			-			-		-	-	-			-	-	-				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	Monitoring dan Evaluasi	-		-				-		-		-			-			-			-		-	-	-			-	-	-				
		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Jumlah kegiatan Penetapan Jaringan (UU 23 tahun 2007)	-		-				-		-		-			-			-			-		-	-	-			-	-	-				
		Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan Rumusan Kebijakan Penetapan jaringan	-		-				-		-		-			-			-			-		-	-	-			-	-	-				
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Sosialisasi dan Uji coba	-		-				-		-		-			-			-			-		-	-	-			-	-	-				
		Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api	-		-				-		-		-			-			-			-		-	-	-			-	-	-				
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pertimbangan Teknis	-		-				-		-		-			-			-			-		-	-	-			-	-	-				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	-		-				-		-		-			-			-			-		-	-	-			-	-	-				
																												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100%	100%				100%	16%		
																												Peringkat Kinerja	sangat tinggi	sangat tinggi				sangat tinggi	sangat rendah		
		TOTAL PAGU		77,414		101,207,018,928				15,494		23,683,034,671			5,442,705,934			4,579,551,189			3,461,672,743			7,777,097,440			21,754,157,306					21,754,157,306				
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													5,442,705,934			4,579,551,189									21,754,157,306					21,754,157,306				
		TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																										Rata-rata Capaian Kinerja (%)	87.48%	98.71%				34%	48%		
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										Peringkat Kinerja	tinggi	sangat tinggi				sangat rendah	sangat rendah		

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :

FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
													I		II		III		IV												
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = (I, II, III, IV)		13 = 12/7 x		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K		K	Rp.				
		URUSAN WAJIB																													
		KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK				**82,268,938,101**			**39,266,935,853**					**1,927,671,042.00**		**8,940,541,785.00**		**4,752,961,541.00**								39,266,935,853			47.73	**DKIPS**	Prov. SULUT/Luar Daerah
1	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika ; INDEKS NILAI LKIP PD DINAS KIPS RATA - RATA MINIMUM B**			**9,440,299,812**			**4,233,229,160**																	**4,233,229,160**			**44.84**		**Manado**
1.1		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum	60	Bulan	**7,457,836,852**	48	Bulan	3,099,929,353															48	Bulan	3,099,929,353	80.00	41.57			Manado
1.2		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan	60	Bulan	**849,626,983**	48	Bulan	381,610,591															48	Bulan	381,610,591	80.00	44.92			Manado
1.3		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Tersedianya kebutuhan administrasi barang/jasa	60	Bulan	**377,611,992**	48	Bulan	89,562,450															48	Bulan	89,562,450	80.00	23.72			Manado
1.4		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundanaan	60	Bulan	**188,805,996**	48	Bulan	37,463,950															48	Bulan	37,463,950	80.00	19.84			Manado
1.5		Penataan Kearsipan	Tersedianya penatasan kearsipan yang baik	60	Bulan	**94,402,998**	48	Bulan	19,228,450															48	Bulan	19,228,450	80.00	20.37			Manado
1.6		Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi	100	Kali	**472,014,991**	73	Kali	605,434,366															73	Kali	605,434,366	73.00	128.27			Prov.SULUT/ Luar Daerah
																											78.83	**46.45**			
																											Rendah				
2	Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika ; INDEKS NILAI LKIP PD DINAS KIPS RATA - RATA MINIMUM B**	**INDEKS NILAI LKIP PD DINAS KIPS RATA - RATA MINIMUM B**		**4,281,485,269**	**INDEKS NILAI LKIP PD DINAS KIPS RATA - RATA MINIMUM B**		**2,311,922,151**																	**2,311,922,151**				**DKIPS**	**Manado**
2.1		Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	15	Unit	1,322,229,512	11	Unit	400,000,000															11	Unit	400,000,000	73.33	30.25			Manado
2.2		Pengadaan perlatan/perlengkapnn rumah jabatan/dinas	Tersedianya perlatan/perlengkapan rumah jabatan/dinas	1	Paket		1	Paket	76,000,000															1	Paket	76,000,000	100.00				Manado
2.3		Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	400	Paket	1,844,955,757	100	Paket	1,151,487,100															100	Paket	1,151,487,100	25.00	62.41			Manado
2.4		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	5	Paket	250,000,000	1	Paket	106,229,479															1	Paket	106,229,479	20.00	42.49			Manado
2.5		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5	Paket	360,000,000	7	Paket	160,503,572															7	Paket	160,503,572	140.00	44.58			Manado
2.6		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5	Paket	110,000,000	5	Paket	24,125,000															5	Paket	24,125,000	100.00	21.93			Manado
2.7		Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	1	Paket	199,800,000	1	Paket	199,210,000															1	Paket	199,210,000	100.00	99.70			Manado
2.8		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	1	Paket	194,500,000	1	Paket	194,367,000															1	Paket	194,367,000	100.00	99.93			Manado
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)						**82.29**	**57.33**			
																					Predikat Kinerja						**Rendah**				
3		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin**			**268,497,675**			**177,868,500**																	**177,868,500**			**66.25**	**DKIPS**	**Manado**
3.1		Pengadaan paksian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya seragam dinas untuk orasasi	5	Paket	268,497,675	2	Paket	177,868,500															2	Paket	177,868,500	40.00	66.25			Manado
																											40.00	**66.25**			
																											Sangat rendah				
4		**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas KIPS**			**1,128,224,930**			**252,471,586**																	**252,471,586**			**22.38**	**DKIPS**	**Prov.SULUT/ Luar Daerah**
4.1		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terciptanya bimbingan teknis	10	Kegiatan	500,000,000	2	Kegiatan	246,813,586															2	Kegiatan	246,813,586	20.00	49.36			Luar Daerah
4.2		Pendidikan dan pelatihan formal	Terciptanya pendidikan dan pelatihan formal	4	Kegiatan	350,000,000	0	Kegiatan	-															0	Kegiatan	-	0.00	0.00			Manado
4.3		Pelatihan Kantor Sendiri	Terciptanya pelatihan kantor sendiri	5	Kegiatan	278,224,930	0	Kegiatan	5,658,000															0	Kegiatan	5,658,000	0.00	2.03			
																											6.67	**17.13**			
																											Sangat rendah				
5	**Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan**			**149,650,760**			**58,746,500**																	**58,746,500**			**39.26**	**DKIPS**	**Manado**
5.1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terciptanya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	48	Dokumen	22,000,000	24	Dokumen	9,703,000															24	Dokumen	9,703,000	50.00	44.10			Manado
5.2		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	10	Dokumen	19,000,000	4	Dokumen	9,065,000															4	Dokumen	9,065,000	40.00	47.71			Manado
5.3		Penyusunan laporan Tahunan SKPD	Tersedianya laporan tahunan	5	Dokumen	60,650,760	2	Dokumen	19,614,000															2	Dokumen	19,614,000	40.00	32.34			Manado
5.4		Penyusunan Laporan Bulanan SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan	10	Dokumen	48,000,000	14	Dokumen	20,364,500															14	Dokumen	20,364,500	140.00	42.43			Manado
																											67.50	**41.65**			
																											Sangat rendah				

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
													I			II			III			IV																	
6		**Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/ Kedaerahan**	**Berkembangnya kemitraan kerjasama investasi dan promosi daerah (tingkat partisipasi dan promosi pameran) dan Meningkatnya Rasa Nasionalisme Kebangsaan Indonesia**			**495,056,955**			**65,480,000**																					**65,480,000**			**13.23**	**DKIPS**	
6.1		Pelaksanaan Pameran dan Promosi	Tersedianya informasi pembangunan daerah lewat kegiatan pameran dan promosi	5	Kegiatan	310,000,000	1	Kegiatan	33,270,000																			1	Kegiatan	33,270,000	20.00	10.73		Manado
6.2		Pelaksanaan Hari Kebangkitan Nasional	Tersedianya pelaksanaan Hari Kebangkitan Nasional		Kegiatan	-	0	Kegiatan	-																			0	Kegiatan	-	-	-		Manado
6.3		Seminar Jurnalistik Hari Pers Nasional	Tersedianya seminar jurnalistik hari pers nasional	5	Kegiatan	185,056,955	1	Kegiatan	32,210,000																			1	Kegiatan	32,210,000	20.00	17.41		Manado
																																13.33	**9.38**			
																																Sangat rendah				
7	**Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien**	**Program Perencanaan Perangkat Daerah**	**Terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. (Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD)**			**188,566,872**			**58,410,300**																					**58,410,300**			**30.98**	**DKIPS**	**Manado**
7.1		Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunya Renstra SKPD	50	Kegiatan	52,566,872	12	Kegiatan	11,211,000																			12	Kegiatan	11,211,000	24.00	21.33		Manado
7.2		Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Renja SKPD	50	Kegiatan	39,000,000	12	Kegiatan	13,184,800																			12	Kegiatan	13,184,800	24.00	33.81		Manado
7.3		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Tersusunnya RKA SKPD	50	Kegiatan	97,000,000	12	Kegiatan	34,014,500																			12	Kegiatan	34,014,500	24.00	35.07		Manado
																																24.00	**30.07**			
																																Sangat Rendah				
8	**Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman**	**Program Pengembangan Keterbukaan Informasi**	**Persentase PPID Pembantu yang mengembangkan Keterbukaan Informasi**			**6,492,823,127**			**2,559,922,472**																					**2,559,922,472**			**39.43**	**DKIPS**	**Prov.SULUT/ Luar Daerah**
8.1		Penyelesaian Sengketa Informasi	Terselesaikannya sengketa informasi antara Pemohon dan Termohon	135	Sidang	3,451,823,127	41	Sidang	1,530,000,000																			41	Sidang	1,530,000,000	30.37	44.32		Manado
8.2		Sosialisasi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik	Terlaksananya Sosialisasi UU 14 Tahun 2008	10	Kegiatan	325,000,000	2	Kegiatan	58,382,000																			2	Kegiatan	58,382,000	20.00	17.96		Manado
8.3		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	240	Kali	300,000,000	60	Kali	113,951,900																			60	Kali	113,951,900	25.00	37.98		Prov.SULUT
8.4		Koordinasi dan Konsultasi Keterbukaan Informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	120	Kali	1,500,000,000	30	Kali	581,361,410																			30	Kali	581,361,410	25.00	38.76		Luar Daerah
8.5		Pembuatan Website Komisi Informasi Prov. Sulut	Tersedianya Website Komisi Informasi Provinsi Sulut	1	Paket	15,000,000	1	Paket	-																			1	Paket	-	100.00	0.00		Manado
8.6		Pengelolaan Website Komisi Informasi Prov. Sulut	Tersedianya informasi digital melalui website komisi informasi Prov. Sulut	3	Paket	126,000,000	1	Paket	-																			1	Paket	-	33.33	0.00		Manado
8.7		Focus Group Discussion tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terlaksananya FGD Keterbukaan Informasi Publik di Kab/Kota	5	Kegiatan	325,000,000	1	Kegiatan	94,123,962																			1	Kegiatan	94,123,962	20.00	28.96		Prov. SULUT
8.8		Focus Group Discussion tentang penyelesaian sengketa Informasi	Meningkatkan Jumlah Permohonan Informasi Publik di Kab/Kota	5	Kegiatan	300,000,000	1	Kegiatan	46,577,000																			1	Kegiatan	46,577,000	20.00	15.53		Manado
8.9		Pemeringkatan badan publik tingkat Provinsi Kab/Kota	Terlaksananya Pemeringkatan Badan Publik	5	Kegiatan	150,000,000	1	Kegiatan	135,526,200																			1	Kegiatan	135,526,200	20.00	90.35		Prov. SULUT
																																32.63	**30.43**			
																																Sangat Rendah				
9	Terwujudnya sistem persandian yang berkualitas yang dirangkaja dengan SDM yang berkualifikasi ahli sandi	**Program Peningkatan/ Pengembangan Persandian**	**1. Persentase Aparatur yang mendapatkan Sertifikat Teknologi Informasi dan Komunikasi dari Lembaga Terakreditas 2. Persentase Berita Melalui Email Resmi yang dimanakan**			**1,070,667,506**			**444,201,511**																					**444,201,511**			**41.49**	**DKIPS**	**Prov.SULUT/ Luar Daerah**
9.1		Pelaksanaan Pendistribusian Peralatan Sandi	Tersedianya Pendistribusian Peralatan Sandi	10	Kegiatan	198,000,000	4	Kegiatan	108,440,804																			4	Kegiatan	108,440,804	40.00	54.77		Prov.SULUT/ Luar Daerah
9.2		Pengamanan Data Persandian	Tersedianya pengamanan data persandian	10	Kegiatan	152,000,000	2	Kegiatan	108,917,389																			2	Kegiatan	108,917,389	20.00	71.66		Prov.SULUT/ Luar Daerah
9.3		Pembinaan dan Pengawasan Sarana Persandian	Tersedianya pembinaan dan pengawasan sarana persandian	10	Kegiatan	60,527,800	2	Kegiatan	107,423,303																			2	Kegiatan	107,423,303	20.00	177.48		Prov.SULUT/ Luar Daerah
9.4		Bimbingan Teknis Pengembangan Jaringan Aplikasi	Terciptanya sumber daya manusia dalam pengusasan jaringan aplikasi	2	Kegiatan	120,000,000	0	Kegiatan	-																			0	Kegiatan	-	0.00	0.00		Manado
9.5		Bimbingan Teknis Asesmen Teknologi Informasi	Terciptanya sumber daya manusia yang terampil dan profesional dalam bidang pengelolaan TIK	6	Kegiatan	124,000,000	2	Kegiatan	31,110,167																			2	Kegiatan	31,110,167	33.33	25.09		Manado
9.6		Bimbingan Teknis Sertifikasi Digital	Terciptanya peningkatan sumber daya yang terampil dan profesional dalam bidang pengelolaan TIK	4	Kegiatan	95,486,697	2	Kegiatan	21,397,848																			2	Kegiatan	21,397,848	50.00	22.41		Manado

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
													I			II			III			IV														
9.7		Bimbingan Teknis Jaringan Komputer	Terciptanya sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemeliharaan jaringan komputer	3	Kegiatan	90,000,000	1	Kegiatan	30,972,000																				1	Kegiatan	30,972,000	33.33	34.41		Manado
9.8		Bimtek untuk perangkat Daerah di Kab/Kota dan Mitra kerja Bagian Persandian	Terciptanya sumber daya manusia yang terampil dalam bagian persandian	3	Kegiatan	230,653,009	1	Kegiatan	35,940,000																				1	Kegiatan	35,940,000	33.33	15.58		Manado
9.9		Diklat Persandian	Terciptanya peningkatan sumber daya yang terampil dan profesional dalam bagian persandian		Kegiatan	-		Kegiatan	-																					-					
																															28.75	**50.17**		
																															Sangat Rendah			
10		**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**1. Jumlah komunikasi dan informasi kepada masyarakat melalui media masa 2. Jumlah kegiatan Penunjang Pengembangan Komunikasi, Informasi**			**41,637,729,367**			**24,382,303,460**																					24,382,303,460		58.56	**DKIPS**	Prov.SULUT / Luar Daerah
10.1		Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Terlaksananya penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	5	Kegiatan	600,000,000	1	Kegiatan	208,440,330																				1	Kegiatan	208,440,330	20.00	34.74		Prov. SULUT
10.2		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui kerjasama Produksi Penyiaran	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran televisi nasional	5	Paket	750,000,000	2	Paket	1,303,420,896																				2	Paket	1,303,420,896	40.00	173.79		Prov. SULUT
10.3		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui kerjasama Siaran Pembangunan Daerah	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran radio nasional	5	Paket	650,000,000	2	Paket	224,684,000																				2	Paket	224,684,000	40.00	34.57		Prov. SULUT
10.4		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui kerjasama Imbal Siar Media Online kantor Berita Nasional	Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran kantor berita nasional	5	Paket	550,000,000	1	Paket	1,501,889,900																				1	Paket	1,501,889,900	20.00	273.07		Prov. SULUT
10.5		Koordinasi Kehumasan Antar Instansi di Sulawesi Utara	Terselenggaranya koordinasi kehumasan antar perangkat daerah di sulawesi utara	5	Kegiatan	650,000,000	2	Kegiatan	21,607,600																				2	Kegiatan	21,607,600	40.00	3.32		Manado
10.6	Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman	Peyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak	Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media cetak	2	Paket	1,050,000,000	2	Paket	2,491,827,800																				2	Paket	2,491,827,800	100.00	237.32		Prov. SULUT
10.7		Kegiatan Pengadaan Videotron	Tersedianya Videotron		Unit	16,653,632,308	0	Unit	-																				0	Unit	-				
10.8		Kemitraan dengan Media Massa	Terlaksanya kemitraan dengan media massa	5	Kegiatan	650,000,000	1	Kegiatan	30,830,000																				1	Kegiatan	30,830,000	20.00	4.74		Manado
10.9		Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengembangan kominfo dan media massa	20	Kali	400,000,000	2	Kali	197,702,898																				2	Kali	197,702,898	10.00	49.43		Manado
10.10		Temu Bakohumas Expo dan Komunitas Tingkat Nasional Tahun 2017	Terlaksananya informasi pembangunan daerah sulawesi utara untuk masyarakat di luar daerah	5	Kegiatan	2,000,000,000	1	Kegiatan	9,067,019																				1	Kegiatan	9,067,019	20.00	0.45		Prov. SULUT / Luar Daerah
10.11		Pengelolaan dan Operasional Media Center	Terlaksananya pengelolaan fasilitas operasional Media Center	2	Kegiatan	2,000,000,000	0	Kegiatan	-																				0	Kegiatan	-	0.00	0.00		Manado
10.12		Pembangunan Command Center	Terlaksananya pembangunan command center	2	Paket	10,754,097,059	1	Paket	13,474,574,786																				1	Paket	13,474,574,786	50.00	125.30		Manado
10.13		Pengadaan fasilitas penunjang kelompok informasi masyarakat	Terlaksananya pengadaan fasilitas seminiasr	9	Unit	800,000,000	0	Unit	307,450,000																				0	Unit	307,450,000	0.00	38.43		Prov. SULUT
10.14		Pembuatan website desa kelompok informasi masyarakat	Terlaksananya pembuatan website desa kelumnok	1	Paket	30,000,000	1	Paket	462,500																				1	Paket	462,500	100.00	1.54		Manado
10.15		Bimtek pengelola website desa kelompok informasi masyarakat	Terlaksananya bimtek pengelola website desa	3	Kegiatan	300,000,000	0	Kegiatan	-																				0	Kegiatan	-	0.00	0.00		Manado
10.16		SMS Gateway	Terlaksananya program sms gateway	4	Paket	300,000,000	0	Paket	-																				0	Paket	-	0.00	0.00		Manado
10.17		Gelar Inovasi Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya gelar inovasi komunikasi, informasi dan media massa	4	Kegiatan	3,500,000,000	2	Kegiatan	647,740,331																				2	Kegiatan	647,740,331	50.00	18.51		Prov. SULUT / Luar Daerah
		Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Kemasyarakatan		Kegiatan		12	Kegiatan	3,962,605,400																				12	Kegiatan	3,962,605,400	#DIV/0!	#DIV/0!		Prov. SULUT
																															31.88	**62.20**		
																															Sangat rendah			
11		**Program Peningkatan Struktur Sistim Penyiaran dan Pengawasan Isi Siaran**	**Persentase usulan ijin lembaga penyiaran yang di rekomendasikan**			**4,966,762,296**			-																					-		**0.00**	**DKIPS**	
11.1		Verifikasi Faktual Data Lembaga Penyiaran	Lembaga Penyiaran yang sesuai standar Penyiaran	5	Kegiatan	400,000,000		Kegiatan	-																				0	Kegiatan	-	0.00	0.00		Manado
11.2		Evaluasi Dengar Pendapat	Terlaksananya Evaluasi kelayakan Lembaga Penyiaran yang berproses izin	5	Kegiatan	500,000,000		Kegiatan	-																				0	Kegiatan	-	0.00	0.00		Manado
11.3	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja kelembagaan penyiaran	Penuntasan Tunggakan Berkas Permohonan IPP Lembaga-lembaga Penyiaran dan Percepatan FRB	Terpenuhinya syarat kelengkapan berkas proses perizinan dan percepatan FRB	5	Kegiatan	400,000,000		Kegiatan	-																				0	Kegiatan	-	0.00	0.00		Manado
11.4		Kinerja dan Kesejahteraan Komisioner	Meningkatnya kinerja anggota KPID Sulut	5	Kegiatan	2,916,762,296		Kegiatan	-																				0	Kegiatan	-	0.00	0.00		Manado
11.5		Pengawasan/Pembinaan Lembaga Penyiaran	Terciptanya isi siaran dan aktivitas lembaga penyiaran yang sesuai peraturan penyiaran	5	Kegiatan	350,000,000		Kegiatan	-																				0	Kegiatan	-	0.00	0.00		Manado

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
													I			II			III			IV													
11.6		Penindakan Lembaga Penyiaran dengan Polda	Terlaksananya penindakan terhadap pelanggaran penyiaran	5	Kegiatan	400,000,000		Kegiatan	-																			0	Kegiatan	-	0.00	0.00			Manado
																																0.00	0.00			
																																Sangat Rendah				
12	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja kelembagaan penyiaran	**Peningkatan Peran dan Fungsi serta Penguatan Kelembagaan KPID**	**Persentase lembaga penyiaran yang beroprasi tanpa ijin**			**1,595,696,701**			**-**																							**0.00**	**DKIPS**	
12.1		Sosialisasi Peran dan Fungsi KPID dan Dokumentasi Hukum Bidang Penyiaran	Terlaksananya Sosialisasi terhadap Lembaga Penyiaran, Masyarakat dan Pelajar	4	Kegiatan	175,000,000		Kegiatan																				0	Kegiatan		0.00	0.00			Manado
12.2		Kinerja Dewan Kehormatan	Tercapainya keputusan rekomendasi tingkat pelanggaran kode etik KPID	3	Kegiatan	320,696,701		Kegiatan																				0	Kegiatan		0.00	0.00			Manado
12.3		Rapat Koordinasi dan Konsultasi, Rapim Tingkat Nasional penyiaran	Terlaksananya koordinasi nasional seluruh KPID	4	Kegiatan	1,100,000,000		Kegiatan																				0	Kegiatan		0.00	0.00			Manado
																																0.00	0.00			
																																Sangat Rendah				
13	1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi, informatika dan komunikasi (TIK);	**Program Peningkatan Sistem Informasi dan Telematika**	**Jumlah Perangkat Daerah dan Kab/kota Yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Telematika**			**1,226,979,563**			**540,162,297**																						**540,162,297**		**44.02**	**DKIPS**	**Prov. SULUT**
13.1		Pengadaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Terlaksananya pengadaan bandwidth akses internet	60	Bulan	384,000,000	0	Bulan	-																			0		-	0.00	0.00			Prov. SULUT
13.2		Penyediaan Jasa Hosting	Terlaksananya penyediaan jasa hosting	5	Paket	92,000,000	0	Paket	-																			0		-	0.00	0.00			Prov. SULUT
13.3		Pemeliharaan dan Updating Website sulutprov.go.id	Terlaksananya pemeliharaan dan updating website sulutprov.go.id	3	Bulan	180,000,000	1	Bulan	3,697,650																			1		3,697,650	33.33	2.05			Prov. SULUT
13.4		Pembuatan dan Pengelolaan Website kominfo.sulutprov.go.id	Terlaksananya pembuatan dan pengelolaan website	1	Paket	15,000,000	0	Paket	-																			0		-	0.00	0.00			Prov. SULUT
13.5		Pemutakhiran Data Sistem Informasi dan Telematika	Terlaksanya koordinasi dan konsultasi eksisting dalam rangka pemutakhiran data sistem informatika dan telematika	5	Kegiatan	294,206,563	4	Kegiatan	357,274,170																			4		357,274,170	80.00	121.44			Prov. SULUT
13.6		Penyebaran Informasi pada Masyarakat dengan Fasilitas Internet Mobile	Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui internet mobile	14	Kegiatan	231,773,000	2	Kegiatan	179,190,477																			2		179,190,477	14.29	77.31			Prov. SULUT
13.7		Perbaikan dan Perawatan Jaringan	Terlaksananya perbaikan dan perawatan jaringan di SKPD lingk. Pemprov. Sulut	5	Kegiatan	30,000,000	1	Kegiatan	-																			1		-	20.00	0.00			Manado
13.8		Pengembangan Science On a Sphere (SOS)	Terlaksananya kegiatan science on a sphere (SOS)		Paket	-	0	Paket	-																			0		-					
																																21.09	28.69			
																																Sangat rendah				
14		**Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi**	**Tersedianya data statistik sektoral dalam bentuk digital**			**455,256,843**			**9,532,800**																						**9,532,800**		**2.09**	**DKIPS**	
14.1		Digitalisasi informasi pembangunan daerah	Tersedianya informasi data elektronik dan profil daerah sulawesi utara	5	Kegiatan	455,256,843	1	Kegiatan	9,532,800																			1	Kegiatan	9,532,800	20.00	2.09			Manado
																																20.00	2.09			
																																Sangat Rendah				
15	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi, informatika dan komunikasi (TIK)	**Program E-Government**	**Persentase Program Pengelolaan e-Government yang dilaksanakan**			**1,221,939,347**			**4,037,784,935**																						**4,037,784,935**		**330.44**	**DKIPS**	
15.1		Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah	Terciptanya website online Perangkat Daerah	3	Kegiatan	190,000,000	0	Kegiatan	-																			0	Kegiatan	-	0.00	0.00			Manado
15.2		Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	3	Kegiatan	190,000,000	0	Kegiatan	-																			0	Kegiatan	-	0.00	0.00			Manado
15.2		Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	Terlaksananya peningkatan kualitas layanan publik	4	Kegiatan	541,939,347	1	Kegiatan	190,410,000																			1	Kegiatan	190,410,000	25.00	35.13			Manado
15.3		Pengembangan Command Center	Tersedianya Command Center menjadi Pusat Pengelolah Data dan Infomasi Pemerintah, Pusat Terintegrasinya Sistem Jaringan dan Aplikasi, Pusat Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Suporting Data kepada Pimpinan dalam rangka Pengambilan Keputusan, Media Monitoring Evaluasi Pimpinan, Media Promosi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	3	Kegiatan	300,000,000	2	Kegiatan	3,847,374,935																			2	Kegiatan	3,847,374,935	66.67	1282.46			Manado
																																22.92	329.40			
																																sangat rendah				
16	Tersedianya akses pita lebar nasional, internet dan penyiaran	**Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik**	**1. Cakupan Layanan Telekomunikasi 2. Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik yang akurat**			**1,599,325,000**			**-**																			0		-			**DKIPS**	

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
													I			II			III			IV															
16.1	digital yang merata dan terjangkau	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik Pemerintah Daerah	Tersedianya informasi publik	3	Kegiatan	900,000,000	0	Kegiatan	0																			0	Kegiatan	-	0.00	0.00		Manado
16.2		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik	Persentase penduduk yang terpapar informasi publik	3	Kegiatan	699,325,000	0	Kegiatan	0																			0	Kegiatan	-	0.00	0.00		Manado
																															0.00	0.00		
																															Sangat Rendah			
17	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi, informatika dan komunikasi (TIK);	**Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah**	**Tersusunnya Data, Informasi dan Statistik Daerah**			**4,418,664,578**			**117,568,101**																				**117,568,101**			**2.66**	**DKIPS**	
17.1		Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Pemerintah Daerah	Tersedianya data statistik daerah	24	Kegiatan	850,000,000	7	Kegiatan	38,568,700																			7	Kegiatan	38,568,700	29.17	4.54		Manado
17.2		Pengelolaan, Updating dan Analisis Data Statistik Pemerintah Daerah	Tersedianya pengelolaan, updating dan analisis data statistik pemerintah daerah	24	Kegiatan	500,000,000	6	Kegiatan	17,349,999																			6	Kegiatan	17,349,999	25.00	3.47		Manado
17.3		Penyusunan dan Pengelolaan Serta Publikasi Dokumentasi Data Statistik Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Tersedianya data statitik publikasi dokumentasi pemerintahan dan pembangunan daerah	24	Kegiatan	1,250,000,000	0	Kegiatan	23,171,502																			0	Kegiatan	23,171,502	0.00	1.85		Manado
17.4		Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan dan Analisis Data Statistik Pemerintah Daerah	Tersedianya data yang akurat	20	Kali	250,000,000	0	Kali	-																			0	Kali	-	0.00	0.00		Manado
17.5		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya data dan informasi yang akurat	220	Kali	768,664,578	0	Kali	16,077,900																			0	Kali	16,077,900	0.00	2.09		Manado
17.6		Bimbingan Teknis Statistik Daerah	Terciptanya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam bidang statistik	6	Kegiatan	800,000,000	1	Kegiatan	22,400,000																			1	Kegiatan	22,400,000	16.67	2.80		Manado
																															11.81	2.46		
																															Sangat rendah			
18	Terwujudnya sistem persandian yang berkualitas yang didukung dengan SDM yang berkualifikasi ahli sandi	**Penyelenggaraan Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi**	**Tersediannya SDM dan Sarana Prasarana penyelenggaraan informasi pemerintah yang aman**			**1,631,311,500**			**17,332,080**																				**17,332,080**			**1.06**	**DKIPS**	
18.1		Sosialisasi Persandian / Rakor SKPD Kab/Kota	Terlaksananya pemahaman terhadap Bidang Persandian	3	Kegiatan	391,311,500	0	Kegiatan	17332080																			0	Kegiatan	17,332,080	0.00	4.43		Prov. SULUT
18.2		Regulasi Pengamanan Informasi	Terlindunginya sensvuna Informasi	3	Kegiatan	500,000,000	0	Kegiatan	0																			0	Kegiatan	-	0.00	0.00		Prov. SULUT
18.3		Workshop Pengingkatan Kesadaran Pengamanan Informasi	Terlindunginya pengguna Informasi	3	Kegiatan	270,000,000	0	Kegiatan	0																			0	Kegiatan	-	0.00	0.00		Prov. SULUT
18.4		Asistensi Penyelenggaraan Persandian Daerah	Pemanfasatan alat secara efektiv dan efisien persandian	3	Kegiatan	150,000,000	0	Kegiatan	0																			0	Kegiatan	-	0.00	0.00		Prov. SULUT
18.5		Konsultasi dan Koordinasi Persandian	Terciptanya pemahaman dan kelancaran tugas	10	Kali	170,000,000	0	Kali	0																			0	Kali	-	0.00	0.00		Prov. SULUT
18.6		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian	Pencegahan timbulnya persoalan	10	Kali	150,000,000	0	Kali	0																			0	Kali	-	0.00	0.00		Prov. SULUT
																															0.00	73.82		
																															Sangat rendah			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah PErangkat Daerah : Nilai LKIP SKPD Sekretariat Daerah rata-rata Minimum B**							**100**	**Persen**	**7,538,268,305.00**	**25%**	**Persen**	**1,649,456,425.00**	**25%**	**Persen**	**2,051,097,652.00**	**25%**	**Persen**	**1,454,044,312.00**	**25%**	**Persen**	**1,786,853,079.00**	**100%**	**Persen**	**6,941,451,468**	**0.01**	**92.08%**					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah PErangkat Daerah : Nilai LKIP SKPD Sekretariat Daerah rata-rata Minimum B**							**100%**	**Persen**	**15,682,810.00**		**Persen**	**0.00**	**50%**	**Persen**	**725,456.00**		**Persen**	**0.00**	**50%**	**Persen**	**13,230,225.00**	**100%**	**Persen**	**13,955,681.00**	**100.00%**	**88.99%**					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							7	Dokumen	5,399,686.00		Dokumen		4	Dokumen	452,728.00		Dokumen	0.00	3.00	Dokumen	4,646,383	7	Dokumen	5,099,111	100.00%	94.43%					
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perangkat Daerah							2	Dokumen	6,745,420.00		Dokumen			Dokumen	0.00		Dokumen	0.00	2	Dokumen	5,605,216	2	Dokumen	5,605,216	100.00%	83.10%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	JumlahLaporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							12	Dokumen	3,537,704.00		Dokumen		6	Dokumen	272,728.00		Dokumen	0.00	6	Dokumen	2978626	12	Dokumen	3,251,354	100.00%	91.91%					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Laporan	0.00		Laporan			Laporan	0.00		Laporan	0.00		Laporan		0	Laporan	-	#DIV/0!					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah PErangkat Daerah : Nilai LKIP SKPD Sekretariat Daerah rata-rata Minimum B**							**12**	**Bulan**	**6,314,239,478.00**	**3**	**Bulan**	**1,529,844,947.00**	**3**	**Bulan**	**1,769,187,467.00**	**3**	**Bulan**	**1,344,277,267.00**	**3**	**Bulan**	**1,181,263,399.00**	**12**	**Bulan**	**5,824,573,080**	**100.00%**	**92.25%**					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Pelaksanaan Tugas ASN							12	Bulan	6,151,678,132.00	3	Bulan	1,508,847,911.00	3	Bulan	1,739,852,969.00	3	Bulan	1,323,509,353.00	3	Bulan	1098481036	12	Bulan	5,670,691,269	100.00%	92.18%					
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Pelaksanaan Tugas ASN							12	Bulan	4,762,641.00	3	Bulan		3	Bulan	0.00	3	Bulan	0.00	3	Bulan	4762280	12	Bulan	4,762,280	100.00%	99.99%					
		Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							12	Bulan	150,080,282.00	3	Bulan	20,997,036.00	3	Bulan	23,645,948.00	3	Bulan	20,767,914.00	3	Bulan	77225083	12	Bulan	142,635,981	100.00%	95.04%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							1	Dokumen	7,718,423.00		Dokumen		1	Dokumen	5,688,550.00		Dokumen	0.00		Dokumen	795000	1	Dokumen	6,483,550	100.00%	84.00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeateran SKPD								Dokumen	0.00		Dokumen			Dokumen	0.00		Dokumen	0.00		Dokumen		0	Dokumen	-	#DIV/0!	#DIV/0!					

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
													I			II			III			IV																
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terselenggaranya pengadministrasian yang baik di sub bagian kepegawaian**							**12**	**Bulan**	**44,000,000.00**	**3**	**Bulan**	**0.00**	**3**	**Bulan**	**44,000,000.00**	**3**	**Bulan**	**0.00**	**3**	**Bulan**	**0.00**	**12**	**Bulan**	**44,000,000**	**100.00%**	**100%**									
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya							1	Paket	44,000,000.00		Paket		1	Paket	44,000,000.00		Paket	0.00		Paket		1	Paket	44,000,000	100.00%	100%									
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal								Kegiatan	0.00		Kegiatan			Kegiatan	0.00		Kegiatan	0.00		Kegiatan		0	Kegiatan	-	#DIV/0!										
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terselenggaranya Pengadministrasian yang baik**							**12**	**Bulan**	**432,076,486.00**	**3**	**Bulan**	**0.00**	**3**	**Bulan**	**77,466,432.00**	**3**	**Bulan**	**0.00**	**3**	**Bulan**	**318,740,467.00**	**12**	**Bulan**	**396,206,899**	**100.00%**	**91.70%**									
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dan terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							1	Paket	427,030,489.00		Paket			Paket	75,266,432.00		Paket	0.00	1	Paket	315,896,092	1	Paket	391,162,524	100.00%	91.60%									
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							12	Bulan	2,845,997.00	3	Bulan		3	Bulan	0.00	3	Bulan	0.00	3	Bulan	2844375	12	Bulan	2,844,375	100.00%	99.94%									
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah							1	Bulan	2,200,000.00		Bulan		1	Bulan	2,200,000.00		Bulan	0.00		Bulan		1	Bulan	2,200,000	100.00%	100.00%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat**							**12**	**Bulan**	**610,753,484.00**	**3**	**Bulan**	**119,611,478.00**	**3**	**Bulan**	**133,143,768.00**	**3**	**Bulan**	**109,767,045.00**	**3**	**Bulan**	**211,672,093**	**12**	**Bulan**	**574,194,384**	**100.00%**	**94.01%**									
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Penyediaan Jasa Surat Menyurat							12	Bulan	610,753,484.00	3	Bulan	119,611,478.00	3	Bulan	133,143,768.00	3	Bulan	109,767,045.00	3	Bulan	211672093	12	Bulan	574,194,384	100.00%	94.01%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**							**12**	**Bulan**	**121,516,047.00**	**3**	**Bulan**	**0.00**	**3**	**Bulan**	**26,574,529.00**	**3**	**Bulan**	**0.00**	**3**	**Bulan**	**61,946,895.00**	**12**	**Bulan**	**88,521,424**	**100.00%**	**72.85%**									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan							12	Bulan	121,516,047.00	3	Bulan		3	Bulan	26,574,529.00	3	Bulan	0.00	3	Bulan	61946895	12	Bulan	88,521,424	100.00%	72.85%									
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase Media Yang Melaksanakan Penyebaran Informasi Publik Tentang Kebijakan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;**							**12**	**Bulan**	**11,680,910,810.00**	**3**	**Bulan**	**83,204,105.00**	**3**	**Bulan**	**4,885,524,803.00**	**3**	**Bulan**	**2,224,163,361.00**	**3**	**Bulan**	**4,449,125,344.00**	**12**	**Bulan**	**11,642,017,613.00**	**100.00%**	**99.67%**									
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi							12	Bulan	11,680,910,810.00	3	Bulan	83,204,105.00	3	Bulan	4,885,524,803.00	3	Bulan	2,224,163,361.00	3	Bulan	4,449,125,344.00	12	Bulan	11,642,017,613	100.00%	99.67%									
		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik							4	Kab/Kota	429,999,744.00		Kab/Kota		2	Kab/Kota	180,500,000.00	2	Kab/Kota	103,500,000.00		Kab/Kota	142136442	4	Kab/Kota	426,136,442	100.00%	99.10%									
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Yang dilaksanakan							3	Kab/Kota	750,002.00		Kab/Kota		3	Kab/Kota	750,002.00		Kab/Kota	0.00		Kab/Kota		3	Kab/Kota	750,002	100.00%	100.00%									
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah							1	Kab/Kota	1,371,806.00		Kab/Kota		1	Kab/Kota	685,903.00		Kab/Kota	0.00	7	Kab/Kota	685,903	8	Kab/Kota	1,371,806	800.00%	100.00%									
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)							12	Bulan	8,812,001,545.00	3	Bulan	83,204,105.00	3	Bulan	3,175,875,524.00	3	Bulan	2,115,263,361.00	3	Bulan	3,429,717,953	12	Bulan	8,804,060,943	100.00%	99.91%									
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik							1	Kegiatan	25,413,509.00		Kegiatan			Kegiatan	463,509.00		Kegiatan	0.00	1	Kegiatan	24,950,000	1	Kegiatan	25,413,509	100.00%	100.00%									
		Pelayanan Informasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan							4	Kegiatan	16,254,292.00		Kegiatan			Kegiatan	0.00		Kegiatan	0.00	4	Kegiatan	10,854,292	4	Kegiatan	10,854,292	100.00%	66.78%									
		Layanan Hubungan Media	Jumlah Pelaksanaan Layanan Hubungan Media							5	Kegiatan	25,423,781.00		Kegiatan			Kegiatan	588,004.00	2	Kegiatan	5,400,000.00		3	17,003,653	2	Kegiatan	22,991,657	40.00%	90.43%									
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan							5	Kegiatan	2,298,864,318.00		Kegiatan		1	Kegiatan	1,525,157,584.00		Kegiatan	0.00	4	Kegiatan	772,304,601	5	Kegiatan	2,297,462,185	100.00%	99.94%									
		Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Rekomendasi Pengembangan Manajemen Krisis							4	Kegiatan	34,916,372.00		Kegiatan		1	Kegiatan	1,027,003.00	1	Kegiatan	0.00	2	Kegiatan	30,372,500	4	Kegiatan	31,399,503	100.00%	89.93%									
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo							1	Kegiatan	35,435,441.00		Kegiatan			Kegiatan	0.00		Kegiatan	0.00	1	Kegiatan	21,100,000	1	Kegiatan	21,100,000	100.00%	59.54%									
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas							1	Kegiatan	480,000.00		Kegiatan		1	Kegiatan	477,274.00		Kegiatan	0.00		Kegiatan		1	Kegiatan	477,274	100.00%	99.43%									
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI**							**12**	**Bulan**	**5,603,499,786.00**	**3**	**Bulan**	**188,087,874.00**	**3**	**Bulan**	**1,985,886,609.00**	**3**	**Bulan**	**1,064,386,466.00**	**3**	**Bulan**	**2,363,341,698.00**	**12**	**Bulan**	**5,601,702,647.00**	**100.00%**	**99.97%**									

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
													I			II			III			IV																
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								Bulan	0.00		Bulan	0.00		Bulan	0.00		Bulan	0.00		Bulan	0.00	0	Bulan	-											
		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Nama Domain Pemerintah Provinsi								Bulan	0.00		Bulan			Bulan	0.00		Bulan	0.00		Bulan		0	Bulan	-	#DIV/0!	#DIV/0!									
		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	**Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah**							**12**	**Bulan**	**5,603,499,786.00**	**3**	**Bulan**	**188,087,874.00**	**3**	**Bulan**	**1,985,886,609.00**	**3**	**Bulan**	**1,064,386,466.00**	**3**	**Bulan**	**2,363,341,698.00**	**12**	**Bulan**	**5,601,702,647**	**100.00%**	**99.97%**									
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, text, data dan signal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan internet pemerintah								Bulan	0.00		Bulan			Bulan	0.00		Bulan	0.00		Bulan		0	Bulan	-											
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik								Bulan	0.00		Bulan			Bulan	0.00		Bulan	0.00		Bulan		0	Bulan	-											
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintah) yang memanfaatkan sertifikat elektronik								Bulan	0.00		Bulan			Bulan	0.00		Bulan	0.00		Bulan		0	Bulan	-											
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentasi perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan								Bulan	0.00		Bulan			Bulan	0.00		Bulan	0.00		Bulan		0	Bulan	-											
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah								Bulan	0.00		Bulan			Bulan	0.00		Bulan	0.00		Bulan		0	Bulan	-											
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengimplementasi Inovasi Yang Mendukung Smart Province								Bulan	0.00		Bulan			Bulan	0.00		Bulan	0.00		Bulan		0	Bulan	-											
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah							12	Bulan	5,603,499,786.00	3	Bulan	188,087,874.00	3	Bulan	1,985,886,609.00	3	Bulan	1,064,386,466.00	3	Bulan	2,363,341,698	12	Bulan	5,601,702,647	100.00%	99.97%									
		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentasi layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintah) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik								Bulan	0.00		Bulan			Bulan	0.00		Bulan	0.00		Bulan		0	Bulan	-											
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**							**12**	**Bulan**	**77,563,873.00**	**3**	**Bulan**	**6,922,638.00**	**3**	**Bulan**	**18,032,721.00**	**3**	**Bulan**	**10,367,402.00**	**3**	**Bulan**	**21,126,550.00**	**12**	**Bulan**	**56,449,311.00**	**100.00%**	**72.78%**									
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase kegiatan strategi yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyak jumlah kegiatan strategi yang harus diamankan							12	Bulan	68,928,977.00	3	Bulan	6,922,638.00	3	Bulan	13,828,721.00	3	Bulan	10,367,402.00	3	Bulan	19,208,463.00	12	Bulan	50,327,224	100.00%	73.01%									
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah							100	Persen	64,465,589.00	24	Persen	6,922,638.00	24	Persen	13,828,721.00	25	Persen	10,367,402.00	27	Persen	16,932,656	100	Persen	48,051,417	100.00%	74.54%									
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi							100	Persen	4,463,388.00	24	Persen		24	Persen	0.00	25	Persen	0.00	27	Persen	2,275,807	100	Persen	2,275,807	100.00%	50.99%									
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	**Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PSRES) yang diterapkan daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi**							**12**	**Bulan**	**8,634,896.00**	**3**	**Bulan**	**0.00**	**3**	**Bulan**	**4,204,000.00**	**3**	**Bulan**	**0.00**	**3**	**Bulan**	**1,918,087.00**	**12**	**Bulan**	**6,122,087**	**100.00%**	**70.90%**									

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
													I			II			III			IV																
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi							100	Persen	8,634,896.00	24	Persen		24	Persen	4,204,000.00	25	Persen	0.00	27	Persen	1,918,087	100	Persen	6,122,087	100.00%	70.90%								
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										-																									
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 18)																										**100.00%**	**97.35%**					**26.76**	**47.08**		
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 18)																																**Sangat rendah**			
		PERMASALAHAN	Penyerapan Realisasi Anggaran sudah sesuai dengan Anggaran Kas yang telah dianggarkan pada DPA dan DPA Perubahan DKIPS Tahun Anggaran 2021. Untuk beberapa Sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis, yang sesuai dengan ketentuan perundangan - undangan yang berlaku dilaksanakan pada triwulan ke IV. Sehingga dalam rangka pelaksanaan proses pertanggungjawaban/penyerapan terdapat kendala, Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah di Tahun 2021, harus menyesuaikan dengan status Pandemi Covid-19 di daerah sehingga beberapa sub kegiatan teknis terealisasi sesuai dengan target;																																			
		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN	Untuk selanjutnya dalam pelaksanaan realisasi capaian kinerja dan anggaran, DKIPS Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya melaksanakan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran sesuai dengan kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.																																			

FORMULIR E.55
EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2020)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA			Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 x 100%			14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100%		16	17
				Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			
1	**Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi & UKM Daerah: Nilai Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dinas Koperasi & UKM Daerah Rata-rata Minimum B**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dinas Koperasi & UKM Daerah Rata-rata Minimum B**		**13,594,525,362**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dinas Koperasi & UKM Daerah Rata-rata Minimum B**		**11,229,012,607**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dinas Koperasi & UKM Daerah Rata-rata Minimum B**		**7,940,528,104**			**2,748,082,204**			**3,121,942,945**			**8,274,039,227**			**12,184,219,009**			**Nilai Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dinas Koperasi & UKM Daerah**		**45,976,571,863**			**3,835,157,974**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dinas Koperasi & UKM Daerah Rata-rata Minimum B**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dinas Koperasi & UKM Daerah Rata-rata Minimum B**			
1.1		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan**	**10**	**dokumen**	**67,274,167**			**13,250,000**			**18,271,000**			**4,091,400**			**28,459,761**			**51,406,799**			**50,001,449**					**26,846,105,818**			**3,835,157,974**						
1.1..1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	7	dokumen	50,745,554			11,550,000			7,516,500	3	bln	2,598,000	6	bln	14,607,160	9	bln	35,827,248	12	bln	35,827,248	12	bulan	88,859,656	12	bulan	11.82	24	100,409,656		1.98	Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	dokumen	16,528,613			1,700,000			10,754,500	3	bln	1,493,400	6	bln	13,852,601	9	bln	15,579,551	12	bln	14,174,201	12	bulan	45,099,753	12	bulan	4.19	24	46,799,753		2.83	Dinas Koperasi & UKM Daerah serta Balai Diklat KUMKM	
1.2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN**			**8,929,266,721**			**8,451,815,725**			**7,626,385,738**			**1,985,045,473**			**2,158,168,708**			**5,743,011,940**			**7,063,857,931**	12	bulan	**9,886,226,121**	12	bulan	1.30	24					
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	8,893,497,162			8,310,215,725			7,613,454,338	3	bln	1,979,757,673	6	bln	2,144,556,649	9	bln	5,720,702,331	12	bln	7,032,563,291	12	bulan	16,877,579,944	12	bulan	2.22	24	25,187,795,669		2.83	Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut	
1.2.2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium PPK	12	bulan	18,600,000			109,800,000			-	3	bln	1,550,000	6	bln	6,200,000	9	bln	10,850,000	12	bln	18,600,000	12	bulan	37,200,000	12	bulan	#DIV/0!	24	147,000,000		7.90	Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut	
1.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	laporan	5,742,571			2,350,000			4,050,000	3	bln	2,214,000	6	bln	3,506,159	9	bln	5,720,159	12	bln	3,506,159	12	bulan	14,946,477	12	bulan	3.69		17,296,477		3.01	Dinas Koperasi & UKM Daerah serta Balai Diklat KUMKM Prov. Sulut	
1.2.3.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	30	dokumen	11,426,988			29,450,000			8,881,400	3	bln	1,523,800	6	bln	3,905,900	9	bln	5,739,450	12	bln	9,188,481	12	bulan	20,357,631	12	bulan	2.29		49,807,631		4.36	Dinas Koperasi & UKM Daerah serta Balai Diklat KUMKM Prov. Sulut	
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)					**#DIV/0!**						
																							Predikat Kinerja												
1.3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Pakaian Olahraga**			**217,655,335**			**156,050,000**			**12,000,000**			**161,551,200**			**49,490,124**			**211,041,324**			**204,176,324**			**626,258,972**			52.19						
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Olahraga	100	%	95,200,000			101,000,000			12,000,000	3	bln	81,721,200	6	bln	9,270,000	9	bln	90,991,200	12	bln	81,721,200	12	bulan	263,703,600			21.98		364,703,600		3.83	Dinas Koperasi & UKM Daerah serta Balai Diklat KUMKM Prov. Sulut	
1.3.2		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi	100	%	32,005,335						-	3	bln		6	bln	29,600,124	9	bln	29,600,124	12	bln	32,005,124	12	bulan	91,205,372			#DIV/0!		91,205,372		2.85	Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut	
1.3.3		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN yang Berkompeten Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	100	%	90,450,000			55,050,000			-	3	bln	79,830,000	6	bln	10,620,000	9	bln	90,450,000	12	bln	90,450,000	12	bulan	271,350,000			#DIV/0!		326,400,000		3.61	Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut	
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)					**#DIV/0!**						
																							Predikat Kinerja												
1.4		**Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			**1,381,107,792**			**1,564,831,982**			**159,584,848**			**365,631,500**			**411,129,278**			**873,246,015**			**1,047,237,476**			**2,697,244,269**			16.90						
1.4.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	%	772,373,391			1,433,861,126			1,284,848	3	bln	353,253,500	6	bln	309,695,700	9	bln	702,375,581	12	bln	762,468,200	12	bulan	2,127,792,981			1656.07		3,561,654,107		4.61	Dinas Koperasi & UKM Daerah serta Balai Diklat KUMKM Prov. Sulut	
1.4.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1	TA	76,272,401						-	3	bln	12,378,000	6	bln	24,756,000	9	bln	57,701,000	12	bln	76,272,401	12	bulan	171,107,401			#DIV/0!		171,107,401		2.24		
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1	TA	78,412,000						-	3	bln		6	bln	31,364,800	9	bln	54,888,400	12	bln	78,412,000	12	bulan	164,665,200			#DIV/0!		164,665,200		2.10		
1.4.4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	TA	454,050,000			130,970,856			158,300,000	3	bln		6	bln	45,312,778	9	bln	58,281,034	12	bln	130,084,875	12	bulan	233,678,687			1.48		364,649,543		0.80	Dinas Koperasi & UKM Daerah serta Balai Diklat KUMKM Prov. Sulut	
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)					**#DIV/0!**						
																							Predikat Kinerja												
1.5		**Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Peralatan dan Mesin**			**38,735,001**			**-**			**-**			**-**			**-**			**35,500,000**			**-**			**35,500,000**			#DIV/0!						
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang diadakan	5	Unit	38,735,001						-	3	bln	-	6	bln	-	9	bln	35,500,000	12	bln	-	12	bulan	35,500,000			#DIV/0!		35,500,000		0.92	Balai Diklat KUMKM Prov. Sulut	
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)					**#DIV/0!**						
																							Predikat Kinerja												
1.5		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**			**1,557,774,653**			**-**			**-**			**216,511,631**			**354,270,046**			**930,272,295**			**1,405,065,819**			**2,906,119,791**			#DIV/0!						
1.5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	430,800,000						-	3	bln	39,056,480	6	bln	59,202,760	9	bln	155,248,279	12	bln	226,693,031	12	bulan	480,200,550			#DIV/0!		480,200,550		1.11	Dinas Koperasi & UKM Daerah serta Balai Diklat KUMKM Prov. Sulut	
1.5.2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	1,126,974,653						-	3	bln	177,455,151	6	bln	295,067,286	9	bln	775,024,016	12	bln	1,178,372,788	12	bulan	2,425,919,241			#DIV/0!		2,425,919,241		2.15	Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut	
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)					**#DIV/0!**						
																							Predikat Kinerja												
1.6		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kendaraan Dinas yang Terpelihara**			**1,402,711,693**			**1,043,064,900**			**124,286,518**			**15,251,000**			**120,425,028**			**429,560,854**			**2,413,880,010**			**2,979,116,892**			23.97						
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas yang Terpelihara	5	Unit	128,106,670			190,420,000			62,371,754	3	bln	12,068,000	6	bln	43,299,314	9	bln	82,261,314	12	bln	1,178,372,788	12	bulan	1,316,001,416			21.10		1,506,421,416		11.76	Dinas Koperasi & UKM Daerah serta Balai Diklat KUMKM Prov. Sulut	
1.6.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	1	TA	39,645,400						-	3	bln	1,900,000	6	bln	15,550,000	9	bln	29,950,000	12	bln	29,000,000	12	bulan	76,400,000			#DIV/0!		76,400,000		1.93	Dinas Koperasi & UKM Daerah	
1.6.3		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehavbilitasi Gedung Kantor	1	TA	1,234,959,623			852,644,900			61,914,764	3	bln	1,283,000	6	bln	61,575,714	9	bln	317,349,540	12	bln	1,206,507,222	12	bulan	1,586,715,476			25.63		2,439,360,376		1.98	Dinas Koperasi & UKM Daerah	
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)					**#DIV/0!**						
																							Predikat Kinerja												
2	**Tersedianya Aksesibitas Petani, Pekebun,**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Koperasi Aktif**			**127,600,000**			**-**			**-**			**190,960,000**			**-**			**25,390,000**			**35,410,000**			**251,760,000**			**#DIV/0!**						
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi			127,600,000			-			-			190,960,000			-			25,390,000			35,410,000			251,760,000			#DIV/0!						

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2020)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA			Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 x 100%			14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100%		16	17
				Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			
		Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya Kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi	15	KSP/USP	127,600,000						3	bln	190,960,000	6	bln	-	9	bln	25,390,000	12	bln	35,410,000	12	bulan	251,760,000			#DIV/0!						Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut	
									-																											
3	Tersedianya Aksesibitas Petani, Pekebun,	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI**	**Koperasi Aktif**			**104,489,326**			**-**			**-**			**-**			**-**			**-**			**-**			**-**			**#DIV/0!**						
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi Sehat dan Aktif			104,489,326			-			-			-			-			-			-			-			#DIV/0!						
		Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Koperasi Sehat dan Aktif	15	Koperasi	104,489,326						3	bln		6	bln	-	9	bln	-	12	bln	-	12	bulan	-			#DIV/0!						Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut	
4	Tersedianya Aksesibitas Petani, Pekebun, Nelayan, Pelaku	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Koperasi Aktif**			**3,351,182,045**			**5,389,060,000**			**2,597,223,792**			**190,960,000**			**1,230,530,938**			**2,170,551,738**			**2,347,619,393**			**5,939,662,069**			**2.29**						
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	SDM Pengelola Koperasi dan Wirausaha Yang Dilatih			3,351,182,045			5,389,060,000			2,597,223,792			190,960,000			1,230,530,938			2,170,551,738			2,347,619,393			5,939,662,069			2.29						
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	SDM Pengelola Koperasi dan Wirausaha Yang Dilatih	960	Orang	3,351,182,045			5,389,060,000			2,597,223,792	3	bln	190,960,000	6	bln	1,230,530,938	9	bln	2,170,551,738	12	bln	2,347,619,393	12	bulan	5,939,662,069			2.29						Dinas Koperasi & UKM Daerah serta Balai Diklat KUMKM Prov. Sulut
																												0.91								
5	Tersedianya Aksesibitas Petani, Pekebun, Nelayan, Pelaku IKM, UMKM dan Koperasi Terhadap Pemanfaatan Teknologi, Sumber-sumber Pembiayaan, Informasi Pasar dan Akses	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Perlindungan Hukum Atas Produk**			168,326,212			**-**			**-**			**-**			**-**			**58,595,800**			**58,595,800**			**117,191,600**			**#DIV/0!**						
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perlindungan Hukum Atas Produk			168,326,212			-			-			-			-			58,595,800			58,595,800			117,191,600			#DIV/0!						
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Perlindungan Hukum Atas Produk	15	KUMKM	168,326,212			-				3	bln	-	6	bln	-	6	bln	58,595,800	12	bln	58,595,800	12	bulan	117,191,600			#DIV/0!						Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut
																												#DIV/0!								
6	Tersedianya Aksesibitas Petani, Pekebun, Nelayan, Pelaku IKM, UMKM dan Koperasi Terhadap Pemanfaatan Teknologi, Sumber-sumber Pembiayaan, Informasi Pasar dan Akses	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah, Jumlah UKM non BPR/ LKM Aktif, Jumlah BPR/ LKM Aktif**			- 111,480,045			**-**			**-**			**-**			**-**			**25,437,900**			**25,437,900**			**50,875,800**			**#DIV/0!**						
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Direktori Data Koperasi dan UMKM			111,480,045			-			-			-			-			25,437,900			25,437,900			50,875,800			#DIV/0!						
		Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Direktori Data Koperasi dan UMKM	2	dokumen	111,480,045			-				3	bln	-	6	bln	-	9	bln	25,437,900	12	bln	25,437,900	12	bulan	50,875,800			#DIV/0!						Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut
																												#DIV/0!								

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2020)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA			Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV																	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = (i, ii, iii, IV)			13 = 12/7 x 100%			14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100%		16	17
				Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			
7	**Tersedianya Aksesibitas Petani, Pekebun, Nelayan, Pelaku IKM, UMKM dan Koperasi Terhadap Pemanfaatan Teknologi, Sumber-sumber Pembiayaan, Informasi Pasar dan Akses**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha**			**1,387,805,786**			**-**		**-**			**31,240,000**			**2,497,183**			**35,755,536**			**401,743,157**			**471,235,876**			**#DIV/0!**								
		Pengembangan Usaha Kecil dengan Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	UMKM Naik Kelas			1,387,805,786			-		-			31,240,000			2,497,183			35,755,536			401,743,157			471,235,876			#DIV/0!								
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	UMKM Naik Kelas	15	UMKM	1,387,805,786						3	bln	31,240,000	6	bln	2,497,183	9	bln	35,755,536	12	bln	401,743,157	12	bulan	471,235,876			#DIV/0!						Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut	
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)												
																								Predikat Kinerja			**Sangat Rendah**						**Rendah**		**Sangat Rendah**		
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							**8,166,256,882**		**10,537,751,896**			**2,944,730,573**			**4,000,701,020**			**9,600,902,106**			**13,589,363,640**			**39,897,759,696**											
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 6)																																			
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 6)																																			
		FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																																			
		FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																																			
		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :																																			
		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :																																			

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

489.64% 473.14%
97.93% 94.63%

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang Mengacu pada Sasaran RKPD Provinsi:
1
2
3

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL																											
I		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**					100%	##########		##########		##########		2,479,364,010		2,313,118,935		10,835,296,960	**93.31%**	**83.26%**						
I.1		**Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM B**		-		-	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Minimum B**	**49,977,549**		**4,997,000**		**16,567,000**		**15,379,400**		**12,863,000**	2 kegiatan	**49,806,400**	**99.66%**	**99.66%**					DPMPTSPD	Manado
I.1.1		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	4 kegiatan	28,300,887	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	2 kegiatan	15,379,400		12,863,000	4 kegiatan	28,242,400	100.00%	99.79%						
I.1.2		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd				-	4 kegiatan	21,676,662	1 kegiatan	4,997,000	1 kegiatan	16,567,000	0 kegiatan	-		-	2 kegiatan	21,564,000	50.00%	99.48%						
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**99.66%**	**99.66%**						
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
I.2		**Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM B**					**Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Minimum B**	##########		##########		##########		2,179,772,461		1,945,873,986		9,436,580,257	**91.00%**	**99.66%**					DPMPTSPD	Manado
I.2.1		Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan asn					14 bulan	##########	3 bulan	##########	5 bulan	2,619,816,593	3 bulan	2,083,037,762	3 bulan	1,822,893,968	14 bulan	9,003,162,461	100.00%	83.43%						
I.2.2		Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi kepegawaian					12 bulan	80,003,014	3 bulan	10,383,957	3 bulan	29,088,957	3 bulan	16,897,957	3 bulan	23,191,957	12 bulan	79,562,828	100.00%	99.45%						
I.2.3		Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD					12 bulan	346,176,261	3 bulan	66,704,423	3 bulan	101,001,742	3 bulan	75,827,742	3 bulan	95,672,061	12 bulan	339,205,968	100.00%	97.99%						
I.2.4		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2 kali	4,535,001	0 kali	-	1 kali	4,533,000	0 kali	-	0 kali	-	1 kali	4,533,000	50.00%	99.96%						
I.2.5		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					12 bulan	10,121,134	3 bulan	1,991,000	3 bulan	-	3 bulan	4,009,000	3 bulan	4,116,000	12 bulan	10,116,000	100.00%	99.95%						
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**90.00%**	**99.66%**						
																		Peringkat Kinerja		**Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
I.3		**Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM B**					**Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Minimum B**	**83,160,000**		-		**83,160,000**		-				**83,160,000**	**100.00%**	**100.00%**					DPMPTSPD	Manado
I.3.1		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan THL					105 pakaian	83,160,000	0 pakaian	-	105 pakaian	83,160,000	0 pakaian	-		-	105 pakaian	83,160,000	100.00%	100.00%						
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**100.00%**						
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
I.4		**Program Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM B**					**Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Minimum B**	**139,584,999**		**49,093,200**		**25,351,430**		**6,794,690**		**57,061,018**		**138,300,338**	**100.00%**	**99.08%**					DPMPTSPD	Manado
I.4.1		Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10 kali	139,584,999	2 kali	49,093,200	2 kali	25,351,430	1 kali	6,794,690	5 kali	57,061,018	10 kali	138,300,338	100.00%	99.08%						
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**99.08%**						
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
I.5		**Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM B**					**Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Minimum B**	**174,152,002**		-		**114,076,600**	Bulan	**59,235,000**	Bulan	-		**173,311,600**	**62.50%**	**99.52%**					DPMPTSPD	Manado
I.5.1		Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan dan Peralatan Mesin					40 unit	174,152,002	0 unit	-	22 unit	114,076,600	3 unit	59,235,000	0 unit	-	25 unit	173,311,600	**62.50%**	**99.52%**						
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**62.50%**	**99.52%**						
																		Peringkat Kinerja		**Rendah**	**Sangat Tinggi**						
I.6		**Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM B**					**Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Minimum B**	**844,941,926**		**199,176,574**		**193,538,869**		**198,832,025**		**247,066,798**		**838,614,266**	**100.00%**	**98.96%**					DPMPTSPD	Manado
I.6.1		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik					12 bulan	194,250,000	3 bulan	56,753,290	3 bulan	31,527,010	3 bulan	42,844,221	3 bulan	62,152,113	12 bulan	193,276,634	100.00%	99.50%						
I.6.2		Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor					12 bulan	590,213,926	3 bulan	131,963,284	3 bulan	151,280,359	3 bulan	145,637,804	3 bulan	157,134,685	12 bulan	586,016,132	100.00%	99.29%						
I.6.3		Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya makanan dan minuman					12 bulan	60,478,000	3 bulan	10,460,000	3 bulan	10,731,500	3 bulan	10,350,000	3 bulan	27,780,000	12 bulan	59,321,500	100.00%	98.09%						
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**98.96%**						
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
I.7		**Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM B**					**Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Minimum B**	**123,147,000**		**14,880,668**		**31,038,864**		**19,350,434**		**50,254,133**	12 bulan	**115,524,099**	**100.00%**	**93.81%**					DPMPTSPD	Manado
I.7.1		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan peroranagan dinas dan kendaraan dinas jabatan yang terpelihara					12 bulan	123,147,000	3 bulan	14,880,668	3 bulan	31,038,864	3 bulan	19,350,434	3 bulan	50,254,133	12 bulan	115,524,099	100.00%	93.81%						
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**93.81%**						
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
II		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Peningkatan jumlah Kerjasama Penanaman Modal/MOU**					**2 Mou/ Kerjasama**	**78,995,000**		-		**31,055,400**		-		**47,928,299**		**78,983,699**	**100.00%**	**99.99%**						
II.1		**Program Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah**	**Persentase Peningkatan jumlah Promosi Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri**					**2 Mou/ Kerjasama**	**78,995,000**		-		**31,055,400**		-		**47,928,299**		**78,983,699**	**100.00%**	**99.99%**					DPMPTSPD	Manado
II.1.1		Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Peningkatan jumlah kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting					3 kegiatan	78,995,000	0 kegiatan	-	1 kegiatan	31,055,400	0 kegiatan	-	2 kegiatan	47,928,299	3 kegiatan	78,983,699	100.00%	99.99%						
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**99.99%**						
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
III		**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelayanan Perizinan terhadap total pemohon perizinan Persentase**					**85%**	##########		##########		##########		**148,953,949**		**140,057,819**		**679,782,887**	**96.33%**	**98.44%**						
III.1		**Program Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang ruang lingkupnya Daerah Kab / Kota**					**nilai 79**	**690,562,250**		**183,179,381**		**176,956,738**		**148,953,949**		**140,057,819**		**679,782,887**	**96.33%**	**96.25%**					DPMPTSPD	Manado
III.1.1		Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha yang Terintegrasi secara Elektronik					200 perizinan/ non perizinan	574,768,790	335 perizinan/ non perizinan	163,229,381	373 perizinan/ non perizinan	144,450,279	457 perizinan/ non perizinan	124,326,049	## perizinan/ non perizinan	140,057,819	### perizinan/ non perizinan	572,063,528	100%	99.53%						
III.1.2		Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya Lintas Daerah Kab / Kota					6 kegiatan	40,682,001	1 kegiatan	7,000,000	1 kegiatan	11,700,000	1 kegiatan	7,825,000	2 kegiatan	14,115,000	5 kegiatan	40,640,000	100%	99.90%						
III.1.3		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah yang ruang lingkupnya Lintas Daerah Kab / Kota					12 kegiatan	75,111,459	2 kegiatan	12,950,000	3 kegiatan	20,806,459	3 kegiatan	16,802,900	3 kegiatan	16,520,000	11 kegiatan	67,079,359	89%	89.31%						
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**96.33%**	**96.25%**						
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 8 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
IV		**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN**	**Persentase peningkatan penyampaian LKPM**					**70%**	##########		-		**29,194,600**		**99,252,800**		**379,319,500**		**507,766,900**	**100.00%**	**92.38%**						
IV.1		**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Provinsi**	**Peningkatan Jumlah aparatur penanaman modal tingkat provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimtek**					200 perusahaan/ pelaku usaha	**544,223,629**	0 perusahaan / pelaku usaha	-	25 perusahaan / pelaku usaha	**29,194,600**	50 perusahaan/ pelaku usaha	**99,252,800**	## perusahaan / pelaku usaha	**379,319,500**	200 perusahaan / pelaku usaha	**507,766,900**	**100.00%**	**92.38%**					DPMPTSPD	Manado
IV.1.1		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal					1 laporan	116,965,626	0 laporan	-	0 laporan	13,807,600	0 laporan	34,245,000	1 laporan	58,239,000	1 laporan	106,291,600	100%	90.87%						
IV.1.2		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					1 laporan	262,420,503	0 laporan	-	0 laporan	3,000,000	0 laporan	61,092,800	1 laporan	189,880,700	1 laporan	253,973,500	100%	96.78%						
IV.1.3		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal					1 laporan	164,837,500	0 laporan	-	0 laporan	12,387,000	0 laporan	3,915,000	1 laporan	131,199,800	1 laporan	147,501,800	100%	89.48%						
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**92.38%**						
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
V		**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI**	**Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal Tepat Waktu**					**1 laporan**	##########		**33,768,996**		**61,449,446**		**34,569,096**		**33,568,096**		**163,355,634**	**100.00%**	**99.08%**						
V.1		**Program Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi**					1 laporan	**164,874,955**		**33,768,996**		**61,449,446**		**34,569,096**		**33,568,096**		**163,355,634**	**100.00%**	**99.08%**					DPMPTSPD	Manado
V.1.1		Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi					1 laporan	164,874,955	0 laporan	33,768,996	0 laporan	61,449,446	0 laporan	34,569,096	1 laporan	33,568,096	1 laporan	163,355,634	100%	99.08%						
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**99.08%**						
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									##########		##########		##########		**2,762,139,855**		**2,913,992,649**		**12,265,186,080**								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				**97,93%**	**86.83%**						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

PERMASALAHAN :	**1. Realisasi anggaran di Triwulan III masih dalam kategori rendah dikarenakan pelaksanaan program dan kegiatan mengalami keterlambatan akibat pandemi covid-19. Pada bulan Juli kantor DPMPTSPSD sempat ditutup karena menjadi cluster penyebaran Covid-19 dan menerapkan WFH sampai bulan Agustus.**
	2. Realisasi anggaran di Triwulan IV dalam kategori tinggi, belum mencapai kategori sangat tinggi karena ada sisa anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar 1.788.531.206.
	3. Realisasi kinerja kategori sangat tinggi karena secara umum dapat mencapai target kinerja, sekalipun pada beberapa kegiatan tidak mencapai 100% karena adanya REFOCUSING anggaran.
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :	

Evaluasi Hasil Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Periode Pelaksanaan : Tahun 2021

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi

Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kinerja pelayanan publik, Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan laporan tahunan/tahun sesuai peraturan perundangan, Terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar - besarnya.

#REF!

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Prov. Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Prov. yang Dievaluasi		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah Prov. s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	K	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLA				**36,921,503,566**										**34,872,049,923**		**94.45%**						
01	**Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**2 keg**	**14,170,825,700**	**0 -**	**1,185,143,631**	**0 -**	**1,105,178,376**	**0 -**	**1,988,962,797**	**2 keg**	**1,134,495,860**	**2 bulan**	**13,945,072,653**	**100%**	**98.41%**	**2 bulan**	**13,945,072,653**	**3%**	**Rp 2,789,014,530.60**	**DISPORA**	**PROV. SUIUT**
01		*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah*	*2 keg*	*17,748,961*	*1*	*2,354,207*	*0*	*660,000*	*0*	-	*1*	*9,289,754*	*2 Keg*	*12,303,961*	*100%*	*69.32%*	*2 bulan*	*12,303,961*	*3%*	*Rp 2,460,792.20*	*DISPORA*	*PROV. SUIUT*
01.01		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 keg	10,569,752	-		-		-		2 keg	6,939,752	2 keg	*6,939,752*	100%	65.66%	2 bulan	6,939,752	3%	Rp 1,387,950.40	DISPORA	PROV. SUIUT
01.06		Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 bulan	7,179,209	1 bulan	2,354,207	0 bulan	660,000	0 bulan	-	1 bulan	2,350,002	2 bulan	5,364,209	100%	75%	2 bulan	5,364,209	3%	Rp 1,072,841.80	DISPORA	PROV. SUIUT
01.02		*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*3 keg*	*8,835,064,107*		*8,547,000*		*19,007,000*		*18,007,000*	*3 keg*	*13,005,554*	*3 bulan*	*8,589,411,774*	*100%*	*97.22%*	*3 bulan*	*8,589,411,774*	*5%*	*Rp 1,717,882,354.80*	*DISPORA*	*PROV. SUIUT*
02.01		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	8,758,628,662	3 bulan	2,116,591,332	5 bulan	2,888,339,332	3 bulan	1,859,798,999	3 bulan	1,654,156,666	14 bulan	8,518,886,329	100.00%	97.26%	14 bulan	8,518,886,329	280%	Rp 1,703,777,265.80	DISPORA	PROV. SUIUT
02.02		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	68,566,554	3 bulan	16,984,500	3 bulan	14,957,000	0 bulan	-	3 bulan	32,035,054	9 bulan	63,976,554	75.00%	93.31%	9 bulan	63,976,554	180%	Rp 12,795,310.80	DISPORA	PROV. SUIUT
02.05		Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dok	7,868,891	1 dok	5,611,394	0 bulan	-	0	-	0 bulan	937,497	1 bulan	6,548,891	100.00%	83.23%	1 bulan	6,548,891	20%	Rp 1,309,778.20	DISPORA	PROV. SUIUT
05		*Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*	*2 keg*	*78,890,872*	*0 -*	*60,000,000*	*1 keg*	*60,000,000*	*1 keg*	*60,000,000*	*0 bulan*	-	*2 bulan*	*78,890,872*	*100.00%*	*100.00%*	*2 bulan*	*78,890,872*	*40%*	*Rp 15,778,174.40*	*DISPORA*	*PROV. SUIUT*

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Prov. Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Prov. yang Dievaluasi		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah Prov. s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV													
05.02		Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta dengan atribut perlengkapannya	1 paket	60,000,000	1 paket	60,000,000	0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-	1 bulan	60,000,000	100.00%	100.00%	1 bulan	60,000,000	20%	Rp	12,000,000.00	DISPORA	PROV. SUIUT
05.03		Sub Kegiatan pendataan dn pengolahan administrasi kepegawaian	12 bulan	18,890,872	3 bulan	6,890,872	0 bulan	-	9 bulan	-	0 bulan	12,000,000	12 bulan	18,890,872	100.00%	100.00%	12 bulan	18,890,872	240%	Rp	3,778,174.40	DISPORA	PROV. SUIUT
06		*Kegiatan Adminstrasi Umum perangkat Daerah*	*2 keg*	*468,702,220*	*2 -*	*197,290,004*	*0 -*	*117,696,376*	*0 -*	*53,033,840*	*0 -*	*50,000,000*	*2 bulan*	*457,448,107*	*100.00%*	*97.60%*	*2 bulan*	*457,448,107*	*40%*	*Rp*	*91,489,621.40*	*DISPORA*	*PROV. SUIUT*
06.02		Sub Kegiatan Penyediaan,peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	251,065,220	3 bulan	66,090,001	3 bulan	26,291,376	3 bulan	2,834,336	3 bulan	139,167,960	12 bulan	234,383,673	100.00%	93.36%	12 bulan	234,383,673	240%	Rp	46,876,734.60	DISPORA	PROV. SUIUT
06.09		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	217,637,000	3 bulan	50,682,000	3 bulan	66,955,000	3 bulan	50,000,000	3 bulan	55,427,434	12 bulan	223,064,434	100.00%	102.49%	12 bulan	223,064,434	240%	Rp	44,612,886.80	DISPORA	PROV. SUIUT
08		*Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan PemerintahanDaerah*	*2 keg*	*3,607,037,478*	*0 bulan*	*860,040,125*	*0 bulan*	*860,907,000*	*0 bulan*	*851,432,000*	*2 keg*	*1,015,288,752*	*2 keg*	*3,587,667,877*	*100.00%*	*99.46%*	*2 bulan*	*3,587,667,877*	*40%*	*Rp*	*717,533,575.40*	*DISPORA*	*PROV. SUIUT*
08.03		Sub Kegiatanpenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	37,287,081	3 bulan	9,333,125	3 bulan	10,200,000	3 bulan	8,975,000	3 bulan	9,541,875	12 bulan	38,050,000	100.00%	102.05%	12 bulan	38,050,000	240%	Rp	7,610,000.00	DISPORA	PROV. SUIUT
08.04		Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	3,569,750,397	3 bulan	850,707,000	3 bulan	850,707,000	3 bulan	842,457,000	3 bulan	1,005,746,877	12 bulan	3,549,617,877	100.00%	99.44%	12 bulan	3,549,617,877	240%	Rp	709,923,575.40	DISPORA	PROV. SUIUT
09		*Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah*	*3 keg*	*1,163,382,062*	*0 bulan*	*56,912,295*	*0 bulan*	*46,908,000*	*3 keg*	*1,006,489,957*	*0 bulan*	*46,911,800*	*3 keg*	*1,219,350,062*	*100.00%*	*104.81%*	*3 bulan*	*1,219,350,062*	*60%*	*Rp*	*243,870,012.40*	*DISPORA*	*PROV. SUIUT*
09.02		Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau	12 bulan	197,640,095	3 bulan	56,912,295	3 bulan	46,908,000	3 bulan	89,735,800	3 bulan	66,212,000	12 bulan	259,768,095	100.00%	131.43%	12 bulan	259,768,095	240%	Rp	51,953,619.00	DISPORA	PROV. SUIUT
09.10		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 keg	965,741,967	0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	959,581,967	1 keg	-	1 bulan	959,581,967	100.00%	99.36%	1 bulan	959,581,967	20%	Rp	191,916,393.40	DISPORA	PROV. SUIUT
													Rara-rata Capaian Kinerja (%)		**100%**	**112%**			**140%**	**Rp**	**5,578,029,061.20**		
													Peringkat Kinerja		**tinggi**	**rendah**			**tinggi**	**rendah**			
02	**Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan**	**Program Kapasitas daya saing Kepemudaan**	**100 org**	**1,350,647,930**	**3 bulan**	**248,714,778**	**3 bulan**	**104,811,270**	**100 org**	**1,316,821,812**	**0 bulan**	**-**	**106 bulan**	**1,335,173,930**	**106.00%**	**98.85%**	**106 bulan**	**1,335,173,930**	**2120%**	**Rp**	**267,034,786.00**	**DISPORA**	**PROV. SUIUT**

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Prov. Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Prov. yang Dievaluasi		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah Prov. s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV												
02.01		*Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan*	*4 keg*	*1,350,647,930*	*1 bulan*	*124,357,389*	*1 bulan*	*52,405,635*	*1 bulan*	*658,410,906*	*1 bulan*	*500,000,000*	*4 bulan*	*1,335,173,930*	*100.00%*	*98.85%*	*4 bulan*	*1,335,173,930*	*80%*	*Rp*	*267,034,786.00*	*DISPORA*	*PROV. SUIUT*
02.03		Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas Daya Saing pemuda kader provinsi	3 keg	600,646,434	1 bulan	50,323,217	1 bulan	50,323,217	0 bulan	-	1 bulan	500,000,000	3 bulan	600,646,434	100.00%	100.00%	3 bulan	600,646,434	60%	Rp	120,129,286.80	DISPORA	PROV. SUIUT
02.04		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar bendera	2 keg	750,001,496	1 bulan	74,034,172	0 bulan	2,082,418	1 bulan	658,410,906	0 bulan	-	2 bulan	734,527,496	100.00%	97.94%	2 bulan	734,527,496	40%	Rp	146,905,499.20	DISPORA	PROV. SUIUT
													Rara-rata Capaian Kinerja (%)		**100%**	**99%**			**575%**	**Rp**	**534,069,572.00**		
													Peringkat Kinerja		**tinggi**	**rendah**			**tinggi**	**rendah**			
03	**Meningkatnya Pengembangan Kebijakan Manajemen olahraga**	**Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**	**10 medali**	**21,100,029,936**	**3 bulan**	**2,733,070,628**	**3 bulan**	**1,369,436,452**	**3 bulan**	**29,947,277,498**	**0 bulan**	**4,533,822,102**	**9 bulan**	**19,291,803,340**	**90.00%**	**91.43%**	**9 bulan**	**19,291,803,340**	**180%**	**Rp**	**3,858,360,668.00**	**DISPORA**	**PROV. SUIUT**
03.01		*Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan pada jenjang pendidian yang menjadi kewenangan daerah*	*10 medali*	*1,057,362,005*	*3 bulan*	*310,000,005*	*3 bulan*	*512,750,000*	*3 bulan*	*-*	*0 bulan*	*-*	*9 bulan*	*822,750,005*	*90.00%*	*77.81%*	*9 bulan*	*822,750,005*	*180%*	*Rp*	*164,550,001.00*	*DISPORA*	*PROV. SUIUT*
03.01.01		Sub Kegiatan koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga yang diselenggarakan oleh	2 keg	357,362,000	1 bulan	110,000,000	1 bulan	12,750,000	0 bulan	-	0 bulan	-	2 bulan	122,750,000	100.00%	34.35%	2 bulan	122,750,000	40%	Rp	24,550,000.00	DISPORA	PROV. SUIUT
03.01.03		Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Olahraga Provinsi	2 keg	700,000,005	1 bulan	200,000,005	1 bulan	500,000,000	0 bulan	-	0 bulan	-	2 bulan	700,000,005	100.00%	100.00%	2 bulan	700,000,005	40%	Rp	140,000,001.00	DISPORA	PROV. SUIUT
03.02		*Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga*	*13 keg*	*19,952,477,572*	*3 bulan*	*1,027,094,950*	*3 bulan*	*151,968,226*	*3 bulan*	*14,932,888,749*	*3 bulan*	*2,266,911,051*	*12 bulan*	*18,378,862,976*	*92.31%*	*92.11%*	*12 bulan*	*18,378,862,976*	*240%*	*Rp*	*3,675,772,595.20*	*DISPORA*	*PROV. SUIUT*
03.02.01		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga multi event dan single	6 keg	1,402,745,671	0 bulan	-	1 bulan	151,968,226	0 bulan	-	0 bulan	-	1 bulan	151,968,226	16.67%	10.83%	1 bulan	151,968,226	20%	Rp	30,393,645.20	DISPORA	PROV. SUIUT
03.02.03		Sub Kegiatan Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan dalam multi event dan single event	7 keg	18,549,731,901	1 bulan	1,027,094,950	0 bulan	-	3 bulan	14,932,888,749	3 bulan	2,266,911,051	7 bulan	18,226,894,750	100.00%	98.26%	7 bulan	18,226,894,750	140%	Rp	3,645,378,950.00	DISPORA	PROV. SUIUT
03.03		*Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi tingkat Nasional*	*1 tahun*	*90,190,359*	*0 bulan*	*29,440,359*	*0 bulan*	*20,000,000*	*1 bulan*	*40,750,000*	*0 bulan*	*-*	*1 bulan*	*90,190,359*	*100.00%*	*100.00%*	*1 bulan*	*90,190,359*	*20%*	*Rp*	*18,038,071.80*	*DISPORA*	*PROV. SUIUT*
03.04		Sub Kegiatan pemberian penghargaan olahraga provinsi	1 keg	40,750,000	0 bulan	-	0 bulan	-	1 bulan	40,750,000	0 bulan	-	1 bulan	40,750,000	100.00%	100.00%	1 bulan	40,750,000	20%	Rp	8,150,000.00	DISPORA	PROV. SUIUT

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Prov. Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Prov. yang Dievaluasi		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah Prov. s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV													
03.05		Sub Kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral	1 keg	49,440,359	1 bulan	29,440,359	0 bulan	20,000,000	0 bulan	-	0 bulan	-	1 bulan	49,440,359	100.00%	100.00%	1 bulan	49,440,359	20%	Rp	9,888,071.80	DISPORA	PROV. SUIUT
Rara-rata Capaian Kinerja (%)															**100%**	**99%**			**50%**	**Rp**	**7,716,721,336.00**		
Peringkat Kinerja															**tinggi**	**rendah**			**tinggi**		**rendah**		
04	**Melaksanakan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**100 org**	**300,000,000**	**0 bulan**	**50,400,000**	**0 bulan**	**67,800,000**	**0 bulan**	**30,800,000**	**100 org**	**151,000,000**	**100 bulan**	**300,000,000**	**100.00%**	**100.00%**	**100 bulan**	**300,000,000**	**2000%**	**Rp**	**60,000,000.00**	**DISPORA**	**PROV. SUIUT**
04.01	*Kegiatan Pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan*	*Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan*	*100 org*	*300,000,000*	*0 org*	*50,400,000*	*0 org*	*67,800,000*	*0 org*	*30,800,000*	*100 org*	*151,000,000*	*100 bulan*	*300,000,000*	*100.00%*	*100.00%*	*100 bulan*	*300,000,000*	*2000%*	*Rp*	*60,000,000.00*	*DISPORA*	*PROV. SUIUT*
04.08	Sub Kegiatan Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan Kepramukan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1 keg	300,000,000	0 org	50,400,000	0 org	67,800,000	0 org	30,800,000	1 keg	151,000,000	1 bulan	300,000,000	100.00%	100.00%	1 bulan	300,000,000	20%	Rp	60,000,000.00	DISPORA	PROV. SUIUT
Rara-rata Capaian Kinerja (%)															**100%**	**100%**			**1340%**	**Rp**	**120,000,000.00**		
Peringkat Kinerja															**tinggi**	**rendah**			**tinggi**		**rendah**		

FORMULIR E.55
EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang Mengacu pada Sasaran RKPD Provinsi:
1. **Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan**
2. **Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya minimal rata-rata 6 kali /tahun**
3. **Meningkatnya jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya menjadi 5 tempat pada akhir 2021**

TRIWULAN IV

Sasaran	gram/Kegiatan/Sub Kegi	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA	
									I		II		III		IV									
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (I, II, III, IV)		13 = 12/7 X 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100%	
			K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp
Terwujudnya integrasi nilai-nilai luhur budaya yang memperhatikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat sulawesi utara sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Disbud; INDEKS NILAI LKIP SKPD Disbud RATA - RATA MINIMUM B**	**INDEKS NILAI LKIP SKPD Disbud RATA - RATA MINIMUM B**	**50,226,948,880**	**INDEKS NILAI LKIP SKPD Disbud RATA - RATA MINIMUM B**	**40,176,249,403**	**INDEKS NILAI LKIP SKPD Disbud RATA - RATA MINIMUM B**	**12,916,583,077**		**1,999,160,537**		**4,407,239,657**		**6,473,190,486**		**11,183,744,937**		**11,183,744,937**	**100%**	**86.58**	**8658%**	**48,430,333,196**	**50%**	**99%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja																							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan	60 Bulan	40,342,515.00	12 Bulan	30,660,311	12 Bulan	10,488,503.00	3 Bulan		3 Bulan	2,016,000	3 Bulan	2,016,000	3 Bulan	10,488,000	12 Bulan	10,488,000	100%	100%	24 Bulan	41,148,311	40%	102%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Laporan	60 Bulan	35,400,000.00	12 Bulan	26,904,000	12 Bulan	10,021,349.00	3 Bulan	975,000	3 Bulan	1,950,000	3 Bulan	1,950,000	3 Bulan	8,744,000	12 Bulan	8,744,000	100%	87%	24 Bulan	35,648,000	40%	101%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan	60 Bulan	57,000,000.00	12 Bulan	43,320,000	12 Bulan	5,091,200.00	3 Bulan	-	3 Bulan	2,544,000	3 Bulan	2,544,000	3 Bulan	5,091,000	12 Bulan	5,091,000	100%	100%	24 Bulan	48,411,000	40%	85%
	Administrasi Keuangan							-				-						-						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	70 Bulan	40,523,658,055	14 Bulan	32,418,926,444	14 Bulan	8,104,731,611.00	3 Bulan	1,620,946,322	3 Bulan	3,320,946,322	3 Bulan	4,936,872,189	3 Bulan	6,557,818,511	14 Bulan	6,557,818,511	100%	81%	28 Bulan	38,976,744,955	40%	96%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi layanan ASN	60 Bulan	268,938,470.00	12 Bulan	215,150,776	12 Bulan	53,787,694.00	1 Bulan	13,449,000	1 Bulan	25,167,000	1 Bulan	26,898,000	1 Bulan	53,754,000	12 Bulan	53,754,000	100%	100%	24 Bulan	268,904,776	40%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan	5 Laporan	12,277,235.00	1 Laporan	9,821,788	1 Laporan	2,455,447.00	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan		1 Laporan	2,455,000	1 Bulan	2,455,000	100%	100%	2 Bulan	12,276,788	40%	100%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan	5 Laporan	12,277,235.00	1 Laporan	9,821,788	1 Laporan	2,455,447.00	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan		1 Laporan	2,455,000	1 Bulan	2,455,000	100%	100%	2 Bulan	12,276,788	40%	100%
	Administrasi Kepegawaian			-		-		-				-						-						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disiplin ASN	5 Kegiatan	594,000,000.00	4 Kegiatan	475,200,000	1 Kegiatan	72,000,000.00	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	71,280,000	1 Kegiatan	71,280,000	1 Kegiatan	71,280,000	1 Kegiatan	71,280,000	100%	99%	5 Kegiatan	546,480,000	100%	92%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kapasitas ASN	5 Kegiatan	260,241,750.00	4 Kegiatan	208,193,400	1 Kegiatan	52,048,350.00	1 Kegiatan	52,048,150	1 Kegiatan	52,048,150	1 Kegiatan	52,048,150	1 Kegiatan	52,048,150	1 Kegiatan	52,048,150	100%	100%	5 Kegiatan	260,241,550	100%	100%
	Administrasi Umum			-		-		-				-						-						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Cetakan dan	60 Bulan	23,100,000.00	12 Bulan	18,480,000	12 Bulan	4,620,000.00	12 Bulan	-	## Bulan	-	12 Bulan	1,800,000	12 Bulan	4,600,000	12 Bulan	4,600,000	100%	100%	24 Bulan	23,080,000	40%	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya ATK	60 Bulan	112,310,000.00	12 Bulan	89,848,000	12 Bulan	16,632,000.00	12 Bulan	4,000,000	## Bulan	8,316,000	12 Bulan	8,316,000	12 Bulan	16,566,000	12 Bulan	16,566,000	100%	100%	24 Bulan	106,414,000	40%	95%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Makanan dan	60 Bulan	623,820,000.00	12 Bulan	499,056,000	12 Bulan	114,200,000.00	12 Bulan	18,543,900	## Bulan	33,839,400	12 Bulan	69,226,900	12 Bulan	114,192,500	12 Bulan	114,192,500	100%	100%	24 Bulan	613,248,500	40%	98%

Sasaran	gram/Kegiatan/Sub Kegi	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA	
									I		II		III		IV									
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (I, II, III, IV)		13 = 12/7 X 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			-		-		-				-						-						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Tersedianya Sarana dan Prasarana	5 Paket	147,272,730.00	4 Paket	117,818,184	1 Paket	29,454,546.00	1 Paket	-	1 Paket	29,450,000	1 Paket	29,450,000	1 Paket	29,450,000	1 Paket	29,450,000	100%	100%	5 Paket	147,268,184	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-		-				-						-						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,	60 Bulan	894,000,000.00	12 Bulan	715,200,000	12 Bulan	178,800,000.00	12 Bulan	19,194,309	## Bulan	47,286,064	12 Bulan	45,264,978	12 Bulan	93,519,750	12 Bulan	93,519,750	100%	52%	24 Bulan	808,719,750	40%	90%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan	60 Bulan	698,503,285.00	12 Bulan	558,802,628	12 Bulan	79,495,999.00	12 Bulan	-	## Bulan	-	12 Bulan	9,030,000	12 Bulan	79,025,000	12 Bulan	79,025,000	100%	99%	24 Bulan	637,827,628	40%	91%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan	60 Bulan	5,174,769,605.00	12 Bulan	4,139,815,684	12 Bulan	1,080,650,343.00	12 Bulan	165,878,456	## Bulan	416,237,225	12 Bulan	657,120,874	12 Bulan	1,033,237,981	12 Bulan	1,033,237,981	100%	96%	24 Bulan	5,173,053,665	40%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			-		-		-				-						-						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Tersedianya Jasa Pemeliharaa	60 Bulan	674,038,000.00	12 Bulan	539,230,400	12 Bulan	81,261,440.00	12 Bulan	17,500,000	## Bulan	25,126,601	12 Bulan	58,916,500	12 Bulan	67,691,500	12 Bulan	67,691,500	100%	83%	24 Bulan	606,921,900	40%	90%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Tersedianya Jasa Pemeliharaa	60 Bulan	75,000,000.00	12 Bulan	60,000,000	12 Bulan	52,050,967.00	12 Bulan	-	## Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	**51,667,400**	12 Bulan	51,667,400	100%	99%	24 Bulan	111,667,400	40%	149%
								-									**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**		100%	94%			50%	99%
								-									**Peringkat Kinerja**			**Tinggi**				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							-																
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya							-																
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	192,012,500	4 Kegiatan	153,610,000	1 Kegiatan	38,029,000.00	1 Kegiatan	19,626,000	1 Kegiatan	38,029,000	1 Kegiatan	38,029,000	1 Kegiatan	38,029,000	1 Kegiatan	38,029,000	100%	100%	5 Kegiatan	191,639,000	100%	100%
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya							-																
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Jumlah Lembaga Seni	150 Lembaga	805,882,505	120 Kegiatan	644,706,004	30 Kegiatan	161,175,000.00	30 Kegiatan	-	## Kegiatan	161,175,000	30 Kegiatan	161,175,000	30 Kegiatan	161,175,000	30 Kegiatan	161,175,000	100%	100%	150 Kegiatan	805,881,004	100%	100%
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	238,452,500	4 Kegiatan	190,762,000	1 Kegiatan	149,060,000.00	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	**38,377,000**	1 Kegiatan	**148,375,500**	1 Kegiatan	148,375,500	100%	100%	5 Kegiatan	339,137,500	100%	142%
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100%**	**100%**			**100%**	**114%**
																	Peringkat Kinerja			**Tinggi**				

Sasaran	gram/Kegiatan/Sub Kegi	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA	
									I		II		III		IV									
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (I, II, III, IV)		13 = 12/7 X 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN																							
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas																							
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	371,578,410	4 Kegiatan	297,262,728	1 Kegiatan	74,315,682.00	1 Kegiatan	31,000,000	1 Kegiatan	64,315,600	1 Kegiatan	64,315,600	1 Kegiatan	74,315,600	1 Kegiatan	74,315,600	100%	100%	5 Kegiatan	371,578,328	100%	100%
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Seni	5 Kegiatan	2,250,000,000	4 Kegiatan	1,800,000,000	1 Kegiatan	490,000,000.00	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan	490,000,000	1 Kegiatan	490,000,000	100%	100%	5 Kegiatan	2,290,000,000	100%	102%
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100%**	**100%**			**100%**	**101%**
																	Peringkat Kinerja			**Rendah**				
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH																							
	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi																							
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	155,232,500	4 Kegiatan	124,186,000	1 Kegiatan	31,046,500.00	1 Kegiatan	29,911,000	1 Kegiatan	29,911,000	1 Kegiatan	29,911,000	1 Kegiatan	30,807,500	1 Kegiatan	30,807,500	100%	99%	5 Kegiatan	154,993,500	100%	100%
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100%**	**100%**			**100%**	**100%**
																	Peringkat Kinerja			**Tinggi**				
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN																							
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi																							
	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran,	Jumlah cagar budaya	5 Cagar Budaya	2,000,000,000	4 Cagar Budaya	1,000,000,000	1 Cagar Budaya	600,000,000.00	1 Cagar Budaya	-	1 Cagar Budaya	-	1 Cagar Budaya	-	1 Cagar Buday	600,000,000	1 Cagar Budaya	600,000,000	100%	100%	5 Cagar Budaya	1,600,000,000	100%	80%
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100%**	**100%**			**100%**	**80%**
																	Peringkat Kinerja			**Tinggi**				
	Pengelolaan Museum Provinsi																							
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi	Jumlah Kolek	175 Koleksi	671,389,905	140 Koleksi	537,111,924	35 Koleksi	521,779,999.00	35 Koleksi	6,088,400	# Koleksi	**77,602,295**	35 Koleksi	**122,542,295**	35 Koleksi	506,107,545	35 Koleksi	506,107,545	100%	97%	175 Koleksi	1,043,219,469	100%	155%
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Kegia	5 egiatan	3,916,819,500	4 egiatan	3,133,455,600	1 Kegiatan	783,363,900.00	1 egiatan	-	# egiatan	-	1 egiatan	-	1 Kegia	763,614,000	1 Kegiatan	763,614,000	100%	97%	5 Kegiatan	3,897,069,600	100%	99%
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Kegia	5 egiatan	6,500,306,450	4 egiatan	5,200,245,160	1 Kegiatan	117,568,100.00	1 egiatan	-	# egiatan	-	1 egiatan	**46,107,000**	1 Kegia	117,237,000	1 Museum	117,237,000	100%	100%	5 Museum	5,317,482,160	100%	82%
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100%**	**98%**			**100%**	**112%**
																	Peringkat Kinerja			**Tinggi**				

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM **11,183,744,937**

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5) **8658%**

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5) **Tinggi**

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :

FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : Kegiatan ada yang dilaksanakan di tahun 2019 dan tidak dilaksanakan lagi di tahun 2020 begitupun sebaliknya baru mulai dilaksanakan 2021

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :

FORMULIR EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2021 (S/D TRIWULAN II)

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi :

1 **Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan**
2 **Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SKPD yang berkelanjutan**
3 **Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan danTerwujudnya SDM dan Kelembagaannya serta IPTEK kelautan dan**

NO.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (2017, 2018 dan 2019		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg di Evaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peragkat daerah yang di Evaluasi (2021)			Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi / KET
										Triwulan 1		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8.9.10.11			13 - 12/7*100%	14=6+12			15=14/5x100%		16	17
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja			Kinerja	%		
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnyan Kinerja Pelayanan Publik oleh DKPD: Indeks Nilai LKIP Dinas Daerah Rata-Rata Minimum B	Meningkatnyan Kinerja Pelayanan Publik oleh	15,059,965,625	Meningkatnyan Kinerja Pelayanan	9,027,960,480	Cakupan kinerja pelayanan Administrasi Umum yg dilaksanakan	2,857,173,412	Cakupan kinerja yg dilaksanakan s/d Triwulan I	547,124,762	Cakupan kinerja yg dilaksanakan s/d Triwulan II	1,842,215,582					Cakupan kinerja yg dilaksana kan s/d	2,389,340,344	100.00%	83.63			11,417,300,794	#REF!	#REF!		
1.1	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Tersedianya Kebutuhan dan Kelancaran administrasi umum	60 Bulan	10,963,625,000	36 Bulan	7,171,858,456	12 Bulan	2,515,989,212	3 Bulan	547,124,762	6 Bulan	1,759,586,391	- Bln	-			12 Bulan	2,306,711,153	100.00%	0.92	48 Bulan	9,478,569,609	80%	86.5%	DKPD	
1.2		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Tersedianya Kebutuhan dan Kelancaran tugas administrasi keuangan	60 Bulan	1,087,340,625	36 Bulan	445,854,350	12 Bulan	18,844,200	3 Bulan	-	6 Bulan	6,397,000	- Bln	-			12 Bulan	6,397,000	100.00%	0.34	48 Bulan	452,251,350	80%	41.6%	DKPD	
1.3		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Tersedianya Kebutuhan administrasi barang/jasa	60 Bulan	910,000,000	36 Bulan	295,884,300	12 Bulan	27,590,000	3 Bulan	-	6 Bulan	-	- Bln	-			12 Bulan	-	100.00%	0.00	48 Bulan	295,884,300	80%	32.5%	DKPD	
1.4		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Kebutuhan administrasi kepegawaian	60 Bulan	620,000,000	36 Bulan	112,736,000	12 Bulan	22,250,000	3 Bulan	-	6 Bulan	2,800,000	- Bln	-			12 Bulan	2,800,000	100.00%	0.13	48 Bulan	115,536,000	80%	18.6%	DKPD	
1.5		Kegiatan Penataan Kearsipan	Tersedianya kebutuhan dan tertatanya kearsipan dinas	60 Bulan	54,000,000	36 Bulan	5,907,000	12 Bulan	1,700,000	3 Bulan	-	6 Bulan	-	- Bln	-			12 Bulan	-	100.00%	0.00	48 Bulan	5,907,000	80%	10.9%	DKPD	
1.6		Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya rapat perjalanan dalam rangka koordinasi dan konsultasi	250 Kali	1,425,000,000	88 Kali	995,720,344	40 Kali	270,800,000	2 Kali		3 Kali	73,432,191	- kali	-			40 Kali	73,432,191	100.00%	0.27	128 Kali	1,069,152,535	51%	75.0%	DKPD	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.0%	83.63				#REF!	#REF!		
																		Peringkat Kinerja		Baik	Baik				Baik	CUKUP		
1	**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Perangkat Daerah . Nilai LKIP SKPD Sekretariat Daerah Rata-rata minimum**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Presentase Terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	12 Bulan	**18,181,089,304**	**12 Bulan**	-	**12 Bulan**	**17,491,449,733**	**12 Bulan**	**3,648,194,600**	**12 Bulan**	**8,050,518,733**	**12 Bulan**	**229,707,124**			**12 Bulan**	**15,429,126,926**	**100.00%**	**88.21**	**12 Bulan**	**15,429,126,926**	**100%**			
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah		30,309,000				15,010,000		-		9,310,000		-		5,700,000		15,010,000				15,010,000				
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas	2 Dok	14,744,000	0 -	-	2	8,250,000	- Dok	-	1 Dok	2,550,000	1 Dok	-	2 Dok	5,700,000	2 Dok	8,250,000	1	0.00	2 Dok	8,250,000	100%	100.00%	DKPD	Refocusing
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi program Kegiatan	1 Dok	14,065,000	0 -	-	1	5,761,900	- Dok	-	1 Dok	5,761,900	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	5,761,900	1	1.00	1 Dok	5,761,900	100%	100.00%	DKPD	Refocusing
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	1,500,000	0 -	-	3	998,100	- Dok	-	1 Dok	998,100	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	998,100	0.3333333	1.00	1 Dok	998,100	33%	100.00%	DKPD	Refocusing
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai akuntablitas kinerja penyelenggarakan pemerintah daerah, nilai evaluasi kinerja pemerintah daerah (SKPD-LPPD), prestasee ASN yang tidak dikenai sanksi disiplin		14,813,056,969				14,369,372,615		3,368,827,113		7,226,895,904		-		1,816,546,778		12,412,269,795				12,412,269,795				
		Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya penganggaran SKPD	12 Bulan	14,794,951,667	0 -	-	12	14,359,502,115	3 Bulan	3,368,827,113	6 Bulan	7,217,625,404	9 bln	-	12 Bln	1,815,946,778	6 Bulan	12,402,399,295	0.5	1.00	6 Bulan	12,402,399,295	50%	86.37%	DKPD	Refocusing
		Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan	12 Bulan	10,810,540	0 -	-	12	9,098,000	0 Bulan	-	6 Bulan	8,498,000	9 bln	-	12 Bln	600,000	6 Bulan	9,098,000	0.5	1.00	6 Bulan	9,098,000	50%	100.00%	DKPD	Refocusing
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunya laporan keuangan akhir Tahun SKPD	12 Bulan	2,945,000	0 -	-	12	772,500	0 Bulan	-	6 Bulan	772,500	9 bln	-	12 Bln	-	6 Bulan	772,500	0.5	1.00	6 Bulan	772,500	50%	100.00%	DKPD	Refocusing
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan balanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 Bulan	4,349,762	0 -	-	12	-	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bln	-		-	0	1.00	- Dok	-	0%	0.00%	DKPD	Refocusing
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Laporan BMD SKPD	12 Bulan	18,653,000			12	13,567,446		-		13,567,446		-		-	12 Bulan	13,567,446	1	1.00	12 Dok	13,567,446		100.00%		
		Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Inventarisasi BMD	12 Bulan	18,653,000	0 -	-	12	13,567,446	3 Bulan	-	6 Bulan	13,567,446	9 Bulan	-	12 Bln	-	12 Bulan	13,567,446	1	1.00	12 Dok	13,567,446	100%	100.00%	DKPD	
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	122,750,000			12	112,279,000		-		8,079,000		-		97,600,000	12 Bulan	105,679,000	1	1.00	12 Dok	105,679,000	100%	94.12%		
		Sub kegiatan : Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas ASN	12 Bulan	101,200,000	0 -	-	115	101,200,000	0	-	-	-	-	-	-	-	115 Stel	94,600,000	1	1.00	115 Dok	94,600,000	958%	93.48%	DKPD	
	Laporan Administrasi umum dan keuangan	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawain	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	12 Bulan	21,550,000	0 -	-	100	11,079,000	3 Bln	-	6 Bln	8,079,000	9 Bln	-	12 Bln	3,000,000	12 bulan	11,079,000	0.12	1.00	12 Dok	11,079,000	100%	100.00%	DKPD	Refocusing
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Kebutuhan Administrasi Umum*	*12 Bulan*	*1,114,505,049*	*0* -	-	*100*	*893,897,600*		-		*60,927,673*		*209,000,000*		*622,065,382*	12 Bulan	*891,993,055*	*0.12*	*1.00*	*12 Dok*	*891,993,055*	*100%*	99.79%		
		Sub kegiatan :n Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kebutuhan dan kelancaran administrasi umum	12 Bulan	13,106,029	0 -	-	100	8,233,000	3 Bln	-	6 Bln	8,233,000	9 Bln	-	12 Bln	-	12 Bulan	8,233,000	0.12	1.00	12 Paket	8,233,000	100%	100.00%	DKPD	Refocusing
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Harmonisasi Program dan Kegiatan SKPD	12 Bulan	1,097,586,000	0 -	-	100	885,664,600	3 Bln	-	6 Bln	52,694,673	9 Bln	209,000,000	12 Bln	622,065,382	12 Bulan	883,760,055	0.12	1.00	12 Bulan	883,760,055	100%	99.78%	DKPD	Refocusing
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Pengarsipan di kantor	12 Bulan	3,813,020	0 -	-	100	-	3 Bln	-	6 Bln	-	9 Bln	-	12 Bln	-	12 Bulan	-	0.12	1.00	12 Bulan	-	100%	0.00%	DKPD	Refocusing
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanya BMD di SKPD*	*12 Bulan*	*86,900,004*			*100*	*56,500,000*				*56,500,000*		-		-	12 Bulan	*56,500,000*	*0.12*	*1.00*	*12*	*56,500,000*	*100%*	*65.02%*		
		Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	45,200,003	0 -	-	100	15,000,000	3 Bln	-	6 Bln	15,000,000	9 Bln	-	12 Bln	-	12 Bulan	15,000,000	0.12	1.00	12 Bulan	15,000,000	100%	100.00%	DKPD	Refocusing
		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya'	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	41,700,001	0 -	-	100	41,500,000	3 Bln	-	6 Bln	41,500,000	9 Bln	-	12 Bln	-	12 Bulan	41,500,000	0.12	1.00	12 Bulan	41,500,000	100%	100.00%	DKPD	Refocusing
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	*Terwujudnya Cakupan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum*	*12 Bulan*	*1,465,751,882*				*1,410,246,059*		*279,367,487*		*623,445,861*		*20,707,124*		*394,180,599*		*1,317,701,071*				*1,317,701,071*		93.44%		
		Sub Kegiatan : Penyediaan jada komunikasi, sumber Daya air dan listrik	Tersedianya Rekening listrik, air dan telepon setiap bulannya	12 Bulan	184,200,000	0 -	-	100	101,441,490	3 Bln	-	6 Bln	34,884,793	9 Bln	-	12 Bln	44,699,557	6 Bln	79,584,350	0.06	1.00	6 Bulan	79,584,350	50%	78.45%	DKPD	Refocusing
		Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	1,281,551,882	0 -	-	100	1,308,804,569	3 Bln	279,367,487	6 Bln	588,561,068	9 Bln	20,707,124	12 Bln	349,481,042	6 Bln	1,238,116,721	0.06	1.00	6 %	1,238,116,721	50%	94.60%	DKPD	Refocusing
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	*Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah*	*Terpenuhinya pemeliharaan Operasional Kantor*	*1 Tahun*	*529,163,400*	*100* %		*100*	*620,577,013*	*100*	%	*100*	*51,792,849*		-		*564,613,710*	*100*	*616,406,559*			*100*	*616,406,559*				
		Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 tahun'	90,211,200	0 -	-	100	67,720,000	0	%	20	%	21,173,768	31	%	-	60 %	42,819,616	20	%	63,993,384	0.2	1.00	20	%	63,993,384	2000%	94.50%	DKPD	Refocusing
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	124,852,200	0 -	-	100	397,029,200	0	%	25	%	23,662,268	25	%	-	100 %	372,961,199	25	%	396,623,467	0.25	1.00	25	%	396,623,467	2500%	99.90%	DKPD	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan/perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	85,500,000	0 %	-	100	38,411,813	0	%	15	%	6,956,813	18	%	-	100 %	31,417,000	15	%	38,373,813	0.15	1.00	15	%	38,373,813	1500%	99.90%	DKPD	Refocusing
		Pemeliharaan /rehablitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Terpeliharanya peralatan/perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	228,600,000	0 %	-	100	117,416,000	0	%	0	%	-	0	%	-	100 %	117,415,895	0	%	117,415,895	0	1.00	-	%	117,415,895	0%	100.00%	DKPD	Refocusing
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.0%	88.21				#REF!	#REF!		
																		Peringkat Kinerja		Baik	Baik				Baik	CUKUP		
2		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur**	**Terlaksananya pembangunan**	**33,336,968,336**	**Meningkatnyan**	**24,005,125,254**	**Cakupan kinerja penyediaan Sapras**	**257,215,352**	**Cakupan kinerja penyediaan Sapras yg**		**Cakupan kinerja penyediaan Sapras yg**	**71,970,197**						**Cakupan kinerja**	**71,970,197**		**27.98**		**24,077,095,451**	**75.57%**	**43.87%**		
2.1	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya infrastruktur dalan Pengembangan Perikanan	5 Paket	15,129,526,461	5 Paket	16,018,623,660	1 Paket (Kewajiban)	-	0	Paket		-						-	0.00%	0.00	5 Paket	16,018,623,660	100%	105.88%		
2.2		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional dinas roda-4 dan Roda-2	17 Unit	2,800,000,000	8 Paket	545,187,613	2 Paket	-	0	Unit		-						-	0.00%	0.00	8 Paket	545,187,613	47%	19.47%		
2.3		Pengadaan peralatan/perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya peralatan/perlengkapan rumah jabatan/dinas	5 Paket	609,375,000	3 Paket	25,771,581	2 Paket	-	-	-		-						-	0.00%	0.00	3 Paket	25,771,581	60%	4.23%		

NO.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (2017, 2018 dan 2019		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg di Evaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peragkat daerah yang di Evaluasi (2021)			Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun 2021 (%)		Unit Peranggkat Daerah Penanggung 16	Lokasi / KET
										Triwulan 1			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8			9			10			11			12=8.9.10.11			13 - 12/7*100%		14=6+12			15=14/5x100%		16	17
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp			Kinerja			Kinerja	%		
2.4		Pengadaan peralatan/perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan/perlengkapan Gedung Kantor	120 paket	5,641,984,375	80 paket	3,688,231,200	35 paket	77,900,000	-	Paket		4	Paket	4,000,000							35	Paket	4,000,000	100.00%	0.05	115	Paket	3,692,231,200	96%	65.44%	DKPD	
2.5		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas Jabatan	5 Paket	565,000,000	4 Paket	31,237,550	1 paket	-	-	Paket				-									-	0.00%	0.00	4	Paket	31,237,550	80%	5.53%	DKPD	
2.6		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	5 Paket	1,850,000,000	4 Paket	301,424,875	3 Paket	7,500,000	-	Paket		2	paket	7,500,000							3	paket	7,500,000	100.00%	1.00	7	Paket	308,924,875	140%	16.70%	DKPD	
2.7		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharannya kendaraan dinas/operasional	100 Unit	1,805,000,000	28 Unit	620,188,830	20 Unit	104,815,352	-	Unit		2	Unit	14,537,126							20	Unit	14,537,126	100.00%	0.14	48	Unit	634,725,956	48%	35.16%	DKPD	
2.8		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan/ perlengkapan gedung kantor	50 Paket	1,600,000,000	38 Unit	129,489,981	20 Unit	67,000,000	-	Unit		14	Unit	45,933,071							20	Unit	45,933,071	100.00%	0.69	58	Unit	175,423,052	116%	10.96%	DKPD	
2.9		Rehalilitasi sedang/berat gedung kantor	Terehabilitasinya gedung kantor	5 Paket	1,225,000,000	6 Paket	1,516,689,874	2 Paket	-	-	-				-									-	0.00%	0.00	6	Paket	1,516,689,874	120%	123.81%	DKPD	
		Rehalilitasi Sedang/berat Rumah Dinas	Terehabilitasinya Rumah dinas/jabatan	5 Paket	410,000,000	2 Paket	209,750,000	1	-	-	-				-									-	0.00%	0.00	2		209,750,000	40%	51.16%		
2.10		Rehalilitasi sedang/berat gedung pameran	Terpeliharanya gedung pameran	5 Paket	530,000,000	2 Paket	92,990,000	1 Paket	-	-	-				-									-	0.00%	0.00	2	pkt	92,990,000	40%	17.55%	DKPD	
2.11		Pembangunan gedung kantor (DAK)	Tersedianya infrastruktur dalan Pengembangan Perikanan	5 Paket	1,171,082,500	1	825,540,090	2 Paket	-	-	-				-									-	0.00%	0.00	1	pkt	825,540,090	20%	70.49%	DKPD	
															-									-								
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	27.98				75.57%	43.87%		
																						Peringkat Kinerja			Sangat Rendah	Baik				Baik	Sangat Rendah		
3		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnyan Kinerja Pelayanan Publik DKP: Indeks Nilai LKIP Dinas Daerah Pala Pata Minimum	99% (meningkatnya disiplin ASN)	-	97,% (meningkatnya disiplin	-	Kantor	-			-			-							-	Stell	-			-	Stel	-	0.00%	0.00%		
3.1		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	0 Stel	-	0	Stel	-	0	stel	-				-									-			-	Stel	-				Tidak Dilaksanakan Tahun 2020
3.2	Terwujudnya Kesejahteran Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Khusus Pakaian Hari-Hari Tertentu (batik)	Tersedianya Pakaian Dinas untuk Hari-Hari Khusus2	0 Stel	-	0	Stel	-	-	Stel	-				-									-			-		-				Tidak Dilaksanakan Tahun 2020
3.3		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	- Stel	-	0	Stel	-	0	Stel	-				-									-			-	Stel	-			DKPD	Tidak Dilaksanakan Tahun 2020
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%		
																						Peringkat Kinerja			Tidk ada Ker	Tidk ada Ker							
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnyan Kinerja Pelayanan Publik DKP: Indeks Nilai LKIP Dinas Daerah Pala Pata Minimum	Meningkatnya Kinerja Pelayanan	1,085,587,500	Meningkatnyan Kinerja	76,292,000	Meningkatnyan Kinerja Pelayanan Publik DKP: Indeks	-			-			-							1	Kegiatan	-	0.00%	0.00	9	Kegiat	249,205,309		22.96%	DKPD	
	Terwujudnya Kesejahteran Masyarakat Kelautan dan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan	20 Kegiatan	405,587,500	6 Kegiatan	76,292,000	2 Kegiatan	-						-									-	0.00%	0.00	6	Kegiat	76,292,000	30%	18.81%	DKPD	Refocusing
2.00		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksanakannya Bimtek untuk sertifikasi	16 Kegitan	680,000,000	3	172,913,309	3 Kegiatan	-						-									-	0.00%	0.00	3	Kegia	172,913,309	19%	25.43%	DKPD	Refocusing
															-																		
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)								24.38%	22.12%		
																						Peringkat Kinerja			Tidk ada Ker	Tidk ada Ker				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnyan Kinerja Pelayanan Publik DKP: Indeks Nilai LKIP Dinas Daerah Pala Pata Minimum	Meningkatnya Kinerja Pelayanan	677,814,375	Meningkatnyan Kinerja	136,528,300	Meningkatnyan Kinerja Pelayanan Publik DKP: Indeks	16,400,250	Cakupan kinerja terlaksanakanya pembuatan laporan		-	Cakupan kinerja terlaksanakanya pembuatan laporan		10,693,400							Cakupan kinerja terlaksank	10,693,400		65.20			147,221,700	81.67%	21.72%		
1.00		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15 Dokumen	218,000,000	10	Laporan	104,965,900	3	Laporan	4,618,500	3	Lap		3	P	4,618,500					3	Lap	4,618,500	100.00%	1.00	13	Laporan	109,584,400	87%	50.27%	DKPD	
2.00	Terwujudnya Kesejahteran Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan semesteran	10 Laporan	100,000,000	6	Laporan	4,122,000	2	Laporan	3,821,750	-	-		-							2	Lap	-	100.00%	0.00	8	Laporan	4,122,000	80%	4.12%	DKPD	
3.00		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan akhir tahun	5 Laporan	84,814,375	3	Laporan	9,567,000	1	Laporan	6,075,000	1	Lap		1	lap	6,074,900					1	lap	6,074,900	100.00%	1.00	4	Laporan	15,641,900	80%	18.44%	DKPD	
4.00		Penyusunan laporan bulanan SKPD	Tersusunnya laporan bulanan	60 Laporan	275,000,000	36	Laporan	17,873,400	12	Laporan	1,885,000	3	Lap		6	Lap	-					12	Lap	-	100.00%	0.00	48	Laporan	17,873,400	80%	6.50%	DKPD	
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	65.20				81.67%	19.82%		
																						Peringkat Kinerja			Baik	Baik				Baik	Sangat Rendah		
6		Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan	Terlaksanaya Promosi potensi kelautan dan perikanan	100 % terlaksanaya 12 Kegiatan	722,100,000	2	Kegiatan	178,053,950	2	Kegiatan	-	-	-		-							-		-			2	Kegiatan	178,053,950	50.00%	24.66%		
1.00	Terwujudnya Kesejahteran Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi	Terlaksananya pameran dan promosi	10 Kegiatan	722,100,000	5	Kegiatan	178,053,950	2	Kegiatan	-		-		-									-	0.00%	0.00	5	Kegia	178,053,950	50%	24.66%	DKPD	Refocusing
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)								50.00%	24.66%		
																						Peringkat Kinerja			Tidk ada Ker	Tidk ada Ker				Cukup	Sangat Rendah		
7		Program Perencanaan SKPD	Meningkatnyan Kinerja Pelayanan Publik DKP: Indeks Nilai LKIP Dinas Daerah Pala Pata Minimum	Meningkatnya Kinerja Pelayanan	655,209,375	Meningkatnyan	115,628,100	Meningkatnyan Kinerja Pelayanan Publik DKP: Indeks	38,859,600	Cakupan kinerja dengan terlaksanaanya		-	Cakupan kinerja dengan terlaksanaanya pembubuatan 2		11,268,500							Cakupan kinerja dengan	11,268,500		29.00	5	Laporan	126,896,600	63%	16%		
1.00	Terwujudnya Kesejahteran Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Penyusunan Rencana Strategi SKPD	Tersusunnya laporan Renstra	4 Laporan	130,375,000	1		3,500,000	1	Laporan	4,475,000				-							1	Lap	-	100.00%	0.00	2	Laporan	3,500,000	50%	2.68%		
2.00		Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja	10 Laporan	233,000,000	6	Laporan	48,116,800	2	Laporan	5,045,600	1	Lap		1	Lap	3,371,500					2	lap	3,371,500	100.00%	0.67	8	Laporan	51,488,300	80%	22.10%	DKPD	
3.00		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Tersusunnya rencana kerja anggaran	10 Laporan	291,834,375	4	Laporan	64,011,300	2	Laporan	29,339,000	1	Lap		1	Lap	7,897,000					2	lap	7,897,000	100.00%	0.27	6	Laporan	71,908,300	60%	24.64%	DKPD	
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	29.00				63.33%	16.47%		
																						Peringkat Kinerja			Baik	Baik				Cukup	Sangat Rendah		
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Cakupan Jml NTP Perikanan (Jumlah NTN Nelayan dan NTPi Pembudidaya	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat pesisir - Nilai Tukar Nelayan (NTN) = 108 % s/d tahun 2021	19,083,093,750	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat pesisir - Nilai Tukar	8,639,556,540	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat pesisir - Nilai Tukar Nelayan (NTN) = 107 % s/d tahun 2020 - Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	17,025,700	NTP Perikanan = 102,20 (NTN =103,17 dan NTPi = 100)		-	NTP Perikanan = 100 (NTN =101.12 dan NTPi = 99.09)		17,025,700							NTP Perikanan = 100 (NTN =101.12 dan NTPi = 99.09)	17,025,700	0	100.00			8,656,582,240	36.37%	45.36%		
8.1	Terwujudnya Kesejahteran Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Pemberdayaan perempuan pesisir	Jumlah perempuan pesisir yang dibina dan di latih.	25 Paket	2,610,000,000	11 Paket	487,515,700	4 Paket	-						-									-	0.00%	0.00	11	Paket	487,515,700	44%	18.68%		
8.2		Rehalilitasi dan restorasi terumbu karang	Restorasi/transplantasi terumbu karang	20 Lokasi	865,000,000	8	Lokasi	2,215,128,000	2	Lokasi	-				-									-	0.00%	0.00	8	Paket	2,215,128,000	40%	256.08%		
8.3		Peningkatan kesejahteran masyarakat pesisir, nelayan dan di daerah kepulauan	Paket Bantuan Kemiskinan Masyarakat Pesisir	2800 Paket	15,608,093,750	691 Paket	5,936,912,840	12 Paket	17,025,700	-	Paket		12	paket	17,025,700							12	Paket	17,025,700	100.00%	1.00	703	Paket	5,953,938,540	25%	38.15%		
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	100.00				36.37%	104.30%		
																						Peringkat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Tinggi		
9	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Program pengembangan budidaya perikanan	Meningkatnya Produksi Budidaya Ikan dan meningkatnya kesejahteraan Pembudidaya	Cakupan Jumlah Produksi Budidaya sebesar 575.000 ton dan Nilai NTPi 102 %	27,219,762,500	Jumlah Produksi 569.502 ton dan Nilai NTPi = 98.79%	5,812,347,239	Jumlah Produksi 530.000 ton dan Nilai NTPi = 97 %	49,461,472	Jumlah Produksi 98.000 ton dan Nilai NTPi = 100%		-	Jumlah Produksi 190.035 ton dan Nilai NTPi = 99.09 %		49,461,472							Jumlah Produksi 190.035 ton dan Nilai NTPi = 99.09 %	49,461,472	100.00%	100.00			5,861,808,711	44.38%	21.54%		
9.1	Meningkatnya Komoditas Produksi Kelautan dan Perikanan	Pengembangbiakan bibit ikan Unggul yang tersebar di beberapa lokasi kabupaten/Kota	Tersedianya bibit unggul yang disebar di 15 Kab/Kota	Paket bibit 50 Nila, dan Unduk	6,500,000,000	57 Paket	1,427,294,895	34	1PAKET (Bibit Rumpit Laut; Benih Ikan , Induk, Pakan, dan Ikan Hias	-	-	Paket			-									-	0.00%	0.00	57	Paket	1,427,294,895	114%	21.96%		Refocusing

NO.	Sasaran		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (2017, 2018 dan 2019		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg di Evaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peragkat daerah yang di Evaluasi (2021)			Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun 2021 (%)		Unit Peranggkat Daerah Penanggung	Lokasi / KET
											Triwulan 1			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV											
1	2		3	4	5		6		7		8			9			10			11			12=8.9.10.11			13 - 12/7*100%		14=6+12			15=14/5x100%		16	17
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp			Kinerja			Kinerja	%		
9.2			Intensifikasi budidaya ikan (INSTUKAN) di beberapa lokasi kabupaten	Tersedianya Budidaya ikan air tawar, Payau dan Laut	55	Paket Calin, Induk, Ikan Hias, Udang, Bnadeng, benih ikan	35	Paket Calin, Induk, Ikan Hias, Bnadeng, benih ikan	5	Paket Benih, Pakan ,Calin Induk Untuk Kelompok	pAKET			5	paket	49,461,472							5	Paket	49,461,472	100.00%	1.00	40	Paket	2,689,237,723	73%	32.90%		
9.3			Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Budidaya	Tersedianya sarana dan prasarana Budidaya ,Ikan Air Tawar dan laut	5	Paket	4	Paket	1	Paket	-	-	-			-								-	0.00%	0.00	4	Paket	687,151,000	80%	7.55%		
;9.4			Pengembangan statistik perikanan budidaya	Tersedianya data dan informasi statistik perikanan budidaya	5	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	-	-	-			-								-	0.00%	0.00	3	Buku	210,251,000	60%	20.24%		Refocusing
9.5			Peningkatan kapasitas petugas teknis kesling	Meningkatnya kapasitas petugas teknis kesling	12	Petugas Teknis	5	Petugas Teknis	2	Petugas Teknis	-	-	-			-								-	0.00%	0.00	5	Petugas Teknis	33,729,604	42%	28.11%		Refocusing
9.6			Pemantauan dan monitoring kelompok budidaya perikanan	Terlaksananya monitoring kelompok budidaya perikanan	5	Kegiatan	3	Kegiatan	1	Kegiatan	-	-	-			-								-	0.00%	0.00	3	Kegiatan	26,779,000	60%	29.75%		Refocusing
9.6			Pembinaan dan pelatihan Pembudidaya Ikan	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan	16	Kegiatan	9	Kegiatan	4	Kegiatan	-					-								-	0.00%	0.00	9	Kegiatan	507,268,254	56%	50.73%		Refocusing
9.7			Pembinaan wanita pembudidayaan ikan	Terlaksananya pembinaan wanita pembudidaya ikan	150	Wanita Pembudidaya	3	Kegiatan	2	Kegiatan	-	-	-			-								-	0.00%	0.00	3	Kegiatan	83,824,154	2%	21.49%		Refocusing
9.8			Sosialisasi dan Pembinaan Sertifikasi CPIB dan CBIB di UPR dan BBI lokal	Terlaksananya pembinaan sertifikasi CPIB dan CBIB di UPR dan BBI Lokal Unit Pembenihan Ikan	16	Kegiatan	2	Kegiatan	1	Kegiatan	-	-	-			-								-	0.00%	0.00	2	Kegiatan	64,441,900	13%	53.26%		Refocusing
9.9			Audit sertifikasi CPIB dan CBIB	Terlaksananya audit sertifikasi CPIB dan CPIB	7	Kegiatan	4	Kegiatan	1	Kegiatan	-	-	-			-								-	0.00%	0.00	4	Paket	44,496,000	57%	44.50%		Refocusing
9.10			Pelatihan CPIB dan CBIB	Terlaksananya pelatihan CPIB dan CBIB	150	Pembudidaya Terlatih	50	Pembudidaya Terlatih	14225200		50	Pembudidaya Terlatih	-	-	-			-						-	0.00%	0.00	50	Pembudidaya Terlatih	14,225,200	33%	5.69%		Refocusing
9.11			Pengujian Induk dan Benih Ikan	Benih dan Induk Ikan yang di uji	10	Kali Pengujian	2		29,931,781		2	Kali Pengujian	-	-	-			-						-	0.00%	0.00	2		29,931,781	20%	26.03%		Refocusing
9.12			Peningkatan kapasitas petugas teknis pembudidaya ikan	Meningkatnya kapasitas petugas teknis pembudidaya ikan	17	Petugas Teknis	2		17,400,000		2	Orang	-	-	-			-						-	0.00%	0.00	2		17,400,000	12%	13.92%		Refocusing
9.13			Monev ke BBI lokal dan UPR	Laporan monev BBI Lokal dan UPR	15	Kab/Kota	2	Kegiatan	25,778,200		2	Kegiatan	-	-	-			-						-	0.00%	0.00	-		25,778,200	0%	25.78%		Refocusing
																-							Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	1.00			44.38%	27.28%		
																							Peringkat Kinerja			Sangat Baik	Sangat Baik			Rendah	Sangat Rendah		
10		PROGRAM PENGEMBANGAN	**Program pengembangan perikanan tangkap**	**Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap dengan meningkatnya jumlah Produksi tangkap dan meningkatkan kesejahteraan Nelayan**	**Cakupan Jumlah Produksi perikanan Tangkap sebesar 405.422 ton**		**Jumlah Produksi 384.300 ton dan Nilai NTN= 115.78%**	**33,244,425,531**	**Jumlah Produksi 393.614 ton dan Nilai NTN= 107 %**	**1,608,972,000**	**Jumlah Produksi 84.250 ton dan Nilai NTN= 103,17 %**		-	**Jumlah Produksi 147.787,23 ton dan Nilai NTN= 101.12 %**		**448,556,401**						**Jumlah Produksi 147.787,23 ton dan Nilai NTN= 101.12 %**		**448,556,401**	**200.00%**	**27.88**			**33,692,981,932**	**115.00%**	**42.52%**	**DKPD**	
10.1	**Meningkatnya Komoditas Produksi Kelautan dan Perikanan**	Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil	Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil	Terbinaya usaha perikanan tangkap skala kecil	30	Unit (Motor tempel, Kotinti	130	Unit (Motor tempel, Kotinti	10,514,926,700	60	Unit Motor Tempel, Longboat	1,608,972,000	-	-		35	Paket	448,556,401					60	Paket	448,556,401	100.00%	0.28	190	Unit (Motor temp	10,963,483,101	633%	67.07%		
10.2		Pengembangan Sarana perikanan tangkap	Pengembangan Sarana perikanan tangkap	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan Tangkap. 10 s/d 30	15	Kapal	16,000,000,000		-		-	-	-			-								-	0.00%	0.00	-		-	0%	0.00%		
10.3		Pengembangan statistik perikanan tangkap	Pengembangan statistik perikanan tangkap	Pengumpulan data statistik perikanan tangkap	5	Laporan	1,120,000,000	3	Laporan	192,878,200	1	Laporan	-	-	-			-						-	0.00%	0.00	3		192,878,200	60%	17.22%		Refocusing
10.4		Sosialisasi pengaturan alat penangkapan ikan	Sosialisasi pengaturan alat penangkapan ikan	Sosialisasi pengaturan alat penangkapan ikan	10	Kali Kegiatan	250,000,000	5	Kegiatan	130,915,000	1	Kegiatan	-			-								-	0.00%	0.00	5	Kegiatan	130,915,000	50%	52.37%		
10.5		Restoking benih ikan di laut dan perairan umum daratan	Restoking benih ikan di laut dan PUD yang ditebar	Jumlah Benih Ikan di laut dan PUD yang ditebar	40	Paket benih yang ditebar 4 juta	1,450,000,000	12	Paket benih yang ditebar 4 juta	877,876,513	2	Paket/ lokasi	-	-	-			-						-	0.00%	0.00	12		877,876,513	30%	60.54%		Refocusing
10.6		Pendampingan Pengelolaan Kenelayanan	Pengelolaan Kenelayanan	Informasi kenelayanan yang terkelola	20	Kegiatan	220,000,000	6	Kegiatan	263,996,000	1	Kegiatan	-	-	-			-						-	0.00%	0.00	6		263,996,000	30%	120.00%		
10.7		Pelatihan BST ABK	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	15	Kegiatan	195,000,000	7	Kegiatan	439,329,600	2	Kegiatan	-	-	-			-						-	0.00%	0.00	7		439,329,600	47%	225.30%		Refocusing
10.8			Pembangunan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan DAU dan DAK	Tersedianya infrastruktur dalan Pengembangan Perikanan	20	Pelabuhan	43,073,555,950	12	elabuha	20,824,503,518	2	Lokasi	-			-						2	elabuha	-	100.00%	0.00	14	Paket	20,824,503,518	70%	48.35%		
10.9		Pengelolaan	Pelatihan BST ABK	Terlatihnya keselamatan Masyarakat nelayan	150	Nelayan	580,000,000	60	Nelayan	-	30	Nelayan	-	-	-			-						-	0.00%	0.00	60		-	40%			Refocusing
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	27.88			106.67%	65.65%		
																							Peringkat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Baik	Cukup		
11			**Program Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan**	**Meningkatkan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dengan meningkatnya : dan berkurangnya loss hasil perikanan**	**Meningkatkan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Nilai**		**19,966,059,375**	**Meningkatkan Mutu dan Keamanan Hasil**	**3,275,551,313**	**Meningkatkan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dengan**	-	**Meningkatkan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dengan**	-	**Meningkatkan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dengan**		-							**Meningkatkan Mutu dan Keamanan Hasil**	-					**3,275,551,313**	**14.83%**	**16.41%**		
11.1	**Meningkatnya Komoditas Produksi Kelautan dan Perikanan**		Pengembangan Teknik Pengolahan dan Pemkinaan pengawasan mutu	Tersedianyan perlatan dan meningkatnya mutu hasil perikanan	50	Paket	1,781,000,000	**2**	Kegiatan	58,389,000	1	Paket alat Pengolahan	-			-								-	0.00%	0.00	1	Paket	58,389,000	2%	3.28%		Refocusing
			Pengembangan *Teknik Pengolahan dan Pembinaan pengawasan mutu (DAK)*	Tersedianyan perlatan dan meningkatnya mutu hasil perikanan	0		-	**2**		344,053,350	2	Paket	-	-		-								-	0.00%	0.00	-		344,053,350	0%			Refocusing
11.2			Lomba Menu Serba Ikan	Meningkatnya jumlah diversifikasi olahan berbahan baku ikan	25	Jumlah Olahan	720,000,000	5	Kegiatan	286,928,863	2	Kegiatan	-			-								-	0.00%	0.00	2	Kegiatan	286,928,863	8%	39.85%		Refocusing
11.3			Penerapan Sistim Rantai Dingin untuk penanganan hasil tangkapan dari ditangkap sampai konsumen/industri pengolahan	Tersedianya peraltan Chest Freezer, Cool Box, Motor Roda Tiga berinsulasi untuk pengolah	1000	Unit (Freezer, Cool box, dan 5 Unit Cool Room dan 5 Unit Cold storage)	13,785,059,375	218	Unit (Freezer, Cool Box, 1Cool Room utk penyimpanan Ea	1,909,821,800	116	Unit Freezer; Cool Box, 1Cool Room utk penyimpan Ea	-	-	-			-						-	0.00%	0.00	116	Unit	1,909,821,800	12%	13.85%		Refocusing
11.4			Pembinaan UKM Pengolahan Hasil Perikanan	Terbinanya UKM Pengolahan Hasil Perikanan	10	Kegiatan	685,000,000	5	Kegiatan	143,238,500	1	Kegiatan	-	-	-			-						-	0.00%	0.00	1	Kegiatan	143,238,500	10%	20.91%		Refocusing
11.5			Sosialisasi/Diseminasi pengembangan usaha dan peningkatan mutu dan nilai tambah	Infromasi pengembangan usaha dan peningkatan mutu dan nilai tambah hasil olahan perikanan	5	Kegiatan	250,000,000	2	Kegiatan	34,102,000	1	Kegiatan	-	-	-			-						-	0.00%	0.00	1	Kegiatan	34,102,000	20%	13.64%		Refocusing
11.6			Pelatihan teknis masyarakat pengembangan usaha	Terlatihnya masyarakat pengolah untuk pengembangan usaha	5	Kegiatan	355,000,000	3	Kegiatan	45,170,000	1	Kegiatan	-	-	-			-						-	0.00%	0.00	1	Kegiatan	45,170,000	20%	12.72%		Refocusing
11.7			Pemberdayaan teknis kepada masyarakat peningkatan mutu dan nilai tambah ikan	Terbinanya kelompok masyarakat pengolah untuk meningkatkan mutu Hasil perikanan	5	Kegiatan	75,000,000	**1**	**kegiatan**	11,025,000	-	-	-	-	-	-			-						-	0.00%	0.00	1	Kegiatan	11,025,000	20%	14.70%		Refocusing
11.8			Gemar Makan Ikan	Konsumsi Ikan Meningkat	600	Anak Sekolah	490,000,000	500	Anak Sekolah	163,571,000	100	Anak	-			-								-	0.00%	0.00	100	Kegiatan	163,571,000	17%	33.38%		Refocusing
11.9			Peningkatan kapasitas petugas teknis pengolahan	Meningkatnya kapasitas petugas teknis pengolahan	10	Petugas Teknis	180,000,000	2		-	2	Orang	-	-	-			-						-	0.00%	0.00	2		-	20%	0.00%		Refocusing
11.10			Peluang dan Investasi Kelautan dan Perikanan	Tersedianya Buku Peluang dan Investasi perikanan meningkat	10	Kegiatan	1,645,000,000	4	Kegiatan	279,251,800	2	Kegiatan	-	-	-			-						-	0.00%	0.00	2	Kegiatan	279,251,800	20%	16.98%		Refocusing
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)							13.48%	15.39%		
																							Peringkat Kinerja			Tdk ada Keg	Tdk ada Keg.			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

NO.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (2017, 2018 dan 2019		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg di Evaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peragkat daerah yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun 2021 (%)		Unit Peragkat Daerah Penanggung	Lokasi (/ KET
										Triwulan 1		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8.9.10.11		13 - 12/7*100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja		Kinerja	%		
12		**Program Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir**	**Jumlah Pulau-Pulau yang terfasilitasi dan direhabilitasi kawasan pesisir dan laut Karang,**	**62 Lokasi (Rehabilitasi**	**7,948,302,414**		**4,350,201,077**	**13 Lokasi**	**186,803,428**		-	**1 Lokasi**	**31,013,000**					**1 Lokasi**	**31,013,000**	**100.00%**	**16.60**			**4,381,214,077**	**88.89%**	**55.12%**		
12.1	**Meningkatkan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Rehabilitasi wilayah pesisir dan lingkungan laut	Terselenggaranya Restorasi/rehabilitasi karang dan penanaman mangrove	15 Lokasi	3,815,181,907	9 Lokasi	701,444,692	2 Lokasi	-	- -		-	-						-	0.00%	0.00	9 Lokasi	701,444,692	60%	18.39%		
12.2		Pengawasan kawasan konservasi perairan	Jumlah kawasan konservasi yang di fasilitasi	20 LOkasi	779,193,039	11 Lokasi	661,949,400	2 Lokasi	176,862,428	- -		1 lokasi	21,072,000					2 lokasi	21,072,000	100.00%	0.12	13 Lokasi	683,021,400	65%	87.66%		
12.3		Penyusunan RZWP3K Provinsi Sulut	Tersedianya perda zonasi RZWP3K	5 Dokumen	769,734,375	4 Dokumen	485,906,835	1 Dokumen	9,941,000	- Dokumen		1 lap	9,941,000					1 Lp.	9,941,000	100.00%	1.00	5 Dokum	495,847,835	100%	64.42%		
12.4		Bersih-Bersih Pantai	Terselenggaranya bersih pantai	15 Kegiatan	780,000,000	10 Kegiatan	262,943,500	4 Kegiatan	-	- -		-	-						-	0.00%	0.00	10 Kegiat	262,943,500	67%	33.71%		Refocusing
12.5		Pengembangan Pulau-Pulau Kecil dan Terluar	Terlaksananya Pengembangan PPK dan Pulau Terluar	12 LOkasi	780,000,000	5 Lokasi	278,535,400	2 Lokasi	-	- -		-	-						-	0.00%	0.00	5 Lokasi	278,535,400	42%	35.71%		Refocusing
12.6		Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan (DAK)	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Ruang Laut	20 Lokasi	1,024,193,093	4	1,959,421,250	- Lokasi	-	- -		-	-						-	0.00%	0.00	4 -	1,959,421,250	20%	191.31%		
		Pengembangan Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (DAK)	Terlaksananya Pengembangan PPK dan Pulau Terluar	12 LOkasi		4 Lokasi		4 Lokasi	-				-						-	0.00%	0.00	4	-	0%			
		Pengadan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK)	Tersedianya Sarana Pengawasan di laut	1 Paket Kapal		1 Paket		1 Paket	-				-						-	0.00%	0.00	1	-	0%			
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**16.60**			**88.89%**	**71.87%**		
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Cukup**	**Baik**		
13		**PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN**	**Terlaksananya pengawasan dan Pengedalian sumberdaya kelautan dan perikanan serta terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait**	**5 kegiatan**	**3,710,584,375**		**316,399,500**	**Sulut**	-	-	-		-					**3**	**Kegiatan** -				**316,359,500**	**39.33%**	**8.53%**		
13.1	**Meningkatkan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan**	Kerjasama operasi pengawasan terpadu di laut	Terlaksananya kerjasama operasi pengawasan terpadu	20 Kali operasi	670,375,000	4 Kali Operasi	119,742,000	1 Kali Operasi	-	- -		-	-						-	0.00%	0.00	4 Kali Operasi	119,742,000	20%	17.86%		Refocusing
13.2		Peningkatan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut	Terlaksananya peningkatan masyarakat dalam pengawasan SDKP	10 kegiatan dengan bertambahnya 15 Pokmaswas	282,209,375	5 Kegiatan	90,803,500	1 Kegiatan	-				-						-	0.00%	0.00	5 Kegiatan	90,803,500	50%	32.18%		Refocusing
13.3		Pengawasan bahan aditif pada ikan dan produk perikanan	Terlaksananya pengawasan bahan aditif pada ikan dan produk perikana	Kali untuk dengan mencapai 98 % jumlah Supermarket, Pasar, dan reatoran yang di awasi. 12	798,000,000	6 Kegiatan	76,914,000	2 Kegiatan	-	- -			-					2 Kegiatan	-	100.00%	0.00	8 Kegiatan	76,914,000	67%	9.64%		Refocusing
13.4		Penanganan tindak pidana perikanan	Jumlah kasus perikanan yang difasilitasi	5 Kasus	555,000,000	- -	-	1 Kasus	-	- -			-						-	0.00%	0.00	-	-	0%	0.00%		
13.5		Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan	Terfasilitasinya KapalPengawas	5 Paket	1,405,000,000	3 Lokasi	28,900,000	1 Paket	-				-						-	0.00%	0.00	3 Lokasi	28,900,000	60%	2.06%		Refocusing
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)						**39.33%**	**12.35%**		
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
14		**Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan**	**Terlaksananya kajian dan Informasi data serta sosialisasi program/kegiatan**	**10 Kajian dokumen dan 41 Kegiatan**	**3,818,511,525**		**1,449,120,749**	**Tersedianyan data dan Informasi kelautan dan perikanan**	**9,619,600**	- -	-	**Tersedianya data dan Informasi kelautan dan Perikanan**	**9,552,600**					**Tersediany a data dan**	**9,552,600**	**100.00%**	**99.30**		**1,458,673,349**	**56.59%**	**38.20%**		
1.00	**Meningkatkan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan**	Kajian sistem penyuluhan perikanan	Tersedianya kajian Ketelusuran Tuna, Cakalang, Tongkol dan Kajian PEMDA Pungutan Hasil Perikanan	10 Dokumen	609,000,000	3 Dokumen	90,000,000	1 Kajian	-	- -			-						-	0.00%	0.00	3 Dokumen	90,000,000	30%	14.78%		Refocusing
2.00		Sosialisasi statistik perikanan	Tersosialisasinya statistik perikanan dalam penyediaan data	laporan /Buku Statistik 10	265,625,000	6 Kegiatan	155,850,200	2 Kegiatan	-	- -			-						-	0.00%	0.00	6 Kegiatan	155,850,200	60%	58.67%		Refocusing
3.00		Konsolidasi dan validasi data statistik perikanan Kabupaten/Kota	Tervalidasinya data statistik perikanan	24 Laporan	530,000,000	5 Kegiatan	167,946,551	2 Kegiatan	9,619,600	- -		1 Keg	9,552,600					2 Kegiatan	9,552,600	100.00%	0.99	7 Kegiatan	177,499,151	29%	33.49%		
4.00		Sosialisasi pembangunan KP	Kegiatan Pembangunan KP di Sulawesi Utara	12 Kegiatan	680,000,000	10 Kegiatan	247,771,818	4 Kegiatan	-				-						-	0.00%	0.00	10 Kegiatan	247,771,818	83%	36.44%		Refocusing
5.00		JAKEPO	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	5 Kegiatan	396,740,625	4 Kegiatan	195,721,083	1 Kegiatan	-	- -			-						-	0.00%	0.00	4 Kegiatan	195,721,083	80%	49.33%		Refocusing
6.00		Promosi pembangunan KP	Terselenggaranya promosi pembangunan KP	10 Kegiatan	580,000,000	6 Kegiatan	352,824,700	2 Kegiatan	-	- -			-						-	0.00%	0.00	6 Kegiatan	352,824,700	60%	60.83%		Refocusing
7.00		Penunjang kegiatan nasional di daerah	Dukungan daerah terhadap kegiatan nasional di daerah	5 Kegiatan	335,000,000	5 Kegiatan	46,261,797	2 Kegiatan	-	- -			-						-	0.00%	0.00	5 Kegiatan	46,261,797	100%	13.81%		Refocusing
8.00		Opersasional Database sistem informasi manajemen penyuluhan perikanan (SIMLUHDAYA KP)	Tersedianya Data Online Database penyuluh dan informasi Data	1 Laporan	23,890,500	1 Kegiatan	23,890,500	- -	-	- -			-						-	0.00%	0.00	1 Kegiatan	23,890,500	100%	100.00%		Refocusing
10.00		Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Provinsi	Terapresiasinya penyuluh yang handal	5 Kegiatan	48,255,400	1 Kali	48,255,400	- -	-	- -			-						-	0.00%	0.00	1 -	48,255,400	20%	100.00%		Refocusing
11.00		Pertemuan Kelompok mendukung peningkatan produksi perikanan	Pertemuan kelompok untuk peningkatan produksi perikanan	10 Kegiatan	350,000,000	6 Kegiatan	120,598,700	2 Kegiatan	-				-						-	0.00%	0.00	6 Kegiatan	120,598,700	60%	34.46%		Refocusing
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**99.30**			**62.25%**	**50.18%**		
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Baik**	**Sangat Baik**			**Cukup**	**Cukup**		
15		**Program Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**	**Peningkatan Koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Identifikasi,Inventarisasi, Sinkronisasi dan Koordinasi**	**14 Kegiatan**	**2,646,812,500**		**765,940,400**	**Tersediaya data dan Informasi serta inventarisasi Potensi potensi kelautan dan Perikanan**	**6,672,400**		-		**6,408,200**						**6,408,200**		**96.04**		**772,348,600**	**52.00%**	**29.18%**	DKPD	
1.00	**Meningkatkan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan**	Koordinasi Pembangunan KP	Tersusunnya program/kegiatan Kabupaten/Kota	16 Kegiatan	840,000,000	8 Kegiatan	260,397,300	2 Kegiatan	-	- -			-						-	0.00%	0.00	8 Kegiatan	260,397,300	50%	31.00%		Refocusing
		Sinkronisasi Program/Kegiatan Pengembangan SDKP Kab/Kota	Tersinkronnya Program kegiatan dengan Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	260,000,000	- -	9,530,000	1 Kegiatan	-		-		-						-	0.00%	0.00	- Kegiatan	9,530,000	0%	3.7%		Refocusing
2.00		Inventarisasi potensi kelautan dan perikan/indeks teknis kelautan dan perikanan	Terlaksananya kegiatan inventarisasi potensi KP	10 Laporan Informasi KP	481,250,000	6 Laporan dan Informasi KP	184,555,300	1 Laporan Informasi KP	-	-	1 Laporan dan Informasi KP	-	-						-	0.00%	0.00	6 Laporan dan Informasi KP	184,555,300	60%	38.35%		Refocusing
3.00		Monitoring dan evaluasi program kegiatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya monev program/kegiatan di kab/kota	10 Kegiatan	442,781,250	7 Kegiatan	156,568,300	2 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	-	2 Lp.	6,408,200				2 Lap	6,408,200	100.00%	0.00	9 Kegiatan	162,976,500	90%	36.81%		
4.00		Pelaksanaan Hari Nusantara	Terlaksananya peringatan hari nusantara	5 Kegiatan	442,781,250	2 Kegiatan	84,945,000	1 Kegiatan	-	- -	-		-						-	0.00%	0.00	2 Kegiatan	84,945,000	40%	19.18%		Refocusing
5.00		Monitoring dan evaluasi program kegiatan di Kabupaten/Kota (DAK)	Laporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	5 Laporan	180,000,000	-	69,944,500	**2 lap**	6,672,400	- -	-		2 Lp.	-				2 Lap	-	100.00%	0.00	1 Laporan	69,944,500	20%	38.86%		
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**96.04**			**43.33%**	**27.98%**		
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Baik**	**Sangat Baik**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
16		**Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Terselenggaranya forum koordinasi dengan Kabupaten/Kota**	**5 Kegiatan**	**1,230,418,750**		**907,334,100**		**4,128,000**		-		**4,128,000**					**1**	4,128,000			**3 Kegia**	**911,462,100**	**80.00%**	**74.08%**		
1	**Meningkatkan Komoditas Produksi Kelautan dan**	Temu koordinasi kelautan dan perikanan	Terlaksananya Rapat Kerja Teknis di Sulawesi Utara	5 Kegiatan	1,230,418,750	3 Kegiatan	907,334,100	1 Kegiatan	4,128,000	- -		1 Keg.	4,128,000					1 Lap	4,128,000	100.00%	1.00	4 Kegiatan	911,462,100	80%	74.08%		
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**100.00**			**80.00%**	**74.08%**		
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Baik**	**Sangat Baik**			**Baik**	**Baik**		
17		**Program Manajemen Pengelolaan DAK (DAK)**	**Peningkatan pengawasan dalam pengelolaan DAK**	**4 Kegiatan**	**101,682,821**		**61,304,100**		**72,155,821**		-		-					- -	-			**3** -	**83,304,100**	**100.00%**	**81.93%**		
	Meningkatkan Komoditas Produksi Kelautan dan Perikanan	Rapat Koordinasi	Tersedianyan Laporan /Notulen Raapat	2 Laporan	29,527,000	**3 lapran**	22,000,000	1 Laporan	-	- -	-		-						-	0.00%	0.00	1 **Laporan**	22,000,000	50%	74.51%		
		Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan DAK setiap kegiatan	3 Laporan	72,155,821	**6** -	61,304,100	3 laporan	72,155,821	- -	-		-						-	0.00%	0.00	**3** Lapor	61,304,100	100%	84.96%		

NO.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (2017, 2018 dan 2019		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg di Evaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peragkat daerah yang di Evaluasi (2021)			Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun 2021 (%)		Unit Peragkat Daerah Penanggung	Lokasi / KET
										Triwulan 1		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8,9,10,11			13 - 12/7*100%		14=6+12			15=14/5x100%		16	17
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				Kinerja			Kinerja	%		
	PERSENTASE LUAS WILAYAH LAUT DAN PESISIR YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100 %	1,718,212,544			100 %	1,138,080,000	96 %	-	95 %	11,065,000	96 %	399,400,000	97 %	711,615,000	2 lokasi	1,122,080,000	2.00%	98.59	2 Lokasi	1,122,080,000	2%	65.31%		
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	TERSEDIANYA DOKUMEN PERDA ZONASI RZWP3K DAN KAJIAN PERDA SERTA TERWUJUDNYA WILAYAH PERAIRAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG TERSHABILITASI	13 Kab/Kota	1,587,332,987			13 Kab/Kota	1,138,080,000		-		11,065,000		399,400,000		711,615,000	13 Kab/Kota	1,122,080,000	100.00%	0.99	13 Kab/Kota	1,122,080,000	100%	70.69%		
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	REVISI PERDA RZWP3K PROVINSI SULAWESI UTARA	1 Dokumen	37,332,989			1 Dokumen	23,080,000	1 Dok	-	1 Dok	11,065,000	48 %	-	100 %	12,015,000	1 Dokumen	23,080,000	100.00%	1.00	1 Lokasi	23,080,000	100%	100.00%	DKPD	Refocusing
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PENDAYAGUNAAN WILAYAH PERAIRAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG TERREHABILITASI	1 Dokumen	1,549,999,998			1 Dokumen	1,115,000,000	1 Dok	-	1 Dok	-	34 %	399,400,000		699,600,000	1 Dokumen	1,099,000,000	100.00%	0.99	1 Lokasi	1,099,000,000	100%	98.57%	DKPD	Refocusing
		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	TERLATIHNYA DAN TERSEDIANYA SARANA PENUNJANG USAHA KELOMPOK PEREMPUAN PESISIR DAN TERFASILITASI SARANA DAN PRASARANA MASYARAKAT PESISIR DAN NELAYAN DI DAERAH KEPULAUAN	13 Kab/Kota	130,879,557			13 Kab/Kota	-		-		-		-		-		-		-		-		-		
		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PELATIHAN DAN FASILITASI SARANA USAHA MASYARAKAT PESISIR	1 Tahun	120,694,752			1 Tahun	-		-		-		-		-	1 Dokumen	-	100.00%	#DIV/0!	1 Lokasi	-	100%	0.00%		Refocusing
		Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KELOMPOK NELAYAN YANG DIFASILITASI SARANA DAN PRASARANA	1 Tahun	10,184,805			1 Tahun	-		-		-		-		-	1 Dokumen	-	100.00%	#DIV/0!	1 Lokasi	-	100%	0.00%		Refocusing
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	98.59			100.00%	0.00%		
																		Peringkat Kinerja		Sangat Baik	Sangat Baik			Baik	Baik		
	Nilai Tukar Nelayan Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT	##### Ton	13,042,542,262			######### Ton	12,693,082,705	85,535.54 Ton	156,224,219	85,535.54 Ton	430,759,956	85,535.54 Ton	1,663,567,340	85,535.54 Ton	8,188,974,407		10,439,525,922		82.25	342,142.17 Ton					
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 LOKASI PERAIRAN LAUT DAN 1 PUD	100 %	2,150,971,014			100 %	1,845,075,380				107,387,800		-		1,623,487,920		1,730,875,720								
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	TERSEDIANYA PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	100 %	39,731,014			100 %	8,425,500				5,675,500	67 %	-	100 %	2,750,000	100 %	8,425,500	100.00%	1.00	3 Laporan	8,425,500	3%	100.00%	DKPD	Refocusing
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	TERSEDIANYA PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	100 %	2,111,240,000			100 %	1,836,649,880				101,712,300	5 %	-	98 %	1,620,737,920	100 %	1,722,450,220	100.00%	0.94	3 Laporan	1,722,450,220	3%	81.58%	DKPD	Refocusing
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	750 KAPAL PERIKANAN YANG MENGURUS IZIN	100 %	40,534,000			100 %	4,900,000				2,750,000		-		2,150,000		4,900,000								
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	TERLAKSANANYA PELAYANAN PERIZINAN KAPAL PERIKANAN DIATAS 10 GT	100 %	40,534,000			100 %	4,900,000				2,750,000	50 %	-	100 %	2,150,000		4,900,000	0.00%	1.00	3 Laporan	4,900,000	3%	12.09%	DKPD	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	2 LOKASI PELABUHAN PERIKANAN YANG DIBANGUN DAN DIMANFAATKAN	100 %	10,851,037,248			100 %	10,843,107,325		156,224,219		320,622,156		1,663,567,340		6,563,336,487		8,703,750,202								
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN YANG SESUAI STANDAR	100 %	10,175,460,000			100 %	10,175,460,000					16 %	1,656,131,497		6,396,247,670		8,052,379,167	0.00%	0.79	3 Laporan	8,052,379,167	3%	79.14%	DKPD	
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	TERLAKSANANYA FUNGSI PEMERINTAH DAN PENGUSAHA DI PELABUHAN PERIKANAN	100 %	675,577,248			100 %	667,647,325		156,224,219		320,622,156	73 %	7,435,843		167,088,817		651,371,035	0.00%	0.98	3 Laporan	651,371,035	3%	96.42%	DKPD	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		20.00%	82.25			3.00%	96.42%		
																		Peringkat Kinerja		Sangat Baik	Sangat Baik			Baik	Baik		
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI	##### Ton	3,931,247,193		100,578.06	######### Ton	3,910,116,738	100,578.06 Ton		100,578.06 Ton	489,994,819	100,578.06 Ton	623,653,513	100,578.06 Ton			3,438,204,329		87.93	402,312.25 Ton					
		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	TERLAKSANANYA MONITORING KELOMPOK BUDIDAYA PERIKANAN	100 %	19,999,202			100 %	-				0		0		0		0								
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	TERCAPAINYA JUMLAH PEMBUDIDAYA YANG MEMAHAMI SOP PENETAPAN SYARAT DAN IZIN KAPAL PENGANGKUT PEMBUDIDAYA IKAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 30 GT	100 %	19,999,202			100 %	-		-		-		0		0		-	0.00%	#DIV/0!	3 Laporan	-	3%	0.00%	DKPD	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	TERLAKSANANYA PEMBUDIDAYA PERIKANAN KJA LAUT DAN RL	100 %	3,911,247,991			100 %	3,910,116,738				489,994,819		623,653,513				3,438,204,329								
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA SERTA INDUK DAN BENIH PEMBUDIDAYA IKAN	100 %	2,853,000,000			100 %	2,897,097,047				-	13.13 %	377,103,900		2,069,560,466		2,446,664,366	0.00%	0.84	3 Laporan	2,446,664,366	3%	85.76%	DKPD	
		Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya dilaut dan lintas daerah kab/kota	TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PELATIHAN	100 %	30,176,300			100 %	-				-		-		-		-	0.00%	#DIV/0!	3 Laporan	-	3%	0.00%	DKPD	
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	TERSEDIANYA BIBIT INDUK UNTUK PEMBUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DAN LAUT SERTA PAKAN UNTUK BBI TATELI	100 %	1,017,791,572			100 %	1,013,019,691				489,994,819	72.71 %	246,549,613		254,995,531		991,539,963	0.00%	0.98	3 Laporan	991,539,963	3%	97.42%	DKPD	
		Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	TERLAKSANANYA PEMBINAAN SERTIFIKASI CPIB DAN CBIB DI UPR DAN BBI LOKAL UNIT PEMBENIHAN IKAN	100 %	10,280,119			100 %	-				-	0 %	0		-		-	0.00%	0.00	3 Laporan	-	3%	0.00%	DKPD	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	87.93			3.00%	0.00%		
																		Peringkat Kinerja		Sangat Baik	Sangat Baik			Baik	Baik		
	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	95 %	1,837,003,312			95 %	2,741,103,331	30%		65%	81,962,471	80 %	100,441,188	97 %	1,547,167,062		1,732,570,721		63.21						
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	TERLAKSANANYA KERJA SAMA OPERASI PENGAWASAN, TERLAKSANANYA PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT	15 Kab/Kota	1,815,743,312			15 Kab/Kota	2,736,143,331				81,962,471		100,441,188		1,545,207,062		1,727,610,721								
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	TERWASINYA KEGIATAN ILLU FISHING DAN PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	15 Kab/Kota	1,815,743,312			15 Kab/Kota	2,736,143,331	30%		65%	81,962,471	80 %	100,441,188	97 %	1,545,207,062		1,727,610,721	0.00%	0.63	3 Laporan	1,727,610,721	63%	63.14%	DKPD	

NO.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (2017, 2018 dan 2019		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg di Evaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peragkat daerah yang di Evaluasi (2021)			Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun 2021 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung	Lokas i/ KET
										Triwulan 1		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8,9,10,11			13 - 12/7*100%		14=6+12			15=14/5x100%		16	17
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp							Kinerja	%		
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	TERLAKSANANYA PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS YANG MEMBANTU PENGAWASAN PERIKANAN	15 Kab/Kota	21,260,000			15 Kab/Kota	4,960,000						0		1,960,000			4,960,000									
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	MENINGKATNYA POKMASWAS YANG DIBINA	15 Kab/Kota	21,260,000			15 Kab/Kota	4,960,000			3,000,000	60 %	0		1,960,000		4,960,000	0.00%	1.00	3	Laporan	4,960,000	100%	100.00%	DKPD	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	63.21				100.00%	100.00%		
																		Peringkat Kinerja			Sangat Baik	Sangat Baik				Baik	Baik		
	KONSUM SI IKAN (Kg/Kapita/Tahun)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Terlaksananya Ekspor Produk Keluatan dan Perikanan	65 (Kg/Kapita/Tahun)	557,242,308			65 (Kg/Kapita/Tahun)	466,637,161	########## (Kg/Kapita/Tahun)		305,613.29 (Kg/Kapita/Tahun)	215,073,990	########## (Kg/Kapita/Tahun)	108,362,517	########## (Kg/Kapita/Tahun)	116,911,209		440,347,716			94.37							
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	MENINGKATNYA JUMLAH SKP YANG DIKELUARKAN / DITERBITKAN	100 %	526,908,496			100 %	466,637,161				215,073,990		108,362,517		116,911,209		440,347,716										
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	TERLAKSANANYA PELATIHAN TEKNIS MASYARAKAT PENGEMBANGAN USAHA DAN MENINGKATNYA JUMLAH OLAHAN HASIL PERIKANAN	100 %	30,204,335			100 %	3,900,000				2,175,000	56 %	0		1,725,000		3,900,000	0.00%	1.00	3	Laporan	3,900,000	3%	100.00%	DKPD	
		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Bahuasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	TERLAKSANANYA PEMBINAAN UKM PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	100 %	496,704,161			100 %	462,737,161				212,898,990	69 %	108,362,517		115,186,209		436,447,716	0.00%	0.94	3	Laporan	436,447,716	3%	94.32%	DKPD	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	TERSEDIANYA DATA KEBUTUHAN BAHAN BAKU USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA SERTA TERPANTAUNYA HARGA IKAN SECARA TERATUR DAN BERKESINAMBUNGAN	100 %	30,333,812			100 %	-																			
		Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	TERLAKSANANYA MONITORING DAN SURVEI KETERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN HARGA IKAN DI SULUT	100 %	30,333,812			100 %	-				-		0		0		-	0.00%	#DIV/0!	3	Laporan	-	3%	0.00%	DKPD	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	94.37				3.00%	0.00%		
																		Peringkat Kinerja			Sangat Baik	Sangat Baik				Baik	Baik		
									43,492,800.882										35,651,273.428										
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)			77.65%	81.97				98.00%	97.16%		
																		Peringkat Kinerja			Tidk ada Kep	Tidk ada Kep				Baik	Baik		
	JUMLAH ANGGARAN & REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				39.267.336.923		100.578		38.440.469.668		3.804.418.819		9.279.374.969		3.125.131.682		10.564.667.678		-										
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									=		=		=		=		Rata-rata Capaian Kinerja (%)			8.63%					97.00%	98.00%		
	PRESIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM [PROGRAM 1 S/D PROGRAM 6]							Belum tercapainya kinerja keuangan dan Kegiatan										Perinrkat Kinerja			Baik								
	FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :							Pengiriman data yang cepat dariPihak ketiga dan Kab.Kota																					
	FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :							Adanya Pandemi COVID 19 dan ReCOFUSING Anggaran sehingga mempengaruhi capaian kinerja																					
	TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :							Mempercepat pelaksanaan kegiatan dan perluadanya anggaran perubahan																					

FORMULIR E.55
EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang Mengacu pada Sasaran RKPD Provinsi:
1
2
3

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PARIWISATA																											
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut**					**100 %**	**10,784,960,526**		**2,349,255,580**		**3,025,638,452**		**-**		**4,422,863,614**		**9,797,757,646**	**100%**	**83%**		**-**		**-**		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai LKIP Dinas Pariwisata**					**B Nilai**	**23,491,000**		**-**		**6,268,800**		**-**		**14,058,800**		**20,327,600**				**-**		**-**		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen					2 Dokum	17,000,000	0 Dokumen	-	2 Dokumen	6,268,800	Dokumen	-	Dokumen	10,370,000	2 Dokumen	16,638,800	100%	98%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen					2 Dokum	3,493,200	0 Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	2 Dokumen	1,863,800	2 Dokumen	1,863,800	100%	53%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen					3 Dokum	2,997,800	2 Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	1,825,000	3 Dokumen	1,825,000	100%	61%					Dispar	Sulut
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Nilai LKIP Dinas Pariwisata**					**B Nilai**	**8,986,814,178**		**2,303,739,030**		**2,525,046,767**		**-**		**3,430,633,448**		**8,259,419,245**				**-**		**-**		
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan Tunjangan ASN					14 Bulan	7,965,335,482	3 Bulan	2,030,294,829	3 Bulan	2,282,748,956	3 Bulan	-	5 Bulan	2,929,746,200	14 Bulan	7,242,789,985	100%	91%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan					12 Bulan	1,004,083,148	3 Bulan	273,444,201	3 Bulan	238,831,011	3 Bulan	-	3 Bulan	489,686,248	12 Bulan	1,001,961,460	100%	100%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Jumlah bulan					12 Bulan	3,477,000	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	2,310,000	12 Bulan	2,310,000	100%	66%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen					1 Dokum	3,485,545	1 Dokumen	-	Dokumen	3,466,800	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	3,466,800	100%	99%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeste	Jumlah dokumen					17 Dokum	7,967,000	0 Dokumen	-	Dokumen	-	10 Dokumen	-	7 Dokumen	6,996,000	17 Dokumen	6,996,000	100%	88%					Dispar	Sulut
		Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen					1 Dokum	2,466,003	0 Dokumen	-	Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1,895,000	1 Dokumen	1,895,000	100%	77%					Dispar	Sulut
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Nilai LKIP Dinas Pariwisata**					**B Nilai**	**133,760,000**		**-**		**6,600,000**		**-**		**125,199,760**		**131,799,760**				**-**		**-**		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai					120 orang	110,000,000	0 orang	-	orang	-	orang	-	120 orang	108,504,000	120 orang	108,504,000	100%	99%					Dispar	Sulut
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan					1 kegiata	23,760,000	0 kegiatan	-	1 kegiatan	6,600,000	kegiatan	-	kegiatan	16,695,760	1 kegiatan	23,295,760	100%	98%					Dispar	Sulut
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Nilai LKIP Dinas Pariwisata**					**B Nilai**	**431,255,804**		**-**		**102,475,429**		**-**		**319,567,210**		**422,042,639**								
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan					12 Bulan	15,000,002	3 Bulan	-	3 Bulan	4,026,000	3 Bulan	-	3 Bulan	10,889,000	12 Bulan	14,915,000	100%	99%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan					12 Bulan	60,332,500	3 Bulan	-	3 Bulan	13,516,000	3 Bulan	-	3 Bulan	41,964,900	12 Bulan	55,480,900	100%	92%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan					12 Bulan	17,532,800	3 Bulan	-	3 Bulan	6,580,900	3 Bulan	-	3 Bulan	7,353,000	12 Bulan	13,933,900	100%	79%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan					12 Bulan	338,390,502	3 Bulan	-	3 Bulan	78,352,529	3 Bulan	-	3 Bulan	259,360,310	12 Bulan	337,712,839	100%	100%					Dispar	Sulut
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Nilai LKIP Dinas Pariwisata**					**B Nilai**	**69,099,998**		**-**		**12,900,000**		**-**		**56,082,000**		**68,982,000**								
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin					6 Unit	69,099,998	0 Unit	-	1 Unit	12,900,000	Unit	-	5 Unit	56,082,000	6 Unit	68,982,000	100%	100%					Dispar	Sulut
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Nilai LKIP Dinas Pariwisata**					**B Nilai**	**423,435,837**		**10,383,957**		**174,858,791**		**-**		**211,865,035**		**397,107,783**								
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan					12 Bulan	313,435,837	3 Bulan	10,383,957	3 Bulan	137,407,711	3 Bulan	-	3 Bulan	150,686,645	12 Bulan	298,478,313	100%	95%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan					12 Bulan	110,000,000	3 Bulan	-	3 Bulan	37,451,080	3 Bulan	-	3 Bulan	61,178,390	12 Bulan	98,629,470	100%	90%					Dispar	Sulut

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Nilai LKIP Dinas Pariwisata**						**717,103,709**		**35,132,593**		**197,488,665**		-		**265,457,361**		**498,078,619**								
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan					12 Bulan	185,232,222	3 Bulan	3,658,900	3 Bulan	43,320,770	3 Bulan	-	3 Bulan	96,606,799	12 Bulan	143,586,469	100%	78%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan					12 Bulan	16,000,000	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	3,275,000	12 Bulan	3,275,000	100%	20%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan					12 Bulan	335,882,899	3 Bulan	13,988,308	3 Bulan	74,736,348	3 Bulan	-	3 Gedung	82,801,896	12 Gedung	171,526,552	100%	51%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan					12 Bulan	179,988,588	3 Bulan	17,485,385	3 Bulan	79,431,547	3 Bulan	-	3 Bulan	82,773,666	12 Bulan	179,690,598	100%	100%					Dispar	Sulit
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**83.38%**						
																		Peringkat Kinerja		**SANGAT TINGGI**	**TINGGI**						
2	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Sulawesi Utara	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN**					**100 %**	**8,950,589,017**		**643,644**		**335,410,066**		-		**5,992,371,384**		**6,328,425,094**	**82%**	**63%**		-		-		
		Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	**Persentase PAD Sektor pariwisata**					**0 %**	**51,629,000**		-		**14,245,000**		-		**23,585,000**		**37,830,000**								
		Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Objek daya tarik wisata unggulan					2 objek	13,769,000	0 objek	-	objek	-	objek	-	objek	-	0 objek	-	0%	0%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah laporan					12 laporan	37,860,000	0 laporan	-	6 laporan	14,245,000	laporan	-	6 laporan	23,585,000	12 laporan	37,830,000	100%	100%					Dispar	Sulut
		Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	**Jumlah entitas pengelolaan KSPP**					**2 Kawasa**	**297,890,200**		-		-		-		**246,546,900**		**246,546,900**								
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah kegiatan					1 kegiatan	297,890,200	0 kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	1 kegiatan	246,546,900	1 kegiatan	246,546,900	100%	83%					Dispar	Sulut
		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	**Jumlah entitas pengelolaan destinasi**					**3 Destina**	**8,601,069,817**		**643,644**		**321,165,066**		-		**5,722,239,484**		**6,044,048,194**								
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah kegiatan					2 kegiatan	239,308,000	0 kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	2 kegiatan	204,366,350	2 kegiatan	204,366,350	100%	85%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Pengadaaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	Jumlah unit sarana prasarana					10 unit	8,277,248,162	0 unit	643,644	unit	321,165,066	unit	-	9 unit	5,484,093,134	9 unit	5,805,901,844	90%	70%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah laporan					12 laporan	84,513,655	0 laporan	-	laporan	-	laporan	-	12 laporan	33,780,000	12 laporan	33,780,000	100%	40%					Dispar	Sulut
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**81.67%**	**63.03%**						
																		Peringkat Kinerja		**TINGGI**	**RENDAH**						

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
3	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Sulawesi Utara	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA** **JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA**					**150,000** **orang wisnus** **15,000** **orang wisman**	**1,498,915,482** -		-		**52,537,476**		-		**53,880,500**		**1,474,336,680**	**100%**	**97%**						
		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalaam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	**Tingkat hunian akomodasi** **Rata-rata lama tinggal**					**15** **%** **2.8** **hari**	**1,498,915,482**		-		**52,537,476**		-		**53,880,500**		**1,474,336,680**								
		Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah media promosi					4 media	322,195,929	0 media	-	media	-	media	-	4 media	318,515,000	4 media	318,515,000	100%	99%					Dispar	Dalam & Luar Negeri
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri	Jumlah kegiatan					2 kegiatan	1,101,215,862	0 kegiatan	-	kegiatan	34,895,876	kegiatan	-	2 kegiatan	1,049,403,704	2 kegiatan	1,084,299,580	100%	98%					Dispar	Dalam & Luar Negeri
		Sub Kegiatan Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, baik dalam dan luar negeri	Jumlah kegiatan					2 kegiatan	32,922,284	0 kegiatan	-	kegiatan	17,641,600	kegiatan	-	2 kegiatan	15,270,500	2 kegiatan	32,912,100	100%	100%					Dispar	Dalam & Luar Negeri
		Sub Kegiatan Peningkatan Kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah kegiatan					2 kegiatan	42,581,407	0 kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	2 kegiatan	38,610,000	2 kegiatan	38,610,000	100%	91%					Dispar	Dalam & Luar Negeri
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%) **Peringkat Kinerja**		**100.00%** **SANGAT TINGGI**	**96.99%** **SANGAT TINGGI**						
4	Meningkatnya Pengembangan Industri dan Ekonomi Kreatif	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU**					**1.30** **%**	**51,453,407**		-		**41,819,652**		-		**6,190,000**		**48,009,652**	**100%**	**93%**						
		Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	**Jumlah kota kreatif**					**1** **Kota**	**51,453,407**		-		**41,819,652**		-		**6,190,000**		**48,009,652**								
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah laporan					15 Laporan	51,453,407	4 Laporan	-	7 Laporan	41,819,652	Laporan	-	4 Laporan	6,190,000	15 Laporan	48,009,652	100%	93%					Dispar	Sulut
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%) **Peringkat Kinerja**		**100.00%** **SANGAT TINGGI**	**93.31%** **SANGAT TINGGI**						
5	Meningkatnya Pengembangan Industri dan Ekonomi Kreatif	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF (Rp.)**					**########** **Rp**	**961,320,645**		-		-		-		**622,328,600**		**622,328,600**	**100%**	**63%**						
		Kegiatan Pelaaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	**Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi**					**25** **%**	**961,320,645**		-		-		-		**622,328,600**		**622,328,600**								
		Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan	Jumlah kegiatan					2 Kegiatan	124,746,315	0 Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	2 Kegiatan	102,513,800	2 Kegiatan	102,513,800	100%	82%					Dispar	Sulut

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
		Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kegiatan					2	Kegiatan 183,642,200	0	Kegiatan -		Kegiatan -		Kegiatan -	2	Kegiatan 138,105,900	2	Kegiatan 138,105,900	100%	75%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Pelatihan berbasis kompetensi bidang homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah kegiatan					3	Kegiatan 489,030,130	0	Kegiatan -		Kegiatan -		Kegiatan -	3	Kegiatan 335,951,000	3	Kegiatan 335,951,000	100%	69%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan					2	Kegiatan 163,902,000	0	Kegiatan -		Kegiatan -		Kegiatan -	2	Kegiatan 45,757,900	2	Kegiatan 45,757,900	100%	28%					Dispar	Sulut
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**63.50%**						
																		Peringkat Kinerja		**SANGAT TINGGI**	**RENDAH**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**22,247,239,077**		**2,349,899,224**		**3,455,405,646**		-		**11,097,634,098**		**18,270,857,672**								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PRO																				**96.33%**	**80.04%**						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 15)																				**SANGAT TINGGI**	**TINGGI**						
PERMASALAHAN :						**Terdapat beberapa pembangunan fisik dengan anggaran yang besar, tidak selesai 100%, sehingga anggaran yang tidak terserap cukup banyak. Anggaran pembangunan fisik yang tidak selesai, sumber dananya berasal dari PEN yang masuk pada anggaran perubahan**																					
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :						**Koordinasi dengan bidang terkait dan PPTK untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas, serta anggaran untuk pembangunan fisik akan dilaksanakan pada awal tahun.**																					

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021

Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d RENJA Perangkat		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA perangkat daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung awab	KET.
										I		II		III		IV											
	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				Kinerja	Rp	Kin	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI																									
1		***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat**	**46,460,719,076**			**Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat**	**46,460,719,076**		**7,799,650,403**		**23,056,530,313**		**32,781,036,544**		**41,704,341,884**		**41,712,441,884**					**41,712,441,884**				
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Pertanian dan Peternakan	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	**Presentase keterpaduan**		**73,434,948**				**73,434,948**		**27,448,800**		**51,335,200**		**60,057,400**		**73,086,300**		**73,086,300**					**73,086,300**				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	3 Dok	41,972,548			3 Dok	41,972,548	1 Dok	27,448,800	1 Dok	29,872,800	2 Dok	37,595,750	3 Dok	41,635,750	3 Dok	41,635,750	100.0 %	99.20 %	3 Dok	41,635,750	100.00 %	99.20 %		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	2 Dok	5,000,000			2 Dok	5,000,000	- Dok	-	0 Dok	0.00	0 Dok	-	2 Dok	4,999,400	2 Dok	4,999,400	100.0 %	99.99 %	2 Dok	4,999,400	100.00 %	99.99 %		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyukuran Kinerja	3 Dok	26,462,400			3 Dok	26,462,400	1 Dok	-	1 Dok	21,462,400	2 Dok	22,461,650	3 Dok	26,451,150	3 Dok	26,451,150	100.0 %	99.96 %	3 Dok	26,451,150	100.00 %	99.96 %		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyerapan Anggaran (Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah)**		**44,895,691,403**				**44,895,691,403**		**7,636,621,296**		**22,647,470,066**		**31,819,985,199**		**40,175,594,519**		**40,175,594,519**					**40,175,594,519**				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan	14 Bln	38,753,344,620			14 Bln	38,753,344,620	3 Bln	6,667,027,111	6 Bln	20,129,599,287	9 Bln	27,800,397,335	14 Bln	34,104,899,348	14 Bln	34,104,899,348	100.0 %	88.01 %	14 Bln	34,104,899,348	100.00 %	88.01 %		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ketersediaan	12 Bln	6,051,612,909			12 Bln	6,051,612,909	3 Bln	957,916,585	6 Bln	2,486,702,589	9 Bln	3,960,520,697	12 Bln	5,980,517,969	12 Bln	5,980,517,969	100.0 %	98.83 %	12 Bln	5,980,517,969	100.00 %	98.83 %		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Teradianya kebutuhan administrasi	12 Bln	67,100,040			12 Bln	67,100,040	3 Bln	8,488,000	6 Bln	25,156,350	9 Bln	43,649,077	12 Bln	66,732,230	12 Bln	66,732,230	100.0 %	99.45 %	12 Bln	66,732,230	100.00 %	99.45 %		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Penyampaian Laporan Keuangan	12 Bln	8,293,638			12 Bln	8,293,638	3 Bln	1,795,600	6 Bln	2,824,940	9 Bln	8,092,190	12 Bln	8,173,726	12 Bln	8,173,726	100.0 %	98.55 %	12 Bln	8,173,726	100.00 %	98.55 %		
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase Penyampaian Laporan Keuangan	3 Dok	15,340,196			3 Dok	15,340,196	1 Dok	1,394,000	1 Dok	3,186,900	2 Dok	7,325,900	3 Dok	15,271,246	3 Dok	15,271,246	100.0 %	99.55 %	3 Dok	15,271,246	100.00 %	99.55 %		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase kehadiran dalam**		**68,653,529**				**68,653,529**		**14,521,403**		**40,300,303**		**55,868,994**		**81,224,724**		**81,224,724**					**81,224,724**				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan	12 Bln	55,921,704			12 Bln	55,921,704	3 Bln	14,521,403	6 Bln	29,825,703	9 Bln	44,794,394	12 Bln	68,493,124	12 Bln	68,493,124	100.0 %	###### %	12 Bln	68,493,124	100.00 %	122.48 %		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan	12 Bln	12,731,825			12 Bln	12,731,825	3 Bln	-	6 Bln	10,474,600	9 Bln	11,074,600	12 Bln	12,731,600	12 Bln	12,731,600	100.0 %	100.0 %	12 Bln	12,731,600	100.00 %	100.00 %		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rata- rata Presentase Kinerja ASN (Dinas**		**746,277,200**				**746,277,200**		**65,311,755**		**152,398,456**		**417,717,912**		**715,299,300**		**715,299,300**					**715,299,300**				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Penyediaan jasa	12 Bln	746,277,200			12 Bln	746,277,200	3 Bln	65,311,755	6 Bln	152,398,456	9 Bln	417,717,912		715,299,300	12 Bln	715,299,300	100.0 %	95.85 %	12 Bln	715,299,300	100.00 %	95.85 %		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase barang milik daerah di (Dinas Pertanian &**		**505,217,955**				**505,217,955**		**54,187,604**		**111,585,543**		**264,772,914**		**500,199,684**		**500,199,684**					**500,199,684**				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas Jabatan	12 Bln	254,889,095			12 Bln	254,889,095	3 Bln	35,877,056	6 Bln	56,357,701	9 Bln	116,321,487	12 Bln	253,170,531	12 Bln	253,170,531	100.0 %	99.33 %	12 Bln	253,170,531	100.00 %	99.33 %		
		Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional dan lapangan	12 Bln	148,522,156			12 Bln	148,522,156		12,113,552		32,649,996		96,085,426	12 Bln	146,729,628	12 Bln	146,729,628	100.0 %				146,729,628				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	12 Bln	73,399,938			12 Bln	73,399,938	3 Bln	2,625,000	6 Bln	12,083,000	9 Bln	35,188,955	12 Bln	73,350,855	12 Bln	73,350,855	100.0 %	99.93 %	12 Bln	73,350,855	100.00 %	99.93 %		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 Gedung	22,406,766			1 Gedung	22,406,766	- Gedung	3,571,996	1 Gedung	8,494,846	1 Gedung	11,513,046	1 Gedung	20,948,670	1 Gedung	20,948,670	100.0 %	93.49 %	1 Gedung	20,948,670	100.00 %	93.49 %		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	12 Bln	6,000,000			12 Bln	6,000,000	- Bln	-	6 Bln	2,000,000	9 Bln	5,664,000	12 Bln	6,000,000	12 Bln	6,000,000	100.0 %	###### %	12 Bln	6,000,000	100.00 %	100.00 %		
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Persenatase administrasi BMD**		**22,225,541**				**22,225,541**		**1,559,545**		**13,870,245**		**18,334,045**		**22,137,277**		**22,137,277**					**22,137,277**				
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	15 Kab/kota	12,055,500			15 Kab/kota	12,055,500	- Kab/kota	-	5 Kab/kota	9,691,500	10 Kab/kota	10,391,500	15 Kab/kota	12,055,500	15 Kab/kota	12,055,500	100.0 %	k %	15 Kab/kota	12,055,500	100.00 %	100.00 %		

	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d RENJA Perangkat		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA perangkat daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	KET.
										I		II		III		IV											
	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				Kinerja	Rp	Kin	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang	12 Bln	3,375,782			12 Bln	3,375,782	3 Bln	361,000	6 Bln	1,151,600	9 Bln	4,415,000	12 Bln	3,375,300	12 Bln	3,375,300	100.0 %	99.99 %	12 Bln	3,375,300	100.00 %	99.99 %		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penatausahaan	1 TA	6,794,259			1 TA	6,794,259	- TA	1,198,545	1 TA	3,027,145	1 TA	3,527,545	1 TA	6,706,477	1 TA	6,706,477	100.0 %	98.71 %	1 TA	6,706,477	100.0 %	98.71 %		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Realisasi Pengadaan**		**12,100,000**				**12,100,000**		-		**8,100,000**		**8,100,000**		**12,100,000**		**8,100,000**		%				**8,100,000**				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan penunjang	6 Unit	12,100,000			6 Unit	12,100,000	- Unit	-	- Unit	8,100,000	2 Unit	8,100,000		8,100,000	6 Unit	8,100,000	100.0 %	66.94 %	6 Unit	8,100,000	100.00 %	66.94 %		
		Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi**		**137,118,500**				**137,118,500**		-		**31,470,500**		**136,200,080**		**136,800,080**		**136,800,080**		%				**136,800,080**				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN dan THL yang menggunakan	1 Keg	114,400,000			1 Keg	114,400,000	- Keg	-	1 Keg	16,800,000	1 Keg	114,081,580	1 Keg	114,081,580	1 Keg	114,081,580	100.0 %	99.72 %	1 Keg	114,081,580	100.0 %	99.72 %		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Penilaian Kinerja ASN dan THL	15 Kab/kota	22,718,500			15 Kab/kota	22,718,500	- Kab/kota	-	5 Kab/kota	14,670,500	10 Kab/kota	22,118,500	15 Kab/kota	22,718,500	15 Kab/kota	22,718,500	100.0 %	100.0 %	15 Kab/kota	22,718,500	100.00 %	100.00 %		
																				100.0 %	98.0 %						
2		***PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN***	**Persentasi peningkatan luas tambah tanam tanaman pangan dan hortikultura dan**		**2,293,398,426**				**2,293,398,426**		**138,424,500**						**2,285,569,898**		**2,285,569,898**				**2,285,569,898**				
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	**Sarana pertanian yang diberikan**		**27,818,618**				**27,818,618**		**1,198,500**		**10,398,500**		**19,198,500**		**27,398,500**		**27,398,500**				**27,398,500**				
		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan pengawasan sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan,	12 Bln	27,818,618			12 Bln	27,818,618	3 Bln	1,198,500	6 Bln	10,398,500	9 Bln	19,198,500	12 Bln	27,398,500	12 Bln	27,398,500	100.0 %	98.49 %	12 Bln	27,398,500	100.00 %	98.49 %		
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	**Dokumen pengawasan benih yang beredar**		**593,721,443**				**593,721,443**		**53,363,000**		**487,483,000**		**523,614,000**		**592,040,000**		**592,040,000**				**592,040,000**				
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit hortikultura	Peningkatan luas tanam tanaman hortikultura	1 Keg	392,549,000			1 Keg	392,549,000	- Keg	-	1 Keg	390,895,000	1 Keg	390,895,000	1 Keg	390,895,000	1 Keg	390,895,000	100.0 %	99.58 %	1 Keg	390,895,000	100.0 %	99.58 %		
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Tanaman Pangan	Peningkatan luas tanam tanaman pangan (Mandiri)	12 Bln	201,172,443			12 Bln	201,172,443	3 Bln	53,363,000	6 Bln	96,588,000	9 Bln	132,719,000	12 Bln	201,145,000	12 Bln	201,145,000	100.0 %	99.99 %	12 Bln	201,145,000	100.00 %	99.99 %		
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	**Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro**		**272,259,365**				**272,259,365**		**83,863,000**		**194,863,688**		**228,651,688**		**266,532,398**		**266,532,398**				**266,532,398**				
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah dokumen pelaksanaan sistem manajemen mutu	12 Bln	230,850,884			12 Bln	230,850,884	3 Bln	83,863,000	6 Bln	170,859,920		202,247,920	12 Bln	226,498,420	12 Bln	226,498,420	100.0 %	98.11 %	12 Bln	226,498,420	100.00 %	98.11 %		
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah dokumen pelaksanaan sistem manajemen mutu SDG tumbuhan dan	1 Keg	41,408,481			1 Keg	41,408,481	- Keg	26,403,768	1 Keg	24,003,768		26,403,768	1 Keg	40,033,978	1 Keg	40,033,978	100.0 %	96.68 %	1 Keg	40,033,978	100.00 %	96.68 %		
		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan serta pakan kewenangan Provinsi	**Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan**		**1,399,599,000**				**1,399,599,000**		-		**750,148,775**		**838,288,775**		**1,399,599,000**		**1,399,599,000**				**1,399,599,000**				
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	1 Keg	1,399,599,000			1 Keg	1,399,599,000	- Keg	-	1 Keg	750,148,775		838,288,775	1 Keg	1,399,599,000	1 Keg	1,399,599,000	100.0 %	100.0 %	1 Keg	1,399,599,000	100.00 %	100.00 %		
																				100.0 %	98.8 %						

	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d RENJA Perangkat		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA perangkat daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	KET.
										I		II		III		IV											
	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				Kinerja	Rp	Kin	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
3		***PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN***	**Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Permendagri 18/2020)**		**1,832,949,096**				**1,832,949,096**		**197,644,000**						**1,802,287,149**		**1,802,287,149**				**1,802,287,149**				
		Penataan Prasarana Pertanian	**Dokumen panataan prasarana pertanian**		**1,832,949,096**				**1,832,949,096**		**197,644,000**		**199,268,000**		**607,996,750**		**1,802,287,149**		**1,802,287,149**				**1,802,287,149**				
		Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas	1 Dok	650,001,735			1 Dok	650,001,735	- Dok	195,000,000	1 Dok	195,000,000	1 Dok	455,000,000	1 Dok	650,000,000	1 Dok	650,000,000	100.0 %	100.0 %	1 Dok	650,000,000	100.00 %	100.00 %		
		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas	1 Keg	61,364,000			1 Keg	61,364,000	- Keg	-	- Keg	0.00	- Keg	561,900	1 Keg	61,280,200	1 Keg	61,280,200	100.0 %	99.86 %	1 Keg	61,280,200	100.00 %	99.86 %		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dokumen laporan koordinasi, Sinkronisasi dan	1 Keg	1,110,975,065			1 Keg	1,110,975,065	- Keg	-	- Keg	0.00	1 Keg	144,552,100	1 Keg	1,080,405,399	1 Keg	1,080,405,399	100.0 %	97.25 %	1 Keg	1,080,405,399	100.00 %	97.25 %		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin	12 Bln	10,608,296			12 Bln	10,608,296	3 Bln	2,644,000	6 Bln	4,268,000	9 Bln	7,882,750	12 Bln	10,601,550	12 Bln	10,601,550	100.0 %	99.94 %	12 Bln	10,601,550	100.00 %	99.94 %		
								Rata-rata Capaian Kinerja												100.0 %	99.3 %						
								Peringkat Kinerja																			
4		***PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER***	**Persentasi Penurunan Kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular (RKP)**		**267,652,703**				**267,652,703**		**39,976,700**								**266,228,514**				**266,228,514**				
		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	**Dokumen Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan**		**267,652,703**				**267,652,703**		**39,976,700**		**178,968,964**		**199,525,964**		**266,228,514**		**266,228,514**				**266,228,514**				
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel penyakit hewan dan nanyan asal hewan	12 Bln	267,652,703			12 Bln	267,652,703	3 Bln	39,976,700	6 Bln	178,968,964	9 Bln	199,525,964	12 Bln	266,228,514	12 Bln	266,228,514	100.00 %	99.47 %	12 Bln	266,228,514	100.00 %	99.47 %		
								Rata-rata Capaian Kinerja												100.00	99.47						
								Peringkat Kinerja																			
5		***PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN***	**Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT**		**293,053,056**				**293,053,056**								**176,556,020**		**176,556,020**				**176,556,020**				
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	**Menurunnya persentase kerugian akibat bencana**		**293,053,056**				**293,053,056**		**15,010,120**		**95,681,170**		**131,306,420**		**176,556,020**		**176,556,020**				**176,556,020**				
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (OPT) (Permendagri	1 TA	145,053,056			1 TA	145,053,056	- TA	15,010,120	1 TA	95,681,170	1 TA	131,306,420	1 TA	144,956,420	1 TA	144,956,420	100.0 %	99.93 %	1 TA	144,956,420	100.0 %	99.93 %		
		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan,	Persentase fasilitasi pencegahan bencana (mandiri)	1 Keg	148,000,000			1 Keg	148,000,000	- Keg	-	- Keg	-		-	1 Keg	31,599,600	1 Keg	31,599,600	100.0 %	21.35 %	1 Keg	31,599,600	100.00 %	21.35 %		
								Rata-rata Capaian Kinerja												100.0 %	60.6 %						
								Peringkat Kinerja																			

	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d RENJA Perangkat		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA perangkat daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	KET.
				I		II		III		IV																	
	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				Kinerja	Rp	Kin	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
6		***PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN***	**Cakupan Bina Kelompok**		**472,691,586**				**472,691,586**		**3,600,000**						**440,102,147**		**440,102,147**				**440,102,147**				
		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	**Dokumen Pengembangan Ketenagaan**		**271,279,507**				**271,279,507**		-		**115,798,240**		**229,208,900**		**239,108,900**		**239,108,900**				**239,108,900**				
		Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Meningkatnya Kapasitas Penyuluh	15 Kab/kota	109,552,197			15 Kab/kota	109,552,197	- Kab/kota	-	- Kab/kota	0.00	10 Kab/kota	83,192,160	15 Kab/kota	83,192,160	15 Kab/kota	83,192,160	100.0 %	75.9 %	15 Kab/kota	83,192,160	100.00 %	75.94 %		
		Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Meningkatnya Kapasitas Penyuluh Pertanian Swadaya	15 Kab/kota	161,727,310			15 Kab/kota	161,727,310	- Kab/kota	-	5 Kab/kota	115,798,240	10 Kab/kota	146,016,740	15 Kab/kota	155,916,740	15 Kab/kota	155,916,740	100.0 %	96.4 %	15 Kab/kota	155,916,740	100.00 %	96.41 %		
		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	**Persentase Pengembangan**		**201,412,079**				**201,412,079**		3,600,000		**160,142,847**		**169,202,847**		**200,993,247**		**200,993,247**				**200,993,247**				
		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan	12 Bln	201,412,079			12 Bln	201,412,079	- Bln	3,600,000	6 Bln	160,142,847	9 Bln	169,202,847	12 Bln	200,993,247	12 Bln	200,993,247	100.0 %	99.8 %	12 Bln	200,993,247	100.00 %	99.79 %		
								Rata-rata Capaian Kinerja												100.0 %	90.7 %						
								Peringkat Kinerja																			

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.0 % 91.1 %

Peringkat Kinerja **Sangat Tinggi**

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM BL. Rp. 11.812.739.867 , Realisasi Rp.3.172.000.928

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 6) Capaian Kinerja 100 %. Anggaran 91,1%

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 6)

FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :

- Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah
- Kegiatan yang bersifat kontraktual banyak yang telah dilaksanakan

FORM E-55

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI

EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN II DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra pada Tahun 2016 -2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) / Target Renstra pada Tahun 2021-2025 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Relaisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
										TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13= 6+12		14 = 13/5 x 100%		15	16
				Kinerja	RP	Kinerj	RP	Kinerja	RP	Kinerja	RP	Kinerja	RP	Kinerja	RP	Kinerja	RP	Kinerja	RP	Kinerja	RP	Kinerja	RP		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Meningkatkan Akuntabilits Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Perangkat Daerah: Nilai LKIP SKPD sekretariat Daerah rata rata Minimum B**	- -	-	- -	-		**29,076,147,743**		**4,360,343,297**		**8,782,872,775**		**5,419,148,494**		**5,055,258,964**		**22,338,017,760**		**76.83%**				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatkan Akuntabilits Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Perangkat Daerah: Nilai LKIP SKPD sekretariat Daerah rata rata Minimum B**	- -	-	- -	-	**1 Kegiatan**	**375,098,228**	**Kegiatan**	**32,098,081**	**Kegiatan**	**63,961,934**	**1 Kegiatan**	**155,023,793**	**Kegiatan**	**122,084,995**	1 **Kegiatan**	**373,168,803**						
				- -	-	- -	-	**7 Dokumen**		**2 Dokumen**		**1 Dokumen**		**3 Dokumen**		**Dokumen**		6 **Dokumen**							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	- -	-	- -	-	1 Kegiatan	52,247,153	Kegiatan	-	Kegiatan		1 Kegiatan	37,890,605	Kegiatan	14,138,767	1 Kegiatan	52,029,372	100.00%					
				- -	-	- -	-	2 Dokumen		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		100.00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	- -	-	- -	-	1 Dokumen	143,482,301	1 Dokumen	24,228,081	0 Dokumen	31,098,234	Dokumen	38,092,388	Dokumen	48,640,828	1 Dokumen	142,059,531	100.00%					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	- -	-	- -	-	5 Dokumen	179,368,774	1 Dokumen	7,870,000	1 Dokumen	32,863,700	1 Dokumen	79,040,800	Dokumen	59,305,400	3 Dokumen	179,079,900	60.00%					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatkan Akuntabilits Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Perangkat Daerah: Nilai LKIP SKPD sekretariat Daerah rata rata Minimum B**	- -	-	- -	-	**62 Bulan**	**17,021,225,869**	**18 Bulan**	**3,919,871,377**	**16 Bulan**	**3,642,992,809**	**11 Bulan**	**3,384,336,103**	**17 Bulan**	**2,368,799,007**	62 **Bulan**	**10,947,200,289**						
				- -	-	- -	-	**15 Laporan**		**10 Laporan**		**10 Laporan**		**11 Laporan**		**13 Laporan**		44 **Laporan**							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	- -	-	- -	-	14 Bulan	16,582,301,490	5 E	3,861,031,834	3 Bulan	3,568,021,210	1 Bulan	3,300,167,779	5 Bulan	2,178,045,754	14 Bulan	12,907,266,577	100.00%					
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	- -	-	- -	-	12 Bulan	277,666,500	4 Bulan	44,994,843	4 Bulan	51,919,785	1 Bulan	51,830,390	3 Bulan	118,751,051	12 Bulan	267,496,069	100.00%					
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	- -	-	- -	-	24 Bulan	140,037,824	6 Bulan	13,844,700	6 Bulan	21,986,914	6 Bulan	27,490,684	6 Bulan	62,117,802	24 Bulan	125,440,100	100.00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	- -	-	- -	-	2 Laporan	5,501,039	Laporan		Laporan	0	1 Laporan	1,156,000	1 Laporan	1,765,000	2 Laporan	2,921,000	100.00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	- -	-	- -	-	42 Laporan	12,219,102	10 Laporan		10 Laporan	1,064,900	10 Laporan	3,691,250	12 Laporan	4,665,900	42 Laporan	9,422,050	100.00%					
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	- -	-	- -	-	12 bulan	3,499,914	3 bulan		3 bulan	0	3 Bulan		3 Bulan	3,453,500	12 bulan	3,453,500	100.00%					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Meningkatkan Akuntabilits Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Perangkat Daerah: Nilai LKIP SKPD sekretariat Daerah rata rata Minimum B**					**361 Pegawai**	**131,399,863**	**- Pegawai**	-	**- Pegawai**	-	**156 Pegawai**	**128,397,500**	**Pegawai**	**2,593,350**	156 **Pegawai**	**130,990,850**						
				- -	-	- -	-	**1 Tahun**		**Tahun**		**Tahun**		**Tahun**		**Tahun**		0 **Tahun**							
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	- -	-	- -	-	161 Pegawai	128,800,000	Pegawai		Pegawai	0	156 Pegawai	128,397,500	Pegawai	0	156 Pegawai	128,397,500	96.89%					
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	- -	-	- -	-	200 Pegawai	2,599,863	Pegawai		Pegawai	0				2,593,350	0 Pegawai	2,593,350	0.00%				**RECOFUSING ANGGARAN**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	- -	-	- -	-	1 Tahun	-	Tahun		Tahun	0					0 Tahun	-					**RECOFUSING ANGGARAN**	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatkan Akuntabilits Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Perangkat Daerah: Nilai LKIP SKPD sekretariat Daerah rata rata Minimum B**	- -	-	- -	-	**60 Bulan**	**437,700,834**	**15 Bulan**	**27,390,882**	**15 Bulan**	**65,207,603**	**15 Bulan**	**117,907,352**	**15 Bulan**	**198,873,469**	60 **Bulan**	**409,379,306**						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	- -	-	- -	-	36 Bulan	375,195,124	9 Bulan	27,390,882	9 Bulan	65,207,603	9 Bulan	79,885,353	9 Bulan	175,632,418	36 Bulan	348,116,256	100.00%					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	- -	-	- -	-	12 Bulan	56,806,000	3 Bulan		3 Bulan	0	3 Bulan	38,021,999	3 Bulan	17,612,401	12 Bulan	55,634,400	100.00%					
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	- -	-	- -	-	12 Bulan	5,699,710	3 Bulan		3 Bulan	0	3 Bulan	0	3 Bulan	5,628,650	12 Bulan	5,628,650	100.00%					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatkan Akuntabilits Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Perangkat Daerah: Nilai LKIP SKPD sekretariat Daerah rata rata Minimum B**					**15 Unit**	**3,195,758,602**	**0 Unit**	-	**19 Unit**	**779,038,306**	**0 Unit**	**78,054,549**	**0 Unit**	**1,895,705,049**	19 **Unit**	**2,752,797,904**						
				- -	-	- -	-	**1 Paket**		**0 Paket**		**0 Paket**		**0 Paket**		**1 Paket**		1 **Paket**							
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	- -	-	- -	-	19 Unit	301,606,820	Unit		19 Unit	228,900,000	Unit	-	0 Unit	69,726,546	19 Unit	298,626,546	100.00%					
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	- -	-	- -	-	1 Paket	2,894,151,782	Paket		Paket	550,138,306	Paket	78,054,549	1 Paket	1,825,978,503	1 Paket	2,454,171,358	100.00%					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatkan Akuntabilits Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Perangkat Daerah: Nilai LKIP SKPD sekretariat Daerah rata rata Minimum B**	- -	-	- -	-	**24 Bulan**	**212,600,000**	**3 Bulan**	-	**3 Bulan**	-	**3 Bulan**	**40,192,855**	**3 Bulan**	**157,108,225**	12 **Bulan**	**197,301,080**						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	- -	-	- -	-	12 Bulan	212,600,000	3 Bulan		3 Bulan	0	3 Bulan	40,192,855	3 Bulan	157,108,225	12 Bulan	197,301,080	100.00%					
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	- -	-	- -	-	12 Bulan	-	0 Bulan		0 Bulan	0	0 Bulan		0 Bulan	-	0 Bulan	-					**RECOFUSING ANGGARAN**	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatkan Akuntabilits Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Perangkat Daerah: Nilai LKIP SKPD sekretariat Daerah rata rata Minimum B**	- -	-	- -	-	**72 Bulan**	**720,892,637**	**18 Bulan**	**38,730,157**	**18 Bulan**	**38,885,121**	**18 Bulan**	**317,768,061**	**9 Bulan**	**310,094,869**	63 **Bulan**	**705,478,208**						
				- -	-	- -	-	**2 Paket**		**- Paket**		**- Paket**		**1 Paket**		**- Paket**		1 **Paket**							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	- -	-	- -	-	24 Bulan	312,043,819	6 Bulan	7,579,150	6 Bulan	7,733,250	6 Bulan	105,889,374	6 Bulan	182,204,609	24 Bulan	303,406,383	100.00%					

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	-	-	-	-	-	-	36	Bulan	44,476,590	9	Bulan		9	Bulan	0	9	Bulan	7,965,000		Bulan	32,634,000	27	Bulan	40,599,000	75.00%						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	-	-	-	-	-	-	2	Paket	165,049,600		Paket			Paket	0	1	Paket	151,911,000		Paket	11,443,000	1	Paket	163,354,000	50.00%						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik	-	-	-	-	-	-	12	Bulan	199,322,628	3	Bulan	31,151,007	3	Bulan	31,151,871	3	Bulan	52,002,687	3	Bulan	83,813,260	12	Bulan	198,118,825	100.00%						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Komoditi Perkebunan**							**6,700**	**Ha**	**5,323,646,397**	**-**	**Ha**	**304,293,600**	**-**	**Ha**	**3,553,608,330**	**-**	**Ha**	**368,352,640**	**6,700**	**Ha**	**1,093,614,400**	6700	**Ha**	**5,319,868,970**							
				-	-	-	-	-	-	**2**	**Unit**			**Unit**			**Unit**			**Unit**			**Unit**		0	**Unit**								
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	**Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Komoditi Perkebunan**	-	-	-	-	-	-	**6,700**	**Ha**	**5,323,646,397**	**-**	**Ha**	304,293,600	**-**	**Ha**	3,553,608,330	**-**		368,352,640	**6,700**	HA	1,093,614,400	6700	**Ha**	5,319,868,970							
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	-	-	-	-	-	-	6,700	Ha	5,323,646,397		Ha	304,293,600		Ha	3,553,608,330			368,352,640	6700	Ha	1,093,614,400	6700	Ha	5,319,868,970	100.00%						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Komoditi Perkebunan**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	**1**	**Tahun**	**1,040,276,725**		**Tahun**	-		**Tahun**	**343,335,500**	**1**	**Tahun**	**557,564,000**		**Tahun**	**3**	1	**Tahun**	**900,899,503**		**-**		**-**			
										3	**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**		**3**	**Kegiatan**			**Kegiatan**		3	**Kegiatan**							
										100	**Paket**			**Paket**			**Paket**		**100**	**Paket**			**Paket**		100	**Paket**							
										17	**Unit**			**Unit**			**Unit**		**17**	**Unit**			**Unit**		17	**Unit**							
		Penataan Prasarana Pertanian	**Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Komoditi Perkebunan**	**-**	**-**	**-**	-	-	-			**1,040,276,725**						**343,335,500**			**557,564,000**			**137,106,925**	0		1,038,006,425							
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi perkebunan	-	-	-	-	-	-	1		1,040,276,725						343,335,500			557,564,000			137,106,925	1		1,038,006,425	100.00%						
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Komoditi Perkebunan**	-	-	-	-	-	-	**2**	**Unit**	**497,415,143**		**Unit**	**34,220,000**		**Unit**	**292,103,972**			**234,914,141**			**- 64,731,222**	0	**Unit**	**496,506,891**							
										150	**Ha**			**Ha**			**Ha**							0	**Ha**							
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	**Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Komoditi Perkebunan**	-	-	-	-	-	-			**497,415,143**			**34,220,000**			**292,103,972**			**234,914,141**			**- 64,731,222**	0		496,506,891							
		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	menurunnya angka akibat bencana pertanian dan peternakan	-	-	-	-	-	-			154,918,981						57,870,345			91,498,919.00			5,140,000.00	0		154,509,264	0.00%						
		Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikulura dan Perkebunan	menurunnya angka akibat bencana pertanian dan peternakan	-	-	-	-	-	-			342,496,162			**34,220,000**			234,233,627			143,415,222			- 69,871,222	0		341,997,627	0.00%						
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Meningkatnya Pengetahuan Keterampilan Petani dalam Mengelola Usaha Tani**	-	**-**	**-**	-	-	-	**120**	**Petani**	**120,133,445**		**Petani**	**3,739,200**		**Petani**	**3,739,200**	**60**	**Petani**	**36,637,500**	**60**	**Petani**	**60,310,056**	**120**	**Petani**	**104,425,956**							
										-	**KT**			**KT**			**KT**			**KT**			**KT**	0	**KT**								
										-	**Pelaku Usaha**			**Pelaku Usaha**			**Pelaku Usaha**			**Pelaku Usaha**			**Pelaku Usaha**	0	**Pelaku Usaha**								
		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	**Meningkatnya Pengetahuan Keterampilan Petani dalam Mengelola Usaha Tani**	-	-	-	-	-	-			**120,133,445**			**3,739,200**			**3,739,200**			**36,637,500**			**60,310,056**	0		**104,425,956**							
		Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Meningkatnya kapasitas dan aksebilitas petani pekebun terhadap sumber-sumber pembiayaan	-	-	-	-	-	-	120		120,133,445			3,739,200			3,739,200	60	Petani	36,637,500	60	Petani	60,310,056	120		104,425,956	100.00%						
		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Meningkatnya kapasitas dan aksebilitas petani pekebun terhadap sumber-sumber pembiayaan	-	-	-	-	-	-			-													0		-							

84.51%

:

:

FORMULIR E.55
EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PELAKSANAAN : S/D BULAN DESEMBER 2021

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang baik**					190	14,083,691,727.00	54	2,356,499,093.00	72	4,880,715,536.00	58 -	2,722,253,044.00	51 -	2,601,476,595.00	185	12,560,944,268.00	97%	89%					
1.1.		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja					5 dok	21,996,420.00	4	3,000,000.00	5	1,972,000.00	4 -	6,598,200.00	4 -	8,344,600.00	5	19,914,800.00	100%	91%					Dinas ESDM
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan					4 dok	20,494,419.00	4 dok	3,000,000.00	4 dok	472,000.00	4 dok	6,598,200.00	4 dok	8,344,600.00	4 dok	18,414,800.00	100%	90%					Dinas ESDM
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 dok	1,502,001.00	0 -	0.00	1 dok	1,500,000.00	0 -	0.00	0 -	0.00	1 dok	1,500,000.00	100%	100%					Dinas ESDM
1.2.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						12	41,199,591.00	12	10,648,996.00	12	9,933,000.00	12 -	9,933,000.00	12 -	10,233,638.00	12	40,748,634.00	100%	99%					Dinas ESDM
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersediannya Honorarium THL					12 bulan	41,199,591.00	12 bulan	10,648,996.00	12 bulan	9,933,000.00	12 bulan	9,933,000.00	12 bulan	10,233,638.00	12 bulan	40,748,634.00	100%	99%					Dinas ESDM
1.3.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						30	11,205,393,816.00	7	1,676,764,980.00	10	4,159,264,576.00	6 -	2,179,279,231.00	6 -	1,747,188,914.00	30	9,762,497,701.00	100%	87%					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					14 bulan	11,026,658,000.00	3 bulan	1,593,547,730.00	5 bulan	4,099,446,924.00	3 bulan	2,161,771,481.00	3 bulan	1,729,056,914.00	14 bulan	9,583,823,049.00	100%	87%					Dinas ESDM
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersediannya Laporan Keuangan Akhir Tahun					4 keg	19,701,543.00	1 keg	7,627,250.00	2 keg	12,052,652.00	0 -	0.00	0 -	0.00	4 keg	19,679,902.00	100%	100%					Dinas ESDM
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/ semesteran					12 lap	159,034,273.00	3 lap	75,590,000.00	3 lap	47,765,000.00	3 lap	17,507,750.00	3 lap	18,132,000.00	12 lap	158,994,750.00	100%	100%					Dinas ESDM
1.4.		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						20	12,749,570.00	2	4,260,000.00	13	1,634,000.00	0 -	0.00	3 -	6,826,300.00	15	12,720,300.00	75%	100%					**Dinas ESDM**
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah					8 keg	11,991,570.00	2 keg	4,260,000.00	1 keg	876,000.00	0 -	0.00	3 keg	6,826,300.00	3 keg	11,962,300.00	38%	100%					Dinas ESDM
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemanfaatan barang dalam fisik					12 bulan	758,000.00	0 -	0.00	12 bulan	758,000.00	0 -	0.00	0 -	0.00	12 bulan	758,000.00	100%	100%					
1.5.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						36	191,461,961.00	11	59,108,430.00	9 -	59,713,984.00	9 -	32,003,200.00	7 -	38,653,468.00	36	189,479,082.00	100%	99%					**Dinas ESDM**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan					12 bulan	26,918,431.00	3 bulan	1,725,000.00	3 bulan	5,700,000.00	3 bulan	3,690,000.00	3 bulan	15,393,900.00	12 bulan	26,508,900.00	100%	98%					Dinas ESDM
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi					12 keg	88,305,244.00	5 keg	42,579,000.00	3 keg	33,837,244.00	3 keg	9,949,000.00	1 keg	1,775,000.00	12 keg	88,140,244.00	100%	100%					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 bulan	76,238,286.00	3 bulan	14,804,430.00	3 bulan	20,176,740.00	3 bulan	18,364,200.00	3 bulan	21,484,568.00	12 bln	74,829,938.00	100%	98%					Dinas ESDM
1.6.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						18	471,261,747.00	3	24,200,000.00	8	183,590,500.00	3 -	35,000,000.00	4 -	226,325,000.00	18	469,115,500.00	100%	100%					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor					6 pkt	363,062,730.00	0 -	0.00	5 pkt	148,590,500.00	0 -	0.00	1 pkt	212,425,000.00	6 pkt	361,015,500.00	100%	99%					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin					12 bulan	108,199,017.00	3 bulan	24,200,000.00	3 bulan	35,000,000.00	3 bulan	35,000,000.00	3 bulan	13,900,000.00	12 bulan	108,100,000.00	100%	100%					Dinas ESDMD

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
1.7.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**45**	**1,855,149,008.00**	**9**	**550,313,100.00**	**9**	**415,437,939.00**	**18**	**397,412,022.00**	**9**	**431,431,272.00**	**45**	**1,794,594,333.00**	**100%**	**97%**					**Dinas ESDM**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat					12 bulan	15,075,630.00	3 bulan	5,586,000.00	3 bulan	5,418,900.00	3 bulan	1,438,500.00	3 bulan	2,631,400.00	12 bulan	15,074,800.00	**100%**	**100%**					Dinas ESDM
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Listrik dan Air					12 bulan	212,480,000.00	3 bulan	29,208,203.00	3 bulan	48,001,956.00	3 bulan	38,741,324.00	3 bulan	56,418,443.00	12 bulan	172,369,926.00	**100%**	**81%**					Dinas ESDM
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perelngkapan Gedung Kantor					9 bulan	1,800,150.00	0 -	0.00	0 -	0.00	9 bulan	1,044,000.00	0 -	0.00	9 bulan	1,044,000.00	**100%**	**58%**					
		Pnyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium,Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan THL					12 bulan	1,625,793,228.00	3 bulan	515,518,897.00	3 bulan	362,017,083.00	3 bulan	356,188,198.00	3 bulan	372,381,429.00	12 bulan	1,606,105,607.00	**100%**	**99%**					Dinas ESDM
1.8.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**24**	**284,479,614.00**	**6**	**28,203,587.00**	**6**	**49,169,537.00**	**6**	**62,027,391.00**	**6 -**	**132,473,403.00**	**24**	**271,873,918.00**	**100%**	**96%**					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas					12 bulan	260,330,561.00	3 bulan	24,643,087.00	3 bulan	49,169,537.00	3 bulan	53,840,491.00	3 bulan	120,142,603.00	12 bulan	247,795,718.00	**100%**	**95%**					Dinas ESDM
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor					12 bulan	24,149,053.00	3 bulan	3,560,500.00	3 bulan	0.00	3 bulan	8,186,900.00	3 bulan	12,330,800.00	12 bln	24,078,200.00	**100%**	**100%**					Dinas ESDM
																			Rata-Rata Capaian Kerja (%)	**97%**	**89%**			**0.00**	**0.00**	
																			Predikat Kerja	**SANGAT TINGGI**	**TINGGI**					
2		**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**Terlaksananya Pengelolaan Aspek Kegeologian**					**120**	**2,170,904,275.00**	**27**	**114,671,417.00**	**20**	**197,124,617.00**	**27**	**670,633,217.00**	**46**	**1,183,265,876.00**	**120**	**2,165,695,127.00**	**100%**	**100%**					
2.1.		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah**					**100**	**266,500,487.00**	**23**	**60,153,217.00**	**18**	**47,957,217.00**	**20**	**52,600,107.00**	**39**	**104,521,505.00**	**100**	**265,232,046.00**	**100%**	**100%**					**Dinas ESDM**
		Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada cekungan Air Tanah	Tersedianya Data Zona Konservasi Air Tanah dan Honorarium THL					100 %	266,500,487.00	23 %	60,153,217.00	18 %	47,957,217.00	20 %	52,600,107.00	39 %	104,521,505.00	100 %	265,232,046.00	**100%**	**100%**					Dinas ESDM
2.2.		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian,Izin Pemakaian,dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Pelaksanaan Penatausahaan Izin Pengeboran Penggalian Air Tanah**					**6**	**36,260,208.00**	**4**	**28,143,200.00**	**2**	**8,109,000.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**6**	**36,252,200.00**	**100%**	**100%**					**Dinas ESDM**
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Pemboran,Penggalian dan Pengusahaan Air Tanah					6 keg	36,260,208.00	4 keg	28,143,200.00	2 keg	8,109,000.00	0	0.00	0	0.00	6 keg	36,252,200.00	**100%**	**100%**					Dinas ESDM
2.3.		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Terlaksanaya Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah**					**14**	**1,868,143,580.00**	**0**	**26,375,000.00**	**0**	**141,058,400.00**	**7**	**618,033,110.00**	**7**	**1,078,744,371.00**	**14**	**1,864,210,881.00**	**100%**	**100%**					**Dinas ESDM**
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfataan Air Tanah					14 titik	1,868,143,580.00	0	26,375,000.00	0	141,058,400.00	7 titik	618,033,110.00	7 titik	1,078,744,371.00	14 titik	1,864,210,881.00	**100%**	**100%**					Dinas ESDM
																			Rata-Rata Capaian Kerja (%)	**100%**	**100%**			**#REF!**	**#REF!**	
																			Predikat Kerja	**SANGAT TINGGI**	**SANGAT TINGGI**					
3		**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**Terlaksananya Pengelolaan Mineral dan Batuan**					**236**	**452,413,240.00**	**123**	**263,663,836.00**	**63**	**101,657,717.00**	**19**	**34,646,997.00**	**26**	**47,652,558.00**	**231**	**447,621,108.00**	**98%**	**99%**					

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
3.1.		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	**Terlaksananya Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara**					**8**	**16,279,586.00**	**4**	**8,700,000.00**	**4**	**7,405,000.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**8**	**16,105,000.00**	**100%**	**99%**					
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Data dan Informasi IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan					6 lap	13,179,586.00	2 lap	5,600,000.00	4 lap	7,405,000.00	0 -	0.00	0 -	0.00	6 lap	13,005,000.00	**100%**	**99%**					
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terkendali dan Terawasinya Pemanfaatan WIUP Bukan Logam dan Batuan					2 lap	3,100,000.00	2 lap	3,100,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2 lap	3,100,000.00	**100%**	**100%**					
3.2.		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk**	**Tertatanya Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam danBatubara dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri**					**100**	**180,477,430.00**	**26**	**47,607,436.00**	**26**	**46,685,217.00**	**19**	**34,646,997.00**	**26**	**47,652,558.00**	**97**	**176,592,208.00**	**97%**	**98%**					
		Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Terawasinya Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Logam dan Batubara dalan Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri					100 %	180,477,430.00	26 %	47,607,436.00	26 %	46,685,217.00	19 %	34,646,997.00	26 %	47,652,558.00	97 %	176,592,208.00	**97%**	**98%**					
3.3.		**Penatusahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) daerah**	**Tertatanya Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan**					**9**	**70,047,359.00**	**6**	**54,764,500.00**	**3**	**14,602,000.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**9**	**69,366,500.00**	**100%**	**99%**					
		Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1	Terawasinya Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batubara					9 keg	70,047,359.00	6 keg	54,764,500.00	3 keg	14,602,000.00	0	0.00	0	0.00	9 keg	69,366,500.00	**100%**	**99%**					

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
3.4		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara,Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan**	**Tertatanya Izin Usaha Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam,Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batubara**					**100**	**96,152,727.00**	**75**	**79,965,900.00**	**24**	**16,185,000.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**99**	**96,150,900.00**	**99%**	**100%**					
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Terkendalinya dan Terawasinya Perlaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat,Mineral Logam,Batubara, Mineral Bukan Logam					100 %	96,152,727.00	75 %	79,965,900.00	24 %	16,185,000.00	0	0.00	0	0.00	99 %	96,150,900.00	**99%**	**100%**					
3.5		**Penatausahan Izin Usaha Jasa Petambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri**					**9**	**45,493,638.00**	**5**	**37,826,000.00**	**3**	**7,618,000.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**8**	**45,444,000.00**	**89%**	**100%**					
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksnaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terkendali dan Terawasinya Pelaksanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanamana Modal Dalam Negeri					9 keg	45,493,638.00	5 keg	37,826,000.00	3 keg	7,618,000.00	0	0.00	0	0.00	8 keg	45,444,000.00	**89%**	**100%**					
3.6		**Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan oleh Gubernur pada saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan**	**Terlaksananya Penerbitan Izin Sementara Untuk Pertambangan Mineral atau Batubara**					**10**	**43,962,500.00**	**7**	**34,800,000.00**	**3**	**9,162,500.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**10**	**43,962,500.00**	**100%**	**100%**					
		Pengeloaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang dilakukan Pemegang Usaha Pertambangan	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan					10 keg	43,962,500.00	7 keg	34,800,000.00	3 keg	9,162,500.00	0	0.00	0	0.00	10 keg	43,962,500.00	**100%**	**100%**					
																		Rata-Rata Capaian Kerja (%)		**98%**	**99%**			**0.00**	**0.00**	
																		Predikat Kerja		**SANGAT TINGGI**	**SANGAT TINGGI**					
4		**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**Terlaksananya Pengeloaan Energi Baru Terbarukan**					**111**	**207,308,561.00**	**67**	**103,668,317.00**	**32**	**52,041,978.00**	**10**	**11,023,247.00**	**0**	**38,170,786.00**	**109**	**204,904,328.00**	**98%**	**99%**					**Dinas ESDM**
4.1		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**Terlaksananya Penghematan Energi di Wilayah Provinsi**					**111**	**207,308,561.00**	**67**	**103,668,317.00**	**32**	**52,041,978.00**	**10**	**11,023,247.00**	**0**	**38,170,786.00**	**109**	**204,904,328.00**	**98%**	**99%**					
		Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terbina dan Terawasinya Penghematan Energi					100 %	178,294,061.00	60 %	80,412,817.00	30 %	46,462,978.00	10 %	11,023,247.00	0	37,990,786.00	100 %	175,889,828.00	**100%**	**99%**					Dinas ESDM
		Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komperhensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Terlaksananya Sosialisasi Menyeluruh dan Komperhensif Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi					5 keg	13,255,500.00	4 keg	13,255,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4 keg	13,255,500.00	**80%**	**100%**					Dinas ESDM
		Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan SDM dalam Pelaksanaan Konservasi Energi					6 keg	15,759,000.00	3 keg	10,000,000.00	2 keg	5,579,000.00	0 -	0.00	0 -	180,000.00	5 keg	15,759,000.00	**83%**	**100%**					Dinas ESDM
																		Rata-Rata Capaian Kerja (%)		**98%**	**99%**			**0.00**	**0.00**	

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV												
																-	-	-		Predikat Kerja		SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI					
5		**PROGRAM PENGELOLAN KETENAGALISTRIKAN**	**Terlaksananya Pengelolaan Ketenagalistrikan**					**325**	**1,747,342,087.00**	**43**	**222,822,319.00**	**127**	**769,516,321.00**	**21**	**46,305,107.00**	**134**	**688,992,809.00**	**325**	**1,727,636,556.00**	**100%**	**99%**					**Dinas ESDM**
5.1		**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**Tertatanya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN dan Penyewaan Tenaga Listrik**					**5**	**25,194,000.00**	**4**	**24,719,000.00**	**0**	**0.00**	**1**	**475,000.00**	**0**	**0.00**	**5**	**25,194,000.00**	**100%**	**100%**					**Dinas ESDM**
		Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Prosedur Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN					5 keg	25,194,000.00	4 keg	24,719,000.00	0	0.00	1 keg	475,000.00	0	0.00	5 keg	25,194,000.00	**100%**	**100%**					Dinas ESDM
5.2		**Penatausahaan Izin Operasi dan Fasilitas Instalasinya dalam daerah Provinsi**	**Tertatanya Izin Operasi dan Fasilitas Instalasi dan Tersedianya Honorarium THL**					**100**	**235,295,900.00**	**30**	**69,814,719.00**	**15**	**32,221,853.00**	**20**	**45,830,107.00**	**35**	**86,555,878.00**	**100**	**234,422,557.00**	**100%**	**100%**					
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi dan Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi dan Fasilitas Instalasi					100 %	235,295,900.00	30 %	69,814,719.00	15 %	32,221,853.00	20 %	45,830,107.00	35 %	86,555,878.00	100 %	234,422,557.00	**100%**	**100%**					Dinas ESDM
5.3		**Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi**	**Tersedianya Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik**					**4**	**11,510,541.00**	**1**	**4,486,500.00**	**3**	**6,120,250.00**	**0**	**0.00**	**0**	**750,000.00**	**4**	**11,356,750.00**	**100%**	**99%**					
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dan Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik,RUPTL,Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik					4 lap	11,510,541.00	1 lap	4,486,500.00	3 lap	6,120,250.00	0 -	0.00	0 -	750,000.00	4 lap	11,356,750.00	**100%**	**99%**					
5.4		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**Tersedianya Anggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik**					**220**	**1,475,341,646.00**	**9**	**123,802,100.00**	**112**	**731,174,218.00**	**0**	**0.00**	**99**	**601,686,931.00**	**220**	**1,456,663,249.00**	**100%**	**99%**					

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tersedianya Tenaga Listrik di Daerah Yang Memerlukan Penerangan Jalan					211 titik	1,400,574,546.00	0	49,035,000.00	112 titik	731,174,218.00	0 -	0.00	99 titik	601,686,931.00	211 titik	1,381,896,149.00	100%	99%					
		Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terkendalinya dan Terawasinya Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik					9 keg	74,767,100.00	9 keg	74,767,100.00	0 -	0.00	0 -	0.00	0 -	0.00	9 keg	74,767,100.00	100%	100%					
																		Rata-Rata Capaian Kerja (%)		100.00%	99%			#REF!	#REF!	
																		Predikat Kerja		SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI					
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								18,661,659,890.00		3,061,324,982.00		6,001,056,169.00		3,484,861,612.00		4,559,558,624.00		17,106,801,387.00							
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5)																			98.69%	97.12%			#DIV/0!	#DIV/0!	
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5)																			SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			#REF!	#REF!	
	PERMASALAHAN :		1. Terdapat Anggaran yang tidak terserap yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan ASN karena adanya ASN yang memasuki Purna Bakti dan Mutasi serta ASN yang tidak masuk kantor karena sakit																							
	TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :		1. Untuk Tahun Anggaran 2022 akan dilakukan perhitungan kembali terkait Gaji dan Tunjangan ASN																							

FORMULIR E.55

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang Mengacu pada Sasaran RKPD Provinsi:

1
2
3

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																											
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Disperindag**						**9,804,509,799**		**2,028,391,980**		**2,724,630,648**		**2,087,717,915**		**2,378,647,065**		**9,219,387,608**				-				
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan						7,631,140,986		1,852,590,403		2,139,673,461		1,598,668,367		1,523,739,212		7,114,671,443								
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kinerja ASN					14 Bulan	7,147,360,334	3 Bulan	1,780,399,354	3 Bulan	2,066,739,747	3 Bulan	1,524,827,538	5 Bulan	1,277,088,927	14 Bulan	6,649,055,566	100%	93%					Disperindag	Manado
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawian					12 Bulan	183,453,086	3 Bulan	30,704,886	3 Bulan	30,737,996	3 Bulan	30,671,776	3 Bulan	89,613,529	12 Bulan	181,728,187	100%	99%					Disperindag	Manado
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan					12 Bulan	300,327,566	3 Bulan	41,486,163	3 Bulan	42,195,718	3 Bulan	43,169,053	3 Bulan	157,036,756	12 Bulan	283,887,690	100%	95%					Disperindag & UPTD BPSMB	Manado
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Adminstrasi Barang/Jasa						158,091,457		30,406,896		35,056,561		35,338,331		54,955,398		155,757,186								
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa					12 Bulan	158,091,457	3 Bulan	30,406,896	3 Bulan	35,056,561	3 Bulan	35,338,331	3 Bulan	54,955,398	12 Bulan	155,757,186	100%	99%					Disperindag	Manado
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						84,000,000		-		-		82,359,200		-		82,359,200								
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya					### Pegawai	84,000,000	0 Pegawai	-	0 Pegawai	-	98 Pegawai	82,359,200	0 Pegawai	-	98 Pegawai	82,359,200	93%	98%					Disperindag	Manado
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan						564,833,932		19,923,609		171,555,762		107,430,701		250,950,820		549,860,892								
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum					12 Bulan	54,400,516	0 Bulan	-	3 Bulan	25,940,000	3 Bulan	27,691,400	3 Bulan	-	9 Bulan	53,631,400	75%	99%					Disperindag & UPTD BPSMB	Manado
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum					12 Bulan	23,500,000	0 Bulan	-	3 Bulan	7,157,300	3 Bulan	3,553,950	6 Bulan	9,304,650	12 Bulan	20,015,900	100%	85%					Disperindag	Manado
		Sub Kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi					12 Bulan	365,787,237	0 Bulan	-	3 Bulan	111,728,100	3 Bulan	46,093,000	6 Bulan	200,822,207	12 Bulan	358,643,307	100%	98%					Disperindag & UPTD BPSMB	Dalam & Luar Daerah Sulawesi Utara
		Sub Kegiatan Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Pengarsipan					12 Bulan	121,146,179	3 Bulan	19,923,609	3 Bulan	26,730,362	3 Bulan	30,092,351	3 Bulan	40,823,963	12 Bulan	117,570,285	100%	97%					Disperindag	Manado
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum					12 Bulan	-	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0%	0%					UPTD BPSMB	Manado
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah						136,972,729		-		41,100,000		22,048,000		68,700,000		131,848,000								
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan/perlengkapan Gedung Kantor					11 Unit	136,972,729	0 Unit	-	3 Unit	41,100,000	4 Unit	22,048,000	4 Unit	68,700,000	11 Unit	131,848,000	100%	96%					Disperindag & UPTD BPSMB	Manado
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						276,244,651		11,760,750		88,934,641		52,090,562		100,232,371		253,018,324								
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum					12 Bulan	168,600,000	0 Bulan	-	6 Bulan	58,959,891	3 Bulan	33,323,812	3 Bulan	53,151,171	12 Bulan	145,434,874	100%	86%					Disperindag & UPTD BPSMB	Manado
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum					12 Bulan	107,644,651	3 Bulan	11,760,750	3 Bulan	29,974,750	3 Bulan	18,766,750	3 Bulan	47,081,200	12 Bulan	107,583,450	100%	100%					Disperindag	Manado
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah						953,226,044		113,710,322		248,310,223		189,782,754		380,069,264		931,872,563								
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional					12 Bulan	198,081,800	0 Bulan	-	6 Bulan	73,669,933	3 Bulan	41,741,190	3 Bulan	78,887,532	12 Bulan	194,298,655	100%	98%					Disperindag	Manado
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor					12 Bulan	20,500,000	0 Bulan	-	0 Bulan	-	3 Bulan	9,640,000	9 Bulan	10,700,000	12 Bulan	20,340,000	100%	99%					Disperindag & UPTD BPSMB	Manado

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor					2 Gedung	149,998,394	0 Gedung	-	1 Gedung	49,900,000	Gedung	-	1 Gedung	99,900,000	2 Gedung	149,800,000	100%	100%					Disperindag	Manado
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor					10 Bulan	515,419,470	1 Bulan	44,831,597	3 Bulan	124,740,290	3 Bulan	138,401,564	3 Bulan	190,581,732	10 Bulan	498,555,183	100%	97%					Disperindag & UPTD BPSMB	Manado
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor					2 Bulan	69,226,380	2 Bulan	68,878,725	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0 Bulan	-	2 Bulan	68,878,725	100%	99%					Disperindag & UPTD BPSMB	Manado
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**92.69%**	**90.99%**						
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
2	Tersedianya stok kebutuhan barang pokok dan barang penting yang cukup, terdistribusi dengan baik dan harga yang terjangkau	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Prosentase Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau**						**925,000,000**		**71,760,619**		**213,799,949**		**90,333,274**		**520,195,557**		**896,089,399**							
		Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Terpantaunya pembangunan pasar dengan menggunakan dana DAK/TP sesuai dengan petunjuk Teknis yang ada						925,000,000		71,760,619		213,799,949		90,333,274		520,195,557		896,089,399							
		Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya pasar murah yang dapat menyediakan barang pokok yang dapat dijangkau masyarakat kurang mampu					60 Lokasi	925,000,000	0 Lokasi	71,760,619	30 Lokasi	213,799,949	0 Lokasi	90,333,274	30 Lokasi	520,195,557	60 Lokasi	896,089,399	100%	97%					Disperindag	Sulawesi Utara
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**96.87%**						
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
3	Meningkatnya kinerja ekspor	**Program Pengembangan Ekspor**	**Meningkatnya nilai Ekspor**						**2,295,000,000**		**-**		**31,845,000**		**27,699,000**		**249,575,030**		**309,119,030**							
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Keikutsertaan Pelaku Ekspor dan IKM Dalam Pameran Dagang						2,295,000,000		-		31,845,000		27,699,000		249,575,030		309,119,030							
		Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pameran Dalam dan Luar Negeri					1 Pameran	195,000,000	0 Pameran	-	0 Pameran	-	0 Pameran	-	1 Pameran	158,353,030	1 Pameran	158,353,030	100%	81%					Disperindag	Dalam & Luar Negeri
		Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Peserta					40 Orang	2,100,000,000	0 Orang	-	40 Orang	31,845,000	0 Orang	27,699,000	0 Orang	91,222,000	40 Orang	150,766,000	100%	7%					Disperindag	Sulawesi Utara
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**44.19%**						
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**						
4	Meningkatnya jumlah unit usaha IKM, tenaga kerja, nilai investasi	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Prosentase penurunan angka pengaduan masyarakat**						**194,989,619**		**10,612,400**		**111,814,200**		**10,016,000**		**40,764,480**		**173,207,080**							
		Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengujian Mutu Produk Hilir						194,989,619		10,612,400		111,814,200		10,016,000		40,764,480		173,207,080							
		Sub Kegiatan Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Produk Hilir yang akan Diuji					10 Produk Hilir	40,850,000	3 Produk Hilir	7,555,000	4 Produk Hilir	29,275,000	0 Produk Hilir	-	3 Produk Hilir	3,535,000	10 Produk Hilir	40,365,000	100%	99%					Disperindag	Sulawesi Utara
		Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian	Terlaksananya Pengujian Mutu Komoditi Serta Meningkatnya Kapasitas Laboratorium					1 Kegiatan	81,031,197	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	34,770,900	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	25,435,080	1 Kegiatan	60,205,980	100%	74%					UPTD BPSMB	Sulawesi Utara
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Terawasinya Barang Beredar dan Jasa					15 Laporan	73,108,422	4 Laporan	3,057,400	5 Laporan	47,768,300	3 Laporan	10,016,000	3 Laporan	11,794,400	15 Laporan	72,636,100	100%	99%					UPTD BPSMB	Sulawesi Utara
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**90.82%**						
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
5	Meningkatnya jumlah unit usaha IKM, tenaga kerja, nilai investasi	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB**						**1,419,048,601**		**72,604,924**		**362,162,879**		**546,995,764**		**358,621,662**		**1,340,385,229**							
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya pemberdayaan terhadap pelaku industri						1,419,048,601		72,604,924		362,162,879		546,995,764		358,621,662		1,340,385,229							
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya Penyusunan RPIP Sulut					1 Dokumen	50,000,000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	39,900,000	1 Dokumen	39,900,000	100%	80%					Disperindag	Sulawesi Utara
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Bantuan Mesin Peralatan Yang Dihibahkan					50 Unit	1,369,048,601	0 Unit	72,604,924	0 Unit	362,162,879	50 Unit	546,995,764	0 Unit	318,721,662	50 Unit	1,300,485,229	100%	95%					Disperindag	Sulawesi Utara
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**87.40%**						
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
6	Meningkatnya jumlah unit usaha	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Pertumbuhan Industri**						**45,190,622**		**3,440,000**		**15,050,000**		**300,000**		**24,000,000**		**42,790,000**							

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
	IKM, tenaga kerja, nilai investasi	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Terolahnya Data Industri Sulawesi Utara						45,190,622		3,440,000		15,050,000		300,000		24,000,000		42,790,000								
		Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)																									
		Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi Melalui SIINas	Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Industri					1 kegiatan	45,190,622	0 kegiatan	3,440,000	0 kegiatan	15,050,000	0 kegiatan	300,000	1 kegiatan	24,000,000	1 kegiatan	42,790,000	100%	95%					Disperindag	Sulawesi Utara
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	94.69%						
																		Peringkat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									14,683,738,641		2,186,809,923		3,459,302,676		2,763,061,953		3,571,803,794		11,980,978,346								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 14)																				98.78%	84.16%						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 15)																				Sangat Tinggi	Tinggi						

PERMASALAHAN :	Penyerapan anggaran pada Triwulan IV-2021 pada dasarnya sangat baik, begitu pula dalam pencapaian realisasi fisik, dimana hampir semua target kinerja tercapai. Akan tetapi angka persentase capaian anggaran yang sebesar 84,16% seolah-olah menunjukkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara kurang optimal dalam merealisasikan anggaran kegiatan. Hal tersebut wajar jika anggaran yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara keseluruhannya bersifat dapat dihabiskan. Akan tetapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki satu buah sub kegiatan yang didalamnya terdapat anggaran belanja subsidi kepada BUMN. Pengukuran keberhasilan dari anggaran bersubsidi ini bersifat berbanding terbalik dengan penyerapan anggaran, dimana jika anggaran subsidi tersebut tidak terserap berarti Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil mencapat target yang ditentukan. Belanja subsidi kepada BUMN ini dianggarkan untuk menopang Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dalam perjanjian kerja sama tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggandeng maskapai penerbangan Garuda Indonesia untuk membawa komoditi ekspor langsung ke Jepang (Narita). Akan tetapi, pihak Garuda Indonesia baru akan menerbangkan pesawatnya apabila jumlah muatan barang/komoditi yang akan diekspor minimal 15 Ton. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sepakat untuk mensubsidi selisih kurang muatan sebesar Rp.26.000/kg. Sebagai contoh apabila total muatan hanya 8 ton maka selisih kurang muatan sebesar 7 ton harus disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Namun jika total muatan melebihi 15 ton maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak perlu mengeluarkan biaya.
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :	Kegiatan subsidi ini masih berlanjut hingga November 2022. Apabila dana subsidi yang dianggarkan pada tahun 2022 masih tersisa cukup banyak hingga menjelang Bulan September 2022, maka dana tersebut akan digeser ke belanja lainnya pada APBD Perubahan 2022 agar tidak menjadi SILPA.

FORMULIR E.55

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI

RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang Mengacu pada Sasaran RKPD Provinsi:
1 Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Optimal dalam rangka Pencapaian Target Pendapatan Daerah
2 Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk menunjang Kinerja Aparatur
3 Terlaksannya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal dalam rangka pencapaian target Pendapatan Daerah

TRIWULAN IV

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggu
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11			13 = 12/7 X 100%		14 = 6 + 12			15 = 14 / 5 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																										
1.	**Meningkatnya Penerimaan pendapatan Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah; Indeks Nilai LKIP PD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Rata-Rata B**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Pendapatan Daerah Daerah Rata-Rata**	**70,774,042,245**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi**	-	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Pendapatan Daerah Daerah Rata-Rata Minimum B**	**70,774,042,245**		**12,446,566,837**		**17,241,061,297**		**15,359,232,933**		**20,640,964,007**		**65,687,825,074**	**100**	**86.02**			**65,687,825,074**	**100**	**86.02**	**Bapenda**
		KEGIATAN PERENCANAAN, PENGAGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah; Indeks Nilai LKIP PD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Rata-Rata B		**106,743,610**				**106,743,610**		**-**		**517,000**		**22,387,204**		**50,854,315**		**73,758,519**	**100**	**42.01**			**73,758,519**	**100**	**42.01**	Bapenda
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4	Dokumen	5,999,708				4	Dokumen	5,999,708	2	Dokumen	-		-	2	Dokume	-	-		227,100	4	Dokumen	227,100	100	3.79	4	Dokumen	227,100	100	3.79	Bapenda
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	Dokumen	91,690,151				1	Dokumen	91,690,151	-		-		-	1	Dokume	22,387,204			48,062,215	1	Dokumen	70,449,419	100	76.83	1	Dokumen	70,449,419	100	76.83	Bapenda
		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1	Dokumen	3,053,933				1	Dokumen	3,053,933	-		-		-		-	1	dokumen	2,241,600	1	Dokumen	2,241,600	100	73.40	1	Dokumen	2,241,600	100	73.40	Bapenda
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan LKIP,EPRA	12	Laporan	5,999,818				12	Laporan	5,999,818	-		-	6	Lap	517,000			-	6	Lap	323,400	12	Lap	840,400	100	14.01	12	Lap	840,400	100	14.01	Bapenda
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100	42.01				100	42.01	
																							Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**56,197,890,483**				**56,197,890,483**		**11,513,810,892**		**15,020,908,311**		**11,735,410,479**		**13,689,711,072**		**51,959,840,754**	**100**	**91.46**			**51,959,840,754**	**100**	**91.46**	**Bapenda**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	54,309,790,167				14	Bulan	54,309,790,167	3	bulan	11,250,603,722	5	bulan	14,567,352,162	3	bulan	11,355,418,806	3	bulan	12,994,205,722	14	bulan	50,167,580,412	100	92.37	14	bulan	50,167,580,412	100	92.37	Bapenda
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Administrasi Keuangan	12	Bulan	280,854,822				12	Bulan	280,854,822	3	bulan	37,759,964	3	bulan	66,119,312	3	bulan	62,071,972	3	bulan	104,200,441	12	bulan	270,151,689	100	96.19	12	bulan	270,151,689	100	96.19	Bapenda
		Pelaksanaan dan Penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Kebutuhan Adminsitrasi Keuangan	12	Bulan	981,009,773				12	Bulan	981,009,773	3	bulan	135,750,820	3	bulan	233,677,502	3	bulan	189,196,321	3	bulan	377,823,481	12	bulan	936,448,124	100	95.46	12	bulan	936,448,124	100	95.46	Bapenda
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun	2	Laporan	49,535,457				2	Laporan	49,535,457	2	Laporan	20,516,776	-	Lapor	17,389,900	-	Laporan	965,000	-	Laporan	-	2	Laporan	38,871,676	100	78.47	2	Laporan	38,871,676	100	78.47	Bapenda
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan, Semesteran	13	Laporan	576,700,264				13	Laporan	576,700,264	3	Laporan	69,179,610	4	Lapor	136,369,435	3	Laporan	127,758,380	**3**	Laporan	213,481,428	13	Laporan	546,788,853	100	94.81	13	Laporan	546,788,853	100	94.81	Bapenda
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100	91.46				100	91.46	
																							Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		**108,359,372**				**108,359,372**		**8,162,559**		**37,423,590**		**17,260,013**		**40,908,643**		**103,754,805**	**100**	**95.75**			**103,754,805**	**100**	**95.75**	**Bapenda**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD	12	Laporan	108,359,372				12	Laporan	108,359,372	3	Laporan	8,162,559	3	Lapor	37,423,590	3	Laporan	17,260,013	3	Laporan	40,908,643	12	Laporan	103,754,805	100	95.75	12	Laporan	103,754,805	100	95.75	Bapenda
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100	95.75				100	95.75	
																							Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		KEGIATAN ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PD	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Kewenangan PD		**401,936,341**				**401,936,341**		**34,464,195**		**123,766,755**		**57,143,780**		**117,464,379**		**332,839,109**	**100**	**74.98**			**332,839,109**	**100**	**74.98**	**Bapenda**
		Analisa dan pengembangan Retribusi Daerah, serta penyusunan kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Kebijakan Retribusi Daerah	1	Dokumen	79,811,796				1	Dokumen	79,811,796	-		-	1	Dok	43,317,400	-		-	-	Dokumen	20,922,250	1	Dokumen	64,239,650	100	80.49	1	Dokumen	64,239,650	100	80.49	Bapenda
		Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Kebijakan Retribusi Daerah	100	%	44,879,438				100	%	44,879,438	-		-	-		600,000	-		-	100	%	24,872,000	100	%	25,472,000	100	56.76	100	%	25,472,000	100	56.76	Bapenda
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Data Retribusi Daerah	12	Laporan	277,245,107				12	Laporan	277,245,107	3	Laporan	34,464,195	3	Lapor	79,849,355	3	Laporan	57,143,780	3	Laporan	71,670,129	12	Laporan	243,127,459	100	87.69	12	Laporan	243,127,459	100	87.69	Bapenda
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100	74.98				100	74.98	
																							Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sedang				Sangat Tinggi	Sedang	

| | | |

3.	Meningkatnya Penerimaan dan Pendapatan	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio PAD (Terhadap PDRB Harga Berlaku)**			**12,060,701,442**			-			**12,060,701,442**			**1,165,885,800**			**3,174,164,438**			**2,411,850,321**			**4,593,058,408**			**11,344,958,967**	**100**	**86.46**	-		**11,344,958,967**	**100**	**86.46**	**Bapenda**
		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	***Jumlah Penerimaan PAD Per Tahun Anggaran***			**12,060,701,442**						**12,060,701,442**			**1,165,885,800**			**3,174,164,438**			**2,411,850,321**			**4,593,058,408**	-		**11,344,958,967**	**100**	**86.46**	-		**11,344,958,967**	**100**	**86.46**	**Bapenda**
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Pendapatan Daerah	2	Dokumen	160,818,417				2	Dokumen	160,818,417	-		-	1	do	41,404,000			5,516,000	1	dok	72,440,000	2	Dokumen	119,360,000	100	74.22	2	Dokumen	119,360,000	100	74.22	Bapenda
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Pendapatan Daerah	4	Dokumen	102,244,696				4	Dokumen	102,244,696			-	1	dok	13,133,000	1	dok	10,280,000	2	Lap	60,537,847	4	Lap	83,950,847	100	82.11	4	Lap	83,950,847	100	82.11	Bapenda
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daer	12	Laporan	48,979,752				12	Laporan	48,979,752			-	6	Lap	12,800,000	3	Lap	6,782,500	3	Lap	16,893,000	12	Lap	36,475,500	100	74.47	12	Lap	36,475,500	100	74.47	Bapenda
		Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Obyek Pajak Daerah	5	Dokumen	58,497,010				5	Dokumen	58,497,010	-		-	1		24,290,000	2		4,576,000	2		18,895,000	5	Dokumen	47,761,000	100	81.65	5	Dokumen	47,761,000	100	81.65	Bapenda
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah DokumenPengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3	Dokumen	3,050,261,294				3	Dokumen	3,050,261,294	-		78,132,779	1	dok	910,796,104	1	dok	480,323,165	1	dok	1,504,786,481	3	Dokumen	2,974,038,529	100	97.50	3	Dokumen	2,974,038,529	100	97.50	Bapenda
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Wajib Pajak Daerah	5	Dokumen	3,024,351,725				5	Dokumen	3,024,351,725	1	Dokumen	385,324,224	2	Doku	721,554,677	1	Dokume	664,164,784	1	Dokumen	1,169,327,422	5	Dokumen	2,940,371,107	100	97.22	5	Dokumen	2,940,371,107	100	97.22	Bapenda
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Pelayanan dan Konsultasi terhadap Wajib Pajak	100	%	3,891,132,376				100	%	3,891,132,376			590,322,596			944,646,877			927,079,211	100	%	1,223,377,797	100	%	3,685,426,481	100	94.71	100	%	3,685,426,481	100	94.71	Bapenda
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Analisis dan Verifikasi Pajak Daerah	2	Dokumen	180,336,633				2	Dokumen	180,336,633			-	1	dok	78,304,200			17,906,000	1	dok	40,510,000	2	Dokumen	136,720,200	100	75.81	2	Dokumen	136,720,200	100	75.81	Bapenda
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah	10	Dokumen	1,030,249,128				10	Dokumen	1,030,249,128	2	Dokumen	75,023,648	2	dok	260,252,976	3	dok	192,105,816	3	dok	318,407,421	10	Dokumen	845,789,861	100	82.10	10	Dokumen	845,789,861	100	82.10	Bapenda
		Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak	3	Dokumen	443,336,065				3	Dokumen	443,336,065	1	Dokumen	37,082,553	1	dok	145,451,604	1	dok	81,042,345			141,007,440	3	Dokumen	404,583,942	100	91.26	3	Dokumen	404,583,942	100	91.26	Bapenda
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2	Dokumen	70,494,346				2	Dokumen	70,494,346			-	1	dok	21,531,000			22,074,500	1	dok	26,876,000	2	Dokumen	70,481,500	100	99.98	2	Dokumen	70,481,500	100	99.98	Bapenda
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**100**	**86.46**				**100**	**86.46**	
																									Predikat Kinerja			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**82,965,510,194**						**82,965,510,194**			**13,612,452,637**			**20,461,449,735**			**17,783,259,454**			**25,293,985,015**	**12**		**77,151,146,841**					**77,151,146,841**					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 3																												**100**	**87.66**				**100**	**87.66**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 3)																																					
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																																					
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																																					
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :																																					

FORMULIR E.55
EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																											
1	**Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi - Indeks LAKIP**						**29,237,385,984**		**5,407,909,056**		**6,435,332,100**		**6,745,991,200**		**6,278,335,012**		**24,867,567,368**				-				
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya dokumen perencanaan sesuai dengan RPJMD dan RKPD**					**12 Bulan**	**81,016,057**		**21,382,500**		**15,237,000**		**20,010,000**		**21,917,000**		**78,546,500**								
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan sesuai dengan RPJMD dan RKPD					12 Bulan	5,969,331	3 Bulan	4,733,500	3 Bulan	1,200,000	3 Bulan	-	3 Bulan	-	12 Bulan	5,933,500	100%	99%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA - SKPD					12 Bulan	6,060,071	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	3,901,000	12 Bulan	3,901,000	100%	64%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan RKA - SKPD					12 Bulan	3,249,701	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	3,242,000	3 Bulan	-	12 Bulan	3,242,000	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA - SKPD					12 Bulan	3,249,701	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	3,190,000	12 Bulan	3,190,000	100%	98%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan DPA - SKPD					12 Bulan	3,250,498	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	3,208,000	3 Bulan	-	12 Bulan	3,208,000	100%	99%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersediannya Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					12 Bulan	3,154,010	3 Bulan	3,059,000	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	12 Bulan	3,059,000	100%	97%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12 Bulan	56,082,745	3 Bulan	13,590,000	3 Bulan	14,037,000	3 Bulan	13,560,000	3 Bulan	14,826,000	12 Bulan	56,013,000	100%	100%					BKAD	Manado
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan**					**12 Bulan**	**22,661,617,656**		**4,942,129,707**		**5,454,645,596**		**4,331,491,304**		**3,885,875,655**		**18,614,142,262**								
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan					12 Bulan	22,361,015,403	3 Bulan	4,884,137,319	3 Bulan	5,367,455,139	3 Bulan	4,258,004,847	3 Bulan	3,804,835,879	12 Bulan	18,314,433,184	100%	82%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan					12 Bulan	276,080,399	3 Bulan	50,000,388	3 Bulan	84,069,457	3 Bulan	67,176,957	3 Bulan	74,497,776	12 Bulan	275,744,578	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan					12 Bulan	3,227,174	3 Bulan	3,182,000	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	12 Bulan	3,182,000	100%	99%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan					12 Bulan	14,999,961	3 Bulan	4,810,000	3 Bulan	-	3 Bulan	5,105,000	3 Bulan	4,693,000	12 Bulan	14,608,000	100%	97%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan					12 Bulan	3,144,913	3 Bulan	-	3 Bulan	3,121,000	3 Bulan	-	3 Bulan	-	12 Bulan	3,121,000	100%	99%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan					12 Bulan	3,149,806	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	1,204,500	3 Bulan	1,849,000	12 Bulan	3,053,500	100%	97%					BKAD	Manado
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah**					**12 Bulan**	**61,182,276**		**3,600,000**		**8,148,000**		**18,950,000**		**28,389,946**		**59,087,946**								
		Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah					12 Bulan	6,991,989	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	6,738,000	12 Bulan	6,738,000	100%	96%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah					12 Bulan	14,960,000	3 Bulan	3,600,000	3 Bulan	1,200,000	3 Bulan	6,400,000	3 Bulan	2,940,000	12	14,140,000	100%	95%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah					12 Bulan	8,687,589	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	3,300,000	3 Bulan	5,194,946	12	8,494,946	100%	98%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah					12 Bulan	30,542,698	3 Bulan	-	3 Bulan	6,948,000	3 Bulan	9,250,000	3 Bulan	13,517,000	12	29,715,000	100%	97%					BKAD	Manado
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian**					**12 Bulan**	**922,788,948**		**71,411,138**		**282,771,791**		**373,271,457**		**150,891,276**		**878,345,662**								
		Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian					12 Bulan	89,870,068	3 Bulan	10,097,000	3 Bulan	17,182,750	3 Bulan	12,279,000	3 Bulan	29,167,000	12 Bulan	68,725,750	100%	76%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian					12 Bulan	352,100,000	3 Bulan	-	3 Bulan	22,292,728	3 Bulan	322,793,000	3 Bulan	-	12 Bulan	345,085,728	100%	98%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian					12 Bulan	192,889,716	3 Bulan	28,451,638	3 Bulan	44,124,857	3 Bulan	38,199,457	3 Bulan	68,443,776	12 Bulan	179,219,728	100%	93%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian					12 Bulan	287,929,164	3 Bulan	32,862,500	3 Bulan	199,171,456	3 Bulan	-	3 Bulan	53,280,500	12 Bulan	285,314,456	100%	99%					BKAD	Manado
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan administrasi umum**					**12 Bulan**	**797,313,769**		**131,677,576**		**189,653,867**		**207,599,414**		**241,013,706**		**769,944,563**								
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pengelolaan administrasi umum					12 Bulan	136,745,684	3 Bulan	26,717,576	3 Bulan	34,020,914	3 Bulan	33,923,914	3 Bulan	42,032,352	12 Bulan	136,694,756	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya pengelolaan administrasi umum					12 Bulan	251,887,374	3 Bulan	49,011,500	3 Bulan	63,293,500	3 Bulan	73,850,000	3 Bulan	64,624,000	12 Bulan	250,779,000	100%	100%					BKAD	Manado

FORMULIR E.55

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI

RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																											
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya pengelolaan administrasi umum					12 Bulan	61,875,000	3 Bulan	9,800,000	3 Bulan	19,800,000	3 Bulan	16,225,000	3 Bulan	15,950,000	12 Bulan	61,775,000	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi umum					12 Bulan	131,160,266	3 Bulan	-	3 Bulan	31,536,203	3 Bulan	13,245,000	3 Bulan	63,446,854	12 Bulan	108,228,057	100%	83%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi umum					12 Bulan	120,795,346	3 Bulan	36,523,500	3 Bulan	23,699,500	3 Bulan	42,562,000	3 Bulan	17,329,500	12 Bulan	120,114,500	100%	99%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi umum					12 Bulan	94,850,099	3 Bulan	9,625,000	3 Bulan	17,303,750	3 Bulan	27,793,500	3 Bulan	37,631,000	12 Bulan	92,353,250	100%	97%					BKAD	Manado
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur**					**12 Bulan**	**2,468,712,174**		**-**		**-**		**1,193,276,240**		**1,165,093,202**		**2,358,369,442**								
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur					12 Bulan	848,900,000	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	840,000,040	3 Bulan	-	12 Bulan	840,000,040	100%	99%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana					12 Bulan	45,000,001	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 3	-	3 Bulan	36,463,753	12 Bulan	36,463,753	100%	81%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur					12 Bulan	1,574,812,173	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	353,276,200	3 Bulan	1,128,629,449	12 Bulan	1,481,905,649	100%	94%					BKAD	Manado
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**12 Bulan**	**1,197,426,960**		**150,964,476**		**280,592,381**		**317,319,312**	**3 Bulan**	**399,490,600**		**1,148,366,769**								
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12 Bulan	162,508,130	3 Bulan	20,306,638	3 Bulan	37,200,017	3 Bulan	28,476,902	3 Bulan	75,659,776	12 Bulan	161,643,333	100%	99%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12 Bulan	614,400,000	3 Bulan	72,526,000	3 Bulan	134,390,000	3 Bulan	192,096,954	3 Bulan	179,288,614	12 Bulan	578,301,568	100%	94%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12 Bulan	420,518,830	3 Bulan	58,131,838	3 Bulan	109,002,364	3 Bulan	96,745,456	3 Bulan	144,542,210	12 Bulan	408,421,868	100%	97%					BKAD	Manado
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur**					**12 Bulan**	**1,047,328,144**		**86,743,659**		**204,283,465**		**284,073,473**		**385,663,627**		**960,764,224**								
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur					12 Bulan	417,230,210	3 Bulan	45,767,059	3 Bulan	74,989,993	3 Bulan	72,157,291	3 Bulan	145,868,373	12 Bulan	338,782,716	100%	81%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur					12 Bulan	66,000,000	3 Bulan	-	3 Bulan	34,750,000	3 Bulan	28,500,000	3 Bulan	-	12 Bulan	63,250,000	100%	96%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur					12 Bulan	159,500,000	3 Bulan	-	3 Bulan	46,263,472	3 Bulan	62,458,182	3 Bulan	49,710,254	12 Bulan	158,431,908	100%	99%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur					12 Bulan	404,597,934	3 Bulan	40,976,600	3 Bulan	48,280,000	3 Bulan	120,958,000	3 Bulan	190,085,000	12 Bulan	400,299,600	100%	99%					BKAD	Manado
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Perinrkat Kinerja			**100.00% Sedang**	**94.66% Sangat Tinggi**				
2	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Opini BPK Terhadap LKPD - WTP**						**562,221,886,672**		**11,827,224,962**		**154,867,722,549**		**314,099,831,973**		**543,558,434,044**		**1,024,353,213,528**								
		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Terwujudnya penyusunan Perda/Pergub tentang APBD dan Perubahan APBD**					**12 Bulan**	**1,734,759,377**		**49,048,651**		**180,032,976**		**334,095,057**		**1,090,461,412**		**1,653,638,096**								
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS					12 Bulan	207,626,609	3 Bulan	-	3 Bulan	18,560,000	3 Bulan	30,061,500	3 Bulan	155,078,350	12 Bulan	203,699,850	100%	98%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Nota Kesepakatan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan					12 Bulan	156,833,157	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	24,946,500	3 Bulan	127,196,250	12 Bulan	152,142,750	100%	97%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Laporan Kegiatan koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD					12 Bulan	62,373,513	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	48,294,000	3 Bulan	13,306,250	12 Bulan	61,600,250	100%	99%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Laporan Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verivikasi Perubahan RKA-SKPD					12 Bulan	56,292,275	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	54,693,250	3 Bulan	-	12 Bulan	54,693,250	100%	97%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Laporan Koordinasi, Penyusunan dan Verivikasi DPA-SKPD					12 Bulan	7,841,523	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	6,621,250	12 Bulan	6,621,250	100%	84%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Laporan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					12 Bulan	7,876,430	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	7,633,250	12 Bulan	7,633,250	100%	97%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen Perda APBD dan Pergub APBD					12 Bulan	483,384,308	3 Bulan	6,823,308	3 Bulan	58,306,896	3 Bulan	59,670,712	3 Bulan	328,845,336	12 Bulan	453,646,252	100%	94%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen Perda APBD dan Pergub Perubahan APBD					12 Bulan	438,125,441	3 Bulan	6,922,638	3 Bulan	10,350,847	3 Bulan	72,608,657	3 Bulan	328,715,526	12 Bulan	418,597,668	100%	96%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersedianya Regulasi Keuangan dan BMD Pemerintahan Prov. Sulut					12 Bulan	173,681,261	3 Bulan	27,171,705	3 Bulan	53,539,233	3 Bulan	16,452,900	3 Bulan	65,073,800	12 Bulan	162,237,638	100%	93%					BKAD	Manado

FORMULIR E.55

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI

RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																											
		Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Laporan Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah					12 Bulan	8,139,994	3 Bulan	8,131,000	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	12 Bulan	8,131,000	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Laporan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					12 Bulan	60,261,483	3 Bulan	-	3 Bulan	22,169,000	3 Bulan	-	3 Bulan	35,751,000	12 Bulan	57,920,000	100%	96%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Laporan Perencanaan Anggaran Pembiayaan Daerah					12 Bulan	4,839,994	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	4,688,500	3 Bulan	-	12 Bulan	4,688,500	100%	97%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Laporan Pembinaan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pemerintah					12 Bulan	67,483,389	3 Bulan	-	3 Bulan	17,107,000	3 Bulan	22,679,038	3 Bulan	22,240,400	12 Bulan	62,026,438	100%	92%					BKAD	Manado
		Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	**Tercapainya Kualitas Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota yang Baik**					**12 Bulan**	**817,243,894**		**45,773,650**		**210,107,900**		**351,596,900**		**794,185,950**		**1,401,664,400**								
		Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	SK Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota					12 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	12 Bulan	-							BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	SK Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota					12 Bulan	158,243,476	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	156,952,500	12 Bulan	156,952,500	100%	99%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	SK Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota					12 Bulan	157,128,509	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	147,257,500	12 Bulan	147,257,500	100%	94%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	SK Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					12 Bulan	130,047,226	3 Bulan	-	3 Bulan	12,160,000	3 Bulan	121,060,000	3 Bulan	128,775,000	12 Bulan	261,995,000	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan kab/kota					12 Bulan	183,312,049	3 Bulan	24,068,650	3 Bulan	109,668,150	3 Bulan	109,668,150	3 Bulan	176,665,450	12 Bulan	420,070,400	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Laporan Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah					12 Bulan	35,463,247	3 Bulan	-	3 Bulan	25,070,750	3 Bulan	25,070,750	3 Bulan	35,033,750	12 Bulan	85,175,250	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kab/kota					12 Bulan	8,234,406	3 Bulan	8,155,000	3 Bulan	8,155,000	3 Bulan	8,155,000	3 Bulan	8,155,000	12 Bulan	32,620,000	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota					12 Bulan	23,280,242	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	21,926,250	12 Bulan	21,926,250	100%	94%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota					12 Bulan	24,303,989	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	5,527,250	3 Bulan	23,133,500	12 Bulan	28,660,750	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					12 Bulan	23,511,785	3 Bulan	-	3 Bulan	3,240,000	3 Bulan	8,705,500	3 Bulan	22,876,750	12 Bulan	34,822,250	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					12 Bulan	60,117,261	3 Bulan	-	3 Bulan	38,264,000	3 Bulan	59,860,250	3 Bulan	59,860,250	12 Bulan	157,984,500	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan	Laporan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah					12 Bulan	13,601,704	3 Bulan	13,550,000	3 Bulan	13,550,000	3 Bulan	13,550,000	3 Bulan	13,550,000	12 Bulan	54,200,000	100%	100%					BKAD	Manado
		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Terwujudnya penyerapan Belanja APBD**						**5,938,253,708**		**3,903,559,078**		**4,472,877,243**		**4,819,072,978**		**5,822,109,008**		**19,017,618,307**								
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen Laporan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					12 Bulan	466,216,090	3 Bulan	32,874,538	3 Bulan	200,350,395	3 Bulan	302,231,002	3 Bulan	446,667,378	12 Bulan	982,123,313	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Laporan Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					12 Bulan	217,216,850	3 Bulan	30,792,776	3 Bulan	87,403,690	3 Bulan	119,936,604	3 Bulan	214,680,906	12 Bulan	452,813,976	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen Laporan Kegiatan penatausahaan pembiayaan daerah					12 Bulan	48,255,806	3 Bulan	-	3 Bulan	12,557,200	3 Bulan	21,838,700	3 Bulan	47,707,500	12 Bulan	82,103,400	100%	100%					BKAD	Manado

FORMULIR E.55

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI

RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																											
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen Laporan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					12 Bulan	127,110,677	3 Bulan	-	3 Bulan	9,351,000	3 Bulan	39,685,200	3 Bulan	112,017,400	12 Bulan	161,053,600	100%	100%					BKAD	Manado
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen Laporan Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					12 Bulan	125,404,885	3 Bulan	-	3 Bulan	37,861,300	3 Bulan	61,611,650	3 Bulan	116,744,550	12 Bulan	216,217,500	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dokumen Laporan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					12 Bulan	4,339,943,910	3 Bulan	3,799,889,864	3 Bulan	3,861,850,278	3 Bulan	4,002,552,542	3 Bulan	4,299,354,694	12 Bulan	15,963,647,378	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen Laporan Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait					12 Bulan	251,698,303	3 Bulan	-	3 Bulan	14,648,000	3 Bulan	22,361,900	3 Bulan	232,358,700	12 Bulan	269,368,600	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen Juknis					12 Bulan	362,407,187	3 Bulan	40,001,900	3 Bulan	248,855,380	3 Bulan	248,855,380	3 Bulan	352,577,880	12 Bulan	890,290,540	100%	100%					BKAD	Manado
		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Terwujudnya Opini BPK terhadap LKPD**						**1,313,593,903**		**229,815,646**		**491,403,701**		**798,547,701**		**1,160,482,751**		**2,680,249,799**								
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dokumen Sistem akuntansi dan sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah					12 Bulan	114,034,815	3 Bulan	19,525,000	3 Bulan	41,628,400	3 Bulan	41,628,400	3 Bulan	109,093,400	12 Bulan	211,875,200	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen Laporan pertanggungjawaban APBD					12 Bulan	208,611,000	3 Bulan	36,649,700	3 Bulan	73,820,800	3 Bulan	98,655,800	3 Bulan	203,847,000	12 Bulan	412,973,300	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen konsolidasi Laporan keuangan SDKP, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah					12 Bulan	242,300,620	3 Bulan	102,880,596	3 Bulan	236,108,751	3 Bulan	236,108,751	3 Bulan	236,108,751	12 Bulan	811,206,849	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen RanPerda dan Ranpergub pertanggungjawaban					12 Bulan	385,070,000	3 Bulan	34,600,000	3 Bulan	83,815,000	3 Bulan	365,324,000	3 Bulan	365,324,000	12 Bulan	849,063,000	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen Laporan Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah					12 Bulan	20,086,801	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	13,127,100	12 Bulan	13,127,100	100%	65%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen kebijakan akuntansi pemda					12 Bulan	66,999,609	3 Bulan	21,958,350	3 Bulan	34,772,350	3 Bulan	34,772,350	3 Bulan	58,374,350	12 Bulan	149,877,400	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen sisdur akuntansi					12 Bulan	69,183,576	3 Bulan	3,679,000	3 Bulan	5,095,900	3 Bulan	5,895,900	3 Bulan	39,535,500	12 Bulan	54,206,300	100%	78%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Dokumen Laporan kegiatan pembinaan					12 Bulan	55,409,788	3 Bulan	10,523,000	3 Bulan	16,162,500	3 Bulan	16,162,500	3 Bulan	54,016,250	12 Bulan	96,864,250	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Laporan pembinaan keuangan BLUD					12 Bulan	151,897,694	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	81,056,400	12 Bulan	81,056,400	100%	53%					BKAD	Manado
		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Terwujudnya penyerapan Belanja APBD**						**551,903,762,076**		**7,543,878,195**		**149,381,283,659**		**307,604,145,639**		**534,209,136,412**		**998,738,443,905**								
		Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Investasi dan penyertaan modal daerah					12 Bulan	81,153,845	3 Bulan	21,920,000	3 Bulan	25,770,200	3 Bulan	29,090,700	3 Bulan	69,430,000	12 Bulan	146,210,900	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pinjaman Pemerintah Daerah					12 Bulan	224,872,410	3 Bulan	18,736,000	3 Bulan	59,540,500	3 Bulan	59,540,500	3 Bulan	199,935,000	12 Bulan	337,752,000	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah					12 Bulan	51,057,052,602	3 Bulan	6,488,395,945	3 Bulan	14,178,465,920	3 Bulan	22,083,279,087	3 Bulan	38,783,734,130	12 Bulan	81,533,875,082	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya pengelolaan dana bantuan keuangan khusus					12 Bulan	80,034,604,567	3 Bulan	7,788,250	3 Bulan	7,788,250	3 Bulan	17,752,834,020	3 Bulan	78,312,478,570	12 Bulan	96,080,889,090	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi					12 Bulan	7,020,627,356	3 Bulan	-	3 Bulan	1,007,038,000	3 Bulan	1,007,038,000	3 Bulan	6,518,675,083	12 Bulan	8,532,751,083	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya dokumen dana tidak terduga					12 Bulan	413,485,451,296	3 Bulan	1,007,038,000	3 Bulan	134,102,680,789	3 Bulan	266,672,363,332	3 Bulan	410,324,883,629	12 Bulan	812,106,965,750	100%	100%					BKAD	Manado
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Tersedianya sistem informasi keuangan dn BMD yang komprehensif, tepat dan akurat**					**12 Bulan**	**514,273,714**		**55,149,742**		**132,017,070**		**192,373,698**		**482,058,511**		**861,599,021**								

FORMULIR E.55

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI

RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																											
		Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Keuangan dan BMD yang komprehensif, tepat dan akurat.					12 Bulan	146,003,070	3 Bulan	7,707,638	3 Bulan	37,781,871	3 Bulan	68,916,742	3 Bulan	135,385,570	12 Bulan	249,791,821	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Keuangan dan BMD yang komprehensif, tepat dan akurat.					12 Bulan	193,817,104	3 Bulan	33,797,104	3 Bulan	60,410,199	3 Bulan	70,131,956	3 Bulan	190,013,391	12 Bulan	354,352,650	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Tersedianya Sistem Informasi Keuangan dan BMD yang komprehensif, tepat dan akurat.					12 Bulan	174,453,540	3 Bulan	13,645,000	3 Bulan	33,825,000	3 Bulan	53,325,000	3 Bulan	156,659,550	12 Bulan	257,454,550	100%	100%					BKAD	Manado
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**96.74%**						
																	Predikat Kinerja		**Sedang**	**Tinggi**						
3	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah dokumen Manajemen aset**						**2,829,995,172**		**367,729,442**		**714,199,988**		**806,682,933**		**681,101,420**		**2,569,713,783**							
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan						2,829,995,172		367,729,442		714,199,988		806,682,933		681,101,420		2,569,713,783							
		Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Regulasi Keuangan dan BMD Pemerinah Prov. Sulut					12 Bulan	239,486,964	3 Bulan	-	3 Bulan	107,013,750	3 Bulan	75,865,000	3 Bulan	53,941,100	12 Bulan	236,819,850	100%	99%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah					12 Bulan	152,694,934	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	110,168,700	3 Bulan	42,222,700	12 Bulan	152,391,400	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Regulasi Keuangan dan BMD Pemerinah Prov. Sulut					12 Bulan	133,768,382	3 Bulan	-	3 Bulan	9,989,050	3 Bulan	42,812,200	3 Bulan	80,954,003	12 Bulan	133,755,253	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan					12 Bulan	217,988,049	3 Bulan	67,930,580	3 Bulan	35,089,750	3 Bulan	-	3 Bulan	111,295,100	12 Bulan	214,315,430	100%	98%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Buku Inventaris Barang Milik Daerah					12 Bulan	97,005,837	3 Bulan	32,506,000	3 Bulan	57,767,750	3 Bulan	-	3 Bulan	5,600,000	12 Bulan	95,873,750	100%	99%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya administrasi penyimpanan bukti kepemilikan Sertifikat dan BPKB					12 Bulan	1,052,237,756	3 Bulan	137,476,362	3 Bulan	254,100,388	3 Bulan	241,108,683	3 Bulan	387,088,517	12 Bulan	1,019,773,950	100%	97%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan Penilaian Barang Milik Daerah					12 Bulan	249,178,622	3 Bulan	15,296,900	3 Bulan	1,400,000	3 Bulan	168,501,900	3 Bulan	57,999,999	12 Bulan	243,198,799	100%	98%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					12 Bulan	51,905,730	3 Bulan	-	3 Bulan	24,911,200	3 Bulan	-	3 Bulan	19,820,000	12 Bulan	44,731,200	100%	86%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					12 Bulan	89,970,006	3 Bulan	27,182,400	3 Bulan	10,448,100	3 Bulan	43,354,700	3 Bulan	-	12 Bulan	80,985,200	100%	90%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah					12 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	12 Bulan	-	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah					12 Bulan	545,758,892	3 Bulan	87,337,200	3 Bulan	213,480,000	3 Bulan	124,871,750	3 Bulan	119,750,000	12 Bulan	545,438,950	100%	100%					BKAD	Manado
		Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengelola Barang					12 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3	-	12 Bulan	-	100%					BKAD	Manado
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**96.65%**						
																	Peringkat Kinerja		**Sedang**	**Sangat Tinggi**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**594,289,267,828**		**17,602,863,460**		**162,017,254,637**		**321,652,506,106**		**550,517,870,476**		**1,051,790,494,679**							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 14)															**501,272,624,203**					**100.00%**	**96.02%**					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 3)																				**Sedang**	**Sangat Tinggi**					

PERMASALAHAN :

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :	Di tahun 2021 yang menjadi fokus Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah dengan tetap berpegang pada anggaran kas yang sudah disusun dalam EPRA sehingga realiasi anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan

FORMULIR E.55
EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021

No	SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2017, 2018, 2019 dan 2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi / Ket
													I		II		III		IV														
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12=I,II,III,IV			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K		Rp	K		K		Rp	K	Rp		
1	• Terlaksananya koordinasi perencanaan program yang efektif • Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kinerja pelayanan administrasi perkantoran, serta pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		4,946,296,420	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		4,089,947,765	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata		-		-		-		-		-	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		0	0.00%		Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		4,089,947,765	61.15%	77.02%	BKD	Prov. Sulut
1		Keg Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi umum	60	Bln	1,984,235,160	36	Bln	1,530,248,443.00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	36	Bln	1,530,248,443	60.00%	77.12%		
2		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi keuangan	60	Bln	997,070,000	36	Bln	630,568,645.00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	36	Bln	630,568,645	60.00%	63.24%		
3		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi pengadaan barang/jasa	60	Bln	501,065,100	36	Bln	263,429,646.00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	36	Bln	263,429,646	60.00%	52.57%		
4		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi kepegawaian	60	Bln	184,636,000	36	Bln	102,582,492.00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	36	Bln	102,582,492	60.00%	55.56%		
5		Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	84	Bln	1,219,732,160	73	Keg	1,509,604,539.00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	73	Keg	1,509,604,539	86.90%	123.77%		
6		Keg Penataan Kearsipan	Jumlah Pelaksanaan keg Penataan Kearsipan	60	Bln	59,558,000	24	Bln	53,514,000.00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	24	Bln	53,514,000	40.00%	89.85%		
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0%**	**0.00%**	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**61.15%**	**77.02%**		
																						Predikat Kinerja			**Sangat rendah**	**Sangat rendah**	**Predikat Kinerja**			**Rendah**	**Tinggi**		
2	• Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang dan pendukung pekerjaan PNS BKD	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		10,479,304,157	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		4,804,821,397	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		-		-		-		-		-	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		0	0.00%		Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		4,804,821,397	80.44%	60.19%	BKD	Prov. Sulut
1		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat	1	unit	502,346,250	3	unit	467,091,945																0	0	3	unit	467,091,945	300.00%	92.98%		
2		Pengadaan peralatan/ perlengkapan gdg kantor	Prosentase ketersediaan perlengkapan kantor yang memadai	375	unit	6,907,840,286	121	unit	3,111,439,924.00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	121	unit	3,111,439,924	32.27%	45.04%		
3		Pemeliharaan rutin/berkala gdg kantor	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan gdg kantor	5	gdg	229,042,147	2	gdg	164,243,205.00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	2	gdg	164,243,205	40.00%	71.71%		
4		Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Prosentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	130	unit	2,560,755,783	13	unit	906,156,483.00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	13	unit	906,156,483	10.00%	35.39%		
5		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gdg kantor	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan peralatan gdg kantor	1550	unit	279,319,691	309	unit	155,889,840.00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	309	unit	155,889,840	19.94%	55.81%		
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0%**	**0.00%**	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**80.44%**	**60.19%**		
																						Predikat Kinerja			**Sangat rendah**	**Sangat rendah**	**Predikat Kinerja**			**Sangat Rendah**	**rendah**		
3	• Mewujudkan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat ketaatan dan kepatuhan aparatur terhadap	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		606,778,347	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		618,670,000	Nilai Akuntabilitas		-		-		-		-		-	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum		-	0.00%		Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		618,670,000	68.73%	113.52%	BKD	Prov. Sulut
1		Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi	12	Unit	72,000,000	10	Unit	98,000,000.00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-	0	0	10	unit	98,000,000	83.33%	136.11%		
2		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah PNS yang menerima pakaian dinas	350	ASN	306,778,347	210	ASN	212,220,000.00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-	0	0	210	org	212,220,000	60.00%	69.18%		
3		Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah PNS yang menerima pakaian dinas	350	ASN	228,000,000	220	ASN	308,450,000.00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-	0	0	220	ASN	308,450,000	62.86%	135.29%		
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0%**	**0.00%**	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**68.73%**	**113.52%**		
																						Predikat Kinerja			**Sangat rendah**	**Sangat rendah**	**Predikat Kinerja**			**Sedang**	**Sangat Hemat**		
4	• Mewujudkan kualitas rumusan perundang-undangan kepegawaian yang optimal	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat pengetahuan dan keahlian sumber daya aparatur dalam implementasi Tugas Pokok dan Fungsi, serta peraturan di bidang pemerintahan daerah dan kepegawaian	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		1,398,566,495	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		1,192,339,963	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		-		-		-		-		-	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		-	0.00%		Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum		1,192,339,963	62.41%	70.79%	BKD	Prov. Sulut
1		Sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi bagi PNS dilingkungan Pemprov. Sulut dan Kab/Kota	20	keg	674,975,303	12	keg	655,803,863.00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-	0	0	12	Keg	655,803,863	60.00%	97.16%		
2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	40	keg		8	Keg	168,406,000.00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-	0	0	8	Keg	168,406,000	20.00%	133.00%		
3		Pelatihan Kantor Sendiri	Jumlah pelaksanaan pelatihan Tupoksi BKD bagi PNS BKD	56	keg	559,351,861	31	keg	276,469,500.00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-	0	0	31	materi	276,469,500	55.36%	20.00%		
		Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah							11,741,000.00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-	0	0			11,741,000				
4		Workshop kepegawaian	Jumlah pelaksanaan workshop bagi PNS dilingkungan	7	keg	164,239,331	8	keg	79,919,600.00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-	0	0	8	Keg	79,919,600	114.29%	33.00%		
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0.00%**	**0.00%**	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**62.41%**	**70.79%**		
																						Predikat Kinerja			**Sangat rendah**	**Sangat rendah**	**Predikat Kinerja**			**Rendah**	**Sedang**		

No	SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2017, 2018, 2019 dan 2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi / Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=I,II,III,IV			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K			K		Rp				
5	• Mewujudkan peningkatan pengembangan sistem pelap capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat penyelesaian dan kualitas pelap kinerja dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		404,542,875	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		132,363,551	Nilai Akuntabilitas		-			-			-			-			-	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum		-		0.00%	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		132,363,551	56.67%	31.91%	BKD	Prov. Sulut
1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah lap	15	lap	113,302,063	9	lap	46,265,233.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	9	lap	46,265,233	60.00%	40.83%		
2		Penyusunan laporan Bulanan SKPD	Jumlah lap	50	lap	173,269,054	30	lap	57,962,518.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	30	lap	57,962,518	60.00%	33.45%		
3		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah lap	15	lap	70,941,252	7	lap	11,981,800.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	7	lap	11,981,800	46.67%	19.00%		
4		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah lap	5	lap	47,030,506	3	lap	16,154,000.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	3	lap	16,154,000	60.00%	34.35%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0.00%**	**0.00%**	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**56.67%**	**31.91%**		
																									Predikat Kinerja			**Sangat rendah**	**Sangat rendah**	**Predikat Kinerja**			**Rendah**	**Sangat rendah**		
6	• Mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan hari-hari besar	Program Penyelenggaraan Hari-hari besar Kenegaraan/ Kedaerahan	Tingkat Pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		1,011,357,188	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		681,892,000	Nilai Akuntabilitas																					Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		681,892,000	80.00%	67.42%	BKD	Prov. Sulut
1		Pelaksanaan Lomba PBB	Pelaksanaan Keg Lomba PBB	15	Kategori	1,011,357,188	12	Kategori	681,892,000.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				0	0	12	keg	681,892,000	80.00%	67.42%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0.00%**	**0.00%**	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**80.00%**	**67.42%**		
																									Predikat Kinerja			**Sangat rendah**	**Sangat rendah**	**Predikat Kinerja**			**Tinggi**	**Sedang**		
7	• Terlaksananya koordinasi perencanaan program yang efektif	Program Perencanaan PD	Peningkatan kinerja pelayanan publik BKD	5 dok		364,739,400	5 dok		257,204,278			-			-			-			-			-			-	0.00%		0	5	dok	257,204,278	33.33%	39.24%	BKD	Prov. Sulut
1		Penyusunan Rencana Strategis PD	Dok Renstra	5	dok	104,430,438	1	Dok	41,286,800.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	Dok	-	0	0	1	Dok	41,286,800	20.00%	39.54%		
2		Penyusunan Rencana Kerja PD	Dok Renja	10	dok	238,164,950	4	Dok	142,790,778.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	Dok	-	0	0	4	Dok	142,790,778	40.00%	59.95%		
3		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Dok RKA	10	dok	126,574,450	4	Dok	73,126,700.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	Dok	-	0	0	4	Dok	73,126,700	40.00%	57.77%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0.00%**	**0.00%**	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**33.33%**	**39.24%**		
																									Predikat Kinerja			**Sangat rendah**	**Sangat rendah**	**Predikat Kinerja**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
8	• Mewujudkan sistem pembinaan manajemen kepegawaian yang optimal • Mewujudkan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas	Program Pembinaan Manajemen Kepegawaian	Peningkatan kinerja pelayanan publik BKD	15 Kabupaten dan Kota		2,089,374,095	15 Kabupaten dan Kota		1,121,230,100	15 Kabupaten dan Kota		-			-			-			-			-			-	15 Kabupaten dan Kota			0	15 Kabupaten dan Kota		1,121,230,100	27.78%	53.39%	BKD	Prov. Sulut
1		Konsolidasi Manajemen Kepegawaian se-Provinsi Sulut	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	36	keg	736,885,243	2	keg	157,634,400.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	2	keg	157,634,400	5.56%	21.39%		
2		Diseminasi Hasil Pembangunan Daerah Bidang Kepegawaian	Keg Penyediaan Bahan Untuk Kebutuhan Diseminasi	5	keg	302,422,614	2	keg	131,255,000.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	2	Keg	131,255,000	40.00%	43.40%		
3		Forum BKD	Jumlah pelaksanaan forum BKD	30	keg	517,412,238	6	keg	386,148,300.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	6	0	386,148,300	20.00%	11.00%		
4		Survey Pelayanan Kepegawaian	Informasi indeks profesionalitas,	3	buku	183,720,000	1	buku	245,604,400.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	1	buku	245,604,400	33.33%	133.68%		
5		Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kepegawaian		10	lap	348,934,000	4	lap	200,588,000.00			-			-			-			-			-			-			4	lap	200,588,000	40.00%	57.49%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0%**	**0.00%**	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**27.78%**	**53.39%**		
																									Predikat Kinerja			**Sangat rendah**	**Sangat rendah**	**Predikat Kinerja**			**Sangat Rendah**	**rendah**		
9	• Mewujudkan peningkatan etos kerja dan karier Aparatur Sipil Negara melalui pembinaan karier dalam jabatan struktural dan fungsional	Program Pengembangan Aparatur	Tingkat pelaksanaan pengadaan aparatur yang	1. Jumlah JPT (44 org) , 2. Jumlah		17,464,335,984	1. Jumlah JPT (44 org) , 2.		15,535,513,958	1. Jumlah JPT (44 org) , 2.		-			-			-			-			-			-	1. Jumlah JPT (44 org) , 2. Jumlah Jab Adm		-		0.00%	1. Jumlah JPT (44 org) , 2. Jumlah		#########	106.36%	83.67%	BKD	Prov. Sulut
1		Pengembangan Pendidikan Formal Aparatur Sipil Negara	Jumlah PNS Pemprov. Sulut mengikuti tugas belajar	226	org	3,953,588,125	128	keg	6,474,940,506.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	128	org	6,474,940,506	56.64%	163.77%		
2		Assesment Kompetensi Pegawai ASN	Jumlah lap assessment	1	lap	170,000,000	4	lap	750,364,189.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	4	lap	750,364,189	80.00%	88.28%		
3		Pengembangan Inovasi Aparatur Negara	Jumlah Pelaksanaan keg Lomba Inovasi Aparatur Negara	3	keg	5,190,088,380	1	keg	1,730,029,461.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	1		1,730,029,461	33.33%	33.33%		
4		Pengebilaan Pengangkatan dan Pemberhentian serta Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah JFT yang difasilitasi	20	Keg	370,161,629	594	berkas	350,729,577.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	594	berkas	350,729,577	40.00%	18.95%		
5		Seleksi jabatan pimpinan tinggi	Jumlah thpn seleksi jabatan pimpinan tinggi	25	thpn	380,000,000	12	thpn	587,590,415.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	12	thpn	587,590,415	48.00%	19.00%		
6		Mutasi jabatan administrasi	Jumlah thpn mutasi jabatan administrator dan jabatan pengawas	20	thpn	896,880,000	16	thpn	597,251,485.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	16	thpn	597,251,485	80.00%	66.59%		
7		Pelantikan dan serah terima jabatan	Jumlah perangkat daerah/instansi pemerintah	40	PD	60,900,000	40	PD	24,210,000.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	40	PD/instansi	24,210,000	100.00%	39.75%		
8		Pelaksanaan sertifikasi kompetensi jabatan fungsional tertentu	Jumlah keg sertifikasi kompetensi jabatan fungsional tertentu	5	dok	39,500,000	9	dok	148,926,670.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	9	dok	148,926,670	180.00%	377.03%		
9		Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Teknis, Fungsional dan Manajerial kepegawaian ASN	Jumlah pegawai ASN yang ditugaskan dalam diklat, bimtek, worksop, kursus, seminar, penataran, dan praktek kerja di kantor pemerintah dan swasta,	120	org	4,693,000,000	150	org	4,211,218,920.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	150	org	4,211,218,920	125.00%	89.73%		
10		Peningkatan Kompetensi kepemimpinan pegawai ASN	Jumlah pegawai Asn yang ditugaskan dalam diklat kepemimpinan	15	org	560,000,000	66	org	154,692,580.00	0	org	-	0	org	-	0	org	-	0	org	-	0	org	-	0	org	-	0	0	66	org	154,692,580	440.00%	27.62%		

No	SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2017, 2018, 2019 dan 2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi / Ket
				I			II			III			IV																								
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=I,II,III,IV			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K			K	Rp		
11		Monitoring terhadap PNS Tugas Belajar dan Praja/Taruna Sekolah Kedinasan		5	keg	172,083,500	3	keg	68,833,400.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	3	keg	68,833,400	60.00%	40.00%		
12		Penilaian Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Kabupaten dan Kota				-			45,473,015.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0			45,473,015				
13		Fasilitasi Peserta Diklat Kepemimpinan I dan Diklat Kepemimpinan II		3	keg	978,134,350	1	keg	391,253,740.00	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	keg	391,253,740	33.33%	40.00%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		106.36%	83.67%		
																									Predikat Kinerja			Sangat rendah	Sangat rendah	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi		
10	• Mewujudkan pengelolaan kenaikan pangkat yang optimal • Terlaksananya pengelolaan penempatan dan pemindahan Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi • Mewujudkan pengelolaan pemberhentian dan status Aparatur Sipil Negara yang optimal	Program Pengelolaan Mutasi dan Status Kepegawaian	Tingkat kinerja peningkatan karir, mutasi dan proses pensiun PNS	8 Pelayanan Administrasi		3,371,190,625	8 Pelayanan Administrasi		2,581,284,609.00	7 Pelayanan Administrasi		-			-			-			-			-			-	8 Pelayanan Administrasi		-		0.00%	8 Pelayanan Administrasi		2,581,284,609	60.49%	65.62%	BKD	Prov. Sulut
1		Pengelolaan Kenaikan Pangkat	ketersediaan kebutuhan untuk penyelenggaraan Keg pengelolaan kenaikan pangkat eks	20000	dok	1,394,449,019	13205	Dok	1,352,626,360.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	13205	Dok	1,352,626,360	66.03%	97.00%		
2		Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat, pemindahan, dan pensiun	5	keg	246,430,420	3	keg	113,003,200.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	3	Keg	113,003,200	60.00%	45.86%		
3		Pemrosesan Pensiun	Pengebilan konsep SK Pensiun dan pengusulan pensiun untuk penerbitan keputusan	5	Keg	807,998,496	3	keg	523,266,942.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	3	Keg	523,266,942	60.00%	64.76%		
4		Pembekalan bagi ASN memasuki Purna tugas	Jumlah pembekalan ASN memasuki purna tugas	5	keg	103,475,937	3	keg	72,935,800.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	3	Keg	72,935,800	60.00%	70.49%		
5		Pemrosesan Status Pegawai ASN	Jumlah keg pemrosesan status ASN	5	keg	35,089,289	2	keg	23,793,000.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	2	Keg	23,793,000	40.00%	67.81%		
6		Penilaian Kompetensi PNS Pindah - Masuk Pemprov Sulut	ketersediaan kebutuhan untuk penilaian kompetensi PNS pindah masuk Pemprov. Sulut	10	keg	228,129,253	6	keg	93,665,000.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	6	Keg	93,665,000	60.00%	41.06%		
7		Pengebilan Cuti, Pemindahan dan Penempatan PNS	Jumlah dok usulan Cuti dan Pindah yang dapat diproses	2500	Dok	555,618,211	1935	keg	401,994,307.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	1935	Dok	401,994,307	77.40%	72.35%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		60.49%	65.62%		
																									Predikat Kinerja			Sangat rendah	Sangat rendah	Predikat Kinerja		Rendah	Rendah		
11	• Mewujudkan akurasi kehadiran Aparatur Sipil Negara melalui e-absensi. • Mewujudkan sitem pengawasan dan pengendalian kepegawaian melalui pembinaan dan penegakan disiplin ASN	Program Pembinaan Aparatur	Tingkat pengkajian, pembinaan dan pengawasan aparatur	4% pada akhir tahun		2,719,157,069	4% pada akhir tahun		1,271,169,686	4% pada akhir tahun		-			-			-			-			-			-	4% pada akhir tahun		-		0.00%	4% pada akhir tahun		1,271,169,686	119.07%	54.40%	BKD	Prov. Sulut
1		Penilaian kinerja dan Disiplin Pegawai ASN	Jumlah pelaksanaan verifikasi dan evaluasi kehadiran PNS dan kinerja PNS	60	Bln	1,219,010,394	492	rekomendasi	413,961,749.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	492	Bln	413,961,749	99.00%	33.96%		
2		Pemrosesan Kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah penanganan kasus yang dilakukan PNS setiap tahun	25	kasus	214,154,210	58	kasus	128,231,060.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	58	kasus	128,231,060	232.00%	59.88%		
3		Inspeksi Disiplin dan Kehadiran PNS	Jumlah pelaksanaan Sidak	120	keg	869,767,181	93	keg	667,343,977.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	93	%	667,343,977	77.50%	76.73%		
4		Pembinaan dan Pengembangan Karakter dan Mental ASN	Jumlah Pembinaan Pengambangan Karakter dan Mental ASN	36	keg	325,927,384	12	keg	30,750,000.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	12	keg	30,750,000	33.33%	9.43%		
5		Pelaksanaan Apel Kerja	Jumlah Pelaksanaan Apel Kerja	36	keg	90,297,900	16	keg	30,882,900.00							0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	16		30,882,900	44.44%	34.20%		
6		Penguatan Budaya Integritas, Budaya Kinerja dan Budaya Melayani	Pelaksanaan Seminar dan atau apel kerja Blnan dilingkungan Pemprov. Sulut	11	keg	266,253,750	12																				-			#DIV/0!	12		9,002,500	109.09%	3.38%		
7		Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	1	keg	21,300,300	0																				-			#DIV/0!	0		-	0.00%	0.00%		
8		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Aparatur	Jumlah lap hasil monitoring dan evaluasi dan tim kerjanya	1	lap	9,318,881	0																				-			#DIV/0!	0		-	0.00%	0.00%		
9		Keg Pembinaan dan pengembangan karakter dan mental ASN	Jumlah ASN yang terlatih peraturan baris-berbaris	3000	org	325,927,384	0	org																			-			#DIV/0!	0		-	0.00%	0.00%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0%	0.00%	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		119.07%	54.40%		
																									Predikat Kinerja			Sangat rendah	Sangat rendah	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Rendah		
12	• Mewujudkan pembinaan, fasilitasi profesi dan penguatan kelembagaan KORPRI	Program Pembinaan, Fasilitasi Profesi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI	Tingkat pengkajian, pembinaan dan pengawasan aparatur	100%		2,303,245,473	100%		2,480,542,082	100%		-			-			-			-			-			-	100.00%		-		0	100.00%		2,480,542,082	79.72%	107.03%	BKD	Prov. Sulut
1		Pelayanan konsultasi bantuan hukum anggota KORPRI	Jumlah anggota KORPRI yang mendapat bantuan hukum,	12	lap	265,050,473	24	keg	499,593,200.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	24	lap	499,593,200	200.00%	188.49%		
2		Penyediaan kebutuhan administrasi sekretariat dewan pengurus KORPRI	Jumlah lap pelaksanaan tugas sekretariat DP KORPRI	12	lap	374,214,000	13	lap	276,050,882.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	13	lap	276,050,882	108.33%	73.77%		
3		Pelaksanaan PORSENI, MTQ, lomba kesenian dan budaya dan keg keagamaan	Jumlah Pelaksanaan PORSENI, MTQ, lomba kesenian dan budaya dan tim kerjanya	10	lomba	615,000,000	3	-	1,091,879,214.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	3	lomba	1,091,879,214	30.00%	177.54%		
4		Pelaksanaan lomba olahraga/POR serta seni dan budaya di lingkungan KORPRI	Jumlah pelaksanaan lomba olahraga/POR serta seni dan	10	lomba	572,755,000	4	-	224,400,628.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	4	0	224,400,628	40.00%	39.18%		
5		Fasilitasi Kekuatertaan pegawai ASN pada PORNAS KORPRI , Lomba seni dan		6	Lomba	235,128,000	2		192,021,000.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	2	lomba	192,021,000	33.33%	81.67%		
6		Musyawarah KOPRI Provinsi Sulawesi Utara		3	keg	241,098,000	2		196,597,158.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	2	keg	196,597,158	66.67%	81.54%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		79.72%	107.03%		
																									Predikat Kinerja			Sangat rendah	Sangat rendah	Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat tinggi		

No	SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2017, 2018, 2019 dan 2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Progg Jawab	Lokasi / Ket
													I			II			III			IV																	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=I,II,III,IV			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K	Rp		
13	• Mewujudkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara berdasarkan kinerja, masa kerja dan kompetisi	Program Pengembangan Kesejahteraan Pegawai	Meningkatnya kinerja pelayanan	100%		6,498,086,955	100%		4,583,978,938	100%		-			-			-			-			-	100.00%		-			100.00%		4,583,978,938	48.58%	161.42%	BKD	Prov. Sulut
1		Seleksi pegawai ASN Tekdan	Jumlah Pelaksanaan seleksi ASN Tekdan	5	keg	1,323,620,720	5	keg	921,294,000.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	5	Keg	921,294,000	100.00%	69.60%		
2		Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	Jumlah pelaksanaan	5	keg	45,568,500	1	keg	46,324,000.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	1	%	46,324,000	20.00%	101.66%		
3		Fasilitasi pemberian penghargaan satyalancana karya satya	Jumlah pelaksanaan pemberkasan untuk pemberian penghargaan satya lencana	300	Dok	57,784,375	103	Dok	235,618,700.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	103	dok	235,618,700	34.33%	407.76%		
4		Fasilitasi pengelolaan Administrasi BPJS, Taspen dan Bapertarum		25	keg	5,071,113,360	10	keg	3,380,742,238.00																				10		3,380,742,238	40.00%	66.67%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%	Rata-rata Capaian Kinerja (%)			48.58%	161.42%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
14	• Mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang berkualitas melalui SIMPEG online	Program Pengembangan Data dan Informasi Kepegawaian	Tingkat pembangunan dan pengelolaan data dan	10% pada akhir tahun		5,079,102,735	10% pada akhir tahun		3,159,778,405	10% pada akhir tahun		-			-			-			-			-	10% pada akhir tahun		-		0.00%	10% pada akhir tahun		3,159,778,405	55.93%	54.20%	BKD	Prov. Sulut
1		Pengembangan Sistem Informasi ASN Terintegrasi	Jumlah Api sistem informasi ASN terdistribusi/terintegrasi	5	Api	1,455,780,395	4	keg	1,059,691,588.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	4	Api	1,059,691,588	80.00%	72.79%		
2		Pengembangan sistem informasi pengawasan daerah	pembangunan dan pengelolaan SIMPEG yang	60	Bln	1,939,922,497	25	Bln	1,388,570,282.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	25	Bln	1,388,570,282	41.67%	71.58%		
3		Pengelolaan Absensi Online	Jumlah Pengelolaan SMART online	150	UPT dan BPP	237,803,952	114	UPT dan BPP	84,705,234.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	114	PD dan UPT	84,705,234	76.00%	35.62%		
4		Pengelolaan Arsip Manual dan Digital Kepegawaian	Jumlah Keg pengelolaan dan penataan arsip manual PNS	5	keg	169,667,866	32	keg	81,999,800.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	32	%	81,999,800	22.00%	48.33%		
5		Rekonsiliasi Data Kepegawaian	Jumlah lap rekonsiliasi	20	lap	1,275,928,025	12	keg	544,811,501.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	12	lap	544,811,501	60.00%	42.70%		
15		Pembangunan / pengembangan sistem jaringan informasi kinerja pegawai	pembangunan/pengembangan sistem jaringan informasi kinerja	1	Apl	1,146,043,136	100%		109,408,800																		-	#DIV/0!	#DIV/0!							
15		Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)	Keg administrasi pengelolaan KPE				-		-																		-	#DIV/0!	#DIV/0!							
15		Pengembangan Unit CAT	Tersedianya SDM pengelola CAT dan prosedur operasional				-		-																		-	#DIV/0!	#DIV/0!							
15		Sosialisasi Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi				-		-																		-	#DIV/0!	#DIV/0!							
14.10		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Data dan Informasi Kepegawaian	lap monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan data dan informasi kepegawaian				-		-																		-	#DIV/0!	#DIV/0!							
14.11		Perumusan dan Penetapan Kebijakan Sistem Informasi ASN	Jumlah Dok kebijakan Sistem Informasi ASN				-		-																		-	#DIV/0!	#DIV/0!							
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%	Rata-rata Capaian Kinerja (%)			55.93%	54.20%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Predikat			Rendah	Rendah		
15	• Mewujudkan kualitas perencanaan pegawai khususnya penyusunan formasi yang rasional	Program Perencanaan dan Pengadaan Aparatur	Tingkat pelaksanaan penyediaan aparatur yang berkualitas, profesional, dan	10% pada akhir tahun		5,215,934,612	10% pada akhir tahun		5,380,929,333	10% pada akhir tahun		-			-			-			-			-	10% pada akhir tahun		-			10% pada akhir tahun		5,380,929,333	89.70%	268.19%	BKD	Prov. Sulut
1		Kajian kebijakan dan hukum bidang kepegawaian	Jumlah naskah kajian/telaahan hukum yang dihasilkan	25	kajian	265,442,213	20	keg	220,381,257.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	20	keg	220,381,257	80.00%	83.02%		
2		Penyusunan Formasi Pegawai ASN	Jumlah Dok formasi yang tersusun	5	dok	1,201,107,774	5	keg	442,686,758.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	5	lap	442,686,758	100.00%	36.86%		
3	• Mewujudkan penerimaan Praja/Taruna sekolah kedinasan yang berkualitas	Pengembangan Manajemen ASN berbasis Meritrokasi (Merit Sistem)		5	keg	1,593,506,511	1	keg	531,168,837.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	1	keg	531,168,837	20.00%	33.33%		
4		Penerimaan Calon Pegawai ASN	Jumlah thpn penerimaan calon pegawai ASN yang menjadi	4	thpn	126,075,000	8	thpn	852,083,664.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	8	thpn	852,083,664	200.00%	675.85%		
5		Diseminasi Pendidikan/sekolah kedinasan	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan diseminasi pendidikan/sekolah kedinasan	15	kab/kota	84,050,000	17	Kab/Kota	816,420,667.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	17	kab/kota	816,420,667	113.33%	971.35%		
6		Pelaksanaan penerimaan Praja/Taruna sekolah kedinasan utusan Sulawesi Utara	Jumlah thpn penerimaan calon Praja/Taruna sekolah kedinasan yang menjadi kewenangan	6	thpn	294,175,000	14	thpn	1,229,173,852.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	14	thpn	1,229,173,852	233.33%	417.84%		
7		Penyusunan pola karir pegawai ASN	Jumlah keg penyediaan	2	dok	30,900,000	2	-	106,350,034.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	2	Bln	106,350,034	100.00%	344.17%		
8		Penyusunan Standar Penilaian Kinerja ASN Berbasis Jabatan dan IT	Terbentuknya Standar kualifikasi Penilaian Kinerja ASN	5	dok	476,274,406	2	keg	84,696,682.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	2	PD dan UPT	84,696,682	40.00%	17.78%		
9		Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Tahunan	Terbentuknya Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Tahunan	5	dok	229,278,708	2	keg	785,497,582.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	2	%	785,497,582	40.00%	342.60%		
10		Pengembangan materi/soal CAT		5	keg	215,700,000	1	keg	71,900,000.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	1	keg	71,900,000	20.00%	33.33%		
11		Sosialisasi Pendidikan/Sekolah Kedinasan		1	keg	71,900,000	1	keg	31,395,000.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	1	keg	31,395,000	100.00%	43.66%		
12		Pelaksanaan orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)		10	keg	627,525,000	2	keg	209,175,000.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	2	keg	209,175,000	20.00%	33.33%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%	Rata-rata Capaian Kinerja (%)			89.70%	268.19%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Predikat Kinerja			Tinggi	Sangat Tinggi		
1	• Terlaksananya koordinasi perencanaan program yang efektif	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		-	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		-	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD		50,293,455	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		13,512,100	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		20,658,700	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		39,826,000	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata		45,126,200	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		45,126,200			88.89%	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		45,126,200	0.00%	0.00%	BKD	Prov. Sulut
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	0	0	-	0	0	-	2	dok	25,942,999	2	dok	5,022,200	2	dok	12,168,800	2	dok	22,061,000	2	dok	22,407,000	2	dok	22,407,000	100.00%	86.37%	2	dok	22,407,000	0.00%	0.00%		
2	• Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Laporan	0	0	-	0	0	-	2	dok	17,570,775	0	dok	5,973,900	0	dok	5,973,900	1	dok	15,249,000	2	dok	17,089,200	2	dok	17,089,200	100.00%	97.26%	2	dok	17,089,200	0.00%	0.00%		
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	0	0	-	0	0	-	1	lap	6,779,681	1	lap	2,516,000	1	lap	2,516,000	1	lap	2,516,000	1	lap	5,630,000	1	lap	5,630,000	100.00%	83.04%	1	lap	5,630,000	0.00%	0.00%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100%	88.89%	Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Tinggi	Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2017, 2018, 2019 dan 2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi / Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=I,II,III,IV		13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
2	Mewujudkan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		-	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		-	Nilai Akuntabilitas		114,347,095	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		22,524,838	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		49,187,295	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		68,308,452	Nilai Akuntabilitas		111,422,028	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum	111,422,028		97.39%	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-	111,422,028	0.00%	0.00%	BKD	Prov. Sulut
1		Pelaksanaan dan Penatausahaan	Jumlah Dokumen keuangan	0	0		0	0		12	bulan	106,389,596	3	bulan	18,790,538	6	bulan	44,332,995	9	bulan	63,454,152	12	bulan	103,677,728	12	bulan	103,677,728	100.00%	97.45%	12	bulan	103,677,728	0.00%	0.00%		
2		Koordinasi dan penyusunan Laporan	Jumlah laporan keuangan yang	0	0		0	0		12	bulan	7,957,499	3	bulan	3,734,300	6	bulan	4,854,300	9	bulan	4,854,300	12	bulan	7,744,300	12	bulan	7,744,300	100.00%	97.32%	12	bulan	7,744,300	0.00%	0.00%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100%**	**97.39%**	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**0.00%**	**0.00%**		
																									Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**Predikat Kinerja**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
3	Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		-	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		-	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD		11,801,427	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		5,366,800	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		6,430,600	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		6,430,600	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		11,341,600	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	11,341,600		96.10%	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	11,341,600	0.00%	0.00%	BKD	Prov. Sulut
1		Penataaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	0	0		0	0		12	bulan	11,801,427	3	bulan	5,366,800	6	bulan	6,430,600	9	bulan	6,430,600	12	bulan	11,341,600	12	bulan	11,341,600	100.00%	96.10%	6	bulan	11,341,600	0.00%	0.00%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100%**	**96.10%**	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**0.00%**	**0.00%**		
																									Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**Predikat Kinerja**			**Sangat Rendah**	**Sangat rendah**		
4	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		-	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		-	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD		450,898,768	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		13,845,276	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		231,047,190	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		251,815,104	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		428,127,406	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	428,127,406		93.21%	Nilai Akuntabil tas	428,127,406	0.00%	0.00%	BKD	Prov. Sulut
1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	0	0		0	0		2	keg	223,340,000	-		-	2	keg	159,720,000	2	keg	159,720,000	2	keg	218,593,250	2	keg	218,593,250	100.00%	97.87%	2	Keg	218,593,250	0.00%	0.00%		
2		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan yang disusun	0	0		0	0		1	lap	126,673,610			13,845,276	0	lap	34,613,190		lap	55,381,104	1	lap	115,288,956	1	lap	115,288,956	100.00%	91.01%	1	Keg	115,288,956	0.00%	0.00%		
3		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0	0		0	0		3	keg	35,067,712			-	2	keg	14,048,000	2	keg	14,048,000	3	keg	30,604,800	3	keg	30,604,800	100.00%	87.27%	3	materi	30,604,800	0.00%	0.00%		
4		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0	0		0	0		3	keg	65,817,446			-	1	keg	22,666,000	1	keg	22,666,000	3	keg	63,640,400	3	keg	63,640,400	100.00%	96.69%	3	Keg	63,640,400	0.00%	0.00%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**93.21%**	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**0.00%**	**0.00%**		
																									Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**Predikat Kinerja**			**Sangat rendah**	**Sangat rendah**		
5	Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		-	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		-	Nilai Akuntabilitas		346,396,801	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		42,083,200	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		96,968,698	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum		176,898,772	Nilai Akuntabilitas		288,715,457	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum	288,715,457		91.18%	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-	288,715,457	0.00%	0.00%	BKD	Prov. Sulut
1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan	0	0		0	0		12	bulan	99,478,037	3	bulan	25,600,000	6	bulan	43,005,400	9	bulan	54,343,800	12	bulan	94,426,500	12	bulan	94,426,500	100.00%	95%	12	lap	94,426,500	0.00%	0.00%		
2		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan materi yang dicetak	0	0		0	0		4	materi	7,526,745	1	materi	1,939,200	1	materi	4,129,200	1	materi	5,037,200	4	materi	7,419,100	4	materi	7,419,100	100.00%	99%	4	lap	7,419,100	0.00%	0.00%		
3		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	0	0		0	0		12	bulan	26,554,990	3	bulan	-	6	bulan	12,099,000	9	bulan	13,734,800	12	bulan	25,314,800	12	bulan	25,314,800	100.00%	95%	12	lap	25,314,800	0.00%	0.00%		
4		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi/konsultasi yang	0	0		0	0		12	bulan	212,837,029	3	bulan	14,544,000	6	bulan	37,735,098	9	bulan	103,782,972	12	bulan	161,555,057	12	bulan	161,555,057	100.00%	76%	12	lap	161,555,057	0.00%	0.00%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**91.18%**	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**0.00%**	**0.00%**		
																									Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**Predikat Kinerja**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
6	Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		-	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		-	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD		499,432,437	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B			Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B			Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		38,000,000	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-		490,479,000	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	490,479,000			Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	490,479,000	0.00%	0.00%	BKD	Prov. Sulut
1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	0	0		-	0		25	unit	499,432,437	0	0	-	0	0	-	2	Unit	38,000,000	25	Unit	490,479,000	25	Unit	490,479,000	100.00%	98%	25	keg	490,479,000	0.00%	0.00%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**98.21%**	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**0.00%**	**0.00%**		
																									Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**Predikat Kinerja**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

No	SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2017, 2018, 2019 dan 2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Prog Jawab	Lokasi / Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=I,II,III,IV			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
7	Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	0%		-	0%		-	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata		414,559,106	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		44,755,775	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		126,844,506	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		211,589,232	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		395,836,410	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		395,836,410			97.68%	5 dok		395,836,410	0.00%	0.00%	BKD	Prov. Sulut
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	0	0	-	0	-	-	14	unit	303,463,188	3	unit	27,155,775	5	unit	86,594,506	10	unit	161,963,232	14	unit	285,530,910	14	unit	285,530,910	100.00%	94.09%	14	unit	285,530,910	0.00%	0.00%		
2		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi	0	0	-	0	-	-	1	keg	35,200,000	1	keg	17,600,000	1	keg	17,600,000	1	keg	24,476,000	1	keg	35,196,000	1	keg	35,196,000	100.00%	99.99%	1	keg	35,196,000	0.00%	0.00%		
3		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah kegiatan pemelihraaran/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	0	0	-	0	-	-	12	bulan	75,895,918	3	bulan	-	6	bulan	22,650,000	9	bulan	25,150,000	12	bulan	75,109,500	12	bulan	75,109,500	100.00%	98.96%	12	bulan	75,109,500	0.00%	0.00%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	97.68%	Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
8	• Mewujudkan sistem pembinaan manajemen kepegawaian yang optimal • Mewujudkan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas	Pengadaan , Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1. Jumlah kegiatan pengadaan, Pemberhentian dan informasi kepegawaian yang	0%		-	0%		-	1.7 kegiatan 2. 5,20%		3,362,373,049	1.7 kegiatan 2. 5,20%		193,546,390	1.7 kegiatan 2. 5,20%		460,802,248	1.7 kegiatan 2. 5,20%		1,146,694,876	1.7 kegiatan 2. 5,20%		3,102,317,547	1.7 kegiatan 2. 5,20%		3,102,317,547			91.80%	1.7 kegiatan 2. 5,20%		3,102,317,547	0.00%	0.00%	BKD	Prov. Sulut
1		Perumusan bahan kebijakan ASN	Jumlah naskah kajian/telaahan hukum yang dihasilkan	0	0		0	0	-	1	tahun	117,615,740	0.20	tahun	31,370,076	0.50	tahun	44,387,602	0.75	tahun	80,152,097	1	tahun	104,381,330	1.0	tahun	104,381,330	100.00%	88.75%	1	tahun	104,381,330	0.00%	0.00%		
2		Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen Formasi yang dihasilkan	0	0	-	0	0	-	1	dok	96,489,421	1	dok	11,391,138	1	dok	30,306,356	1	dok	46,484,794	1	dok	92,693,994	1.0	dok	92,693,994	100.00%	96.07%	1	dok	92,693,994	0.00%	0.00%		
3		Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan ASN dan PPPK	Jumlah tahapan	0	0	-	0	0	-	4	tahapan	962,937,156	0	tahapan	15,416,400	1	tahapan	62,780,400	2	tahapan	411,524,219	4	tahapan	875,598,708	4.0	tahapan	875,598,708	100.00%	90.93%	4	tahapan	875,598,708	0.00%	0.00%		
4		Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen pemberhentian yang diproses	0	0	-	0	-	-	400	dok	135,802,295	195	dok	12,171,500	334	dok	29,577,300	454	dok	38,661,300	617	dok	117,259,300	617.0	dok	117,259,300	100.00%	86.35%	617	dok	117,259,300	0.00%	0.00%		
5		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan lembaga profesi ASN bekerja Pemerintah	0	0	-	0	-	-	5	keg	707,792,483	1	keg	66,182,000	3	keg	141,257,000	4	keg	279,593,000	5	keg	589,797,200	5.0	keg	589,797,200	100.00%	83.33%	5	keg	589,797,200	0.00%	0.00%		
6		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi	0	0	-	0	-	-	1	apl	634,081,488	1	apl	43,170,000	1	apl	113,030,400	1	apl	215,890,800	1	apl	625,628,299	1.0	apl	625,628,299	100.00%	98.67%	1	apl	625,628,299	0.00%	0.00%		
7		Pengelolaan data Kepegawaian	Prosentase pengelolaan data kepegawaian yang diperbaharui secara berkala	0	0	-	0	-	-	100	%	707,654,466	25	%	13,845,276	50	%	39,463,190	75	%	74,388,666	100	%	696,958,716	100.0	%	696,958,716	100.00%	98.49%	100	%	696,958,716	0.00%	0.00%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100%	91.80%	Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
9	Mewujudkan pengelolaan kenaikan pangkat yang optimal, terlaksananya pemindahan dan	Mutasi dan Promosi ASN	Presentase kegiatan mutasi dan promosi ASN	0%			0%		-	100%		733,533,347	100.00%		24,379,838	100%		111,301,293	100%		302,120,221	100%		619,613,582	100%		619,613,582	100.00%	84.47%	100%		619,613,582	0.00%	0.00%	BKD	Prov. Sulut
1		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen mutasi yang diproses	0	0%		0	0%	-	250	dok	101,217,588	200	dok	7,425,200	230	dok	20,525,400	261	dok	37,847,900	830	dok	94,942,656	830	dok	94,942,656	100.00%	93.80%	830	dok	94,942,656	0.00%	0.00%		
2		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah dokumen kenpa yang diproses	0	0		0	0%	-	300	dok	184,564,701	520	dok	14,954,638	718	dok	48,158,095	1,875	dok	89,786,352	###	dok	157,576,034	2,831	dok	157,576,034	100.00%	85.38%	2831	dok	157,576,034	0.00%	0.00%		
3		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen	0	0		0	0	-	5	keg	447,751,058	1	keg	2,000,000	3	keg	42,617,798	4	keg	174,485,969	5	keg	367,094,892	5	keg	367,094,892	100.00%	81.99%	5	keg	367,094,892	0.00%	0.00%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	84.47%	Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Tinggi	Predikat Kinerja			Sangat rendah	Sangat rendah		
10		Pengembangan Kompetensi ASN	1.Presentase ASN yang	0%	0%	-	0%	0%	-	1.75%;		4,907,848,306	1.75%; 2.75%;		20,291,354	1.75%; 2.75%;		247,671,555	1.75%; 2.75%;		1,345,521,606	1.75%; 2.75%;		4,854,027,394	1.75%; 2.75%;		4,854,027,394		87.30%	8 Pelayanan		4,854,027,394	0.00%	0.00%	BKD	Prov. Sulut
1		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti	0	0	-	0	0	-	70	orang	603,974,418	9	orang	13,368,716	9	orang	198,532,559	9	orang	444,093,753	35	orang	587,077,497	34	orang	587,077,497	48.57%	97.20%	34	Dok	587,077,497	0.00%	0.00%		
2		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapat	0	0	-	0	0	-	27	orang	4,140,750,818	9	orang	-	9	orang	1,974,000	10	orang	822,874,000	35	orang	4,131,468,000	35	orang	4,131,468,000	100.00%	99.78%	35	Keg	4,131,468,000	0.00%	0.00%		
3		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah dokumen fasilitasi	0	0	-	0	0	-	2	dok	24,072,817			-	1	dok	8,428,000	1	dok	14,384,000	1	dok	15,950,000	1	dok	15,950,000	50.00%	66.26%	1	Keg	15,950,000	0.00%	0.00%		
4		Fasilitasi Pengembangan Karier dalam jabatang fungsional	Jumlah pemangku jabatanfungsional tertentu pada instansi pemerintah	0	0	-	0	0	-	350	berkas	139,050,253	230	berkas	6,922,638	447	berkas	38,736,996	648	berkas	64,169,853	810	berkas	119,531,897	810	berkas	119,531,897	100.00%	85.96%	810	Keg	119,531,897	0.00%	0.00%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			74.64%	87.30%	Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Tinggi	Predikat Kinerja			Sangat rendah	Sangat rendah		

No	SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2017, 2018, 2019 dan 2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi / Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=I,II,III,IV		13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		K		Rp	K	Rp		
11		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Presentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	0%		-	0%		-	0,5%		478,277,876	0,5%		21,514,900	0,5%		85,856,100	0,5%		129,403,150	0,5%		430,822,250	0,5%	430,822,250		84.00%	0,5%		430,822,250	0.00%	0.00%	BKD	Prov. Sulut
1		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kebijakan yang dihasilkan	0	0	-	0	0	-	5	dok	24,848,805	2	dok	2,396,500	3	dok	7,003,500	4	dok	10,497,000	5	dok	19,803,500	5	dok 19,803,500	100.00%	79.70%	5	dok	19,803,500	0.00%	0.00%		
2		Pengeblaan Pemberian Penghargaan bagi pegawai	Jumlah kegiatan pemberian penghargaan bagi pegawai yang dilaksakan	0	0	-	0	0	-	3	keg	243,559,456	1	keg	4,953,000	1	keg	13,126,000	2	keg	26,322,550	3	keg	231,122,250	3	keg 231,122,250	100.00%	94.89%	3	keg	231,122,250	0.00%	0.00%		
3		Pembinaan disiplin ASN	Presentasi disiplin PNS	0	0	-	0	0	-	92	%	195,149,725	92	%	12,453,400	92	%	59,548,800	92	%	86,033,800	92	%	168,872,700	92	% 168,872,700	100.00%	86.53%	92	%	168,872,700	0.00%	0.00%		
4		Pengeblaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Presentase pelanggaran disiplin ASN	0	0	-	0	0	-	1	%	14,719,890	1	%	1,712,000	1	%	6,177,800	1	%	6,549,800	1	%	11,023,800	1	% 11,023,800	100.00%	74.89%	1	%	11,023,800	0.00%	0.00%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100%**	**84.00%**	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**0.00%**	**0.00%**		
																									Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	**Predikat Kinerja**			**Sangat rendah**	**Sangat rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**63,952,012,430**			**47,891,666,065**			-		-		-			-			-		-		-								
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**0%**	**0%**	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**69%**	**87%**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 15)																									**Predikat Kinerja**		**Sangat rendah**	**Sangat rendah**	**Predikat Kinerja**			**Sedang**	**Tinggi**		
									-																									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						-			-			**11,369,761,667**		**401,820,471**		**1,436,768,185**			**3,716,608,013**			**10,777,828,874**												
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**97.69%**	**91.84%**	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**0.00%**	**0.00%**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 11)																									**Predikat Kinerja**		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**Predikat Kinerja**			**Sangat rendah**	**Sangat rendah**		

FORMULIR E.55

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI

RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI UTARA

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang Mengacu pada Sasaran RKPD Provinsi:
1. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana/Prasarana Kediklatan sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
3. Meningkatkan Perencanaan dan Pengembangan Program Kediklatan PNS

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 13 / 5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																									
		Pendidikan dan Pelatihan																									
1	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana/Prasarana Kediklatan sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah; Indeks Nilai LKIP PD Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Rata-Rata B**	**60 bulan**	**13,785,877,150**	**36 100%**	**9,823,882,906**	**12 100%**	**2,430,147,855**	**3 bulan**	**249,229,020**	**3 bulan**	**396,995,725**	**3 bulan**	**629,666,526**	**3 bulan**	**818,107,231**	**12 bulan**	**2,093,998,502**	**100.00%**	**86.17%**	**48 bulan**	**11,917,881,408**	**80.00%**	**86.48%**	**BPSDMD**	**atutumo**
1.1.		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan	60 bulan	1,628,652,650	48 bulan	596,106,695	12 bulan	588,156,624	3 bulan	68,961,520	3 bulan	142,527,215	3 bulan	141,054,720	3 bulan	211,446,600	12 bulan	563,990,055	100.00%	95.89%	60 bulan	1,160,096,750	100.00%	71.23%		
1.2.		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Tersedianya kebutuhan administrasi barang/jasa	60 bulan	429,790,000	48 bulan	170,480,000	12 bulan	1,088,439,250	3 bulan	180,267,500	3 bulan	254,468,510	3 bulan	237,738,840	3 bulan	301,993,830	12 bulan	974,468,680	100.00%	89.53%	60 bulan	1,144,948,680	100.00%	266.40%		
1.3.		Kegiatan Penataan Kearsipan	Jumlah kegiatan penataan arsip	60 bulan	47,786,500	48 bulan	26,669,400	12 bulan	15,600,000	3 bulan	-	3 bulan	-	3 bulan	2,102,000	3 bulan	830,000	12 bulan	2,932,000	100.00%	18.79%	60 bulan	29,601,400	100.00%	61.95%		
1.4.		Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	284 kali	2,114,067,000	185 kali	1,582,016,291	10 kali	96,682,051	0 kali	-	0 kali	-	1 kali	4,495,000	7 kali	88,321,159	8 kali	92,816,159	80.00%	96.00%	193 kali	1,674,832,450	67.96%	79.22%		
1.5.		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Tersedianya kebutuhan administrasi umum	60 bulan	9,166,519,500	48 bulan	7,251,497,540	12 bulan	637,069,930	3 bulan	-	3 bulan	-	3 bulan	243,925,966	3 bulan	215,515,642	12 bulan	459,441,608	100.00%	72.12%	60 bulan	7,710,939,148	100.00%	84.12%		
1.6.		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya kebutuhan administrasi kepegawaian	60 bulan	399,061,500	48 bulan	197,112,980	12 bulan	4,200,000	3 bulan	-	3 bulan	-	3 bulan	350,000	3 bulan	-	12 bulan	350,000	100.00%	8.33%	60 bulan	197,462,980	100.00%	49.48%		
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**96.67%**	**86.17%**			**94.66%**	**102.07%**		
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Rendah**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
2	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana/Prasarana Kediklatan sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah; INDEKS Kepuasan Peserta Diklat - Jumlah pengaduan peserta diklat tentang layanan publik kediklatan**	**1,780 Unit**	**18,811,662,500**	**211 unit**	**4,608,292,227**	**268 unit**	**4,492,212,929**	**11 unit**	**426,921,000**	**115 unit**	**516,311,400**	**79 unit**	**1,435,855,800**	**83 unit**	**1,923,204,050**	**288 unit**	**4,302,292,250**	**107.46%**	**95.77%**	**499 unit**	**8,910,584,477**	**28.03%**	**47.37%**	**BPSDMD**	**atutumo**
2.1.		Pembangunan gedung kantor	Jumlah prasarana yang terbangun	9 unit	10,944,043,600	2 gedung	1,995,300,000	0 gedung	-	0 gedung	-	0 gedung	-	0 gedung	-	0 gedung	-	0 gedung	-	0.00%	0.00%	2 gedung	1,995,300,000	22.22%	18.23%		
2.2.		Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	6 unit	1,500,000,000	0 unit	-	1 unit	34,000,000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	1 unit	33,220,000	1 unit	33,220,000	0.00%	0.00%	1 unit	33,220,000	16.67%	2.21%		
2.3.		Pengadaan peralatan/ perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan/ perlengkapan gedung kantor	1500 unit	1,921,748,000	45 unit	1,159,671,050	139 unit	1,799,473,266	11 unit	229,911,000	115 unit	516,311,400	0 unit	-	33 unit	931,928,600	159 unit	1,678,151,000	100.00%	93.26%	204 unit	2,837,822,050	13.60%	147.67%		
2.4.		Pemeliharaan rutin/ berkala sedang kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala sedang kantor	25 unit	310,549,500	13 unit	149,301,612	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0.00%	0.00%	13 unit	149,301,612	52.00%	48.08%		
2.5.		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	15 unit	1,158,281,400	8 unit	779,678,696	9 unit	242,000,973	0 unit	-	0 unit	-	5 unit	104,136,600	4 unit	79,312,981	9 unit	183,449,581	100.00%	75.81%	17 unit	963,128,277	113.33%	83.15%		
2.6.		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan/ perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	205 unit	777,040,000	142 unit	464,518,372	114 unit	127,418,465	0 unit	-	0 unit	-	70 unit	72,162,500	44 unit	53,980,000	114 unit	126,142,500	100.00%	99.00%	256 unit	590,660,872	124.88%	76.01%		
2.7.		Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Jumlah gedung/ruang yang selesai direhabilitasi	20 unit	2,200,000,000	1 unit	59,822,497	5 unit	2,289,320,225	0 unit	197,010,000	0 unit	-	4 unit	1,259,556,700	1 unit	824,762,469	5 unit	2,281,329,169	100.00%	99.65%	6 unit	2,341,151,666	30.00%	106.42%		
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**95.77%**			**53.24%**	**68.82%**		
																		Peringkat Kinerja		**Rendah**	**Rendah**			**Rendah**	**Sedang**		
11	Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan	**Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur**	**Persentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin**	**111 orang**	**13,625,000**	**111 orang**	**13,624,800**	**0 orang**	**0**		-		-		-		-	**95%**	-	0%	**0%**	**95%**	**13,624,800**	**100%**	**100%**	**BPSDMD**	**atutumo**
11.1.		Pelatihan Kantor Sendiri	Jumlah ASN BPSDMD	111 orang	13,625,000	111 orang	13,624,800	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	111 orang	13,624,800	100.00%	100.00%		
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%			**100%**	**100%**		
																		Peringkat Kinerja		-	-			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
3	Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase dari ASN Penyelenggara Diklat yang kompeten**	**714 stel**	**687,500,000**	**471 stel**	**361,870,550**	**224** stel	**221,760,000**	**0 stel**	-	**112 stel**	**110,880,000**	**###**	**86,966,000**	**0 stel**	-	**224 stel**	**197,846,000**	**100.00%**	**89.22%**	**695 stel**	**559,716,550**	**97.34%**	**81.41%**	**BPSDMD**	**atutumo**
3.1		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	630 stel	409,500,000	433 stel	237,053,550	224 stel	221,760,000	0 stel	-	112 stel	110,880,000	112 stel	86,966,000	0 stel	-	224 stel	197,846,000	100.00%	89.22%	657 stel	434,899,550	104.29%	106.20%		
3.2		Pengadaan pakaian sipil lengkap	Jumlah pakaian sipil lengkap	84 stel	278,000,000	38 stel	124,817,000	0 stel	-	0 stel	-	0 stel	-	0 stel	-	0 stel	-	0 stel	-	0.00%	0.00%	38 stel	124,817,000	45.24%	44.90%		
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**89.22%**			**74.76%**	**75.55%**		
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sedang**	**Sedang**		
4	Meningkatkan Perencanaan dan Pengembangan Program Kediklatan PNS	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan**	**130 laporan**	**77,090,000**	**104 laporan**	**42,433,300**	**27 laporan**	**29,915,400**	**0 laporan**	-	**0 laporan**	-	**2 laporan**	**1,470,000**	**24 laporan**	**19,442,500**	**26 laporan**	**20,912,500**	**96.30%**	**69.91%**	**130 laporan**	**63,345,800**	**100.00%**	**82.17%**	**BPSDMD**	**atutumo**
4.1.		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	5 laporan	31,255,000	4 laporan	19,135,400	2 laporan	5,771,400	0 laporan	-	0 laporan	-	0 laporan	-	2 laporan	1,850,000	2 laporan	1,850,000	100.00%	32.05%	6 laporan	20,985,400	120.00%	67.14%		
4.2.		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan	5 laporan	13,910,000	4 laporan	5,644,200	1 laporan	-	0 laporan	-	0 laporan	-	0 laporan	-	0 laporan	-	0 laporan	-	0.00%	0.00%	4 laporan	5,644,200	80.00%	40.58%		
4.3.		Penyusunan laporan bulanan SKPD	Jumlah laporan	120 laporan	31,925,000	96 laporan	17,653,700	24 laporan	24,144,000	0 laporan	-	0 laporan	-	2 laporan	1,470,000	22 laporan	17,592,500	24 laporan	19,062,500	100.00%	78.95%	120 laporan	36,716,200	100.00%	115.01%		
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**69.91%**			**100.00%**	**74.24%**		
																		Peringkat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Rendah**			**Sangat Tinggi**	**Sedang**		
5	Meningkatkan Perencanaan dan Pengembangan Program	**Program Perencanaan Perangkat Daerah**	**Terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. (Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten,dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD)**	**24 dokumen**	**123,829,000**	**17 dokumen**	**72,847,500**	**4 dokumen**	**5,771,400**	**0 dokumen**	-	**0 dokumen**	-	**0 dokumen**	-	**1 dokumen**	**4,350,000**	**1 dokumen**	**4,350,000**	**25.00%**	**75.37%**	**18 dokumen**	**77,197,500**	**75.00%**	**62.34%**	**BPSDMD**	**atutumo**

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 13 / 5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.1.	Kedikilatan PNS	Penyusunan Rencana Strategis (SKPD)	Jumlah dokumen	4 dokumen	36,104,000	1 dokumen	8,439,000	1 dokumen	5,771,400	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	4,350,000	1 dokumen	4,350,000	100.00%	75.37%	2 laporan	12,789,000	50.00%	35.42%		
5.2.		Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen	10 dokumen	58,675,000	8 dokumen	34,503,800	1 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0.00%	0.00%	8 dokumen	34,503,800	80.00%	58.80%		
5.3.		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Jumlah dokumen	10 dokumen	29,050,000	8 dokumen	29,904,700	2 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0.00%	0.00%	8 dokumen	29,904,700	80.00%	102.94%		
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	75.37%			70.00%	65.72%		
																		Peringkat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Rendah		
6	Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan	**Program Pengembangan Kompetensi Inti**	**Persentase dari target ASN yang memiliki kompetensi teknis inti**	**1,050 orang**	**3,894,069,800**	**270 orang**	**1,037,188,224**	**168 orang**	**511,132,430**	**0 orang**	-	**0 orang**	-	**0 orang**	-	**42 orang**	-	**42 orang**	**69,182,000**	**25.00%**	**13.54%**	**312 orang**	**1,106,370,224**	**29.71%**	**28.41%**	**BPSDMD**	**atutumo**
6.0.		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kongkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah alumni	orang		orang		168 orang	511,132,430	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	42 orang	69,182,000	42 orang	69,182,000	25.00%	13.54%	42 orang	69,182,000	0.00%	0.00%		
6.1.		Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah alumni	90 orang	528,137,400	30 orang	267,933,324	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	30 orang	267,933,324	33.33%	50.73%		
6.2.		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	40 orang	132,724,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	40 orang	132,724,100	100.00%	96.55%		
6.3.		Pelatihan Perencanaan dan Pengembangan Aparatur Pariwisata	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
6.4.		Pelatihan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah alumni	120 orang	412,392,300	75 orang	212,582,900	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	75 orang	212,582,900	62.50%	51.55%		
6.5.		Pelatihan Konservasi Koleksi dan Tata Pamer Museum	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	36 orang	103,126,900	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	36 orang	103,126,900	90.00%	75.02%		
6.6.		Pelatihan Strategi Pemasaran Aktivitas Budaya dan Kesenian	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	14 orang	105,130,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	14 orang	105,130,100	35.00%	76.48%		
6.7.		Pendidikan dan Pelatihan tentang Dasar-Dasar Amdal	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
6.8.		Pendidikan dan Pelatihan Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah dan Analisis Manajemen SDM Aparatur PNS Daerah serta Standar Pelayanan Publik	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	38 orang	103,215,500	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	38 orang	103,215,500	95.00%	75.09%		
6.9.		Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Jumlah alumni	80 orang	341,722,200	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
6.10.		Diklat Teknis Dasar Manajemen Bencana	Jumlah alumni	80 orang	274,928,200	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
6.11.		Diklat Pemberdayaan Perempuan	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	37 orang	112,475,400	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	37 orang	112,475,400	92.50%	81.82%		
6.12.		Diklat Manajemen Keselamatan	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
6.13.		Diklat Perdagangan dan Perindustrian	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
6.14.		Diklat Perpustakaan	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
6.15.		Diklat Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
6.16.		Diklat Pelerjaan Umum	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
6.17.		Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
6.18.		Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
6.19.		Diklat Pendidikan	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
6.20.		Diklat Admindik Cagil	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
6.21.		Diklat Penelitian Pengembangan	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		25.00%	13.54%			24.21%	24.15%		
																		Peringkat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
7		**Program Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional**	**Persentase dari target ASN yang memiliki kompetensi teknis umum dan fungsional**	**1,810 orang**	**6,665,282,200**	**217 orang**	**728,682,266**	**2,641 orang**	**1,675,253,994**	**0 orang**	-	**1,500 orang**	**660,547,500**	**### orang**	**104,034,000**	**674 orang**	**141,487,395**	**2499 orang**	**906,068,895**	**94.62%**	**54.09%**	**### orang**	**1,634,751,161**	**150.06%**	**24.53%**	**BPSDMD**	**atutumo**
7.0.		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kongkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah alumni	orang		orang		2,641 orang	1,675,253,994	orang		1,500 orang	660,547,500	325 orang	104,034,000	674 orang	141,487,395	2499 orang	906,068,895	94.62%	54.09%	2499 orang	906,068,895	0.00%	0.00%		
7.1.		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah alumni	120 orang	412,392,300	30 orang	101,556,600	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	30 orang	101,556,600	25.00%	24.63%		
7.2.		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Standar Operasional	Jumlah alumni	120 orang	412,392,300	30 orang	99,849,200	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	30 orang	99,849,200	25.00%	24.21%		
7.3.		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah alumni	80 orang	274,928,200	orang		0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
7.4.		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah alumni	80 orang	274,928,200	orang		0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
7.5.		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
7.6.		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kepegawaian	Jumlah alumni	80 orang	274,928,200	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11			13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 13 / 5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.7.		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Sistem Informasi Terpadu	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
7.8.		Pendidikan danPelatihan Teknis Verifikator Keuangan	Jumlah alumni	80 orang	274,928,200	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
7.9.	Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan	Pengembangan Kompetensi Kewidyaiswaraan Subtansi PIM III dan PIM IV	Jumlah alumni	40 orang	300,000,000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
7.10.		Diklat Training Officer Course (TOC)	Jumlah alumni	110 orang	454,928,200	37 orang	125,958,800	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	37 orang	125,958,800	33.64%	27.69%		
7.11.		Diklat Training Management of Trainer (MOT)	Jumlah alumni	110 orang	454,928,200	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
7.12.		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah alumni	160 orang	549,856,400	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
7.13.		Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
7.14.		Pendidikan dan Pelatihan Pungsional Pengadministrasi Barang	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
7.15.		Pendidikan dan Pelatihan Pungsional Pengelola Barang Inventaris	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
7.16.		Pendidikan dan Pelatihan Pungsional Pengadministrasi Kepegawai	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
7.17.		Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Perubahan	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
7.18.		Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Integritas, Inovasi, dan Kreativitas ASN	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	24 orang	49,255,366	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	24 orang	49,255,366	60.00%	35.83%		
7.19.		Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pelayanan Masyarakat	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
7.20.		Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental untuk Sulut yang Berkepribadian bagi ASN Perempuan	Jumlah alumni	60 orang	256,481,600	30 orang	118,766,300	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	30 orang	118,766,300	50.00%	46.31%		
7.21.		Workshop Coach Laporan Aktualisasi dan Proyek Perubahan	Jumlah alumni	30 orang	78,804,800	30 orang	78,804,800	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	30 orang	78,804,800	100.00%	100.00%		
7.22.		Pendidikan dan Pelatihan Penyelelaian Aset	Jumlah alumni	60 orang	300,000,000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
7.23.		Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara	Jumlah alumni	80 orang	274,928,200	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
7.24.		Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pungsional Pustakawan	Jumlah alumni	80 orang	274,928,200	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
7.25.		Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pungsional Pemadam Kebakaran	Jumlah alumni	80 orang	274,928,200	0 orang	38,120,400	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	38,120,400	0.00%	13.87%		
7.26.		Bimbingan Teknis Capacity Building	Jumlah alumni	40 orang	137,464,100	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
7.27.		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bahasa Asing	Jumlah alumni	40 orang	146,360,000	36 orang	116,370,800	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	36 orang	116,370,800	90.00%	79.51%		
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)			94.62%	54.09%			13.70%	12.57%		
																			Peringkat Kinerja		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
8		**Program Pengembangan Kompetensi Manajerial**	**Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural**	**1,868 orang**	**25,601,284,742**	**626 orang**	**5,000,388,524**	**330 orang**	**2,205,119,374**	**0 orang**	-	**0 orang**	-	**0 orang**	**183,896,098**	**532 orang**	**1,477,279,550**	**532 orang**	**1,661,175,648**		**161.21%**	**75.33%**	**### orang**	**6,661,564,172**	**71.08%**	**26.02%**	**BPSDMD**	**atutumo**
8.1.		Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II bagi PNS	Jumlah alumni	240 orang	7,262,640,000	0 orang	-	orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
8.2.		Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV bagi PNS	Jumlah alumni	150 orang	2,948,263,750	86 orang	1,608,095,600	25 orang	382,095,247	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	146,255,499	25 orang	162,290,000	25 orang	308,545,499		100.00%	80.75%	111 orang	1,916,641,099	74.00%	65.01%		
8.3.		Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III bagi PNS	Jumlah alumni	150 orang	2,810,225,000	57 orang	1,066,906,770	25 orang	357,420,241	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	37,640,599	25 orang	178,470,000	25 orang	216,110,599		100.00%	60.46%	82 orang	1,283,017,369	54.67%	45.66%		
8.4.		Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III bagi PNS Kab/Kota	Jumlah alumni	150 orang	2,810,225,000	26 orang	472,656,980	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	26 orang	472,656,980	17.33%	16.82%		
8.5.		Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV bagi PNS Kab/Kota	Jumlah alumni	90 orang	1,768,958,250	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
8.6.		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III bagi CPNS Kab/Kota	Jumlah alumni	120 orang	1,115,520,000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
8.7.		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II bagi CPNS Kab/Kota	Jumlah alumni	120 orang	1,115,520,000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
8.8.		Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kinerja serta Tugas Camat/Lurah/ Sekdes	Jumlah alumni	160 orang	561,856,400	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
8.9.		Diklat Aparat Pelopor Revolusi Mental (APRM) bagi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah alumni	150 orang	900,000,000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
8.10.		Diklat APRM bagi Camat	Jumlah alumni	138 orang	900,000,000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
8.11.		Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD	Jumlah alumni	120 orang	1,115,520,000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
8.12.		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III bagi CPNS	Jumlah alumni	120 orang	1,025,267,542	417 orang	1,813,949,174	280 orang	1,465,603,886	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	482 orang	1,136,519,550	482 orang	1,136,519,550		100.00%	77.55%	899 orang	2,950,468,724	749.17%	287.78%		
8.13.		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II bagi CPNS	Jumlah alumni	120 orang	1,115,520,000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%		
8.14.		Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pelopor Revolusi Mental (APRM) bagi Eselon III Perempuan	Jumlah alumni	40 orang	151,768,800	40 orang	38,780,000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-		0.00%	0.00%	40 orang	38,780,000	100.00%	25.55%		
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	75.33%			71.08%	31.49%		
																			Peringkat Kinerja		Sangat Tinggi	Sedang			Sedang	Sangat Rendah		
9		**Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan**	**Meningkatnya Persentase Kinerja Aparatur dalam Menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan**	**654 dokumen**	**7,634,298,500**	**164 dokumen**	**2,051,403,113**	**36 dokumen**	**614,064,319**	**0 dokumen**	-	**3 dokumen**	**60,210,000**	**10 dokumen**	**122,875,700**	**10 dokumen**	**106,968,067**	**23 dokumen**	**329,913,115**		**63.89%**	**53.73%**	**187 dokumen**	**2,381,316,228**	**28.59%**	**31.19%**	**BPSDMD**	**atutumo**
9.1.		Kajian sistim dan kualitas materi diklat PNS	Jumlah dokumen hasil kajian	5 dokumen	215,036,500	3 dokumen	105,175,460	1 dokumen	34,890,244	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	30,044,676	1 dokumen	30,044,676		100.00%	86.11%	4 dokumen	135,220,136	80.00%	62.88%		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA			Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)			Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
													Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV																	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13 = 12 / 7 x 100%			14 = 6 + 12			15 = 13 / 5 x 100%			16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
9.2.	Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan	Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)	Jumlah dokumen AKD, silabi, modul dan pedoman diklat	5	dokumen	92,977,000	2	dokumen	-	1	dokumen	34,824,837	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	1	dokumen	9,814,672	1	dokumen	9,814,672	100.00%	28.18%	3	dokumen	9,814,672	60.00%	10.56%		
9.3.		Akreditasi Program Diklat	Jumlah program diklat yang terakreditasi	3	program diklat	600,000,000	0	program diklat	-	2	program diklat	95,815,895	0	program diklat	-	2	program diklat	54,210,000	0	program diklat	38,015,000	0	program diklat	-	2	program diklat	92,225,000	100.00%	96.25%	2	program diklat	92,225,000	66.67%	15.37%		
9.4.		Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Widyaswara	Jumlah dupak yang dinilai	91	dupak	167,991,000	54	dupak	35,360,500	18	dupak	92,923,094	0	dupak		0	dupak	-	9	dupak	39,600,000	0	dupak		9	dupak	39,600,000	50.00%	42.62%	63	dupak	74,960,500	69.23%	44.62%		
9.5.		Penerbitan Jurnal Kediklatan	Jumlah edisi yang diterbitkan	10	edisi	301,774,000	6	edisi	151,082,200	2	edisi	49,796,895	0	edisi		0	edisi	-	0	edisi	-	0	edisi	-	0	edisi	-	0.00%	0.00%	6	edisi	151,082,200	60.00%	50.06%		
9.6.		Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah PNS yang diuji	75	orang	495,000,000	0	orang	-	0	orang	-	0	orang		0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0.00%	0.00%	0	orang	-	0.00%	0.00%		
9.7.		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat	Jumlah dokumen	5	dokumen	169,177,000	2	dokumen	53,651,700	1	dokumen	-	0	dokumen		0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0.00%	0.00%	2	dokumen	53,651,700	40%	31.71%		
9.8.		Evaluasi Pasca Diklat	Jumlah dokumen	5	dokumen	219,977,000	2	dokumen	140,535,000	1	dokumen	52,698,000	0	dokumen		0	dokumen	-	0	dokumen	-	1	dokumen	49,154,200	1	dokumen	49,154,200	100.00%	93.28%	3	dokumen	189,689,200	60%	86.23%		
9.9.		Kajian Pengembangan Kurikulum	Jumlah dokumen hasil kajian	5	dokumen	210,000,000	1	dokumen	6,800,000	1	dokumen	34,902,243	0	dokumen		0	dokumen	-	0	dokumen	-	1	dokumen	8,255,386	1	dokumen	8,255,386	100.00%	23.65%	2	dokumen	15,055,386	40.00%	7.17%		
9.10.		Pembuatan SOP Kediklatan	Jumlah SOP yang tersusun	15	SOP	150,000,000	0	SOP	-	5	SOP	34,955,243	0	SOP		0	SOP	-	0	SOP	-	5	SOP	9,825,581	5	SOP	9,825,581	100.00%	28.11%	5	SOP	9,825,581	33.33%	6.55%		
9.11.		Peningkatan Kompetensi bagi Tenaga Pengembang Kompetensi	Jumlah alumni	177	orang	2,126,000,000	57	orang	859,815,746	0	orang	-	0	orang		0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0.00%	0.00%	57	orang	859,815,746	32.20%	40.44%		
9.12.		Kajian/Penelitian dan Orasi Ilmiah Kediklatan	Jumlah dokumen	10	dokumen	536,190,000	3	dokumen	150,215,601	2	dokumen	94,971,296	0	dokumen		1	dokumen	6,000,000	0	dokumen	-	1	dokumen	39,732,900	2	dokumen	45,732,900	100.00%	48.15%	5	dokumen	195,948,501	50.00%	36.54%		
9.13.		Pelaksanaan Uji Kompetensi Apoteng	Jumlah alumni	125	orang	477,010,000	25	orang	78,115,989	0	orang	-	0	orang		0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0.00%	0.00%	25	orang	78,115,989	20.00%	16.38%		
9.14.		Studi Komparasi Pengembangan Kompetensi Widyaiswara	Jumlah Wi yang mengikuti studi komparasi	54	orang	540,000,000	0	orang	-	0	orang	-	0	orang		0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0.00%	0.00%	0	orang	-	0.00%	0.00%		
9.15.		Kajian Penelitian Ilmiah Kediklatan untuk Widyaiswara	Jumlah dokumen hasil kajian penelitian	54	dokumen	540,000,000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen		0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0.00%	0.00%	0	dokumen	-	0.00%	0.00%		
9.16.		Rapat Koordinasi Kediklatan	Jumlah dokumen	5	dokumen	618,247,000	4	dokumen	372,090,917	1	dokumen	47,449,081	0	dokumen	-	0	dokumen	-	1	dokumen	45,260,700	0	dokumen	-	1	dokumen	45,260,700	100.00%	95.39%	5	dokumen	417,351,617	100.00%	67.51%		
9.17.		Penyusunan dan Pengelolaan Informasi Kediklatan	Jumlah media	10	media	174,919,000	5	media	98,560,000	1	media	40,837,491	0	media		0	media	-	0	media	-	0	media	-	0	media	-	0.00%	0.00%	5	media	98,560,000	50.00%	56.35%		
																										Rata-rata Capaian Kinerja (%)			94.44%	53.73%				44.79%	31.32%		
																										Peringkat Kinerja			Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
10	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana/Prasarana Kediklatan sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan**	**Keterpenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan sesuai standar**	**1,362**	**unit**	**20,618,737,000**	**631**	**unit**	**4,706,542,386**	**0**	**unit**	**-**	**0**	**unit**	**-**	**0**	**unit**	**-**	**0**	**unit**	**-**	**0**	**unit**	**-**	**0**	**unit**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	**631**	**unit**	**4,706,542,386**	**46.33%**	**22.83%**	**BPSDMD**	**atutumo**
10.1.		Pembangunan Gedung Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah prasarana yang terbangun	5	gedung	9,800,000,000	1	dokumen	822,180,000	0	gedung	-	0	gedung	-	0	gedung	-	0	gedung	-	0	gedung	-	0	gedung	-	0.00%	0.00%	1	gedung	822,180,000	20.00%	8.39%		
10.2.		Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peralatan/perlengkapan penunjang pendidikan dan pelatihan	942	unit	7,202,650,000	410	unit	2,246,295,780	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0.00%	0.00%	410	unit	2,246,295,780	43.52%	31.19%		
10.3.		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung penunjang pendidikan dan pelatihan	30	unit	160,641,000	24	unit	100,795,034	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0.00%	0.00%	24	unit	100,795,034	80.00%	62.75%		
10.4.		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan/ Perlengkapan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan penunjang pendidikan dan pelatihan	375	unit	225,000,000	189	paket	137,718,035	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0.00%	0.00%	189	unit	137,718,035	50.40%	61.21%		
10.5.		Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah gedung/ruang yang direhabilitasi	10	unit	3,230,446,000	7	unit	1,399,553,537	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0.00%	0.00%	7	unit	1,399,553,537	70.00%	43.32%		
																										Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%				52.78%	41.37%		
																										Peringkat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Rendah	Sangat Rendah		
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**12,185,377,701**			**676,150,020**			**1,744,944,625**			**2,564,764,124**			**4,490,838,793**			**9,585,738,910**	**90.08%**	**68.12%**								
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 11)																								**Capaian Realisasi Anggaran dan Peringkat Kinerja Tahun 2021**			**Tinggi**	**Sedang**				**63.57%**			
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 11)																																**Peringkat Kinerja**	**Rendah**		
		FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																																			
																										Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 59 tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Utara															
		FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																																			
																										Terbatasnya kuantitas dan kualitas ASN BPSDMD yang sesuai dengan standar kompetensi diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi.													
																										Sulawesi Utara kembali mulai mengalami peningkatan penyebaran pandemi Covid-19 gelombang II													
		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :																																			
																										Alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi mengalami peningkatan di Tahun 2021													

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2019
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 dan 2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2019										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2019)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2019)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi /Ket.
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12			15 = 13/5 x		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K		Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp	K	Rp	K		Rp.	K	Rp		
1	**Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana/Prasarana Kediklatan sesuai dengan Kebutuhan Organisasi**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik; Indeks Nilai LKIP Daerah Rata-Rata B**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Minimum B**		**4,121,669,210**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Minimum B**		**412,261,566**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Minimum B**		**566,901,000**	**15**	**Bln**	**76,066,549**	**15**	**Bln**	**103,284,557**	**15**	**Bln**	**98,155,009**	**15**	**Bln**	**202,274,421**	**60**	**Bln**	**479,780,536**	**100.0**	**75.8**	**24.0**	**Bln**	**178,408,420.4**	**8**	**0**	**Balitbangda**	
1.1		Penyediaan Kebutuhan Adminstrasi Umum	Terselenggaranya Pelayanan administrasi Umum dengan baik dan lancar	60	Bln	992,455,147	12	Bln	233,336,920	12	Bln	256,661,000	3	Bln	37,607,432	3	Bln	43,996,816	3	Bln	71,067,209	3	Bln	120,358,963	12	Bln	273,030,420	100.0	106.38	24	Bln	506,367,340	1.67	0.00	Balitbangda	
1.2		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan dengan Baik dan Lancar	60	Bln	431,970,600	12	Bln	63,480,000	12	Bln	102,180,000	3	Bln	11,095,700	3	Bln	7,945,900	3	Bln	10,037,800	3	Bln	34,617,300	12	Bln	63,696,700	100.0	62.34	24	Bln	127,176,700	1.67	0.00	Balitbangda	
1.3		Penyediaan Kebutuhan Adminstrasi Barang/jasa	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Barang/ Jasa	60	Bln	-	12	Bln	56,600,000	12	Bln	68,400,000	3	Bln	3,300,000	3	Bln	-	3	Bln	6,300,000	3	Bln	3,600,000	12	Bln	13,200,000	100.0	19.30	24	Bln	69,800,000	1.67	0	Balitbangda	
1.4		Penyediaan Kebutuhan Adminstrasi Kepegawaian	Terselenggaranya pelayanan Administrasi Barang dan Jasa dengan Baik dan Lancar	60	Bln	50,464,263	12	Bln	6,500,000	12	Bln	28,260,000	3	Bln	4,725,000	3	Bln	2,172,500	3	Bln	10,750,000	3	Bln	10,611,000	12	Bln	28,258,500	100.0	99.99	24	Bln	34,758,500	1.67	0.00	Balitbangda	
1.5		Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60	Bln	2,646,779,200	12	Bln	52,344,646	12	Bln	111,400,000	3	Bln	19,338,417	3	Bln	49,169,341	3	Bln	-	3	Bln	33,087,158	12	Bln	101,594,916	100.0	91.20	24	Bln	153,939,562	1.67	0.00	Balitbangda	
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0	75.8							
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Tinggi							
2	**Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana/Prasarana Kediklatan sesuai dengan Kebutuhan Organisasi**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik; Indeks Nilai LKIP Daerah Rata-Rata B**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Minimum B**		**7,142,111,500**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Minimum B**		**174,600,000**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Minimum B**		**1,569,550,000**	**1**	**Unit**	**1,200,000**	**3**	**Unit**	**89,330,498**	**-**		**565,900,946**	**42**	**Ged**	**821,602,351**	**46**	**Unit**	**1,478,033,795**	**100.0**	**85.5**	**22.8**	**Unit**	**413,158,448.8**	**104**	**0**	**Balitbangda**	
2.1		Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor	1	Gedung	110,000,000			82,800,000	1	Gedung	307,500,000	0	Unit	-	0	Unit	-			246,220,000	1	Ged	22,000,000	1	Gedung	268,220,000	100.0	87.23	1	Gedung	351,020,000	100.00	0.00	Balitbangda	
2.2		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tesedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	75	Unit	4,896,477,000	15	unit	78,886,158	15	unit	154,250,000				2	Unit	22,743,360			25,705,391	13	Unit	62,713,388	15	Unit	111,162,139	100.0	72.07	30	Unit	190,048,297	1.33	0.00	Balitbangda	
2.3		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional	75	Unit	1,067,817,250	15	unit	6,456,921	15	unit	37,800,000	1	Unit	1,200,000	1	Unit	6,747,138			3,432,000	13	Unit	20,058,000	15	Unit	31,437,138	100.0	83.17	30	Unit	37,894,059	1.33	0.00	Balitbangda	
2.4		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin /Berkala Peeralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	75	Unit	1,067,817,250	15	unit	6,456,921	15	unit	1,070,000,000						59,840,000			290,543,555	15	Unit	716,830,963	15	Unit	1,067,214,518	100.0	99.74	30	Unit	1,073,671,439	1.33	0.00	Balitbangda	
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0	85.5							
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Tinggi							
3	**Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Penyelenggaraan Balitbangda**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**2400**	**Psg**		**80**	**Psg**	**28,500,000**	**40**	**psg**	**40,000,000**	-	-	-	-	-	-	**40**	**Psg**	**39,200,000**	-	-	-	**40**	**Psg**	**39,200,000**	**100.0**	**98**	**120**	**Psg**	**67,700,000**	**0**	-	**Balitbangda**	
3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PDH Keki, Batik dan Pakaian Olahraga	2400	Psg		80	Psg	28,500,000	40	psg	40,000,000							40	Psg	39,200,000				40	Psg	39,200,000	100.0	98.00	120	Psg	67,700,000	0.04	-	Balitbangda	
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0	98.0							
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
4	**Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Penyelenggaraan Balitbangda**	**Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Tersedianya Informasi Kinerja dan Keuangan Dalam Semester/Tahunan Sesuai Peraturan dan Perundang-undangan**	**95**	**Lap**	**602,950,000**			**8,800,000**	**19**	**Lap**	**48,580,000**	**5**	**Lap**	**10,813,144**	-	-	-	-	-	**19,954,800**	-	-	**6,751,041**	**5**	**Lap**	**37,518,985**	**61.1**	**84.9**	**2.5**	**Lap**	**23,159,492.5**	**10.1**	**0.0**	**Balitbangda**	
4.1		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal	90	Lap	425,950,000			2,500,000	18	Lap	42,830,000	4	Lap	10,813,144			-			14,500,000			6,751,041	4	Lap	32,064,185	22.2	74.86	4	Lap	34,564,185	0.25	0.00	Balitbangda	
4.2		Pelatihan kantor Sendiri	Tersedianya Pelatihan Kantor Sendiri	5	Lap	177,000,000			6,300,000	1	Lap	5,750,000	1	Lap							5,454,800			-	1	Lap	5,454,800	100.0	94.87	1	Lap	11,754,800	20.00	0.00	Balitbangda	
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			61.1	84.9							
																									Predikat Kinerja			Rendah	Tinggi							
5	**Meningkatkanya Kwalitas Implementasi Daerah**	**Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tersedianya Informasi Kinerja dan Keuangan Dalam Semester/Tahunan Sesuai Peraturan dan Perundang-undangan**	**10**	**Lap**	**74,405,600**	**4**	**Lap**	**35,000,000**	**2**	**Lap**	**8,100,000**	**1**	**Lap**	**2,639,900**	-	**Lap**	-	**1**	**lap**	**5,249,800**	-	-	-	**2**	**Lap**	**7,889,700**	**100**	**96**	**3**	**Lap**	**21,444,850**	**20**	**0**	**Balitbangda**	
5.1		Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Lap	32,581,100	2	Lap	15,000,000	1	Lap	5,250,000	0	Lap			Lap		1	lap	5,249,800			-	1	Lap	5,249,800	100.0	100.00	3	Lap	20,249,800	20.00	0.00	Balitbangda	
5.2		Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	Lap	41,824,500	2	Lap	20,000,000	1	Lap	2,850,000	1	Lap	2,639,900	0	Lap	-		lap	-			-	1	Lap	2,639,900	100.0	92.63	3	Lap	22,639,900	20.00	0.00	Balitbangda	
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0	96.3							
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
6	**Terselenggaranya Program dan Anggaran Balitbangda yang berpedoman pada RPJMD**	**Program Perencanaan SKPD**	**Terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya**	**20**	**Dok**	**74,437,199**	**8**	**Dok**	**12,800,000**	**4**	**Dok**	**11,368,000**	-	-	-	-	-	**5,433,400**	-	-	**8,306,400**	**4**	**####**	-	**4**	**Dok**	**11,362,100**	**100**	**100**	**6**	**Dok**	**12,081,050**	**10**	**0**	**Balitbangda**	
6.1		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Tersedianya Rencana Kerja Anggaran (RKA)	10	Dok	40,036,131	4	Dok	8,400,000	2	Dok	7,868,000						3,933,400			3,933,900	2	Dok	-	2	Dok	7,867,300	100.0	99.99	6	Dok	16,267,300	10.00	0.00	Balitbangda	
6.2		Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Rencana Kerja SKPD	10	Dok	34,401,068	4	Dok	4,400,000	2	Dok	3,500,000						1,500,000			4,372,500	2	Dok	-	2	Dok	3,494,800	100.0	99.85	6	Dok	7,894,800	10.00	0.00	Balitbangda	
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0	99.9							
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
7	**Terdianya Kebijakan Regulasi/Rergulasi/PedomanPenyelenggaraan Inovasi Daerah**	**Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah**	**Presentase Perangkat Daerah yang di fasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah**	**13**	**Pen**	**912,255,104**	**1**	**Keg**	**171,950,000**	**7**	-	**360,000,000**	-	**Pen**	**24,334,756**	-	**Pen**	**34,770,000**	-	-	**165,175,185**	**7**	-	**133,820,011**	**7**	-	**358,099,952**	**100**	**99**	**3**	**Keg**	**176,683,317**	-	**0**	-	
7.1		Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Tersedianya Aplikasi Sisten Inovasi Daerah (SIDA)	5	Keg	412,392,300	1	Keg	51,850,000	1	Keg	120,293,750	0	Keg	24,334,756	0	Keg	27,770,000			34,324,533	1	Keg	33,864,461	1	Keg	120,293,750	100.0	100.00	2	Keg	172,143,750	0.00	0.00	Balitbangda	

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 dan 2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2019												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2019)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2019)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi /Ket.
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12			15 = 13/5 x		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K		Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
7.2		Penelitian Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Pemukiman di Kawasan seputaran Waduk	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pembangunan Infrastruktur & Kawasan Pemukiman di Kawasan Pemukiman Seputaran Waduk Kuwil	4	Pen	253,303,453			61,000,000	3	Dok	109,874,000		Pen			Pen	7,000,000			51,105,152	3	Dok	49,868,800	3	Pen	107,973,952	100.0	98.27	3	Pen	168,973,952	0.00	0.00	Balitbangda	
7.3		Pengkajian Strategis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dalam Rangka Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan Kota Manado	Jumlah Hasil Kajian Strategis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dalam rangka Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan di Kota Manado	4	Peng	246,559,351			59,100,000	3	Dok	129,832,250						79,745,500				3	Dok	50,086,750	3	Pen	129,832,250	100.0	100.00	3	Pen	188,932,250	0.00	0.00	Balitbangda	
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0	99.4							
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
8	**Terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kelitbangan dengan berbagai lembaga/Instansi**	**Program Kelembagaan/Koordinasi dan Kerjasama**	**Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**	**15**	**Keg**	**13,138,727,100**	**3**	**Keg**	**125,169,101**	**3**	**Keg**	**245,000,000**	**-**	**Keg**	**2,600,000**	**-**	**Keg**	**2,600,000**	**-**	**-**	**30,232,500**	**3**	**-**	**208,048,820**	**3**	**Keg**	**243,481,320**	**100**	**102**	**2**	**Keg**	**122,883,474**	**20**	**0**	**Balitbangda**	
8.1		Penguatan Jaringan Penelitian (JARLIT)	Tersedianya Aplikasi Jaringan Penelitian (JARLIT)	5	Keg	7,262,640,000	1	Keg	49,600,000	1	Keg	73,606,700										1	Keg	97,079,460	1	Keg	97,079,460	100.0	131.89	2	Keg	146,679,460	20.00	0.00	Balitbangda	
8.2		Rakornas dan Rakorlitbangda	Terlaksananya Rakornas dan Rakorbangda	5	Keg	3,004,661,350	1	Keg	32,649,000	1	Keg	97,845,900										1	Keg	73,347,400	1	Keg	73,347,400	100.0	74.96	2	Keg	105,996,400	20.00	0.00	Balitbangda	
8.3		Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Forum Komunikasi Kelitbangan Daerah	Terlaksananya Sinkronisasi Sinergitas Pelaksanaan Kelitbangan Antara Pemerintah Provinsi Sulut dan Stakholder Kelitbangan di Sulawesi Utara	5	Keg	2,871,425,750	1	Keg	42,920,101	1	Keg	73,547,400		Keg	2,600,000		Keg	2,600,000			30,232,500	1	Keg	37,621,960	1	Keg	73,054,460	100.0	99.33	2	Keg	115,974,561	20.00	0.00	Balitbangda	
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0	102.1							
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
9	**Meningkatnya Keterlibatan Badan dan Pengembangan dalam Perumusan lingkup Pemerintah Daerah**	**Program Penelitian dan Pengkajian Pemerintahan dan Peraturan Lingkup Sulawesi Utara**	**Tersusunnya Penelitian dan Pengkajian Pemerintahan dan Peraturan Lingkup Sulawesi Utara**	**5**	**Buku/ Dok**	**340,676,093**	**-**	**Buku/ Dok**	**120,000,000**	**9**	**Dok**	**200,000,000**	**-**	**-**	**-**	**1**	**Buku**	**38,717,000**	**-**	**-**	**32,585,000**	**9**	**Dok**	**111,380,241**	**10**	**Buku/ Dok**	**182,682,241**	**111**	**92**	**3**	**Buku/ Dok**	**100,894,080**	**44**	**0**	**Balitbangda**	
9.1		Pengkajian tentang Penanganan WNI yang Hidup di Philipina	Jumlah Kajian /Dokumen Hasil Penelitian tentang dampak Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap Industri Perikanan di Kota Bitung	4	Buku/ Dok	290,676,093		Buku/ Dok	70,000,000	3	Dok	75,000,000				1	Buku	38,717,000			15,785,000	3	Dok	17,425,000	4	Buku/ Dok	71,927,000	133.3	95.90	4	Buku/ Dok	141,927,000	33.33	0.00	Balitbangda	
9.2		Pengkajian Terhadap SOP Rancangan Peraturan daerah di Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara	Jumlah Kajian /Dokumen Hasil Pengkajian Tentang Penanganan Masalah Profesionalisme Kinerja dan Kedisiplinan PNS	1	Buku/ Dok	50,000,000		Buku/ Dok	50,000,000	3	Dok	50,000,000						7,125,000				3	Dok	41,134,934	3	Buku/ Dok	48,259,934	100.0	96.52	3	Buku/ Dok	98,259,934	100.00	0.00	Balitbangda	
9.3		Pengkajian terhadap Layanan Advokasi hukum terhadap masyarakat miskin di kabupaten/kota Se-Sulawesi Utara								3	Dok	75,000,000						9,675,000				3	Dok	52,820,307	3	0	62,495,307	100.0	83.33	3	-	62,495,307	0.00	-	Balitbangda	
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			111.1	91.9							
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
10	**Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah**	**Program Penelitian dan Pengkajian Sosial dan Kependudukan**	**Tersusunnya Penelitian Sosial dan Kependudukan**	**45**	**Buku/ Dok**	**9,800,000,000**	**1**	**Buku/ Dok**	**285,000,000**	**9**	**Buku/ Dok**	**240,000,000**	**-**	**Buku / Dok**	**108,955,000**	**-**	**Buku/ Dok**	**33,500,000**	**2**	**Buku / Dok**	**59,942,500**	**7**	**-**	**36,940,000**	**9**	**Buku/ Dok**	**239,337,500**	**100**	**100**	**3**	**Buku/ Dok**	**174,779,167**	**2**	**0**	**Balitbangda**	
10.1		Pengkajian Daya Saing Daerah Kabupaten / Kota se-Sulut	Jumlah Kajian / Dokumen Hasil Penelitian Daya Saing Daerah di Kabupaten/Kota Se- Sulut	15	Buku/ Dok	9,800,000,000	1	Buku/ Dok	285,000,000	3	Dok	140,000,000		Buku / Dok	108,955,000		Buku/ Dok	25,450,000	1	Dok	4,965,000	2	Dok	-	3	Buku/ Dok	139,370,000	100.0	99.55	4	Buku/ Dok	424,370,000	6.67	0.00	Balitbangda	
10.2		Pengkajian tentang administrasi kependudukan di kabupaten/kota Provinsi Se-Sulawesi Utara		15	Buku/ Dok					3	Dok	50,000,000						8,050,000	1	Dok	41,945,700	2	Dok	-	3	Buku/ Dok	49,995,700	100.0	99.99	3	Buku/ Dok	49,995,700	0.00	-	Balitbangda	
10.3		Pengkajian evaluasi kebijakan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di kab.Minahasa Tenggara, Kab. Kepl.Sangihe		15	Buku/ Dok					3	Dok	50,000,000									13,031,800	3	Dok	36,940,000	3	Buku/ Dok	49,971,800	100.0	99.94	3	Buku/ Dok	49,971,800	0.00	-	Balitbangda	
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0	99.8							
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
11		**Program Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan**	**Tersusunnya Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan**	**25**	**Rek**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12**	**-**	**188,353,700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,204,800**	**-**	**-**	**47,744,800**	**12**	**-**	**130,404,100**	**12**	**Rek**	**188,353,700**	**100**	**100**	**3**	**Rek**	**47,088,425**	**16**	**-**	**Balitbangda**	
11.1		Pengkajian Peningkatan daya Saing Industri Kreatif dan Unggulan Provinsi Sulawesi Utara untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)		7	Rek		0		0	3	Dok	46,196,300									15,496,400	3	Dok	30,699,900	3	Rek	46,196,300	100.0	100.00	3	Rek	46,196,300	14.29	-	Balitbangda	

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 dan 2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2019										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2019)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2019)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi /Ket.
				I			II			III			IV																						
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12			15 = 13/5 x		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K		Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
11.2		Pengkajian Pengembangan Manajemen Pariwisata untuk mendukung daya saing dan Perekonomian di daerah perbatasan		6	Rek		0		0	3	Dok	43,586,000								-	3	Dok	43,586,000	3	Rek	43,586,000	100.0	100.00	3	Rek	43,586,000	16.67	-	Balitbangda	
11.3		Pengkajian Pengelolaan badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik		6	Rek		0		0	3	Dok	48,718,200								6,750,000	3	Dok	41,968,200	3	Rek	48,718,200	100.0	100.00	3	Rek	48,718,200	16.67	-	Balitbangda	
11.4		Pengkajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara		6	Rek		0		0	3	Dok	49,853,200								25,498,400	3	Dok	14,150,000	3	Rek	49,853,200	100.0	100.00	3	Rek	49,853,200	16.67	-	Balitbangda	
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.0	100.0							
																							Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)			97.5	94.0					-	-	
																							Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 11)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 11)

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : Adanya Peraturan yang Mendorong Tupoksi Terkait
- Permendagri Nomor 17 Tahun 2016
- Pergub Nomor 86 Tahun 2016
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
- Permendagri Nomor 17 Tahun 2016

FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : Kurangnya Sarana dan Prasarana seperti : SDM, Laptop dan lain lain yan g dibutuhkan

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : Pelatihan Fungsional Peneliti

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I, II dan III TAHUN 2021

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2020												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2020)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = (i, ii, iii, IV)			13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K		Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (nama SKPD): INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM B**	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov.Sulut Rata-		**37,336,048,057**			-	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Pengelola Perbatasan Negara Rata-Rata Minimum B		**6,270,181,134**			**1,436,315,066**			**1,331,215,548**			**1,502,600,622**			**1,160,380,673**	**84.00**	**bulan**	**5,693,708,472**	**1400%**	**824.08**	**149.00**	**bulan**	**8,276,159,016**	**80.00**	**216**		
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	60	bulan	28,471,729	12	bulan	-	12	bulan	4,951,605	3	bulan	-	6	bulan	-	9	bulan	-	12	bulan	4,951,605	12	bulan	-	**100%**	-	0	bulan	-	0.00	-	BPPD	Manado
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	60	bulan	28,471,729	12	bulan	-	12	bulan	4,951,605	3	bulan	-	6	bulan	-	9	bulan	-	12	bulan	4,951,605	12	bulan	-	100%	-	**0**	bulan	-	0.00	-	BPPD	Manado
																										Rata-Rata Capaian Kerja (%)										
																										Predikat Kerja	**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**						**Predikat Kerja**	**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**		
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daera	Penyerapan Anggaran (BPPD)	60	bulan	27,316,619,582	12	bulan	-	12	bulan	4,583,764,421	3	bulan	1,061,251,141	6	bulan	1,281,182,190	9	bulan	1,000,050,461	12	bulan	795,595,716	12	bulan	4,138,079,508	**400%**	**90.28**	24	bulan	4,138,079,508	40.00	**15.19**	BPPD	Manado
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	60	bulan	27,237,060,932	12	bulan	-	12	bulan	4,581,627,592	3	bulan	1,061,251,141	6	bulan	1,281,182,190	9	bulan	1,000,050,461	12	bulan	795,595,716	12	bulan	4,138,079,508	100%	**90.32**	24	bulan	4,138,079,508	40.00	**15.19**	BPPD	Manado
1.2.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan	60	bulan	20,911,767	12	bulan	-	12	bulan	-	3	bulan	-	6	bulan	-	9	bulan	-	12	bulan	-	12	bulan	-	100%	-	24	bulan	-	40.00	-	BPPD	Manado
1.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan	60	bulan	46,360,117	12	bulan	-	12	bulan	-	3	bulan	-	6	bulan	-	9	bulan	-	12	bulan	-	12	bulan	-	100%	-	24	bulan	-	40.00	-	BPPD	Manado
1.2.4		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Presentase Penyampaian Laporan Analisis dan Prognosis Realisasi Anggaran	60	bulan	12,286,767	12	bulan	-	12	bulan	2,136,829	3	bulan	-	6	bulan	-	9	bulan	-	12	bulan	-	12	bulan	-	100%	-	24	bulan	-	40.00	-	BPPD	Manado
																										Rata-Rata Capaian Kerja (%)	**100%**	**90.28**				**40.00**	**15.19**		
																										Predikat Kerja	**SANGAT RENDAH**	**TINGGI**				**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**		
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	60	bulan	253,000,000	12	bulan	-	12	bulan	44,000,000	3	bulan	-	6	bulan	41,271,358	9	bulan	-	12	bulan	-	12	bulan	41,271,358	**100%**	**93.80**	24	bulan	41,271,358	40.00	**16.31**	BPPD	Manado
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN dan THL yang menggunakan seragam sesuai ketentuan	60	bulan	253,000,000	12	bulan	-	12	bulan	44,000,000	3	bulan	-	6	bulan	41,271,358	9	bulan	-	12	bulan	-	12	bulan	41,271,358	100%	**93.80**	24	bulan	41,271,358	40.00	**16.31**	BPPD	Manado
																										Rata-Rata Capaian Kerja (%)	**100%**	**93.80**				**40.00**	**16.31**		
																										Predikat Kerja	**SANGAT RENDAH**	**SANGAT TINGGI**				**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**		
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kehadiran dalam acara yang diundang	60	bulan	2,823,974,517	12	bulan	-	12	bulan	423,584,127	3	bulan	95,684,296	6	bulan	8,762,000	9	bulan	156,628,496	12	bulan	159,337,070	12	bulan	420,411,862	**200%**	**99.25**	24	bulan	420,411,862	40.00	**15.22**	BPPD	Manado
1.4.1		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	60	bulan	112,608,000	12	bulan	-	12	bulan	10,089,800	3	bulan	4,844,996	6	bulan	-	9	bulan	2,950,000	12	bulan		12	bulan	7,794,996	100%	**77.26**	24	bulan		40.00	-	BPPD	Manado
1.4.2		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bulan	2,711,366,517	12	bulan	-	12	bulan	413,494,327	3	bulan	90,839,300	6	bulan	8,762,000	9	bulan	153,678,496	12	bulan	159,337,070	12	bulan	412,616,866	100%	**99.79**	24	bulan	412,616,866	40.00	**15.22**	BPPD	Manado
																										Rata-Rata Capaian Kerja (%)	**100%**	**88.52**				**20.00**	**7.61**		
																										Predikat Kerja	**SANGAT RENDAH**	**TINGGI**				**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan	60	bulan	2,849,875,289	12	bulan	-	12	bulan	495,629,887	3	bulan	-	6	bulan	-	9	bulan	103,730,000	12	bulan	-	12	bulan	437,267,250	**200%**	**88.22**	24	bulan	437,267,250	40.00	**32.13**	BPPD	Manado
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan penunjang kantor	60	bulan	599,265,006	12	bulan	-	12	bulan	104,220,001	3	bulan	-	6	bulan	-	9	bulan	103,730,000	12	bulan	-	12	bulan	103,730,000	100%	**99.53**	24	bulan	103,730,000	40.00	**17.31**	BPPD	Manado
1.5.2		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaPenyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	60	bulan	2,250,610,283	12	bulan	-	12	bulan	391,409,886	3	bulan	-	6	bulan	-	9	bulan	41,491,450	12	bulan	292,045,800	12	bulan	333,537,250	100%	**85.21**	24	bulan	333,537,250	40.00	**14.82**	BPPD	Manado
																										Rata-Rata Capaian Kerja (%)	**100%**	**92.37**				**20.00**	**16.06**		
																										Predikat Kerja	**SANGAT RENDAH**	**SANGAT TINGGI**				**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**		

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2020												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2020)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
													I			II			III			IV															
1.6	1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata- rata Presentase Kinerja ASN (Nama SKPD)	60	bulan	3,811,690,565	12	bulan	-	12	bulan	673,914,094	3	bulan	273,870,386	6	bulan	-	9	bulan	233,824,433	12	bulan	182,565,157	12	bulan	624,870,894	**300%**	**92.72**	24	bulan	624,870,894	40.00	**48.82**	BPPD	Manado
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bulan	662,400,000	12	bulan	-	12	bulan	95,200,000	3	bulan	27,148,408	6	bulan	-	9	bulan	60,366,009	12	bulan	24,696,735	12	bulan	85,062,744	100%	**89.35**	24	bulan	85,062,744	40.00	**12.84**	BPPD	Manado
1.6.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor	60	bulan	478,783,565	12	bulan	-	12	bulan	95,873,919	3	bulan	38,240,674	6	bulan	-	9	bulan	59,052,899	12	bulan	32,927,110	12	bulan	91,980,009	100%	**95.94**	24	bulan	91,980,009	40.00	**19.21**	BPPD	Manado
1.6.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	60	bulan	2,670,507,000	12	bulan	-	12	bulan	482,840,175	3	bulan	208,481,304	6	bulan	-	9	bulan	114,405,525	12	bulan	124,941,312	12	bulan	447,828,141	100%	**92.75**	24	bulan	447,828,141	40.00	**16.77**	BPPD	Manado
																										Rata-Rata Capaian Kerja (%)	**100%**	**92.68**					**20.00**	**16.27**		
																										Predikat Kerja	**SANGAT RENDAH**	**SANGAT TINGGI**					**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**		
1.7	1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah di (Nama SKPD) dalam kondisi Baik	60	bulan	252,416,375	12	bulan	-	12	bulan	44,337,000	3	bulan	5,509,243	6	bulan	-	9	bulan	8,367,232	12	bulan	17,931,125	12	bulan	31,807,600	**100%**	**71.74**	24	bulan	31,807,600	40.00	**12.60**	BPPD	Manado
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		60	bulan	252,416,375	12	bulan	-	12	bulan	44,337,000	3	bulan	5,509,243	6	bulan	-	9	bulan	8,367,232	12	bulan	17,931,125	12	bulan	31,807,600	100%	**71.74**	24	bulan	31,807,600	40.00	**12.60**	BPPD	Manado
																										Rata-Rata Capaian Kerja (%)	100%	71.74					**20.00**	12.60		
	Meningkatnya perencanaan SKPD																									**Predikat Kerja**	**SANGAT RENDAH**	**SEDANG**					**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**		
2		**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi**	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Pengelola Perbatasan Daerah		**10,881,735,528**			-	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Pengelola Perbatasan Negara Rata-Rata		**925,046,462**			-			**66,382,234**			**60,857,000**						**892,516,833**	**100%**	**96.48**			**181,824,175**	**40**	**89.53158079**		
2.1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Yang Dapat Dikoordinasikan dan Ditetapkan	10	Dokumen	1,136,963,824	0	Dokumen	-	2	Dokumen	188,822,839	0	Dokumen	-	1	Dokumen	66,382,234	0	Dokumen	60,857,000	0	Dokumen	54,584,941	2	Dokumen	181,824,175	100%	**96.29**	2	Dokumen	181,824,175	20.00	**31.40**	BPPD	Manado
2.1.1		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Otda yang dapat dikoordinasikan, diintegrasikan dan disinkronisasikan	5	Dokumen	770,278,039	0	Dokumen	-	1	Dokumen	130,861,398	0	Dokumen	-	1	Dokumen	66,382,234	0	Dokumen	60,857,000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	127,239,234	100%	**97.23**	1	Dokumen	127,239,234	20.00	**16.52**	BPPD	Manado
2.1.2		Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Yang Disusun dan Ditetapkan	5	Dokumen	366,685,786	0	Dokumen	-	1	Dokumen	57,961,441	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	54,584,941	1	Dokumen	54,584,941	100%	**94.17**	1	Dokumen	54,584,941	20.00	**14.89**	BPPD	Manado
																										Rata-Rata Capaian Kerja (%)	**100%**	**96.48**					**20**	**15.70**		
	terkoordinasi, terfasilitasi dan tersedianya rekomendasi pengembangan dan pengelolaan infrastruktur																									**Predikat Kerja**	**SANGAT RENDAH**	**SANGAT TINGGI**					**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**		
2.2		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan dan ditetapkan	45	Dokumen	5,811,814,455	0	Dokumen	-	4	Dokumen	107,587,107	0	Dokumen	25,724,500	4	Dokumen	-	0	Dokumen	38,245,500	0	Dokumen	63,935,908	2	Dokumen	102,181,408	**100%**	**94.98**	2	Dokumen	102,181,408	4.44	**13.54**	BPPD	Manado
2.2.1		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	Jumlah Dokumen Master plan Pembangunan Kawasan Perbatasaan Yang Dapat dikoordinasikan, diintegrasikan dan disinkronisasikan	25	Dokumen	2,181,959,590	0	Dokumen	-	2	Dokumen	-	0	Dokumen	-	2	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0%	-	0	Dokumen	-	0.00	-	BPPD	Manado
2.2.2		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Yang Dapat Dikoordinasikan, diintegrasikan dan disinkronisasikan (Dokumen Pengelolaan Infrastruktur Fisik,	10	Dokumen	754,854,865	0	Dokumen	-	2	Dokumen	107,587,107	0	Dokumen	25,724,500	2	Dokumen	-	0	Dokumen	38,245,500	0	Dokumen	63,935,908	2	Dokumen	102,181,408	100%	**94.98**	2	Dokumen	102,181,408	20.00	**13.54**	BPPD	Manado
2.2.3		Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Batas Wilayah Negara Yang Dapat Difasilitasi	10	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0%	-	0	Dokumen	-	0.00	-	BPPD	Manado
2.2.4		Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	40	Dokumen	2,875,000,000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0%	-	0	Dokumen	-	0.00	-	BPPD	Manado
																										Rata-Rata Capaian Kerja (%)	**100%**	**94.98**					**2.22**	**13.54**		

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2020												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2020)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket.
													I			II			III			IV																	
																												Predikat Kerja	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI					Predikat Kerja	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
2.3		Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewallayahan Perbatasan yang dapat dimonitoring dan dievaluasi	40	Laporan	3,932,957,249	0	Laporan	-	8	Laporan	628,636,516	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	608,511,250	3	Laporan	608,511,250	57%	96.80	3	Laporan	608,511,250	7.50	44.59	BPPD	Manado
2.3.1		Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan yang dapat dikendalikan, diawasi serta dievaluasi	10	Laporan	790,377,974	0	Laporan	-	2	Laporan	129,289,084	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	126,824,750	1	Laporan	126,824,750	50%	98.09	1	Laporan	126,824,750	10.00	16.05	BPPD	Manado
2.3.2		Peraporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan yang dapat dilaporkan	5	Laporan	2,268,734,387	0	Laporan	-	1	Laporan	382,394,408	0	Laporan		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	377,751,700	1	Laporan	377,751,700	100%	98.79	1	Laporan	377,751,700	20.00	16.65	BPPD	Manado
2.3.3		Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dapat Dibahas dan Dievaluasi	25	Laporan	873,844,888	0	Laporan	-	5	Laporan	116,953,024	0	Laporan		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	103,934,800	1	Laporan	103,934,800	20%	88.87	1	Laporan	103,934,800	4.00	11.89	BPPD	Manado
																										Rata-Rata Capaian Kerja (%)	57%	95.25			Rata-Rata Capaian Kerja (%)	2.50	44.59		
																										Predikat Kerja	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI			Predikat Kerja	SANGAT RENDAH	44.59		
						48,217,783,585						**7,195,227,596**			**1,436,315,066**			**1,397,597,782**			**1,563,457,622**			**1,160,380,673**			**6,586,225,305**			**508.52**			**8,457,983,191**		**305.80**		
																											95%	90.68				20.52	17.54		
																											SANGAT RENDAH	TINGGI				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA						: Menunggu Realisasi APBD Perubahan TA 2020																															
	FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA						: 1. Karena dana TA 2020 sudah dilaksanakan refocusing Covid - 19																															
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						2. Sisa Anggaran Belanja Listrik tidak mencukupi untuk penggunaan sampai dengan bulan Desember 2020																															
	TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA						: 1. Akan menyesuaikan dengan anggaran APBD Perubahan																															
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 9)						2. Telah dilakukan pergeseran anggaran dari kegiatan lainnya untuk mencukupi belanja Listrik sampai bulan Desember 2020																															

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA perangkat daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	KET.
										IV											
1	2	3	4	5		6		7		11		12=8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
		BADAN PENGUHUBUNG DAERAH																			
1		***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**31,369,915,830**			**Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**31,369,915,830**		**28,333,658,429**		**28,333,658,429**					**28,333,658,429**				
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja**		**21,787,885**				**21,787,885**		**21,780,626**		**21,780,626**				**21,780,626**				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	3 Dok	3,299,249			3 Dok	3,299,249	3 Dok	3,296,626	3 Dok	3,296,626	100.0 %	99.92 %	3 Dok	3,296,626	100.00 %	99.92 %		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	2 Dok	18,309,091			2 Dok	18,309,091	2 Dok	18,309,000	2 Dok	18,309,000	100.0 %	100.00 %	2 Dok	18,309,000	100.00 %	100.00 %		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengukuran Kinerja	3 Dok	179,545			3 Dok	179,545	3 Dok	175,000	3 Dok	175,000	100.0 %	97.47 %	3 Dok	175,000	100.00 %	97.47 %		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyerapan Anggaran (Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah)**		**4,850,727,865**				**4,850,727,865**		**4,112,692,493**		**4,112,692,493**				**4,112,692,493**				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	14 Bln	4,669,168,778			14 Bln	4,669,168,778	14 Bln	3,931,228,013	14 Bln	3,931,228,013	100.0 %	84.20 %	14 Bln	3,931,228,013	100.00 %	84.20 %		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya kebutuhan administrasi barang/jasa	12 Bln	17,164,400			12 Bln	17,164,400	12 Bln	17,161,000	12 Bln	17,161,000	100.0 %	99.98 %	12 Bln	17,161,000	100.00 %	99.98 %		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun	12 Bln	9,356,588			12 Bln	9,356,588	12 Bln	9,354,768	12 Bln	9,354,768	100.0 %	99.98 %	12 Bln	9,354,768	100.00 %	99.98 %		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Bln	111,071,753			12 Bln	111,071,753	12 Bln	110,991,132	12 Bln	110,991,132	100.0 %	99.93 %	13 Bln	110,991,132	101.00 %	99.93 %		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase Pelaksanaan Akuntansi	3 Dok	43,966,346			3 Dok	43,966,346	3 Dok	43,957,580	3 Dok	43,957,580	100.0 %	99.98 %	3 Dok	43,957,580	100.00 %	99.98 %		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase kehadiran dalam acara yang diundang**		**400,123,306**				**400,123,306**		**400,075,539**		**400,075,539**				**400,075,539**				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	115,049,086			12 Bln	115,049,086	12 Bln	115,032,200	12 Bln	115,032,200	100.0 %	99.99 %	12 Bln	115,032,200	100.00 %	99.99 %		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12 Bln	32,700,000			12 Bln	32,700,000	12 Bln	32,675,000	12 Bln	32,675,000	100.0 %	99.92 %	12 Bln	32,675,000	100.00 %	99.92 %		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bln	103,901,818			12 Bln	103,901,818	12 Bln	103,900,908	12 Bln	103,900,908	100.0 %	100.00 %	12 Bln	103,900,908	100.00 %	100.00 %		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Terselenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bln	148,472,402			12 Bln	148,472,402	12 Bln	148,467,431	12 Bln	148,467,431	100.0 %	100.00 %	12 Bln	148,467,431	100.00 %	100.00 %		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rata- rata Presentase Kinerja ASN Badan Penghubung Daerah**		**2,844,646,278**				**2,844,646,278**		**2,795,521,713**		**2,795,521,713**				**2,795,521,713**				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bln	245,475			12 Bln	245,475	12 Bln	245,000	12 Bln	245,000	100.0 %	99.81 %	12 Bln	245,000	100.00 %	99.81 %		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	15,000,000			12 Bln	15,000,000	12 Bln	15,000,000	12 Bln	15,000,000	100.0 %	100.00 %	12 Bln	15,000,000	100.00 %	100.00 %		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	12 Bln	2,106,400,803			12 Bln	2,106,400,803	12 Bln	2,057,355,705	12 Bln	2,057,355,705	100.0 %	97.67 %	12 Bln	2,057,355,705	100.00 %	97.67 %		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bln	723,000,000			12 Bln	723,000,000	12 Bln	722,921,008	12 Bln	722,921,008	100.0 %	99.99 %	12 Bln	722,921,008	100.00 %	99.99 %		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase barang milik daerah di dalam kondisi Baik**		**2,598,973,774**				**2,598,973,774**		**2,596,350,812**		**2,596,350,812**				**2,596,350,812**				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan dinas Jabatan	12 Bln	394,180,000			12 Bln	394,180,000	12 Bln	394,029,945	12 Bln	394,029,945	100.0 %	99.96 %	12 Bln	394,029,945	100.00 %	99.96 %		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional dan lapangan	12 Bln	1,657,924,682			12 Bln	1,657,924,682	12 Bln	1,657,915,838	12 Bln	1,657,915,838	100.0 %	100.00 %	12 Bln	1,657,915,838	100.00 %	100.00 %		

	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA			Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA perangkat daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2021 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	KET.
												IV																	
1	2	3	4	5			6		7			11			12=8+9+10+11			13 = 12/7 x 100%			14 = 6 + 12			15=14/5 x100%			16	17
				Kinerja		Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1	Gedung	546,869,092			1	Gedung	546,869,092	1	Gedung	544,405,029	1	Gedung	544,405,029	100.0 %	99.55 %	1	Gedung	544,405,029	100.00 %	99.55 %		
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Persenatase administrasi BMD**			**22,693,700**					**22,693,700**			**22,690,545**			**22,690,545**					**22,690,545**				
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Persentase Rekonsiliasi Laporan BMD	12	Bln	22,693,700			12	Bln	22,693,700	12	Bln	22,690,545	12	Bln	22,690,545	100.0 %	99.99 %	12	Bln	22,690,545	100.0 %	99.99 %		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Realisasi Pengadaan**			**20,523,413,022**					**20,523,413,022**			**18,277,772,611**			**18,277,772,611**					**18,277,772,611**				
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas atau lapangan	16	Unit	520,000,000			16	Unit	520,000,000			0	0	Unit	0	0 %	0 %	0	Unit	0	0 %	0 %		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan gedung kantor atau bangunan	6	Unit	19,998,413,021			6	Unit	19,998,413,021			18,273,144,121	6	Unit	18,273,144,121	100.0 %	91.37 %	6	Unit	18,273,144,121	100.00 %	91.37 %		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan penunjang kantor	3	Unit	5,000,001			3	Unit	5,000,001			4,628,490	3	Unit	4,628,490	100.0 %	92.57 %	3	Unit	4,628,490	100.00 %	92.57 %		
		Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian**			**107,550,000**					**107,550,000**			**106,774,090**			**106,774,090**					**106,774,090**				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN dan THL yang menggunakan seragam sesuai ketentuan	1	Keg	35,200,000			1	Keg	35,200,000	1	Keg	35,046,090	1	Keg	35,046,090	100.0 %	99.56 %	1	Keg	35,046,090	100.0 %	99.56 %		
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pegawai Pensiun yang dipulangkan	5	Org	72,350,000			5	Org	72,350,000	5	Org	71,728,000	5	Org	71,728,000	100.0 %	99.14 %	5	Org	71,728,000	100.00 %	99.14 %		
																		Rata-rata Capaian Kinerja									
																		Peringkat Kinerja									
2		***PRORGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG***	**Persentasi peningkatan pelaksanaan pelayanan penghubung**			**306,801,091**					**306,801,091**			**305,802,878**			**305,802,878**					**305,802,878**				
		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	**Meningkatnya pelaksanaan Pelayanan Penghubung**			**306,801,091**					**306,801,091**			**305,802,878**			**305,802,878**					**305,802,878**				
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	12	Bln	37,829,932			12	Bln	37,829,932	12	Bln	37,816,238	12	Bln	37,816,238	100.0 %	99.96 %	12	Bln	37,816,238	100.00 %	99.96 %		
		Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	12	Bln	7,977,888			12	Bln	7,977,888	12	Bln	7,496,000	12	Bln	7,496,000	100.0 %	93.96 %	12	Bln	7,496,000	100.00 %	93.96 %		
		Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Meningkatnya Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestaruan Seni Budaya	12	Bln	87,288,305			12	Bln	87,288,305	12	Bln	86,865,500	12	Bln	86,865,500	100.0 %	99.52 %	12	Bln	86,865,500	100.00 %	99.52 %		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12	Bln	173,704,966			12	Bln	173,704,966	12	Bln	173,625,140	12	Bln	173,625,140	100.0 %	99.95 %	12	Bln	173,625,140	100.00 %	99.95 %		
																		Rata-rata Capaian Kinerja									
																		Peringkat Kinerja									

Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100.0 %	96.4 %
Peringkat Kinerja		**Sangat Tinggi**

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Rp. 31.654.023.220, Realisasi Rp.28.616.770.762;

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 2) Capaian Kinerja 100 %. Anggaran 96,4%

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :

- Adanya Pembatasan pergerakan dikarenakan bencana biologis nasional yaitu Pandemi COVID-19

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
													I		II		III		IV													
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11				12=(I,II,III,IV)		13=12/7 x 100%		14=6+12		15= 14/5 x100%		16	17
				Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administrasi perkantoran	100%		12,896,079,812.00	65.96%		11,145,517,110.00	100%		3,643,102,281.00	8.51%	562,458,036.00	17.02%	1,163,365,939.00	8.51%	622,316,312.00	8.51%	1,236,762,066.00			42.55%	3,584,902,353.00	42.55%	98.40%	27%	14,730,419,463.00	27.13%	114%		
		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum/ **Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor/ Penyediaan Bahan Logistik Kantor/ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan/ Penyediaan Jasa Surat Menyurat/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran/ **Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor/ Tersedianya bahan logistik Kantor/ Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan/ Tersedianya Layanan Surat Menyurat Kantor/ Tersedianya Layanan Komunikasi, Listrik dan Sumber daya Air/ Tersedianya Fasilitas Layanan Umum Kantor**	60	Bulan	9,192,850,812.00	48	Bulan	7,376,013,981.00	12	Bulan	3,104,514,376.00	3	Bulan 538,064,742.00	3	Bulan 768,514,699.00	3	Bulan 613,436,846.00	3	Bulan 1,126,785,551.00			12	3,046,801,838.00	100.00%	98.14%	60	10,422,815,819.00	100%	113%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan	60	Bulan	1,342,000,000.00	48	Bulan	1,375,895,830.00	12	Bulan	0.00	0	Bulan 0.00	0	Bulan 0.00	0	Bulan 0.00	0	Bulan 0.00			0	0.00	0.00%	0.00%	48	1,375,895,830.00	80%	103%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang / Jasa	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	60	Bulan	308,000,000.00	48	Bulan	187,199,664.00	12	Bulan	0.00	0	Bulan 0.00	0	Bulan 0.00	0	Bulan 0.00	0	Bulan 0.00			0	0.00	0.00%	0.00%	48	187,199,664.00	80%	61%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	60	Kali	360,429,000.00	8	Kali	518,143,569.00	2	Kegiatan	0.00	0	Kali 0.00	0	Kali 0.00	0	Kali 0.00	0	Kali 0.00			0	0.00	0.00%	0.00%	8	518,143,569.00	13%	144%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Penataan Kearsipan	Terlaksananya Penataan Kearsipan yang Baik	5	Kegiata	124,800,000.00	4	Kegiata	134,956,702.00	1	Kegiatan	0.00	0	Kegiata 0.00	0	Kegiata 0.00	0	Kegiata 0.00	0	Kegiatan 0.00			0	0.00	0.00%	0.00%	4	134,956,702.00	80%	108%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi/ **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi/ **Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD**	40	Kegiata	1,568,000,000.00	32	Kegiata	1,553,307,364.00	8	Kegiatan	538,587,905.00	1	Kegiata 24,393,294.00	5	Kegiata 394,851,240.00	1	Kegiata 8,879,466.00	1	Kegiatan 109,976,515.00			8	538,100,515.00	100.00%	99.91%	40	2,091,407,879.00	100%	133%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	99.05%			76%	110%		
																					Peringkat Kinerja		(Sangat Baik)	(Sangat Baik)			(Tinggi)	FALSE		
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana aparatur	100%		10,534,222,687.00	73.53%		9,271,182,707.00	100%		2,095,009,248.00	#####	217,659,731.00	16.13%	471,119,500.00	#####	529,790,738.00	16.13%	868,040,821.00			58.06%	2,086,610,790.00	58.06%	99.60%	44%	11,357,793,497.00	44%	108%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional/ **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ **Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	10	Unit	1,750,000,000.00	1	Unit	32,800,000.00	1	Unit	290,000,000.00	0	Unit 0.00	0	Unit 0.00	1	Unit 284,800,000.00	0	Unit 0.00			1	284,800,000.00	0.00%	0.00%	2	317,600,000.00	20%	18%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
		Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terciptanya Kenyamanan dalam Rumah Dinas	25	Paket	1,859,245,000.00	15	Paket	1,232,707,150.00	0	Paket	0.00	0	Paket 0.00	0	Paket 0.00	0	Paket 0.00	0	Paket 0.00			0	0.00	0.00%	0.00%	15	1,232,707,150.00	60%	66%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Gedung Kantor/ **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	Terciptanya Kenyamanan dalam Gedung Kantor/ **Jumlah peralatan /perlengkapan gedung kantor yang diadakan**	25	Paket	1,859,245,000.00	20	Paket	2,210,447,271.00	5	Paket	351,080,993.00	0	Paket 0.00	1	Paket 44,955,000.00	1	Paket 36,450,000.00	3	Paket 267,316,568.00			5	348,721,568.00	100.00%	99.33%	25	2,559,168,839.00	100%	138%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas jabatan	60	Bulan	199,660,687.00	36	Bulan	190,703,770.00	12	Unit	0.00	0	Bulan 0.00	0	Bulan 0.00	0	Bulan 0.00	0	Bulan 0.00			0	0.00	0.00%	0.00%	36	190,703,770.00	60%	96%		Refocusing Covid-19
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeuhinya Gedung Kantor yang Kondusif	60	Bulan	905,600,000.00	48	Bulan	1,061,414,842.00	12	Gedung	0.00	0	Bulan 0.00	0	Bulan 0.00	0	Bulan 0.00	0	Bulan 0.00			0	0.00	0.00%	0.00%	48	1,061,414,842.00	80%	117%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional/ **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan**	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Operasional/ **Terlaksananya pemeliharaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	85	Unit	2,177,472,000.00	68	Unit	2,118,525,072.00	17	Unit	721,691,901.00	4	Unit 131,879,130.00	5	Unit 188,998,512.00	4	Unit 117,983,677.00	4	Unit 281,999,756.00			17	720,861,075.00	100.00%	99.88%	85	2,839,386,147.00	100%	130%		Kegiatan SIPD Tahun 2021

NO	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=[I,II,III,IV]		13=12/7 x 100%		14=6+12		15= 14/8 x100%		16	17
				Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Gedung Kantor/ **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor/ **Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	60	Bulan	783,000,000.00	48	Bulan	964,453,066.00	12	Unit	437,800,000.00	3	Bulan	85,780,601.00	3	Bulan	137,414,625.00	3	Bulan	90,557,061.00	3	Bulan	124,040,005.00	12	437,792,292.00	100.00%	100.00%	60	1,402,245,358.00	100%	179%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
		Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor/ **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya**	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor/ **Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan**	15	Paket	1,000,000,000.00	14	Paket	1,460,131,536.00	3	Gedung	294,436,354.00	0	Paket	0.00	1	Paket	99,751,363.00	0	Paket	0.00	0	Paket	194,684,492.00	1	294,435,855.00	33.33%	100.00%	15	1,754,567,391.00	100%	175%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
							0																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		66.67%	79.84%			78%	115%		
							0																		Peringkat Kinerja		(Sedang)	(Tinggi)			(Tinggi)	FALSE		
3	Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya disiplin aparatur	97%		631,430,000.00	4		799,681,455.00	96%		151,360,000.00	0.00%		0.00	96.09%		150,981,600.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	96%	150,981,600.00	100.09%	99.75%	165%	950,663,055.00	170%	151%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya/ **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**	Jumlah Aparatur Pemerintah yang Disiplin/ **Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan**	712	Stel	631,430,000.00	638	Stel	799,681,455.00	179	Orang	151,360,000.00	0	Stel	0.00	172	Stel	150,981,600.00	0	Stel	0.00	0	Stel	0.00	172	150,981,600.00	96.09%	99.75%	810	950,663,055.00	114%	151%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		96.09%	99.75%			114%	151%		
																									Peringkat Kinerja		(Sangat Baik)	(Sangat Baik)			FALSE	FALSE		
4	Meningkatnya Profesionalisme dan Kinerja	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya diklat SDM Aparatur Sipil Negara	100%		1,323,935,938.00	63%		659,281,931.00	100%		721,440,153.00	#####		29,849,851.00	25.00%		73,582,900.00	#####		85,409,281.00	35.00%		492,891,773.00	95%	681,733,805.00	95.00%	94.50%	53%	1,341,015,736.00	53%	101%		
		Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan/ **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	Jumlah bimbingan teknis bagi PNS/ **Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek**	100	PNS	1,323,935,938.00	63	PNS	659,281,931.00	20	Kegiatan	721,440,153.00	2	Kegiatan	29,849,851.00	5	Kegiatan	73,582,900.00	5	Kegiatan	85,409,281.00	7	Kegiatan	492,891,773.00	19	681,733,805.00	95.00%	94.50%	82	1,341,015,736.00	82%	101%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		95.00%	94.50%			82%	101%		
																									Peringkat Kinerja		(Sangat Baik)	(Sangat Baik)			(Tinggi)	FALSE		
5	Meningkatnya Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan laporan per tahun sesuai dengan peraturan perundangan	100%		236,420,000.00	77.65%		215,645,350.00	100%		82,561,140.00	#####		10,908,464.00	4.76%		4,362,200.00	4.76%		4,351,500.00	4.76%		62,721,286.00	33.33%	82,343,450.00	33.33%	99.74%	37%	297,988,800.00	37%	126%		
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja/ **Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	10	Jokume	55,420,000.00	6	Jokume	37,369,729.00	2	Laporan	2,123,000.00	2	Jokume	2,015,464.00	0	Jokume	0.00	0	Jokume	0.00	0	Dokumen	0.00	2	2,015,464.00	100.00%	94.93%	8	39,385,193.00	80%	71%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	10	Jokume	27,000,000.00	8	Jokume	23,437,900.00	2	Laporan	0.00	0	Jokume	0.00	0	Jokume	0.00	0	Jokume	0.00	0	Dokumen	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	8	23,437,900.00	80%	87%		Nama Kegiatan sudah berubah
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun/ **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	Tersusunnya Laporan Tahunan SKPD/ **Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	5	Jokume	49,000,000.00	4	Jokume	35,878,174.00	1	Laporan	5,940,000.00	1	Jokume	5,940,000.00	0	Jokume	0.00	0	Jokume	0.00	0	Dokumen	0.00	1	5,940,000.00	100.00%	100.00%	5	41,818,174.00	100%	85%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
		Penyusunan Laporan Bulanan SKPD	Tersusunnya Laporan Bulanan SKPD	60	Jokume	105,000,000.00	48	Jokume	118,959,547.00	12	Laporan	0.00	0	Jokume	0.00	0	Jokume	0.00	0	Jokume	0.00	0	Dokumen	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	48	118,959,547.00	80%	113%		Nama Kegiatan sudah berubah (4 SIPD Tahun
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD**	0	Jokume	0.00	0	Jokume	0.00	4	Dokumen	74,498,140.00	1	Jokume	2,953,000.00	1	Jokume	4,362,200.00	1	Jokume	4,351,500.00	1	Dokumen	62,721,286.00	4	74,387,986.00	100.00%	99.85%	4	74,387,986.00	0%	0%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	98.26%			85%	89%		
																									Peringkat Kinerja		(Sangat Baik)	(Sangat Baik)			(Tinggi)	(Tinggi)		
6	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur	Program Perencanaan SKPD	Sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya	100%		102,153,281.00	41.03%		76,468,800.00	100%		16,009,579.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	#####		14,188,140.00	0.00%		1,500,000.00	57%	15,688,140.00	57.14%	97.99%	33%	92,156,940.00	33%	90%		
		Penyusunan Rencana Strategis	Tersusunnya Dokumen Renstra	4	Jokume	6,272,031.00	0	Jokume	0.00	1	Dokumen	0.00	0	Jokume	0.00	0	Jokume	0.00	0	Jokume	0.00	0	Dokumen	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0%	0%		Nama Kegiatan sudah berubah
		Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja	25	Jokume	39,381,250.00	8	Jokume	33,991,777.00	2	Dokumen	0.00	0	Jokume	0.00	0	Jokume	0.00	0	Jokume	0.00	0	Dokumen	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	8	33,991,777.00	32%	86%		Nama Kegiatan sudah berubah
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	Tersusunnya Dokumen RKA/ **Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen**	10	Jokume	56,500,000.00	8	Jokume	42,477,023.00	2	Dokumen	5,908,706.00	0	Jokume	0.00	0	Jokume	0.00	2	Jokume	5,257,415.00	0	Dokumen	600,000.00	2	5,857,415.00	100.00%	99.13%	10	48,334,438.00	100%	86%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan**	0	Jokume	0.00	0	Jokume	0.00	2	Dokumen	10,100,873.00	0	Jokume	0.00	0	Jokume	0.00	2	Jokume	8,930,725.00	0	Dokumen	900,000.00	2	9,830,725.00	100.00%	97.33%	2	9,830,725.00	0%	0%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50.00%	49.57%			33%	43%		
																									Peringkat Kinerja		(Sangat Rendah)	(Sangat Rendah)			(Sangat Rendah)	(Sangat Rendah)		
7	Meningkatnya Maturitas Implementasi	Program Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatnya Level Maturitas SPIP	Level 4		668,167,500.00	Level 3		324,735,220.00	Level 3		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	Level 3	0.00	Level 3	0.00%	Level 3	324,735,220.00	Level 3	49%		
		Sosialisasi SPIP	Jumlah kegiatan Sosialisasi SPIP	10	Kegiata	203,530,000.00	6	Kegiatan	91,286,520.00	2	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	6	91,286,520.00	60%	45%		Nama Kegiatan sudah berubah
		Diagnostic Asesment	Jumlah SKPD yang telah dilaksanakan Diagnostic Asesment	40	SKPD	157,372,500.00	24	SKPD	89,455,300.00	8	SKPD	0.00	0	SKPD	0.00	0	SKPD	0.00	0	SKPD	0.00	0	SKPD	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	24	89,455,300.00	60%	57%		Nama Kegiatan sudah berubah
		Asistensi Implementasi SPIP	Jumlah SKPD yang telah diasistensi	40	SKPD	180,030,000.00	29	SKPD	79,796,400.00	8	SKPD	0.00	0	SKPD	0.00	0	SKPD	0.00	0	SKPD	0.00	0	SKPD	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	29	79,796,400.00	73%	44%		Nama Kegiatan sudah berubah

NO	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	Kinerja	5	Rp.	Kinerja	6	Rp.	Kinerja	7	Rp.	Kinerja	8	Rp.	Kinerja	9	Rp.	Kinerja	10	Rp.	Kinerja	11	Rp.	12=[I,II,III,IV]		13=12/7 x 100%		14=6+12		15= 14/8 x100%		16	17
		Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi SPIP	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP	40	SKPD	127,235,000.00	24	SKPD	64,197,000.00	8	SKPD	0.00	0	SKPD	0.00	0	SKPD	0.00	0	SKPD	0.00	0	SKPD	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	24	64,197,000.00	60%	50%		Nama Kegiatan sudah berubah
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%			63%	49%		
																								Peringkat Kinerja		(Sangat Rendah)	(Sangat Rendah)			(Rendah)	(Sangat Rendah)		
8	Terwujudnya Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Keuangan	Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Keuangan	Mempertahankan opini BPK WTP terhadap pengelolaan keuangan	Opini WTP		17,486,476,065.00	Opini WTP		10,196,691,304.00	Opini WTP		138,366,407.00	#####		125,225,000.00	1.36%	0.00	12,331,318.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	Opini WTP	137,556,318.00	Opini WTP	99.41%	Opini WTP	10,196,691,304.00	Opini WTP	58%		
		Review Laporan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah I	Jumlah Hasil Evaluasi LPPD pada Kabupaten / Kota Wilayah I	60	LHR	96,111,700.00	51	LHR	100,746,524.00	15	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	51	100,746,524.00	85%	105%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Review Laporan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah II	Jumlah Hasil Evaluasi LPPD pada Kabupaten / Kota Wilayah II	55	LHR	96,416,500.00	48	LHR	102,608,747.00	15	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	48	102,608,747.00	87%	106%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Review Laporan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah III	Jumlah Hasil Evaluasi LPPD pada Kabupaten / Kota Wilayah III	55	LHR	94,529,800.00	48	LHR	109,142,490.00	15	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	48	109,142,490.00	87%	115%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Review Laporan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah IV	Jumlah Hasil Evaluasi LPPD pada Kabupaten / Kota Wilayah IV	60	LHR	94,152,000.00	24	LHR	34,650,250.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	24	34,650,250.00	40%	37%		kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2019
		Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Hasil Review Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	5	LHR	390,086,300.00	33	LHR	130,470,764.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	33	130,470,764.00	660%	33%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Review Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Provinsi Wilayah I	Jumlah Hasil Review Laporan Kinerja SPKD Provinsi Wilayah I	120	LHR	183,726,500.00	87	LHR	110,966,377.00	15	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	87	110,966,377.00	73%	60%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Review Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Provinsi Wilayah II	Jumlah Hasil Review Laporan Kinerja SPKD Provinsi Wilayah II	110	LHR	183,475,500.00	66	LHR	79,803,355.00	22	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	66	79,803,355.00	60%	43%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Review Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Provinsi Wilayah III	Jumlah Hasil Review Laporan Kinerja SPKD Provinsi Wilayah III	110	LHR	182,898,300.00	66	LHR	74,809,155.00	15	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	66	74,809,155.00	60%	41%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Review Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Provinsi Wilayah IV	Jumlah Hasil Review Laporan Kinerja SPKD Provinsi Wilayah IV	120	LHR	182,408,500.00	52	LHR	57,217,775.00	2	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	52	57,217,775.00	43%	31%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah I	Jumlah Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah I	120	LHP	1,441,669,700.00	102	LHP	1,108,645,069.00	30	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	102	1,108,645,069.00	85%	77%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah II	Jumlah Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah II	110	LHP	988,529,500.00	88	LHP	931,323,009.00	22	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	88	931,323,009.00	80%	94%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah III	Jumlah Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah III	110	LHP	989,859,500.00	96	LHP	1,012,028,018.00	30	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	96	1,012,028,018.00	87%	102%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah IV	Jumlah Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD	120	LHP	990,526,500.00	52	LHP	510,325,001.00	2	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	52	510,325,001.00	43%	52%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pemeriksaan dengan tujuan tertentu wilayah I	Jumlah Pemeriksaan dengan tujuan tertentu wilayah I	15	LHP	750,000,000.00	3	LHP	34,565,400.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	3	34,565,400.00	20%	5%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pemeriksaan dengan tujuan tertentu wilayah II	Jumlah Pemeriksaan dengan tujuan tertentu wilayah II	15	LHP	750,000,000.00	4	LHP	69,431,900.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	4	69,431,900.00	27%	9%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pemeriksaan dengan tujuan tertentu wilayah III	Jumlah Pemeriksaan dengan tujuan tertentu wilayah III	15	LHP	750,000,000.00	4	LHP	54,267,500.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	4	54,267,500.00	27%	7%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pemeriksaan dengan tujuan tertentu wilayah IV	Jumlah Pemeriksaan dengan tujuan tertentu wilayah IV	15	LHP	750,000,000.00	4	LHP	103,761,650.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	4	103,761,650.00	27%	14%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Probity Audit SKPD Provinsi Wilayah I	Jumlah Probity Audit pada SKPD Provinsi Wilayah I	25	LHP	225,365,000.00	14	LHP	91,727,163.00	1	Laporan	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	14	91,727,163.00	56%	41%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Probity Audit SKPD Provinsi Wilayah II	Jumlah Probity Audit pada SKPD Provinsi Wilayah II	25	LHP	234,385,000.00	14	LHP	103,101,900.00	2	Laporan	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	14	103,101,900.00	56%	44%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Probity Audit SKPD Provinsi Wilayah III	Jumlah Probity Audit pada SKPD Provinsi Wilayah III	25	LHP	236,500,000.00	14	LHP	86,783,000.00	1	Laporan	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	14	86,783,000.00	56%	37%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Probity Audit SKPD Provinsi Wilayah IV	Jumlah Probity Audit pada SKPD Provinsi Wilayah IV	25	LHP	237,351,835.00	9	LHP	349,873,412.00	1	Laporan	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	9	349,873,412.00	36%	147%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa	Jumlah laporan hasil review penyerapan anggaran dan	20	LHR	349,005,000.00	14	LHR	235,510,494.00	4	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	14	235,510,494.00	70%	67%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pemeriksaan Dana BOS Wilayah I	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Bos Wilayah I	100	LHP	288,472,000.00	56	LHP	158,702,900.00	3	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	56	158,702,900.00	56%	55%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pemeriksaan Dana BOS Wilayah II	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Bos Wilayah II	110	LHP	288,720,000.00	62	LHP	170,720,052.00	4	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	62	170,720,052.00	56%	59%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pemeriksaan Dana BOS Wilayah III	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Bos Wilayah III	120	LHP	287,174,250.00	64	LHP	184,682,005.00	3	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	64	184,682,005.00	53%	64%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pemeriksaan Dana BOS Wilayah IV	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Bos Wilayah IV	120	LHP	286,652,900.00	35	LHP	115,365,053.00	1	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	35	115,365,053.00	29%	40%		kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2019
		Pemeriksaan Hibah/Bansos	Jumlah Laporan pemeriksaan hibah/bansos	25	LHP	735,995,000.00	18	LHP	315,400,006.00	9	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	18	315,400,006.00	72%	43%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun

NO	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=[I,II,III,IV]		13=12/7 x 100%		14=6+12		15= 14/8 x100%		16	17
				Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.	Kinerja		Rp.		Kinerja			
		Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK Wilayah I	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK wilayah I	120	LHP	648,100,000.00	71	LHP	662,359,001.00	8	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	71	662,359,001.00	59%	102%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK Wilayah II	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK wilayah II	110	LHP	648,100,000.00	65	LHP	604,494,005.00	8	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	65	604,494,005.00	59%	93%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK Wilayah III	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK wilayah III	110	LHP	648,100,000.00	62	LHP	510,845,531.00	4	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	62	510,845,531.00	56%	79%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK Wilayah IV	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK wilayah IV	120	LHP	648,100,000.00	37	LHP	311,425,491.00	1	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	37	311,425,491.00	31%	48%		kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2019
		Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	75	LHP	2,504,542,780.00	39	LHP	1,523,608,007.00	12	Laporan	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	39	1,523,608,007.00	52%	61%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Pemeriksaan Dana BOS Wilayah V	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Bos Wilayah V	2	LHP	72,170,000.00	1	LHP	35,396,600.00	1	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	1	35,396,600.00	50%	49%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK Wilayah V	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK wilayah V	2	LHP	233,352,000.00	1	LHP	111,933,700.00	1	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	1	111,933,700.00	50%	48%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Reviu Laporan Keuangan	**Jumlah Laporan Keuangan Yang Telah Direviu Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara**	0	Laporan	0.00	0	Laporan	0.00	48	Laporan	138,366,407.00	42	Laporan	125,225,000.00	4	Laporan	12,331,318.00	0	Laporan	0.00	0	Laporan	0.00	46	137,556,318.00	95.83%	99.41%	46	137,556,318.00	0%	0%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)		95.83%	99.41%			73%	59%		
																								Peringkat Kinerja		(Sangat Baik)	(Sangat Baik)			(Sedang)	(Rendah)		
9	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi sulawesi utara dan 15 kab/kota	Provinsi Kategori A, Kab./Kota rata-rata CC		2,686,655,051.00	Provinsi Kategori B, Kab./Kota rata-rata C		1,402,205,943.00	Provinsi Kategori BB, Kab./Kota rata-rata CC		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	Provinsi Kategori BB, Kab./Kota rata-rata CC	0.00	Provinsi Kategori B, Kab./Kota rata-rata C		0.00%	Provinsi Kategori B, Kab./Kota rata-rata C	1,402,205,943.00	Provinsi Kategori B, Kab./Kota rata-rata C	52%		
		Evaluasi Implementasi SAKIP SKPD Provinsi Wilayah I	Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Provinsi Wilayah I	20	LHE	236,900,000.00	25	LHE	168,483,033.00	15	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	25	168,483,033.00	125%	71%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Evaluasi Implementasi SAKIP SKPD Provinsi Wilayah II	Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Provinsi Wilayah II	20	LHE	241,875,000.00	18	LHE	188,820,413.00	8	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	18	188,820,413.00	90%	78%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Evaluasi Implementasi SAKIP SKPD Provinsi Wilayah III	Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Provinsi Wilayah III	20	LHE	243,455,000.00	25	LHE	187,863,200.00	15	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	25	187,863,200.00	125%	77%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Evaluasi Implementasi SAKIP SKPD Provinsi Wilayah IV	Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Provinsi Wilayah IV	20	LHE	239,973,550.00	9	LHE	72,387,950.00	2	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	9	72,387,950.00	45%	30%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Review Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi	Jumlah Hasil Review Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi	5	LHR	242,439,000.00	4	LHR	123,824,020.00	1	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	4	123,824,020.00	80%	51%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Evaluasi Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah I	Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten / Kota Wilayah I	5	LHE	310,715,000.00	4	LHE	164,973,400.00	1	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	4	164,973,400.00	80%	53%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Evaluasi Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah II	Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten / Kota Wilayah II	5	LHE	430,645,000.00	5	LHE	196,912,022.00	2	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	5	196,912,022.00	100%	46%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Evaluasi Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah III	Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten / Kota Wilayah III	5	LHE	315,695,000.00	7	LHE	181,069,455.00	3	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	7	181,069,455.00	140%	57%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Evaluasi Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah IV	Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten / Kota Wilayah IV	5	LHE	314,880,301.00	2	LHE	117,872,450.00	1	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	2	117,872,450.00	40%	37%		kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2019
		Evaluasi Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah V	Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten / Kota Wilayah V	2	LHE	110,077,200.00	0	LHE	0.00	1	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0%	0%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%			83%	50%		
																								Peringkat Kinerja		(Sangat Rendah)	(Sangat Rendah)			(Tinggi)	(Rendah)		
10	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai LPPD dilingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan 15 kab./kota	Provinsi nilai Tinggi. Kab./kota rata-rata		13,870,667,884.00	Provinsi nilai Tinggi. Kab./kota rata-rata Tinggi		6,347,459,825.00	Provinsi nilai Tinggi. Kab./kota rata-rata Tinggi		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	Provinsi nilai Tinggi. Kab./kota rata-rata	0.00	Provinsi nilai Tinggi. Kab./kota rata-		0.00%	Provinsi nilai Tinggi. Kab./kota rata-rata	6,347,459,825.00	Provinsi nilai Tinggi. Kab./kota rata-rata	46%		

NO	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=[I,II,III,IV]		13=12/7 x 100%		14=6+12		15= 14/8 x100%		16	17
				Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja		Kinerja	Rp.	Kinerja			
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah I	Jumlah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah I	20	LHE	487,350,000.00	14	LHE	335,607,236.00	5	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	14	335,607,236.00	70%	69%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah II	Jumlah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah II	20	LHE	368,600,000.00	17	LHE	324,153,059.00	5	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	17	324,153,059.00	85%	88%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah III	Jumlah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah III	20	LHE	369,950,000.00	15	LHE	290,617,423.00	3	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	15	290,617,423.00	75%	79%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah IV	Jumlah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	15	LHE	369,950,000.00	11	LHE	189,889,426.00	3	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	LHE	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	11	189,889,426.00	73%	51%		kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2019
		Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Review Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi	5	LHR	272,350,000.00	5	LHR	127,512,094.00	1	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	LHR	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	5	127,512,094.00	100%	47%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan SKPD Provinsi Wilayah I	Jumlah Pengawasan Secara Berkala pada SKPD Provinsi Wilayah I	60	LHP	732,002,000.00	45	LHP	337,362,336.00	15	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	45	337,362,336.00	75%	46%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan SKPD Provinsi Wilayah II	Jumlah Pengawasan Secara Berkala pada SKPD Provinsi Wilayah II	55	LHP	732,800,000.00	44	LHP	323,485,300.00	15	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	44	323,485,300.00	80%	44%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan SKPD Provinsi Wilayah III	Jumlah Pengawasan Secara Berkala pada SKPD Provinsi Wilayah III	55	LHP	732,002,000.00	40	LHP	274,617,527.00	15	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	40	274,617,527.00	73%	38%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan SKPD Provinsi Wilayah IV	Jumlah Pengawasan Secara Berkala pada SKPD Provinsi Wilayah IV	60	LHP	733,200,000.00	22	LHP	321,734,405.00	2	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	22	321,734,405.00	37%	44%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Wilayah I	Jumlah Pengawasan Secara Berkala pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah I	20	LHP	843,812,000.00	11	LHP	494,537,275.00	5	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	11	494,537,275.00	55%	59%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Wilayah II	Jumlah Pengawasan Secara Berkala pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah II	20	LHP	844,100,000.00	13	LHP	519,656,165.00	5	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	13	519,656,165.00	65%	62%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Wilayah III	Jumlah Pengawasan Secara Berkala pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah III	20	LHP	843,812,000.00	13	LHP	488,167,025.00	3	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	13	488,167,025.00	65%	58%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Wilayah IV	Jumlah Pengawasan Secara Berkala pada Pemerintah Kabupaten/Kota	15	LHP	843,812,000.00	8	LHP	296,786,575.00	3	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	8	296,786,575.00	53%	35%		kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2019
		Review rencana kerja SKPD Provinsi Wilayah I	Jumlah laporan hasil review rencana kerja SKPD Provinsi wilayah I	120	LHP	229,150,000.00	87	LHP	163,018,970.00	15	LHR	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	87	163,018,970.00	73%	71%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Review rencana kerja SKPD Provinsi Wilayah II	Jumlah laporan hasil review rencana kerja SKPD Provinsi wilayah II	110	LHP	229,210,000.00	66	LHP	115,139,707.00	22	LHR	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	66	115,139,707.00	60%	50%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Review rencana kerja SKPD Provinsi Wilayah III	Jumlah laporan hasil review rencana kerja SKPD Provinsi wilayah III	110	LHP	229,090,000.00	66	LHP	120,051,327.00	15	LHR	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	66	120,051,327.00	60%	52%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Review rencana kerja SKPD Provinsi Wilayah IV	Jumlah laporan hasil review rencana kerja SKPD Provinsi wilayah IV	120	LHP	229,140,000.00	52	LHP	96,500,982.00	2	LHR	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	52	96,500,982.00	43%	42%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Review RKPD	Jumlah Laporan hasil review RKPD	10	LHP	304,400,000.00	8	LHP	128,810,747.00	2	LHR	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	8	128,810,747.00	80%	42%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Review KUA/PPAS	Jumlah Laporan hasil review KUA-PPAS	10	LHP	262,367,900.00	5	LHP	35,114,200.00	2	LHR	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	5	35,114,200.00	50%	13%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Wilayah I	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi dana desa wilayah I	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0%	0%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Wilayah II	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi dana desa wilayah II	4	LHP	66,200,000.00	4	LHP	66,047,800.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	4	66,047,800.00	100%	100%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Wilayah III	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi dana desa wilayah III	4	LHP	66,000,000.00	4	LHP	65,874,400.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	4	65,874,400.00	100%	100%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Wilayah IV	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi dana desa wilayah IV	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0%	0%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pemeriksaan Pengalihan personil peralatan pembiayaan Wilayah I	Jumlah laporan hasil pemeriksaan P3D wilayah I	16	LHP	600,000,000.00	4	LHP	137,460,376.00	0	LHP	0.00													0	0.00	0.00%	0.00%	4	137,460,376.00	25%	23%		kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2018
		Pemeriksaan Pengalihan personil peralatan pembiayaan Wilayah II	Jumlah laporan hasil pemeriksaan P3D wilayah II	16	LHP	600,000,000.00	4	LHP	138,925,924.00	0	LHP	0.00													0	0.00	0.00%	0.00%	4	138,925,924.00	25%	23%		kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2018
		Pemeriksaan Pengalihan personil peralatan pembiayaan Wilayah III	Jumlah laporan hasil pemeriksaan P3D wilayah III	16	LHP	600,000,000.00	4	LHP	149,600,736.00	0	LHP	0.00													0	0.00	0.00%	0.00%	4	149,600,736.00	25%	25%		kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2018
		Pemeriksaan Pengalihan personil peralatan pembiayaan Wilayah IV	Jumlah laporan hasil pemeriksaan P3D wilayah IV	12	LHP	600,000,000.00	3	LHP	147,093,390.00	0	LHP	0.00													0	0.00	0.00%	0.00%	3	147,093,390.00	25%	25%		kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2018

NO	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	Kinerja	5	Rp.	Kinerja	6	Rp.	Kinerja	7	Rp.	Kinerja	8	Rp.	Kinerja	9	Rp.	Kinerja	10	Rp.	Kinerja	11	Rp.	12=(I,II,III,IV)		13=12/7 x 100%		14=6+12		15= 14/8 x100%		16	17
		Pemeriksaan Dana Desa Wilayah I	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dana desa wilayah I	20	LHP	280,158,400.00	11	LHP	154,149,585.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	11	154,149,585.00	55%	55%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pemeriksaan Dana Desa Wilayah II	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dana desa wilayah II	20	LHP	281,860,000.00	11	LHP	163,515,640.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	11	163,515,640.00	55%	58%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pemeriksaan Dana Desa Wilayah III	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dana desa wilayah III	20	LHP	280,158,400.00	11	LHP	169,449,900.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	11	169,449,900.00	55%	60%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Pemeriksaan Dana Desa Wilayah IV	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dana desa wilayah IV	15	LHP	447,026,384.00	6	LHP	103,322,595.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	6	103,322,595.00	40%	23%		kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2019
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah V	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dana desa wilayah V	2	LHP	158,290,800.00	1	LHP	69,257,700.00	0	LHE	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	1	69,257,700.00	50%	44%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Wilayah V	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dana desa wilayah V	2	LHP	233,876,000.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0%	0%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	0.00%			55%	46%		
																						Peringkat Kinerja			(Sangat Rendah)	(Sangat Rendah)			(Rendah)	(Sangat Rendah)		
11	Tersusunnya Kebijakan Pengawasan	Program Perencanaan Pengawasan Komprehensif	Menghindari tumpang tindih pemeriksaan	5 PKPT		1,171,019,584.00	3 PKPT		1,002,393,072.00	1 PKPT		155,906,500.00	0.00%		0.00	10.00%		19,346,887.00	5.00%		3,327,443.00	55.00%		129,720,522.00	1 PKPT	152,394,852.00	3 PKPT	97.75%	3 PKPT	1,154,787,924.00	20%	99%		
		Pengendalian pelaksanaan Pengawasan	Jumlah rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengawasan	60	Dokume	56,951,188.00	46	Dokume	32,372,498.00	0	Dokumen	0.00	0	Dokume	0.00	0	Dokume	0.00	0	Dokume	0.00	0	Dokumen	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	46	32,372,498.00	77%	57%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Penyusunan Perencanaan Pengawasan/ **Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan**	Jumlah Peta pengawasan dengan Inspektorat Kab./Kota dan Itjen Kemendagri/ **Peta Pengawasan Dengan Pemeriksa Kab/Kota**	80	Dokume	152,000,000.00	56	Dokume	19,626,273.00	15	Dokumen	155,906,500.00	0	Dokume	0.00	2	Dokume	19,346,887.00	1	Dokume	3,327,443.00	11	Dokumen	129,720,522.00	14	152,394,852.00	93.33%	97.75%	70	172,021,125.00	88%	113%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
		Koordinasi Perencanaan Pengawasan	Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan di Pusat dan Daerah	20	Kegiata	1,019,019,584.00	12	Kegiatan	950,394,301.00	4	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	12	950,394,301.00	60%	93%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	**Program Kerja Pengawasan Tahunan**	0	Dokume	0.00	0	Dokume	0.00	1	Dokumen	0.00	0	Dokume	0.00	0	Dokume	0.00	0	Dokume	0.00	0	Dokumen	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0%	0%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)			46.67%	48.87%			75%	88%		
																						Peringkat Kinerja			(Sangat Rendah)	(Sangat Rendah)			(Sedang)	(Tinggi)		
12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan Pengawasan	Program Percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1. Persentase tindak lanjut temuan 2. Persentase Penurunan Jumlah temuan BPK	1. 65% 2. 10%		2,050,182,688.00	67.14%		2,077,993,482.00	1. 60% 2. 10%		572,292,722.00	7.14%		73,686,605.00	7.14%		139,682,134.00	#####		137,937,275.00	14.29%		220,080,017.00	1. 60% 2. 10%	571,386,031.00	1. 60% 2. 10%	99.84%	1. 60% 2. 10%	2,649,379,513.00	1. 92,30% 2. 100%	129%		
		Monitoring penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan/ **Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**	Jumlah kegiatan monitoring penyelesaian tindak lanjut pengawasan/ **Jumlah Laporan Monitoring Penyelesaian TLHP BPK RI dan APIP**	20	Kegiata	828,725,000.00	16	Kegiatan	1,362,064,149.00	4	Kegiatan	508,640,222.00	1	Laporan	73,686,605.00	1	Laporan	139,682,134.00	1	Laporan	115,212,800.00	1	Laporan	179,867,417.00	4	508,448,956.00	100.00%	99.96%	20	1,870,513,105.00	100%	226%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
		Evaluasi Hasil Pengawasan	Jumlah kegiatan evaluasi hasil pengawasan	20	Kegiata	80,000,000.00	12	Kegiatan	53,091,352.00	4	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	12	53,091,352.00	60%	66%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun
		Koordinasi Hasil Pengawasan	Jumlah kegiatan koordinasi hasilpengawasan di Pusat dan Daerah	20	Kegiata	807,400,000.00	16	Kegiatan	614,155,675.00	4	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	16	614,155,675.00	80%	76%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi/ **Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah**	Jumlah sidang TP-TGR/ **Jumlah Sidang MTPTGR**	10	Kegiata	334,057,688.00	3	Kegiatan	48,682,306.00	2	Kegiatan	63,652,500.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	1	Kegiatan	22,724,475.00	1	Kegiatan	40,212,600.00	2	62,937,075.00	100.00%	98.88%	5	111,619,381.00	50%	33%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	66.28%			73%	100%		
																						Peringkat Kinerja			(Sangat Baik)	(Sedang)			(Sedang)	FALSE		
13	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan Pengawasan	Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level 3		4,955,300,128.00	Level 2		2,803,258,092.00	Level 3		64,988,598.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	14.55%		59,834,100.00	Level 3	59,834,100.00	Level 2	92.07%	Level 2	2,863,092,192.00	Level 2	58%		

NO	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=[I,II,III,IV]		13=12/7 x 100%		14=6+12		15= 14/8 x100%		16	17
				Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja	Rp.		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja		Kinerja	Rp.	Kinerja			
		Sosialisasi Peraturan Pengawasan/ **Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	Jumlah Sosialisasi Pengawasan/ **Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi**	15	Kegiata	442,600,000.00	9	Kegiatan	172,588,323.00	9	Kegiatan	64,988,598.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	8	Kegiatan	59,834,100.00	8	59,834,100.00	88.89%	92.07%	17	232,422,423.00	113%	53%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
		Penyusunan Pedoman dan Standar Pengawasan	Jumlah Pedoman dan Standar yang disusun	25	Jokume	94,900,000.00	20	Jokume	175,904,514.00	5	Dokumen	0.00	0	Jokume	0.00	0	Jokume	0.00	0	Jokume	0.00	0	Dokumen	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	20	175,904,514.00	80%	185%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Bertambahnya Aparatur Pengawasan yang Profesional	200	ASN	3,993,124,200.00	120	ASN	2,149,293,327.00	40	ASN	0.00	0	ASN	0.00	0	ASN	0.00	0	ASN	0.00	0	ASN	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	120	2,149,293,327.00	60%	54%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Monitoring dan Evaluasi Mandiri Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat dan Bimtek Pengawasan	5	Laporan	424,675,928.00	4	Laporan	305,471,928.00	1	Laporan	0.00	0	Laporan	0.00	0	Laporan	0.00	0	Laporan	0.00	0	Laporan	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	4	305,471,928.00	80%	72%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
																										Rata-rata Capaian Kinerja (%)	88.89%	92.07%			83%	91%		
																										Peringkat Kinerja	(Tinggi)	(Sangat Baik)			(Tinggi)	(Sangat Baik)		
14	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih	Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1. Persentase penyampaian LHKPN 2. Persentase penanganan pengaduan masyarakat	1. 95% 2. 90%		11,904,487,987.00	67.52%		3,796,350,289.00	1. 90% 2. 90%		1,048,964,528.00	3.03%		62,300,000.00	27.27%		330,736,914.00	#####		146,551,500.00	10.61%		502,113,217.00	1. 90% 2. 90%	1,041,701,631.00	-	99.31%	-	4,838,051,920.00	-	40.64%		
		Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan	20	Kali	1,718,862,010.00	17	Kali	1,259,131,752.00	4	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	Kali	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	17	1,259,131,752.00	85%	73%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Sosialisasi Anti Korupsi	Terlaksananya Sosialisasi Anti Korupsi	500	Jokume	215,700,000.00	262	Jokume	31,278,050.00	0	Orang	0.00	0	Orang	0.00	0	Orang	0.00	0	Orang	0.00	0	Orang	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	262	31,278,050.00	52%	15%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Penanganan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara	Jumlah penanganan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil	5000	ASN	425,000,000.00	3528	ASN	423,122,540.00	0	ASN	0.00	0	ASN	0.00	0	ASN	0.00	0	ASN	0.00	0	ASN	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	3528	423,122,540.00	71%	100%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ **Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi**	Jumlah Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ **Jumlah Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**	5	Kali	285,000,000.00	4	Kali	198,980,068.00	47	LHE	21,799,750.00	0	LHE	0.00	10	LHE	5,750,000.00	33	LHE	14,250,000.00	4	LHE	1,760,500.00	47	21,760,500.00	100.00%	99.82%	51	220,740,568.00	1020%	77%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
		Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/ **Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas**	Jumlah SKPD Provinsi yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/ **Jumlah Laporan Evaluasi ZIWBK**	5	Kali	93,897,000.00	3	Kali	74,856,400.00	2	Laporan	14,025,000.00	0	Laporan	0.00	2	Laporan	11,925,000.00	0	Laporan	0.00	0	Laporan	0.00	2	11,925,000.00	100.00%	85.03%	5	86,781,400.00	100%	92%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
		Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah wilayah I	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah wilayah I	25	LHP	1,250,000,000.00	2	LHP	8,925,000.00			0.00													0	0.00	0.00%	0.00%	2	8,925,000.00	8%	1%		Kegiatan ini digabung sejak 2018
		Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah wilayah II	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah wilayah II	25	LHP	1,250,000,000.00	1	LHP	5,900,000.00			0.00													0	0.00	0.00%	0.00%	1	5,900,000.00	4%	0%		Kegiatan ini digabung sejak 2018
		Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah wilayah III	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah wilayah III	25	LHP	1,250,000,000.00	1	LHP	3,500,000.00			0.00													0	0.00	0.00%	0.00%	1	3,500,000.00	4%	0%		Kegiatan ini digabung sejak 2018
		Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah wilayah IV	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah wilayah IV	25	LHP	1,250,000,000.00	4	LHP	25,661,990.00			0.00													0	0.00	0.00%	0.00%	4	25,661,990.00	16%	2%		Kegiatan ini digabung sejak 2018
		Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	100	LHP	994,138,990.00	55	LHP	483,167,802.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	55	483,167,802.00	55%	49%		Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021
		Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)/ **Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kegiatan Saber Pungli/ **Jumlah Kegiatan Pendampingan**	25	Kali	2,591,889,987.00	10	Kali	1,200,468,087.00	10	Kegiatan	760,736,135.00	1	Kegiatan	47,300,000.00	5	Kegiatan	239,523,014.00	1	Kegiatan	51,911,500.00	3	Kegiatan	420,010,636.00	10	758,745,150.00	100.00%	99.74%	20	1,959,213,237.00	80%	76%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
		Operasionalisasi TP4D	Terevaluasinya aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	1	Kegiata	280,000,000.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0%	0%		kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2019

NO	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket.
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	Kinerja	5	Rp.	Kinerja	6	Rp.	Kinerja	7	Rp.	Kinerja	8	Rp.	Kinerja	9	Rp.	Kinerja	10	Rp.	Kinerja	11	Rp.	12=[I,II,III,IV]		13=12/7 x 100%		14=6+12		15= 14/8 x100%		16	17
		Audit Investigasi	Persentase Peningkatan Teringkatnya Kecurangan	2	Kegiata	300,000,000.00	1	Kegiatan	81,358,600.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	Kegiatan	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	1	81,358,600.00	50%	27%		Nama Kegiatan sudah terulah di SIPD Tahun
		Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	**1. Jumlah Dokumen Pemenuhan MCP, 2. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi, 3. Jumlah Wajib LHKPN yang melaporkan**	0	Kegiata	0.00	0	Kegiatan	0.00	3	Kegiatan	252,403,643.00	1	Kegiatan	15,000,000.00	1	Kegiatan	73,538,900.00	1	Kegiatan	80,390,000.00	0	Kegiatan	80,342,081.00	3	249,270,981.00	100.00%	98.76%	3	249,270,981.00	0%	0%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	95.84%			119%	39%		
																						Peringkat Kinerja			(Sangat Baik)	(Sangat Baik)			FALSE	(Sangat Rendah)		
15	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi**	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**OPINI BPK**	WTP		0.00	Level 2		0.00	Level 3		4,499,873,143.00	1.16%		87,988,210.00	38.84%		1,710,645,112.00	#####		1,240,816,766.00	16.52%		1,434,409,098.00	Level 3	4,473,859,186.00	Level 2	99.42%	Level 2	4,473,859,186.00	Level 2	0%		
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	**- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) - Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR)**	0	Laporan	0.00	0	Laporan	0.00	101	Laporan	792,657,483.00	0	Laporan	0.00	25	Laporan	255,810,804.00	56	Laporan	403,757,836.00	16	Laporan	111,271,820.00	97	770,840,460.00	96.04%	97.25%	97	770,840,460.00	0%	0%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	**- Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) - Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR)**	0	Laporan	0.00	0	Laporan	0.00	170	Laporan	1,777,201,888.00	2	Laporan	17,178,410.00	103	Laporan	1,012,576,889.00	47	Laporan	468,720,179.00	18	Laporan	278,679,000.00	170	1,777,154,478.00	100.00%	100.00%	170	1,777,154,478.00	0%	0%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
		Reviu Laporan Kinerja	**Laporan Reviu Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara**	0	Laporan	0.00	0	Laporan	0.00	1	Laporan	36,470,397.00	0	Laporan	0.00	1	Laporan	36,463,182.00	0	Laporan	0.00	0	Laporan	0.00	1	36,463,182.00	100.00%	99.98%	1	36,463,182.00	0%	0%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
		Pengawasan Umum Dan Teknis Kabupaten/Kota	**- Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) - Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE)**	0	Laporan	0.00	0	Laporan	0.00	35	Laporan	0.00	0	Laporan	0.00	0	Laporan	0.00	0	Laporan	0.00	0	Laporan	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0%	0%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
		Kerjasama Pengawasan Internal	**1. Jumlah Kerjasama Implementasi SAKIP, 2. Jumlah Kerjasama Peningkatan Kapabilitas APIP, 3. Jumlah Kerjasama Pencegahan Korupsi**	0	Kegiata	0.00	0	Kegiatan	0.00	3	Kegiatan	1,008,324,683.00	0	Kegiatan	0.00	1	Kegiatan	300,539,237.00	1	Kegiatan	182,881,629.00	1	Kegiatan	524,651,878.00	3	1,008,072,744.00	100.00%	99.98%	3	1,008,072,744.00	0%	0%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)**	0	LHP	0.00	0	LHP	0.00	35	LHP	885,218,692.00	2	LHP	70,809,800.00	4	LHP	105,255,000.00	7	LHP	185,457,122.00	22	LHP	519,806,400.00	35	881,328,322.00	100.00%	99.56%	35	881,328,322.00	0%	0%		Kegiatan SIPD Tahun 2021
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)			82.67%	82.79%			0%	0%		
																						Peringkat Kinerja			(Tinggi)	(Tinggi)			(Sangat Rendah)	(Sangat Rendah)		
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										13,189,874,299.00			1,170,075,897.00			4,076,154,504.00			2,784,688,955.00			5,008,072,900.00		13,038,992,256.00								
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 15)																								85.15%	98.86%			78%	81%		
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 15)																								(Tinggi)	(Sangat Baik)			(Tinggi)	(Tinggi)		
		FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :		1. Ketersediaan dana Tepat waktu 2. Komunikasi dan Koordinasi yang baik antar perangkat daerah																														
		FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN KINERJA :		1.Pandemi Covid-19																														
		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA																														

FORMULIR E.55
EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA			Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV																	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = (I, II, III, IV)			13 = 12/7 x 100%			14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100%			16	17
				Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																																			
1	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana/Prasarana Badan Kesbanggpol sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah ; NILAI LKIP SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POITIK DAERAH RATA-RATA MINIMUM B**	**Nilai AkuntabilitasKinerja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Rata-rata Minimum B**		**721,200,000**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Rata-Rata Minimum B**		**5,098,555,913**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Rata-Rata Minimum B**		**3,207,098**			-			**3,150,000**			-			-	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Rata-Rata Minimum B**		**3,150,000**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rata-Rata Minimum B**		**2.22**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rata-Rata Minimum B**			**Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rata-Rata Minimum B**				
1.1.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		60	bulan	11,100,000	24	bulan	13,120,000	12	bulan	3,207,098	3	bln	-	6	bln	3,150,000	9	bln	-	12	bln	-	12	bulan	3,150,000	100.00%		0.98	24						Badan Kesbanggpol Daerah Prov. Sulut	Kegiatan-kegiatan inti dalam urusan
1.2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,914,027,740**	3	bln	**1,255,291,178**			**1,250,925,126**			**1,618,988,091**				12	bulan	**4,704,149,564**			0.80	24							
1.3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		60	bulan	-	24	bulan	4,986,076,113	12	bulan	5,783,242,500	3	bln	1,241,407,221	6	bln	1,194,215,341	9	bln	1,576,362,263	12	bln	506,656,255	12	bulan	4,518,641,080	100.00%		0.78	24							
1.4		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		60	bulan	-	24	bulan	-	12	bulan	3,904,545	3	bln	1,450,000	6	bln	2,250,000	9	bln	200,000	12	bln	34,554,000	12	bulan	38,454,000	100.00%		9.85	24							
1.5		Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		60	bulan	-	24	bulan	-	12	bulan	120,435,624	3	bln	10,383,957	6	bln	51,919,785	9	bln	41,535,828	12	bln	36,817,914	12	bulan	140,657,484	100.00%		1.17	24							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		60	bulan	4,850,000	24	bulan	13,085,000	12	bulan	3,399,838	3	bln	850,000	6	bln	2,540,000	9	bln	-	12	bln	-	12	bulan	3,390,000	100.00%		1.00	24							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		60	bulan	705,250,000	24	bulan	86,274,800	12	bulan	3,045,233	3	bln	1,200,000	6	bln	-	9	bln	890,000	12	bln	917,000	12	bulan	3,007,000	100.00%		0.99	24							
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)					**2.30**										
																								Predikat Kinerja														
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**457,531,100**			**114,351,500**			**311,329,898**			**160,773,957**			**44,459,145**			**41,535,828**						**307,487,484**												
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		60	bulan	241,250,000	24	bulan	64,751,500	12	bulan	144,300,000	3	bln	141,790,000	6	bln	-	9	bln	-			-	12	bulan	141,790,000	100.00%		0.98	24							
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		60	bulan	69,856,100	24	bulan	49,600,000	12	bulan	142,337,975	3	bln	18,983,957	6	bln	44,459,145	9	bln	41,535,828	12	bln	60,718,554	12	bulan	165,697,484	100.00%		1.16	24							
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		60	bulan	146,425,000	24	bulan	-	12	bulan	24,691,923	3	bln	-	6	bln	-	9	bln	-			-	0	bulan	-	0.00%			24							
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)					**1.07**										
																								Predikat Kinerja														
		Adminstrasi Umum Perangkat Daerah				**1,239,512,280**			**42,151,100**			**278,162,397**			**101,081,900**			**68,230,000**			**70,417,000**						**277,312,500**												
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		60	bulan	-	24	bulan	-	12	bulan	171,795,383	3	bln	48,500,000	6	bln	63,790,000	9	bln	33,800,000	12	bln	25,000,000	12	bulan	171,090,000	100.00%		1.00	24							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60	bulan	1,239,512,280	24	bulan	42,151,100	12	bulan	106,367,014	3	bln	52,581,900	6	bln	4,440,000	9	bln	36,617,000	12	bln	12,583,600	12	bulan	106,222,500	100.00%		1.00	24							
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)					**1.53**										
																								Predikat Kinerja														
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**4,364,257,624**			**1,660,835,939**			**790,345,861**			**55,722,479**			**410,400,184**			**192,216,901**						**794,513,572**			**2.96**									
		Pengadaan Mebel		60	bulan	750,000,000	24	bulan	389,230,000	12	bulan	82,799,999	3	bln	-	6	bln	66,159,500	9	bln	-	12	bln	15,000,000	12	bulan	81,159,500	100.00%		0.98	24							
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		60	bulan	405,463,800	24	bulan	-	12	bulan	228,080,002	3	bln	-	6	bln	186,120,000	9	bln	-	12	bln	26,400,000	12	bulan	212,520,000	100.00%		0.93	24							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		60	bulan	3,208,793,824	24	bulan	1,271,605,939	12	bulan	479,465,860	3	bln	55,722,479	6	bln	158,120,684	9	bln	192,216,901	12	bln	94,774,008	12	bulan	500,834,072	100.00%		1.04	24							
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)					**1.97**										
																								Predikat Kinerja														
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**7,531,468,859**			**488,982,491**			**647,622,960**			**57,189,700**			**409,878,293**			**102,241,750**						**666,997,343**			1.26									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		12	Unit	6,127,583,400	24	bulan	266,561,350	12	bulan	376,860,000	3	bln	57,189,700	6	bln	185,564,950	9	bln	77,461,750	12	bln	40,297,600	12	bulan	360,514,000	100.00%		0.96	24							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		60	bulan	199,750,000	24	bulan	38,074,000	12	bulan	38,000,000	3	bln	-	6	bln	25,555,000	9	bln	12,430,000	12	bln	30,000,000	12	bulan	67,985,000	100.00%		1.79	24							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5	paket	1,204,135,459	24	bulan	184,347,141	12	bulan	232,762,960	3	bln	-	6	bln	198,758,343	9	bln	12,350,000	12	bln	27,390,000	12	bulan	238,498,343	100.00%		1.02	24							
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)					**1.68**										
																								Predikat Kinerja														
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**			**8,013,350,410**			**657,242,100**			**480,372,361**			**123,058,911**			**150,370,276**			**82,081,648**						**376,278,749**			**0.79**									
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan																																			
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1100	orang	702,654,800			657,242,100	12		86,346,777	3	bln	49,696,773	6	bln	-	9	bln	20,342,000	12	bln	-	12	bulan	70,038,773	100.00%		0.81	24							
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1400	orang	3,022,400,000			-	12		82,158,091	3	bln	3,461,319	6	bln	14,225,000	9	bln	44,433,053	12	bln	13,845,276	12	bulan	75,964,648	100.00%		0.92	24							
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		500	orang	504,646,000			-	12		173,339,964	3	bln	-	6	bln	122,300,000	9	bln	-	12	bln	-	12	bulan	122,300,000	100.00%		0.71	24							
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1500	orang	3,783,649,610			-	12		88,302,003	3	bln	36,773,319	6	bln	13,845,276	9	bln	17,306,595	12	bln	6,922,638	12	bulan	74,847,828	100.00%		0.85	24							
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				-			-	12		50,225,526	3	bln	33,127,500	6	bln	-	9	bln		12	bln	-	12	bulan	33,127,500	100.00%		0.66	24							
									-															**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**					**0.79**										
																								Predikat Kinerja														
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERBASIS KEARIFAN BUDAYA LOKAL	**Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan**			**3,794,949,585**			**419,802,600**			**2,200,722,609**			**135,576,566**			**124,267,776**			**1,270,206,190**						**1,953,618,327**			**0.90**									
		Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Pemahaman Pendidikan Kebangsaan	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan																								-											
	fv	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		25	Kasus	528,834,945			339,326,600	12		105,719,197	3	bln	18,306,619	6	bln	40,021,776	9	bln	34,633,757	12	bln	6,922,638	12	bulan	99,884,790	100.00%		0.94	24							

		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		20	Laporan	512,627,599			-	12		53,488,555	3	bln	3,461,319	6	bln	9,715,000	9	bln	27,729,233	12	bln	10,383,957	12	bulan	51,289,509	100.00%		0.96	24							
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		3000	orang	1,872,737,400			-	12		165,735,333	3	bln	48,177,328	6	bln	64,500,000	9	bln	-	12	bln	-	12	bulan	112,677,328	100.00%		0.68	24							
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		5	kegiatan	384,066,150			-	12		1,800,000,000	3	bln	-	6	bln	-	9	bln	1,207,843,200	12	bln	406,261,200	12	bulan	1,614,104,400	100.00%		0.90	24							
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		20	Triw	496,683,491			80,476,000	12		75,779,524	3	bln	65,631,300	6	bln	10,031,000	9	bln	-	12	bln	-	12	bulan	75,662,300	100.00%		1.00	24							
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)									**0.90**						
																				Predikat Kinerja															
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Persentase Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**			**3,841,805,000**			**281,352,141**			**1,825,940,660**			**793,280,900**			**46,325,518**			**1,087,322,314**						**2,215,512,370**			**0.69**							
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan																								-											
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		3200	orang	916,709,000			281,352,141	12		82,098,357	3	bln	-	6	bln	13,809,518	9	bln	20,767,914	12	bulan	6,922,638	12	bulan	41,500,070	100.00%		0.51	24							
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		475	orang	898,241,000			-	12		16,065,028	3	bln	-	6	bln	-	9	bln	-	12	bulan	-	12	bulan	-	100.00%		0.00	24							
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		4100	orang	2,026,855,000			-	12		1,652,779,430	3	bln	750,000,000	6	bln	3,500,000	9	bln	1,066,554,400	12	bulan	281,661,000	12	bulan	2,101,715,400	100.00%		1.27	24							
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				-			-	12		74,997,845	3	bln	43,280,900	6	bln	29,016,000	9	bln	-	12	bulan	-	12	bulan	72,296,900	100.00%		0.96	24							
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)									**0.55**						
																				Predikat Kinerja															
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Persentase Ormas, LSM, FKUB yang mendapat pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**						**-**			**358,053,785**			**23,512,719**			**113,252,276**			**24,229,233**						**160,994,228**			**0.65**							
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			-										6	bln									-											
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				-			-	12		20,004,024	3	bln	-	6	bln	19,970,000	9	bln		12	bulan	-	12	bulan	19,970,000	100.00%		1.00	24							
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				-			-	12		69,848,042	3	bln	-	6	bln	15,800,000	9	bln	-	12	bulan	-	12	bulan	15,800,000	100.00%		0.23	24							
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				-			-	12		84,089,231	3	bln	20,051,400	6	bln	63,637,000	9	bln	-	12	bulan	-	12	bulan	83,688,400	100.00%		1.00	24							
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				-			-	12		109,162,978	3	bln	3,461,319	6	bln	13,845,276	9	bln	24,229,233	12	bulan	-	12	bulan	41,535,828	100.00%		0.38	24							
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				-			-	12		74,949,510	3	bln	-	6	bln	-	9	bln	-	12	bulan		0	bulan	-	0.00%			24							
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)									**0.52**						
																				Predikat Kinerja															

| | | |

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perbaikan ekonomi global pada 2021 terus berlanjut meski tidak merata dengan ketidakpastian pasar keuangan yang berlanjut. Proses pemulihan ekonomi nasional juga terus berlangsung dengan stabilitas yang tetap terjaga, meski sempat tertahan pada triwulan III 2021 seiring dengan merebaknya varian Delta. Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi dasar untuk pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun selanjutnya, dengan didukung oleh sinergi kebijakan untuk akselerasi vaksinasi dan penanganan COVID-19 dengan pembukaan sektor-sektor ekonomi prioritas. Sinergi dan inovasi kebijakan ekonomi nasional menjadi kunci dalam mendorong proses pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas. Sinergi akselerasi vaksinasi dan penguatan penanganan COVID-19, termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbagai level, dengan pembukaan sektor prioritas menjadi *game changer* tidak hanya dalam pengendalian penyebaran varian Delta, namun juga dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,83 persen.

Perekonomian Indonesia diprakirakan akan terus membaik didukung kemajuan penanganan COVID-19 termasuk vaksinasi, pemulihan ekonomi global, serta stimulus dan penguatan kebijakan. Bersamaan dengan pengaruh positif ekonomi global, berbagai faktor domestik juga mendorong penguatan ekonomi nasional pada 2023. Ekonomi Indonesia diprakirakan terus membaik, didorong oleh prospek ekonomi global yang meningkat dan dampak kebijakan lanjutan untuk mendukung reformasi struktural. Pertumbuhan ekonomi global yang semakin baik pada 2023 sejalan tekanan COVID-19 yang berkurang dan dampak positif stimulus kebijakan di banyak negara akan menopang perbaikan ekspor Indonesia. Hal tersebut pada gilirannya akan meningkatkan aktivitas produksi dan investasi. Perbaikan iklim berusaha sebagai dampak implementasi UU Cipta Kerja juga akan

mendukung perbaikan investasi domestik. Kinerja konsumsi swasta juga akan kembali pulih, ditopang oleh peningkatan pendapatan, terutama dari kinerja ekspor yang terus meningkat. Pemerintah dan otoritas terkait yang terus diperkuat, termasuk kebijakan reformasi struktural yang berlanjut, akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan meningkat pada di kisaran 5,3-5,9 persen pada 2023.

Upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatan kesejahteraan masyarakat di tahun 2021 masih *on track*. Beberapa kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional telah dijalankan secara ekstra dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan roda perekonomian terus berjalan. Pelaksanaan program vaksinisasi yang sedang digalakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dalam rangka untuk meningkatkan *herd immunity* masyarakat terhadap COVID-19 sehingga upaya pemulihan ekonomi dapat segera pulih dan iklim usaha dapat segera bangkit kembali.

Arah kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Utara pada RKPD Tahun 2023 menjadi sangat strategis dan harus menjawab pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan walaupun daerah mengalami penurunan aktivitas ekonomi besar-besaran sampai akhir tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara terkontraksi signifikan. Perbaikan kinerja lapangan usaha maupun pengeluaran sejalan dengan proses pemulihan perekonomian global akan mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi Sulawesi utara. Satu prasyarat utama dalam mendukung pemulihan perekonomian adalah kesuksesan program vaksinasi dan disiplin protokol COVID-19. Dengan pengendalian pandemi yang lebih baik maka tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat diperkirakan akan meningkat dengan lebih cepat. Oleh karena itu langkah Kebijakan Pemerintah Daerah akan terfokus pada beberapa hal, diantaranya:

1. Pembukaan sektor-sektor produktif dan aman. Ditengah proses pengendalian COVID-19 yang semakin baik, sektor-sektor yang berisiko rendah seperti pertanian, pertambangan, industri pengolahan, pertambangan, jasa keuangan, infokom dan administrasi pemerintahan perlu terus didorong kinerjanya. Hal ini untuk mengkompensasi penurunan kinerja-kinerja sektor-sektor lainnya. Disisi lain, sektor-sektor yang memiliki *forward dan backward linkage significant* seperti transportasi, konstruksi, perdagangan, dan akomodasi makan minum perlu dijaga keberlangsungan usaha salah satunya dengan penerapan sertifikasi protokol kesehatan.
2. Percepatan stimulus fiskal yang tepat. Di tengah pandemi COVID-19 dimana kondisi pendapatan masyarakat dan tendensi swasta yang cenderung menahan diri, pemerintah dapat menjadi jalan keluar dengan

percepatan realisasi stimulus fiskal baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

3. Berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk peningkatan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha. Kredit perbankan yang berlokasi di Sulawesi Utara cenderung kontraktif pada tahun 2020. Hal tersebut tidak boleh kembali terjadi pada tahun 2023, oleh karena itu, aktivitas sosial masyarakat dan perputaran roda perekonomian perlu terus ditingkatkan agar permintaan kredit maupun pembiayaan meningkat dan menghasilkan *multiplier effect*.
4. Digitalisasi ekonomi dan keuangan, sehubungan dengan transisi ekonomi khususnya UMKM. Pandemi COVID-19 berdampak kepada setiap kalangan usaha termasuk UMKM. Berbeda dengan krisis keuangan, pandemi COVID-19 menyebabkan aktivitas masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Oleh karena itu, adaptasi terhadap teknologi dan pemanfaatan digital ekonomi dapat menjadi solusi untuk mendorong kinerja usaha termasuk UMKM.

Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Sulawesi Utara secara holistik di bawah tema yaitu **"Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan",** dengan prioritas pembangunan meliputi:

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah;
4. Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas;
5. Pembangunan Kepariwisataan;
6. Penanggulangan Bencana dan Mitigasi Perubahan Iklim;
7. Peningkatan Kualitas Tata Pemerintahan; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pandemi COVID-19 berdampak langsung pada semua agen-agen ekonomi baik konsumen, produsen, pemerintah, lembaga keuangan dan negara lain. Setiap perekonomian harus mempersiapkan diri dengan berbagai tindakan pemulihan di saat era *"new normal"* dengan *"new equilibrium"*. Arah kebijakan perencanaan provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 harus menunjang upaya pemerintah nasional dalam mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan penguatan ketahanan kesehatan untuk menopang keberlanjutan kehidupan masyarakat.

3.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya

a. Pertumbuhan Ekonomi

Secara keseluruhan tahun 2021, Perekonomian Sulut menunjukkan indikasi pemulihan dengan tumbuh positif 4,16 persen setelah terkontraksi sebesar -0,99 persen pada tahun 2020. Angka pertumbuhan tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan perekonomian nasional yang tumbuh 3,69 persen. Dua Lapangan Usaha (LU) Sulut yang menunjukkan penguatan pada triwulan IV 2021 adalah LU Perdagangan dan LU Transportasi. Hal ini sejalan dengan pelonggaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan momentum naiknya permintaan pada periode Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru. Adapun LU Pertanian, LU Industri, dan LU Konstruksi tercatat tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara tahunan, peningkatan aktivitas sosial ekonomi dan mobilitas masyarakat dan pemulihan perekonomian global khususnya negara mitra dagang utama, telah mendorong kinerja yang relatif signifikan pada LU Perdagangan, LU Industri, LU Konstruksi, dan LU Transportasi. Dari sisi Pengeluaran, perbaikan perekonomian Sulut terutama didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor-Impor, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi. Namun kontraksi pada Konsumsi Pemerintah pada triwulan IV 2021 menjadi faktor penahan kinerja perekonomian yang lebih tinggi. Secara tahunan, kinerja perekonomian Sulut tahun 2021 didukung oleh menguatnya pertumbuhan Investasi, Konsumsi Rumah Tangga, dan Ekspor, sementara pertumbuhan eksport masih cukup tinggi dan Konsumsi Pemerintah yang masih kontraktif.

Perekonomian Sulut pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh 3,38 persen, atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,15 persen. Pelonggaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat menyusul penurunan kasus aktif COVID-19 dan meningkatnya permintaan menjelang perayaan HBKN Natal dan Tahun Baru menjadi faktor utama yang mendorong perbaikan perekonomian Sulut pada triwulan IV 2021. Hal tersebut sejalan dengan perekonomian nasional yang juga tumbuh menguat 5,02 persen.

Sektor Perdagangan dan LU Transportasi menjadi pendorong utama perekonomian Sulut pada triwulan IV 2021. Menyambut perayaan HBKN Natal dan Tahun Baru, aktivitas masyarakat cenderung meningkat yang didukung oleh penurunan kasus aktif COVID-19 dan menguatnya program vaksinasi. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk melonggarkan PPKM dan syarat penerbangan. Pembelajaran tatap muka pun berangsur-angsur mulai diterapkan kembali.

Dari sisi Pengeluaran, perbaikan perekonomian Sulut terutama didorong oleh kinerja positif Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor-Impor, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi. Menguatnya pertumbuhan komponen Konsumsi Rumah Tangga sejalan dengan pelonggaran aktivitas sosial ekonomi dan masyarakat dibandingkan triwulan III 2021 dan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal ini mendorong peningkatan pada aktivitas pertemuan tatap muka di sekolah serta penambahan jam operasional pusat perbelanjaan dan penyediaan makan minum. Sementara itu, membaiknya perekonomian mitra dagang Sulut turut mendorong permintaan Ekspor LN Sulut.

Namun Impor Sulut juga meningkat signifikan sejalan dengan peningkatan impor bahan bakar mineral. Sementara itu, kontraksi yang terjadi pada komponen Konsumsi Pemerintah menjadi faktor penahan kinerja perekonomian Sulut di triwulan IV 2021 sejalan dengan menurunnya realisasi belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, dan belanja modal dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan Investasi juga tercermin dari penurunan realisasi pengadaan semen, sejalan dengan penurunan realisasi belanja modal pemerintah dan penurunan impor barang modal.

Secara tahunan perekonomian Sulut tumbuh 4,16 persen, menguat dibandingkan tahun 2020 yang kontraksi -0,99 persen. Meski secara tahunan tumbuh positif dan menguat, namun perbaikan kinerja perekonomian tersebut masih belum optimal dengan adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat khususnya pada triwulan III 2021. Kondisi epidemiologi Sulut yang memburuk seiring dengan kenaikan kasus aktif COVID-19 pada Juli dan Agustus 2021 menyebabkan pembatasan aktivitas dan terjadi hampir di sepanjang triwulan III 2021.

b. Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha

Perekonomian Sulut tahun 2021 masih didominasi 5 (lima) Lapangan Usaha (LU) utama dengan kontribusi sekitar 65,44 persen terhadap PDRB Sulut. LU Pertanian masih menjadi sektor dengan pangsa terbesar dalam perekonomian Sulut, diikuti oleh LU Perdagangan, LU Konstruksi, LU Pengolahan, dan LU Transportasi. Untuk triwulan IV 2021 dua LU utama Sulut yang mengalami penguatan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu LU Perdagangan dan LU Transportasi sejalan dengan pelonggaran aktivitas masyarakat. Sementara itu, LU Industri, LU Konstruksi, dan LU Pertanian mengalami perlambatan pada triwulan laporan. Secara tahunan, peningkatan aktivitas sosial ekonomi dan mobilitas masyarakat, kenaikan investasi, serta proses perbaikan perekonomian dunia mendorong perbaikan kinerja yang relatif signifikan pada 4 (empat) Lapangan Usaha (LU)

utama, yaitu LU Perdagangan, LU Pengolahan, LU Konstruksi, dan LU transportasi. Sementara itu, kinerja LU Pertanian masih stabil dengan kecenderungan melambat pada tahun 2021.

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Pertanian) Sulut tercatat tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya maupun secara tahunan. LU Pertanianmerupakan sektor terbesar di Sulut dengan pangsa tahunan sekitar 21,08 persen dari total volume perekonomian Sulut yang sebesar Rp 142,60 triliun (ADHB, 2021). Selain itu berdasarkan data ketenagakerjaan Agustus 2021, tenaga kerja di Sulut yang bekerja pada LU Pertanian mencapai 25,08 pesen, tertinggi dibandingkan LU lainnya. Besarnya pangsa LU Pertanian pada struktur ekonomi dan tenaga kerja Sulut menunjukkan signifikansi LU tersebut pada perkembangan perekonomian Sulut.

Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran Serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Perdagangan) melanjutkan penguatan pada triwulan IV 2021 dan secara keseluruhan tahun 2021 tumbuh menguat. LU Perdagangan tumbuh sebesar 7,51 persen pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,06 persen. Secara keseluruhan tahun 2021, LU Perdagangan mengalami penguatan dengan tumbuh 3,44 persen setelah terkontraksi pada tahun 2020 sebesar -1,65 persen. Berlanjutnya perbaikan kinerja LU Perdagangan didorong oleh kenaikan penjualan sejalan dengan tingkat aktivitas masyarakat yang mengalami pemulihan pasca relaksasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah momentum permintaan tinggi pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru.

Dari sisi sub LU Perdagangan Besar dan Eceran, membaiknya kinerja LU Perdagangan didorong oleh tingkat aktivitas grosir dan oerdagangan yang menguat. Relaksasi kebijakan PPKM pada sepanjang triwulan IV 2021 sejalan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin terkendali setelah sempat mengalami kenaikan sepanjang triwulan III 2021. Hal ini mendorong aktivitas masyarakat mengalami peningkatan pada triwulan laporan yang ditransmisikan pada peningkatan volume penjualan ritel khususnya di Kota Manado sebagai pusat perekonomian terbesar di Sulut.

Lapangan Usaha Konstruksi pada triwulan IV 2021 tumbuh melambat, namun secara keseluruhan tahun mengalami penguatan dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi sebesar 0,91 persen. LU Konstruksi pada triwulan IV 2021 tumbuh 0,02 persen, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,78 persen. Namun demikian, secara keseluruhan LU Konstruksi tercatat menguat dengan tumbuh sebesar 6,97 persen setelah

terkontraksi cukup dalam pada tahun 2020 sebesar -4,13 persen. Secara tahunan, kenaikan kinerja LU Konstruksi merupakan transmisi dari pembangunan di Sulut, baik yang bersumber dari belanja modal pemerintah maupun investasi swasta pada tahun 2021. Dari sisi pemerintah, realisasi belanja modal yang bersumber dari APBN tercatat sebesar Rp 3.220 miliar sepanjang tahun 2021 atau tumbuh 78,01 persen dibanding tingkat realisasi di tahun sebelumnya. Percepatan pembangunan proyek-proyek strategis nasional seperti penyelesaian jalan tol Manado-Bitung Seksi 2B, percepatan pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan dan Lolak serta pembangunan infrastruktur pendukung KEK Likupang menjadi proyek-proyek yang mendukung perbaikan kinerja LU Konstruksi. Dari sisi swasta, penyelesaian Terminal Internasional Bandara Sam Ratulangi menjadi faktor pendorong perbaikan kinerja LU Konstruksi.

Relaksasi kebijakan PPKM pada sepanjang triwulan IV 2021 serta pembatalan PPKM Nataru mendorong kinerja LU Transportasi tumbuh menguat pada triwulan laporan. LU Transportasi pada triwulan IV 2021 tumbuh menguat 4,34 persen dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -5,59 persen. Adapun, berdasarkan capaian tersebut secara keseluruhan tahun LU Transportasi mencatatkan pertumbuhan 1,79 persen setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020 sebesar -13,78 persen. Peningkatan kinerja LU Transportasi terdapat pada setiap Sub Lapangan Usaha baik Sub Lapangan Usaha Udara, Darat, maupun Laut. Secara tahunan, penguatan kinerja LU Transportasi terutama ditopang oleh menguatnya pertumbuhan Sub LU Angkutan Udara yang tumbuh 9,56 persen setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020 sebesar -33,18 persen. Sejalan dengan kinerja Transportasi Udara, Kinerja Transportasi Laut juga terpantau mengalami mengalami kenaikan pada tahun 2021. Secara tahunan, Sub LU Angkutan Laut tumbuh 3,18 persen menguat dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi -4,59 persen. Hal ini tercermin dari pertumbuhan penumpang laut sebesar 18,30 persen pada tahun 2021 menguat dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 43,22 persen. Kenaikan aktivitas masyarakat secara tahunan juga tercermin dari tumbuhnya Sub LU Angkutan Darat yang pada tahun 2021 tetap tumbuh sebesar 1,86 persen setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020 sebesar -13,42 persen.

Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh 5,64 persen, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,74 persen. Untuk keseluruhan tahun kinerja LU Pengolahan tetap tumbuh kuat sebesar 8,92 persen dibandingkan tahun

2020 yang tumbuh 4,41 persen. Penguatan kinerja LU Pengolahan pada tahun 2021 ditopang oleh Sub LU Industri Makanan dan Minuman serta Industri Barang Galian Bukan Logam yang masing-masing tumbuh sebesar 9,50 persen serta 11,36 persen menguat dibandingkan tahun 2020 yang tumbuh masing-masing sebesar 5,27 persen dan 6,25 persen. Secara keseluruhan, Sub LU Industri Makanan dan Minuman di Sulut merupakan industri dengan pangsa terbesar mencapai 83,50 perseb dari total PDRB LU Pengolahan (ADHB 2021). Sehingga kinerja sub industri ini menjadi sumber pertumbuhan LU Pengolahan Sulut. Berlanjutnya penguatan kinerja LU Pengolahan tidak lepas dari dampak kenaikan harga komoditas dan proses perbaikan perekonomian global. Hal ini terkonfirmasi dari kenaikan Ekspor LN yang cukup signifikan kepada negara tujuan Amerika Serikat, Malaysia, Belanda dan Jepang.

c. Struktur PDRB Menurut Pengeluaran

Dari sisi Pengeluaran, kinerja perekonomian Sulut pada tahun 2021 didukung oleh menguatnya pertumbuhan Investasi, Konsumsi Rumah Tangga, dan Ekspor. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh menguat sejalan dengan kenaikan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Meski sempat tertahan akibat penyebaran varian delta di triwulan III 2021, tingkat aktivitas dan proses pemulihan ekonomi yang terus berjalan mendorong keyakinan masyarakat yang kemudian ditransmisikan pada Konsumsi Rumah Tangga.

Kemudian, Investasi pemerintah maupun swasta menjadi sumber pertumbuhan tertinggi ekonomi Sulut pada tahun 2021. Investasi pemerintah melalui penyelesaian jalan tol Manado-Bitung seksi 2B, pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan dan Lolak serta pembangunan infrastruktur pendukung KEK Likupang menjadi proyek-proyek yang mendukung perbaikan investasi. Dari sisi swasta, penyelesaian Terminal Internasional Bandara Sam Ratulangi menjadi faktor pendorong perbaikan kinerja LU Konstruksi. Adapun, kenaikan Ekspor didukung oleh kenaikan Ekspor LN maupun Ekspor Antar Daerah/Domestik. Kenaikan Ekspor LN didukung oleh menguatnya Ekspor LN minyak nabati maupun non minyak nabati. Namun kenaikan Ekspor yang lebih rendah dibandingkan penguatan Impor, menyebabkan Net Ekspor menurun dibandingkan tahun 2020. Impor LN non migas Sulut pada tahun 2021 didominasi oleh impor intermediasi dan barang modal yang penting untuk mendorong ekonomi. Sementara itu, Impor Antar Daerah tumbuh signifikan pada tahun 2021. Kenaikan Impor Antar Daerah sejalan dengan kenaikan Konsumsi Rumah Tangga yang relatif masih membutuhkan komoditas-komoditas yang tidak diproduksi di Sulut. Sementara itu, kontraksi pada Konsumsi

Pemerintah sejalan dengan penurunan realisasi belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga pada APBD.

Dari sisi pemerintah, kinerja Konsumsi Pemerintah masih mengalami kontraksi dengan tumbuh sebesar -3,37 persen meskipun tidak sedalam kontraksi triwulan sebelumnya sebesar -6,49 persen. Realisasi belanja non modal pemerintah yang bersumber dari APBD provinsi maupun APBN hingga triwulan IV tercatat sebesar Rp 9,46 triliun, relatif meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp 9,01 triliun. Rasio realisasi belanja non modal pemerintah terhadap total belanja APBD Provinsi dan APBN tercatat sebesar 95,08 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 89,49 persen. Secara tahunan, Konsumsi Pemerintah masih berada dalam periode kontraktif pada tahun 2021. Konsumsi Pemerintah terkontraksi sebesar -2,51 persen tidak jauh berbeda dibandingkan kontraksi komponen tersebut pada tahun 2020 yang sebesar -2,57 persen.

Realisasi belanja modal pemerintah baik yang bersumber dari APBD dan APBN hingga triwulan IV 2021 tercatat Rp4,25 triliun meningkat dibandingkan realisasi belanja modal pada periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp2,84 triliun. Realisasi tersebut, terutama guna mendukung pembangunan proyek-proyek strategis nasional seperti penyelesaian jalan tol Manado-Bitung seksi 2B, pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan dan Lolak serta pembangunan infrastruktur pendukung KEK Likupang menjadi proyek-proyek yang mendukung perbaikan kinerja LU Konstruksi. Sementara itu, investasi swasta juga terindikasi melambat. Berdasarkan data dari BKPM, PMDN di Sulawesi Utara pada triwulan IV tercatat terkontraksi sebesar -45,27 persen melanjutkan perlambatan pada triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -25,84 persen. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja PMA di Sulut juga terkontraksi pada triwulan laporan sebesar -43,01 persen dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh menguat sebesar 65,77 persen. Namun untuk keseluruhan tahun 2021, Investasi di Sulut mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang berasal baik dari investasi pemerintah maupun investasi swasta. Investasi pemerintah melalui belanja modal APBN di Sulut tumbuh 78,01 persen, sementara itu dari sisi swasta penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tumbuh masing-masing sebesar 8,60 persen dan 15,13 persen.

Pada triwulan IV 2021, Ekspor Sulut kembali tumbuh tinggi. Namun untuk keseluruhan tahun 2021 posisi Net Ekspor Sulut turun disebabkan pertumbuhan Impor yang lebih tinggi dari pertumbuhan Ekspor. Dari sisi historis, provinsi Sulut merupakan net eksportir antar

negara, namun masih menjadi net importir dalam Perdagangan Antar Daerah terutama secara tahunan. Pada tahun 2021, kenaikan Ekspor relatif lebih rendah dibandingkan penguatan Impor terutama didorong oleh kenaikan Impor Antar Daerah sejalan dengan kenaikan Konsumsi Rumah Tangga yang relatif masih membutuhkan komoditas-komoditas yang tidak diproduksi di Sulut. Total Ekspor Sulut pada triwulan IV 2021 tumbuh sebesar 14,77 persen melanjutkan penguatan setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 10,28 persen. Nilai Ekspor luar negeri (LN) Sulut pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 298,86 juta atau tumbuh sebesar 56,52 persen melanjutkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 42,78 persen. Sementara itu, Ekspor Antar Daerah yang tercermin dari volume muat perdagangan dalam negeri/antar daerah melalui jalur laut tercatat sebesar 285,99 ribu ton tumbuh sebesar 18,84 persen meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 327,09 ribu ton atau tumbuh sebesar 40,17 persen. Secara tahunan Ekspor Sulut pada tahun 2021 tumbuh 9,23 persen menguat dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 2,42 persen.

Sementara itu, total Impor Sulut pada triwulan IV 2021 turut tumbuh sebesar 13,01 persen menguat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,09 persen. Adapun, kinerja Impor Antar Daerah pada triwulan IV 2021 yang tercermin dari volume bongkar perdagangan dalam negeri/antar daerah melalui jalur laut tercatat tumbuh sebesar 12,74 pesen dengan volume 686,36 ribu ton atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 59,60 persen dengan volume sebesar 752,23 ribu ton. Kinerja Impor Antar Daerah sejalan dengan Konsumsi Rumah Tangga di Sulut yang tumbuh positif pada triwulan laporan. Selain itu, beragamnya komoditas kebutuhan masyarakat Sulut yang tidak diproduksi di Sulut menyebabkan berbagai macam barang kebutuhan komoditas perlu diambil dari daerah lain.

d. Inflasi

Inflasi Sulawesi Utara secara tahunan pada triwulan IV 2021 berdasarkan kota pencatatannya relatif lebih tinggi dari periode sebelumnya. Inflasi kota Manado tercatat sebesar 2,65 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,06 persen. Kenaikan tekanan inflasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga cabai rawit menjelang HBKN Nataru dan kenaikan harga minyak goreng. Fenomena serupa juga terjadi di Kota Kotamobagu. Secara tahunan, inflasi Kota Kotamobagu sebesar 2,51 persen tercatat lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,30 persen. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan komoditas cakalang

diawetkan, minyak goreng, dan cabai rawit juga menjadi penggerak utama inflasi di Kota Kotamobagu. Penurunan tekanan inflasi pada Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan menjadi penahan laju inflasi yang lebih dalam di kedua kota.

Kota Manado sebagai salah satu kota pencatatan inflasi di Sulawesi Utara mengalami inflasi sebesar 2,65 persen pada triwulan IV 2021. Tekanan inflasi tersebut tercatat lebih tinggi apabila dibanding periode sebelumnya sebesar 2,06 persen. Faktor pendorong inflasi Kota Manado ini utamanya bersumber dari peningkatan tekanan harga pada komoditas cabai rawit. Komoditas cabai rawit yang sebelumnya tercatat deflasi -1,97 persen pada triwulan III menjadi inflasi 51,53 persen dengan andil inflasi 0,41 persen pada triwulan IV 2021. Selain itu, minyak goreng dan komoditas perikanan (cakalang dan malalugis) juga menjadi faktor pendorong inflasi dengan andil masingmasing 0,32 persen dan 0,51 persen. Kenaikan inflasi juga didorong oleh meningkatnya tarif angkutan udara baik pada maskapai *full service* maupun *low cost carrier*. Hal ini terjadi akibat tren penurunan kasus aktif COVID-19 pada akhir Triwulan IV 2021 sehingga meningkatkan kegiatan dan mobilitas masyarakat, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Inflasi Kotamobagu secara tahunan juga tercatat meningkat menjadi 2,51 persen dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,30 persen. Inflasi di Kota Kotamobagu terutama didorong oleh komoditas cakalang diawetkan dengan andil 0,42 persen, minyak goreng dengan andil 0,29 persen, cabai rawit dengan andil 0,26 persen, ikan cakalang dengan andil 0,13 persen, dan rokok putih dengan andil 0,10 persen.

Mengawali tahun 2022, TPID Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun program pengendalian inflasi dalam Roadmap Pengendalian Inflasi Sulut tahun 2022-2024 melalui *High Level Meeting* dan Rapat Koordinasi Teknis. Upaya pengendalian inflasi tersebut dilakukan melalui empat pilar 4K mencakup Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif, yang selanjutnya diturunkan ke dalam beberapa sub-program kegiatan. Melalui *High Level Meeting* (HLM) TPID Provinsi Sulawesi Utara, dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi teknis bersama dengan dinas dan lembaga terkait, Peta Jalan Pengendalian Inflasi Sulawesi Utara tahun 2022-2024 telah disepakati bersama. Peta jalan tersebut kemudian menjadi pedoman bagi peta jalan Kab/Kota lainnya di Sulawesi Utara. Kota Manado dan Kota Kotamobagu sebagai kota pencatatan inflasi di Sulut juga telah menindaklanjuti pembuatan peta jalan pengendalian inflasi melalui HLM. TPID terus melakukan koordinasi untuk

memastikan tindak lanjut komitmen HLM telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuannya antara lain dengan penyusunan program kerja teknis antar dinas dan lembaga.

e. Kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja namun juga terdapat perbaikan kualitas hidup penduduk miskin. Presentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara pada 2021 sebesar 7,36 persen. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara pada tahun 2021 sejumlah 186.550 orang, turun 0,41 persen poin terhadap Maret 2021, dimana penduduk miskin daerah perkotaan September 2021 sebesar 5,09 persen, turun 0,27 poin persen dibandingkan Maret 2021. Sementara daerah perdesaan sebesar 10,07 persen, turun sebesar 0,54 pin persen dibandingkan Maret 2021.

Secara umum, pada periode 2016-2021, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara cenderung fluktuatif namun menunjukkan tren menurun sejak September 2017. Perkembangan persentase tingkat kemiskinan tahun 2016 sampai dengan September 2021 menunjukan bahwa persentase kemiskinan terendah terjadi pada bulan September 2021 sebear 7.36 persen atau 186.550 penduduk miskin dan tertinggi terjadi pada Maret 2016 sebesar 8.34 persen atau 202.820 penduduk.

Dimensi kemiskinan lainnya yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman dan indeks keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk. ndeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pengukuran kemiskian tidak hanya berhenti pada jumlah dan persentase penduduk miskin, namun perlu juga diperhatikan dimensi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan akan menggambarkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan akan menunjukkan sejauh mana sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Perkotaan an Perdesaan Sulawesi Utara turun sebesar 0,128 poin, dari 1,238 pada Maret 2021 menjadi 1,040 pada September 2021.

f. Ketenagakerjaan

Total penduduk Sulawesi Utara pada Agustus 2021 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 diperkirakan sebanyak 2,5 juta orang. Penduduk usia kerja sebesar 1,95 juta orang, bertambah 19,12 ribu orang (0,99 persen) dibandingkan keadaan 1 tahun sebelumnya (1,91 juta orang). Jumlah angkatan kerja di Sulawesi Utara pada Agustus 2021 mencapai 1,21 juta orang, berkurang sekitar 12,71 ribu orang (1,04 persen) dibanding Agustus 2020 yang sebesar 1,23 juta orang. Ditinjau lebih jauh jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2021 sebesar 1,13 juta orang, berkurang sekitar 8,01 ribu orang (0,71 persen) jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2020 (1,13 juta orang). Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2021 sebanyak 85,54 ribu orang, berkurang sekitar 4,71 ribu orang jika dibandingkan keadaan Agustus 2020 (90,25 ribu orang).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Utara pada Agustus 2021 mencapai 7,06 persen, mengalami penurunan sebesar 0,31 persen poin dibanding TPT Agustus 2020 (7,37 persen). Penurunan TPT ini menandakan telah adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Utara yang sebelumnya terdampak Covid-19. Pada Agustus 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terjadi di Kota Manado, yaitu 12,17 persen, sedangkan TPT terendah terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 2,30 persen.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja sebesar 282,62 ribu orang (25,08 persen) pekerja, sementara lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas & Air paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 5,15 ribu orang (0,46 persen) pekerja.

Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Indikator ini mampu menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi. Jam kerja merupakan gambaran intensitas kerja. Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu *(full time worker)* adalah mereka yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu. Sementara pekerja tidak penuh dibagi dua, yaitu setengah pengangguran (jam kerja kurang dari 35 jam seminggu, masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan) dan paruh waktu (jam kerja kurang dari 35 jam tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain). Pada Agustus 2021 persentase pekerja penuh terhadap total pekerja sebesar 65,19 persen mengalami peningkatan dibanding keadaan Agustus 2020 (64,62 persen) atau meningkat 0,57 persen.

g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 2021 capaian IPM di Sulawesi Utara mencapai 73,30. Angka tersebut meningkat 0,37 poin atau sebesar 0,51 persen dari capaian pada tahun 2020 sebesar 72,93. Peningkatan IPM Sulawesi Utara menunjukkan mulai pulihnya kondisi masyarakat yang sebelumnya terpuruk akibat adanya Pandemi COVID-19 tahun 2020. Selain pertumbuhan, status capaian pembangunan manusia juga menjadi salah satu indikator untuk melihat kemajuan pembangunan manusia. Capaian nilai IPM di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok. Pengklasifikasian ini bertujuan untuk mengelompokkan wilayah-wilayah dalam kelompok yang sama dalam hal capaian pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara mencapai 73,30 pada tahun 2021, bahkan selalu berada di atas 70 poin sejak tahun 2015. Dengan capaian tersebut, IPM Sulawesi Utara berada pada kategori "IPM Tinggi".

Dilihat dari tiga dimensi pembentuk IPM, Sulawesi Utara mengalami peningkatan capaian di seluruh dimensi. Dimensi pertama yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh umur harapan hidup (UHH) saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Pada tahun 2021, umur harapan hidup saat lahir di Sulawesi Utara meningkat sebesar 0,07 tahun, menurun jika dibandingkan dengan penambahan umur harapan hidup tahun 2020 sebesar 0,11 tahun. Selama periode 2017 hingga 2021, UHH telah meningkat sebesar 0,72 tahun. Harapan seorang bayi yang baru lahir untuk terus bertahan hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Hal tersebut juga didorong oleh beberapa faktor, diantaranya kemajuan teknologi di bidang pengobatan dan kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, semakin luasnya jangkauan asuransi kesehatan bagi seluruhmasyarakat, serta tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap penerapan pola hidup sehat.

Dimensi pengetahuan dalam penghitungan IPM merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menghitung capaian pendidikan dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah hanya menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Pada tahun 2021, harapan lama sekolah di Sulawesi Utara adalah sebesar 12,94 tahun atau meningkat 0,09 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2020. Sedangkan rata-rata lama sekolah 9,62 tahun atau meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun 2020. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode 2017-2021 harapan lama sekolah meningkat 0,28 tahun

sedangkan rata-rata lama sekolah meningkat 0,48 tahun. HLS merupakan indikator proses pembangunan yang menggambarkan ukuran keberhasilan program pendidikan dalam jangka pendek, sedangkan RLS menggambarkan indikator output pembangunan dalam jangka panjang. Kedua indikator tersebut menggambarkan capaian (stock) dan penambahan (flow) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah. Peningkatan pertumbuhan indikator pengetahuan di Sulawesi Utara didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah meningkatnya sarana dan prasarana dibidang pendidikan, kemajuan teknologi di bidang pendidikan serta kesadaran masyarakat bahwa pentingnya pendidikan di era saat ini karena pendidikan merupakan investasi di masa depan.

Pada dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator tersebut mencerminkan kemampuan masyarakat untuk membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Agar kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah menjadi terbanding, maka perlu dibuat standarisasi terutama yang diakibatkan adanya perbedaan tingkat harga barang dan jasa antar wilayah satu dengan lainnya. Dengan adanya standarisasi tersebut, maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan secara tepat. Pada tahun 2021, pertumbuhan pengeluaran per kapita di Sulawesi Utara adalah sebesar 0,84 persen, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar -2,91 persen. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Sulawesi Utara mengalami penurunan pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19, dimana pendapatan masyarakat menurun karena banyaknya lapangan usaha yang gulung tikar atau tutup sehingga terpaksa harus melakukan pengurangan pegawai atau pemotongan gaji pegawai. Namun, pada tahun 2021 kembali meningkat sebagai akibat mulai bergeliatnya kegiatan ekonomi masyarakat. Selama lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita Sulawesi Utara sebesar 1,43 persen. Tahun 2017 pengeluaran per kapita penduduk adalah sekitar 10,42 juta rupiah per tahun, nilai tersebut terus meningkat hingga mencapai 11,12 juta rupiah pada tahun 2019 dan menurun menjadi 10,79 juta rupiah pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2021 pengeluaran per kapita kembali meningkat menjadi 10.88 juta rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu tahun pandemi COVID-19 melanda, daya beli masyarakat Sulawesi Utara mulai meningkat kembali.

h. Gini Rasio

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah. Sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, biasanya digunakan koefisien Gini (Ratio Gini). Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Adapun kriteria ukuran ketimpangan Gini Ratio meliputi Ketimpangan Rendah (Gini Ratio< 0,3), Sedang (0,3 ≤ Gini Ratio ≤ 0,5) dan Tinggi (Gini Ratio> 0,5). Gini Ratio Provinsi Sulawesi Utara Maret 2020 sebesar 0,370. Ketimpangan di Sulawesi Utara masuk dalam kategori "ketimpangan sedang" dengan nilai koefisien Gini mencapai 0,359 pada September 2021, turun tipis 0,009 poin dari koefisien Gini pada September 2020 yang mencapai 0,368.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Sulawesi Utara secara keseluruhan diperkirakan masih berada dalam trajektori pemulihan dan tumbuh menguat ditahun berjalan dan selanjutnya. Berlanjutnya kenaikan aktivitas ekonomi seiring dengan meningkatnya adaptasi masyarakat dalam beraktivitas di tengah pengendalian COVID-19 serta permintaan eksternal yang masih tinggi, akan mendorong perekonomian dari sisi pengeluaran. Kemudian, akan ditransmisikan kepada peningkatan mobilitas yang mendorong LU Perdagangan dan Transportasi dan menguatnya LU Industri dari sisi lapangan usaha. Tekanan Inflasi IHK Sulawesi Utara pada triwulan 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan berlangsungnya proses pemulihan perekonomian Sulut. Membaiknya konsumsi rumah tangga diperkirakan dapat mendorong permintaan terhadap komoditas-komoditas strategis penggerak inflasi Sulawesi Utara seperti BARITO dan komoditas perikanan. Kenaikan secara menyeluruh juga berisiko terjadi seiring dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai. Meskipun demikian, inflasi diperkirakan masih akan berada di rentang sasaran inflasi 3,0 ± 1 persen.

Memandang dinamika perekonomian daerah pada awal tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 4,5-5,5 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang sebesar 4,16 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulut akan didorong oleh konsumsi domestik dan permintaan eksternal.

Ditahun 2021, terbatasnya aktivitas dan mobilitas masyarakat berpengaruh signifikan pada proses pemulihan ekonomi, sedangkan proses vaksinasi berperan penting dalam mengawal peningkatan aktivitas di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung. Kedua faktor tersebut masih akan menjadi kunci perbaikan perekonomian.

Peningkatan konsumsi diperkirakan akan terjadi pada sub komponen transportasi, rekreasi dan pendidikan. Pengendalian COVID-19 dan tren kenaikan tingkat vaksinasi di Sulut diperkirakan menjaga tingkat aktivitas perdagangan baik domestik maupun antar daerah dan juga akan ditransmisikan pada peningkatan mobilitas masyarakat. Selain itu, masih terdapat potensi *base effect* kenaikan aktivitas sosial ekonomi masyarakat terutama bila dibandingkan dengan Tahun 2021 yang sempat tertahan.

Terdapat 9 kelompok besar masyarakat yang terdampak akibat dampak Pandemi COVID-19, yang rata-rata bekerja di sektor informal, yaitu pekerja yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa dengan skala usaha mikro dan kecil, pekerja yang bergerak di bidang pertanian skala usaha mikro dan kecil, pekerja yang bergerak di bidang pariwisata skala usaha mikro dan kecil, pekerja yang bergerak di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil, pekerja yang bergerak di bidang industri skala usaha mikro dan kecil, penduduk yang bekerja sebagai pemulung, penduduk lanjut usia, penduduk dengan kebutuhan khusus (disabilitas) dan penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP, suspect dan terinfeksi COVID-19 Menyikapi berbagai tantangan dan risiko ke depan tersebut, dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal, maka pemerintah provinsi Sulawesi Utara perlu meningkatkan dan memperkuat koordinasi kebijakan bersama pemerintah kabupaten dan kota guna mengurangi dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian Sulut melalui *refocusing* anggaran belanja daerah yang ditujukan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat melalui skema *social safety net* (jaring pengaman sosial) terutama bagi masyarakat miskin maupun masyarakat rawan miskin akibat *shock* pandemi COVID-19 pada kondisi keuangan. Peta sebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara sudah menyebar ke 15 Kabupaten/Kota. Menyikapi berbagai tantangan akibat pandemi COVID-19, dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal, maka pemerintah provinsi sulawesi utara perlu melalukan *refocusing* anggaran belanja daerah yang ditujukan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat melalui skema *social safety net* (jaring pengaman sosial) terutama bagi masyarakat miskin maupun masyarakat rawan miskin akibat *shock* pandemi COVID-19 pada kondisi keuangan.

Prospek perekonomian daerah di tahun 2023 memiliki potensi untuk mengalami peningkatan dengan memperhatikan beberapa faktor

yang akan mendorong perekonomian antara lain dari permintaan domestik, peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Sulawesi Utara diperkirakan akan mendorong realisasi konsumsi masyarakat. Peningkatan aktivitas sosial akan berlangsung secara gradual dan terutama bersumber dari konsumsi rumah tangga dan koknsumsi pemerintah pusat. Disisi investasi, diperkirakan akan didukung oleh kenaikan belanja modal pemerintah terutama yang bersumber dari APBN. Kenaikan belanja modal APBN terutama dianggarkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Utara seperti bendungan Lolak dan Kuwil Kawangkoan.

Sementera itu, dari sisi swasta, prospek berbaikan investasi terutama berasal dari percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2022 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Percepatan ini juga didukung oleh pembentukan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan KEK Likupang setelah ditandatanginya *joint venture* antara PT. Minahasa Property and Resort Development (PT. MPRD) dan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diperkirakan membaik didukung oleh perbaikan kinerja perekonomian negara-negara mitra dagang utama. Hal ini juga didukung oleh tren positif harga *Coconut Natural Oil* (CNO) yang diperkirakan menjadi insentif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di sektor industri untuk meningkatkan produksi.

3.1.3 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah

Sebagai Bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, rencana target ekonomi makro untuk tahun 2022 sampai tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.1. Indikator dan Target Ekonomi Makro Prov. Sulut 2022-2026

Indikator Makro	2022	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.5-5.5	5-5.7	5.7-6.0	6.0-6.5	6.5-7
Inflasi (%)	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1
PDRB ADHB (Trilyun)	142.8	154.8	168.5	184.1	202.1
PDRB ADHK (Trilyun)	95.1	103.1	112.2	122.6	134.5
PDRB Perkapita (juta)	56	60	65	70	76
IPM	73	74	75	76	77
TPT (%)	6.47-7.18	6.0-6.5	5.5-6.0	5.0-5.5	4.5-5.0
Kemiskinan (%)	7.5-6.9	5.93	5.65	5.37	5.09
Gini Ratio	0.360	0.355	0.350	0.345	0.340

Memandang proses pemulihan ekonomi Sulawesi Utara pada tahun 2022, perbaikan perekonomian masih akan berlanjut ditahun 2023 meski cenderung berada dibawah *baseline model*. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa asumsi umum yang ditetapkan untuk mencapai target indikator makro adalah

1. Dari sisi pengeluaran, konsumsi domestik diperkirakan masih akan melanjutkan pemulihan sejalan dengan target *herd immunity* pada akhir tahun 2022.
2. Sementara itu, investasi diperkirakan akan meningkat seiring dengan percepatan realisasi investasi di KEK Likupang, KEK Bitung maupun rencana pembangunan Kawasan Industri Mongondow. Adapun permintaan eksternal diperkirakan masih akan kuat meski cenderung moderasi pada tahun 2023.
3. Disisi lapangan usaha, aktivitas kembali menjadi faktor pendorong utama kinerja pada tahun 2023. Lapangan Usaha Pertanian diperkirakan akan tumbuh membaik seiring dengan perbaikan permintaan di sektor hilir (industri, restoran, perhotelan, dll) seiring dengan percepatan proses vaksinasi dan aktivitas.
4. Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan diperkirakan kembali normal sejalan dengan terbentuknya *herd immunity* di Sulawesi Utara. Selain itu, *value added* perdagangan kembali meningkat sejalan diselenggarakannya festival-festival secara luring dengan kapasitas yang lebih besar.
5. Kinerja Lapangan Usaha Konstruksi diperkirakan ikut meningkat sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur dalam kawasan KEK Likupang mengingat target operasional KEK tersebut pada tahun 2022. Selain itu, realisasi investasi di KEK Likupang diperkirakan semakin baik sejalan penurunan ketidakpastian perekonomian pasca pandemi.
6. Dari sisi pemerintah, berlanjutnya konstruksi proyek-proyek strategis pemerintah daerah maupun pemerintah pusat diperkirakan akan mendorong kinerja Lapangan Usaha Konstruksi. Untuk Lapangan Usaha Industri, kinerja diperkirakan masih akan stabil sejalan dengan pergerakan harga CNO yang juga cenderung stabil dan sudah berada diatas perkiraan harga jangka panjangnya. Sementara itu, membaiknya permintaan domestic diperkirakan akan mendorong pemulihan kinerja industri, mikro, kecil dan menengah di Sulawesi Utara.
7. Dari sisi Lapangan Usaha transportasi, tercapainya *herd immunity* diperkirakan akan terus mendorong aktivitas baik dari sisi frekuensi maupun kapasitas baik di darat, laut maupun udara.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan terintegrasi memberikan dasar penentuan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penentuan alokasi anggaran mengalami perubahan pendekatan dari *money follow function* menjadi *money follow program priority*. Hal ini untuk meminimalkan masalah perencanaan dan pengangaran yang sering terjadi terutama penganggaran yang berdasarkan

tugas dan fungsi menyebabkan terjadinya inefisiensi, duplikasi program, alokasi anggaran tidak terfokus dan sebagainya. Konsep perencanaan terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih optimal tercapai.

Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2023 masih akan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, dimana alokasi anggaran khusus penanganan COVID-19 masih terus berlanjut. Kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dan kapasitas pendapatan asli daerah menjadi terbatas. Ini memberikan konsekuensi pada kebijakan belanja dan pembiayaan daerah di tahun 2023. Untuk kebijakan keuangan daerah tahun 2023 pemerintah daerah akan mempersiapkan beberapa skenario pengelolaan keuangan pasca pandemi COVID-19 mendukung rencana aksi daerah penanganan dampak COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara.

Kebijakan keuangan daerah terdiri atas kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Sehingga berbagai potensi pendapatan daerah harus teridentifikasi dan dioptimalkan. Kebijakan belanja akan diarahkan bagi program dan kegiatan prioritas yang mendukung prioritas pembangunan daerah, terutama dengan adanya pandemi COVID 19. Sedangkan kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran pada pos-pos pembiayaan.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengembangan dan proyeksi peningkatan pendapatan daerah dilaksanankan dengan memperhatikan beberapa asumsi sebagi berikut:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sumber pajak utama daerah, seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan perluasan sumber-sumber pendapatan baru;
2. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomis;
3. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjukkan dari meningkatnya deviden yang diterima antara lain PT. Membangun Sulut Hebat (PT. MSH) seiring dengan operasionalnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri Bitung serta Bank SULUTGO yang diharapkan kinerja akan lebih baik;
4. Program vaksinisasi COVID-19 berhasil, disamping protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan disiplin sehingga dampak Pandemi COVID-19 dapat dipulihkan.

Kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah tersebut diarahkan untuk:

1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah;
2. Peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan retribusi daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi;
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah;
6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah;
7. Sosialisasi dan *public relationship* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas dan pelayanan umum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membayar pajak daerah dan retribusi daerah; dan
9. Mengembangkan sistim evaluasi pelayanan prima dengan melakukan surve kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.

Disamping kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, diperlukan juga upaya-upaya untuk mendukung target-target pendapatan tahun 2023 sebagai berikut:

a) Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
b) Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang;
c) Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel;
d) Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah, melalui pendekatan persuasif dalam bentuk sosialisasi, inventarisasi dan pemungutan

langsung yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta pendekatan represif dalam bentuk razia/penertiban yang didukung oleh pihak Kepolisian Daerah;

e) Sosialisasi dan *Public Relationship*, melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah, selain itu upaya sosialisasi ditujukan untuk aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang manfaat dari kerja sama pemungutan Pajak Provinsi yang berimplikasi terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota;
f) Peningkatan Fungsi Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui optimalisasi fungsi Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai forum komunikasi upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah sesuai peran dan tupoksi masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
g) Penyesuaian tarif retribusi, melalui inventarisasi dan analisis tarif jenis retribusi tertentu yang sudah layak disesuaikan dengan memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat termasuk investasi;
h) Optimalisasi sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah, melalui optimalisasi penerimaan dari pengelolaan sumber daya milik daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam struktur APBD; dan
i) Meningkatkan koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk kelancaran penerimaan dana dimaksud yang berkontribusi terhadap APBD, lebih khusus untuk Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Cukai Hasil Tembakau yang mulai dikelola pada akhir tahun 2011.

Kondisi ekonomi daerah dan berbagai tantangan dan prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2023, memberikan arah kebijakan terhadap pendapatan daerah yang menjadi salah satu dasar penentuan pagu anggaran sementara di seluruh perangkat daerah. Perencanaan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2023 adalah upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah dengan menggenjot peningkatan pajak dan retribusi daerah. Total pendapatan tahun 2023 ditargetkan mencapai Rp. 4.094.407.075.591 dengan pendapatan asli daerah Rp. 1.455.393.791.591, Pajak daerah sebesar Rp.

1.149.962.344.088, Untuk retribusi daerah tahun 2023 sebesar Rp. 206.896.697.401, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 50.838.250.000, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp 47.696.500.103.

Pendapatan Transfer daerah tahun 2023 mencapai Rp. 2.639.013.284.000 terdiri Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Daerah.

Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023 *	TARGET TAHUN 2024 *
1	**PENDAPATAN**	**3.690.999.513.207,59**	**3.958.016.296.497,31**	**4.000.115.968.022**	**4.094.407.075.591,00**	**4.119.289.559.636,00**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**1.125.317.788.015,59**	**1.310.528.740.581,31**	**1.715.555.007.022**	**1.455.393.791.591,00**	**1.480.276.275.636,00**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	930.415.146.643,00	1.075.924.577.041,00	1.136.543.855.914	1.149.962.344.088,00	1.166.051.304.247,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	114.784.249.029,63	113.645.575.018,00	480.410.016.800	206.896.697.401,00	215.003.375.713,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42.255.754.286,00	51.195.170.272,00	50.838.250.000	50.838.250.000,00	50.838.250.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.862.638.056,96	69.763.418.250,31	47.762.884.308	47.696.500.103,00	48.383.345.677,00
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.545.378.834.519,00**	**2.626.382.357.008,00**	**2.284.560.961.000,00**	**2.639.013.284.000,00**	**2.639.013.284.000,00**
1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**2.545.378.834.519,00**	**2.626.382.357.008,00**	**2.284.560.961.000,00**	**2.639.013.284.000,00**	**2.639.013.284.000,00**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	2.519.010.935.519,00	2.572.853.136.008,00	2.271.594.185.000	2.624.034.697.436	2.624.034.697.436
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	26.367.899.000,00	53.529.221.000,00	12.966.776.000	14.978.586.564	14.978.586.564
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**20.302.890.673,00**	**21.105.198.908,00**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	Pendapatan Hibah	20.302.890.673,00	21.105.198.908,00	0	0	0

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2022
** RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021- 2026*

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Sinergitas program pembangunan nasional dan daerah untuk penyusunan RKPD 2022 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana terdapat 6 (enam) urusan pemeritahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta beberapa prioritas lainnya yaitu 18 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Dasar ini mempengaruhi penjabaran kebijakan belanja daerah dalam berbagai bidang. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Belanja daerah disusun untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional dan mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2023 diarahkan untuk memenuhi program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan non dasar serta urusan pilihan; mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan; mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, arah kebijakan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023*	TARGET TAHUN 2024*
2.	**BELANJA**	**4.501.905.708.338,00**	**4.352.913.924.432,00**	**3.817.647.909.769**	**3.607.651.559.723,33**	**3.757.534.043.768,33**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**2.904.429.743.652,00**	**2.826.577.228.890,00**	**2.749.007.352.008**	**2.766.735.146.619,30**	**2.933.727.018.560,07**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.190.369.817.805,00	1.210.423.059.765,00	1.381.765.918.482	1.407.221.213.024,06	1.449.437.849.414,78
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	896.791.043.512,00	1.005.883.042.598,00	1.091.386.869.081	536.566.309.349,95	542.279.511.257,02
2.1.3	Belanja Bunga	5.786.177.935,00	38.724.931.630,00	63.390.249.880	68.610.305.514,50	51.669.510.491,91
2.1.4	Belanja Subsidi	0	62.972.000,00	4.375.000.000	4.532.000.000,00	4.667.960.000,00
2.1.5	Belanja Hibah	808.012.704.400,00	544.370.987.679,00	205.854.314.645	720.909.696.545,13	855.909.696.545,13
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.470.000.000,00	27.112.235.218,00	2.235.000.000	28.895.622.185,66	29.762.490.851,23
2.2	**BELANJA MODAL**	**1.090.984.905.420,00**	**1.031.253.909.110,00**	**524.880.520.847**	**299.406.089.981,70**	**279.299.392.392,27**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	15.583.396.192,00	26.305.556.987,00	53.552.397.942	25.375.150.822,68	24.450.185.647,53
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.816.277.959,00	176.526.848.182,00	151.834.595.313	64.184.914.158,69	71.116.238.255,48
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	405.621.209.966,00	308.290.849.539,00	235.961.995.632	97.481.209.280,95	76.404.987.315,92

NO.	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023*	TARGET TAHUN 2024*
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	461.889.771.303,00	518.991.608.652,00	80.622.562.960	110.991.557.918,36	105.913.525.638,27
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	74.250.000,00	1.139.045.750,00	2.908.969.000	1.373.257.801,03	1.414.455.535,06
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**216.942.675.596,00**	**6.499.465.833,00**	**9.508.656.098**	**7.210.323.122,33**	**7.426.632.816,00**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	216.942.675.596,00	6.499.465.833,00	9.508.656.098	7.210.323.122,33	7.426.632.816,00
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**289.548.383.670,00**	**488.583.320.599,00**	**534.251.380.736**	**534.300.000.000,00**	**537.081.000.000,00**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	289.548.383.670,00	410.302.808.029,00	529.251.380.736	441.600.000.000,00	441.600.000.000,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	78.280.512.570,00	5.000.000.000	92.700.000.000,00	95.481.000.000,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2022

** RPJMD Prov. Sulut Tahun 2021-2026*

Anggaran belanja APBD Sulawesi Utara tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 3.607.651.559.723,33.

Kerangka Pendanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan menurut struktur belanja daerah meliputi:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai
   Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai ASN dan Non ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Belanja Barang dan Jasa.
   Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
c. Belanja Bunga
   Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Belanja Subsidi
   Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.
e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
   Belanja Hibah
   Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

3. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

4. Belanja Tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).

Dari sisi penerimaan pembiayaan, mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan di semua sektor serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan berdasarkan Pasal 15b ayat (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasioal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020.

Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib seperti penyertaan modal daerah. Pemerintah daerah sebagaimana peraturan daerah Penyertaan Modal diarahkan kepada Bank SULUTGO yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk memberikan penjaminan pembiayaan pada usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi, di targetkan Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah menetapkan Perda PT. Jamkrida sehingga perlu menyiapkan anggaran untuk penyertaan modal. Selanjutnya ditahun 2023, pengeluaran pembiayaan dianggarkan juga untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dimana dalam rangka meningkatkan pelayanan sektor kesehatan dan menunjang pemulihan ekonomi nasional Pemerintah provinsi Sulawesi Utara telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan pinjaman dari Lembaga keuangan bukan bank lewat penyedia jasa keuangan pembiayaan infrastruktur PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan proyeksi/target tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

NO	Uraian	JUMLAH				
		REALISASI 2020	REALISASI 2021	TAHUN 2022	TARGET 2023 *	TARGET 2024 *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	**PEMBIAYAAN**					
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**949.155.952.296,38**	**779.591.662.911,97**	**35.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	195.997.699.977,38	138.196.715.987,97	35.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	641.394.946.924,00	0	0	0
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	753.158.252.319,00	0	0	0	0
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**50.000.000,00**	**79.789.898.452,00**	**217.468.058.253**	**516.755.515.867,67**	**391.755.515.867,67**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000,00	160.000.000,00	31.750.000.000	175.000.000.000,00	50.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	79.629.898.452,00	185.718.058.253	341.755.515.867,67	341.755.515.867,67
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**949.105.952.296,38**	**699.801.764.459,97**	**(182.468.058.253)**	**(486.755.515.867,67)**	**(361.755.515.867,67)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**138.199.757.165,97**	**304.904.136.525,28**	**0**	**0**	**0**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2022

** RPJMD Prov. Sulut 2021-2026*

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan: (1) menjaga kesinambungan antara Prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 dengan 5 tujuan dan 5 sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026; (2) memastikan konsistensi antara perencanaan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) pada program prioritas tahun 2023; (3) kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, dan pinjaman bank daerah untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; (4) mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dijabarkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw.

Visi besar Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yaitu **"Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik",** diaktualisasikan berdasarkan 3 kata kunci utama, sebagai berikut:

1) **"Maju"**, ditunjukkan oleh:
   - Kemampuan untuk menjamin Pemberdayaan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata dan jasa sebagai sumber ketahanan ekonomi daerah;
   - Kemampuan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan dan pembiayaan pembangunan dan mengoptimalkan belanja daerah yang bersumber dari sumber daya lokal sehingga mengurangi ketergantungan sumber daya dari luar daerah;
   - Kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan kemajuan IPTEK/Digitalisasi dalam berbagai bidang;
   - Memiliki Litbang yang handal; dan
   - Terbentuknya Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental.

2) **"Sejahtera"**, ditunjukan oleh:
   - Kemampuan menanggulangi kemiskinan, pengangguran serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- Kemampuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, cerdas dan sehat serta memiliki daya saing; dan
- Kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa dan pasca pandemi *COVID-19*.

3) **"Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik"**, ditunjukkan oleh:
   - Kesiapan untuk membangun sarana, prasarana, infrastruktur dan konektivitas yang merata dan berkeadilan dalam koridor ketahanan lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan;
   - Pelabuhan Hub Internasional Bitung sebagai pintu ekspor/impor ke Asia dan Pasifik;
   - Kesiapan kebijakan, sumberdaya manusia sebagai tujuan wisata dunia, tujuan MICE (*Meetings, Insentives, Conferences and Exebitions)*, tujuan studi, serta pengembangan ilmu dan teknologi;
   - Kemampuan pemerintah membangun jaringan kerjasama bilateral, regional dan internasional untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah; dan
   - Implementasi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, maka telah dirumuskan 5 Misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Sulawesi Utara. 5 Misi Pembangunan Sulawesi Utara 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara

Misi ini mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, yang semakin berkepribadian, berdaya saing dan berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin, sekaligus meningkatnya rata-rata lama sekolah dan manajemen pendidikan yang memperhatikan kompetensi dan profesionalitas guru agar sesuai dengan SPM pendidikan. Selain itu, diupayakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia, meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, peningkatan efektivitas pencegahan dan pengendalian (promotif dan preventif) penyakit dan penyehatan lingkungan yang membentuk sistim kesehatan yang optimal, serta berkembangnya jaminan kesehatan. Didukung dengan kualitas manusia yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi didukung dengan kelitbangan yang handal. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya

manusia yang mampu berdaya saing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi.

2) **Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa**

Misi kedua ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program Perekonomian daerah Sulawesi Utara dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam pendekatan kewilayahan (perdesaan / perbatasan / daerah tertinggal), sektor unggulan (pertanian, Perikanan, Pariwisata dan jasa), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional). Didukung dengan keberadaan KEK Industri dan KEK Pariwisata. Melalui misi ini Sulawesi Utara akan menuju pada transformasi ekonomi yang bertumpu pada sektor unggulan daerah dengan peningkatan produksi, akumulasi nilai tambah melalui industri pengolahan yang didukung dengan Distribusi, logistik dan transportasi sampai pada pasar yang baik dan memadai. Hal ini akan memberikan daya ungkit untuk menyiapkan destinasi Pariwisata di Sulawesi Utara yang berlebih menarik. Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) tetap dilanjutkan untuk percepatan penurunan Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran, serta mendorong PDRB perkapita yang tinggi.

3) **Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas**

Misi ketiga ini dikembangkan untuk memperkuat posisi geografis (geoposisi) Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina dan berada pada ALKI II dan ALKI III ditunjang dengan penetapan Pelabuhan Bitung sebagai hub internasional serta Bandara Internasional Sam Ratulangi sebagai Hub. Kondisi ini mengokohkan Sulawesi Utara sebagai wilayah prioritas dalam pengembangan pembangunan yang berorientasi global khususnya ke Asia Timur dan pasifik sebagai Super Hub. Hal ini akan menentukan untuk mewujudkan Pintu Gerbang yang didukung dengan ketersediaan Infrastruktur yang memadai untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan Industri, mempercepat akses ke kawasan pariwisata, mendongrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat. Pembangunan Infrasrtuktur dan Pengembangan Kawasan Pariwisata mengacu pada Dokumen Perencanaan yang dihasilkan melalui Integrated Planning Infrastruktur dan Pariwisata.

4) **Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan**

Misi keempat ini mengarahkan kebijakan pembangunan daerah Sulawesi Utara agar dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah tertuang dalam komitmen SDGs. Semua urusan pembangunan

harus mengakomodir asas pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi hari sejalan dengan juga menjaga kelestarian bumi. Kondisi ini akan ditunjukkan dengan peningkatan indeks kesesuaian pemanfaatan ruang dan indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

5) Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah

Misi kelima ini untuk mendukung percepatan implementasi reformasi birokrasi secara optimal dan sinergitas antar daerah (Pusat ProvinsiKabupaten/Kota). Pada peiode sebelumnya telah terwujud tata Kelola pemerintahan Sulawesi Utara yang membaik, dalam periode kedepan ini reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas bersama-sama Provinsi dn Kabupaten/Kota. Reformasi birokrasi kedepan diharapkan bertumpu pada 3 (tiga) dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumberdaya manusia aparatur yang semakin baik. Hal ini akan didukung dengan proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik didukung dengan reformasi Birokrasi, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan sinergitas antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara bahkan mengoptimalkan kerjasama antar daerah.

Guna memastikan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Sulawesi Utara lebih terarah dalam implementasinya kedepan, maka Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam Tujuan dan Sasaran disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sulawesi Utara tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

- Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara

  Misi pertama ini bertujuan untuk “Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter”, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia”. Adapun Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja yakni Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Prevalensi Stunting dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

- Misi 2: Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa.

Misi kedua ini bertujuan untuk "Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas", dengan sasaran yang ingin dicapai adalah "Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat". Adapun Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja yakni Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini *(Gini Ratio)*, Persentase Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

- Misi 3: Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas.
  Misi ketiga ini bertujuan untuk "Terbangunnya infrastruktur dan konektivitas yang memadai", dengan sasaran yang ingin dicapai adalah "Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas". Adapun Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Infrastruktur.

- Misi 4: Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan.
  Misi keempat ini bertujuan untuk "Mewujudkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan", dengan sasaran yang ingin dicapai adalah "Meningkatnya pembanginan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan". Adapun Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja yakni Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Akses Air Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak.

- Misi 5: Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah.
  Misi kelima ini bertujuan untuk "Meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi serta sinergitas antar daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan", dengan sasaran yang ingin dicapai adalah "Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan". Adapun Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja yakni Opini BPK, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks SPBE. Penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya pada setiap misi disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	IDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
Visi: "Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik",					
MISI I: Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter	Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	74
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94.65
			Prevalensi Stunting	%	15
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	58.06

MISI	TUJUAN	SASARAN	IDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
MISI II: Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.0 – 5.7
			Indeks Gini (Gini Ratio)	Angka	0.355
			Persentase Angka Kemiskinan	%	5.93
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6.00 – 6.50
MISI III: Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai	Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas	Indeks Infrastruktur	Angka	0.89
MISI IV: Pembangunan Daerah yang berkelanjutan	Terwujudnya Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Pembanginan Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang	Angka	0.68
			Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	71.11
			Akses Air Minum Layak	%	94
			Akses Sanitasi Layak	%	87
MISI V: Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh Sinergitas Antar Daerah	Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK Kualifikasi Penilaian	Opini	WTP
			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	61.00
			Indeks SPBE	Angka	3.3

Sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026

Adapun Strategi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara.

Diperlukan beberapa strategi agar kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Sulawesi Utara dapat semakin meningkat. Strategi yang ditempuh antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan;
2. Menyediakan pendidikan yang inklusif, terjangkau dan berkualitas, termasuk Pelaksanaan Program Paket C;
3. Mendorong partisipasi aktif pemuda serta memajukan keolahragaan;
4. Mendorong kemajuan pelaksanaan pendidikan vokasi;
5. Mendorong peningkatan peran keluarga serta kesetaraan gender;
6. Mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal;
7. Meningkatkan cakupan terhadap perlindungan bagi tenaga kerja formal dan non formal;
8. Pemberian jaminan sosial bagi masyarakat miskin.
9. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan;

2) Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa.

Diperlukan beberapa terobosan demi meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Untuk itu, beberapa strategi yang diperlukan antara lain:

1. Menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
2. Mendorong pengembangan pertanian organik;
3. Mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat;
4. Meningkatkan daya saing sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan dan perikanan, termasuk pengembangan komoditi Kelapa dan turunannya serta peningkatan produktivitas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
5. Pengembangan kawasan pariwisata di sepanjang Koridor Pantai Utara (Pantura) dan Koridor Pantai Selatan (Pansela) Sulawesi Utara;
6. Meningkatkan produktifitas sektor UMKM;
7. Mendorong kinerja ekspor daerah;
8. Diversifikasi komoditas ekspor, termasuk pengembangan komoditi Sarang Burung Walet dan Tanaman Porang;
9. Meningkatkan inovasi daerah untuk menarik investasi;

3) Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas.

Diperlukan beberapa terobosan yang perlu dilakukan untuk memantapkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Untuk itu, beberapa strategi yang diperlukan antara lain:

1. Mengembangkan sistem konektifitas antar daerah yang berkualitas;
2. Mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif, adil dan merata;
3. Mendorong terwujudnya Sulawesi Utara sebagai *Super Hub* di kawasan Indonesia Timur;
4. Mendorong transformasi digital di seluruh wilayah Sulawesi Utara;
5. Mendorong pembangunan kawasan Perbatasan, daerah terluar, terpencil dan tertinggal;
6. Meningkatkan tingkat kemantapan infrastruktur penunjang ekonomi wilayah;
7. Pengembangan Infrastruktur Kawasan sekitar Danau Tondano;
8. Membangun infrastruktur perdesaan;
9. Peningkatan Kapasitas *Bandwidth Data Center*, mendorong intergrasi Jaringan *Fiber Optic* Laut Pasifik dengan Palapa Ring Agar Sulawesi Utara menjadi *Backbone Data Center* di Indonesia.

4) Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan.

Pengarusutamaan Pembangunan berkelanjutan merupakan amanat dalam RPJMN 2020 – 2024. Pembangunan Berkelanjutan dimaksudkan agar setiap aspek pembangunan yang dilaksanakan selalu berwawasan lingkungan. Dengan kata lain, pembangunan daerah yang dilaksanakan

senantiasa menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, strategi yang akan ditempuh antara lain:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
2. Mendorong pencapaian pemenuhan target akses air minum dan sanitasi layak;
3. Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan;
4. Mendorong upaya mitigasi terhadap perubahan iklim;
5. Meningkatkan pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya, termasuk pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

5) Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar daerah.

Efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam pelayanan kepada masyakarat harus bisa diterapkan di setiap sendi pelayanan masyarakat. Selain itu, sinergitas antar daerah yang terjalin dengan baik akan memudahkan pencapaian target pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Beberapa strategi yang diperlukan untuk pencapaian pembangunan misi ini antara lain:

1. Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi;
2. Mendorong inovasi pelayanan publik pada setiap Perangkat Daerah dan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan dan sinergitas antar daerah serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
4. Mendorong sinergitas program antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi beserta Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

4.2.1. Nasional

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia.

Terdapat 5 (lima) arahan utama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2) Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3) Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4) Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan esalonisasi; dan
5) Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, serta memberikan arahan bagi pembangunan nasional di tahun 2023, maka Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu "**Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan",** dengan 8 (delapan) Prioritas Nasional, sebagai berikut:

1) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
2) Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan);
3) Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan *Decent Job*;
4) Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
5) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
6) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan Iklim);
7) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain: Air Bersih dan Sanitasi;
8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Gambar 4.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023

Adapun Sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2023, antara lain:

1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,9 %;
2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0 %;
3) Rasio Gini sebesar 0,375 – 0,378;
4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,29 – 73,35;
5) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02 %;
6) Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5 – 8,5 %
7) Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103-105; dan
8) Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 105-107.

4.2.2. Sulawesi Utara

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah provinsi Sulawesi utara Tahun 2023 mengacu dan memperhatikan: (1) Tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026; (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021 dan RKPD Tahun 2022 Triwulan I; (3) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; (4) Permasalahan ditingkat daerah dan nasional; dan (5) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2023.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di Sulawesi Utara. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2023, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat pendemi COVID-19 di Sulawesi Utara.

Sejalan dengan Arah Kebijakan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, maka Tema Pembangunan Daerah Tahun 2023 difokuskan pada **"Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan SDM dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan",** dengan 8 Prioritas Pembangunan Daerah, yakni:

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

   Selaras dengan prioritas nasional, perencanaan jangka menengah daerah dan evaluasi kondisi kemiskinan, Provinsi Sulawesi Utara menetapkan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Secara umum persentase kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara selang 2016-2021 berada di bawah persentase nasional dan menunjukkan tren menurun, dengan kekecualian capaian tahun 2020 yang merefleksikan terjangan dampak pandemi Covid-19. Namun, pencapaian ini justru perlu dipacu ketika kondisi ini disandingkan dengan tuntutan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan idealisme pelayanan publik serta hidup bernegara berdasarkan konstitusi. Berdasarkan pertimbangan inilah, percepatan penanggulangan kemiskinan dijadikan prioritas daerah dan diejawantahkan melalui: pemberian jaminan sosial bagi masyarakat miskin, pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, pemberian bantuan RTLH, meningkatkan kualitas dan pemanfaatan DTKS, meningkatkan cakupan terhadap perlindungan bagi tenaga kerja formal dan nonformal, mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

   Percepatan penanggulangan kemiskinan di atas menjadi amalgam dua strategi utama, yaitu (1) penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan (2) peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Strategi kedua ini diabdikan pada tujuan untuk menjadikan kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah nasional dan daerah. Pencapaian prioritas ini tentunya berpartisipasi dalam perwujudan tema pembangunan daerah 2023 tentang peningkatan daya saing daerah secara khusus melalui sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Peningkatan Kualitas SDM

Demi mempertahankan linieritas dengan prioritas nasional, perwujudan misi perencanaan jangka menengah pemerintah daerah, dan merespons identifikasi masalah pembangunan berhubungan dengan sumber daya manusia, secara khusus sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, Provinsi Sulawesi Utara menetapkan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas dalam pembangunan daerah 2023. Prioritas ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Provinsi Sulawesi Utara yang semakin berkepribadian, berdaya saing dan berkualitas. Demi pencapaian peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah ini, pemerintah mewujudkannya dengan meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan, menyediakan pendidikan yang inklusif, terjangkau dan berkualitas, termasuk pelaksanaan Program Paket C, mendorong kemajuan pelaksanaan pendidikan vokasi, meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan, mendorong peningkatan peran keluarga serta kesetaraan gender, mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal, dan mendorong partisipasi aktif pemuda serta memajukan keolahragaan. Usaha perwujudan ini mengasumsikan pemberdayaan manusia seutuhnya dan menyasar unsur-unsur pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Prioritas ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian tema pembangunan daerah 2023 mengenai peningkatan daya saing daerah melalui sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah

Secara strategis, prioritas ini memelihara keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional keempat tentang mendorong pemulihan dunia usaha di masa Pandemi Covid-19. Prioritas ini juga ditetapkan oleh Provinsi Sulawesi Utara demi menjaga keselarasan antara identifikasi masalah dan isu strategis di ranah pengembangan industri dan peningkatan investasi secara khusus di sektor unggulan daerah, pengembangan peran koperasi dan UMKM, serta jaminan pemenuhan dan diversifikasi pangan.

Dengan pertimbangan tersebut, prioritas peningkatan daya saing produk unggulan daerah dilaksanakan dengan menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat, mendorong pengembangan pertanian organik, meningkatkan daya saing sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan dan perikanan, termasuk pengembangan komoditi Kelapa dan turunannya serta peningkatan produktivitas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, meningkatkan produktifitas sektor UMKM, mendorong kinerja ekspor daerah, diversifikasi komoditas ekspor, termasuk pengembangan komoditi Sarang Burung Walet dan Tanaman Porang, dan meningkatkan inovasi daerah untuk menarik investasi. Secara

strategis, prioritas ini mendukung tema pembangunan daerah 2023 tentang peningkatan daya saing daerah.

4. Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas

Penetapan prioritas ini mempertimbangkan keterkaitan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan agenda pembangunan nasional yang termaktub dalam perencanaan jangka menengah nasional. Prioritas ini juga memelihara keselarasannya dengan prioritas nasional yang berhubungan dengan percepatan pengembangan infrastruktur dasar. Ranah pengembangan infrastruktur ini mencakup pelayanan dasar di bidang air minum dan sanitasi dan transformasi ekonomi, digital, dan konektivitas.

Prioritas ini juga merupakan salah satu bagian dari implementasi dan operasionalisasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi demi pencapaian sasaran pemerintah daerah yang termaktub dalam perencanaan jangka menengah daerah. Untuk mengejawantahkan prioritas ini, pemerintah berusaha untuk mengembangkan sistem konektivitas antardaerah yang berkualitas, mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif, adil dan merata, mendorong terwujudnya Sulawesi Utara sebagai *Super Hub* di kawasan Indonesia Timur, mendorong transformasi digital di seluruh wilayah Sulawesi Utara, mendorong pembangunan kawasan Perbatasan, daerah terluar, terpencil dan tertinggal, meningkatkan tingkat kemantapan infrastruktur penunjang ekonomi wilayah, pengembangan infrastruktur kawasan sekitar danau Tondano, membangun infrastruktur perdesaan, peningkatan kapasitas *Bandwidth Data Center*, mendorong intergrasi Jaringan *Fiber Optic* Laut Pasifik dengan Palapa Ring Agar Sulawesi Utara menjadi *Backbone Data Center* di Indonesia, dan mendorong pencapaian pemenuhan target akses air minum dan sanitasi layak. Demikian, secara strategis prioritas ini mendukung Tema Pembangunan Daerah Tahun 2023 sebagai salah satu elemen pendukung utama peningkatan daya saing daerah, yaitu dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

5. Pembangunan Kepariwisataan

Pariwisata, secara strategis, menjadi sektor yang potensial untuk dikembangkan selain karena mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, juga cukup strategis bagi suatu negara atau daerah karena pariwisata dipandang sebagai penunjang sektor lainnya. Walau kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2016-2019, dan kemudian mengalami dampak serius Pandemi Covid-19, sektor ini tetap menjadi sumber ketahanan ekonomi daerah. Kondisi meranggas di masa pandemi ini

dijadikan sebagai kesempatan untuk melaksanakan transformasi di sektor pariwisata sekaligus menjawab identifikasi problem optimalisasi industri pariwisata.

Prioritas ini memastikan keselarasan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan strategi pencapaiannya. Prioritas ini juga menjadi tanggapan strategis daerah terhadap proyek prioritas strategis nasional (sebagai salah satu destinasi pariwisata superprioritas/eksistensi KEK Pariwisata Likupang) yang telah ditetapkan dalam perencanaan jangka menengah dan jangka pendek daerah. Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan prioritas ini dengan mengembangkan kawasan pariwisata di sepanjang Koridor Pantai Utara (Pantura) dan Koridor Pantai Selatan (Pansela) Sulawesi Utara. Sebagai satu sektor penting untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah, prioritas pembangunan kepariwisataan ini berkontribusi secara signifikan dalam usaha peningkatan daya saing daerah.

6. Penanggulangan Bencana dan Mitigasi Perubahan Iklim

Secara umum wilayah Sulawesi Utara rawan bencana karena berada di area *ring of fire*. Kawasan rawan bencana alam Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas: kawasan rawan gempa, meliputi seluruh wilayah Provinsi yaitu kawasan yang berada di sekitar wilayah patahan lempeng kulit bumi terluar; kawasan rawan tanah longsor, meliputi Kepulauan Sangihe dan Siau Tagulandang Biaro (Manganitu, Tamako dan Siau Timur), Manado (Kec. Wanea, Kec. Singkil, Kec. Tuminting, Kec. Tikala, Kec. Mapanget, Kec. Bunaken, Kec. Malalayang, dan Kec. Wenang), Jalur jalan Manado-Amurang, Jalur jalan Manado-Tomohon, Jalur jalan Noongan-Ratahan-Belang (Minahasa Tenggara), Torosik (Bolaang Mongondow Selatan); kawasan rawan gelombang pasang yang meliputi pesisir pantai utara dan selatan Provinsi yang memiliki elevasi rendah; kawasan rawan gerakan tanah di Gunung Lokon Kota Tomohon, Gunung Klabat di Kabupaten Minahasa Utara, dan Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara serta kawasan sekitar danau Tondano di Kabupaten Minahasa; dan kawasan rawan banjir yang meliputi daerah muara sungai, dataran banjir dan dataran aluvial terutama di sepanjang sungai di Manado, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow, Minahasa Tenggara, dan Bolaang Mongondow Timur. Mempertimbangkan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan daerah, prioritas ini secara strategis menopang peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan SDM dan infrastruktur yang mempertimbangkan kontinjensi bencana dan mitigasi perubahan iklim sebagai ekspresi wawasan lingkungan.

Prioritas ini mempertahankan kesinambungan dengan agenda nasional tentang pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta menjamin sinergitas dengan prioritas

nasional menyangkut pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim). Prioritas ini diimplementasikan melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman, pemanfaatan energi baru terbarukan, upaya mitigasi terhadap perubahan iklim, pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya, termasuk pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

7. Peningkatan Kualitas Tata Pemerintahan

   Prioritas ini merupakan bagian integral dan penting dari pengejawantahan pengembangan daya saing daerah secara khusus melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Prioritas ini juga menjaga keserasian dengan arahan Presiden Republik Indonesia tentang penyederhanaan birokrasi dan agenda pembangunan nasional menyangkut stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, yang termaktub dalam perencanaan jangka menengah nasional. Prioritas ini juga mendukung secara strategis prioritas pembangunan nasional kedelapan tentang pembangunan IKN.

   Menyadari pentingnya prioritas ini dalam menunjang perencanaan pembangunan nasional dan daerah, implementasinya didorong melalui percepatan penerapan reformasi birokrasi, peningkatan kerja sama pembangunan dan sinergitas antardaerah serta kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan sinergitas program antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

   Keterkaitan pencapaian prioritas ini dengan prioritas peningkatan tata pemerintahan sedemikian eratnya sehingga pelaksanaannya akan saling meliputi dan melengkapi. Kedua prioritas ini secara komplementer mendukung arahan Presiden Republik Indonesia tentang penyederhanaan birokrasi dan agenda pembangunan nasional menyangkut stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, yang termaktub dalam perencanaan jangka menengah nasional. Secara strategis, kedua prioritas ini tentunya berkontribusi pada prioritas pembangunan nasional kedelapan tentang pembangunan IKN. Secara ideal, seluruh usaha pembangunan nasional dan daerah bermuara dan terukur dalam pelayanan publik yang unggul.

   Implementasi prioritas ini diusahakan dengan mendorong inovasi pelayanan publik pada setiap Perangkat Daerah dan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk menjaga kesinambungan antara permasalahan dan isu strategis daerah serta prioritas pembangunan daerah tahun 2023, maka disajikan penyelarasan dengan keterkaitan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Keterkaitan Permasalahan, Isu Startegis Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Tahun 2023

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS 2023	PRIORITAS DAERAH 2023	ARAH KEBIJAKAN 2023
• Terkontraksinya struktur ekonomi Sulawesi Utara terutama pada sektor akomodasi dan makan minum serta transportasi yang utamanya dipengaruhi oleh puncak pembatasan aktivitas dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19; • Kualitas SDM mengalami sedikit penurunan terutama terkait komponen pengeluaran per kapita akibat menurunnya pendapatan masyarakat terutama di masa pandemi. • Masih tingginya kecenderungan ketergantungan terhadap energi fosil akibat dari belum optimalnya pengelolaan sumber daya energi baru terbarukan; • Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang ditandai dengan belum selesainya pembangunan TPA Regional Mamitarang dan belum adanya fasilitas pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis; • Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat, akibat dari menurunnya ketersediaan dan konsumsi pangan secara khusus beras, distribusi yang belum maksimal, maupun susunan ragam pangan yang belum terdiversifikasi dengan baik; • Kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan; dan • Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal terutama di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, akibat dari perubahan regulasi terkait pemenuhan SPM yang mempengaruhi proses perencanaan.	• Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;	1). Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan SDM dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
	• Peningkata Kualitas dan Daya Saing SDM, Pemajuan Kebudayaan dan Revolusi Mental;	2). Peningkatan Kualitas SDM	
	• Penguatan Ekonomi melalui industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa; • Peningkatan kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan; • Peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan serta distribusi pangan yang terdiversifikasi.	3). Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	
	• Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan;	4). Pembangunan Infrastruktur dan konektifitas yang berkualitas	
		5). Pembangunan Kepariwisataan	
		6). Penanggulangan Bencana dan Mitigasi Perubahan Iklim	
	• Penguatan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta penyelanggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif	7). Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan	
		8). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	

Adapun keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2023 diselaraskan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, dan Daerah Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;	(1) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2) Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan);	(2) Peningkatan Kualitas SDM;
3) Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan Decent Job;	(3) Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah;
4) Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;	(4) Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas
5) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;	(5) Pembangunan Kepariwisataan
6) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan Iklim);	(6) Penanggulangan Bencanan dan Mitigasi Perubahan Iklim;
7) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain: Air Bersih dan Sanitasi;	(7) Peningkatan Kualitas Tata Pemerintahan;
8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.	(8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Adapun sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2023, sesuai dengan target RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, antara lain sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74;
2. Indeks Pembangunan Gender sebesar 94,65;
3. Prevalensi Stunting sebesar 15%;
4. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebesar 58,06;
5. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0% – 5,7%;
6. Gini Ratio sebesar 0,355;
7. Persentase Angka Kemiskinan sebesar 5,93%;
8. Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT sebesar 6,0% – 6,5%;
9. Indeks Infrastruktur sebesar 0,89;
10. Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 0,68;
11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 71,11;
12. Akses Air Minum Layak sebesar 94%;
13. Akses Sanitasi Layak sebesar 87%;
14. Opini BPK dengan status WTP;
15. Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 61;
16. Indeks SPBE dengan nilai 3.3.

Tabel 4.4
Keterkaitan antara Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 terhadap pencapaian 5 Misi Daerah, 7 Prioritas Nasional, 8 Prioritas Daerah dan Perangkat Daerah terkait beserta Target Kinerja Tahun 2023

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023	KODE	PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2023 TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN				Persentase Angka Kemiskinan sebesar 5,93% TPT sebesar 6,0% – 6,5% Gini Ratio sebesar 0,355;	13 PROGRAM
MISI II	PN 1	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 1	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENYUSUN RENCANA TENAGA KERJA	46%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 1	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	70%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 1	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM DAN LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM SATU DAERAH PROVINSI	61%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 1	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN	50%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 1	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN	85%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 1	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	PRESENTASI DESA YANG DIFASILITASI DALAM PENATAAN DESA	19,90%	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023	KODE	PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2023 TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
MISI II	**PN 1**	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	100%	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 1**	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 1**	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100%	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 1**	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DIFASILITASI PENETAPANNYA	40%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 1**	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	REKAPITULASI WARGA TRANSMIGRASI YANG DITEMPATKAN	50 KK%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 1**	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PRESENTASE SATUAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI YANG DIFASILITASI PEMBINAANNYA	70%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
2	**PENINGKATAN KUALITAS SDM**				**IPM sebesar 74;** **IPG sebesar 94,65;** **Prevalensi Stunting sebesar 15%;** **IPK sebesar 58,06**	**39 PROGRAM**
MISI I	**PN 2**	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH;	100%	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 2**	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL	100%	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023	KODE	PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	
MISI I	PN 2	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	1:14	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut
MISI I	PN 2	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	100%	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut
MISI I	PN 2	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	100%	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut
MISI I	PN 2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100%	Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut
MISI I	PN 2	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK;	45/100.000 Penduduk	Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut
MISI I	PN 2	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100%	Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut
MISI I	PN 2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	100%	Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut
MISI I	PN 2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE POTENSI SUMBER (PSKS) KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TERLATIH DAN PRODUKTIF	15,20%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
MISI I	PN 2	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERTANGANI	100%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
MISI I	PN 2	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
MISI I	PN 2	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG DILAKSANAKAN;	100%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
MISI I	PN 2	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD	70%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
MISI I	PN 2	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)	28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
MISI I	PN 2	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	RASIO KELUARGA YANG MEMAHAMI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (PER 10.000 KK)	15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
MISI I	PN 2	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA PENYEDIA DATA GENDER DAN ANAK YANG DIPERBAHARUI SECARA BERKALA	85%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023	KODE	PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2023 TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
MISI I	**PN 2**	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIFASILITASI UNTUK MENDAPATKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 2**	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	65	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 2**	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	2,24	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 2**	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE (MCPR))	65%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 2**	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	ANGKA KELAHIRAN REMAJA UMUR 15-19 TAHUN (AGE SPECIFIC FERTILITY RATE / ASFR 15-19)	30%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 2**	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI	0,65%	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 2**	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	6 Prestasi	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 2**	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	6,79%	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 2**	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	TERLESETARIKANNYA CAGAR BUDAYA	100%	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 2**	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	PERSENTASE PENDUDUK YANG PERNAH TERLIBAT SEBAGAI PELAKU/PENDUKUNG PERTUNJUKAN SENI YANG MENJADIKAN KETERLIBATAN SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN (TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS).	0.020%	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 2**	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH	9.5%	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 2**	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	JUMLAH CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA YANG DITETAPKAN	24 Unit	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 2**	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	STANDAR PENGELOLAAN MUSEUM NEGERI	B	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 2**	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	61,5	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023	KODE	PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2023 TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
MISI I	**PN 2**	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT	8.80	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 2**	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 2**	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 2**	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 2**	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE ORMAS, LSM, FKUB YANG MENDAPAT PEMBINAAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 2**	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE KASUS TRANTIBUM YANG TERSELESAIKAN (JUMLAH KASUS TRANTIBUM YANG TERDATA / JUMLAH KASUS YANG TERSELESAIKAN X 100%)	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 2**	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	100%	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulut
MISI II	**PN 2**	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA	100%	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulut
3	**PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UNGGULAN DAERAH**				**Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0% – 5,7%**	**42 PROGRAM**
MISI II	**PN 4**	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASI PENINGKATAN INVESTASI DI PROVINSI	10%	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 4**	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PENINGKATAN JUMLAH KERJASAMA PENANAMAN MODAL/MOU	3 MOU/KERJA SAMA	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023	KODE	PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2023 TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
MISI II	**PN 4**	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK TEPAT WAKTU	87%	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 4**	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASI PENINGKATAN PENYAMPAIAN LKPM	75%	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 4**	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	JUMLAH LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL TEPAT WAKTU	1 LAPORAN	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 4**	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE LUAS WILAYAH LAUT DAN PESISIR YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	55%	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 4**	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT	410.380 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 4**	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI	578020	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 4**	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	97%	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 4**	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	KONSUMSI IKAN (Kg/Kapita/Tahun)	67,5	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 4**	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	8,57%	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 4**					Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 4**	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	1-2%	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 4**					Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 4**	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	18%	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023	KODE	PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2023 TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
MISI II	PN 4	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	0,05-1	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 4					Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 4	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DOKUMEN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1 Dokumen	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 4	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	0,50%	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 4					Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 4	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0,84%	Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 4	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL	31,40%	Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 4	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	JUMLAH KSP / USP YANG TERFASILITASI DALAM PELAYANAN IZIN	90	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 4	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS	3.841 Unit	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 4	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	1%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 4	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	JUMLAH SDM PENGELOLA KOPERASI DAN UMKM YANG DILATIH	615 Orang Pengelola; 615 Orang Wirausaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 4	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	JUMLAH KUMKM YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN KUMKM	180	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 4	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE UMKM NAIK KELAS	2%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 4	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	JUMLAH UMKM YANG MENINGKAT AKSES PROMOSI DAN PEMASARANNYA	220	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023	KODE	PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	
MISI II	PN 5	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PERTIMBANGAN TEKNIS YANG DITERBITKAN IJIN	80%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 5	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 5	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	LAJU INFLASI TERKENDALI (%)	3±1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 5	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERTUMBUHAN NILAI EKSPOR NON MIGAS	6%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 5	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN	90%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 5	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	75%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 5	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIP	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 5	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE REKOMENDASI YANG DITERBITKAN IJIN	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 5	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 4	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE CADANGAN PANGAN	100% (275 Ton)	Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 4	2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	94,5	Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 4	2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN	10,03%	Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
MISI II	PN 4	2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	89%	Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023	KODE	PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2023 TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
4	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS				Indeks Infrastruktur sebesar 0,89	22 PROGRAM
MISI III	PN 7	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	RASIO LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI YANG DILAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI	0.874	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
MISI III	PN 7	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	JUMLAH SISTEM DRAINASE YANG TERBANGUN DAN TERHUBUNG DENGAN SUNGAI LINTAS KAB/KOTA DAN YANG BERADA DI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
MISI III	PN 7	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	JUMLAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI YANG MEMPEROLEH PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
MISI III	PN 7	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS PROVINSI YANG DIBANGUN / DIREHAB / DIRENOVASI / UBAHSUAI / DIPELIHARA DAN DIRAWAT	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
MISI III	PN 7	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE KAWASAN YANG DITATA BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
MISI III	PN 7	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	RASIO KEMANTAPAN JALAN PROVINSI	0,899	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
MISI III	PN 7	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI	0,054	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
MISI III	PN 7	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	RASIO KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN DENGAN RTRW	0,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
MISI III	PN 7	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH 10 - 15 HEKTAR YANG DITANGANI	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
MISI III	PN 7	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE SATUAN PERUMAHAN YANG DILENGKAPI DENGAN PSU	61%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
MISI III	PN 7	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI,	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI,	1 Kegiatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023	KODE	PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2023 TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Pertanahan Daerah Prov. Sulut
MISI III	**PN 7**	2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	PERSENTASE PEMANFAATAN TANAH YANG SESUAI DENGAN PERUNTUKAN TANAHNYA DI ATAS IZIN LOKASI DIBANDINGKAN DENGAN LUAS IZIN LOKASI YANG DITERTIBKAN	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
MISI III	**PN 7**	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	PERSENTASE PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG SELESAI TEPAT WAKTU	40%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
MISI III	**PN 7**	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
MISI III	**PN 7**	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	PERSENTASE GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TEPAT WAKTU	40%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
MISI III	**PN 7**	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
MISI III	**PN 7**	2.10.09	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	TERSEDIANYA LOKASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN/KOTA	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
MISI III	**PN 7**	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	TERLAKSANANYA PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
MISI III	**PN 7**	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	RASIO KONEKTIVITAS PROVINSI	0,45	Dinas Perhubungan
MISI III	**PN 7**	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	JUMLAH ARUS PENUMPANG ANGKUTAN UMUM NAIK TURUN (ORANG)	13.500	Dinas Perhubungan
MISI III	**PN 7**	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	JUMLAH KEGIATAN SOSIALISASI RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN PROVINSI DI KAB/KOTA	3	Dinas Perhubungan

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023	KODE	PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2023 TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
MISI III	**PN 7**	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	100%	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Sulut
5	**PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**				**Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0% – 5,7%**	**4 PROGRAM**
MISI II	**PN 4**	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	100%	Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 4**	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA DAN WISATAWAN NUSANTARA	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 4**	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU	3%	Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut
MISI II	**PN 4**	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF (Rp.)	20.104.200.000	Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut
6	**PENANGGULANGAN BENCANAN DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM**				**Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 0,68;** **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 71,11;** **Akses Air Minum Layak sebesar 94%;** **Akses Sanitasi Layak sebesar 87%;**	**24 PROGRAM**

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023	KODE	PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2023 TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
MISI IV	**PN 6**	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA	10%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	JUMLAH TPA REGIONAL YANG DIOPERASIKAN DENGAN SISTEM SANITARY LANDFILL	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	RASIO PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK OLEH SPAL REGIONAL	0,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	4%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA TANGGUH BENCANA	100%	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MISI II	**PN 3**	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI	100%	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	TERSUSUNNYA RPPLH DAN KLHS PROVINSI	KLHS	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI	71,11	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	TERLAKSANANYA PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN TAMAN KEHATI OLEH PEMERINTAH PROVINSI	1 Taman Kehati	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	JUMLAH USAHA/KEGIATAN YANG MELAKUKAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 LINTAS KAB/KOTA	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI	55%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023	KODE	PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2023 TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
MISI IV	**PN 6**	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	JUMLAH MHA DAN/ATAU KEARIFAN LOKAL YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR	1 Kelompok	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PENINGKATAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MAYARAKAT	100%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	JUMLAH PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1 Penghargaan	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITANGANI	100%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI	50%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	28%	Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS	30%	Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	PERSENTASE PENGELOLAAN AIR TANAH, SUMBER DAYA GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	PERSENTASE USAHA TAMBANG SESUAI KEWENANGAN PROVINSI YANG TIDAK MELANGGAR PERDA	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	PENINGKATAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN	36%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut
MISI IV	**PN 6**	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	RASIO ELEKTRIFIKASI	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023	KODE	PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2023 TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
7	**PENINGKATAN KUALITAS TATA PEMERINTAHAN**				**Opini BPK dengan status WTP;** **Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 61;**	**24 PROGRAM**
MISI V	**PN 8**	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	61,00	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sulut
MISI V	**PN 8**	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	NILAI LPPD	Tinggi	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Prov. Sulut
MISI V	**PN 8**	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE REKOMENDASI PELAKSANAAN PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DITINDAKLANJUTI	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Sulut
MISI V	**PN 8**	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	PERSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100%	Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sulut
MISI V	**PN 8**	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI	100%	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Sulut
MISI V	**PN 8**	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	RASIO NILAI BELANJA YANG DILAKUKAN MELALUI PENGADAAN	100%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Prov. Sulut
MISI V	**PN 8**	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	95%	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Sulut
MISI V	**PN 8**	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sulut
MISI V	**PN 8**	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KETERUKURAN DAN AKURASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	75%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulut
MISI V	**PN 8**	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulut
MISI V	**PN 8**	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023	KODE	PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	
MISI V	**PN 8**	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	4	Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut
MISI V	**PN 8**	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	RASIO PAD (ADHK)	0,014	Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulut
MISI V	**PN 8**	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PERSENTASE PENERAPAN MERIT SISTEM YANG MENJADI KEWENANGAN BKD	80%	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulut
MISI V	**PN 8**	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERSENTASE ASN YANG BERKOMPETENSI	40%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov. Sulut
MISI V	**PN 8**	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN	45%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulut
MISI V	**PN 8**	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	PRESENTASE PELAYANAN PENGHUBUNG	100%	Badan Penghubung Daerah Prov. Sulut
MISI V	**PN 8**	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP	Inspektorat Daerah Prov. Sulut
MISI V	**PN 8**	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PKPT	100%	Inspektorat Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 8**	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 8**	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH	95%	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 8**	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL	18,91	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 8**	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN	230	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 8**	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP YANG DISIMPAN DILEMBAGA KEARSIPAN DAERAH PROVINSI YANG SESUAI NSPK	15 Izin	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut
8	**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**				**Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 61;**	**6 PROGRAM**

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023	KODE	PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2023 TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
					Indeks SPBE dengan nilai 3.3	
MISI I	**PN 8**	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	CAKUPAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)	98,0%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 8**	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	CAKUPAN PENERBITAN AKTA PENCATATAN SIPIL (LAHIR, MATI, KAWIN, CERAI)	72.5%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 8**	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	80%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 8**	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN SKALA PROVINSI DALAM SATU TAHUN	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 8**	2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut
MISI I	**PN 8**	2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Pembahasan/kajian tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dalam bab ini adalah tentang rencana Pengembangan Wilayah yang mencakup pengembangan kawasan provinsi, dan kabupaten/kota yang sesuai dengan kebijakan nasional yang terintegrasi. Dalam dokumen perencanaan RPJPD 2005-2025 Provinsi Sulawesi Utara telah dikemukakan tentang pengembangan dan pembangunan wilayah sebagai strategi prioritas untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah yang didukung setiap daerah yang memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas, sumber daya sosial serta budaya yang beragam. Pembangunan wilayah adalah bagian dari prioritas pemerintah provinsi yang tercantum dalam dokumen RPJMD 2021-2026 provinsi yang difokuskan untuk menyelesaikan ketimpangan antar daerah, selaras dengan perencanaan dalam RPJMN 2020 – 2024 dengan beberapa sasaran sebagai berikut: a. meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah daratan dan kepulauan, b. wilayah daratan pesisir pantai utara dan pesisir pantai selatan, c. terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru serta peningkatan keunggulan kompetitif pusat pertumbuhan yang telah berkembang, d. meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian antar daerah, e. meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kota.

Kajian tentang pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai selama 20 tahun sampai tahun 2021 telah melewati 4 tahap pelaksanaan RPJMD dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi (RPJPD), dievaluasi berdasarkan indikator pembangunan daerah yang telah dicapai sampai tahun 2020 di saat terjadinya Pandemic COVID-19. Hasil evaluasi diuraikan pada sub-bagian capaian pembangunan tahun 2015-2019, sebagai akumulasi pelaksanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dalam RPJPD tahun 2005 - 2025.

5.1. Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024

Pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Utara diarahkan untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 untuk Wilayah Sulawesi, dan melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut. Adapun terkait 3 indikator pembangunan yang telah ditetapkan bagi Provinsi Sulawesi Utara, dilakukan penyesuaian target yaitu pada indicator laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Ringkasan target dan prioritas pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang diarahkan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Arah Target Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan (target nasional)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Laju pertumbuhan ekonomi (%)	6,01	5,80	6,20*	6,60*	6,70*	7,30*	7,60*
			-0,99 (capaian Sulut)	4,0 – 5,0 **	4,5 – 5,5 ***	5,0 – 5,7 ***	5,7 – 6,0 ***
Tingkat kemiskinan (%)	7,80	7,66	7,00*	6,68*	6,45*	5,93*	5,65*
				7,5**	7,5 – 6,9 ***	5,93 ***	5,65 ***
TPT (%)	6,86	6,25	6,70	6,50*	6,30*	5,90*	5,60
			7,37 (capaian Sulut)	7,28**	6,6***	6,47 – 7,18 ***	6,0 – 6,5 ***
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun)	41,24	44,10	50,03*	55,15*	61,74*	69,99*	78,85*

Catatan :
* Penetapan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 untuk Provinsi Sulawesi Utara
** Target Perubahan dalam RKPD 2021
*** Target dalam RPJMD 2021 – 2026

Tabel 5.2. Arah Prioritas Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

Arah Prioritas Pembangunan	
Koridor Pertumbuhan	Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Koridor Pemerataan	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sitaro
Pengembangan komoditas unggulan	Kelapa, lada, cengkeh, pala, kopi, kakao dan perikanan tangkap dan budidaya
Pengembangan sentra produksi	Sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang tersebar di KPPN, kawasan transmigrasi dan PKSN
Pengembangan sentra produksi perikanan	SKPT Talaud
Pengembangan kawasan strategis	a) Berbasis komoditas unggulan dan industri pengolahan: KEK Bitung b) Berbasis pariwisata: DPP Manado – Likupang/ KEK Likupang c) Pengembangan dan penguatan konektivitas: Jalan tol Manado – Bitung, Jalan Akses Wisata Likupang, Pengembangan Pelabuhan Bitung, Bandara Bolaang Mongondow d) Pengembangan pusat perdagangan pelabuhan hub Bitung e) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi f) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan Pendidikan dan kesehatan, Pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata dan revitalisasi Balai Latihan kerja meliputi: 1. Pengembangan SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman,

Arah Prioritas Pembangunan	
	pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, energi dan pertambangan 2. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di perguruan tinggi yang mendukung sektor industri manufaktur, konstruksi, pariwisata dan pertanian. 3. Pengembangan BLK yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi Gedung, manajer umum perdagangan dan pelayan, pramuwisata, koki. 4. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh wilayah provinsi
Pengembangan kawasan perkotaan	a) pengembangan kawasan perkotaan di WM Manado b) Penguatan keterkaitan desa – kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah
Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal dan kawasan perbatasan	a) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di Kecamatan perbatasan pada 14 kecamatan lokpri b) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane c) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar Pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar (air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi) serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset desa, pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal, penataan ruang dan penetapan batas desa, serta peningkatan peran BUMDes d) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antar desa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan BUMDes Bersama di KPPN Minahasa Utara e) Penanganan stunting dengan lokasi focus prioritas pada tahun 2020 mencakup 4 kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dan selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh kabupaten/kota pada tahun 2023 f) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 5,65% di Provinsi Sulut g) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim
Penataan kelembagaan dan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah	a) Percepatan penerapan SPM di daerah secara penuh dan konsisten b) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi. c) Penataan Lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif. d) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) e) Peningkatan riset dan inovasi daerah f) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata lainnya. g) Peningkatan kualitas belanja daerah

Arah Prioritas Pembangunan	
	h) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten i) Pengembangan Kerjasama antardaerah, dan j) penguatan Kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak k) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas Kabupaten Minahasa Utara l) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas Kabupaten Bolaang Mongondow m) Penataan ruang dan lahan yang meliputi: 1. Peningkatan efektivitas instrument pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR 2. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional 3. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional 4. Penerapan insentif dan disinsentif serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang 5. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya 6. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral 7. Penetapan delineasi batas wilayah adat 8. Pembentukan bank tanah 9. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital 10. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan n) Pemenuhan SPM kebencanaan melalui: 1. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistic kebencanaan 2. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat 3. Peningkatan investasi mitigasi structural dan non structural untuk pengurangan resiko bencana o) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon meliputi: 1. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan 2. Optimalisasi potensi sumber energi terbarukan 3. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat – pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam 4. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci serta perlindungan kawasan hutan 5. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang 6. Penerapan kaidah – kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata 7. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup 8. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu 9. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal 10. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air

Arah Prioritas Pembangunan	
Proyek prioritas strategis	a) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado – Likupang b) Integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional c) Pembangunan jaringan pelabuhan utama terpadu di Bitung d) Pembangunan waduk multiguna di Kuwil Kawangkoan dan Lolak

Sumber : Lampiran IV Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024.

5.2. Perkembangan Wilayah Berdasarkan Klaster

5.2.1. Klaster Kabupaten Kepulauan

Klaster wilayah kepulauan memiliki keunikan tertentu sehingga setiap pemerintah kabupaten kepulauan menggunakan strategi pengembangan yang sesuai dengan karakter wilayah kepulauan. Dinamika pembangunan kawasan kepulauan lebih komprehensif berdasarkan visi pembangunan daerah, yang menggunakan sumberdaya terbatas, namun memberikan warna semakin dinamis dalam konsep pengembangan wilayah kepulauan dan perbatasan. Inisiatif dan inovasi setiap pimpinan dan perangkat daerah sangat mewarnai dinamika pembangunan wilayah perdesaan dan perkotaan, didukung dengan pelaksanaan pembangunan daerah oleh pemerintah provinsi dan Pemerintah berdasarkan kewenangan. Kapasitas dan kemampuan daerah aktif berkoordinasi membuka komunikasi dengan pemerintah diatasnya, mempercepat akselerasi pembangunan daerah searah dengan prioritas nasional dan provinsi.

A. Kabupaten Kepulauan Sitaro

Konsep pengembangan kawasan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terfokus pada pengembangan Kecamatan Siau Tengah. Kawasan ini menjadi objek wisata berbasis sumber daya alam lingkungan yang memiliki suasana pegunungan dengan temperature moderat—pada siang hari musim panas bervariasi antara 24-28 derajat Celcius—yang relatif dingin dibandingkan dengan lokasi kecamatan lain di pulau Siau.

Pada beberapa desa di wilayah Kecamatan Siau Tengah, dikembangkan budidaya sayur organik dengan memanfaatkan lingkungan alam yang memungkinkan untuk dikembangkan tanaman hortikultura. Selain itu juga dikembangkan beberapa desa yang memiliki lokasi atau *spots* dengan keunikan pemandangan laut bagian barat yang indah dengan kombinasi panorama pegunungan dan laut, serta dapat menikmati keindahan unik sinar matahari yang memantul dari permukaan laut luas menyongsong tenggelam di permukaan horizon laut atau matahari terbenam (*sunset*).

Lokasi-lokasi pengembangan objek wisata baru di wilayah pegunungan serta wilayah pantai pada beberapa lokasi unik pulau-pulau kecil seperti Pulau Makalehi, Pulau Bahorok, dan Pulau lainnya yang memiliki *spot diving*, objek wisata pinggir pantai dipadukan dengan objek wisata menyaksikan Gunungapi aktif (vulcano), serta lintasan/*track* untuk memanjat gunungapi

sampai pada lokasi-lokasi tertentu yang dapat diizinkan dan dijangkau manusia serta dinilai aman bagi pengunjung (*volcano tracking*).

Lokasi-lokasi unik dan menarik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro dikembangkan untuk mengantisipasi dibukanya Bandara Sawang—bandara baru yang terletak di Pulau Siau—dan menghubungkan penerbangan ke Kota Manado dan ke bandara lain di kabupaten kepulauan. Bertambahnya kunjungan wisatawan domestic dan internasional diprediksi akan terjadi dengan dibukanya penerbangan dari Manado ke Ulu-Siau serta semakin lancar hubungan laut menggunakan kapal cepat di siang hari dan kapal malam dari Manado menuju ke Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Industri Pariwisata, sub sektor perikanan, dan sub sektor perkebunan Pala, menjadi tumpuan utama basis ekonomi lokal melalui peran aktif Usaha/Industri Mikro Kecil sebagai penggerak utama ekonomi Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk bergerak dan terus berkembang. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro menyiapkan kebijakan khusus melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dengan memberikan izin usaha dan juga pemberian izin produksi makanan dan minuman oleh Dinas Kesehatan kepada pelaku U/IMK.

Kebutuhan penunjang pengembangan Kawasan di Kabupaten Kepulauan Sitaro yaitu peningkatan jalan akses ke objek wisata dan permukiman penduduk di desa-desa, serta peningkatan akses pelayaran kapal siang dan malam ke Manado dan ke Tahuna-Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro melakukan peningkatan pelayaran regular akses ke pulau-pulau sekitar Pulau Siau, desa sekitar pulau Siau, dan ke Pulau Tagulandang dan Pulau Biaro. Umumnya, kapal motor sebagai alat transportasi ke pulau-pulau dikelola dan dioperasikan langsung oleh masyarakat atau sektor swasta. Kapal Ferry milik Pemerintah Kabupaten hanya melakukan pelayaran rutin ke Pelabuhan Bitung. Implikasinya bagi Pemerintah Kabupaten yaitu meningkatkan fasilitas keselamatan pelayaran di Pelabuhan Utama dan Pelabuhan di pulau-pulau, serta meningkatkan akses jalan ke desa dan objek-objek wisata.

B. Kabupaten Kepulauan Sangihe

Konsep pengembangan Kawasan Perkotaan Wilayah Kota Tahuna adalah dengan melakukan konservasi kawasan mangrove (bakau) di beberapa lokasi yaitu di Kecamatan Tahuna berdekatan dengan lokasi Pasar Tradisional Towo dan terminal angkutan dalam dan luar kota; dan lokasi hutan mangrove di Kecamatan Tahuna Timur terletak di sekitar permukiman penduduk dan Pelabuhan Regional Tahuna. Kedua lokasi konservasi hutan mangrove dalam wilayah Kota Tahuna berdampingan dengan fasilitas umum publik (Pasar Tradisional, Terminal Angkutan Umum dalam kota dan Pelabuhan Regional) serta permukiman penduduk. Kawasan konservasi hutan mangrove tengah kota dikembangkan menjadi hutan lindung dan disekitar hutan dikembangkan lokasi kegiatan ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengembangkan revitalisasi dan meningkatkan lingkungan permukiman wilayah pesisir yang terarah pada desa-desa dengan mayoritas penduduknya adalah nelayan, mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan mengoptimalkan sumber

daya laut, meningkatkan kapasitas peran BUMDes sebagai pusat penggerak ekonomi desa, serta meningkatkan aksesibilitas transportasi darat dan laut yang menghubungkan antar desa. Pemerintah Kabupaten juga melakukan pengembangan permukiman penduduk perdesaan serta mendorong pusat pertumbuhan melalui pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana penunjang yang berwawasan lingkungan, peningkatan prasarana dan sarana dasar kebutuhan penduduk desa guna mendukung pengembangan ekonomi, pengembangan potensi bahari sebagai kawasan andalan laut daerah dan nasional, serta pengembangan kawasan budidaya lainnya.

Arah kebijakan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama dengan Pemerintah Provinsi mendorong dan mengoptimalkan peran Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Dhago sebagai pusat pengembangan perikanan tangkap dan budidaya tersebar di sepanjang pesisir wilayah potensial yang dilakukan oleh penduduk setempat. Kegiatan perikanan tersebut didukung dengan fasilitas penunjang untuk pengembangan kegiatan pengolahan dan pengepakan agar dapat dipasarkan ke daerah lain dan ke pasar internasional melalui Pelabuhan Bitung dan Bandara Sam Ratulangi Manado.

Potensi wisata bahari, ditempatkan menjadi objek peningkatan kegiatan ekonomi desa pesisir dengan mengembangkan kawasan Taman Laut Pulau Bukide Kecamatan Nusa Tabukan, Taman Laut Pulau Beeng Kecamatan Tabukan Selatan Tengah serta Taman Laut Pulau Dakupang dan Pulau Para Kecamatan Tatoareng. Peningkatan jaringan perhubungan darat dan laut didorong oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan untuk mengembangkan potensi bahari dan wilayah pesisir.

C.Kabupaten Kepulauan Talaud

Pengembangan wilayah kepulauan perbatasan dengan Filipina Selatan sebagai kawasan pengembangan ekonomi wilayah perbatasan, mengedepankan sub-sektor perikanan terintegrasi yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan memanfaatkan kedekatan jarak pelayaran laut menuju General Santos—kota pusat kegiatan pengolahan ikan di wilayah negara tetangga Filipina. Pemanfaatan sumberdaya alam laut di kabupaten ini didukung dengan ketersediaan pusat kegiatan perikanan Salibabu—yang memiliki SKPT Desa Dalum Salibabu. Peran SKPT dapat ditingkatkan untuk melakukan pengolahan tahap awal hasil tangkapan perikanan di wilayah sekitar Kabupaten Kepulauan Talaud, sebelum hasil produk perikanan dikirim atau diekpor ke General Santos (Filipina), atau dikirim ke Kota Bitung sebagai bahan baku pengolahan ikan kaleng.

Wilayah daratan Pulau Karakelang, diarahkan pada pengembangan pusat kegiatan koridor ekonomi Lirung-Melonguane dan sekitarnya. Kedua kota ini terletak di pulau yang berbeda dan dipisahkan oleh selat Lirung-Melong dengan jarak tempuh penyeberangan laut sekitar 15 menit. Wilayah koridor Lirung-Melonguane didukung dengan beberapa desa terletak di daratan kedua pulau tersebut. Pelabuhan Lirung digunakan sebagai Pelabuhan Utama (nusantara dan regional) yang digunakan oleh perusahan pelayaran yang melayani pelayaran regular penumpang dan barang dengan

daerah tujuan Manado, Bitung, Tahuna, dan pelabuhan kecil lainnya di wilayah Kabupaten Talaud.

Di sekitar wilayah daratan Pulau Karakelang dikembangkan pusat kegiatan yaitu pada bagian tengah dan utara pulau tersebut, dimana kegiatannya terkonsentrasi di Kota Beo (kota kecil), yang berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi wilayah disekitarnya yang menjangkau sampai ke wilayah bagian utara desa-desa yang terletak di Pulau Karakelang dan beberapa desa yang tersebar di wilayah bagian utara. Kota Beo dikenal dengan Pelabuhan Lokal yang melayani pelayaran regular Beo-Melonguane-Lirung-Manado (pulang-pergi/pp) dengan kapal penumpang lokal. Pada wilayah pesisir sebelah timur Pulau Karakelang dikembangkan Desa Rainis sebagai pusat kegiatan kecamatan dan ekonomi. Desa Rainis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi melayani desa–desa yang berlokasi di sepanjang pantai timur. Di wilayah pulau besar Salibabu, pusat kegiatan terkosentrasi di sekitar kota Lirung dan di Desa Dalum sebagai lokasi pusat pendaratan dan pengolahan ikan SKPT Salibabu. Selain di lokasi antara kedua Pulau Salibabu dan Pulau Karakelang, dikembangkan objek wisata pantai Pulau Sara Besar dan Pulau Sara Kecil dengan pantai pasir putih yang menjadi ikon dari wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Wilayah Kepulauan Talaud yang memiliki banyak objek wisata pantai dan laut, taman laut, serta pulau-pulau yang memiliki pantai indah untuk lokasi *snorkeling*, serta lokasi untuk penangkapan ikan secara alami dengan konsep yang disebut “Manee”, yaitu kearifan lokal yang rutin dilaksanakan masyarakat setempat untuk menangkap ikan tanpa menggunakan alat tangkap. Manee merupakan warisan leluhur yang menjadi budaya local dengan konsep ramah lingkungan yang dilestarikan dan secara regular dilakukan masyarakat setempat. Kegiatan ramah lingkungan yang dilaksanakan masyarakat menjadi potensi objek wisata menarik bagi para pelancong yang berkunjung dan ingin menyaksikan objek wisata budaya dan alam bahari. Kegiatan masyarakat seperti melakukan Manee, memungkinkan untuk dikembangkan Pemerintah Daerah berkerjasama dengan pihak swasta, dan masyarakat, seperti *community base eco-tourism*, memiliki potensi untuk dikembangkan di beberapa pulau kecil di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kecenderungan setiap daerah adalah untuk menyiapkan objek wisata berbasis sumber daya alam yang memiliki keunikan dan daya tarik khusus yang dikembangkan dan menjadi ikon daerah, sehingga wisatawan yang datang dapat mengunjungi objek wisata unik yang disiapkan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat setempat.

Wilayah kepulauan dan perbatasan melaksanakan konsep pengembangan wilayah melalui pengembangan potensi alam lokal bidang industri pariwisata berbasis keunikan sumberdaya alam, pengembangan komoditi lokal hortikultura dan perkebunan, serta peningkatan usaha penangkapan dan budidaya ikan untuk diekspor ke luar daerah dan mancanegara. Usaha pengembangan daerah mengoptimalkan potensi lokal membutuhkan dukungan konektivitas laut, darat, dan udara sebagai akses antar kabupaten dan ke Pelabuhan Manado dan Bitung yang merupakan pintu utama menuju pasar domestik dan internasional.

5.2.2.Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya

Pada Klaster wilayah Bolaang Mongondow Raya terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang langsung berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, dimana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango.

Wilayah di antara 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tidak dihubungkan dengan jalan secara langsung dari bagian utara menuju ke bagian selatan dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena di kedua kabupaten tersebut terdapat hutan lindung "Dumoga Bone Nani Wartabone" yang terletak memanjang punggung peninsula pulau Sulawesi. Sebelah timur lokasi hutan lindung berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow, pada bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan di bagian barat dengan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, keduanya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Gorontalo. Dengan kata lain Taman Nasional "Dumoga Bone Nani Warta Bone" dikelilingi oleh 5 kabupaten, 3 kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan 2 kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Gorontalo.

Adapun akses yang memungkinkan sebagai penghubung bagian pantai utara (Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) dengan bagian pantai selatan (Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) adalah melalui jalan akses diagonal dari Kota Lolak—Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow—memotong ke bagian tengah daratan Bolaang Mongondow Raya sebagai pusat pengembangan lumbung pangan padi—ke daratan Dumoga-Doloduo—menuju ke bagian selatan sampai ke Molibagu—ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Akses ini dikenal dengan sebutan jalan diagonal Lolak-Pindol-Dumoga-Molibagu, sebagai akses utama jaringan perhubungan untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam wilayah tersebut. Akses jalan diagonal utara-selatan Lolak-Pindol-Dumoga-Molibagu melalui daerah dengan potensi pertanian lahan kering untuk budidaya jagung dan kelapa, serta lahan basah—sawah dengan irigasi teknis—daratan Dumoga dan Doloduo dan wilayah permukiman penduduk transmigrant. Mereka yang berperan sebagai penggerak pengembangan lumbung pangan padi wilayah Bolaang Mongondow.

Selain itu, pantai utara memiliki Pelabuhan regional/lokal Labuhan Uki, yang memungkinkan dan memudahkan peran sebagai pusat distribusi bahan impor dari luar daerah, seperti barang -barang dari Pulau Jawa yang dibongkar dan muat di pelabuhan tersebut, untuk kemudian didistribusikan menuju wilayah pantai timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur. Sebaliknya juga dapat terjadi, produksi bahan baku dari perkebunan seperti kelapa, kakao, dan jagung serta bahan pangan lainnya dari Bolaang Mongondow, dikirim keluar daerah melalui Pelabuhan Labuhan Uki. Adapun jalan diagonal kewenangan pemerintah provinsi ini diperkirakan akan menjadi jalur utama (*back bone*) wilayah pantai

timur/selatan ke wilayah pantai utara. Kedua sisi pantai timur/selatan dan pesisir pantai bagian utara dapat diakses langsung lewat Trans Sulawesi Highway (Utara dan Timur/Selatan) menuju ke Provinsi Gorontalo. Sepanjang Kawasan sepanjang jalan diagonal diperkirakan akan cepat berkembang menjadi poros diagonal klaster cepat tumbuh Lolak-Dumoga/Doloduo-Molibagu. Poros koridor utara-timur/selatan Lolak-Dumoga dan Dumoga-Molibagu, telah menjadi koridor diagonal yang berkembang pesat di wilayah Sulawesi Utara pada masa jangka menengah dan panjang atau RPJP ke II Provinsi Sulawesi Utara.

Potensi jalan diagonal berikutnya yaitu poros diagonal Inobonto-Kotamobagu-Tutuyan [Boltim] (I-K-T) dan Inobonto-Kotamobagu-Molibagu [Bolsel] (I-K-M) ke pantai timur/selatan melewati Trans Sulawesi bagian tengah yang dikenal dengan jalan Amurang-Kotamobagu-Doloduo. Akses jalan jalur cepat yang dibangun dengan biaya APBN (bersumber dari pinjaman Bank Dunia) yang dibangun oleh Kontraktor Korea Selatan dan Perusahaan Pembangunan Jalan Jepang (JBIC) pada tahun 1970-an. Jalur trans bagian tengah ini dibuka untuk mendorong percepatan pembangunan Kawasan Lumbung Pangan (Dumoga sekitarnya)—yang didukung dengan 2 bendungan Torout dan Kasinggolan terletak di tepi Kawasan Hutan Lindung Nani Wartabone.

Pembukaan akses diagonal Inobonto-Kotamobagu-Tutuyan (I-K-T) adalah bagian dari pembukaan akses jalur cepat tumbuh di wilayah Bolaang Mongondow Raya. Wilayah Kota Kotamobagu dan sekitarnya akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah bagian tengah, yang didukung dengan pusat logistik “Dry Port” Kotamobagu dan Kawasan Industri Mongondow (KIMONG) di bagian sebelah Timur-Utara Kabupaten Bolaang Mongondow, yang terletak di bagian sebelah utara wilayah Kota Kotamobagu. Selain itu akan ditunjang dengan berkembangnya wilayah pantai timur/selatan yang semakin berkembang yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan ibukotanya Tutuyan dan wilayah pertambangan emas di bagian barat Bolaang Mongondow Timur dan bagian sebelah timur Kota Kotamobagu. Demikian juga di bagian sebelah barat kota didukung dengan wilayah lumbung pangan daratan Dumoga.

Analisa potensi kawasan yang berkembang dan mengelilingi Kota Kotamobagu, mempercepat kota tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa pemerintahan, perdagangan, perbankan, dan jasa keuangan regional. Akses jalan yang telah terbangun serta pembukaan jalan lingkar Kota Kotamobagu dan rencana pembangunan “Dry Port” di wilayah Kotamobagu di sepanjang *ringroad* akses ke Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow bagian utara. Bersamaan dilakukan pengembangan objek wisata budaya dan wisata alam di dalam kota Kotamobagu, semakin mempercepat pengembangan Kota Kotamobagu sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan dan Hub Transit di antara 3 kabupaten (Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan).

Wilayah Kota Kotamobagu sedang berbenah menyiapkan fasilitas-fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh kabupaten tetangga seperti *Dry Port*—sebagai pusat logistik dan penyimpanan barang dalam ruangan atau

gudang tertutup, *cold storage* bahan pangan hortikultura, dan ruang terbuka *"open space"* untuk terminal *container yard* dengan ukuran kontainer berkapasitas 20" feet dan 40" feet, yaitu kontainer yang transit dari Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Labuhan Uki dan Pelabuhan Anggrek, Gorontalo. Semua barang dalam kontainer yang akan didistribusikan di wilayah Kotamobagu, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow terbuka untuk menggunakan fasilitas tersebut. Adanya fasilitas *Dry Port* akan memberi kemudahan yaitu: 1) Semua jenis barang yang dibutuhkan di beberapa kabupaten dan kota dapat menggunakan fasilitas dalam wilayah *Dry Port* untuk penyimpanan dalam gudang atau di gudang terbuka *container yard*; 2) Lokasi *Dry Port* menyediakan container kosong (*empty container*) yang dapat digunakan oleh pedagang (ekportir dan importir) untuk pengiriman barang dan komoditi yang akan diekspor (ke dalam dan luar negeri); 3) Menjadi titik simpul ekspor komoditi lokal (dari wilayah Kotamobagu dan kabupaten terdekat) atau pintu masuk dan keluar barang dari luar negeri dan dalam negeri dimana dapat dilakukan pemeriksaan Bea Cukai (Custom), Karantina (Quarantine) sebelum kontainer di kirim ke Pelabuhan laut dan udara untuk di ekspor.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lokasinya berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo khususnya dengan Kabupaten Gorontalo Utara. Wilayah perbatasan menjadi perhatian pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam mengembangkan pusat kegiatan ekonomi, antara lain dengan menarik sebagian warga dari kabupaten tetangga menggunakan fasilitas kegiatan ekonomi untuk berbelanja kebutuhan pokok. Dalam kenyataannya, sebagian masyarakat di perbatasan dari kedua kabupaten berinteraksi dalam kegiatan ekonomi dan sosial—yang telah berlangsung lama tanpa mengenal batas wilayah berbeda provinsi dan kabupaten.

Potensi perikanan, perkebunan, pertanian tanaman pangan, serta industri pariwisata, memungkinkan sebagian kegiatan ekonomi terintegrasi dengan wilayah kabupaten Bolaang Mongondow yang juga telah terintegrasi dengan akses Trans Sulawesi *Highway* lintas utara menghubungkan kota Manado dan Kota Gorontalo. Poros jalan Trans Sulawesi Highway menjadi jalur penting menggerakan ekonomi di kedua kabupaten tersebut untuk akses ke pelabuhan untuk pengiriman dan penerimaan barang dari dan ke luar daerah serta akses ke pusat kegiatan ekonomi provinsi.

Aksesibilitas jaringan jalan nasional dan jaringan perhubungan laut—yang dikelola oleh perusahaan pelayaran lokal menghubungkan antar desa dengan kota Manado dan kota Kwandang di Gorontalo, sampai akses ke kota Toli-toli di wilayah Sulawesi Tengah. Jalur pelayaran Manado-Bintauna-Boroko-Kuandang-Toli-toli, sudah terbangun sejak masa penjajahan untuk jalur pengangkutan hasil bumi seperti cengkeh, kopra, dan tanaman perkebunan lainnya menuju pasar internasional.

Wilayah koridor pantai Timur/Selatan menghubungkan beberapa kabupaten yang menghadap Teluk Tomini seperti Kabupaten Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan bahkan menjadi akses sampai ke Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Jalur pantai Timur/Selatan dihubungkan dengan Trans Sulawesi *Highway* Pantai Timur/Selatan yang telah dibangun sejak awal tahun 90-an secara bertahap,

hingga menghubungkan Pelabuhan Bitung dengan Pelabuhan Gorontalo melalui darat serta melalui transportasi laut.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur memiliki pontensi perikanan, pariwisata dan perkebunan. Kedua daerah ini relatif berkembang cepat, menyusul daerah sekitar yang telah berkembang lebih awal, disebabkan dengan dibukanya akses jalan nasional dan pelayaran lokal di pantai timur yang memungkinkan akses ke Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Belang dan Pelabuhan Kota Gorontalo. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terfokus pada pengembangan pesisir pantai selatan dengan pengembangan pelabuhan lokal untuk akses ke Bitung dan ke Kota Gorontalo. Berbeda dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang terarah pada pengembangan pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan di Kota Tutuyan—kota kecil yang dikembangkan sejak terbentuknya kabupaten tersebut. Pengembangan koridor pantai timur/selatan membutuhkan dukungan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di pantai timur dengan akses ke Belang/Ratahan dan Bitung serta akses ke Kota Kotamobagu sebagai magnet utama kegiatan ekonomi dan sosial, karena kedekatan jarak dan sejarah kewilayahan yang dulunya menyatu dalam satu kabupaten induk.

Ekonomi lokal Kabupaten Bolaang Mongondow Timur didukung dengan potensi perikanan dan kelautan, pertambangan, perkebunan, serta pariwisata dengan dikembangkannya objek wisata baru berbasis alam pegunungan dan pantai yang menjadi primadona wisata, berperan sebagai mesin utama yang menggerakan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Sepanjang pantai timur berhadapan dengan Teluk Tomini memiliki potensi sumberdaya alam (perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata) dengan prospek besar untuk dikembangkan menjadi potensi ekonomi daerah beberapa kabupaten yang dilalui Trans Sulawesi Highway Pantai Timur/Selatan. Di masa mendatang, jalur ini akan semakin berkembang dengan dibukanya jalur kereta cepat (*railway*) Bitung-Gorontalo.

5.2.3.Klaster Wilayah Minahasa Bagian Tengah (Selatan, Tenggara,Induk, dan Tomohon)

Klaster Wilayah Minahasa bagian tengah meliputi beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan Kota Tomohon. Klaster ini memiliki beberapa pusat pertumbuhan ekonomi dan koridor pengembangan cepat tumbuh,seperti wilayah Koridor Tumpaan-Amurang, Motoling-Tompaso Baru, Modoinding-sekitar Danau Moat, Koridor Ratahan-Belang-Ratatotok, Tombatu-Silian-Amurang (yang merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Selatan), Koridor Langowan-Kakas, Kawangkoan-Tompaso, Tondano-Tomohon (mencakup dua wilayah administrasi yaitu Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon) danTanawangko-Kalasey.

Koridor Kawasan Minahasa memiliki potensi pengembangan kawasan cepat tumbuh pada wilayah-wilayah kabupaten dan kota. Tantangan pengembangan koridor antara lain adanya kebutuhan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan penertiban alih fungsi lahan, pemenuhan

fasilitas kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi yang relatif terbatas, serta kebutuhan infrastruktur dasar seperti tambahan kebutuhan energi listrik, dan jaringan telekomunikasi. Dimana kedua bidang tersebut bukan kewenangan daerah namun kewenangan pemerintah nasional melalui BUMN. Selain juga adanya kebutuhan peningkatan kualitas akses jaringan jalan dan sarana transportasi publik yang menghubungkan wilayah koridor cepat tumbuh. Pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut dapat mendorong percepatan perkembangan kawasan dan memberikan manfaat pada wilayah sekitar, sehingga perlu didukung pemerintah daerah.

Sebagian wilayah koridor yang telah berkembang, jika dilakukan tanpa perencanaan kawasan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang, pada pengembangan Kawasan di masa mendatang akan berdampak pada kebutuhan untuk penyesuaian dan pengawasan serta penertiban tindakan masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan. Konsep pengembangan klaster ditujukan untuk memacu akselerasi pembangunan wilayah melalui pengembangan pantai timur/selatan melalui sub-sektor perikanan dan sub-sektor perkebunan, sektor transportasi laut dan darat di wilayah pesisir sepanjang wilayah pantai timur/selatan di Kabupaten Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan, yang diharapkan dapat menjadi magnet baru penggerak ekonomi kawasan koridor pantai timur/selatan Sulawesi Utara.

A.Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano

DAS Tondano mencakup beberapa wilayah kabupaten (Minahasa, Minahasa Utara) dan beberapa wilayah kota (Tomohon, Manado, dan Bitung) dan yang memiliki peran besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Minahasa Raya termasuk Kota Manado dan Bitung. DAS Tondano menjadi sumber utama air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, industri, pertanian dan perkebunan. Menjadi sektor utama dalam memberikan kontribusi terhadap bahan pangan kebutuhan dasar dan pemberi sumber pekerjaan bagi sebagian masyarakat di wilayah tersebut.

Alternatif memelihara sumber air baku utama di wilayah perdesaan dan perkotaan adalah dengan menciptakan kerjasama antar pemerintah daerah dan masyarakat (*collaborative governance*) untuk melanjutkan pemeliharaan sumber air DAS dengan menghutankan kembali wilayah sekitar DAS yang dapat dilaksanakan oleh penduduk lokal masing-masing desa/kelurahan dengan didukung oleh pihak LSM dan swasta, serta pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Selain secara ketat pemerintah daerah membatasi terjadinya alih fungsi lahan perkebunan menjadi wilayah permukiman dan pertokoan yang ramai berkembang di setiap daerah, serta pemeliharaan kawasan kawasan sumber mata air untuk dilanjutkan dengan upaya penghutanan kembali kawasan sekitar sumber air.

5.2.4. Klaster Wilayah Bagian Utara Mencakup Kota Manado-Minahasa Utara-Kota Bitung Sebagai Wilayah Cepat Tumbuh di Sulawesi Utara

Klaster wilayah (Manado-Minut-Bitung) disiapkan sejak awal tahun 2000an bersamaan dengan dibentuknya Badan Kawasan Ekonomi Terpadu

Manado-Bitung (KAPET) sebagai *growth centre* di bagian utara Kawasan Timur Indonesia. Pusat pertumbuhan (*growth centre*) ini didukung oleh 2 *growth poles* (Kota Manado dan Kota Bitung)—yang memiliki bandara internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung menjadi pusat *transhipment* penumpang dan barang dari provinsi sekitar Kawasan Timur bagian utara.

Sejak awal berlangsungnya otonomi daerah, wilayah cepat tumbuh (Manado-Minut-Bitung) telah berkembang lebih awal sebelum daerah-daerah lain dipacu pembangunannya. Klaster wilayah cepat tumbuh di Sulawesi Utara dipersiapkan sejak awal kebutuhan infrastruktur dasar dan sosial serta fasilitas penunjang sebagai syarat untuk penggerak utama suatu kawasan dapat bergerak lebih cepat serta dapat mempengaruhi berkembang pada daerah sekitar sebagai wilayah penyangga yang menyediakan bahan baku dan tenaga kerja.

Beberapa indikator pembangunan daerah di wilayah cepat tumbuh, dipengaruhi oleh sejarah masa lalu seperti pusat pelayanan Pendidikan dan Kesehatan terdapat diwilayah ini, yang telah berkembang relatif baik. Menyebabkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif memiliki angka yang tinggi dibandingkan dengan klaster wilayah yang lain. Demikian juga terjadi pada indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita relatif tertinggi di Sulawesi Utara, selain memiliki lokasi strategis di Kawasan Timur bagian utara berhadapan langsung dengan wilayah Asia Timur dan Pacific. Beberapa hal inilah yang membuat klaster wilayah cepat tumbuh memiliki kontribusi terhadap ekonomi Sulawesi Utara sebesar 51% pada total PDRB harga konstan.

Peran Kawasan cepat tumbuh Manado-Minahasa Utara-Bitung memiliki peran strategis dalam upaya percepatan berfungsinya Super Hub Sulut. Sebab lokasi 2 infrastruktur dasar utama (Bandara Internasional dan Pelabuhan Hub Internasional), serta 2 lokasi KEK (Bitung dan Likupang), serta infrastruktur dasar lainnya seperti pusat beberapa lokasi pembangkit listrik gunakan geothermal, air, dan sinar matahari, sebagai syarat utama pengembangan industri pengolahan *yang ramah lingkungan, towards a green industry*

A.Super Hub Sulawesi Utara

Kawasan ini mencakup wilayah Kota Manado, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa Utara, serta Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu. Masing-masing daerah tercakup dalam konsep Super Hub Sulawesi Utara yang memiliki infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung untuk terwujudnya *inter-connectivity* pusat kegiatan ekonomi dan pusat pengolahan produk lokal serta objek wisata berbasis sumberdaya alam seperti pesisir pantai, laut, pegunungan dan kawasan hutan lindung.

Integrasi kawasan potensial ekonomi yang didukung dengan infrastruktur dasar dan sosial yang memadai melalui jaringan perhubungan (*connectivity*) darat, laut dan udara yaitu akses ke provinsi sekitar dan ke mancanegara. Ditunjang dengan tenaga kerja berkualitas di bidang logistik, jasa, dan industri pengolahan, menjadi syarat utama bagi Kawasan Sulawesi Utara dapat berperan sebagai Super Hub di Kawasan Timur Indonesia bagian

Utara. Kawasan ini dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru *growth centre* di KTI yang dapat diwujudkan melalui Kerjasama Pemerintah dan Pemda (*collaborative governance*).

B.Kawasan Kerjasama Regional dengan Negara Tetangga

Lokasi Sulawesi Utara berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Negara Philippines—yang merupakan negara kepulauan seperti Indonesia—memposisikan Sulawesi Utara sebagai provinsi kepulauan yang memiliki hubungan transportasi dan perdagangan yang berkembang sejak masa nenek moyang penduduk Sulawesi Utara. Dikenal pada saat itu dengan *"Ancient Trade"* antara Filipinos (orang Mindanau Selatan) dengan penduduk kepulauan yang bermukim di wilayah Talaud dan Sangihe dan telah memiliki hubungan dalam waktu yang relatif panjang.

C.Kerja Sama Regional

Indonesia adalah anggota Kerja Sama Regional ASEAN *(Association of Southeast Asian Nation*) bersama-sama dengan 9 (sembilan) negara anggota lainnya yaitu: Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. Tujuannya adalah:

- Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di Kawasan ASEAN
- Untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara
- Meningkatkan kerjasama aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan administrasi.

Kerja Sama Sub-Regional (BIMP-EAGA) yang dimulai sejak tahun 1994, sejak itulah Provinsi Sulawesi Utara dilibatkan langsung secara aktif oleh Pemerintah, dalam forum kerja internasional. Kerja Sama Ekonomi Sub-Regional (KESR) merupakan forum kerjasama ekonomi antar wilayah lintas negara yang berdekatan secara geografis, diantaranya IMT-GT (*Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle* dan BIMP-EAGA (*Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area*). Cakupan wilayah Indonesia untuk IMT-GT adalah seluruh pulau Sumatera, sedangkan cakupan wilayah Indonesia untuk BIMP-EAGA adalah seluruh pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. BIMP-EAGA disebut juga "*Building Block of ASEAN*". Tujuannya adalah:

- Mendorong terjadinya peningkatan kerja sama ekonomi antara daerah-daerah di Indonesia dengan daerah-daerah di wilayah negara lain yang secara geografis saling berdekatan.
- Memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta membantu program pengentasan kemiskinan daerah.
- Meningkatan kualitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia di daerah (baik sumber daya alam maupun manusia).
- KESR diharapkan dapat menjadi salah satu modalitas untuk mendorong prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat daerah dalam meningkatkan pemberdayaan potensi ekonomi di wilayah masing-masing.

- Menunjang kesiapan daerah dalam menghadapi era liberalisasi ekonomi dan perdagangan dunia, baik dalam rangka ASEAN, RCEP, TPP maupun perdagangan dunia dalam lingkup yang lebih luas.

Sasaran utama dari kerja sama sub regional ini adalah percepatan peningkatan perdagangan, pariwisata dan investasi (*TTI/Trade, Tourism and Investment*). BIMP-EAGA terhubung dengan beberapa *Development Partner*, antara lain: ADB, JICA, China dan Northern Territory dalam memberikan *Technical Assistance* dan bantuan Dana – Soft Loan.

D.Sulawesi Utara dan KESR-BIMP EAGA

Sejak berdirinya kerja sama ini, pemerintah provinsi selaku perwakilan pemerintah di daerah telah memfasilitasi beberapa program/kegiatan yang sudah dilakukan antara lain:

- *Launching* pelayaran kargo langsung dari Bitung ke Davao pada tahun 2017
- Pembukaan kembali penerbangan langsung Manado-Davao di tahun 2019 namun ditutup pada saat pandemi Covid-19, tepatnya pada awal Maret 2020.
- Promosi potensi komoditi pertanian/perkebunan, pariwisata dan perdagangan ekspor/impor pada acara *Trade Expo* (sebelum pandemi-Covid-19).
- Penyusunan proposal "*BIMP-EAGA BUSINESS CENTER"* di Sulawesi Utara yang menjadi ***pilot project,*** *Business Center* akan dimanfaatkan oleh UMKM untuk meningkatkn kualitas/kuantitas produk sehingga dapat diekspor, berkelanjutan sesuai dengan permintaan pasar internasional dengan sistim *off/on-line business.* Melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut mendapat bantuan/asistensi dari Kementerian Koperasi/UMKM-RI dan Kementerian Perdagangan – RI.

Program/Kegiatan yang akan dilanjutkan adalah :

- Pemanfaatan konektifitas laut Bitung-Davao dengan mengajak para *exporter/importer*, *trader*, s*hips-owner*, konsolidator dan pelaku usaha lainnya
- *Roadshow* ke provinsi tetangga untuk mempromosikan jalur yang sudah ada
- Pembukaan kembali penerbangan langsung Manado-Davao
- Merintis kerja sama dengan Mindanau Selatan-Filipina di bidang Pendidikan, Pariwisata, UMKM dan Perikanan/Pertanian/Perkebunan
- Menghidupkan kembali "Sister City" antara Manado, Bitung dengan Davao City-Filipina dan peluang untuk kabupaten/kota lain antara dua wilayah

Program dan kegiatan yang dijelaskan diatas telah diakomodasi melalui dokumen perencanaan provinsi yaitu RPJMD dan RKPD sejak Pemerintah menetapkan kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah, setelah berlakunya otonomi daerah pada tahun 2000/2001 di seluruh Indonesia.

5.3. Lingkungan Dan Isu Strategis

Ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah dan kabupaten/kota menjadi issue strategis pada pengembangan wilayah antar kabupaten dalam satu kawasan, dimana terjadi perbedaan pembangunan dan pengembangan antar kabupaten dalam satu kawasan. Masalah kemiskinan tercatat pada tahun 2020, dimana pada klaster wilayah Bolaang Mongondow khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) tercatat tingkat kemiskinan relatif tinggi sebesar 12,77 persen dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) memiliki tingkat kemiskinan sebesar 8,41 persen. Kedua kabupaten (Bolmut dan Bolsel) lokasinya berbatasan langsung dengan provinsi tetangga Gorontalo. Sedangkan Kabupaten Bolaang Mongodow Timur tercatat memiliki penduduk miskin relatif rendah 5,88 persen.

Pada Wilayah Klaster Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat tingkat kemiskinan sebesar 11,14 persen, di Kabupaten Kepulauan Talaud tercatat tingkat kemiskinan sebesar 9,49 persen dan di Kabupaten Kepulauan Sitaro tercatat tingkat kemiskinan sebesar 8,94 persen. Di Wilayah Klaster Minahasa-Manado-Bitung, tingkat kemiskinan tahun 2020 tercatat di Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 12,30 persen dan Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 9,14 persen. Di antara Kota-Kota di Sulawesi Utara, Kota Bitung mencatat kemiskinan sebesar 6,41% dan kota yang memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu Kota Kotamobagu 5,42 persen.

Terjadi ketimpangan pendapatan di antara kelompok masyarakat dan antar wilayah klaster dengan masih relatif tinggi Gini Ratio Sulawesi Utara 2020 terindikasi sebesar 0,36. Konsentrasi kegiatan ekonomi produktif terfokus pada wilayah Kota Bitung, Manado, dan Kabupaten Minahasa Utara, serta sebagian kegiatan industri pengolahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan kondisi terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas masih terjadi di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan perbatasan. Demikian juga, pengembangan ekonomi lokal belum optimal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan perbatasan.

Faktor lainnya penyebab ketimpangan antar wilayah antara lain belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Hal ini ditandai dengan:

a) Rendahnya kemajuan operasional Pusat Pertumbuhan Wilayah (seperti 2 KEK, 1 Kawasan Industri, dan 2 SKPT di wilayah kepulauan), serta peran kota menengah kecil di setiap wilayah klaster yang belum berperan optimal;
b) Lemahnya konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan; dan
c) Belum berkembangnya kawasan strategis kabupaten; dan
d) Pengelolaan urbanisasi juga belum optimal;

Peningkatan jumlah penduduk di wilayah perkotaan berkontribusi memberikan tekanan pada kawasan perkotaan, menurunkan kesejahteraan, dan menyebabkan sebagian wilayah perkotaan tidak layak huni. Hal ini ditunjukan pada beberapa kawasan permukiman di Kota Manado dan Bitung yang sering mengalami peningkatan angka kejadian banjir, penurunan permukaan tanah, kenaikan muka air laut, dan penurunan kualitas air

sungai. Padahal wilayah Manado masih harus menampung populasi hampir 0,5 juta jiwa (Kota Manado Dalam Angka 2021, BPS), jumlah penduduk tertinggi di wilayah perkotaan yang ada di Sulawesi Utara. Pada sisi lain, kontribusi Kota Manado relatif besar terhadap terhadap PDRB Provinsi (BPS, 2018), menunjukkan dominasi Kota Manado dalam perekonomian Sulawesi Utara dan tingginya kesenjangan dengan wilayah lain yang ditunjukkan oleh indikator IPM.

Penurunan kesenjangan antar wilayah dan kondisi perkotaan dapat diatasi melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Namun, kondisi saat ini belum tercapai, karena:

1. Baru sebatas beberapa kecamatan dalam kabupaten/kota mencapai target mewujudkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) walaupun masih menunggu untuk ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Belum tersedianya peta dasar skala 1:5.000 sebagai dasar penyusunan RDTR;
3. Belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; dan
4. Terdapatnya tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang diintegrasikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, penetapan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memunculkan berbagai isu antara lain masih banyaknya peraturan perundang-undangan turunan UU No. 23/2014 yang belum ditetapkan;

1. Belum harmonisnya peraturan pelaksana dengan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya;
2. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer daerah dalam pembiayaan pembangunan;
3. Terbatasnya kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mendukung prioritas nasional; serta
4. Tingginya dinamika politik lokal yang menyebabkan hambatan dalam pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan Wilayah Sulawesi Utara menghadapi berbagai permasalahan, seperti:

a. Belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis sumberdaya alam;
b. Belum terwujudnya pengembangan dan peran Pelabuhan Hub Internasional untuk Kawasan Timur Indonesia;
c. Belum terwujudnya kelembagaan dan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung;
d. Masih lemahnya upaya kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi bencana;
e. Masih terbatasnya akses dan mutu layanan dasar;
f. Belum optimalnya peningkatan produktivitas sektor tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan untuk mendukung peran Sulawesi Utara sebagai lumbung pangan nasional;

g. Belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pengelola Kawasan Regional untuk fasilitas dasar bagi masyarakat seperti: air bersih, sanitasi, dan pengolahan sampah; dan

Masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan dan perdesaan.

5.4. Kondisi Provinsi Sulawesi Utara terhadap Pengarusutamaan dalam RPJMN 2020 – 2024

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, maka RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keempat pengarusutamaan tersebut mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif.

Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintah yang baik.

Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) 2018, Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan kelas resiko sedang untuk resiko bencana dan berada di perangkat ke 25 dari 34 provinsi. Ancaman bencana yang dihadapi beragam yaitu gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim/abrasi, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim dan tsunami. Adapun pemetaan indeks resiko bencana tiap kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.1.Tingkat resiko bencana kabupaten/kota berdasarkan IRBI 2018

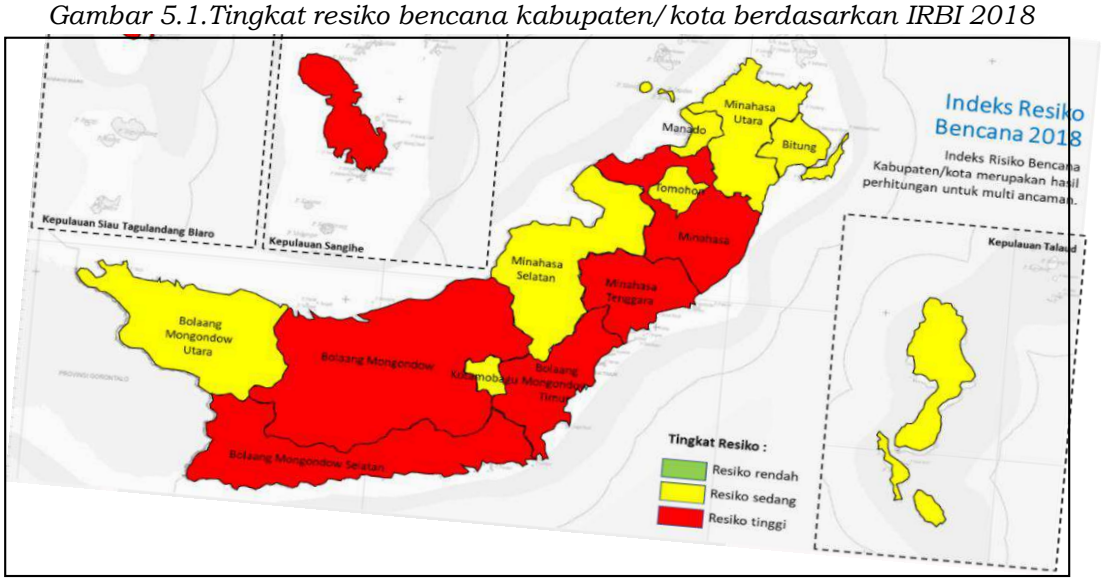

Gambar di atas menjelaskan sebaran tingkat resiko bencana di 15 kabupaten/kota dimana terdapat 8 kabupaten/kota berada pada tingkat resiko sedang dan 7 kabupaten berada pada tingkat resiko tinggi. 3 klaster didominasi oleh kabupaten dengan resiko bencana tingkat tinggi, sedangkan 1 klaster yaitu Klaster Manado – Minahasa Utara – Bitung merupakan klaster dengan resiko bencana tingkat sedang. Kondisi tingkat resiko bencana kabupaten/kota tahun 2015 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut, yang juga memperlihatkan tingkat resiko di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara berubah dari "tinggi" menjadi "sedang" (skor <100.69).

Tabel 5.3.Nilai Indeks Risiko Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sulawesi Utara Dari Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KLS RISIKO 2021
1	MINAHASA	212.40	212.40	212.40	205.50	205.50	205.50	199.40	TINGGI
2	MINAHASA TENGGARA	195.20	195.20	195.20	195.20	195.20	195.20	185.08	TINGGI
3	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	179.20	179.20	179.20	179.20	179.20	179.20	155.86	TINGGI
4	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	TINGGI
5	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	157.60	157.60	157.60	157.60	157.60	157.60	148.45	TINGGI
6	BOLAANG MONGONDOW UTARA	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	SEDANG
7	MINAHASA SELATAN	173.60	173.60	164.47	143.59	143.59	143.59	134.80	SEDANG
8	KEPULAUAN SANGIHE	154.40	154.40	145.78	146.47	132.74	132.74	137.34	SEDANG
9	MINAHASA UTARA	158.40	158.40	138.99	119.84	119.84	119.84	125.31	SEDANG
10	BOLAANG MONGONDOW	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	121.75	SEDANG
11	KOTA TOMOHON	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	SEDANG
12	KOTA BITUNG	163.20	163.20	144.37	125.28	109.23	109.23	100.69	SEDANG
13	KEPULAUAN TALAUD	102.80	102.80	102.80	102.80	102.80	102.80	102.80	SEDANG
14	KOTA MANADO	130.40	130.40	113.67	107.89	107.89	107.89	100.26	SEDANG
15	KOTA KOTAMOBAGU	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	74.83	SEDANG

Sumber : BNPB RI 2021

5.5. Sasaran, Indikator dan Target

Selama masa waktu 5 tahun ke depan (2021-2026)—pelaksanaan RPJMD tahap terakhir di masa waktu penyelesaian Tahapan RPJPD Sulawesi Utara 2000-2025—sasaran pembangunan kewilayahan Sulawesi Utara—memiliki 5 klaster wilayah fokus pembangunan, dengan target capaian, yaitu: penurunan kesenjangan antar klaster wilayah melalui percepatan pelaksanaan transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kepulauan dan Perbatasan (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro) serta Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur yang terletak di sepanjang pantai pesisir Timur/Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang lokasinya di pantai utara berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo—dimana kedua kabupaten ini dihubungkan dengan Trans Sulawesi. Pada waktu bersamaaan melanjutkan dan

mendorong pembangunan di klaster wilayah Minahasa Raya bagian utara dikembangkan wilayah cepat tumbuh klaster Manado-Minahasa Utara-Bitung, sebagai *growth center* di Kawasan Timur Bagian Utara Indonesia.

Sehubungan dengan fokus pembangunan berdasarkan klaster wilayah dan memperhatikan sasaran pembangunan kewilayahan cepat tumbuh, sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara 2021-2026 yaitu rata-rata berada pada range antara 6,0-7,0 persen per tahun, maka target pertumbuhan ekonomi, perkiraan kebutuhan nilai investasi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran pada tahun 2026 diperkirakan sebagai berikut.

Tabel 5.4 Target Pembangunan Wilayah Tahun 2021-2026

Wilayah Koridor/Klaster Pembangunan	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (%) 2021-2026	Kontribusi Ekonomi Regional Klaster	Kebutuhan Investasi (Rp. Tri) 2026	Tingkat Kemiskinan (%) 2026	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2026
Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro	5,0-7,5	10	7,22	7-9	2-5
Kabupaten Klaster Bolaang Mongondow Raya	6,0-8,5	15	10,26	4-9	3-5
Kabupate/Kota Klaster Minahasa Induk, Selatan/Tenggara, dan Tomohon	6,0-7,5	20	4,96	5-9	3-6
Kabupaten/Kota MInahasa Raya bagian Utara (Manado-Minahasa Utara-Bitung)	6,5-8,	55	7,81	3,6	4-7

Sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026

Sasaran pembangunan klaster kewilayahan Sulawesi Utara tahun 2022-2026, direncanakan dapat dicapai melalui lima (5) prioritas kebijakan kawasan, yaitu:

1. Pengembangan kawasan strategis pada setiap klaster wilayah;
2. Pengembangan sektor unggulan berdasarkan komoditas lokal;
3. Pengembangan kawasan perkotaan (Kota Kecil dan Kota Sedang, selain ibukota kabupaten);
4. Pembangunan daerah tertinggal wilayah daratan dan kepulauan, kawasan perbatasan kepulauan dan daratan, dan wilayah perdesaan; serta
5. Pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah

Tabel: 5.5 Sasaran/ Indikator/ Target Prioritas Pembangunan Klaster Kewilayahan Sulawesi Utara

No	Indikator Pembangunan	*Baseline* 2021	2026
Menurunnya celah/gap kesenjangan antar klaster wilayah dan antar koridor wilayah daratan dan kepulauan, dengan memacu transformasi struktur ekonomi, revitalisasi dan peningkatan konektivitas laut dan darat, dan akselerasi pembangunan wilayah kepulauan serta pesisir pantai Timur berhadapan dengan Teluk Tomini.			

No	Indikator Pembangunan	*Baseline* 2021	2026
A. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota			
1.	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/ KI/ KSPN) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per klaster/kabupaten kota)	N/A	≥1
2.	Jumlah Kawasan Pusat Pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan		
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)		2 kawasan	2 kawasan
Kawasan Pengembangan wilayah Kepulauan dan Perbatasan		1 kawasan	3 kawasan
Kawasan Industri		1 kawasan	2 kawasan
Dry Port (DP)		1 kawasan	1 kawasan
Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Provinsi		15 kawasan	20 kawasan
Kawasan Ekonomi, Industri, Logistic Hub (Pergudangan, Container Yard), dan kawasan permukuman, perkantoran, pertokoan menggunakan energi terbarukan (Low Carbon Model)		N/A)	5 kawasan
B. Pengembangan Sektor Unggulan			
a.	Kelapa	271.684 Ton	278.476 Ton
b.	Pala	11.725 Ton	12.018 Ton
c.	Cengkeh	23.851 Ton	24.447 Ton
d.	Kopi	3.767 Ton	3.861 Ton
e.	Cacao	5.819 Ton	5.964 Ton
f.	Vanilla	18 Ton	18 Ton
g.	Kayu Manis	43 Ton	44 Ton
h.	Padi	786.987 Ton	790.484 Ton
i.	Jagung	1.535.987 Ton	1.543.683 Ton
j.	Hortikultura		
-	Bawang Merah	2.915 Ton	8.858 Ton
-	Cabe Besar	3.942 Ton	4.409 Ton
-	Cabe Rawit	14.113 Ton	28.275 Ton
-	Tomat	26.783 Ton	31.894 Ton
k.	Perikanan Budidaya (Ikan dan Rumput Laut)	544.839 Ton	619.413,58 Ton
l.	Perikanan Tangkap	405.422 Ton	415.659,39 Ton
C. Pengembangan Kawasan Perkotaan			
1.	Jumlah Wilayah Metropolitan (WM) dikembangkan	1WM	1WM
2.	Jumlah Kota Kecil dikembangkan		
3.	Jumlah Kota Sedang dikembangkan		
D. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan (Laut dan Darat), Perdesaan, dan Transmigrasi			
1.	Perkembangan Status Pembangunan Desa		
a.	Desa Mandiri/Swadaya	15	33

No	Indikator Pembangunan	*Baseline* 2021	2026
	b. Desa Maju		
	c. Desa Berkembang		
	d. Desa Tertinggal		
2.	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	10,64 (2020)	6
3.	Jumlah Revitalisasi Bumdes berdasarkan status		
	a. Bumdes Berkembang		
	b. Bumdes Maju		
4.	Jumlah Revitalisasi "Bumdes Bersama" berdasarkan status		
	a. Bumdes Bersama Berkembang		
	b. Bumdes Bersama Maju		
5.	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)		
6.	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di PKSN (Kab Kepulauan Perbatasan	0,42	0,52 (standar nasional)
7.	Jumlah daerah tertinggal (kabupaten)	0	0
8.	Rata-rata IPM di kabupaten relatif tertinggal	65-68 (2020)	68-70
9.	Rata-rata nilai indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaaan Prioritas Nasional (KPPN)	51,10	58,70 (standar nasional)
E. Kelembagaan dan Keuangan Daerah			
1.	Jumlah daerah dengan penerimaan meningkat	15	15
2.	Jumlah daerah dengan realisasi belanja meningkat (Kab/Kota)		
3.	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola berkualitas (Kab/Kota)	14	15
4.	Persentase jumlah daerah yang memiliki keuangan yang efektif dan efisien Kab/Kota)	NA	10
5.	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (Kab/Kota)		15
6.	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (Kab/Kota)	NA	15
7.	Persentase capaian penerapan SPM di daerah	NA	100
8.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	2,8	3,2 (standar nasional)
9.	Jumlah lembar Peta Dasar skala 1: 5.000		Seluruh wilayah Sulawesi Utara
10.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/Provinsi		
11.	RDTR Perbatasan Negara/Perbatasan Daerah	-	
12.	Daerah yang Memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (kab/kota)	-	15
13.	Luas bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan berkualitas baik (ribu Ha)		

No	Indikator Pembangunan	*Baseline* 2021	2026
14.	Pembentukan dan operasionalisasi Bank Tanah	0	1 Bank Tanah
F. Pemenuhan Target Layanan Infrastruktur Dasar dan Pengelolaan Persampahan			
1.	Rumah Tangga menempati Hunian Layak	69,48%	70%
2.	Hunian dengan akses air minum layak	90%	100%
3.	Hunian dengan akses air minum aman	NA	15%
4.	Hunian dengan akses sanitasi layak	82%	90%
5.	Hunian dengan akses sanitasi aman	5,28%	15%
6.	Hunian dengan akses air minum perpipaan	11,35% (2020)	30%
7.	Hunian dengan akses sampah terkelola dengan baik terdiri atas:		
a.	Penanganan sampah	74%	80% (RPJMN) 70% (Jakstrada Sulut)
b.	Pengurangan sampah	24 %	20% (RPJMN) 30% (Jakstrada Sulut)

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

5.6. Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan pembangunan wilayah Sulawesi Utara 2021-2026 diarahkan untuk memperkuat dan mewujudkan peran Provinsi Sulawesi Utara menjadi pintu gerbang Indonesia dengan memanfaatkan peluang pasar global/internasional di Asia Timur (China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Philippines), dan wilayah Pasifik, sebagai pintu gerbang Indonesia Timur bagian utara; mengembangkan industri logistik, industri berbasis perikanan dan kelapa dan sawit; mewujudkan peran Provinsi Sulawesi Utara sebagai lumbung pangan padi, jagung, kelapa, dan ikan; serta akselerasi dan penguatan ekonomi mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan, kelapa, berbasis industri pengolahan perikanan, produk turunan kelapa, dan industri pariwisata bahari.

Transformasi ekonomi di wilayah Sulawesi Utara diarahkan untuk hilirisasi produk turunan perikanan, kelapa dan sawit. Industri berbasis perikanan, kelapa dan sawit, untuk menciptakan dan meningkatkan nilai tambah, dilakukan melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi yang siap di-eksport keluar dari wilayah Sulawesi Utara.

Kondisi wilayah Sulawesi Utara yang memiliki potensi bencana alam relatif beragam dan tinggi, juga menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah Sulawesi Utara,dimana kebijakan pembangunan daerah wajib memperhatikan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana. Strategi pembangunan wilayah Sulawesi Utara diprioritaskan pada pemerataan, pertumbuhan, penguatan konektivitas (laut, darat, dan udara), mitigasi dan pengurangan resiko bencana, pelaksanaan otonomi daerah serta penerapan *green economy*, sebagai berikut;

(1) Peningkatan dan penguatan pelaksanaan pelayanan dasar publik, antara lain; (a) peningkatan kualitas SDM, khususnya peningkatan akses layanan Kesehatan, Pendidikan, Pendidikan Vocational Perikanan,

Pertanian, dan Pariwisata, termasuk peningkatan Politeknik Nusa Utara; (b) percepatan pembangunan daerah kepulauan dan perbatasan, dan daerah relatif lambat akselerasi pembangunan daerah, dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal (PEL) berbasis komoditi unggulan daerah yang memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapan terhadap resiko bencana alam; (c) pemenuhan pelayanan dasar publik dan tata kelola di kecamatan perbatasan dan kecamatan kepulauan; (d) penguatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi ekonomi desa, sosial, budaya; dan (e) pembangunan afirmasi pada daerah lambat perkembangan pembangunan dan daerah kepulauan dan perbatasan.

(2) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur, dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; (c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah; dan (d) peningkatan kerja sama antar daerah otonom, termasuk wilayah pengembangan industri pengolahan, industri pariwisata, dan pengembangan wilayah kepulauan;

(3) Penguatan konektivitas dilakukan melalui: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, darat, dan udara, yang terintegrasi; dan (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;

(4) Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;

(5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat, (b) peningkatan ketahanan kawasan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan kabupaten kepulauan; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan;

(6) Pembangunan desa terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa; penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa, pengembangan desa wisata, desa digital, produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; serta pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa. Pembangunan desa terpadu juga mencakup peningkatan peran

desa pada aspek ketahanan pangan, meliputi peningkatan produktivitas pangan dan diversifikasi pangan serta perlindungan lahan pertanian pangan dari alih fungsi lahan. Pengembangan database desa perlu dilakukan, sehingga tersedia data luas lahan pangan eksisting dan yang berproduksi, produktivitas sumber pangan lokal dan distribusinya serta informasi terkait teknologi/pola tanam yang digunakan. Selanjutnya, perlu dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengupayakan stabilisasi harga pangan dan perlindungan pada LP2B mulai dari tahapan perencanaan dan penetapan, pengembangan secara komprehensif, penelitian, pemanfaatan (optimalisasi dan pembinaan pada petani mengenai total management: mulai dari persiapan masa tanam, selama masa tanam-panen, pasca panen, penanaman kembali sampai distribusi dengan memperhatikan prinsip pertanian berkelanjutan), pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan (dari berbagai sumber) serta peran serta masyarakat (petani dan non petani).

(7) Penerapan ekonomi hijau pada beberapa sector ekonomi. Ekonomi hijau adalah ekonomi yang terus tumbuh dan memberikan lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan, tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan, khususnya fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati serta mengutamakan keadilan sosial. Penerapan ekonomi hijau mencakup:

a. Sektor pertanian: memelihara dan meningkatkan produktivitas usaha tani, sekaligus menjamin ketersediaan pangan dan jasa lingkungan secara berkelanjutan, mengurangi eksternalitas negative dan secara bertahap meningkatkan eksternalitas positif yang dapat menularkan kesejahteraan pada masyarakat, membangun dan memulihkan kekayaan (sumberdaya ekologis) dengan cara mengurangi polusi dan efisiensi penggunaan sumberdaya, merestorasi dan meningkatkan kesuburan lahan melalui peningkatan penggunaan input alami, perubahan pola tanah dan terpadu dengan ternak, mengurangi erosi lahan, meningkatkan efisiensi penggunaan air dengan cara menerapkan teknologi minimum tillage dan Teknik budidaya tanaman penutup, pengurangan penggunaan pestisida dan herbisida kimia melalui penerapan pengendalian hama penyakit secara terpadu serta mengurangi kehilangan hasil produksi dengan cara perbaikan teknologi pengelolaan pasca panen.
b. Sektor kehutanan: mempertahankan peran hutan dalam penyerapan karbon, sebagai penyedia bioenergy, sebagai bahan bangunan ramah lingkungan, pengelolaan Hutan Lestari (PHL), reforestasi kawasan hutan, pemulihan hutan terdegradasi serta perluasan hutan masyarakat, pembangunan hutan tanaman (tanaman industry, tanaman karbon dan hutan konservasi), sebagai penyedia jasa lingkungan
c. Sektor perikanan dan kelautan: pengelolaan dan konservasi terumbu karang, manajemen sumber daya perikanan yang lebih baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan, penerapan prinsip dan praktek budidaya dan cara penanganan ikan yang baik,

menyelamatkan lingkungan ekosistem laut yang terdapat di sekitar wilayah CTI yang ada di wilayah laut Provinsi Sulawesi Utara.

d. Sektor energi: konservasi dan efisiensi energi, pemanfaatan energi baru dan terbarukan lewat pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air (Hidro), pengembangan PLT skala kecil berbasis energi baru terbarukan (berbasis tenaga air, sinar matahari dan angin), pengembangan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai pengganti BBM, pengembangan dan pemanfaatan limbah yang diolah menjadi sumber energi (waste to energy, zero waste), pengembangan desa mandiri energi.
e. Sektor pertambangan: penggunaan teknologi bersih di pertambangan, keberhasilan revegetasi, integrasi perencanaan reklamasi, termasuk revegetasi dengan seluruh tahapan kegiatan penambangan, reklamasi pada lahan bekas tambang yang akan berperan dalam mengurangi pemanasan global dan mekanisme dalam mengurangi pemanasan global, serta pemberdayaan masyarakat yang mendorong peningkatan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat di pertambangan yang berkelanjutan.
f. Lapangan kerja ramah lingkungan/hijau (green jobs): perubahan dari perekonomian ke perekonomian hijau akan mengurangi pekerjaan pada sector/kegiatan yang tidak ramah lingkungan berkelanjutan tetapi juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru, tergantikannya Sebagian pekerjaan dengan pekerjaan baru, transformasi profesi karena kriteria/kompetensi baru sudah menggunakan metode kerja “hijau/ramah lingkungan”. Green jobs dapat berkembang di 8 sektor kunci ekonomi hijau yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, energi, manufaktur, daur ulang, property dan transportasi.
g. Sector industri: Menyusun rencana induk pengembangan industry hijau, konservasi energi dan pengurangan emisi CO2 di sector industry, penggunaan mesin ramah lingkungan, menyiapkan standar industri hijau, menyiapkan Lembaga sertifikasi industry hijau, menyiapkan insentif bagi industry hijau, penerapan produksi bersih, penyusunan katalog material input ramah lingkungan, pengembangan sector industry unggulan berbasis teknologi tinggi
h. Perkotaan hijau/berkelanjutan: penerapan 8 atribut kota hijau yaitu perencanaan dan rancangan kota hijau (green planning), ruang terbuka (green space), pembuangan limbah (green waste), alat transportasi (green transportation), air bersih (green water), sumber energi (green energy), bangunan (green building) dan masyarakat peduli lingkungan (green community).

Pada jangka menengah, perencanaan dan penerapan ekonomi hijau di Provinsi Sulawesi Utara diarahkan untuk dimulai di Kota Bitung yang mewakili kota dengan karakteristik kota pesisir, Kota Kotamobagu yang mewakili kota yang berada di *mainland*, dan Kota Tahuna sebagai Ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mewakili daerah kepulauan. Perencanaan dan penerapan ekonomi hijau diterapkan secara bertahap (1

sektor hingga beberapa sektor) dan pada skala kawasan tertentu di setiap kota dengan arahan pada sektor – sektor di tabel berikut.

Tabel 5.6 Arahan untuk sektor yang masuk dalam perencanaan dan penerapan ekonomi hijau di Kota Bitung, Kotamobagu dan Tahuna

Kota Bitung	Kota Kotamobagu	Kota Tahuna
1. Sektor Kehutanan 2. Sektor Perikanan dan Kelautan 3. Sektor Energi 4. Lapangan kerja ramah lingkungan 5. Sektor Industri 6. Kota Hijau (mulai dari 1 hingga 8 elemen hijau)	1. Sektor Pertanian 2. Sektor Energi 3. Lapangan kerja ramah lingkungan 4. Sektor Industri 5. Kota Hijau (mulai dari 1 hingga 8 elemen hijau)	1. Sektor Pertanian 2. Sektor Kehutanan 3. Sektor Perikanan dan Kelautan 4. Sektor Energi 5. Lapangan kerja ramah lingkungan 6. Kota Hijau (mulai dari 1 hingga 8 elemen hijau)

Sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026

5.7. Strategi Pembangunan Wilayah Berdasarkan Klaster Wilayah dan Antar Klaster

A. Klaster Wilayah Kepulauan

Klaster Wilayah Kepulauan meliputi wilayah 3 kabupaten kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro. Strategi pembangunan wilayah kepulauan dan perbatasan diarahkan terutama pemerataan pembangunan, memacu pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah wilayah kepulauan, penguatan konektivitas laut dan udara, dan pengurangan resiko bencana alam, yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar publik melalui:
   a. peningkatkan kualitas SDM khususnya pada akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan vokasional/pelatihan terkait dengan perikanan, perkebunan, pertanian, dan pariwisata;
   b. percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pelayanan dasar publik, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
   c. keberpihakan dari K/L dan Dinas/Badan provinsi, serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah tertinggal klaster wilayah kepulauan dan perbatasan;
   d. pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan;
   e. percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan
   f. pelaksanaan pembangunan afirmatif.
2. Penguatan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui antara lain:
   a. pengembangan komoditas unggulan wilayah kepulauan dan perbatasan yaitu, kelapa, cengkeh, pala, kakao, kopi, perikanan tangkap dan budidaya;

b. pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP;
c. pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa pulau besar;
d. pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan;
e. pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (perkebunan dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur di SKPT, sub-SKPT, dan lokasi-lokasi yang telah memiliki fasilitas TPI, PPI, BJBI serta *food estate* Pala di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
f. pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata bahari;
g. pengembangan kawasan perkotaan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya;
h. penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan kluster kawasan kepulauan dan perbatasan.

3. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain:
   a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
   b. pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
   c. percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antar daerah.
4. Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
5. Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
   a. pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, darat, dan udara yang terintegrasi;
   b. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.
6. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
   a. peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
   b. peningkatan ketahanan kawasan utara dan barat wilayah Kepulauan dan Perbatasan;
   c. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
   d. peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan
   e. peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan dan hutan bakau (*mangrove*).
7. Pembangunan desa terpadu yang mencakup;
   a. peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa;

b. penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif;
c. penetapan batas desa, pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan;
d. transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
e. perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi, dan listrik desa;
f. pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa.

Gambaran integrasi pembangunan Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut

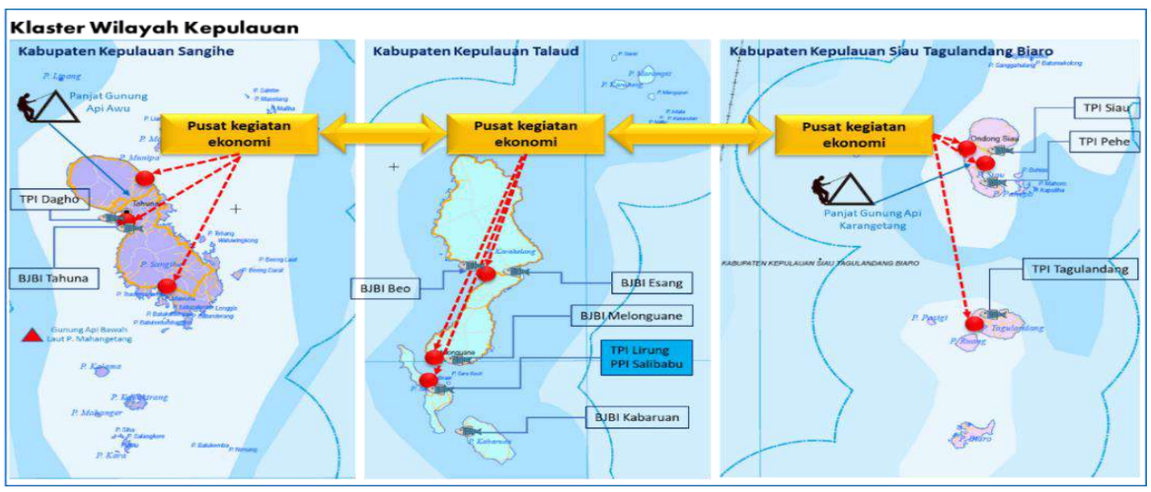

Gambar: 5.2 Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan

Tabel 5.7 Cakupan Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan, dan Strategi Pengembangan

Klaster Wilayah	Kabupaten Kepulauan	Strategi Pengembangan
Wilayah Kepulauan dan Kawasan Perbatasan Antar Negara	Sangihe, Talaud, Sitaro (Ibukota Tahuna, Melonguane, Ondong)	1. Pusat kegiatan ekonomi di Tahuna, Peta, Tamako; Lirung, Melonguane, Beo; Ulu Siau, Ondong, Tagulandang; Major Proyek pengembangan Pusat-Pusat Ekonomi Lokal; 2. Hilirisasi industri perikanan, industri pengolahan ikan, Hilirisasi industri sagu, Hilirisasi industri Pala (Food estate), Hilirisasi industri Kelapa; 3. Pengembangan dan penguatan kelembagaan pengelolaan SKPT Salibabu dan Dhago, dan Sub-SKPT pendukung utama SKPT sebagai pusat industri perikanan penangkapan dan pengolahan Kawasan Kepulauan; Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Kawasan Perbatasan; 4. Pengembangan Kawasan perbatasan berbasis industri perikanan tangkap dan

Klaster Wilayah	Kabupaten Kepulauan	Strategi Pengembangan
		pengolahan; serta pengembangan Sub-SKPT tersebar pada wilayah potensial penangkapan dan budidaya; 5. Pengembangan industri Pariwisata Budaya, Alam (Panjat Gunung Api Karangetang, Awu, dan Bahari serta Gunung Api Bawah Laut); 6. Pembangunan system pengelolaan air limbah domestic (SPALD) dan system penyediaan air minum (SPAM) di KSP (zona inti dan/atau zona penyangga) Kompleks Istana Manganitu dan Kawasan sekitar Suaka Margasatwa Karekelang 7. Pembangunan Konektivitas Daerah Kawasan Kepulauan 8. Pembangunan Cold Storage dan pabrik es tersebar di wilayah kepulauan 9. Pembangunan PLTS di wilayah kepulauan 10. Pengembangan Kawasan Peternakan (Sapi, Unggas dan Babi) dengan lokasi tersebar.

B. Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya

Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya meliputi wilayah 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu. Strategi pembangunan klaster wilayah Bolaang Mongondow Raya mengutamakan pemerataan, pertumbuhan berkualitas dan enklusif, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar antara lain:
   a. peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan pelatihan/vokasional pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata; dan peningkatan serta revitalisasi Balai Latihan Kerja;
   b. percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
   c. pembinaan dan keberpihakan dari Dinas/Badan, K/L serta mitra pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah relatif tertinggal;

d. pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan;
e. percepatan pembangunan desa terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa;
f. pelaksanaan pembangunan afirmatif.

2. Penguatan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui antara lain:
   a. pengembangan komoditas unggulan klaster kawasan Bolaang Mongondow Raya yaitu: kelapa, cengkeh, kakao, kopi, emas, geothermal, perikanan tangkap dan budidaya;
   b. pengembangan sentra produksi perikanan lokasi pesisir yang telah memiliki PPI, TPI, dan BJBI;
   c. pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang tersebar di beberapa kawasan potensial;
   d. revitalisasi kawasan transmigrasi;
   e. pengembangan ekonomi kawasan berbasis komoditas unggulan antara lain lewat pembangunan *food estate* jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow;
   f. pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, peternakan, kemaritiman, dan logam dasar) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada KI dan *Dry Port (DP)*;
   g. pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP);
   h. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi kluster kawasan Bolaang Mongondow Raya dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya;
   i. penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan klaster kawasan.

3. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain:
   a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
   b. pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
   c. percepatan penerapan SPM pelayanan dasar, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah;
   d. peningkatan kerja sama antar daerah otonom di wilayah, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri dan pesisir

4. Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
   a. pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, darat, dan udara yang terintegrasi;
   b. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;

5. Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;

6. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
   a. peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
   b. peningkatan ketahanan kawasan Bolaang Mongondow Selatan, Utara dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara dan sekitarnya;
   c. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
   d. peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;
   e. peningkatan penanganan abrasi pantai wilayah pesisir dan daerah pulau, serta konservasi hutan dan hutan bakau (*mangrove*);
7. Pembangunan desa terpadu yang mencakup:
   a. peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa;
   b. penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa,
   c. pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan;
   d. transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
   e. perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; dan pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa.

Gambaran integrasi pembangunan Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

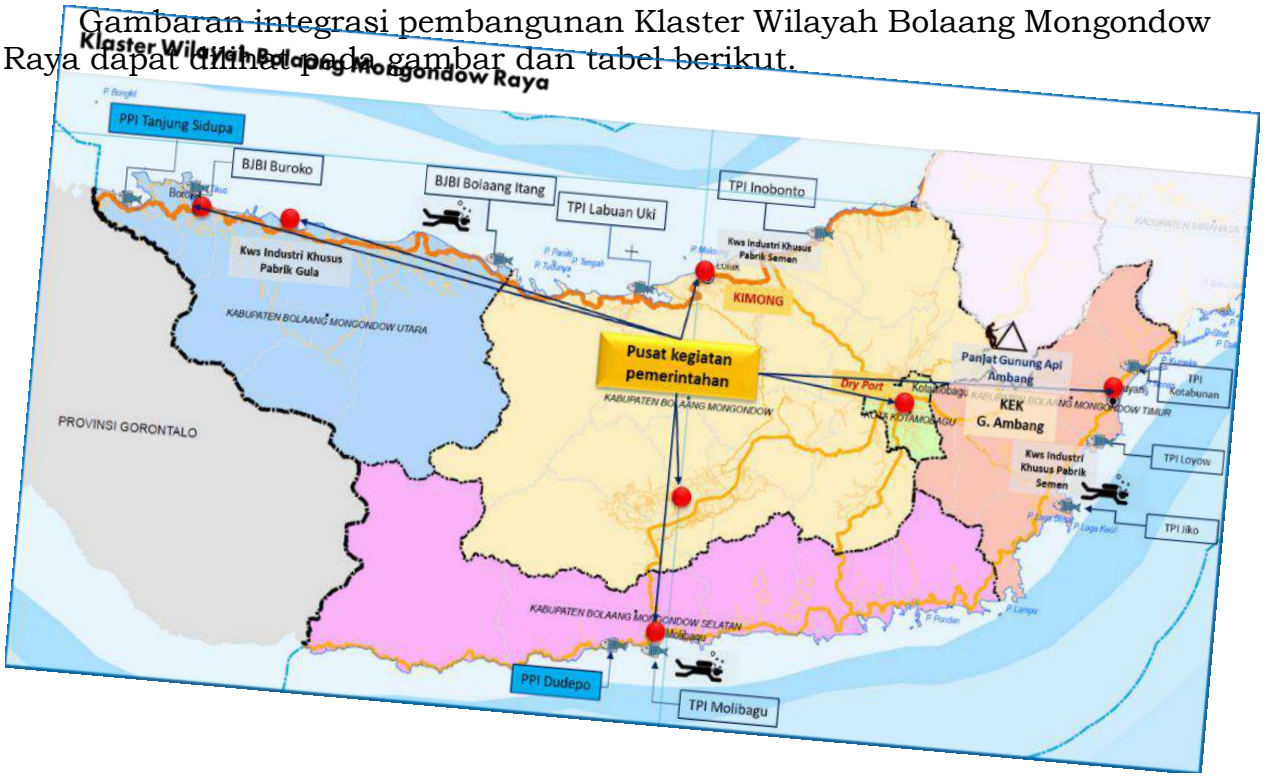

Gambar: 5.3 Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Bolaang Mongondow Raya

Tabel 5.8 Cakupan Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya dan Strategi Pengembangan

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya	Strategi Pengembangan
Wilayah Daratan dan Pesisir, dan Perbatasan Darat dengan Provinsi Gorontalo di Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Kotamobagu (Ibukota Lolak, Buroko, Molibagu, Tutuyan)	1. Pusat Kegiatan Pemerintahan dan Ekonomi Lolak dan Dumoga/Doloduo; Buroko dan Bintauna; Molibagu; dan Tutuyan; 2. Hilirisasi Industri Perikanan, Industri Pengolahan Perikanan; Hilirisasi Industri Pengolahan bahan pangan berbahan baku Beras, Jagung (food estate) di Kab. Bolaang Mongondow, Kentang, Wortel, dan pengolahan buah Nenas dan Pisang; Hilirisasi industri pengolahan Gula Aren dan Gula Semut; Hilirisasi Industri pengolahan Kopi dan Cacao; Pengembangan industry kopi organik di Kawasan Kotamobagu dan sekitanya; Hilirisasi dan pengembangan Industri Mikro dan Kecil produk Makanan Lokal dan Minuman; 3. Pengembangan Kawasan Industri Bolaang Mongondow (Kimong), Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Kimong; Pengembangan Kawasan *Dry Port* Kotamobagu dan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan *Dry Port*; 4. Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional: Pelabuhan Torosik dan Pelabuhan Lokal: Pelabuhan Boroko; 5. Peningkatan TPI Inobonto dan TPI Labuan Uki (Bolmong), PPI Dodepo dan TPI Molibagu (Bolsel), PPI Tanjung Sidupa, BJBI Boroko, BJBI Bolangitang (Bolmut), TPI Jiko, TPI Loyouw dan TPI Kotabunan (Boltim) dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Fasilitas Perikanan; 6. Pengembangan Kota Kecil/Sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Bolaang Mongondow Raya (Buroko, Bintauna Pante; Lolak-Inobonto, Dumoga-Doloduo, Mopuya-Mopugat-Tapadaka) 7. Pengembangan Industri Pariwisata Alam (Taman Nasional, Panjat Gunung Berapi Ambang, Agro Wisata);

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya	Strategi Pengembangan
		Bahari (Pantai, Spots Diving, Snorkeling), dan Budaya. 8. Pembangunan system pengelolaan air limbah domestic (SPALD) Regional dan system penyediaan air minum (SPAM) di KSP (zona inti dan/atau zona penyangga) meliputi KSP PANSELA, PANTURA, Kompleks Keraton Boroko yang berada di Bolaang Mongondow Utara, Kawasan Area Panas Bumi Gunung Ambang, Kompleks Keraton Boroko, Kawasan sekitar Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Kawasan sekitar Cagar Alam Gunung Ambang 9. Pembangunan Gudang pendingin di Pasar tradisional di Kota Kotamobagu. 10. Pengembangan industri peternak sapi di kab. Bolaang Mongondow Utara. 11. Pengembangan Kawasan Peternakan (Sapi, Unggas dan Babi) dengan lokasi tersebar.

C. Klaster Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Tengah/Induk, dan Tomohon)

Klaster Wilayah Minahasa Raya meliputi wilayah 3 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Wilayah Kabupaten Minahasa Induk, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Tomohon. Strategi pembangunan klaster wilayah Minahasa Raya bagian (Selatan, Tenggara, Induk, dan Tomohon) mengutamakan pemerataan, pertumbuhan berkualitas dan inklusif, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar publik antara lain melalui:
   a. peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan pelatihan/vokasional pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata; dan peningkatan serta revitalisasi Balai Latihan Kerja;
   b. percepatan pembangunan daerah kecamatan yang tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
   c. pembinaan dan keberpihakan dari Dinas/Badan, K/L, serta mitra pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah kecamatan relatif tertinggal;
   d. pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola pelayanan pemerintahan di kecamatan;
   e. percepatan pembangunan desa/kelurahan terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa/kelurahan;

2. Penguatan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui:
   a. pengembangan komoditas unggulan klaster kawasan Minahasa Raya yaitu: kelapa, cengkeh, pala, kakao, kopi, emas, geothermal, perikanan tangkap dan budidaya;
   b. pengembangan sentra produksi perikanan lokasi pesisir yang telah memiliki PPI, TPI, dan BJBI;
   c. pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang tersebar di beberapa kawasan potensial;
   d. pengembangan ekonomi kawasan berbasis komoditas unggulan antara lain lewat pembangunan *food estate* kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan;
   e. pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, peternakan, kemaritiman, dan logam dasar) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada pusat pusat pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten dan kota;
   f. pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP);
   g. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi kluster kawasan Minahasa Raya (Bagian Tengah dan Selatan/Tenggara) dan pengembangan kota kecil/sedang baru serta pengembangan kota lainnya;
   h. penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan klaster kawasan.
3. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain:
   a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
   b. pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
   c. percepatan penerapan SPM pelayanan dasar, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah;
   d. peningkatan kerja sama antar daerah otonom di wilayah, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri, dan pesisir.
4. Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
   a. pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut dan darat yang terintegrasi;
   b. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
5. Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
6. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
   a. peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
   b. peningkatan ketahanan kawasan Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa, dan Tomohon dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Tomohon, dan Minahasa Selatan dan sekitarnya;
   c. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
   d. peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;
   e. peningkatan penanganan abrasi pantai wilayah pesisir dan daerah pulau, serta konservasi hutan dan hutan bakau (mangrove);
7. Pembangunan desa/kelurahan terpadu yang mencakup:

a. peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa/kelurahan dan tata kelola aset desa/kelurahan;
b. penguatan pendamping desa/kelurahan yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa/kelurahan;
c. pengembangan desa/kelurahan wisata, desa/kelurahan digital dan produk unggulan desa/kelurahan dan kawasan perdesaan/kelurahan;
d. transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
e. perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi, dan listrik desa; dan
f. pemanfaatan dana desa/kelurahan untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pendamping lokal desa/kelurahan.

Gambaran integrasi pembangunan Klaster Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Induk/Tengah, dan Tomohon) dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini.

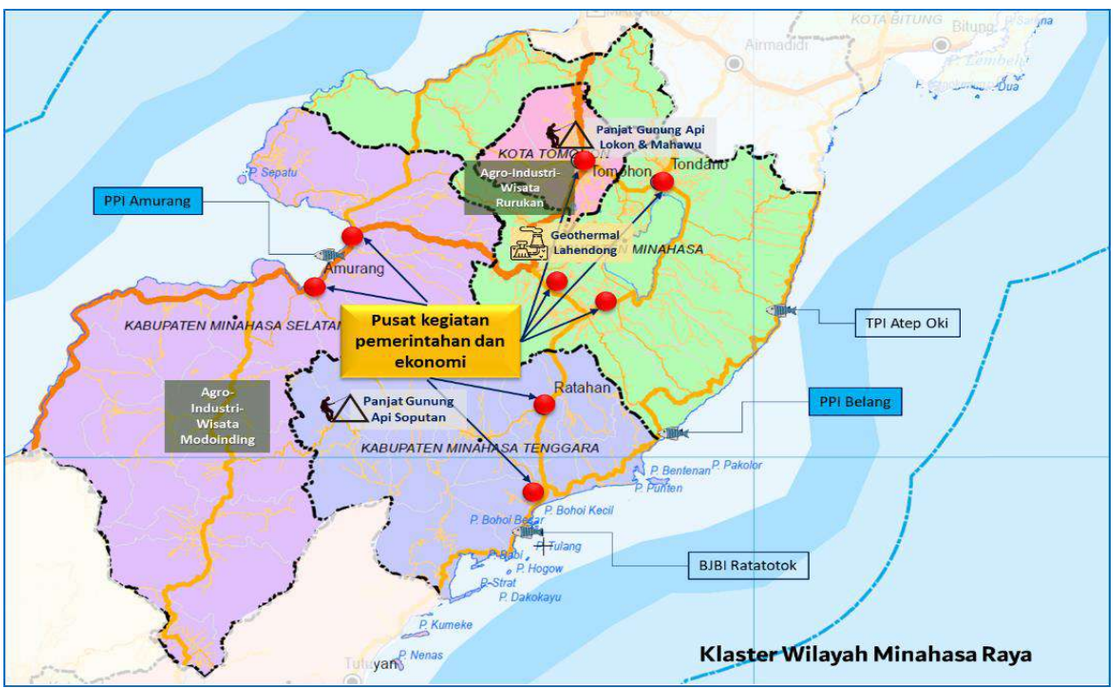

Gambar: 5.4 Integrasi pembangunan wilayah pada Klaster Wilayah Minahasa Raya

Tabel 5.9 Cakupan Klaster Wilayah Minahasa Raya dan Strategi Pengembangan

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Minahasa Raya	Strategi Pengembangan
Wilayah Daratan, Pegunungan, dan Pesisir di Klaster Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Tengah/Induk, dan Tomohon)	Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa, dan Kota Tomohon	a. Pusat Kegiatan Pemerintahan dan Ekonomi Amurang-Tumpaan, Ratahan-Belang, Tondano, Langowan-Kawangkoan, Kota Tomohon; b. Hilirisasi Industri Kelapa, Hilirisasi Industri Perikanan, Industri Pengolahan Perikanan, Hilirisasi Industri Pengolahan bahan pangan berbahan baku Beras, Jagung, Kentang, Wortel, dan Pengolahan buah Pisang; Hilirisasi industri pengolahan

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Minahasa Raya	Strategi Pengembangan
		Gula Aren dan Gula Semut di Kab. Minahasa Tenggara; Hilirisasi Industri Pengolahan Kopi dan Cacao; Hilirisasi dan pengembangan Industri Mikro dan Kecil produk Makanan Lokal dan Minuman; *food estate* kelapa di Kab. Minahasa Selatan c. Pengembangan Kawasan Agro industri Modoinding, Pengembangan Agroindustri Rurukan; Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Agroindustri Modoinding dan Rurukan, Pengembangan agrowisata Modoinding serta Pengembangan Kawasan Peternakan (Sapi, Unggas dan Babi) dengan lokasi tersebar. d. Perencanaan Penyiapan Pengembangan Waduk Pengolahan Air Danau Tondano untuk memenuhi kebutuhan air bersih Kota Bitung dan Kota Manado di Wilayah Tondano Utara memanfaatkan posisi ketinggian lokasi dengan tekanan gravitasi untuk distribusi dan Energi Terbarukan (ET) Solar System, Pembangunan instalasi pengolahan air baku dan jaringan perpipaan e. Pengembangan Pelabuhan Regional: Pelabuhan Amurang dan Belang; Jalan alternative Manado-Tomohon, serta Pembangunan Tol Manado-Amurang f. Pengembangan Fasilitas Pelabuhan/Pendaratan Ikan Belang, PPI Amurang, TPI Atep Oki, BJBI Ratatotok serta Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Pelabuhan/Fasilitas Perikanan; g. Pengembangan Kota Kecil/Sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Minahasa Raya (Modoinding, Tompaso Baru, Motoling, Belang-Ratatotok, Tombatu; Langowan, Kakas dan sekitar, Tompaso-Kawangkoan, Tandengan-Eris, Remboken-Tondano, Tanawangko, Kalasey, Pineleng);

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Minahasa Raya	Strategi Pengembangan
		h. Pengembangan Industri Pariwisata, Bahari, Budaya, Agro, dan Alam seperti Danau Tondano, Danau Linau, Agrowisata Rurukan, Agrowisata Modoinding, Taman Geothermal Lahendong-Tampusu-Tompasa, Panjat/Hiking Gunung Berapi Soputan, Lokon, dan Mahawu; Pantai Tenga, Pantai Kora-Kora, Pantai Rerer-Kombi, Pantai Kalasey, Pantai Air Panas Moinit, Pantai Bukit Tinggi, Rumah Batu Penaesaan, Taman Budaya Moraya, Taman Budaya Kampung Jawa dan Kompleks Kuburan Pahlawan, Objek Wisata Watu Pinabetengan; Objek Wisata Kanonang, Objek Wisata Danau di Remboken; serta penguatan kelembagaan pengelolaan Objek Wisata; Pengembangan wisata tirta Danau Tondano i. Pengembangan Kelembagaan Daerah Pengelolaan Potensi Danau Tondano dan sekitarnya; j. Pengembangan industri pengolahan pupuk organic dan produk turunan berbahan baku eceng gondok di Danau Tondano, pada 6 desa pengolahan di sekitar Danau Tondano k. Pembangunan system pengelolaan air limbah domestic (SPALD) Regional dan system penyediaan air minum (SPAM) di KSP (zona inti dan/atau zona penyangga) meliputi KSP Kawasan Waruga Tonsewer Tompaso Lama, Kawasan Benteng Amurang, Kompleks Lodji Tondano, Kawasan Kampung Jawa, Kawasan Area Panas Bumi Lahendong, Kawasan sekitar Cagar Alam Lokon l. Pembangunan Gudang pendingin di Pasar tradisional di Tondano, Amurang.

D. Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian (Utara, Manado, dan Bitung) sebagai wilayah Cepat Tumbuh

Strategi pembangunan klaster wilayah Minahasa Raya bagian (Utara, Manado, dan Bitung)—sebagai lokasi wilayah cepat tumbuh--mengutamakan pemerataan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas antar wilayah dan akses ke wilayah provinsi tetangga, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar publik antara lain melalui:
   a. peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan pelatihan/vokasional bidang pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, dan konektivitas/logistic; dan peningkatan serta revitalisasi Balai Latihan Kerja di Kota Bitung;
   b. percepatan pembangunan daerah kecamatan yang tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
   c. pembinaan dan keberpihakan dari K/L dan Dinas/Badan Provinsi, serta mitra pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah kecamatan relatif tertinggal;
   d. pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola pelayanan pemerintahan di kecamatan;
   e. percepatan pembangunan desa/kelurahan terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa/kelurahan;
2. Penguatan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru dilakukan melalui:
   a. pengembangan komoditas unggulan seluruh kluster Kawasan di Sulawesi Utara dan wilayah provinsi lain yaitu: kelapa dalam, kelapa sawit, cengkeh, pala, kakao, kopi, emas, geothermal, perikanan tangkap dan budidaya;
   b. pengembangan sentra produksi perikanan lokasi pesisir yang telah memiliki fasilitas pendukung utama seperti: PPS, PPP, PPI, TPI, dan BJBI;
   c. pengembangan sentra produksi perkebunan dan peternakan yang tersebar di beberapa kawasan potensial;
   d. pengembangan ekonomi kawasan berbasis komoditas unggulan antara lain lewat pembangunan *food estate* jagung di Kabupaten Minahasa Utara;
   e. pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (perkebunan, peternakan, kemaritiman, dan logam dasar) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
   f. pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP);

g. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi kluster kawasan Minahasa Raya (Bagian Utara dan Manado-Bitung) dan pengembangan kota kecil/sedang baru lainnya;
h. penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan klaster kawasan.

3. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui:
   a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
   b. pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kawasan;
   c. percepatan penerapan SPM pelayanan dasar, peningkatan dan revitalisasi pelayanan perizinan investasi berbasis e-gov, dan perluasan kerjasama daerah dalam klaster dan di luar klaster;
   d. peningkatan kerja sama antar daerah otonom di wilayah, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, pengolahan sampah, air limbah, air bersih.
4. Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
   a. pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, darat, dan udara yang terintegrasi dengan daerah dan wilayah lain di luar Sulawesi Utara;
   b. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
5. Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
6. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
   a. peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
   b. peningkatan ketahanan kawasan Minahasa Utara, Manado, dan Bitung, dan pemantapan pemulihan pascabencana di Manado, Bitung, dan sekitarnya;
   c. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
   d. peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;
   e. peningkatan penanganan abrasi pantai wilayah pesisir dan daerah pulau, serta konservasi hutan dan hutan bakau (mangrove);
7. Pembangunan desa/kelurahan terpadu yang mencakup:
   a. peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa/kelurahan dan tata kelola aset desa/kelurahan;
   b. penguatan pendamping desa/kelurahan yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa/kelurahan;
   c. pengembangan desa/kelurahan wisata, desa/kelurahan digital, dan produk unggulan desa/kelurahan dan kawasan perdesaan/kelurahan;
   d. transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

e. perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan sampah desa/kelurahan; dan
f. pemanfaatan dana desa/kelurahan untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pendamping lokal desa/kelurahan.

Gambaran integrasi pembangunan Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian Utara dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini.

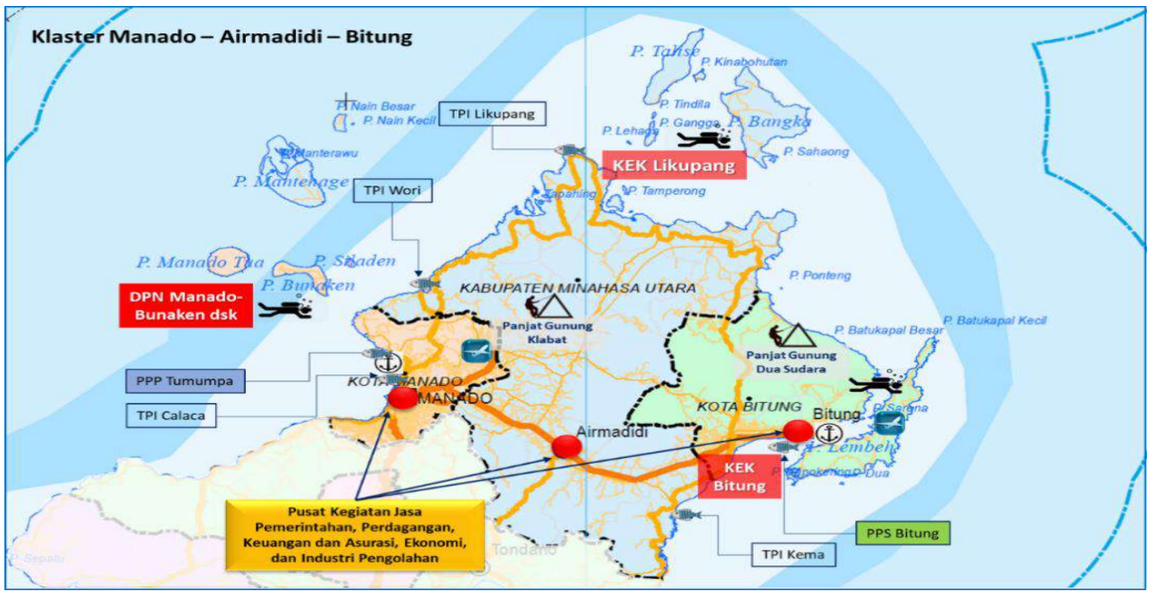

Gambar 5.5 Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Wilayah Kawasan Cepat Tumbuh (Manado-Minut-Bitung)

Tabel 5.10 Cakupan Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian Utara dan Strategi Pengembangan

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Minahasa Raya bagian Utara	Strategi Pengembangan
Wilayah Daratan, Pesisir dan Pulau di Klaster Wilayah Minahasa Raya bagian Utara, Kota Manado, Kota Bitung	Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung	1. Pusat Kegiatan Jasa Pemerintahan, Perdagangan, Keuangan dan Asurasi, Ekonomi, dan Industri Pengolahan; 2. Hilirisasi Industri Perikanan, Industri Pengolahan Perikanan; Hilirisasi Industri Pengolahan bahan pangan berbahan baku Beras, Jagung, Ikan, Kentang, Wortel, dan Pengolahan buah Pisang; termasuk pembangunan *food estate* jagung di Kab. Minahasa Utara; Hilirisasi industri Pengolahan Gula Aren dan Gula Semut; Hilirisasi Industri Pengolahan Kopi dan Cacao; Hilirisasi dan pengembangan Industri Mikro dan Kecil produk Makanan Lokal dan Minuman; 3. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola KEK Bitung dan KEK Likupang; 4. Pengembangan Pelabuhan Regional/Lokal Likupang,

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Minahasa Raya bagian Utara	Strategi Pengembangan
		Pelabuhan Penyeberangan Pateten-Lembeh; 5. Pengelolaan Pelabuhan dan Fasilitas Perikanan yaitu: PPS Bitung,PPP Tumumpa, TPI Calaca, TPI Likupang, TPI Kema, TPI Wori; dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Pelabuhan dan Fasilitas Perikanan yang tersebar di seluruh kab/kota, Pelabuhan Perikanan terintegrasi dengan Fish Market taraf internasional di Likupang; 6. Pengembangan Kota Kecil/Sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Minahasa Minahasa Utara (Airmadidi, Likupang, Kauditan, Sawangan dan Kema); 7. Pengembangan Industri Pariwisata, Bahari/Diving (TNL. Bunaken, Pulau Bangka dan sekitarnya, Selat Lembeh) beberapa lokasi objek wisata pantai tersebar di Likupang sekitarnya, dan Kema; Wisata Budaya (Taman Purbakala Sawangan), Wisata Alam (cagar Alam Tangkoko) Panjat/Hiking Gunung Klabat; serta beberapa spots objek wisata kota Manado dan Bitung. 8. Pembangunan system pengelolaan air limbah domestic (SPALD) Regional dan system penyediaan air minum (SPAM) Regional Bimatara di KSP (zona inti dan/atau zona penyangga) meliputi KSP Kawasan sekitar KEK Bitung, Kawasan sekitar KEK Pariwisata Likupang, Kawasan Pengembangan Bandar Udara Sam Ratulangi dan Kawasan Aerotropolis Pulau Lembeh, Kawasan Waruga di Sawangan Minahasa Utara, Kawasan Pecinan dan Kampung Arah di Manado, Kawasan sekitar Suaka Margasatwa Gunung Manembo – nembo, Kawasan sekitar Cagar Alam Dua Sodara, Kawasan sekitar Cagar Alam Tangkoko, Kawasan sekitar Taman Wisata Alam Batu Putih dan Batu Angus, dan Kawasan sekitar TPA regional Ilo – ilo. Pembangunan TPA Regional Mamitarang dan tempat pengolahan limbah B3 medis. 9. Pengembangan Kawasan Aerotopolis Pulau Lembeh, Pembangunan Jembatan Bitung-

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Minahasa Raya bagian Utara	Strategi Pengembangan
		Lembeh, Pembangunan jalur Kereta api Manado-Bitung 10. Pembangunan Integrated Coastal Road dan Water Transportation Teluk Manado untuk mendukung konektivitas 11. Pembangunan Pasar Induk di Kota Manado, Pembangunan Gudang pendingin di Pasar tradisional di Kota Manado, Kota Bitung, Airmadidi 12. Pengembangan Kawasan Peternakan (Sapi, Unggas dan Babi) dengan lokasi tersebar.

E. Pembangunan Antar Klaster Wilayah Minahasa Raya dan Bolaang Mongondow Raya dalam Koridor Pantai Selatan

Pembangunan antar klaster wilayah pada koridor pantai selatan yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dilakukan sebagai bagian dari kebijakan provinsi untuk menanggulangi kemiskinan. Pemetaan ketimpangan wilayah menunjukkan bahwa kabupaten pada daerah pantai selatan meliputi Kabupaten Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan memiliki progress yang rendah pada capaian beberapa indicator pembangunan dibandingkan pada daerah pantai utara.

Pembangunan yang akan dilakukan mengarah pada pemenuhan pelayanan dasar air minum dan sanitasi pada permukiman pesisir sepanjang koridor pantai selatan oleh Pemerintah Provinsi dengan mempertimbangkan capaian pembangunan pada beberapa indikator seperti tingkat kematian ibu dan bayi, prevalensi stunting, angka putus sekolah dasar, angka Buang Air Besar Sembarangan (BAB) dan jumlah rumah tidak layak huni, dengan scenario pendanaan bantuan keuangan provinsi.

Data kawasan koridor pantai selatan di ketiga kabupaten dapat dilihat pada peta – peta berikut.

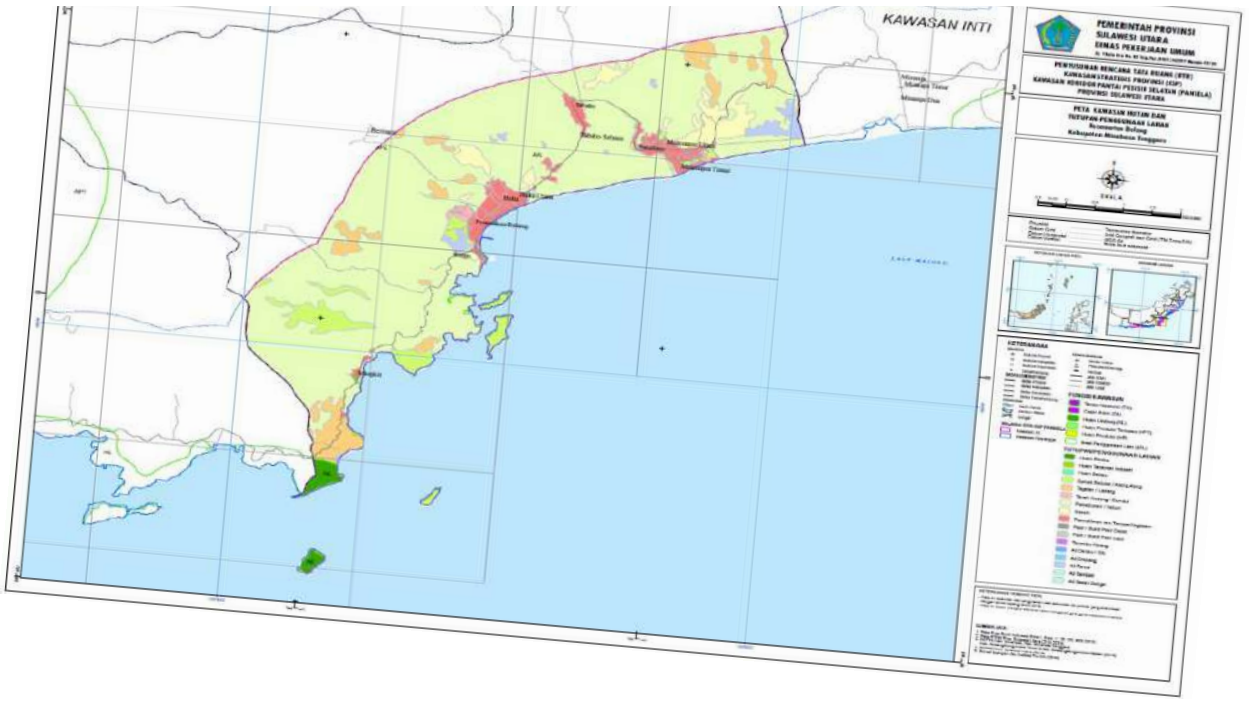

Gambar 5.6 Peta Desa – Desa pesisir di Kabupaten Minahasa Tenggara

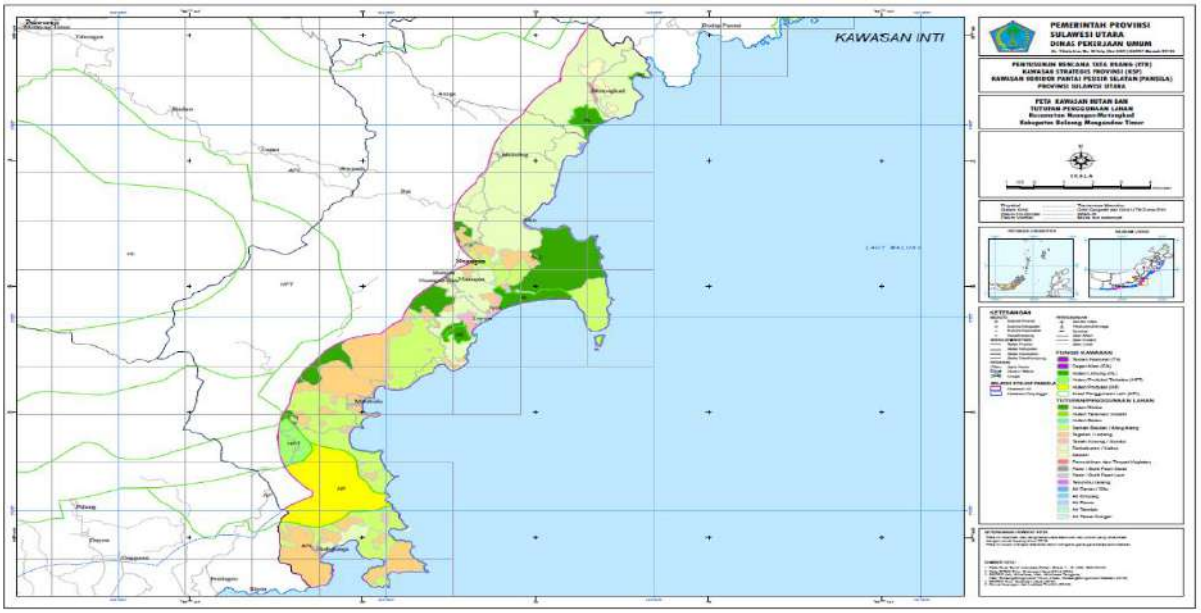

Gambar 5.7 Peta desa – desa pesisir di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

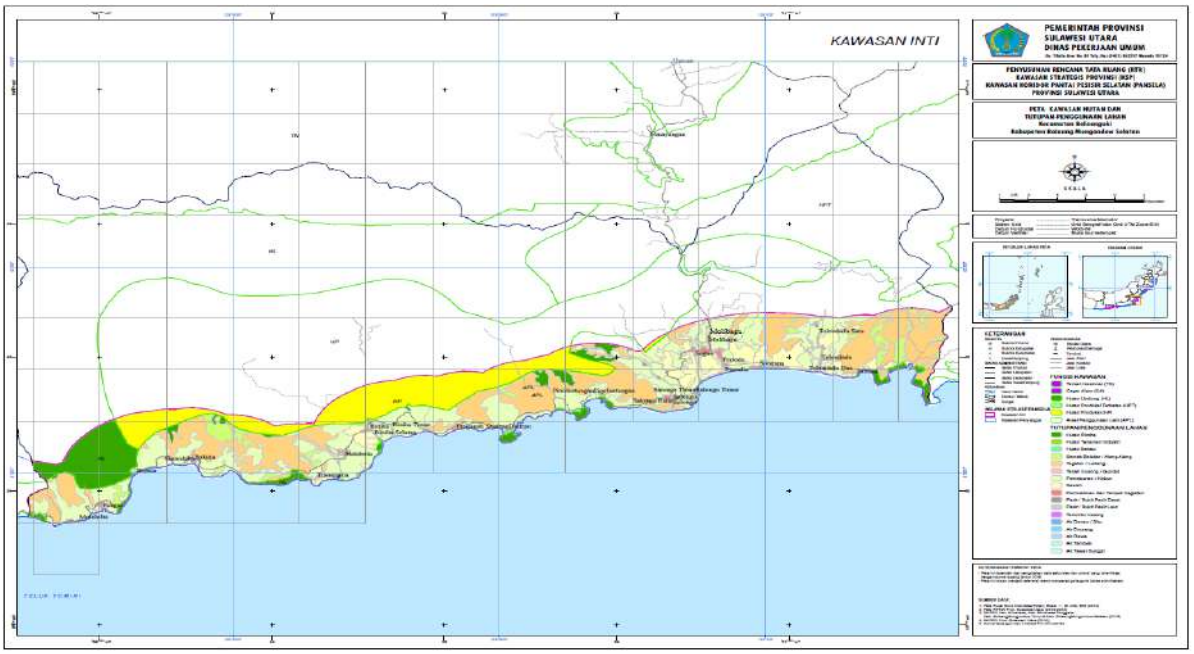

Gambar 5.8 Peta desa – desa pesisir di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

5.8. Kawasan Super Hub Sulawesi Utara

Super Hub Sulawesi Utara mencakup beberapa wilayah kabupaten dan kota yang telah memiliki infrastruktur dasar, sosial, dan Kawasan Ekonomi/Industri menunjang percepatan gerak akselerasi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Timur Indonesia. Melalui transformasi struktur ekonomi daerah dari sektor primer bertahap bergeser ke Sektor Industri pengolahan komoditi lokal dan Sektor Jasa, serta akselerasi peran Industri Pariwisata yang didukung dengan jaringan jasa penerbangan

internasional dan nasional, menggunakan fasilitas Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung.

Wilayah Super Hub mencakup Kota Manado dimana terletak lokasi Bandar Udara Internasional; Kota Bitung memiliki Pelabuhan Hub Internasional dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Kabupaten Minahasa Utara terletak di antara 2 kota (Manado dan Bitung) memiliki lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata; Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki Kawasan Industri (KI) Kimong; dan Kota Kotamobagu akan memiliki *Dry Port* (dalam tahap persiapan).

Arah pengembangan Super Hub dilaksanakan bersama pemerintah nasional dan provinsi, serta seluruh kabupaten dan kota yang memiliki fasilitas penunjang percepatan berkembangnya pusat pertumbuhan (*growth centre)* di Sulawesi Utara sebagai Super Hub di KTI bagian Utara. Melakukan integrasi terpadu antar pusat-pusat kegiatan ekonomi di beberapa kabupaten dan kota melalui jaringan konektivitas akses langsung ke Pelabuhan Hub Internasional Bitung dan Bandar Udara Internasional. Integrasi konektivitas antar kawasan kegiatan ekonomi yang didukung dengan jaringan transportasi antar daerah dan antar provinsi melalui hubungan darat, laut, dan udara, menjadi syarat prioritas Super Hub dapat berperan sebagai penggerak ekonomi Kawasan Timur dan pintu utama di KTI akses langsung ke pasar internasional.

Gambaran integrasi pengembangan Kawasan Super Hub dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini.

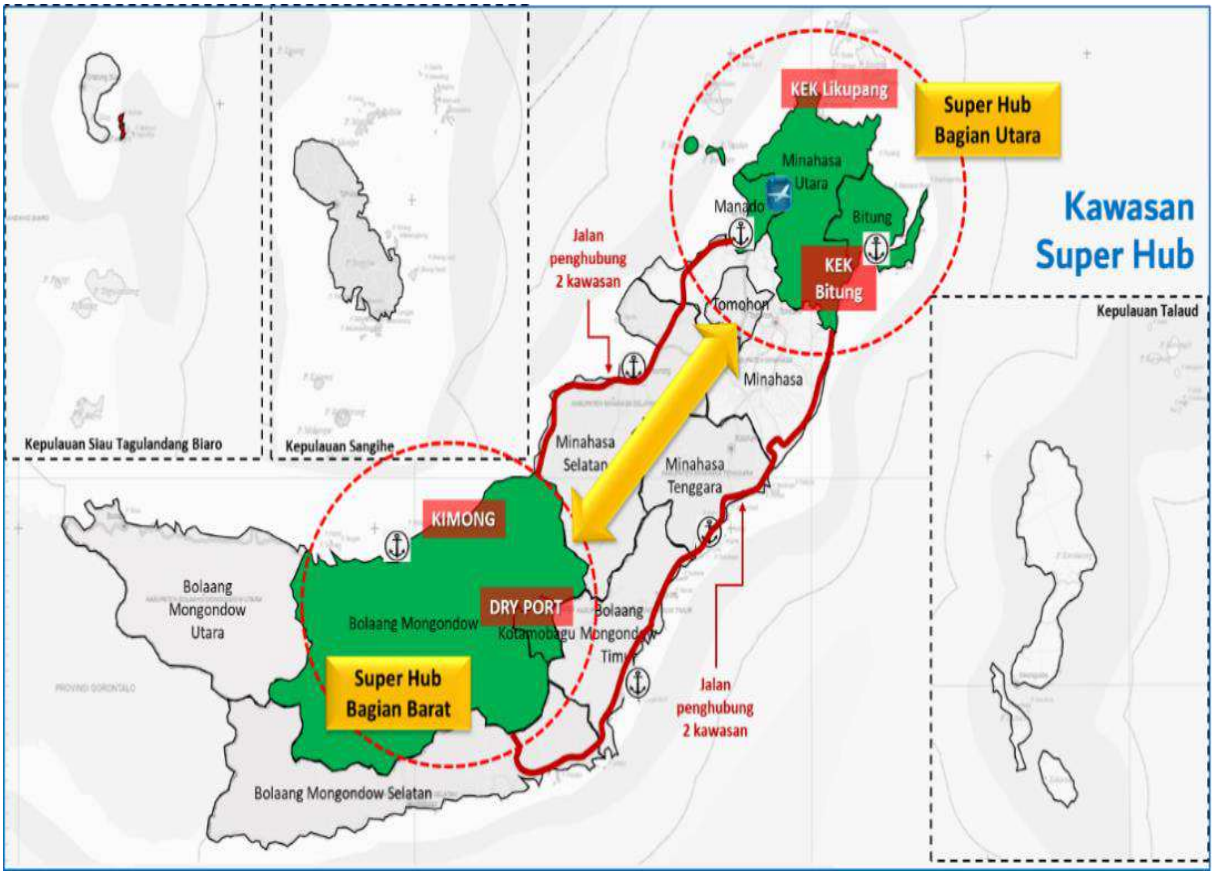

Gambar 5.9 Integrasi Pembangunan Wilayah pada Kawasan Super-Hub Sulut

Tabel 5.11 Cakupan Kawasan Super-Hub Sulut dan Strategi Pengembangan

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota	Strategi Pengembangan
Wilayah daratan bagian utara Peninsula (Manado, Minahasa Utara, dan Bitung) dan bagian barat (Bolaang Mongondow dan Kotamobagu)	Manado, Bitung, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow, dan Kotamobagu	1. Integrasi kawasan ekonomi dan infrastruktur dasar perhubungan melalui konektivitas jaringan perhubungan darat; termasuk termasuk Perencanaan Pembangunan Manado Elevated Coastal Road di Kota Manado,terdiri atas ruas Bahu Mall - Ring Road 3 (yang menggantikan fungsi jalan arteri primer ruas Bahu Mall – Batas Kota Manado) dan ruas Bahu Mall – Pantai Manado – Ring Road 4. 2. Penguatan Kelembagaan Pengelola 2 KEK, 1 KI, dan 1 *Dry Port* (DP); 3. Kemudahan akses dari provinsi tetangga menggunakan fasilitas Pelabuhan dan Bandara di wilayah Sulawesi Utara; 4. Pembukaan kembali jalur pelayaran dan penerbangan Manado-Davao secara regular yang dilayani perusahan Penerbangan dan Pelayaran Indonesia dan Filipina; 5. Pembukaan jalur penerbangan (penumpang dan cargo) akses ke Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Singapore, dan Hong Kong. 6. Optimalisasi peran Pelabuhan Hub Bitung menjadi pintu ekspor dan import Kawasan Timur Indonesia. 7. Pembangunan Jaringan Transportasi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP)

5.9. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kewilayahan di Sulawesi Utara tahun 2021—2026 mengutamakan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan pada bukti data, informasi, dan pengetahuan yang baik, akurat, lengkap, skenario pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi, serta lokasi yang jelas sesuai rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selain itu, pembangunan kewilayahan juga mengutamakan pendekatan holistik dan tematik yang didasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada

prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan sesuai dengan pendekatan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan kewilayahan dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengutamakan kerjasama dan keterpaduan program dan kegiatan antar-kementerian/lembaga, antara-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, serta antara Pemerintah/Pemda dan Badan Usaha dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Untuk mencapai sasaran dan target pembangunan, pembangunan wilayah ke depan akan diterjemahkan melalui dua pendekatan utama yaitu pendekatan koridor pertumbuhan daerah melalui pusat-pusat pengembangan, dan koridor pemerataan berbasiskan klaster wilayah. Pendekatan koridor disusun dengan mempertimbangkan hasil perhitungan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah berdasarkan beberapa indikator makro kabupaten/kota tahun 2019, serta mempertimbangkan jalur perhubungan dan pertumbuhan masing-masing daerah, jalur pariwisata nusantara, dan mempertimbangkan pola persebaran pusat kegiatan seperti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Pendekatan melalui koridor pertumbuhan mengutamakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat mendorong peningkatan nilai tambah, peningkatan penerimaan devisa, dan perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif kedepan. Pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan destinasi pariwisata prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan termasuk metropolitan, kota-kota baru dan kota-kota sedang dan kecil sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Pendekatan melalui koridor pemerataan mengutamakan pengembangan wilayah penyangga (hinterland) yang berada di sekitar pusat pertumbuhan, serta daerah dan kawasan tertinggal untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai dengan kaidah tujuan pembangunan berkelanjutan. Wilayah penyangga tersebut antara lain adalah desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil, terluar dan terdepan, serta daerah tertinggal.

Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2021-2026, sebagai berikut:

5.9.1. Meningkatkan pemerataan antar wilayah daratan dan kepulauan, maupun daerah pesisir dan pegunungan, melalui strategi pembangunan, yaitu:

a. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, melalui:
   i. perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
   ii. penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan, air bersih dan sanitasi, dan listrik;
   iii. peningkatan konektivitas transportasi darat, laut, dan udara;
   iv. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital;
   v. perluasan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan;
   vi. meningkatkan pengawasan dan penjagaan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); serta
   vii. pemenuhan hak-hak masyarakat perbatasan dan kepulauan sesuai mandat regulasi yang berlaku.
b. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung dengan:
   i. tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif;
   ii. penetapan batas desa;
   iii. pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMDes Bersama;
   iv. peningkatan pelayanan dasar desa;
   v. optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa;
   vi. penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.
c. Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah desa, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) perbatasan negara melalui:

i. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas termasuk jaringan logistik dari desa ke pusat-pusat perdagangan baik pasar lokal, regional maupun internasional;
ii. pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan dengan multipihak.

5.9.2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, melalui strategi pembangunan, yaitu:

Optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah yaitu KEK, KI, Destinasi Pariwisata Prioritas, Super Hub, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya hasil-hasil perkebunan dan perikanan antara lain melalui:

i. penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi perkebunan dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
ii. penyediaan jaringan infrastruktur secara terpadu yang meliputi jaringan transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lainnya), sistem energi (listrik, gas, surya, batu bara, dan lainnya), fasilitas air baku dan air bersih, dan sistem pengolahan limbah;
iii. pelayanan perijinan dan investasi yang cepat;
iv. penguatan konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku di kawasan perdesaan dan transmigrasi, kota-kota kecil, dan kota-kota menengah dalam pengadaan bahan baku dan pendukung;
v. pengembangan kerjasama dan kemitraan pembiayaan pemerintah dan badan usaha;
vi. penguatan kerjasama Pemerintah Daerah, badan pengelola, masyarakat, perguruan tinggi dan media dalam promosi dan pengembangan kawasan strategis;
vii. perluasan kerjasama dan kemitraan dalam kerjasama mata rantai produksi domestic dan global.
viii. Penyediaan infrastruktur kelautan dan perikanan untuk pulau-pulau kecil/terluar.

5.9.3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, melalui strategi pembangunan:

a. Pelaksanaan desentralisasi melalui peningkatkan kapasitas daerah otonom untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien;
b. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah antara lain melalui:
    i. penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten termasuk perbaikan mekanisme pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja;
    ii. penataan lembaga dan organisasi Pemerintah Daerah yang lebih efisien dan efektif;
    iii. optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah dan efisien;
    iv. peningkatan riset dan inovasi daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan;
    v. peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keahlian khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah termasuk perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah;
    vi. Optimalisasi peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melalui sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk percepatan pencapaian target prioritas pemerintah, pemprov, dan pemkab/pemkot, melalui APBD setiap daerah;
    vii. optimalisasi dana transfer daerah yang lebih produktif dan afirmatif bagi kemajuan daerah;
    viii. peningkatan penerimaan dan pendapatan daerah baik pajak dan retribusi daerah maupun sumber-sumber penerimaan dan pendapatan lainnya melalui penataan dan pengembangan data dan informasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan;
    ix. pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, melalui; peningkatan kualitas belanja daerah yang berdampak bagi percepatan pencapaian SPM, dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah;

x. peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;

c. Pengembangan kerja sama antar daerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru, melalui;
   i. Penguatan peran PTSP sebagai percepatan pelayanan dan perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha;
   ii. Penataan regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha;
   iii. Pengembangan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
   iv. Perluasan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi pemerintah daerah dengan mitra pembangunan dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pembiayaan dan investasi pembangunan, penyelesaian permasalahan publik bersama, dan pengembangan daya saing dan inovasi daerah.

d. Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis, melalui:
   i. Penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam koordinasi dan pengendalian pembangunan daerah;
   ii. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit antara pusat dan daerah; dan
   iii. Penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah melalui percepatan penyelesaian revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lain mengenai manajemen keuangan daerah

5.9.4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, melalui strategi pembangunan:

a. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana untuk menjamin pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang antara lain melalui:
   i. peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
   ii. penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara daerah (provinsi, kabupaten/kota);

iii. penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;

b. Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui:
   i. sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
   ii. penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
   iii. penetapan deliniasi batas wilayah adat;

c. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah; dan peningkatan pelayanan pertanahan melalui pelayanan modern berbasis digital dan penerimaan PNS petugas ukur pertanahan;

d. Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan bencana; dan meningkatkan ketangguhan menghadapi perubahan iklim dan bencana terutama di pusat-pusat pertumbuhan wilayah kawasan perkotaan melalui:
   i. pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim;
   ii. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan;
   iii. pembangunan budaya sadar bencana, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat;
   iv. pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat, dan logistik kebencanaan terutama di kawasan strategis nasional dan daerah yang memiliki risiko bencana tinggi;
   v. pengembangan sistem peringatan dini multiancaman bencana;
   vi. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana;
   vii. peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana;
   viii. peningkatan investasi untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana;
   ix. perluasan dan penguatan kerjasama dan kemitraan multi pihak dan multi sektor dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;

x. peningkatan upaya penanganan abrasi pantai yang dapat mengancam terjadinya pergeseran batas wilayah.

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2023 berdasarkan Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2023 yang dibahas pada Bab IV, dengan merujuk kepada hasil evaluasi pembangunan Tahun 2021. Rencana kerja dan pendanaan daerah memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pembangunan di setiap Perangkat Daerah serta prakiraan ke depan tahun 2024.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program, kemudian sub kegiatan menterjemahkan aktivitas/layanan.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 disajikan pada Tabel 6.1 Penyajian program, kegiatan sub kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Utara.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja sebagai tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah disajikan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yaitu Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan di Tahun 2023, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

7.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2023 adalah ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah di Tahun 2023, sebagai bagian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJAUTAMA DAERAH	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter	Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	74
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94.65
			Prevalensi Stunting	%	15
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	58,06
Penguatan Ekonomi yang bertumpu padaindustri pertanian, perikanan, pariwisata danjasa	Memperkuat ketahanan ekonomiuntuk pertumbuhan yang berkualitas	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,0 – 5,7
			Indeks Gini (Gini Ratio)	Angka	0,355
			Persentasi Angka Kemiskinan	%	5,93
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,0 – 6,5
Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yangmemadai	Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas	Indeks infrastruktur	Angka	0.89

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Pembangunan Daerah yang berkelanjutan	Terwujudnya Pengarusutamaa npembangunan berkelanjutan danberwawasan lingkungan	Meningkatnya Pembanginan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.	Angka	0.68
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	Angka	71.11
			Akses Air Minum		94
			Akses Sanitasi		87
Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah	Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi BirokrasiDalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK	Opini	WTP
			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	61,00
			Indeks SPBE	Nilai	3.3

7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah. Indikator kinerja utama Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi bagian dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET TAHUN 2023
1. DINAS PENDIDIKAN DAERAH		
	Rata-Rata Lama Sekolah	9,60
	Harapan Lama Sekolah	12,91
	APK SMA/SMK/MA	85,75%
	APM SMA/SMK/MA	64,10%
2. DINAS KESEHATAN DAERAH		
	Usia Harapan Hidup	72,10
	Jumlah Kematian Bayi	230
	Jumlah Kematian Ibu	30
	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100%
	Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%
3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH		
	Rasio Kemantapan Jalan	0,899
	Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh JaringanIrigasi	0,874
4. DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH		
	Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapidengan PSU	61
	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepatwaktu	40
5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%
6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	Persentase penanganan pra bencana	100%
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%
	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kab/Kota	5 Desa/Kelurahan
7. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakterkebangsaan	100%
	Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yangterdata / jumlah kasus yang terselesaikan X 100%)	100%
8. DINAS SOSIAL DAERAH		
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	5,02%
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	15,20%
9. DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH		
	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	71,10%
	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dandikembangkan	40%

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET TAHUN 2023
10. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH		
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	2,5%
	Rasio kekerasan terhadapa perempuan, termasuk TPPO (per 100.000penduduk perempuan)	28
	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkankabupaten/kota layak anak	100%
	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanankoprehensif	65%
11. DINAS KEPENDUDUDKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KB DAERAH		
	Cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan	95%
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,24
	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR15-19)	30%
12. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	19,90%
	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa	100%
	Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100%
	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100%
13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	71,11
14. DINAS PERHUBUNGAN DAERAH		
	Rasio Konektivitas Provinsi	0,450
15. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH		
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuaistandar	100%
	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	100%
16. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH		
	Persentase Koperasi Sehat	1% (3.841 Unit)
	Persentase UMKM Naik Kelas	2%
17. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH		
	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	10%
18. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH		
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,65%
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosialkemasyarakatan	6,79%
	Peningkatan prestasi olahraga	6 Prestasi
19. DINAS KEBUDAYAAN DAERAH		
	Terlestarikannya cagar budaya	100%
	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	24 Unit
20. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH		
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	61,5
	Indeks pembangunan literasi masyarakat	8,80
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yangsah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 undang-undangnomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	18,91

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET TAHUN 2023
21. DINAS PARIWISATA DAERAH		
	Tingkat Hunian Akomodasi	20%
	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3%
	Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara dan Nusantara	25.000 Wisman; 1.000.000 Wisnus
	Nilai tambah Ekonomi Kreatif	20,104,200,000
22. BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	Rasio PAD (ADHK)	0,014
	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	-0,03
23. DINAS PANGAN DAERAH		
	Indeks Ketahanan Pangan	79,67
24. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH		
	Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	988.400 Ton
	NTNP (NTN dan NTPi)	105
	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturanperundangan yang berlaku	97%
25. DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH		
	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura danPeternakan	1-2%
	Nilai Tukar Petani	100 - 103
26. DINAS PERKEBUNAN DAERAH		
	Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan	94 - 100
	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	1%
27. DINAS KEHUTANAN DAERAH		
	Luas Kawasan Hutan yang dikelola masyarakat	2.368 Ha
	Luas hutan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	2.400 Ha
28. DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAH		
	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggarPerda	100%
	Rasio elektrifikasi	100%
	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	36%
	Persentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi BencanaGeologi	100%
29. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH		
	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	9.45
	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	12.65%
30. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan Pembangunan	75%
	Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	100%
31. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79.52
32. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
	Rasio pegawai pendididkan tinggi dan menengah/dasar PNS tidak termasukguru dan tenaga kesehatan	5,40
	Rasio pegawai fungsional, PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	0,09
	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi PNS tidak termasuk guru dantenaga kesehatan	11,75
	Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD	80%

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET TAHUN 2023
33. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	Persentase ASN yang Berkompetensi	40%
34. INSPEKTORAT DAERAH		
	Nilai Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota	Provinsi Kategori BB dan Kab/Kota rata-rata CC
	Nilai LPPD dillingkungan Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota	Provinsi Nilai Tinggi dan Kabupaten/Kota rata-rata tinggi
	Level Maturitas SPIP	Level 3
	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan	WTP
	Persentase Tindak Lanjut Temuan	100%
	Persentase Temuan BPK	10%
	Level Kapabilitas APIP	Level 3
	Persentase Penyampaian LHKPN	100%
	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%
35. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	45%
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	45%
36. BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		
	Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan,ditetapkan, diawasi dan dievaluasi	100%
37. SEKRETARIAT DAERAH		
	Indeks Pelayanan Publik	7,91
	Nilai akuntabilitas kinerja	70,05
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	93,80
38. SEKRETARIAT DEWAN		
	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%
	Pengambilan Keputusan DPRD	11 Keputusan
39. BADAN PENGHUBUNG DAERAH		
	Persentase pelayanan penghubung	100%

7.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah di Tahun 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026

Tabel 7.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

No.	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET TAHUN 2023
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	**PENDIDIKAN**	
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100%
3	Persentase sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran muatan lokal	100%
4	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah atas	1:14
2	**KESEHATAN**	
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	57,5%
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100%
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi	100%
5	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit)	100%
6	Rasio dokter per satuan penduduk;	45/ 100.000 pddk
7	Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100%
8	Persentase Kabupaten Kota Sehat	100%
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
1	Rasio luar kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0,53
2	Rasio luar kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan provinsi	0,53
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,874
4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	10%
5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL regional	0,06
6	Rasio kemantapan jalan	0,899
7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	0,054
8	Persentase jumlah sampah yang tertangani di TPA Regional	40%
9	Jumlah Sistem Drainase yang terbangun dan terhubung dengan Sungai LintasKab/Kota dan Sungai yang berada di Kawasan Strategis Provinsi	1
10	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang memperoleh Pengembangan Infrastruktur Permukiman	2
11	Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun / direhab / direnovasi / ubahsuai / dipelihara dan dirawat	100%
12	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	100%

No.	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET TAHUN 2023
13	Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	0,68
4	**PERUMAHAN RAKYAT**	
1	Persentase warganegara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	4%
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	4%
3	Presentasi luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	100%
4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	61%
5	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Kegiatan
5	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	
1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%
3	Persentase penanganan pra bencana	100%
4	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%
5	Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakarandan Penyelamatan Non Kebakaran di Provinsi Kabupaten/Kota	100%
6	Persentase Kabupaten/Kota tangguh bencana	100%
7	Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%
8	Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%
9	Persentase Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%
10	Persentase Ormas, LSM, FKUB yang mendapat pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%
11	Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata / jumlah kasus yang terselesaikan X 100%)	100%
6	**SOSIAL**	
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan stelah tanggap darurat bencana provinsi	100%
6	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan produktif	15,20%
7	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%
8	Persentase Peningkatan Perlindungan dan jaminan Sosial	100%
9	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan yang dilaksanakan	100%

No.	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET TAHUN 2023
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
7	**TENAGA KERJA**	
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	46%
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	70%
3	Tingkat produktifitas tenaga kerja	77
4	Persentase perusahaan yang merupakan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	50%
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)daerah provinsi	61%
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	85%
8	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	2,5%
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	28
3	Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 10.000KK)	15,0
4	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala	85%
5	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100%
6	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan Komprehensif	65
9	**PANGAN**	
1	Persentase cadangan pangan	100% (275 Ton)
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	10,03
3	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	89%
4	Persentase Ketersediaan pangan utama	0,016
5	Ketersediaan energi dan protein perkapita (/kapita/hari)	2400 kilokalori dan 63 gram
6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	89%
10	**PERTANAHAN**	
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas ijin lokasi dibandingkan dengan luas ijin lokasi yang diterbitkan	100%
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	40%
3	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota	100%
11	**LINGKUNGAN HIDUP**	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	71,11
2	Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	55%
3	Tersusunnya RPPLH dan KLHS Provinsi	KLHS
4	Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pengelolaan Taman KEHATI oleh pemerintah Provinsi	1 Taman Kehati
5	Jumlah Usaha/Kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota	2 Pelaku Usaha/Kegiatan

No.	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET TAHUN 2023
6	Jumlah MHA dan/atau Kearifan lokal yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	1 Kelompok
7	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk mayarakat	100%
8	Jumlah penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 Penghargaan
9	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100%
10	Persentase jumlah sampah yang tertangani	50%
12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUDKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
1	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	100%
2	Pemanfaatan data kependudukan	80%
3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98%
4	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	72,5%
13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	66%
2	Prentase peningkatan status desa mandiri	17,93%
3	Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	19,90%
4	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa	100%
5	Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100%
6	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100%
14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,24
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalencerate/mCPR)	65%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,50%
4	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR15-19)	30%
15	**PERHUBUNGAN**	
1	Rasio konektivitas provinsi	0.450
2	V/C ratio di jalan provinsi	0.7
3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1 Pelabuhan
4	Jumlah arus penumpang angkutan umum naik turun	13.500
5	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi di Kab/Kota	3
16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	
1	Persentase perangkat daerah (PD) yang terkoneksi dijaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%
2	Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%
3	Persentase media yang melaksanakan penyebaran informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;	100%
4	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%

No.	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET TAHUN 2023
17	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	3.841 unit
2	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	2%
18	**PENANAMAN MODAL**	
1	Persentase peningktan investasi di provinsi	10%
2	Peningkatan jumlah kerjasama Penanaman Modal/MOU	3 MOU/ Kerjasama
3	Persentase penerbitan perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal sesuai NSPK tepat waktu	87%
4	Persentase peningkatan penyampaian LKPM	75%
5	Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal tepat waktu	1 laporan
19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,65%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6,79%
3	Peningkatan prestasi olah raga	6 Prestasi
20	**STATISTIK**	
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%
21	**PERSANDIAN**	
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	95%
22	**KEBUDAYAAN**	
1	Terlestarikannya cagar budaya	100%
2	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas).	0,020%
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	9,5%
4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	24 Unit
5	Standar pengelolaan Museum Negeri	B
23	**PERPUSTAKAAN**	
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	61,5
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	8,80
24	**KEARSIPAN**	
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	18,91
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	230
	URUSAN PILIHAN	
25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	
1	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	234.886,92 hektar
2	Jumlah dokumen monev/kajian PK/peraturan turunan Perda RZWP-3-K	1 dok
3	Produksi Perikanan Tangkap	410.380 ton
4	Produksi Perikanan Budidaya	578.020 ton
5	Konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)	67,5

No.	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET TAHUN 2023
6	Penanganan kasus Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	3 kasus
7	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	97%
26	**PARIWISATA**	
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	100%
2	Persentase peningkatan perjalanaan wisatawan nusantara yang datang keprovinsi	100%
3	Tingkat hunian akomodasi	20%
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3%
5	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman
6	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata yang telah disertifikasi	25%
27	**PERTANIAN**	
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	0.88%
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	2%
3	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan	2%
4	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	6,5 %
5	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	97%
6	Cakupan bina kelompok Petani	0,20 %
7	Kontribusi sektor Perkebunan terhadap PDRB	5,40%
8	Produktivitas perkebunan per hektar per tahun	1070 Kg/Ha
9	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	1%
28	**KEHUTANAN**	
1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	31.40%
2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	28%
3	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	0.84%
29	**ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**	
1	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda	100%
2	Persentase desa yang teraliri listrik	100%
3	Rasio elektrifikasi	100%
4	Persentase Rumah tangga pengguna listrik	100%
5	Rasio ketersediaan daya listrik	1,80
6	Persentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	100%
7	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	36%
30	**PERDAGANGAN**	
1	Pertumbuhan nilai eksport non migas	6%
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	90%
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	95%
4	Tertib usaha	80%
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	99%
6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	40%
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5%

No.	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET TAHUN 2023
31	**PERINDUSTRIAN**	
1	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	1 Industri Besar
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan industri (IPUI) bagi industri besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Ijin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%
32	**TRANSMINGRASI**	
1	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	40%
2	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya	70%
3	Rekapitulasi Warga Transmigrasi yang ditempatkan	50 KK
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
33	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**	
1	Rasio belanja pegawai diluar guru dan guru tenaga kesehatan	0.18
2	Rasio PAD (ADHK)	0,014
3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	0.9
4	Opini laporan keuangan	WTP
5	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan Pembangunan	75%
6	Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	100%
34	**PENGAWASAN**	
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
2	Peningkatan kapabilitas apparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	Level 3
3	Persentase capaian pelaksanaan PKPT	100%
35	**PENGADAAN**	
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang di bawah ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	≤ 0,8%
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompertitif	100%
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100%
36	**KEPEGAWAIAN**	
1	Rasio pegawai pendididkan tinggi dan menengah/dasar PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	5,40
2	Rasio pegawai fungsional, PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	0,09
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	11.75
4	Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD	80%

No.	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET TAHUN 2023
37	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	
1	Persentase ASN yang Berkompetensi	40%
38	**MANAJEMEN KEUANGAN**	
1	Defiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-0.12%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-0,03
3	Jumlah Dokumen Manajemen Aset	4
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belaja dalam APBD tahun sebelumnya	0.04
39	**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**	
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%
3	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%
4	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	45%
5	Persentase pelayanan penghubung	100%
6	Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi	100%
7	Indeks Reformasi Birokrasi	61
8	Nilai LPPD	Tinggi
9	Persentase Rekomendasi pelaksanaan program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%
10	Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100%
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100%
12	Persentase pelaksanaan program kebijakan administrasi pembangunan	95%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Utara merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari satu kesatuan integral pencapaian Visi dan Misi RPJMD periode Tahun 2021-2026. Untuk itu seluruh pemangku kepentingan pembangunan Sulawesi Utara perlu mendukung pencapaian amanat-amanat dan target-target yang tertuang dalam RPJMD tersebut khususnya di Tahun 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 pada Bab II, pembangunan Sulawesi Utara menghadapi berbagai permasalah pembangunan saat ini yaitu situasi pandemi *Covid-19* membuat struktur ekonomi sulawesi utara terkontraksi, kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan umkm, dan pengembangan sektor unggulan, masih cukup tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin, terutama kemiskinan di perdesaan, yang mata pencaharian penduduknya dominan di sektor pertanian, kualitas sdm yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan daya saing tenaga kerja terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka, belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat, baik dari ketersediaan, distribusi, maupun diversifikasi, masih cukup tingginya kecenderungan ketergantungan terhadap energy fosil, serta pelayanan jaringan listrik untuk masyarakat yang belum optimal, perlunya peningkatan pelayanan infrastruktur yang mendukung dinamika aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta pengurangan kesenjangan antar wilayah, belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditandai dengan meningkatkan kerusakan ekosistem teresterial dan pesisir-laut, serta meningkatnya pencemaran lingkungan hidup, dan masih perlunya peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi.

Untuk mengatasi masalah tersebut telah dituangkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan serta prioritas program dan kegiatan sebagaimana tertuang pada Bab IV, dengan kebijakan pendanaan tertuang pada Bab III, Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota yang tertuang pada bab V, rincian kegiatan pada Bab

VI, serta target indikator kinerja utama pada tahun 2023 yang tertuang pada bab VII.

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 adalah dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023, yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS. Berkenan dengan hal tersebut, maka RKPD Tahun 2023 harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2023 dan menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023.

Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 ini sangat diperlukan. Sehingga pelaksanaan pembangunan yang mengacu kepada RKPD Tahun 2023 mampu mendukung tercapainya Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yakni **"Sulawesi Utara Maju Dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia Ke Asia Pasifik".**

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE

PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1,292,565,806,350**					**1,388,953,194,350**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**647,130,815,925**					**646,995,577,625**
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**395,388,625**					**395,388,625**
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	100 Persentase	82,038,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	82,038,900
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	100 Persentase	120,112,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	120,112,500
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	100 Persentase	193,237,225	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	193,237,225
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**639,080,000,000**					**639,080,000,000**
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun Anggaran	100 Persentase	630,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	630,000,000,000
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 Persentase	1,080,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	1,080,000,000
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 Persentase	8,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	8,000,000,000
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,575,238,300**					**1,440,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Presentase tingkat disiplin pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	350 Pakaian	100 Persentase	550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	550,000,000
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase tingkat disiplin pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 Persentase	149,988,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	150,000,000
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Presentase tingkat disiplin pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 Persentase	140,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
1	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Presentase tingkat disiplin pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	300 Orang	100 Persentase	490,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	490,000,000
1	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase tingkat disiplin pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 Persentase	245,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	250,000,000
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,522,500,000**					**1,522,500,000**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Paket	100 Persentase	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	500,000,000
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 Persentase	1,022,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	1,022,500,000
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,444,380,000**					**1,444,380,000**
1	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 Persentase	511,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	511,250,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Unit	100 Persentase	683,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	683,130,000
1	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Unit	100 Persentase	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	250,000,000
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**894,996,500**					**894,996,500**
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersediannya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan ListrikTersrdiannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 TA	100 Persentase	894,996,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	894,996,500
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,218,312,500**					**2,218,312,500**
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	jumlah kendaraan dinas	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	100 Persentase	797,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	797,550,000
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	145 Unit	100 Persentase	398,262,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	398,262,500
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 Persentase	1,022,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	1,022,500,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**643,377,102,404**					**738,440,354,932**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**								**377,185,692,972**					**371,150,132,406**
1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 Persentase	50,600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	2,556,250,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Ruang	100 Persentase	15,640,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	511,250,000
1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Indikatro Mandiri	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Ruang	100 Persentase	404,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	5,057,113,000
1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Ruang	100 Persentase	2,300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	2,610,442,500
1	01	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Ruang	100 Persentase	2,300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	2,080,237,395
1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Ruang	100 Persentase	2,852,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	7,675,384,890
1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Ruang	100 Persentase	828,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	1,952,823,670
1	01	02	1.01	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Ruang	100 Persentase	828,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	1,981,346,307
1	01	02	1.01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Ruang	100 Persentase	460,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	2,875,690,135

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	02	1.01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Ruang	100 Persentase	736,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.01	12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Ruang	100 Persentase	3,220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.01	13	Pembangunan Asrama Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 Persentase	2,300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	65 Unit	100 Persentase	1,380,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,450,000,000
1	01	02	1.01	15	Pembangunan Fasilitas Parkir	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	100 Persentase	276,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.01	16	Pembangunan Kantin Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 Persentase	276,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 Persentase	552,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.01	18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Ruang	100 Persentase	368,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Ruang	100 Persentase	23,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	4,227,546,475
1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Ruang	100 Persentase	368,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	2,572,439,242
1	01	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	11 Ruang	100 Persentase	1,380,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	3,011,081,517
1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Ruang	100 Persentase	2,300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	2,310,092,941
1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	11 Ruang	100 Persentase	2,300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	2,556,224,498
1	01	02	1.01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Ruang	100 Persentase	2,300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	454,001,452
1	01	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Ruang	100 Persentase	2,300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	582,676,737
1	01	02	1.01	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Ruang	100 Persentase	2,300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Ruang	100 Persentase	276,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	155,820,002
1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Ruang	100 Persentase	368,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	3,098,915,249
1	01	02	1.01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Ruang	100 Persentase	368,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.01	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 Persentase	2,484,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Unit	100 Persentase	3,982,223,034	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	4,370,952,780
1	01	02	1.01	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 Persentase	220,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1000 Paket	100 Persentase	46,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	226 sekolah	100 Persentase	4,158,400,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	123,810,857,748

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 Peserta didik	100 Persentase	84,220,781,870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	133,810,857,748
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150 Peserta Didik	100 Persentase	920,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	255,625,000
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5100 Orang	100 Persentase	45,996,037,468	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	51,014,535,967
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 Persentase	552,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	370,135,593
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Satuan Pendidikan	100 Persentase	9,030,650,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	598,444,060
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Satuan Pendidikan	100 Persentase	57,040,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	76,687,500
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**								**183,537,741,590**					**251,860,185,026**
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah USB Unit Sekolah baru	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Sekolah	100 Persentase	2,556,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	2,556,250,000
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Ruang	100 Persentase	10,225,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	02	1.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Sekolah	100 Persentase	10,225,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Ruang	100 Persentase	1,840,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	25,208,323,073
1	01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Ruang	100 Persentase	3,790,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	3,838,580,616
1	01	02	1.02	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Ruang	100 Persentase	1,350,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	1,391,097,139
1	01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Ruang	100 Persentase	10,225,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.02	08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Ruang	100 Persentase	10,225,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.02	09	Pembangunan Asrama Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 Persentase	10,225,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	100 Persentase	766,042,480	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	886,613,229
1	01	02	1.02	11	Pembangunan Fasilitas Parkir	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 Persentase	10,225,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.02	12	Pembangunan Kantin Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 Persentase	10,225,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.02	13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 Persentase	10,225,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.02	14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Ruang	100 Persentase	10,225,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	190 Ruang	100 Persentase	1,750,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	18,794,622,745
1	01	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Ruang	100 Persentase	662,040,406	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	662,040,406

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	02	1.02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Ruang	100 Persentase	4,422,312,745	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	4,422,312,745
1	01	02	1.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah rehabilitasi ruang laboratorium	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Sekolah	100 Persentase	1,048,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	1,068,512,917
1	01	02	1.02	19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Sekolah	100 Persentase	10,225,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Sekolah	100 Persentase	248,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	255,625,000
1	01	02	1.02	21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Sekolah	100 Persentase	10,225,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.02	22	Rehabilitasi Asrama Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 Persentase	10,225,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.02	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	100 Persentase	880,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	883,532,156

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 Persentase	10,225,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.02	27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Ruang	100 Persentase	10,225,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah siswa penerima perlengkapan peserta didik	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1000 siswa	100 Persentase	10,225,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jum;ah sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	198 sekolah 0 Paket 198 Paket	100 Persentase	18,675,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	20,675,000,000
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	54721 Peserta didik	100 Persentase	110,978,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	123,978,175,000
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Satuan Pendidikan	100 Persentase	25,562,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	25,562,500
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 Peserta Didik	100 Persentase	255,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	255,625,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4450 Orang	100 Persentase	33,457,775,959	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	46,012,500,000
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200 Orang	100 Persentase	204,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	204,500,000
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Satuan Pendidikan	100 Persentase	397,195,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	511,250,000
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Satuan Pendidikan	100 Persentase	76,687,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	76,687,500
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**								**82,653,667,842**					**115,430,037,500**
1	01	02	1.03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 Persentase	46,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Ruang	100 Persentase	2,484,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.03	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Ruang	100 Persentase	349,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	20,225,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	02	1.03	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 sekolah	100 Persentase	460,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	355,625,000
1	01	02	1.03	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Ruang	100 Persentase	32,000,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	20,225,000
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 sekolah	100 Persentase	10,225,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	20,225,000
1	01	02	1.03	11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 Persentase	368,000,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	20,225,000
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Ruang	100 Persentase	800,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	255,625,000
1	01	02	1.03	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Ruang	100 Persentase	455,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	255,625,000
1	01	02	1.03	20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Ruang	100 Persentase	368,000,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.03	23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 Persentase	9,200,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	76,687,500
1	01	02	1.03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitasi Sekolah	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 sekolah	100 Persentase	8,280,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.03	27	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 sekolah	100 Persentase	349,600,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200 Siswa	100 Persentase	9,660,000,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	10,225,000
1	01	02	1.03	40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	31 Paket	100 Persentase	248,000,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	153,375,000
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Peserta Didik	100 Persentase	800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	110,567,525,000
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Pendidik pada Jenjang Satuan Pendidikan Khusus	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	265 Orang	100 Persentase	1,446,831,342	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	3,045,000,000
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus yang Mendapatkan Pengembangan Karir	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang	100 Persentase	644,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	253,375,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Terakreditasi	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Satuan Pendidikan 31 sekolah	100 Persentase	275,211,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	299,387,500
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Presentase Sekolah yang Mendapatkan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persentase	100 Persentase	423,200,000			TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100 %	25,562,500
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**								**124,452,000**					**258,725,568**
1	**01**	**03**	**1.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**								**42,361,200**					**102,250,000**
1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL	Sekolah yang menyelenggarakan muatan lokal	Jumlah sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persentase	10 Sekolah	42,361,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL	100 %	102,250,000
1	**01**	**03**	**1.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**								**82,090,800**					**156,475,568**
1	01	03	1.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Jumlah Sekolah Yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persentase	10 Sekolah	41,045,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL	100 %	54,225,568
1	01	03	1.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	Jumlah Sekolah Yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Buku	10 Sekolah	41,045,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL	100 %	102,250,000
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**								**883,200,000**					**1,002,438,921**
1	**01**	**04**	**1.01**		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**								**883,200,000**					**1,002,438,921**
1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen Hasil Perhitungan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1:14 Rasio	2 Dokumen	2 Dokumen	552,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	1:14 Rasio	555,625,000
1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen Hasil Perhitungan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1:14 Rasio	2 Laporan	2 Dokumen	331,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	1:14 Rasio	446,813,921
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**								**147,797,100**					**1,353,658,383**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**01**	**05**	**1.01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**								**68,668,100**					**511,250,000**
1	01	05	1.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	presentase pelaksanaan pengendalian perizinan Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persentase	100 Persentase	30,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	100 %	255,625,000
1	01	05	1.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Terlaksananya Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat	presentase pelaksanaan pengendalian perizinan Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 TA	100 Persentase	38,368,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	100 %	255,625,000
1	**01**	**05**	**1.02**		**Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**								**79,129,000**					**842,408,383**
1	01	05	1.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Terlaksananya Pengawasan Perizinan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat	presentase pelaksanaan pengendalian perizinan Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persentase	100 Persentase	17,569,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	100 %	255,625,000
1	01	05	1.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	presentase pelaksanaan pengendalian perizinan Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 TA	100 Persentase	26,562,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	100 %	255,625,000
1	01	05	1.02	03	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Pendidik yang mendapat Pelatihan	presentase pelaksanaan pengendalian perizinan Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persentase	100 Persentase	34,997,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	100 %	331,158,383
1	**01**	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**								**902,438,921**					**902,438,921**
1	**01**	**06**	**1.01**		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**902,438,921**					**902,438,921**
1	01	06	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 TA	100 Persentase	102,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	100 %	102,250,000
1	01	06	1.01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Terlaksananya Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah di Sekolah	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persentase	100 Persentase	102,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	100 %	102,250,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	06	1.01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Publikas	100 Persentase	102,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	100 %	102,250,000
1	01	06	1.01	04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang	100 Persentase	102,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	100 %	102,250,000
1	01	06	1.01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Buku	100 Persentase	153,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	100 %	153,375,000
1	01	06	1.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Peserta Didik	100 Persentase	186,688,921	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	100 %	186,688,921
1	01	06	1.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Dokumen	100 Persentase	153,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	100 %	153,375,000
												TOTAL	**1,292,565,806,350**					**1,388,953,194,350**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**314,000,000**					**315,648,499**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**298,898,800**					**299,523,499**
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**18,024,513**					**19,000,000**
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	1 Tahun	18,024,513	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	100 %	19,000,000
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**150,343,832**					**149,503,090**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	1 Tahun	8,226,432	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	100 %	7,339,750
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	1 Tahun	142,117,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	100 %	142,163,340
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**5,871,900**					**5,180,230**
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	1 Tahun	5,871,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	100 %	5,180,230
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**84,843,900**					**88,371,340**
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	1 100	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	100 %	18,000,000
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	1 100	66,843,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	100 %	70,371,340
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**39,814,655**					**37,468,839**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	1 Tahun	37,814,655	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	100 %	35,468,839
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	1 Tahun	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	100 %	2,000,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**15,101,200**					**16,125,000**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**								**8,105,600**					**8,000,000**
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Presentase Siswa yang mendapatkan Dana BOS Sekolah menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Cakupan Waktu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Sekolah 100 %	4 Satuan Pendidikan	1 Tahun	3,497,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Presentase Siswa yang mendapatkan Dana BOS Sekolah menengah Atas	4 Sekolah 100 %	4,000,000
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Presentase Siswa yang mendapatkan Dana BOS Sekolah menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Cakupan Waktu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Sekolah 100 %	4 Satuan Pendidikan	1 Tahun	4,607,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Presentase Siswa yang mendapatkan Dana BOS Sekolah menengah Atas	4 Sekolah 100 %	4,000,000
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**								**6,995,600**					**8,125,000**
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menenah Kejuruan Terakreditasi Presentase Siswa yang mendapatkan Dana BOS Sekolah menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Atas Terakreditasi B ke A	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah 100 %	5 Sekolah	5 Satuan Pendidikan	3,497,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sekolah Menenah Kejuruan Terakreditasi Presentase Siswa yang mendapatkan Dana BOS Sekolah menengah Kejuruan	5 Sekolah 100 %	4,000,000
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menenah Kejuruan Terakreditasi Presentase Siswa yang mendapatkan Dana BOS Sekolah menengah Kejuruan	Presentase Siswa yang mendapatkan Dana BOS Sekolah menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah 100 %	100 %	5 Satuan Pendidikan	3,497,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sekolah Menenah Kejuruan Terakreditasi Presentase Siswa yang mendapatkan Dana BOS Sekolah menengah Kejuruan	5 Sekolah 100 %	4,125,000
												TOTAL	**314,000,000**					**315,648,499**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**270,000,000**					**310,500,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**231,617,800**					**253,000,000**
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**64,921,800**					**59,800,000**
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ketersediannya administrasi keuangan	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	44,023,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	48,300,000
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase ketersediannya administrasi keuangan	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	5,954,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	5,750,000
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase ketersediannya administrasi keuangan	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	14,944,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	5,750,000
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,700,000**					**23,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah ASN dan THL yang menggunakan seragam sesuai aturan	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	1,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	23,000,000
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**44,577,800**					**40,250,000**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase ketersediannya peralatan dan perlengkapan kantor juga jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	16,163,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	17,250,000
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase ketersediannya peralatan dan perlengkapan kantor juga jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Laporan	100 %	28,413,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	23,000,000
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**79,116,392**					**75,900,000**
1	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ketersedianya peralatan dan mesin lainnya	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	29,497,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	40,250,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Ketersediaya peralatan dan mesin lainnya	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit 100 %	100 %	49,618,892	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	35,650,000
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**6,000,000**					**13,800,000**
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	`00 %	12 Laporan	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	`00 %	13,800,000
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**35,301,808**					**40,250,000**
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	35,301,808	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	40,250,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**38,382,200**					**57,500,000**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**								**12,417,200**					**28,750,000**
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah sekolah lanjutan tingkat atas/SLTA Negeri Terakreditas	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Satuan Pendidikan	100 %	12,417,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100 %	28,750,000
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**								**25,965,000**					**28,750,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah sekolah menengah kejuruan terakreditas B ke A dan Jumlah sekolah menengah kejuruan terakreditas C ke B	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Satuan Pendidikan	100 %	25,965,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100 %	28,750,000
TOTAL													**270,000,000**					**310,500,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**314,000,000**					**345,000,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**254,000,000**					**270,000,000**
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**66,673,890**					**70,000,000**
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	1 Tahun	66,673,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	100 %	70,000,000
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**35,000,000**					**40,000,000**
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase tingkat Disiplin Pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Persentase tingkat Disiplin Pegawai	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Paket	1 Tahun	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tingkat Disiplin Pegawai	100 %	40,000,000
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**94,060,470**					**100,000,000**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	1 Tahun	28,060,470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	100 %	30,000,000
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	1 Tahun	66,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	100 %	70,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**9,000,000**					**10,000,000**
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Laporan	1 Tahun	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	100 %	10,000,000
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**49,265,640**					**50,000,000**
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraa n Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	2 Unit	1 Tahun	49,265,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kendaraa n Dinas	2 Unit	50,000,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**60,000,000**					**75,000,000**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**								**20,000,000**					**25,000,000**
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Presentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Terlaksananya Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang berpartisiapasi dalam Pendidikan Menengah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	11 Satuan Pendidikan	1 Tahun	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	100 %	25,000,000
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**								**30,000,000**					**35,000,000**
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Presentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Terlaksananya Presentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	19 Satuan Pendidikan	1 Tahun	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	100 %	35,000,000
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**								**10,000,000**					**15,000,000**
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Presentase Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Terlaksananya Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Satuan Pendidikan	1 Tahun	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100 %	15,000,000
												TOTAL	**314,000,000**					**345,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0006 CABANG DINAS TOMOHON DAN MINAHASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**269,940,000**					**310,431,001**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**244,913,424**					**281,681,001**
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**13,918,934**					**10,191,737**
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	13,918,934	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	10,191,737
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**70,699,507**					**61,890,631**
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	76 Dokumen	100 %	70,699,507	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	61,890,631
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**23,587,500**					**26,881,250**
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Tingkat Disiplin Pegawai	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Pakaian	100 %	23,587,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	26,881,250
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**63,118,253**					**61,399,570**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Kembuan	100 %	4 Paket	100 %	11,294,468	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	13,349,292

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0006 CABANG DINAS TOMOHON DAN MINAHASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	72 Laporan	100 %	51,823,785	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	48,050,278
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**31,015,287**					**34,442,500**
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Kembuan	100 %	6 Unit	100 %	31,015,287	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	34,442,500
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3,000,000**					**41,400,000**
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Kembuan	100 %	12 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	41,400,000
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**39,573,943**					**45,475,313**
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE AKUNTABILITAS KINERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN TOMOHON MINAHASA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	39,573,943	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE AKUNTABILITAS KINERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN TOMOHON MINAHASA	100 %	45,475,313
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**25,026,576**					**28,750,000**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**								**12,513,288**					**14,375,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0006 CABANG DINAS TOMOHON DAN MINAHASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	42 Satuan Pendidikan	42 Satuan Pendidikan	12,513,288	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100 %	14,375,000
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**								**12,513,288**					**14,375,000**
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26 Satuan Pendidikan	26 Satuan Pendidikan	12,513,288	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100 %	14,375,000
												TOTAL	**269,940,000**					**310,431,001**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0007 CABANG DINAS KEPULAUAN TALAUD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**358,000,000**					**221,000,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**266,000,000**					**141,000,000**
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**33,378,000**					**0**
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ketersediannya administrasi keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ketersediannya administrasi keuangan	Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	29,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase ketersediannya administrasi keuangan	50 Dokumen	0
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase ketersediannya administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase ketersediannya administrasi keuangan	Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Dokumen	1 Laporan	50 Dokumen	3,378,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase ketersediannya administrasi keuangan	50 Dokumen	0
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**29,750,000**					**0**
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah ASN dan THL yang menggunakan seragam sesuai aturan	Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persentase	15 Paket 20 Pakaian	100 Persen	29,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 persentase	0
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**61,872,000**					**0**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase ketersediannya peralatan dan perlengkapan kantor juga jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persentase	5 Paket	100 Persen	14,968,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persentase	0
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase ketersediannya peralatan dan perlengkapan kantor juga jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persentase	12 Laporan	100 Persen	46,904,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persentase	0
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**34,497,800**					**34,497,800**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0007 CABANG DINAS KEPULAUAN TALAUD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persentase	1 Tahun	100 Persen	34,497,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	100 persentase	34,497,800
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**12,000,000**					**12,000,000**
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Tahun	100 Persen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	100 persen	12,000,000
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**94,502,200**					**94,502,200**
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Tahun	100 Persen	33,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	100 persen	33,930,000
1	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Tahun	100 Persen	10,572,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	100 persen	10,572,200
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Tahun	100 Persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	100 persen	50,000,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**92,000,000**					**80,000,000**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**								**14,000,000**					**10,000,000**
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Cakupan Waktu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Sekolah	1 Tahun	100 Persen	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	4 Sekolah	10,000,000
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**								**14,000,000**					**10,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0007 CABANG DINAS KEPULAUAN TALAUD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	umlah Sekolah Menenah Kejuruan Terakreditasi	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 sekolah	1 Tahun	5 Satuan Pendidikan	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		umlah Sekolah Menenah Kejuruan Terakreditasi	5 sekolah	10,000,000
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**								**64,000,000**					**60,000,000**
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendikan KhususTerakreditasi	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Pendikan KhususTerakreditasi	Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Tahun	100 Persen	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sekolah Pendikan KhususTerakreditasi	100 persen	10,000,000
1	01	02	1.03	56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendikan KhususTerakreditasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendikan KhususTerakreditasi	Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Tahun	100 Persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sekolah Pendikan KhususTerakreditasi	100 persen	50,000,000
												TOTAL	**358,000,000**					**221,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0008 CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**269,451,249**					**309,868,936**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**239,520,049**					**275,650,571**
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**19,020,000**					**18,112,500**
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Akuntabilitas SKPD	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	19,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	18,112,500
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**75,000,000**					**86,250,000**
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ketersediannya administrasi keuangan	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	86,250,000
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**25,500,000**					**29,325,000**
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah ASN dan THL yangmenggunakan seragam sesuai aturan	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Kolongan	100 %	30 Paket	100 %	25,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	29,325,000
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**47,581,200**					**54,718,150**
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase ketersediannya peralatan dan perlengkapan kantor juga jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Kolongan	100 %	12 Dokumen	100 %	47,581,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	54,718,150
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**32,650,000**					**38,318,000**
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	32,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	38,318,000
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**4,000,000**					**4,600,000**
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	3,450,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0008 CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	1,150,000
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**35,768,849**					**44,326,921**
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 %	1 Unit	100 %	35,768,849	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	44,326,921
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**29,931,200**					**34,218,365**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**								**10,000,000**					**11,500,000**
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah sekolah lanjutan tingkat atas/SLTA Negeri Terakreditas	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Satuan Pendidikan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100 %	11,500,000
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**								**10,000,000**					**11,500,000**
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah sekolah menengah kejuruan terakreditas B ke A dan Jumlah sekolah menengah kejuruan terakreditas C ke B	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Satuan Pendidikan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100 %	11,500,000
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**								**9,931,200**					**11,218,365**
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warganegara usia 16-18 tahunyang berpartisipasi dalampendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaandan Manajemen	jumlah sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Satuan Pendidikan	100 %	9,931,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warganegara usia 16-18 tahunyang berpartisipasi dalampendidikan	100 %	11,218,365
												TOTAL	**269,451,249**					**309,868,936**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0010 CABANG DINAS SANGIHE

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**358,000,000**					**432,500,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**344,000,000**					**403,500,000**
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**57,770,000**					**70,000,000**
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ketersediaannya Administrasi Keuangan	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	28,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	35,000,000
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase ketersediaannya Administrasi Keuangan	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	29,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	35,000,000
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**15,000,000**					**30,000,000**
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah ASN dan THL yang menggunakan seragam sesuai aturan	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Pakaian	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	30,000,000
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**140,230,000**					**161,500,000**
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Presentase ketersediaannya Administrasi Umum	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,500,000
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase ketersediaannya Administrasi Umum	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,000,000
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase ketersediaannya Administrasi Umum	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Laporan	100 %	133,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	150,000,000
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**48,000,000**					**48,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0010 CABANG DINAS SANGIHE

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Presentase ketersediaannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Laporan	100 %	48,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	48,000,000
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**83,000,000**					**94,000,000**
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase ketersediaannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	59,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	65,000,000
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase ketersediaannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	9,000,000
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase ketersediaannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	20,000,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**14,000,000**					**29,000,000**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**								**9,000,000**					**18,000,000**
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Tingkat partisipasi warga negara usia16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang terakreditasi	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Satuan Pendidikan	100 %	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100 %	18,000,000
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**								**4,000,000**					**9,000,000**
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat partisipasi warga negara usia16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan terakreditasi B ke A dan jumlah sekolah Menengah Kejuruan Terakreditasi C ke B	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Satuan Pendidikan	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100 %	9,000,000
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**								**1,000,000**					**2,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0010 CABANG DINAS SANGIHE

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang terakreditasi	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Satuan Pendidikan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100 %	2,000,000
TOTAL													**358,000,000**					**432,500,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0011 UPTD SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY PROVINSI SULAWESI UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**2,822,000,000**					**3,848,978,505**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**2,822,000,000**					**3,848,978,505**
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,886,500**					**8,865,005**
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Akuntabilitas Kinerja Pendidikan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 Persentase	20 Laporan	1 Tahun Anggaran	2,196,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Akuntabilitas Kinerja Pendidikan Daerah	100 Persentase	1,966,003
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase Akuntabilitas Kinerja Pendidikan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 Persentase	12 Laporan	1 Tahun Anggaran	1,689,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Akuntabilitas Kinerja Pendidikan Daerah	100 Persentase	6,899,002
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2,967,500**					**3,967,500**
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 Persentase	100 Persentase	1 Tahun Anggaran	2,967,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	100 Persentase	3,967,500
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,720,081,000**					**3,721,081,000**
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 Persentase	25 Laporan	100 Persentase	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persentase	6,000,000
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 Persentase	25 Laporan	100 Persentase	2,715,081,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persentase	3,715,081,000
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**95,065,000**					**115,065,000**
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 Persentase	3 Unit	100 Persentase	36,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persentase	46,680,000
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 Persentase	3 ruang	100 Persentase	58,385,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persentase	68,385,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0011 UPTD SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY PROVINSI SULAWESI UTARA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								TOTAL	2,822,000,000					3,848,978,505

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0012 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**314,000,000**					**393,624,800**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**279,880,800**					**350,653,600**
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**85,394,600**					**100,000,000**
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan PemerintahDaerahProvinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase ketersediaannya Administrasi Keuangan	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	85,394,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan PemerintahDaerahProvinsi	100 %	100,000,000
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**98,343,400**					**109,153,600**
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Ketersediaannya peralatan dan perlengkapan kantor dan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 TA	100 %	2,786,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	4,153,600
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketersediaannya peralatan dan perlengkapan kantor dan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 TA	100 %	95,556,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	105,000,000
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**53,123,200**					**75,000,000**
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Ketersediaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	3 Unit	53,123,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	75,000,000
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**28,500,000**					**41,500,000**
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 TA	12 laporan	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	24,000,000
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 TA	12 laporan	16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	17,500,000
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**14,519,600**					**25,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0012 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas dan alat elektronik	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Bolangitang Barat, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	3 Unit	11,519,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	20,000,000
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah kendaraan dinas dan alat elektronik	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	3 Unit	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	5,000,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**34,119,200**					**42,971,200**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**								**17,059,600**					**21,485,600**
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	persentase terlaksananyaprogram penunjang urusan Pemerintah Daerah Propinsi	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditas	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Satuan Pendidikan	100 %	12,316,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase terlaksananyaprogram penunjang urusan Pemerintah Daerah Propinsi	100 %	15,000,000
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	persentase terlaksananyaprogram penunjang urusan Pemerintah Daerah Propinsi	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditas	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Satuan Pendidikan	100 %	4,742,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase terlaksananyaprogram penunjang urusan Pemerintah Daerah Propinsi	100 %	6,485,600
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**								**17,059,600**					**21,485,600**
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalampendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Menegah Kejuruan Terakreditas B ke A dan sekolah menegah kejuruan terakreditas C ke B	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	6 Satuan Pendidikan	100 %	12,316,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalampendidikan	100 % 100 %	15,000,000
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalampendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menegah Kejuruan Terakreditas B ke A dan sekolah menegah kejuruan terakreditas C ke B	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	6 Satuan Pendidikan	100 %	4,742,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalampendidikan	100 % 100 %	6,485,600
												TOTAL	**314,000,000**					**393,624,800**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0013 UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**450,000,000**					**517,500,002**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**225,690,000**					**309,895,849**
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**134,724,250**					**86,466,810**
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya kebutuhan Administrasi Pegawai	Persentase Akuntabilitas Kinerja UPTD Balai TIK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun Anggaran	100 %	101,102,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	67,430,515
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Akuntabilitas Kinerja UPTD Balai TIK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	14,893,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	6,256,851
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Akuntabilitas Kinerja UPTD Balai TIK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	100 %	18,728,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	12,779,444
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**2,756,300**					**2,805,425**
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Akuntabilitas Kinerja UPTD Balai TIK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	2,756,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,805,425
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**0**					**25,806,000**
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Yang tersedia	Persentase tingkat Disiplin Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Pakaian	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	25,806,000
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**8,136,400**					**33,196,981**
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Akuntabilitas Kinerja UPTD Balai TIK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun Anggaran	100 %	8,136,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	33,196,981
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**16,991,550**					**84,743,133**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0013 UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia	Persentase Akuntabilitas Kinerja UPTD Balai TIK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	7,121,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	80,480,715
1	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Akuntabilitas Kinerja UPTD Balai TIK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	9,870,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	4,262,418
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**63,081,500**					**76,877,500**
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas	Persentase Akuntabilitas Kinerja UPTD Balai TIK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	44,081,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	68,252,500
1	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Akuntabilitas Kinerja UPTD Balai TIK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	8,625,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**224,310,000**					**207,604,153**
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**								**224,310,000**					**207,604,153**
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Tingkat partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Sekolah	15 Sekolah	63,726,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	100 %	81,650,000
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Tingkat partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Jumlah Sekolah Menengah Atas Terakreditasi B ke A; Jumlah Sekolah Menengah Atas Terakreditasi C ke B;	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Sekolah	15 Sekolah	160,584,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	100 %	125,954,153
												TOTAL	**450,000,000**					**517,500,002**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**168,987,876,172**					**136,627,208,586**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**140,110,950,704**					**122,327,449,211**
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**58,001,773**					**46,801,773**
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	31,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	20,000,000
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	15,000,000
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	5,896,133	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,896,133
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	5,905,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,905,640
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**133,775,696,047**					**117,535,981,178**
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1100 Orang/ Bulan	100 %	131,669,718,367	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	115,430,000,000
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Dokumen	100 %	2,096,654,384	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	2,096,654,384
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	6,176,996	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	6,176,996

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17 Laporan	100 %	3,146,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	3,149,798
1	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,024,500,014**					**650,000,000**
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket 300 Paket	100 %	720,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	300,000,000
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	304,000,014	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	350,000,000
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**594,298,000**					**700,000,000**
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Paket	100 %	97,599,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	200,000,000
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	496,699,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	500,000,000
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,617,795,910**					**1,200,000,000**
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit	100 %	299,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	200,000,000
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Unit	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	500,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Unit	100 %	818,550,910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	500,000,000
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,117,242,700**					**1,300,000,000**
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36 Laporan	100 %	1,100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	1,100,000,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Laporan	100 %	1,017,242,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	200,000,000
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**923,416,260**					**894,666,260**
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Unit	100 %	2,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	200,000,000
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Unit	100 %	359,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	200,000,000
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 25 Unit	100 %	94,666,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	94,666,260
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	466,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	400,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**26,439,353,516**					**12,649,759,375**
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**3,926,796,488**					**3,525,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Layanan	100 %	199,958,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	461,521,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	265,317,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Dokumen	100 %	999,999,588	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	1,025,000,000
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan Tersedianya Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket 100 %	100 %	1,999,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	2,500,000,000
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**20,450,540,128**					**6,624,759,375**
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	500,000,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	525,000,000
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	501,683,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	525,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Kematian Balita Jumlah Kematian Bayi Jumlah Kematian Ibu Jumlah Kematian Neonatal	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 230 orang 250 orang 30 orang 200 orang	100 %	500,000,000			PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	512,500,000
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Jumlah Kab/Kota yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 15 Kab/Kota	100 %	149,998,005	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	153,750,000
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 15 Kab/Kota	100 %	165,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	169,509,375
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 100 %	100 %	2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	2,050,000,000
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 15 Kab/Kota	100 %	199,708,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	205,000,000
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 15 Kab/Kota	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	205,000,000
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Kab/Kota	100 %	999,999,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 15 Kab/Kota	100 %	149,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 10 % 12 % 13 % 15 % 30 % 53 % 70 % 79 % 80 % 84 % 85 % 91 % 92 % 100 %	100 %	1,876,968,848	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	1,890,000,000

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	148,212,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan Pelayanan Kesehatan Khusus	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Kab/Kota	100 %	499,948,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Persentase Universal Health Coverage (UHC) yang terpenuhi	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Kab/Kota	100 %	11,478,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen 72 % 80 % 93 %	100 %	180,023,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	189,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah DTPK yang mendapat pelayanan kesehatan	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Kab	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Puskesmas Yang terakreditasi	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	499,998,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 100 %	100 %	199,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	200,000,000
1	**02**	**02**	**1.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**								**1,062,782,400**					**2,500,000,000**
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	100 %	800,271,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	1,000,000,000
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	146,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	500,000,000
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	116,371,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	1,000,000,000
1	**02**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								**999,234,500**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah rumah sakit dibina dan dipersiapkan akreditasinya Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 RS 0 Unit	100 %	499,240,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Dengan Pembiayaan Mandiri	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 RS	100 %	499,994,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**937,621,952**					**0**
1	**02**	**03**	**1.01**		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**								**442,728,952**					**0**
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	TERCAPAINYA RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45/100.000 Penduduk	0 Orang	100 %	242,735,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	45/100.000 Penduduk	0
1	02	03	1.01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	TERCAPAINYA RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45/100.000 Penduduk	0 Orang 15 Dokumen	100 %	199,993,952	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	45/100.000 Penduduk	0
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								**494,893,000**					**0**
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	TERCAPAINYA RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45/100.000 Penduduk	0 Orang	100 %	194,953,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	45/100.000 Penduduk	0
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	TERCAPAINYA RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45/100.000 Penduduk	5 Dokumen	100 %	299,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	45/100.000 Penduduk	0
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**								**500,000,000**					**625,000,000**
1	**02**	**04**	**1.01**		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**								**500,000,000**					**625,000,000**
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Sarana	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100 %	625,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**								**999,950,000**					**1,025,000,000**
1	**02**	**05**	**1.02**		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**								**999,950,000**					**1,025,000,000**
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Kab/Kota yang memiliki menerapkan kebijhakan masyarakat gerakan hidup sehat	TERCAPAINYA PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 15 kab/kota	100 %	999,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	100 %	1,025,000,000
												TOTAL	**168,987,876,172**					**136,627,208,586**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**168,987,876,172**					**136,627,208,586**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**140,110,950,704**					**122,327,449,211**
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**58,001,773**					**46,801,773**
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	31,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	20,000,000
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	15,000,000
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	5,896,133	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,896,133
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	5,905,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,905,640
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**133,775,696,047**					**117,535,981,178**
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1100 Orang/ Bulan	100 %	131,669,718,367	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	115,430,000,000
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Dokumen	100 %	2,096,654,384	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	2,096,654,384
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	6,176,996	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	6,176,996

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17 Laporan	100 %	3,146,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	3,149,798
1	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,024,500,014**					**650,000,000**
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket 300 Paket	100 %	720,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	300,000,000
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	304,000,014	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	350,000,000
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**594,298,000**					**700,000,000**
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Paket	100 %	97,599,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	200,000,000
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	496,699,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	500,000,000
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,617,795,910**					**1,200,000,000**
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit	100 %	299,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	200,000,000
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Unit	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	500,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Unit	100 %	818,550,910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	500,000,000
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,117,242,700**					**1,300,000,000**
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36 Laporan	100 %	1,100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	1,100,000,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Laporan	100 %	1,017,242,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	200,000,000
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**923,416,260**					**894,666,260**
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Unit	100 %	2,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	200,000,000
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Unit	100 %	359,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	200,000,000
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 25 Unit	100 %	94,666,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	94,666,260
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	466,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	400,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**26,439,353,516**					**12,649,759,375**
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**3,926,796,488**					**3,525,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Layanan	100 %	199,958,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	461,521,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	265,317,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Dokumen	100 %	999,999,588	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	1,025,000,000
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan Tersedianya Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket 100 %	100 %	1,999,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	2,500,000,000
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**20,450,540,128**					**6,624,759,375**
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	500,000,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	525,000,000
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	501,683,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	525,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Kematian Balita Jumlah Kematian Bayi Jumlah Kematian Ibu Jumlah Kematian Neonatal	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 230 orang 250 orang 30 orang 200 orang	100 %	500,000,000			PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	512,500,000
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Jumlah Kab/Kota yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 15 Kab/Kota	100 %	149,998,005	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	153,750,000
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 15 Kab/Kota	100 %	165,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	169,509,375
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 100 %	100 %	2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	2,050,000,000
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 15 Kab/Kota	100 %	199,708,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	205,000,000
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 15 Kab/Kota	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	205,000,000
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Kab/Kota	100 %	999,999,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 15 Kab/Kota	100 %	149,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 10 % 12 % 13 % 15 % 30 % 53 % 70 % 79 % 80 % 84 % 85 % 91 % 92 % 100 %	100 %	1,876,968,848	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	1,890,000,000

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	148,212,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan Pelayanan Kesehatan Khusus	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Kab/Kota	100 %	499,948,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Persentase Universal Health Coverage (UHC) yang terpenuhi	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Kab/Kota	100 %	11,478,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen 72 % 80 % 93 %	100 %	180,023,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	189,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah DTPK yang mendapat pelayanan kesehatan	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Kab	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Puskesmas Yang terakreditasi	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 %	499,998,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 100 %	100 %	199,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	200,000,000
1	**02**	**02**	**1.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**								**1,062,782,400**					**2,500,000,000**
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	100 %	800,271,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	1,000,000,000
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	146,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	500,000,000
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	116,371,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	1,000,000,000
1	**02**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								**999,234,500**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah rumah sakit dibina dan dipersiapkan akreditasinya Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 RS 0 Unit	100 %	499,240,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Dengan Pembiayaan Mandiri	TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 RS	100 %	499,994,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	100 %	0
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**937,621,952**					**0**
1	**02**	**03**	**1.01**		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**								**442,728,952**					**0**
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	TERCAPAINYA RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45/100.000 Penduduk	0 Orang	100 %	242,735,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	45/100.000 Penduduk	0
1	02	03	1.01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	TERCAPAINYA RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45/100.000 Penduduk	0 Orang 15 Dokumen	100 %	199,993,952	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	45/100.000 Penduduk	0
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								**494,893,000**					**0**
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	TERCAPAINYA RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45/100.000 Penduduk	0 Orang	100 %	194,953,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	45/100.000 Penduduk	0
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	TERCAPAINYA RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45/100.000 Penduduk	5 Dokumen	100 %	299,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK	45/100.000 Penduduk	0
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**								**500,000,000**					**625,000,000**
1	**02**	**04**	**1.01**		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**								**500,000,000**					**625,000,000**
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Sarana	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100 %	625,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**								**999,950,000**					**1,025,000,000**
1	**02**	**05**	**1.02**		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**								**999,950,000**					**1,025,000,000**
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Kab/Kota yang memiliki menerapkan kebijhakan masyarakat gerakan hidup sehat	TERCAPAINYA PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 15 kab/kota	100 %	999,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	100 %	1,025,000,000
												TOTAL	**168,987,876,172**					**136,627,208,586**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**22,640,000,000**					**0**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**4,599,752,447**					**0**
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**4,589,752,447**					**0**
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Noongan	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	100 %	12 Dokumen 100 %	100 %	361,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Noongan	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	100 %	12 Dokumen 100 %	100 %	4,228,052,447	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**10,000,000**					**0**
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Noongan	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	100 %	1 Paket 100 %	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**11,988,739,257**					**0**
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**11,988,739,257**					**0**
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Presentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi di Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Noongan	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	100 %	12 dokumen 100 %	100 %	11,988,739,257	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit)	100 %	0
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**6,051,508,296**					**0**
1	**02**	**03**	**1.01**		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**								**6,051,508,296**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter persatuan penduduk	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Tersedianya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi di Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Noongan	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	45/100.000 Penduduk	24 Orang 100 %	100 %	6,051,508,296	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio dokter persatuan penduduk	45/100.000 Penduduk	0
TOTAL													**22,640,000,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**75,734,000,000**					**90,880,800,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**8,078,230,300**					**9,279,033,750**
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10,999,800**					**13,200,000**
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Sario, Sario	100 %	2 Dokumen	1 TA	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4,800,000
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapainya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Sario, Sario	100 %	1 Dokumen	1 TA	6,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8,400,000
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**12,000,000**					**14,400,000**
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Sario, Sario	100 %	1 Dokumen	1 TA	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3,600,000
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Sario, Sario	100 %	1 Dokumen	1 TA	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3,600,000
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Sario, Sario	100 %	1 Laporan	1 TA	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3,600,000
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Sario, Sario	100 %	1 Laporan	1 TA	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3,600,000
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**133,833,500**					**166,233,750**
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Sario, Sario	100 %	1 Laporan	1 TA	133,833,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	166,233,750
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**6,756,429,000**					**7,680,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Sario, Sario	100 %	1 Laporan	1 TA	2,400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2,880,000,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Sario, Sario	100 %	1 Laporan	1 TA	4,356,429,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4,800,000,000
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,164,968,000**					**1,405,200,000**
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Sario, Sario	100 %	1 Unit	1 TA	299,968,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	360,000,000
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Sario, Sario	100 %	1 Unit	1 TA	865,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,045,200,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**63,191,636,700**					**75,224,935,530**
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**38,889,594,796**					**46,289,607,600**
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Presentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit)	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tercapainya Kegaiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Manado, Sario, Sario	100 %	1 Unit	1 TA	38,889,594,796	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Presentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit)	100 %	46,289,607,600
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**23,984,704,404**					**28,575,327,930**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Presentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit)	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tercapainya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Manado, Sario, Sario	100 %	1 Dokumen	1 TA	23,984,704,404	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit)	100 %	28,575,327,930
1	**02**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								**317,337,500**					**360,000,000**
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Presentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit)	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Tercapaianya Kegaitan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Manado, Sario, Sario	100 %	1 Tahun	1 TA	317,337,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit)	100 %	360,000,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**4,464,133,000**					**6,376,830,720**
1	**02**	**03**	**1.01**		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**								**4,464,133,000**					**6,376,830,720**
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter persatuan penduduk	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tercapainya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Kota Manado, Sario, Sario	45/100.000 Penduduk	1 Dokumen	1 TA	4,464,133,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio dokter persatuan penduduk	45/100.000 Penduduk	6,376,830,720
												TOTAL	**75,734,000,000**					**90,880,800,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD RUMAH SAKIT MATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**52,060,000,000**					**88,912,572,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**8,274,680,000**					**11,818,422,000**
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**7,640,030,000**					**11,089,034,500**
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terkasananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Wanea, Bumi Nyiur	100 Persen	1 Laporan 12 bulan	100 persen	1,836,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,114,400,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Wanea, Bumi Nyiur	100 Persen	1 Laporan 12 bulan	100 persen	5,804,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	8,974,634,500
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**634,650,000**					**729,387,500**
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daearah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Manado, Wanea, Bumi Nyiur	100 Persen	5 Unit	100 persen	184,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daearah	100 Persen	211,887,500
1	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daearah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sarana prasarana pendukung yang dipelihara/direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Manado, Wanea, Bumi Nyiur	100 Persen	3 Unit 1 paket	100 persen	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daearah	100 Persen	517,500,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**41,785,320,000**					**74,794,150,000**
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**41,785,320,000**					**74,794,150,000**
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan UKP Rujukan dan UKM Rujukan	Kota Manado, Wanea, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	41,785,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 Persen	74,794,150,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**2,000,000,000**					**2,300,000,000**
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								**2,000,000,000**					**2,300,000,000**
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Ratio Dokter Persatuan penduduk	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Terlaksannya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM	Kota Manado, Wanea, Bumi Nyiur	45/100.000 penduduk	187 Orang	100 persen	2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ratio Dokter Persatuan penduduk	45/100.000 penduduk	2,300,000,000
												TOTAL	**52,060,000,000**					**88,912,572,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**40,786,000,000**					**47,432,900,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**4,705,833,325**					**5,656,400,000**
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**284,418,100**					**365,400,000**
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	1 Dokumen	100 %	98,555,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	200,000,000
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	1 Dokumen	100 %	10,294,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	4,400,000
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	1 Dokumen	100 %	43,665,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,500,000
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	1 Dokumen	100 %	6,117,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,500,000
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Laporan	100 %	125,784,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	150,000,000
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**578,969,900**					**857,000,000**
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Dokumen	100 %	28,436,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	38,000,000
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	365 Dokumen	100 %	375,159,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	340,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Dokumen	100 %	29,771,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	140,000,000
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	1 Laporan	100 %	32,416,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	37,000,000
1	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	100 Dokumen	100 %	37,748,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	42,000,000
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	18 Laporan	100 %	48,646,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	220,000,000
1	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	0 Dokumen 12 Dokumen	100 %	26,791,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	40,000,000
1	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**523,670,300**					**383,500,000**
1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	1 Dokumen	100 %	24,731,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	17,500,000
1	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Dokumen	100 %	8,499,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	1 Laporan	100 %	56,756,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	62,500,000
1	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Laporan	100 %	67,902,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	11,000,000
1	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	1 Laporan	100 %	17,693,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	22,000,000
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Laporan	100 %	343,087,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	255,000,000
1	02	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,500,000
1	**02**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**114,185,018**					**616,000,000**
1	02	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Presentasi Administrasi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Dokumen	100 %	46,581,818	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	550,000,000
1	02	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Presentasi Administrasi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	11,000,000
1	02	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Presentasi Administrasi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Laporan	100 %	13,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	11,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Presentasi Administrasi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	50 Dokumen	100 %	7,881,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	11,000,000
1	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Presentasi Administrasi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Laporan	100 %	25,632,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	11,000,000
1	02	01	1.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Presentasi Administrasi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Dokumen	100 %	6,339,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	11,000,000
1	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Presentasi Administrasi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Laporan	100 %	10,000,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	11,000,000
1	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**995,796,600**					**1,091,500,000**
1	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	5 Unit	100 %	40,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	55,000,000
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	0 Paket 300 Paket	100 %	364,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	300,000,000
1	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Dokumen	100 %	293,496,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	310,000,000
1	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Dokumen	100 %	21,822,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	55,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Dokumen	100 %	2,629,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	27,500,000
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	0 Orang 100 Orang	100 %	248,598,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	300,000,000
1	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	100 Orang	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	22,000,000
1	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	100 Orang	100 %	17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	22,000,000
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**280,660,601**					**517,000,000**
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	100 Paket	100 %	75,118,421	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	22,000,000
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Paket	100 %	32,181,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	60,500,000
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Paket	100 %	42,904,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	55,000,000
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Paket	100 %	26,793,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	55,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Paket	100 %	66,978,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	22,000,000
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Laporan	100 %	2,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	55,000,000
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Laporan	100 %	18,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	27,500,000
1	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Dokumen	100 %	15,983,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	220,000,000
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**759,339,290**					**495,000,000**
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	1 Unit	100 %	529,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	330,000,000
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Paket	100 %	115,350,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	55,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Unit	100 %	34,673,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	55,000,000
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	1 Unit	100 %	63,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	27,500,000
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	1 Unit	100 %	16,090,910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	27,500,000
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**377,700,000**					**396,000,000**
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Laporan	100 %	340,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	330,000,000
1	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Laporan	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	55,000,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Laporan	100 %	34,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	11,000,000
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**791,093,516**					**935,000,000**
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Unit	100 %	356,307,516	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	330,000,000
1	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	25 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	55,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	20 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	55,000,000
1	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	5 Unit	100 %	9,457,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	55,000,000
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	6 Unit	100 %	113,735,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	110,000,000
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	6 Unit	100 %	251,568,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	275,000,000
1	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	6 Unit	100 %	50,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	55,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**36,080,166,675**					**41,776,500,000**
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**16,259,060,645**					**24,591,500,000**
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	2 Unit	100 %	9,600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	20,000,000,000
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Unit	100 %	2,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	11,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	1 Unit	100 %	1,013,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	11,000,000
1	02	02	1.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	5 Unit	100 %	6,752,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	10,000,000
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	5 Unit	100 %	13,311,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	55,000,000
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	50 Unit	100 %	1,385,395,784	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	1,100,000,000
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	2 Unit	100 %	289,737,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	55,000,000
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	1 Unit	100 %	164,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	55,000,000
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	100 Paket	100 %	707,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	110,000,000
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	5 Unit	100 %	585,116,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	55,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	10 Unit	100 %	209,805,113	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	55,000,000
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	20 Unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	5,500,000
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	5 Unit	100 %	51,735,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	22,000,000
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	10 Unit	100 %	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	22,000,000
1	02	02	1.01	20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	1 Unit	100 %	59,106,994	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	275,000,000
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	300 Paket	100 %	3,007,777,974	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	2,750,000,000
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**18,146,808,400**					**15,054,000,000**
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	50 Orang	100 %	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	5,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	50 Orang	100 %	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	5,500,000
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	50 Dokumen	100 %	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	5,500,000
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	50 Dokumen	100 %	11,526,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	5,500,000
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	50 Dokumen	100 %	1,348,200,000			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	1,200,000,000
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	50 Orang	100 %	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	11,000,000
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	20 Dokumen	100 %	70,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	11,000,000
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	300 Dokumen	100 %	14,066,520,400	Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	11,000,000,000
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	10 Dokumen	100 %	16,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	11,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	10 Dokumen	100 %	2,306,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	2,750,000,000
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Unit	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	22,000,000
1	02	02	1.02	24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	100 Dokumen	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	5,500,000
1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	25 Paket	100 %	11,062,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	5,000,000
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	12 Dokumen	100 %	5,000,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	5,500,000
1	02	02	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	50 Dokumen	100 %	9,469,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	11,000,000
1	**02**	**02**	**1.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**								**575,220,130**					**481,000,000**
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Kabupaten Kota Yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Dokumen	100 %	125,784,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	140,000,000
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Kabupaten Kota Yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	300 Dokumen	100 %	10,005,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	11,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	Persentase Kabupaten Kota Yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	5 Unit	100 %	439,430,930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	330,000,000
1	**02**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								**1,099,077,500**					**1,650,000,000**
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Persentase rumah sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	1 Unit	100 %	368,049,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	550,000,000
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Persentase rumah sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Unit	100 %	441,608,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	550,000,000
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Persentase rumah sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Unit	100 %	289,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	550,000,000
												TOTAL	**40,786,000,000**					**47,432,900,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD RS MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**41,172,285,298**					**0**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**7,501,246,240**					**0**
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**29,440,040**					**0**
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	100 %	1 Dokumen	100 %	29,440,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	0
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**123,105,460**					**0**
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyerapan Anggaran Dinas Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyerapan Anggaran Dinas Rumah Sakit	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	100 %	1 Dokumen	100 %	25,571,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyerapan Anggaran Dinas Rumah Sakit	100 %	0
1	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Penyerapan Anggaran Dinas Rumah Sakit	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	100 %	1 Dokumen	100 %	80,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyerapan Anggaran Dinas Rumah Sakit	100 %	0
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Rumah Sakit	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyerapan Anggaran Dinas Rumah Sakit	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	100 %	1 Laporan	100 %	16,583,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyerapan Anggaran Dinas Rumah Sakit	100 %	0
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**179,330,000**					**0**
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	100 %	1 Laporan	100 %	179,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	0
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**6,790,158,564**					**0**
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	100 %	1 Laporan	100 %	512,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0
1	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	100 %	1 Laporan	100 %	130,456,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0